Pemerintah Kabupaten Gresik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gresik

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati berdasarkan hasil penyempurnaan oleh Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Angggaran 2026; dan
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Penetapan RKPD ini bertujuan untuk :

a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026; dan
b. sebagai bahan pembahasan KUA serta PPAS Tahun 2026 bersama DPRD.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. BAB VII : Penutup.

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Dasar Hukum..... I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I-8
1.4 Maksud Dan Tujuan..... I-10
1.5 Sistematika Penulisan..... I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah..... II-1
2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi II-1
2.1.1.1.2 Batass Wilyah Fungsional..... II-5
2.1.1.1.3 Iklim..... II-10
2.1.1.1.4 Topografi..... II-11
2.1.1.1.5 Geologi..... II-13
2.1.1.1.6 Jenis Tanah..... II-14
2.1.1.1.7 Hidrologi..... II-17
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam..... II-25
2.1.1.2.1 Sumber Daya Alam dan Industri..... II-25
2.1.1.2.2 Hortikultura..... II-25
2.1.1.2.3 Perkebunan..... II-30
2.1.1.2.4 Perikanan..... II-31
2.1.1.2.5 Peternakan..... II-32
2.1.1.2.6 Pariwisata..... II-33
2.1.1.2.7 Industri..... II-36
2.1.1.2.8 Pertambangan..... II-38
2.1.1.2.9 Pengunaan Lahan..... II-40
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... II-42
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan..... II-50
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas..... II-54

2.1.1.5.1 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman..... II-57
2.1.1.5.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengelolaan Sampah..... II-58
2.1.1.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah..... II-60
2.1.1.6 Indeks Ketahanan Daerah..... II-61
2.1.1.7 Resiliensi terhadapa Bencana dan Perubahan Iklim..... II-62
2.1.1.7.1 Resiliensi Terhadap Bencana..... II-62
2.1.1.7.2 Penurunan Emisi GRK..... II-76
2.1.1.7.3 Perubahan Iklim..... II-80
2.1.1.8 Aspek Demografi..... II-82
2.1.1.8.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk..... II-83
2.1.1.8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk..... II-87
2.1.1.8.3 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2024 II-89
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-91
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... II-91
2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi..... II-91
2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II-94
2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan..... II-99
2.1.2.1.4 Indeks Kemiskinan Multidimensi..... II-105
2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka..... II-106
2.1.2.1.6 Indeks Gini..... II-108
2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia..... II-109
2.1.2.1.8 Rasio Partispasi Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin..... II-110
2.1.2.1.9 Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal..... II-111
2.1.2.1.10 Indeks Harmoni..... II-112
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua..... II-113
2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup..... II-113
2.1.2.2.2 Indeks Pembabngunan Kesehatan Masyarakat..... II-114
2.1.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk..... II-116
2.1.2.2.4 Persentase Balita Gizi Kurang..... II-116

2.1.2.2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif..... II-117
2.1.2.2.6 Prevalensi Stunting..... II-117
2.1.2.2.7 Angka Kematian Ibu..... II-119
2.1.2.2.8 Tuberculosis..... II-120
2.1.2.2.9 SPM POSYANDU..... II-121
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II-123
2.1.2.3.1 Rata Rata Lama Sekolah..... II-123
2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah..... II-124
2.1.2.3.3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi..... II-126
2.1.2.3.4 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk: Literasi Membaca Dan Numerasi..... II-127
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif..... II-129
2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja..... II-130
2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional..... II-131
2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju..... II-133
2.1.2.5.1 Indeks Kesalehan Sosial II-133
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-136
2.1.2.6.1 GEDSI II-139
2.1.2.7 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal II-142
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II-143
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... II-143
2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan..... II-143
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... II-145
2.1.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah..... II-145
2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum II-146
2.1.3.2.3 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara..... II-148
2.1.3.2.4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif..... II-149
2.1.3.2.5 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten II-150

2.1.3.2.6 ICOR..... II-151
2.1.3.2.7 Rasio Goverment Expenditure..... II-151
2.1.3.2.8 Pertumbuhan Usaha Mikro II-153
2.1.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin II-154
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-158
2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau II-158
2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia II-158
2.1.3.3.3 Intensitas Energi Primer..... II-159
2.1.3.4 Transformasi Digital II-159
2.1.3.4.1 Indeks Transformasi Digital..... II-160
2.1.3.4.2 Indeks Masyarakat Digital..... II-161
2.1.3.4.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi II-162
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-163
2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto II-163
2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa II-164
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-165
2.1.3.6.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur II-165
2.1.3.6.2 Indeks Konektivitas II-166
2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan II-166
2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri II-168
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-169
2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB II-169
2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi II-172
2.1.3.7.3 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan II-173
2.1.3.7.4 Inklusi Keuangan II-174
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-175
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... II-176
2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi..... II-177

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum II-177
2.1.4.1.3 Indeks Integritas Nasional (KPK) II-178
2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-179
2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik II_183
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-184
2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda II-184
2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM II-185
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan II-187
2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah II-188
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah II-189
2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar..... II-190
2.1.4.4.1.1 Pendidikan II-190
2.1.4.4.1.2 Indeks Pendidikan II-193
2.1.4.4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah II-193
2.1.4.4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah II-194
2.1.4.4.1.5 Angka Partisipasi Kasar II-196
2.1.4.4.1.6 Angka Partisipasi Murni II-197
2.1.4.4.1.7 Angka Kelulusan II-197
2.1.4.4.1.8 Angka Melek Huruf II-198
2.1.4.4.1.9 Angka Partipasi Sekolah II-199
2.1.4.4.1.10 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah II-200
2.1.4.4.2 Kesehatan II-201
2.1.4.4.2.1 Angka Harapan Hidup II-201
2.1.4.4.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart II-201
2.1.4.4.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak II-203

2.1.4.4.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan II-205
2.1.4.4.2.5 Penanganan Penyakit Menular II-205
2.1.4.4.2.6 Universal Health Coverage (UHC) II-210
2.1.4.4.2.7 Vaksinasi Covid-19 II-211
2.1.4.4.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI) II-211
2.1.4.4.2.9 Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029 II-212
2.1.4.4.2.10 Indikator Pelayanan Rumah Sakit II-213
2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi II-218
2.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-213
2.1.4.4.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM II-214
2.1.4.4.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang II-217
2.1.4.4.3.3 Normalisasi Waduk II-217
2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi II-218
2.1.4.4.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) II-219
2.1.4.4.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik II-219
2.1.4.4.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan II-220
2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-222

2.1.4.4.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni II-223
2.1.4.4.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan II-225
2.1.4.4.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh II-226
2.1.4.4.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) II-228
2.1.4.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-229
2.1.4.4.4.6 Sosial..... II-231
2.1.4.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-232
2.1.4.5.1 Ketenagakerjaan II-232
2.1.4.5.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka II-232
2.1.4.5.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja II-236
2.1.4.5.1.3 Hubungan Industrial II-237
2.1.4.5.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk II-238
2.1.4.5.3 Pangan II-239
2.1.4.5.3.1 Indeks Ketahanan Pangan II-240
2.1.4.5.4 Pertanahan II-241
2.1.4.5.5 Lingkungan Hidup II-243
2.1.4.5.5.1 Ruang Terbuka Hijau II-243
2.1.4.5.5.2 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup II-243
2.1.4.5.5.3 Pengelolaan Persampahan II-244
2.1.4.5.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-245
2.1.4.5.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-246
2.1.4.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-249
2.1.4.5.9 Perhubungan II-250
2.1.4.5.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) II-257
2.1.4.5.9.2 Pengelolaan Pelayaran II-261

2.1.4.5.9.3 Pengelolaan Perkeretaapian II-262
2.1.4.5.10 Komunikasi Dan Informatika II-269
2.1.4.5.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-269
2.1.4.5.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik II-271
2.1.4.5.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II-271
2.1.4.5.12 Penanaman Modal II-274
2.1.4.5.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal II-274
2.1.4.5.13 Kepemudaan dan Olah Raga II-275
2.1.4.5.14 Statistik II-276
2.1.4.5.15 Persandian II-277
2.1.4.5.16 Kebudayaan II-277
2.1.4.5.17 Perpustakaan II-281
2.1.4.5.18 Kearsipan II-284
2.1.4.6 Urusan Pilihan II-286
2.1.4.6.1 Kelautan dan Perikanan II-286
2.1.4.6.1.1 Perikanan Tangkap dan Budidaya II-286
2.1.4.6.2 Pariwisata II-292
2.1.4.6.3 Pertanian II-293
2.1.4.6.3.1 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian II-294
2.1.4.6.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan II-297
2.1.4.6.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan II-298
2.1.4.6.4 Energi dan Sumberdaya Mineral II-300
2.1.4.6.5 Perdagangan II-300
2.1.4.6.6 Perindustrian II-302
2.1.4.7 Urusan Penunjang II-304
2.1.4.7.1 Sekretariat Daerah II-304
2.1.4.7.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah II-304

2.1.4.7.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) II-306
2.1.4.7.2 Sekretariat DPRD II-308
2.1.4.7.3 Perencanaan II-309
2.1.4.7.4 Penelitian dan Pengembangan II-310
2.1.4.7.5 Keuangan II-311
2.1.4.7.6 Inspektorat II-312
2.1.4.7.7 Kepegawaian II-313
2.1.4.7.8 Kewilayahan II-314
2.1.4.7.9 Kesatuan Bangsa dan Politik II-316

2.1.5 Standat Pelayanan Minimum II.317
2.1.5.1 Pendidikan II.318
2.1.5.2 Kesehatan II.321
2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II.325
2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II.326
2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..... II.327
2.1.5.6 Sosial.....II.331
2.1.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik..... II-333

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 Hingga 2025..... III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... III-1
3.1.1.1.1 Produj Domestik Regional Bruto (PDRB)..... III-2
3.1.1.2 Kinerja Perdagangan..... III-6
3.1.1.3 Kinerja Investasi..... III-7
3.1.1.4 Tingkat Inflasi..... III-8
3.1.1.5 Daya Saing Daerah..... III-9

3.1.1.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... III-9
3.1.1.5.1.1 Angka Ketergantungan..... III-9
3.1.1.5.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... III-10
3.1.1.5.2.1 Indeks Inovasi Daerah..... III-10
3.1.1.5.2.2 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara III-11
3.1.1.5.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif..... III-12
3.1.1.5.2.4 Proporsi Julah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten.. III-13
3.1.1.5.2.5 ICOR..... III-13
3.1.1.5.2.6 Pertumbahan Usaha Mikro..... III-14
3.1.1.5.2.7 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin..... III-14
3.1.16 Perkiraan Makro Ekonomi Kabuapten Gresik Tahun 2025 dan 2026..... III-15
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-17
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah..... III-19
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2 Program Strategis Nasional..... IV-19
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-20
4.3.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 antara Kabupaten Gresik dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional..... IV-27
4.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026..... IV-31
4.3.2.1 Strategi dan Kebijakan SPM..... IV-40
4.3.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-47
4.3.3.1 Rekomendasi Capaian IKU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... IV-47
4.3.3.2 Rekomendasi Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2026 IV-48
4.3.3.2 Rekomendasi DPRD Terhadap Tematik Pembangunan IV-49

Daerah Tahun 2026.....
4.3.3.4 Rekomendasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026..... IV-50
4.3.3.5 Rekomenda Penyusunan Kamus Usulan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026. IV-51

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan..... V-1
5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju..... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama..... VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... VI-4

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-2
Tabel 2.2 Peran dan Fungsi Sistem Kegiatan di Kabupaten Gresik..... II-4
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Gresik..... II-5
Tabel 2.4 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik..... II-8
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Gresik..... II-8
Tabel 2.6 Kondisi Iklim di Kabupaten Gresik..... II-10
Tabel 2.7 Ketinggian dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022..... II-11
Tabel 2.8 Kelerengan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik (Ha) Tahun 2022..... II-12
Tabel 2.9 Jenis Batuan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022... II-13
Tabel 2.10 Jenis Tanah Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-15
Tabel 2.11 Air Permukaan di Kabupaten Gresik..... II-18
Tabel 2.12 Sungai di Kabupaten Gresik..... II-18
Tabel 2.13 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik..... II-19
Tabel 2.14 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022..... II-20
Tabel 2.15 Sumber Pelayanan Jaringan Perpipaan..... II-21
Tabel 2.16 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik..... II-22
Tabel 2.17 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman..... II-25
Tabel 2.18 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024..... II-27
Tabel 2.19 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024..... II-28
Tabel 2.20 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-29
Tabel 2.21 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-30
Tabel 2.22 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-31

Tabel 2.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-32
Tabel 2.24 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-33
Tabel 2.25 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024..... II-34
Tabel 2.26 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-34
Tabel 2.27 Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik Tahun 2024..... II-37
Tabel 2.28 Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik..... II-39
Tabel 2.29 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Gresik..... II-40
Tabel 2.30 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2029 Kabupaten Gresik..... II-43
Tabel 2.31 Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2029 Kabupaten Gresik..... II-46
Tabel 2.32 Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-51
Tabel 2.33 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak dan Air Siap Minum Perkotaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-52
Tabel 2.34 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik..... II-53
Tabel 2.35 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-53
Tabel 2.36 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-56
Tabel 2.37 Rumah Tangga Sanitasi Aman (%) Tahun 2020-2024..... II-58
Tabel 2.38 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-61
Tabel 2.39 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2024..... II-62
Tabel 2.40 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-64
Tabel 2.41 Luas Kawasan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Gresik (Ha)... II-65
Tabel 2.42 Luas Kawasan Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-68
Tabel 2.43 Luas Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-70

Tabel 2.44 Luas Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-73
Tabel 2.45 Luas Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-75
Tabel 2.46 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Gresik Tahum 2020-2024..... II-78
Tabel 2.47 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2024..... II-83
Tabel 2.48 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-84
Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-85
Tabel 2.50 Jumlah dan Laju Penduduk per Kecamatan Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-88
Tabel 2.51 Kepadatan dan Persentase Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan 2024..... II-90
Tabel 2.52 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik..... II-91
Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2024..... II-92
Tabel 2.54 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-93
Tabel 2.55 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2.56 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... II-96
Tabel 2.57 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-98
Tabel 2.58 Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024..... II-100
Tabel 2.59 Garis Kemiskinan Provinsi Tahun 2020-2024..... II-100
Tabel 2.60 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-101
Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-109
Tabel 2.62 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-115

Tabel 2.63 Capaian Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik tahun 2020-2024..... II-116
Tabel 2.64 Capaian Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Gresik tahun 2020-2024..... II-117
Tabel 2.65 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gresik tahun 2020-2024... II-117
Tabel 2.66 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-120
Tabel 2.67 Treatment Coverage Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-121
Tabel 2.68 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-123
Tabel 2.69 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-124
Tabel 2.70 Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-125
Tabel 2.71 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024..... II-127
Tabel 2.72 IPLM Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik pada Tahun 2023-2024..... II-128
Tabel 2.73 Jumlah Penerima Upah, Bukan Penerima upah, Jasa Konstruksi dan Perusahaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-130
Tabel 2.74 Cakupan Kepersertaan Sosial Tenaga Kerja..... II-131
Tabel 2.75 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024..... II-133
Tabel 2.76 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-135
Tabel 2.77 Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif..... II-136
Tabel 2.78 Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-145
Tabel 2.79 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik dari Tahun 2020-2024..... II-148
Tabel 2.80 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024..... II-149

Tabel 2.81 Jumlah PDRB ADHK Terhadap Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-149
Tabel 2.82 Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-151
Tabel 2.83 Rasio Government Expenditure terhadap PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024..... II-152
Tabel 2.84 Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.. II-153
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-154
Tabel 2.86 Indeks Transformasi Digital Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022..... II-160
Tabel 2.87 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024..... II-161
Tabel 2.88 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024 II-163
Tabel 2.89 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024. II-164
Tabel 2.90 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-165
Tabel 2.91 Capaian Indikator Indeks Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024..... II-166
Tabel 2.92 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik..... II-167
Tabel 2.93 Persentase Desa Mandiri di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-169
Tabel 2.94 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-170
Tabel 2.95 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik..... II-172
Tabel 2.96 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-173
Tabel 2.97 Tingkat Inklusi dan Keuangan di Jawa Timur dan Nasional..... II-175
Tabel 2.98 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-176
Tabel 2.99 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.. II-178

Tabel 2.100 Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-180
Tabel 2.101 Hasil Penilaian Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024..... II-180
Tabel 2.102 Persentase Penegakan Perda Tahun 2021-2024..... II-184
Tabel 2.103 Capaian Aksi HAM Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-186
Tabel 2.104 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-188
Tabel 2.105 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-189
Tabel 2.106 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024..... II-190
Tabel 2.107 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024..... II-191
Tabel 2.108 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024..... II-192
Tabel 2.109 Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-195
Tabel 2.110 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-197
Tabel 2.111 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-197
Tabel 2.112 Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-198
Tabel 2.113 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-198
Tabel 2.114 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.... II-199
Tabel 2.115 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun 2021-2024..... II-200
Tabel 2.118 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 II-202
Tabel 2.117 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-203
Tabel 2.118 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-204
Tabel 2.119 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-206

Tabel 2.120 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-206
Tabel 2.121 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-210
Tabel 2.122 Realisasi Pemeriksaan dan Pemberian Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023..... II-211
Tabel 2.123 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-212
Tabel 2.124 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-214
Tabel 2.125 Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih dan Limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-215
Tabel 2.126 Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024..... II-216
Tabel 2.127 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020- 2024..... II-217
Tabel 2.128 Indikator Persentase Waduk yang Dinormalisasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-218
Tabel 2.129 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-219
Tabel 2.130 Indikator Prosentase Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-219
Tabel 2.131 Indikator capaian akses layak air limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-220
Tabel 2.132 Rekapitulasi dan Daftar Ruas Jalan Menurut Fungsinya..... II-221
Tabel 2.133 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020-2024..... II-222
Tabel 2.134 Kondisi Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-222
Tabel 2.135 SPM Penyediaan Rumah layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-224
Tabel 2.136 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik..... II-225

Tabel 2.137 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-226
Tabel 2.138 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-227
Tabel 2.139 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-228
Tabel 2.140 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-229
Tabel 2.141 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dibina di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-231
Tabel 2.142 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-232
Tabel 2.143 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-237
Tabel 2.144 Indikator Hubungan Industrial Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-238
Tabel 2.145 Indikator Pengendalian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-238
Tabel 2.146 Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-239
Tabel 2.147 Indikator Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-240
Tabel 2.148 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024... II-241
Tabel 2.149 Indikator Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-242
Tabel 2.150 Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-243
Tabel 2.151 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-243
Tabel 2.152 Indikator Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-244
Tabel 2.153 Indikator Pendaftaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-245
Tabel 2.154 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-246
Tabel 2.155 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-247

Tabel 2.156 Indikator Penataan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2024.... II-248
Tabel 2.157 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-249
Tabel 2.158 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024..... II-251
Tabel 2.159 Data Prasarana Perhubungan Kabupaten Gresik..... II-251
Tabel 2.160 Data Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-253
Tabel 2.161 Rasio Konektivitas Kabupaten Gresik..... II-257
Tabel 2.162 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-257
Tabel 2.163 Data Lokasi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-259
Tabel 2.164 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-261
Tabel 2.165 Daftar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Gresik..... II-262
Tabel 2.166 Indikator Pengelolaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024..... II-262
Tabel 2.167 Daftar Perlintasan Kereta Api Sebidang di Wilayah Kabupaten Gresik..... II-264
Tabel 2.168 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-270
Tabel 2.169 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020-2024..... II-270
Tabel 2.170 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020-2024..... II-271
Tabel 2.171 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018-2024..... II-272
Tabel 2.172 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020 – 2024..... II-272
Tabel 2.173 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017-2024..... II-274
Tabel 2.174 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-275
Tabel 2.175 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-275
Tabel 2.176 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-276

Tabel 2.177 Indikator Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-277
Tabel 2.178 Indikator Persandian Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-277
Tabel 2.179 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-278
Tabel 2.180 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik..... II-278
Tabel 2.181 Indikator Pendukung Lain dalam Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-280
Tabel 2.182 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024..... II-282
Tabel 2.183 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024..... II-282
Tabel 2.184 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-284
Tabel 2.185 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresikk Tahun 2020-2024..... II-285
Tabel 2.186 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-286
Tabel 2.187 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-287
Tabel 2.188 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-288
Tabel 2.189 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s.d 2024..... II-290
Tabel 2.190 Indikator Perikanan yang diolah dan dipasarkan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-291
Tabel 2.191 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-292
Tabel 2.192 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2020 – 2024..... II-293
Tabel 2.193 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2024..... II-295
Tabel 2.194 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-298
Tabel 2.195 Data Produksi Peternakan Tahun 2020-2024..... II-298
Tabel 2.196 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)..... II-301
Tabel 2.197 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-301

Tabel 2.198 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2024..... II-302
Tabel 2.199 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2018-2024..... II-303
Tabel 2.200 Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2017-2024..... II-304
Tabel 2.201 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2024..... II-305
Tabel 2.202 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024..... II-301
Tabel 2.203 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-306
Tabel 2.204 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024..... II-301
Tabel 2.205 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024..... II-308
Tabel 2.206 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2020-2024..... II-309
Tabel 2.207 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024..... II-310
Tabel 2.208 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024..... II-310
Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 – 2024..... II-311
Tabel 2.210 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020-2024..... II-312
Tabel 2.211 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 – 2024..... II-313
Tabel 2.212 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024..... II-314
Tabel 2.213 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-315
Tabel 2.214 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 – 2024..... II-316
Tabel 2.215 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020-2024..... II-317
Tabel 2.216 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 – 2024..... II-319
Tabel 2.217 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2024..... II-322

Tabel 2.218 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2024..... II-325
Tabel 2.219 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2024 II-326
Tabel 2.220 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021..... II-327
Tabel 2.221 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2022 – 2024..... II-328
Tabel 2.222 Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2024..... II-329
Tabel 2.223 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 – 2024..... II-332
Tabel 2.224 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-334
Tabel 2.225 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2024..... II-357
Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Prioritas di Kabupaten Gresik..... II-358
Tabel 2.227 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Fokus dan Urusan Pembangunan di Kabupaten Gresik..... II-366
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 – 2024..... III-3
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)..... III-4
Tabel 3.3 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)..... III-6
Tabel 3.4 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022..... III-7
Tabel 3.5 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017 sd Tahun 2024..... III-8
Tabel 3.6 Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah..... III-10
Tabel 3.7 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2021-2024..... III-11

Tabel 3.8 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024..... III-11
Tabel 3.9 Capaian Indikator ICOR Tahun 2024..... III-13
Tabel 3.10 Pertumbuhan Usaha Mikro..... III-14
Tabel 3.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin..... III-15
Tabel 3.12 Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2027..... III-16
Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi / Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 – 2027..... III-22
Tabel 4.1 Keselarasan Visi Misi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik..... IV-4
Tabel 4.2 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026..... IV-6
Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024-2026 IV-13
Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, Nawakarsa..... IV-21
Tabel 4.5 Keselarasasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2026..... IV-28
Tabel 4.6 Keselarasasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2026..... IV-32
Tabel 4.7 Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026..... IV-34
Tabel 4.8 Target IKU tahun 2026..... IV-39
Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026..... V-2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026... VI-2
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026.... VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen..... I-9

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik..... II-6

Gambar 2.2 Peta Ekoregion Kabupaten Gresik..... II-9

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Gresik..... II-9

Gambar 2.4 Peta Kawasan Fungsional Kabupaten Gresik..... II-10

Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Gresik..... II-13

Gambar 2.6 Peta Jenis Batuan (Geologi) Kabupaten Gresik..... II-14

Gambar 2.7 Peta Aliran Sungai Kabupaten Gresik..... II-23

Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Kabupaten Gresik..... II-24

Gambar 2.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Gresik..... II-24

Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik..... II-42

Gambar 2.11 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Gresik Tahun 2029 Dalam Satuan m3..... II-45

Gambar 2.12 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-49

Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2029..... II-50

Gambar 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-55

Gambar 2.15 Peta Resiko Bencana Banjir..... II-66

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik..... II-67

Gambar 2.17 Peta Resiko Bencana Kekeringan..... II-69

Gambar 2.18 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem..... II-72

Gambar 2.19 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor..... II-74

Gambar 2.20 Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi..... II-76
Gambar 2.21 Grafik Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023..... II-85
Gambar 2.22 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-87
Gambar 2.23 Grafik Kepadatan Penduduk Gresik Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan..... II-89
Gambar 2.24 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2010-2024..... II-102
Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 (%)..... II-102
Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan P2 (%)..... II-103
Gambar 2.27 Realisasi Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023..... II-104
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024..... II-106
Gambar 2.29 Indeks Gini Kabupaten Gresik..... II-108
Gambar 2.30 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024... II-114
Gambar 2.31 Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik..... II-118
Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-132
Gambar 2.33 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan..... II-134
Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 II-144
Gambar 2.35 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023..... II-181

Gambar 2.36 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024..... II-181
Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024..... II-193
Gambar 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-194
Gambar 2.39 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 II-201
Gambar 2.40 Angka Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024..... II-205
Gambar 2.41 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-208
Gambar 2.42 Jumlah Demam Berdarah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-208
Gambar 2.43 Jumlah Pengidap Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-209
Gambar 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024..... II-233
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional..... III-2
Gambar 3.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2024 III-10
Gambar 3.2 Skema KBPU..... III-26
Gambar 3.2 Skema PINA..... III-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta sebagai instrumen penting untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 serta memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Seluruh perangkat daerah menjadikan RKPD ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, yang sekaligus merupakan turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.

Proses penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam regulasi tersebut, tahapan penyusunan RKPD meliputi:

(1) Persiapan penyusunan RKPD,
(2) Penyusunan rancangan awal RKPD,
(3) Penyusunan rancangan RKPD,
(4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
(5) Perumusan rancangan akhir RKPD dan
(6) Penetapan RKPD.

Melalui mekanisme tersebut, RKPD menjadi dokumen yang memiliki kedudukan strategis dalam siklus perencanaan

pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 juga memiliki peran sebagai instrumen evaluasi atas capaian tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD adalah "Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat." Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat insan Gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah;
2. Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat; dan
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pencapaian visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis pembangunan daerah. Sasaran strategis tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan yang merata, penguatan karakter masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Pada sektor ekonomi, sasaran diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi industri, maritim, pertanian, UMKM, dan

ekonomi kreatif, sekaligus mendorong hilirisasi industri dan investasi ramah lingkungan. Di bidang infrastruktur, diarahkan pada pembangunan sarana dasar yang merata, peningkatan konektivitas antarwilayah, percepatan transformasi digital, serta penyediaan energi hijau. Pada aspek tata kelola pemerintahan, ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital. Adapun dari sisi kesejahteraan sosial, difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial yang inklusif dengan memperhatikan prinsip Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Namun demikian, dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah masih diperlukan penekanan mengenai pentingnya sinergi antara rencana pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Sinergi tersebut bertujuan agar program pembangunan Kabupaten Gresik sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029. Melalui sinergi tersebut, manfaat program pembangunan dapat dimaksimalkan, keterpaduan kebijakan dapat terwujud, serta hasil pembangunan lebih dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sinkronisasi lintas tingkatan perencanaan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya dukung pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus menjawab tantangan regional yang dihadapi Jawa Timur.

Selain itu, perlu pula ditegaskan bahwa RKPD Tahun 2026 harus mampu menjawab penanganan isu-isu strategis yang berkembang. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian meliputi percepatan pemulihan ekonomi pasca berbagai dinamika global dan regional, pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia

agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan daya saing, serta penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Isu-isu strategis tersebut harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan agar program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 juga menuntut keterlibatan dan akuntabilitas berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan, melainkan harus melibatkan pemangku kepentingan secara luas, mulai dari lembaga legislatif, perangkat daerah, sektor swasta, dunia usaha, hingga masyarakat sipil. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya top-down, tetapi juga aspiratif, partisipatif, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Akuntabilitas semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, serta rasa memiliki (ownership) dari seluruh pemangku kepentingan terhadap hasil pembangunan.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 bukan semata dokumen perencanaan tahunan, melainkan juga merupakan refleksi terhadap capaian visi, misi, dan sasaran strategis RPJMD 2025–2029 yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, responsif terhadap isu-isu strategis, serta menekankan pentingnya keterlibatan dan akuntabilitas berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan. RKPD ini diharapkan menjadi pedoman kerja yang konsisten, sinkron, dan terukur dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Gresik menuju daerah yang maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun RKPD tahun 2026 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

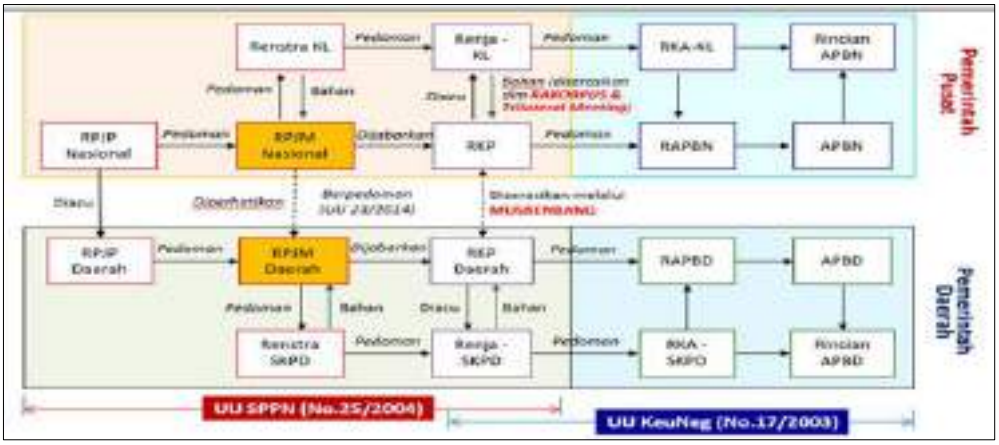

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan atas RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan, dan menjadi tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Gresik dimaksud. Sedangkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 harus tetap merujuk kepada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 serta memperhatikan Tema Tahun 2026 RKPD Provinsi Jawa Timur "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan" dan diselaraskan terhadap RKP Tahun 2026 "Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka Tema RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah "Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif". RKPD 2026 pada dasarnya

merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD 2025–2029 yang mencerminkan arah kebijakan, strategi, sasaran, dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan. Lebih jauh, RKPD 2026 sebagai bagian dari tahapan implementasi RPJMD juga merujuk pada RPJPD Kabupaten Gresik dan dengan demikian harus konsisten dengan tujuan serta arah pembangunan jangka panjang daerah, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi pedoman tahunan, melainkan juga sarana untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta adaptif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gresik..

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen.

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Gresik, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten Gresik berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan.

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Gresik.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kondisi fisik suatu wilayah menggambarkan karakteristik alamiah dan lingkungan yang membentuk suatu area geografis tertentu. Kondisi fisik suatu wilayah dapat mempengaruhi adanya perbedaan mata pencaharian dari masyarakat di wilayah tersebut (Santoso, 2019). Aspek-aspek yang akan dibahas terkait dengan kondisi fisik meliputi Letak dan Kondisi Geografis, Batas Wilayah Fungsional, Iklim, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi, Sumber Daya Alam, Kebencanaan, Penggunaan Lahan, dan Perwujudan Wilayah.

2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara kewilayahan Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Dengan luas wilayah sebesar 125.675,97 Ha, dengan hampir sepertiga bagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Kecamatan di wilayah pesisir ini terletak di sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian wilayah Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan yang mencakup 26 kelurahan dan 330 desa dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak antara 112° dan 113° Bujur Timur dan 7° dan 8° Lintang Selatan. Kabupaten Gresik menempati posisi geografis di arah barat laut dari Surabaya, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten gresik yaitu:

Sebelah Utara : Laut Jawa,
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto,
Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan; serta

Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya.

Berikut merupakan tabel luas daerah berdasarkan kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kecamatan	Total Luas Daerah (ha)
Kecamatan Wringinanom	6.207,11
Kecamatan Driyorejo	8.538,56
Kecamatan Kedamean	6.702,90
Kecamatan Menganti	7.000,00
Kecamatan Cerme	7.163,62
Kecamatan Benjeng	6.230,34
Kecamatan Balongpanggang	6.471,99
Kecamatan Duduksampeyan	7.717,91
Kecamatan Kebomas	3.433,85
Kecamatan Gresik	710,02
Kecamatan Manyar	10.562,11
Kecamatan Bungah	8.538,56
Kecamatan Sidayu	4.452,34
Kecamatan Dukun	6.401,26
Kecamatan Panceng	6.182,40
Kecamatan Ujungpangkah	12.407,52
Kecamatan Sangkapura	12.700,95
Kecamatan Tambak	7.283,68
Kabupaten Gresik	125.675,97

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Sangkapura yang luas wilayahnya mencapai 9,97% dari luas wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan Gresik, yang merupakan ibukota Kabupaten Gresik, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya sebesar 0,46%. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu dengan jarak 18 km. Berikut merupakan Peta Administrasi Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Ditinjau dari Rencana Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk menjaga atau melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup. Wilayah ini mencakup sumber daya alam, buatan, serta nilai sejarah dan budaya yang ada di dalamnya. Kawasan lindung di Kabupaten Gresik mencakup area Badan Air, Cagar Alam, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Perlindungan Setempat, dan suaka margasatwa.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya berdasarkan potensi serta kondisi sumber daya alam, manusia, dan buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik mencakup area Badan Jalan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Tanaman Pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, kawasan ini termasuk dalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan mencakup pertanian, perikanan, industri, pariwisata, serta eksploitasi sumber daya seperti panas bumi, minyak, dan gas bumi. Sementara itu, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043, kawasan ini diarahkan untuk berbagai penggunaan lahan, termasuk permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, serta pemanfaatan sumber daya panas bumi, minyak, dan gas bumi.

c. Kawasan Perkotaan.

Perkembangan perkotaan di Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Kota Surabaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010–2030, sistem pusat permukiman di wilayah ini terbagi menjadi empat pusat kegiatan. Setiap pusat kegiatan memiliki peran dan fungsi tertentu, yang dapat dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Peran dan Fungsi Sistem Kegiatan di Kabupaten Gresik

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	PKN, Manyar, dan PKN Menganti		Jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat
			pendidikan; pusat pariwisata; industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat
			Pertumbuhan wilayah kabupaten
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	Pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PPK	Perkotaan Balongpanggang	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman pedesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun		Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman pedesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL pada Pedesaan Kecamatan Kedamean	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Panceng		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Sangkapura		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Tambak		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Ujung Pangkah		

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Gresik

Keterangan	Kawasan Budi Daya	Kawasan Lindung	Kawasan Perkotaan	Total Luas (Ha)
Badan Air		2.285,95		2.285,95
Badan Jalan	361,55			361,55
Cagar Alam		615,51		615,51
Kawasan Ekosistem Mangrove		1.869,28		1.869,28
Kawasan Hortikultura	11.950,66			11.950,66
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77			1.032,77
Kawasan Pariwisata	99,34			99,34
Kawasan Pembangkitan	82,91			82,91

Keterangan	Kawasan Budi Daya	Kawasan Lindung	Kawasan Perkotaan	Total Luas (Ha)
Tenaga Listrik				
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00			19.824,00
Kawasan Perlindungan Setempat		1.403,45		1.403,45
Kawasan Permukiman Pedesaan			17.514,18	17.514,18
Kawasan Permukiman Perkotaan			15.531,69	15.531,69
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78			178,78
Kawasan Peruntukan Industri	10.469,60			10.469,60
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41			38.537,41
Suaka Margasatwa		3.918,88		3.918,88
Total Luas (Ha)	**82.537,02**	**10.093,07**	**33,045.87**	**125.675,97**

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

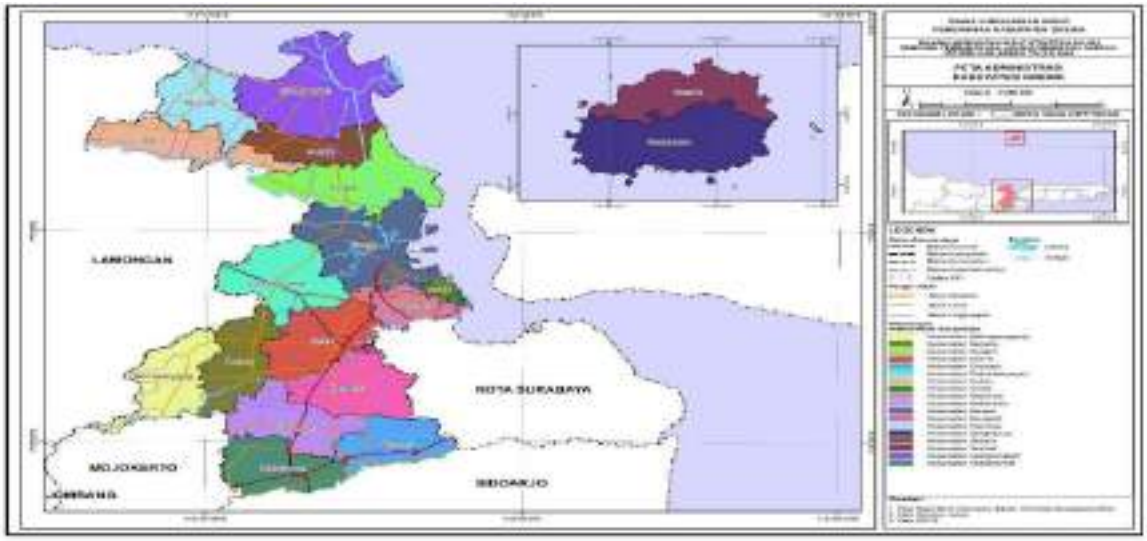

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.1.1.2 Batas Wilayah Fungsional

Batas kawasan fungsional dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan pendekatan *ecoregion* ditetapkan berdasarkan karakteristik ekologis yang serupa, melintasi batas administratif, dan mencerminkan kesatuan ekosistem. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis dan rekomendasi kebijakan dalam KLHS mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan secara lebih menyeluruh, seperti kesatuan hidrologi, topografi, vegetasi, dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, penggunaan *ecoregion* dalam penentuan batas kawasan fungsional memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara holistik. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi risiko lingkungan, mitigasi dampak, serta integrasi kebijakan lintas sektor dan wilayah, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

Ecoregion merupakan wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang mirip. Secara umum ecoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan *bioregion* dan *ecozone*. Berdasarkan *World Wildlife Fund* (WWF) suatu daerah dapat dikategorikan sebagai *ecoregion* ketika memiliki kesamaan dinamika ekosistem atau flora dan fauna, kesamaan pada faktor lingkungan dan interaksi yang krusial bagi kelangsungan kelompok/wilayah tersebut.

Ecoregion menjadi konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan faktor pembatas, potensi jasa ekosistem yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaannya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Pemenuhan terhadap aspek ini merupakan faktor kunci untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan yang berbasis sumber daya alam. Informasi mengenai *ecoregion* Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.4 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik

Jenis	Luas
Bukit Terisolasi	120,26
Dataran Antropogenik Reklamasi Material Pasir	736,50
Dataran *Fluvio-marin* Pesisir Utara Jawa Material Aluvium	20.080,28
Dataran Struktural Lipatan (Dataran Nyaris) Rembang Material Batupasir Tufaan dan Batulempung Gampingan	5.853,76
Delta Pangkah (Bengawan Solo) Material Aluvium	5.345,48
Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan	28.554,51
Palau Lepas Pantai Material Terumbu	19.984,63
Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan	26.092,34
Rataan Pasang Surut Pantai Selatan Jawa	1.462,23
Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium	12.664,20
Wilayah Perkotaan (Bentang Antropogenik)	4.781,79
Grand Total	**125.675,97**

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Kabupaten Gresik terbagi kedalam 2 Daerah Aliran Sungai utama yaitu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hilir dan Daerah Aliran Sungai Brantas Hilir.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Gresik

Kecamatan	WD Bengawan Solo Hilir	WD Brantas Hilir
Kecamatan Wringinanom	473,90	5.733,21
Kecamatan Driyorejo	691,85	4.817,57
Kecamatan Kedamean	5.794,46	908,44
Kecamatan Menganti	5.987,77	1.012,23
Kecamatan Cerme	7.163,62	
Kecamatan Benjeng	6.230,34	
Kecamatan Balongpanggang	6.471,99	
Kecamatan Duduksampeyan	7.717,91	
Kecamatan Kebomas	3.433,85	
Kecamatan Gresik	710,02	
Kecamatan Manyar	10.562,11	
Kecamatan Bungah	8.538,56	
Kecamatan Sidayu	4.452,34	
Kecamatan Dukun	6.401,26	

Kecamatan	WD Bengawan Solo Hilir	WD Brantas Hilir
Kecamatan Panceng	6.182,40	
Kecamatan Ujungpangkah	12.407,52	
Kecamatan Sangkapura	12.700,95	
Kecamatan Tambak	7.283,68	
Total	**113.204,52**	**12.471,45**

Sumber: DLH KabupatenGresik, Tahun 2021.

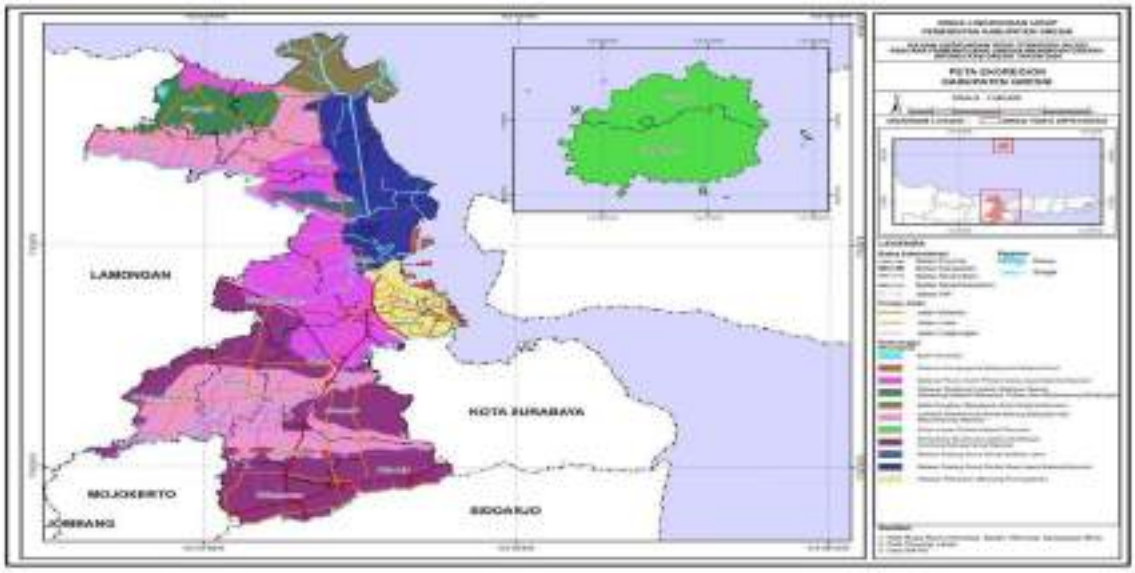

Gambar 2.2 Peta Ekoregion Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Gresik.

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

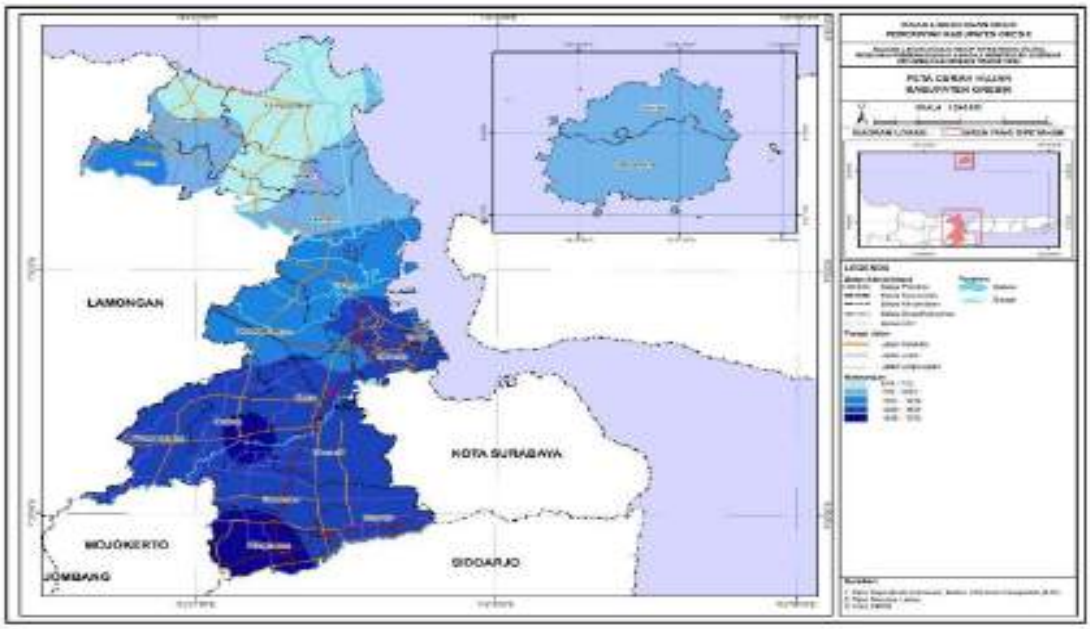

Gambar 2.4 Peta Kawasan Fungsional Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.1.1.3 Iklim

Kabupaten Gresik memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, serta memiliki temperatur yang relatif sedang. Suhu udara di Kabupaten Gresik berkisar antara 27°C (suhu terendah) hingga 29°C (suhu tertinggi). Berikut merupakan tabel rincian kondisi iklim tiap bulan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.6 Kondisi Iklim di Kabupaten Gresik

Bulan	Rata-Rata Suhu	Rata-Rata Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Kelembapan	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
Januari	28,21	506,20	27	87,07	1,77	3,3
Februari	28,16	561,10	24	87,27	1,80	4,6
Maret	28,74	225,20	22	85,71	2,06	5,3
April	29,05	261,00	25	85,89	1,42	5,7
Mei	29,95	66,80	14	78,60	2,89	7,9
Juni	28,87	97,40	16	80,78	2,64	6,7
Juli	28,11	50,90	26	80,60	3,08	5,7
Agustus	28,53	3,10	31	77,37	3,27	7,5
September	29,53	0,10	30	75,91	2,84	8,0
Oktober	30,01	54,60	31	75,46	2,19	7,5

Bulan	Rata-Rata Suhu	Rata-Rata Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Kelembapan	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
November	29,40	215,70	30	81,88	1,47	5,8
Desember	27,74	596,50	31	86,68	2,41	2,4

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.1.1.4 Topografi

Kabupaten Gresik memiliki topografi yang beragam, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Kawasan pesisir ini membentang dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, dan Panceng di daratan utama, serta mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean. Ketinggian tanah di Kabupaten Gresik bervariasi antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan daerah terendah terletak di sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Gambaran kondisi topografi di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Ketinggian dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kecamatan	Ketinggian	Luas Lahan (Ha)
Kecamatan Wringinanom	0 - 100 meter	6.207,10
Kecamatan Driyorejo	0 - 100 meter	5.509,41
Kecamatan Kedamean	0 - 100 meter	6.702,90
Kecamatan Menganti	0 - 100 meter	6.999,99
Kecamatan Cerme	0 - 100 meter	7.163,62
Kecamatan Benjeng	0 - 100 meter	6.230,33
Kecamatan Balongpanggang	0 - 100 meter	6.471,99
Kecamatan Duduksampeyan	0 - 100 meter	7.717,90
Kecamatan Kebomas	0 - 100 meter	3.428,29
Kecamatan Kebomas	100 - 500 meter	5,56
Kecamatan Gresik	0 - 100 meter	710,02
Kecamatan Manyar	0 - 100 meter	10.562,11
Kecamatan Bungah	0 - 100 meter	8.538,56
Kecamatan Sidayu	0 - 100 meter	6.165,29
Kecamatan Dukun	0 - 100 meter	6.401,26
Kecamatan Panceng	0 - 100 meter	6.165,29
Kecamatan Panceng	100 - 500 meter	17,11
Kecamatan Ujungpangkah	0 - 100 meter	12.326,59

Kecamatan	Ketinggian	Luas Lahan (Ha)
Kecamatan Ujungpangkah	100 - 500 meter	80,92
Kecamatan Sangkapura	0 - 100 meter	6.263,78
Kecamatan Sangkapura	100 - 500 meter	6.170,31
Kecamatan Sangkapura	500 - 1.000 meter	266,86
Kecamatan Tambak	0 - 100 meter	4.388,69
Kecamatan Tambak	100 - 500 meter	2.888,42
Kecamatan Tambak	500 - 1.000 meter	6,56
Jumlah		125.675,97

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Tabel 2.8 Kelerengan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik (Ha) Tahun 2022

Kecamatan	0-2%	2-5%	5-15%	15-40%	>40%	Jumlah
Wringinanom	620.710	620.710	620.710	0,00	0,00	1.862.130
Driyorejo	550.941	550.941	550.941	0,00	0,00	1.652.823
Kedamean	670.289	670.289	670.289	0,00	0,00	2.010.867
Menganti	699.999	699.999	699.999	0,00	0,00	2.099.997
Cerme	716.362	716.362	716.362	0,00	0,00	2.149.086
Benjeng	623.033	623.033	0,00	0,00	0,00	1.246.066
Balongpanggang	647.199	647.199	647.199	0,00	0,00	1.941.597
Duduksampeyan	771.790	771.790	771.790	0,00	0,00	2.315.370
Kebomas	343.385	343.385	343.385	343.385	0,00	1.373.540
Gresik	71.002	71.002	71.002	0,00	0,00	213.006
Manyar	1.056.211	1.056.211	1.056.211	0,00	0,00	3.168.633
Bungah	853.856	853.856	853.856	0,00	0,00	2.561.568
Sidayu	445.234	445.234	0,00	0,00	0,00	890.468
Dukun	640.126	640.126	640.126	0,00	0,00	1.920.378
Panceng	618.240	618.240	618.240	618.240	0,00	2.472.960
Ujungpangkah	1.240.751	1.240.751	1.240.751	1.240.751	0,00	4.963.004
Sangkapura	1.270.094	1.270.094	1.270.094	1.270.094	1.270.094	6.350.470
Tambak	728.367	728.367	728.367	728.367	728.367	3.641.835
Jumlah	**12.567.589**	**12.567.589**	**11.499.322**	**4.200.837**	**1.998.461**	**42.833.798**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022

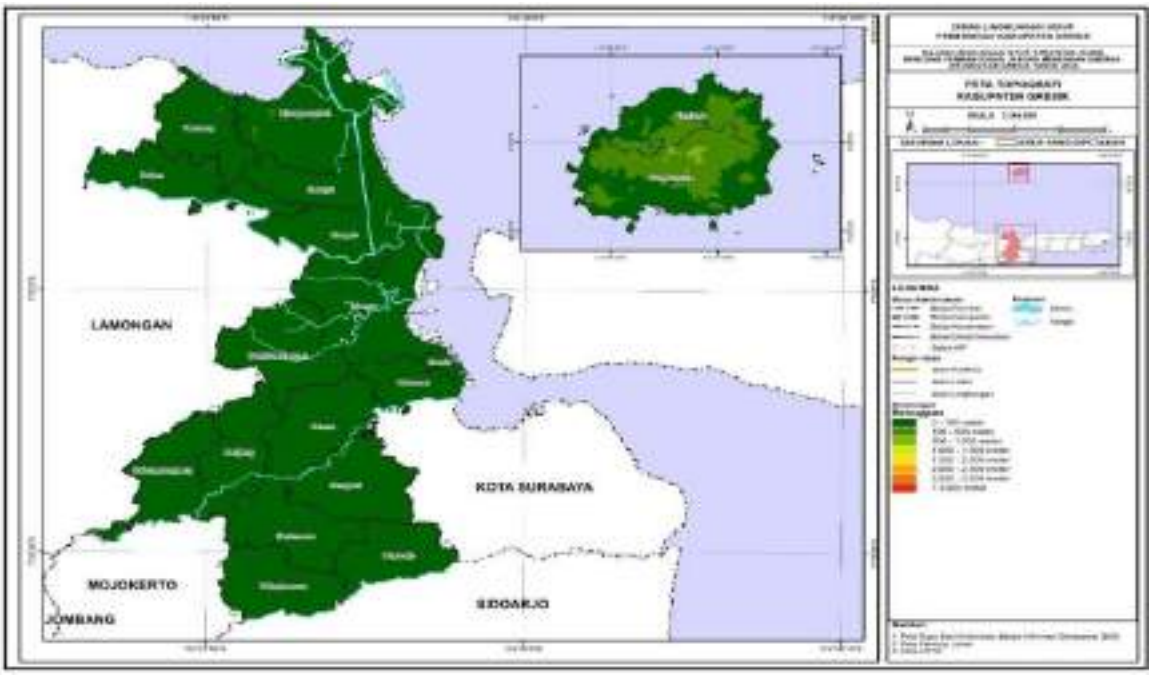

Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

2.1.1.1.5 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh beragam faktor yang memainkan peran penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan bagian dari gunung api belakang busur Kuarter di sisi timur Pulau Jawa, termasuk dalam zona cekungan Jawa Timur. Kabupaten Gresik tersusun dari batuan alluvium, batuan gamping mio-pliosen, batuan sedimen mio-pliosen, batuan sedimen miosen awal, batuan oligo-miosen, batuan sedimen pilo-plistosen, batuan sedimen plistosen, batuan terobosan miosen. Informasi mengenai jenis batuan atau geologi di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Jenis Batuan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Batuan	Luas
Wringinanom	Batuan sedimen mio-pliosen	6.207,10
Driyorejo	Batuan sedimen mio-pliosen	5.509,42
Kedamean	Batuan sedimen mio-pliosen	6.702,90
Menganti	Batuan sedimen plio-plistosen	6.999,99
Cerme	Batuan sedimen plistosen	7.163,62
Benjeng	Batuan sedimen plistosen	6.230,33

Kecamatan	Jenis Batuan	Luas
Balongpanggang	Batuan sedimen plio-plistosen	6.471,99
Duduksampeyan	Batuan sedimen plio-plistosen	7.717,90
Kebomas	Batuan sedimen plio-plistosen	3.433,85
Gresik	Batuan sedimen plio-plistosen	710,021
Manyar	Batuan sedimen plio-plistosen	10.562,11
Bungah	Batuan sedimen plio-plistosen	8.538,56
Sidayu	Batuan sedimen oligo-miosen	4.452,34
Dukun	Batuan sedimen pligo-miosen	6.401,26
Panceng	Batuan sedimen oligo-miosen	6.182,40
Ujungpangkah	Batuan sedimen oligo-miosen	12.407,51
Sangkapura	Batuan alluvium	12.700,94
Tambak	Batuan alluvium	7.283,67
Jumlah		**125.675,97**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022

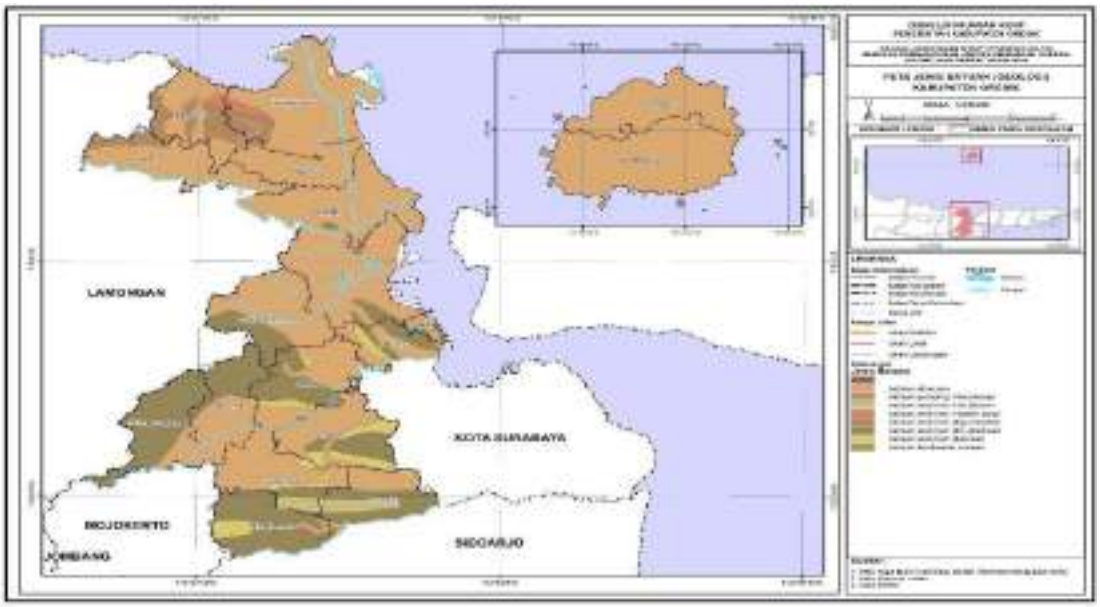

Gambar 2.6 Peta Jenis Batuan (Geologi) Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.1.1.6 Jenis Tanah

Berdasarkan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, sebagian besar tanah wilayah Kabupaten Gresik terdiri atas jenis tanah Aluvial, Grumusol, dan Mediteran. Tanah Aluvial, yang terbentuk dari pengendapan sedimen sungai, danau, atau cekungan, memiliki karakteristik rentan terhadap beban dan

daya topang rendah (Muhammad Taufik et al, 2019). Sementara itu, tanah grumusol berasal dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik, memiliki kandungan organik rendah, sehingga menjadikannya kurang subur dan tidak ideal untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian, tanah mediteran merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur yang keras dan batuan sedimen. Informasi mengenai jenis tanah di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jenis Tanah Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Tanah	Luas
Kecamatan Wringinanom	Aluvial	2.168,00
Kecamatan Wringinanom	Grumosol	4.040,00
Kecamatan Driyorejo	Aluvial	0,98
Kecamatan Driyorejo	Grumosol	5.508,43
Kecamatan Kedamean	Aluvial	4.040,13
Kecamatan Kedamean	Grumosol	2.663,00
Kecamatan Menganti	Aluvial	2.902,00
Kecamatan Menganti	Grumosol	4.098,00
Kecamatan Cerme	Aluvial	5.745,38
Kecamatan Cerme	Grumosol	1.418,23
Kecamatan Benjeng	Aluvial	4.497,39
Kecamatan Benjeng	Grumosol	1.732,94
Kecamatan Balongpanggang	Aluvial	4.770,49
Kecamatan Balongpanggang	Grumosol	1.701,49
Kecamatan Duduksampeyan	Aluvial	4.654,26
Kecamatan Duduksampeyan	Grumosol	3.063,64
Kecamatan Kebomas	Aluvial	3.433,85
Kecamatan Gresik	Aluvial	710,02
Kecamatan Manyar	Aluvial	10.562,00
Kecamatan Bungah	Aluvial	7.349,31
Kecamatan Bungah	Grumosol	1.189,24
Kecamatan Sidayu	Aluvial	2.657,00
Kecamatan Sidayu	Grumosol	1.795,00
Kecamatan Dukun	Aluvial	5.586,55
Kecamatan Dukun	Grumosol	135,13
Kecamatan Dukun	Mediteran	679,58
Kecamatan Panceng	Aluvial	730,00
Kecamatan Panceng	Mediteran	5.453,00

Kecamatan	Jenis Tanah	Luas
Kecamatan Ujungpangkah	Aluvial	7.548,00
Kecamatan Ujungpangkah	Grumosol	232,00
Kecamatan Ujungpangkah	Mediteran	4.628,00
Kecamatan Sangkapura	Aluvial	12.701,00
Kecamatan Tambak	Aluvial	7.284,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Bagian utara Kabupaten Gresik meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, dan Manyar, yang termasuk dalam daerah Pegunungan Kapur Utara dengan tanah yang cenderung kurang subur, terutama di Kecamatan Panceng. Sebagian besar area ini berada di hilir aliran Sungai Bengawan Solo yang bermuara di pantai utara Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan Solo memiliki potensi besar karena dapat mendukung sektor industri, perikanan, perkebunan, dan pemukiman. Selain itu, potensi bahan galian di wilayah ini juga cukup signifikan, khususnya untuk mineral non-logam, dengan sebagian telah dieksplorasi dan sebagian lainnya sudah dalam tahap eksploitasi.

b. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

Bagian tengah Kabupaten Gresik meliputi wilayah Dukun Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, dan Kebomas, yang dikenal dengan tanah yang cukup subur. Di kawasan ini, terdapat beberapa sungai kecil seperti Kali Lamong, Kali Corong, dan Kali Manyar, menjadikan daerah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

c. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Bagian selatan Kabupaten Gresik mencakup wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringin Anom, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur, meskipun ada juga daerah berbukit. Area ini sangat potensial untuk pengembangan industri, permukiman, dan pertanian. Potensi bahan galian di wilayah ini cukup besar, terutama untuk mineral

non-logam. Beberapa jenis bahan mineral non-logam tersebut sudah dieksplorasi, sementara yang lainnya sedang dalam tahap eksploitasi.

d. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik terletak di Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Daerah ini sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan, sementara sebagian lainnya berupa daerah berbukit. Oleh karena itu, wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, pasir, dan batu gamping. Formasi batuan tertua di pulau ini adalah formasi batu gamping gelam, yang juga dikenal sebagai batu marmer (*onyx*), hasil perubahan dari batu gamping. Di atas formasi ini terdapat Formasi Batupasir Kepongan, yang diambil di lapangan untuk bahan bangunan. Formasi yang paling banyak dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung Api Balibak, yang membentuk dinding-dinding air terjun, dengan hasil pelapukannya berupa pasir yang ditemukan di sepanjang pantai. Endapan Aluvial, yang masih mengalami proses pengendapan hingga kini, merupakan formasi paling muda di wilayah ini.

2.1.1.1.7 Hidrologi

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong, serta dilalui oleh Kali Surabaya di wilayah selatan. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Gresik adalah 1.216 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari per tahun. Musim penghujan di Kabupaten Gresik biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga bulan Maret, dengan bulan terbasah adalah Januari yang memiliki curah hujan lebih dari 250 mm per bulan. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus. Berikut merupakan tabel, gambar dan peta yang menjelaskan mengenai kondisi hidrologi Kabupaten Gresik.

Tabel 2.11 Air Permukaan di Kabupaten Gresik

No	Air Permukaan
1	Kali Mas
2	Kali Bengawan Solo
3	Kali Lewean
4	Kali Lamongan
5	Kali Benem
6	Kali Corong
7	Kali Mentani
8	Kali Wangen
9	Kali Bedahan
10	Kali Mantup
11	Kali Medangan
12	Kali Ceper
13	Kali Mireng
14	Kali Wadak
15	Kali Gladakgede
16	Kali Tambak
17	Kali Baturata
18	Kali Raya
19	Kali Baturaya
20	Kali Kope
21	Kali Deje
22	Kali Laok
23	Kali Kebonagung
24	Kali Grunjungan
25	Kali Lancabur
26	Kali Legundi
27	Danau/Telaga

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.12 Sungai di Kabupaten Gresik

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Bengawan Solo	59,17
2	Kali Baturata	6,01
3	Kali Baturaya	3,1
4	Kali Bedahan	6,38
5	Kali Benem	30,33

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
6	Kali Ceper	6,95
7	Kali Corong	8,90
8	Kali Deje	5,49
9	Kali Gladakgede	3,86
10	Kali Grunjungan	5,57
11	Kali Joho	3,93
12	Kali Kebonagung	4,42
13	Kali Kope	4,23
14	Kali Lamongan	63,97
15	Kali Lancabur	2,22
16	Kali Laok	5,59
17	Kali Legundi	2,69
18	Kali Lewean	4,12
19	Kali Mantup	14,99
20	Kali Mas	30,11
21	Kali Medangan	14,23
22	Kali Mentani	4,01
23	Kali Mireng	6,67
24	Kali Raya	4,16
25	Kali Tambak	7,05
26	Kali Wadak	3,91
27	Kali Wangen	9,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.13 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

Cekungan Air Tanah	Jenis	Volume Air tanah Bebas (m^3/tahun)	Air Tanah Tertekan (m^3/tahun)	Luas (Ha)
Brantas	Daerah Lepasan Air	3.674 Juta	175 Juta	10.348,08
Panceng	Daerah Tanah Imbuhan Air	27 Juta	41 Juta	10.465,32
Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta	41.426,82

Sumber: Kementerian ESDM, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.13, Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Gresik terdiri dari tiga wilayah utama yaitu CAT Brantas, CAT Panceng, dan CAT Surabaya-Lamongan. CAT Brantas yang merupakan daerah lepasan air memiliki volume air tanah bebas sebesar 3.647 juta m^3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 175 juta m^3/tahun, dengan luas area mencapai 10.348,08 hektar. Sementara itu, CAT Panceng yang merupakan daerah imbuhan air tanah memiliki volume air tanah bebas sebesar 27 juta m3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 41 juta m^3/tahun, dengan luas area 10.465,32 hektar.

CAT Surabaya-Lamongan yang seluruhnya merupakan daerah lepasan air, tercatat memiliki volume air tanah bebas yang sama yaitu 843 juta m^3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 37 juta m^3/tahun. Area ini terbagi menjadi tiga bagian dengan luas yang berbeda yaitu 41.426,82 hektar. Data ini menjadi acuan dalam pengelolaan cekungan air tanah di wilayah tersebut. Peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan peta arah aliran Sungai Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Luas total Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Gresik mencapai 62.240,21 Ha yang tersebar di 14 kecamatan. CAT Surabaya-Lamongan memiliki area terluas, diikuti CAT Panceng, dan CAT Brantas. Kecamatan Manyar memiliki area CAT terluas dengan total 10.012,17 Ha yang terdiri dari CAT Surabaya-Lamongan. Sementara itu, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki area CAT sama sekali seperti Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Sangkapura, dan Tambak yang ditunjukkan dengan nilai 0,00. CAT Brantas hanya terdapat di tiga kecamatan yaitu Driyorejo (4.381,38 Ha), Kedamean (652,77 Ha), dan Wringinanom (5.313,93 Ha).

Tabel 2.14 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
1	Gresik Kota	IPA Legundi, Sumur GKB, Air Curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya, PT Dewata Bangun Tirta, SPAM Regional Umbulan, dan Bendung Gerak Sembayat (BGS)
2	Gresik Tengah	IPA Legundi, dan Air Curah PT Drupadi Agung Lestari
3	Gresik Selatan	Air Curah PT. Drupadi Agung Lestari, IPA Perumnas, PT.

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
		Dewata Bangun Tirta, SPAM Regional Mojolagres

Sumber: Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, sistem pelayanan jaringan perpipaan di Kabupaten Gresik terbagi menjadi tiga wilayah pelayanan utama. Wilayah Gresik Kota dilayani oleh beberapa sistem yaitu IPA Legundi, Sumur GKB, serta sumber air curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya, PT Dewata Bangun Tirta, SPAM Regional Umbulan dan Bendung Gerak Sembayat (BGS). Untuk wilayah Gresik Tengah, sistem pelayanan berasal dari IPA Legundi dan air curah PT Drupadi Agung Lestari. Sementara itu, wilayah Gresik Selatan mendapatkan layanan air dari 4 (empat) sumber yaitu air curah PT Drupadi Agung Lestari, PT. Dewata Bangun Tirta, IPA Perumnas dan SPAM Regional Mojolagres.

Tabel 2.15 Sumber Pelayanan Jaringan Perpipaan

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
1	Sumur GKB II	Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas	Sumur Dalam	28 L/detik
2	IPA Legundi	Desa Legundi	Kali Surabaya	600 L/detik
3	IPA Perumnas	Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo	Kali Surabaya	100 L/detik
4	Air Curah-Segoromandu	Segoromadu	Air Curah PDAM Surabaya	40 L/detik
5	Air Curah-Gadung	Desa Gadung	Air Curah PDAM Surabaya	5 L/detik
6	Air Curah-PT Dewata	Desa Legundi	Kali Surabaya	210 L/detik
7	Air Curah- PT Drupadi	Desa Krikilan	Kali Surabaya	400 L/detik
8	SPAM Regional Umbulan	Kabupaten Pasuruan	Mata Air Umbulan	1000 L/detik
9	Bendung Gerak Sembayat (BGS)	Desa Sidomukti	Bengawan Solo	1000 L/detik
10	SPAM Regional	Kecamatan	Sungai Brantas	100 L/detik

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
	Mojolagres	Balongpanggang		

Sumber: Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, sumber pelayanan jaringan perpipaan di Kabupaten Gresik berasal dari sepuluh lokasi berbeda dengan kapasitas yang bervariasi. IPA Legundi yang berlokasi di Desa Legundi memiliki kapasitas terbesar yaitu 600 L/detik dengan sumber air baku dari Kali Surabaya. Diikuti oleh Air Curah-PT Drupadi di Desa Krikilan dengan kapasitas 400 L/detik, dan Air Curah-PT Dewata di Desa Legundi sebesar 210 L/detik, keduanya juga mengambil sumber dari Kali Surabaya. IPA Perumnas yang berada di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo memiliki kapasitas 100 L/detik. Sumur GKB II yang terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas menggunakan sumber air dari sumur dalam dengan kapasitas 28 L/detik. Sementara itu, Air Curah-Segoromadu dan Air Curah-Gadung yang mengambil sumber dari Air Curah PDAM Surabaya masing-masing memiliki kapasitas 40 L/detik dan 5 L/detik. Sumber pelayanan Jaringan perpipaan Kabupaten Gresik juga berasal dari SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres yang masing masing memiliki kapasitas 1000 L/detik dan 100 L/detik serta Bendungan Gerak Sembayat (BGS) dengan kapasitas 1000 L/detik.

Tabel 2.16 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Curah Hujan
Kecamatan Wringinanom	1.704 – 1.797
Kecamatan Driyorejo	1.424 – 1.517
Kecamatan Kedamean	1.517 – 1.611
Kecamatan Menganti	1.517 – 1.611
Kecamatan Cerme	1.238 – 1.331
Kecamatan Benjeng	1.238 – 1.331
Kecamatan Balongpanggang	1.424 – 1.517
Kecamatan Duduksampeyan	1.145 – 1.238
Kecamatan Kebomas	1.238 – 1.331
Kecamatan Gresik	1.238 – 1.331
Kecamatan Manyar	1.052 – 1.145

Kecamatan	Curah Hujan
Kecamatan Bungah	1.517 – 1.611
Kecamatan Sidayu	679 – 772
Kecamatan Dukun	679 - 772
Kecamatan Panceng	1.238 – 1.331
Kecamatan Ujungpangkah	679 - 772
Kecamatan Sangkapura	679 - 772
Kecamatan Tambak	1.052 – 1.145

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 2.16, curah hujan di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Wringinanom dengan rentang 1.704 - 1.797 mm, diikuti oleh Kecamatan Kedamean dan Menganti yang memiliki rentang curah hujan sama yaitu 1.517 - 1.611 mm. Kecamatan Balongpanggang dan Driyorejo juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan rentang 1.424 - 1.517 mm. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Bungah, Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah mencatat curah hujan terendah dengan rentang 679 - 772 mm.

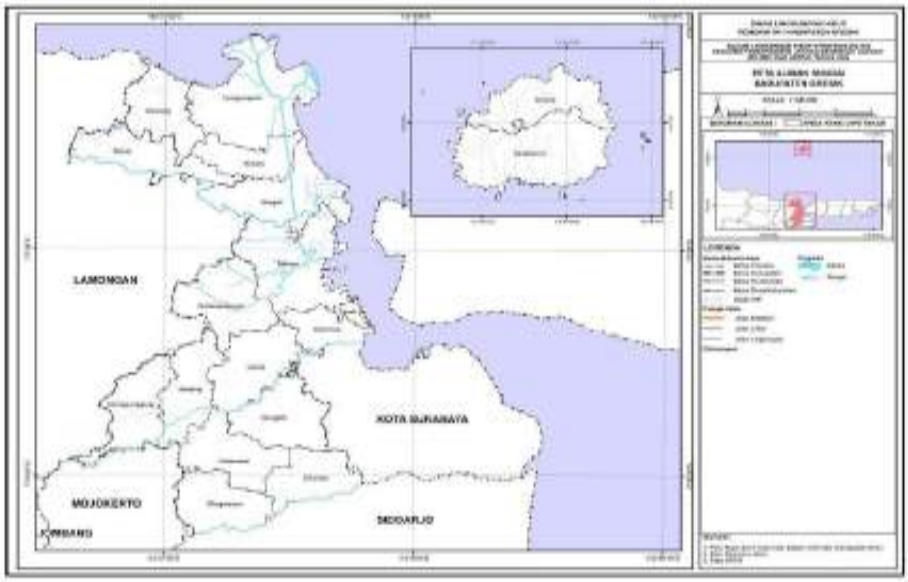

Gambar 2.7 Peta Aliran Sungai Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025

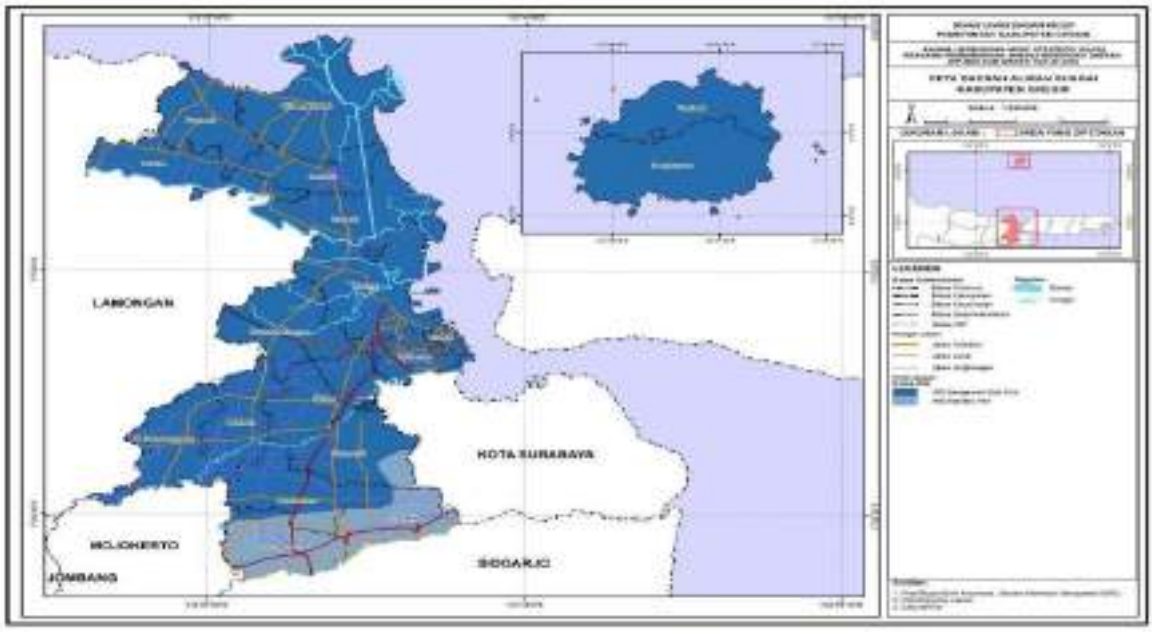

Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025

.

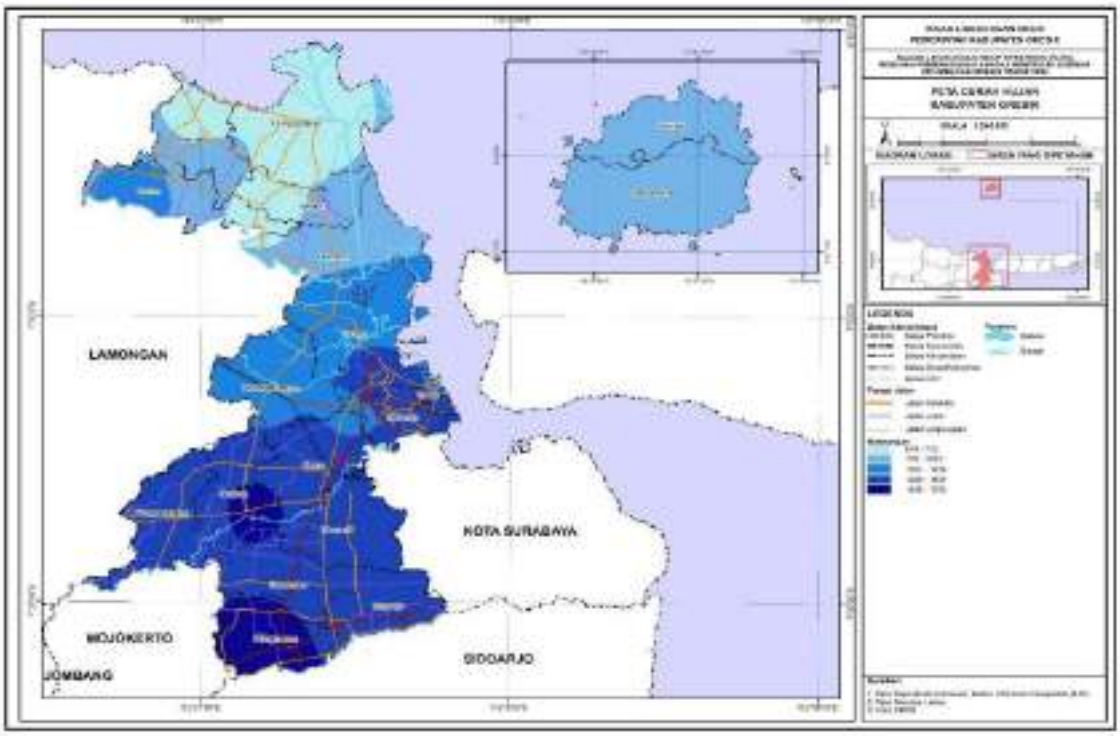

Gambar 2.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Sumber Daya Alam dan Industri

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita (R. latifah et al., 2023). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dengan demikian, pengelolaan SDA yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat digunakan secara efektif dan tidak merusak lingkungan hidup di masa depan.

2.1.1.2.2 Hortikultura

Produksi hortikultura mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias. Jumlah produksi ini dihitung berdasarkan luas area yang dipanen atau jumlah tanaman yang menghasilkan dalam periode waktu tertentu, baik itu bulanan maupun triwulanan. Berikut merupakan tabel produksi hortikultura di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.17 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Daun	-	-	-	-	-
Bawang Merah	1.652,00	658,00	1.056,00	1.796,80	543,00
Bawang Putih	-	-	-	-	-
Bayam	3.638,00	3.831,00	4.233,00	3.341,00	3.008,00
Buncis	-	-	-	-	-
Cabai Besar	21.770,00	48.554,00	49.240,00	28.797,00	33.991,00
Cabai Keriting	-	-	-	-	-
Cabai Rawit	152.592,00	229.568,00	208.456,00	119.260,50	206.238,50
Jamur Tiram	-	1,00	-	7,05	11,90
Jamur	-	-	-	-	-

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Merang					
Jamur Lainnya	-	-	-	-	-
Kacang Panjang	6.361,00	3.172,00	565,00	2.963,00	394,00
Kangkung	7.084,00	6.461,00	8.182,00	10.456,00	11.842,00
Kembang Kol	-	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-	-
Ketimun	1.395,00	131,00	-	-	940,00
Kubis	-	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	-	-	-
Petsai	3.344,00	3.220,00	4.427,00	10.977,00	31.142,00
Terung	20.246,00	2.791,00	2.947,00	5.199,00	1.351,00
Tomat	11.283,00	1.523,00	2.179,00	4,336,00	1.715,00
Wortel	-	-	-	-	-
Melon	1.040,00	82,00	120,00	574,00	-
Semangka	2.051,00	1.240,00	204,00	1.223,00	199,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.17 menunjukkan data produksi sayuran dan buah-buahan semusim dari 2021-2024, cabai rawit merupakan komoditas tertinggi meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Pada tahun 2024 produksi cabai rawit sebesar 20.623,9 ton . Beberapa tanaman seperti kangkung dan sawi menunjukkan peningkatan produksi, sementara komoditas lain seperti ketimun, terung, dan tomat mengalami penurunan produksi. Total produksi keseluruhan menurun dari 29.991,0 ton di 2021 menjadi 29.117,6 ton di 2024. Untuk buah-buahan, produksi Melon dan Semangka relatif lebih rendah dan berfluktuasi dibanding kelompok sayuran.

Tabel 2.18 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jahe	81.270	106.570	800.977	347	1.338
Jeruk Nipis	-	9.669.810	19.193.400	18.543.860	23.098.150
Kapulaga	-	-	-	-	-
Kencur	21	130	239	240	411
Kunyit	21.880.633	23.118.596	24.817.192	19.709.250	1.996.290
Laos	50	250	199	384	671
Lempuyang	70.000	1.200.000	650.000	-	-
Lidah Buaya	38	7	-	-	-
Mahkota Dewa	470	120	150	-	-
Mengkudu	185	830	1.100	578	85
Temuireng	15	5.184	3.682	4.855	2.710
Temukunci	29	2.139	2.582	165	429
Temulawak	5.550.004	11.946.045	9.389.172	4.526.231	530.353
Sambiloto	-	-	-	-	-
Serai	-	1.650	123.600	922.253	1.411.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.18 menunjukan bahwa terjadi fluktuasi produksi tanaman biofarmaka dari tahun 2021-2024. Produksi tanaman kunyit konsisten menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, mencapai puncak di tahun 2022 sebesar 24,8 juta kg. Tanaman jeruk nipis menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dengan produksi tertinggi mencapai 23,1 juta kg di tahun 2024. Temulawak juga menunjukkan angka produksi yang cukup tinggi dengan produksi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 11,9 juta kg. Total produksi tanaman biofarma terjadi peningkatan dari 46,1 juta kg di tahun 2021 menjadi 54,98 juta kg di tahun 2022. Sedangkan, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan produksi dengan total produksi masing-masing tahun sebesar 43,71 juta kg dan 27, 04 juta kg. Beberapa tanaman

seperti kapulaga, lempuyang dan sambiloto tidak memiliki catatan produksi selama periode tersebut.

Tabel 2.19 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Hias (Pohon)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aglonema	3.500	3.600	2.700	620	1.093
Anggrek Pot	-	-	1.890	1.725	43
Anggrek Potong	-	-	-	-	-
Anthurium Bunga	-	-	-	-	39
Bromelia	-	-	-	-	-
Bougenville	-	870	1.439	1.017	34
Cordyline	-	-	-	-	-
Dracaena	-	-	-	-	-
Gerbera	-	-	-	-	-
Heliconia	-	-	-	-	-
Ixora	-	-	-	-	-
Krisan	-	-	-	-	-
Mawar	-	-	-	-	-
Melati (Kg)	30.008	45.600	42.225	33.005	2.410
Pakis	-	-	-	-	-
Palem	-	1.020	1.020	90	15
Phylodendron	-	-	-	-	-
Puring	-	-	-	-	64
Sansevieria	-	-	-	-	82
Sedap Malam	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Data Tabel 2.19 menunjukkan produksi tanaman melati merupakan komoditas dengan produksi tertinggi, tanaman melati konsisten meningkat mencapai produksi paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 45.600 tanaman. Sedangkan produksi tanaman Anthurium Bunga, Puring, dan Sanseviera hanya tercatat di Tahun 2024. Total produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik secara keseluruhan mengalami penurunan signifikan dari 51.090 tanaman di 2021 menjadi

3.780 tanaman di 2024. Beberapa jenis tanaman seperti Anggrek Potong, Bromelia, Cordyline, Dracaena, Gerbera, Heliconia, Ixora, Krisan, Mawar, dan Sedap Malam tidak memiliki catatan produksi selama periode tahun 2021-2024.

Tabel 2.20 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buah-buahan					
Alpukat	1.142,00	1.253,00	1.272,00	2.072,00	1.047,65
Anggur	-	-	-	1,10	3,40
Apel	-	-	-	-	-
Belimbing	4.577,00	6.896,00	7.074,00	6.978,59	20.796,75
Buah Naga	-	4.765,00	4.688,00	3.054,85	1.908,00
Duku	-	-	-	-	-
Durian	6.032,00	7.053,00	6.405,00	1.644,00	3.518,00
Jambu Air	5.425,00	9.389,60	9.337,00	10.032,72	5.968,17
Jambu Biji	4.881,00	15.497,00	16.957,00	14.280,11	25.930,61
Jeruk Pamelo	197,00	177,00	172,00	50,00	96,50
Jeruk Lemon	-	1.661,00	1.735,00	191,60	198,90
Jeruk Siam	4.623,00	4.600,00	4.880,00	6.653,00	20.192,48
Lengkeng	-	2,00	37,00	376,70	566,00
Mangga	675.921,00	871.346,40	786.538,88	831.044,57	763.122,75
Manggis	182,00	621,00	580,00	900,00	95,78
Nanas	1,00	-	-	-	-
Nangka	7.221,00	17.192,00	17.853,00	9.501,60	13.977,28
Pepaya	8.262,00	20.091,30	26.752,00	68.299,22	47.517,42
Pisang	218.975,00	311.148,00	384.351,00	313.122,59	305.298,64
Rambutan	12.477,00	11.535,00	11.337,00	511,60	1.198,90
Salak	-	-	-	6,70	58,00
Sawo	3.629,00	9.872,00	9.956,00	11.369,55	45.098,06
Sirsak	944,00	5.651,00	6.032,00	3.371,70	2.533,58
Sukun	3.565,00	7.342,00	6.694,00	3.952,70	5.447,29
Sayuran					
Melinjo	-	-	-	-	-
Petai	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.20 menunjukkan buah mangga menjadi komoditas dengan produksi tertinggi dengan produksi mencapai 76.312,3 ton pada tahun 2023. Pisang juga menjadi komoditas dengan produksi tinggi setelah mangga dengan produksi mencapai 30.529,9 ton di tahun 2024. Beberapa komoditas mengalami fluktuasi seperti Rambutan yang menurun drastis dari 1153,5 ton di tahun 2021 menjadi 51,2 ton di tahun 2024. Sementara, Pepaya menunjukkan tren positif mencapai 6.829,9 ton di tahun 2023 dan 4751,7 ton di tahun 2024. Total produksi keseluruhan menurun dari 130.483,9 ton di 2021 menjadi 126.457,4 ton. Beberapa tanaman seperti Markisa dan Nanas tidak memiliki catatan produksi di tahun-tahun terakhir.

2.1.1.2.3 Perkebunan

Produksi perkebunan mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang secara berkelanjutan dapat ditanam setiap tahun seperti karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, pala, dan lada. Sedangkan tanaman semusim biasanya ditanam dalam satu musim dan kemudian dipanen sebelum musim berikutnya seperti tebu, tembakau, dan nilam.

Tabel 2.21 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Tahunan					
Karet	-	-	-	-	
Kelapa	5.052,86	5.050,56	5.049,77	5.044,73	5 044,75
Kelapa Sawit	-	-	-	-	
Kopi	-	-	-	-	
Kakao	-	-	-	-	
Teh	-	-	-	-	
Jambu Mete	-	-	-	-	
Pala	-	-	-	-	
Lada	-	-	-	-	
Tanaman Semusim					

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tebu	159.298,63	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158 589,19
Tembakau	285,00	375,00	900,00	1.628,40	3.248,89
Nilam	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.21, sektor perkebunan di Kabupaten Gresik didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu kelapa, tebu, dan tembakau. Produksi kelapa menunjukkan tren penurunan, dari 5.050,56 ton pada tahun 2021 menjadi 5.044,75 ton pada tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada produksi tebu dengan sedikit penurunan produksi, dari 159.790,50 ton pada tahun 2021 menjadi 158.589,19 ton pada tahun 2024. Tembakau mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, meningkat drastis dari 375,00 ton pada tahun 2021 menjadi 3.248,89 ton pada tahun 2024. Total produksi perkebunan rakyat menunjukkan tren peningkatan, dari 165.216,06 ton pada tahun 2021 menjadi 166.882,83 ton pada tahun 2024.

2.1.1.2.4 Perikanan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik memiliki produksi perikanan budidaya tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Sebagian besar jenis budidaya yang digunakan di Kabupaten Gresik adalah Tambak Payau dan Tambak Tawar, yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Berikut merupakan tabel produksi ikan menurut sub sektor perikanan di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Tabel 2.22 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Kg)			
	2021	2022	2023	2024
Penangkapan di Laut	11.457.340	10.793.753	11.949.510,00	13.547.000,00
Budidaya				
Tambak Payau	108.639.603	68.664.948	71.210.017,27	76.430.015,33

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Kg)			
	2021	2022	2023	2024
Tambak tawar	22.856.646	66.267.607	64.237.678,50	63.959445,69
Perairan Umum	-	16.766.346	17.469.779,85	15.582.549,37
Jumlah	**142.953.589**	**162.492.654**	**164.866.985,62**	**169.519.010,00**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.22, Produksi perikanan Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 155,98 ribu ton. Jumlah produksi ikan terbanyak adalah dari produksi perikanan budidaya yaitu tambak payau sebanyak 76,43 ribu ton. Sub sektor perikanan budidaya, terutama tambak payau dan tambak tawar secara konsisten telah memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi ikan di Kabupaten Gresik.

2.1.1.2.5 Peternakan

Peternakan di Kabupaten Gresik didominasi oleh ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Contoh ternak besar seperti sapi dan kerbau digunakan untuk produksi susu dan daging, sementara ternak kecil seperti kambing dan domba digunakan untuk produksi daging dan wol. Kemudian, ternak unggas seperti ayam dan itik digunakan untuk produksi telur dan daging. Dengan demikian, peternakan di Kabupaten Gresik memiliki beragam jenis ternak yang berkontribusi pada keberlanjutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Ternak	Populasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	58.772	59.259	57.347	54.352	24.853
Kerbau	234	234	198	53	57
Kuda	239	239	195	149	152
Sapi Perah	532	499	375	299	260
Kambing	77.741	79.059	80.100	75.746	60.579
Domba	37.271	37.899	39.900	42.135	23.129
Babi	68	27	20	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.24 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Unggas	Populasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Buras	745.040	759.629	733.050	768.020	203.528
Ayam petelur	252.200	260.140	266.005	266.938	344.993
Ayam Pedaging	23.612.357	24.221.660	24.256.355	24.438.606	24.314.449
Bebek	33.264	31.890	31.906	32.322	76.851
Entok	32.525	32.081	32.097	33.210	10.332

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.23 dan Tabel 2.24 terdapat tiga jenis ternak di Kabupaten Gresik, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Jenis ternak besar yang paling banyak diternakkan pada tahun 2024 adalah sapi, sebanyak 24.853 ekor. Namun, angka ini mengalami penurunan dari jumlah sapi di Kabupaten Gresik 3 tahun sebelumnya yang mencapai 59.259 ekor pada tahun 2021. Sedangkan, ternak kecil paling banyak adalah kambing dengan populasi sebanyak 60.579 ekor dan domba sebanyak 23.129 ekor di tahun 2024. Berbagai jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, bebek dan entok. Jenis ternak unggas paling banyak pada tahun 2024 adalah ayam pedaging yaitu mencapai 2.060.263 ekor.

2.1.1.2.6 Pariwisata

Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi pariwisata. Wilayah ini menawarkan sejumlah destinasi wisata menarik, mulai dari tempat wisata religi hingga wisata alam (Arief & Lokajaya, 2023). Oleh karena itu, Kabupaten Gresik menjadi salah satu tujuan wisata yang populer bagi wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik. Berikut ini adalah tabel jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.25 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2020-2024

Wisatawan	Jumlah Wisatawan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	4.360	37	12.599	18.281	18.655
Domestik	2.098.995	2.106.133	4.120.683	4.280.847	4.495.426
Jumlah	2.103.355	2.106.170	4.133.282	4.299.128	4.514.084

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.25 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.495.426 orang, meningkat sebesar 5,01% dari tahun 2023.

Tabel 2.26 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri Cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	132	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Bersarkan Berdasarkan Tabel 2.25 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.495.426 orang, meningkat sebesar 5,01% dari tahun 2023.**Berdasarkan** Tabel 2.25 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.495.426 orang, meningkat sebesar 5,01% dari tahun 2023.

Tabel 2.26 destinasi wisata di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebanyak 132 lokasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Destinasi-destinasi ini tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. Jumlah destinasi yang cukup banyak ini menunjukkan keberagaman potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Gresik, mulai dari objek wisata alam, hingga situs-situs religi yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya. Dengan sebaran yang merata di seluruh wilayah, setiap kecamatan di Kabupaten Gresik memiliki daya tarik wisata, yang semakin memperkuat posisi daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

2.1.1.2.7 Industri

Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang maju dan memiliki keberagaman sektor industri yang berkembang pesat. Berbagai jenis industri, seperti industri elektronik, petrokimia, semen, tekstil, hingga industri makanan berskala rumahan, tumbuh subur di wilayah ini (Mauliza et al., 2023). Keberagaman sektor industri ini menjadikan Kabupaten Gresik sebagai pusat industri yang sangat signifikan di Jawa Timur, dengan berbagai produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun internasional. Berikut daftar industri yang berada pada Kawasan Industri Gresik pada tahun 2024.

Tabel 2.27 Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	PT. PETROKIMIA GRESIK	Jl. Jenderal Ahmad Yani Gresik, Jawa Timur 61119
2	PT. KELOLA MINA LAUT	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C-5, Randuboyo, Randuagung, Kebomas, Gresik.
3	PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI	Jl. Kig Raya Barat No.8, Randuboyo, Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
4	PT. PETROKIMIA KAYAKU	Jl. Jendral Ahmad Yani PO Box 107 Gresik, 61119 Jawa Timur – Indonesia
5	PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Jl. Kig Raya Selatan Blok A5, Karangturi, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia
6	PT. SUMBER BERSIH DUNIA	Jl. Tri Dharma Kawasan Industri Gresik No.3, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
7	PT. ANEKA JASA GRHADIKA	Jl. Prof. Moch. Yamin, SH
8	PT. FOKUS JASA MITRA	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin SH, KIG Gresik
9	PT. BUMI PERSADA KARYA	Jl. Raya Roomo No.94B, Maduran, Roomo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik
10	Eterindo Nusa Graha (ENG)	Kawasan Industri Gresik, Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin
11	PT Petro Jordan Abadi	Jl. Raya Roomo, Manyar Gresik 61151
12	PT Petrowidada	Jl. Prof. Dr. Moch Yamin Sh, KIG Gresik
13	PT Anugerah Inti Germanusa	Jl Prof M Yamin SH Kompl Kawasan Industri Gresik Raya Utr Bl B/4-5, Gresik
14	PT Ranteindo Teknik Mandiri	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, KIG Gresik
15	PT. Fruit ING indonesia	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
16	PT Gotrans Logistics	Jalan Raya KIG Barat II Kav. Q 19-28, Gresik
17	PT Harvestar Flour Mills	Jl. KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Sekarsore, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151
18	PT Blue Gas Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav. L Gresik, Jawa Timur
19	PT Bumi Mandiri Resource	Jl. Kig Raya Barat No.1, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
20	PT Mitra Nasional Kualitas (Minaku)	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C7, Kawasan Industri Gresik, Gresik 61121
21	PT Krakatau Wiremesh Surabaya	Jalan KIG Barat 2 Kavling H-1, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur.
22	PT Colorpak Indonesia Tbk	Jl. Kig Raya Selatan kav E-8, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur
23	PT Primergy Solution	KIG Raya Selatan E7-8, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia
24	PT Sarana Karya Utama	Jl. Kig Raya Selatan Kavling A No.4, Kawasan Industri Gresik, Gresik
25	PT Ispat Panca Putera	JL Tridharma, No. 3 Kav D 1 – 9/14-22, Komplek Kawasan Industri Gresik
26	PT Madsumaya Indo Seafood	Komplex Industri Gresik Kav. 8 No. 15-16 Gresik 61121 – Jawa Timur, Indonesia
27	PT Kimika Usaha Prima	Jl. Tri Dharma Blok B-14 Komplek Ruko KIG, Kebomas, Gresik
28	PT Fruit ING Indonesia	Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik
29	PT Petro Bumi Hijau	Jl. KIG Raya Barat
30	Sika Indonesia	Jl. KIG Raya Utara Kav. 3-4, Gresik
31	PT DSI	JL Kawasan Industri Gresik Barat VI Kav. Q16- 17 Gresik Jawa Timur
32	Komotech	Jl. KIG Raya Barat BI G/7, Gresik, Jawa Timur
33	PT Wiharta Karya Agung	Jl Notoprayitno 4, Kebomas, Gresik
34	PT Rollent Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav-G No.11, Kawasan Industri Gresik
35	PT Samator Gas Industri	Jl. Kig Raya Selatan 61121 Roomo, Gresik, Jawa Timur
36	PT Buana Tirta Utama	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik, Indonesia

Sumber: Kawasan Industri Gresik, Tahun 2023

2.1.1.2.8 Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan sumber daya alam yang dilakukan dengan menggali atau menambang dari dalam tanah atau perut bumi. Selain itu, pertambangan juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara (Fahris Suritno et al., 2022). Kawasan pertambangan di Kabupaten Gresik sendiri memiliki luas sebesar 817,25 hektar. Berikut merupakan tabel luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.28 Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik

No	Galian	Luas Usaha Penambangan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Gamping	124,35	2.400.000
2	Dolomit	36,13	528.960
3	Tanah Urug	26,54	270.000
4	Fosfat	4,13	39.600
5	Batu Gamping	8,50	54.720
6	Dolomit	309,13	6.000.000
7	Batu Gamping	2,60	95.625
8	Batu Gamping	5,00	112.500
9	Sirtu	6,94	432.000
10	Sirtu	22,82	72.000
11	Andesit	7,63	102.000
12	Batu Gamping	4,13	10.560

Sumber: ESDM Prov Jatim, Tahun 2022

Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.28, memberikan gambaran rinci mengenai sektor pertambangan. Berdasarkan data tersebut, jenis bahan galian yang paling banyak ditambang adalah dolomit, dengan luas usaha penambangan mencapai 309,13 hektar dan produksi mencapai 6 juta ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa dolomit menjadi salah satu komoditas utama dalam sektor pertambangan di Kabupaten Gresik.

Selain dolomit, batu gamping juga menjadi bahan galian yang cukup signifikan, dengan beberapa lokasi penambangan yang tersebar di wilayah

ini. Produksi batu gamping di Kabupaten Gresik bervariasi, mulai dari 2.400.000 ton per tahun hingga 112.500 ton per tahun, tergantung pada lokasi dan ukuran usaha penambangannya. Sementara itu, jenis bahan galian lain seperti tanah urug, fosfat, sirtu, dan andesit juga memiliki kontribusi penting terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Gresik, meskipun dengan luas usaha dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan dolomit dan batu gamping.

2.1.1.2.9 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kedua-duanya. Konversi penggunaan lahan dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukan lahan tersebut (Saifuddin & Danardono, 2024). Seperti penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologi, dapat dilihat dari lahan yang semula merupakan rawa-rawa, sawah, kawasan penampung air hujan, daerah resapan air hujan dan lainnya, yang diubah menjadi kawasan permukiman, pertokoan, industri dan lain sebagainya dengan tidak mempertimbangkan kemampuan lahannya (Susetyo, 2018). Berikut merupakan tabel luas penggunaan lahan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.29 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Gresik

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Badan Air	2.285,95
Badan Jalan	361,55
Cagar Alam	615,51
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.869,28
Kawasan Hortikultura	11.950,66
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77
Kawasan Pariwisata	99,34
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	82,91
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00
Kawasan Perlindungan Setempat	1.403,45
Kawasan Permukiman Perdesaan	17.514,18
Kawasan Permukiman Perkotaan	15.531,69

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78
Kawasan Peruntukan Industri	10.469,60
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41
Suaka Margasatwa	3.918,88
TOTAL	**125.675,97**

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.29, total luas lahan mencapai 125.675,97 Ha yang terbagi dalam berbagai peruntukan. Kawasan Tanaman Pangan mendominasi dengan luas 38.537,41 Ha, diikuti oleh Kawasan Perikanan Budi Daya seluas 19.824,00 Ha. Area permukiman terbagi menjadi dua kategori yaitu Kawasan Permukiman Perdesaan (17.514,18 Ha) dan Perkotaan (15.531,69 Ha). Kawasan Hortikultura juga memiliki porsi yang cukup besar yakni 11.950,66 Ha, sementara Kawasan Peruntukan Industri mencapai 10.469,60 Ha. Kawasan konservasi dan lingkungan seperti Mangrove (1.869,28 Ha), Cagar Alam (615,51 Ha), dan Kawasan Perlindungan Setempat (1.403,45 Ha) mendapat porsi yang lebih kecil namun tetap signifikan. Adapun kawasan infrastruktur seperti Badan Air (2.285,95 Ha), Badan Jalan (361,55 Ha), dan Pembangkit Tenaga Listrik (82,91 Ha) mengambil porsi yang lebih kecil. Kawasan lainnya meliputi Hutan Produksi Tetap (1.032,77 Ha), Pariwisata (99,34 Ha), PertaHanan dan Keamanan (178,78 Ha), serta Suaka Margasatwa (3.918,88 Ha). Peta penggunaan lahan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.10

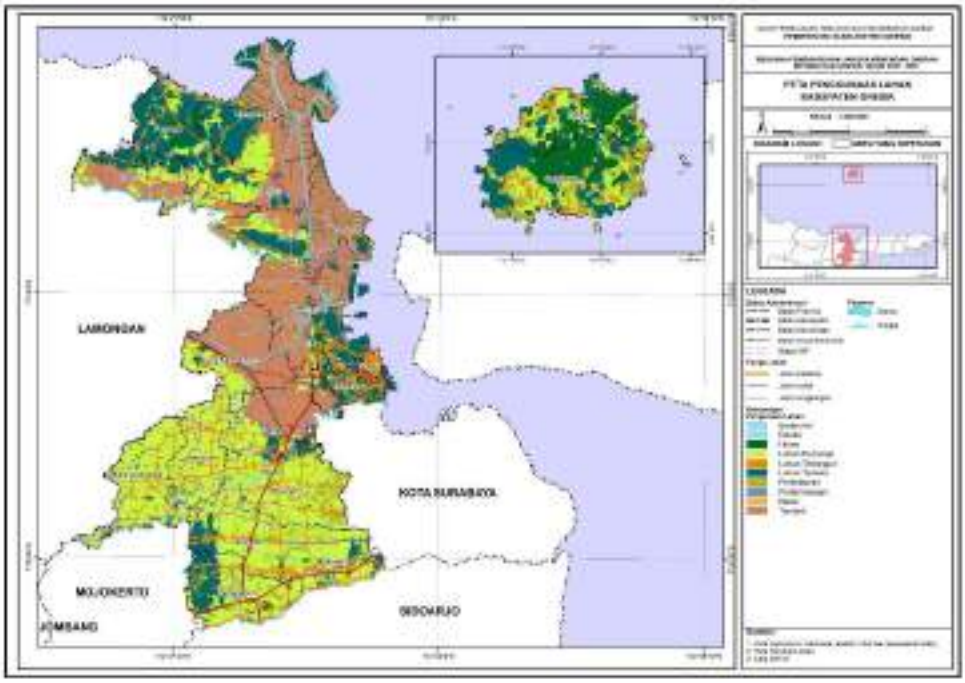

Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sementara daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Di Kabupaten Gresik, penentuan daya dukung lingkungan dilakukan dengan memahami kapasitas lingkungan alam dan sumber daya yang ada untuk mendukung aktivitas manusia. Kabupaten Gresik yang terus berkembang pesat, terutama di sektor industri dan permukiman, membutuhkan analisis daya dukung lingkungan yang mendalam, terutama dalam hal ketersediaan air dan pangan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan permintaan akan sumber daya alam, kebutuhan akan air dan pangan

juga semakin besar, yang membuat analisis kondisi daya dukung pangan menjadi urgensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

a. Daya Dukung Air

Ketahanan daya dukung air di Kabupaten Gresik menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan kehidupan dan perkembangan wilayah ini, terutama mengingat kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi industri. Tabel mengenai daya dukung air pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2029 di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 3.39.

Tabel 2.30 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2029 Kabupaten Gresik

Kecamatan	2024		2029	
	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)
Kecamatan Wringinanom	0,59	6.049,64	491,63	5.558,60
Kecamatan Driyorejo	0,86	5.668,47	1.649,98	4.019,36
Kecamatan Kedamean	-	6.740,93	1.326,54	5.414,39
Kecamatan Menganti	155,87	6.502,57	2.222,98	4.435,47
Kecamatan Cerme	3.043,93	4.395,03	3.095,91	4.343,05
Kecamatan Benjeng	617,95	5.693,37	3.382,14	2.929,18
Kecamatan Balongpanggang	116,13	6.530,61	1.686,13	4.960,61
Kecamatan Duduksampeyan	4.630,26	3.049,67	5.213,71	2.466,23
Kecamatan Kebomas	573,21	2.781,28	689,32	2.665,17
Kecamatan Gresik	14,41	800,69	16,95	798,16
Kecamatan Manyar	5.782,21	4.320,22	5.875,56	4.226,87
Kecamatan Bungah	4.430,22	4.514,50	4.941,27	4.003,45
Kecamatan Sidayu	1.653,75	2.686,08	1.653,75	2.686,08
Kecamatan Dukun	1.835,05	4.772,22	2.429,64	4.177,63
Kecamatan Panceng	166,04	5.985,21	194,84	5.956,41
Kecamatan Ujungpangkah	6.116,96	6.063,42	6.116,96	6.063,42
Kecamatan Sangkapura	61,02	12.884,73	82,58	12.863,17
Kecamatan Tambak	71,51	6.967,37	78,37	6.960,51
Grand Total	**29.269,96**	**96.406,01**	**41.148,23**	**84.527,74**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis daya dukung air pada tahun 2024, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Gresik mengalami kondisi kekurangan daya dukung air, dengan total “belum terlampaui” mencapai 96.406,01 juta meter kubik. Meskipun demikian, beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bungah, Manyar, dan Duduksampeyan, telah melampaui kapasitas daya dukung air, dengan total “terlampaui” mencapai 29.269,96 juta meter kubik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik masih mengalami defisit, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi surplus air.

Proyeksi untuk tahun 2029 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kondisi daya dukung air di Kabupaten Gresik. Total daya dukung air “terlampaui” diperkirakan meningkat menjadi 41.148,23 juta meter kubik, dengan kecamatan seperti Balongpanggang, Benjeng, Bungah, dan Manyar mengalami peningkatan signifikan dalam ketersediaan air. Di sisi lain, total daya dukung air “belum terlampaui” diperkirakan akan menurun menjadi 84.527,74 juta meter kubik, meskipun permintaan air yang semakin tinggi di beberapa kecamatan tetap menjadi tantangan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik, seperti Sidayu, Sangkapura, dan Ujungpangkah, masih menghadapi tantangan terkait daya dukung air yang "belum terlampaui" pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah-daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air masih terbatas, yang dapat berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada ketersediaan air, seperti pertanian dan industri. Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Bungah dan Manyar menunjukkan daya dukung yang "terlampaui" cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan air di wilayah tersebut telah teratasi lebih dari cukup. Namun, kondisi ini juga menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di daerah-daerah dengan surplus, mengingat potensi pengelolaan yang tidak merata dan dampak perubahan iklim yang mungkin mempengaruhi ketersediaan air di masa depan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi daya dukung air, dapat dilihat grafik yang menjelaskan mengenai daya dukung air pada tahun 2029 di Kabupaten Gresik pada Gambar 2.11.

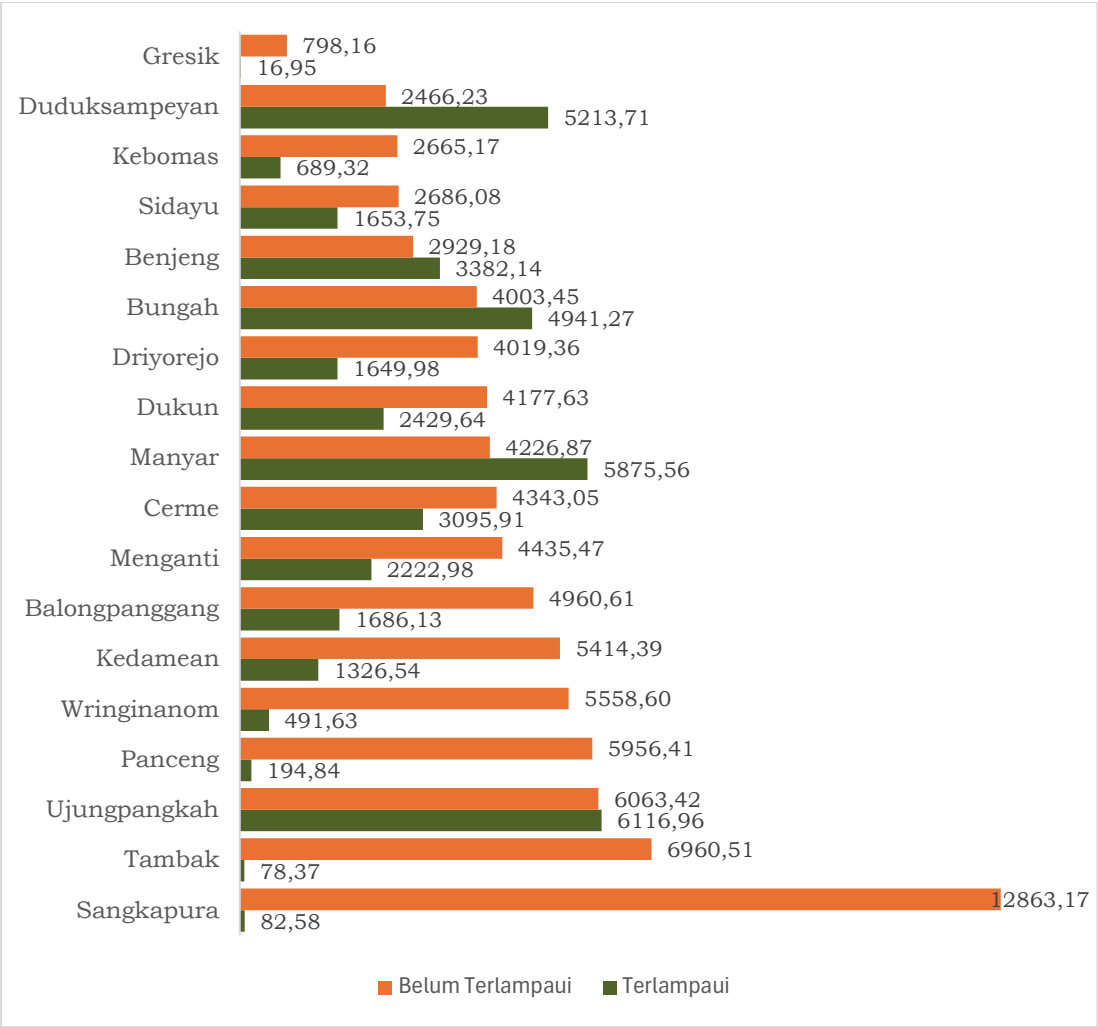

Gambar 2.11 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Gresik Tahun 2029 dalam satuan m^3

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik sangat penting, terutama bagi kecamatan-kecamatan dengan daya dukung air yang terlampaui tinggi, seperti Bungah dan Manyar. Meskipun wilayah-wilayah ini memiliki surplus air, pengelolaan yang efisien dan bijaksana diperlukan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dalam jangka panjang, mengingat potensi ketidakmerataan distribusi dan dampak perubahan iklim. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang tepat terkait pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, guna mengatasi tantangan di masa depan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, serta

menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kebutuhan air bagi masyarakat, pertanian, dan industri.

b. Daya Dukung Pangan

Kebutuhan pangan di Kabupaten Gresik akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, seringkali kebutuhan pangan ini tidak seimbang dengan ketersediaan pangan yang ada, sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam memastikan ketahanan pangan. Oleh karena itu, analisis daya dukung pangan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung stabilitas pangan di wilayah ini. Analisis status daya dukung pangan di Kabupaten Gresik dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di tiap kecamatan, yang dapat menentukan apakah status daya dukung pangan berada dalam kondisi “Belum Terlampaui” atau “Terlampaui.” Kondisi "Terlampaui" terjadi ketika kebutuhan pangan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan yang ada, yang dapat dilihat dari hasil pengurangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan, menunjukkan adanya kekurangan pangan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Gresik, kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Berikut merupakan tabel daya dukung pangan tahun 2024 dan tahun 2029 di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2029 Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg)	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan – Kebutuhan (Kg)	Status
Daya Dukung Pangan Tahun 2024					
1	Kecamatan Wringinanom	10.040.959	6.015.391	4.025.568	Belum Terlampaui
2	Kecamatan Driyorejo	9.351.452	8.628.427	723.025	Belum Terlampaui
3	Kecamatan Kedamean	12.967.046	5.252.527	7.714.518	Belum Terlampaui
4	Kecamatan	10.900.018	10.549.145	350.873	Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg)	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan – Kebutuhan (Kg)	Status
	Menganti				
5	Kecamatan Cerme	7.041.859	6.746.225	295.634	Terlampaui
6	Kecamatan Benjeng	16.955.558	5.442.702	11.512.855	Belum Terlampaui
7	Kecamatan Balongpanggang	19.529.369	4.686.993	14.842.376	Belum Terlampaui
8	Kecamatan Duduksampeyan	6.962.985	4.110.228	2.852.757	Belum Terlampaui
9	Kecamatan Kebomas	465.941	9.278.400	-8.812.459	Terlampaui
10	Kecamatan Gresik	0	6.666.611	-6.666.611	Terlampaui
11	Kecamatan Manyar	1.169.248	9.772.888	-8.603.641	Terlampaui
12	Kecamatan Bungah	4.887.982	5.655.589	-767.606	Terlampaui
13	Kecamatan Sidayu	6.400.092	3.626.638	2.773.454	Belum Terlampaui
14	Kecamatan Dukun	8.488.045	5.458.841	3.029.203	Belum Terlampaui
15	Kecamatan Panceng	8.144.228	4.354.228	3.790.000	Belum Terlampaui
16	Kecamatan Ujungpangkah	9.037.492	4.302.650	4.734.843	Belum Terlampaui
17	Kecamatan Sangkapura	6.739.138	4.386.839	2.352.299	Belum Terlampaui
18	Kecamatan Tambak	3.834.335	2.508.631	1.325.704	Belum Terlampaui
Daya Dukung Pangan Tahum 2029					
1	Kecamatan Wringinanom	9.722.198	6.385.081	3.337.117	Belum Terlampaui
2	Kecamatan Driyorejo	9.054.580	9.158.707	-104.127	Terlampaui
3	Kecamatan Kedamean	12.555.393	5.575.334	6.980.060	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg)	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan – Kebutuhan (Kg)	Status
4	Kecamatan Menganti	9.568.591	11.197.468	-1.628.877	Terlampaui
5	Kecamatan Cerme	6.418.233	7.160.831	-742.598	Terlampaui
6	Kecamatan Benjeng	16.417.286	5.777.196	10.640.089	Belum Terlampaui
7	Kecamatan Balongpanggang	18.909.389	4.975.044	13.934.346	Belum Terlampaui
8	Kecamatan Duduksampeyan	6.741.938	4.362.832	2.379.106	Belum Terlampaui
9	Kecamatan Kebomas	451.149	9.848.626	-9.397.477	Terlampaui
10	Kecamatan Gresik	-	7.076.324	-7.076.324	Terlampaui
11	Kecamatan Manyar	1.132.129	10.373.504	-9.241.376	Terlampaui
12	Kecamatan Bungah	4.732.808	6.003.166	-1.270.358	Terlampaui
13	Kecamatan Sidayu	6.196.914	3.849.522	2.347.393	Belum Terlampaui
14	Kecamatan Dukun	8.218.583	5.794.327	2.424.256	Belum Terlampaui
15	Kecamatan Panceng	7.885.681	4.621.828	3.263.853	Belum Terlampaui
16	Kecamatan Ujungpangkah	8.750.588	4.567.079	4.183.509	Belum Terlampaui
17	Kecamatan Sangkapura	6.525.198	4.656.443	1.868.755	Belum Terlampaui
18	Kecamatan Tambak	3.712.611	2.662.805	1.049.805	Belum Terlampaui

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2024

Status daya dukung pangan dikategorikan menjadi Belum Terlampaui jika ketersediaan pangan masih lebih tinggi dari kebutuhan, dan Terlampaui jika kebutuhan pangan lebih besar dari ketersediaan yang ada.

Pada tahun 2024, beberapa kecamatan seperti Kedamean, Benjeng, dan Balongpanggang berada dalam kondisi Belum Terlampaui, sedangkan kecamatan seperti Kebomas, Gresik, dan Manyar mengalami kondisi Terlampaui. Proyeksi tahun 2029 menunjukkan adanya perubahan dalam keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan di beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan yang sebelumnya berada dalam kondisi Belum Terlampaui, seperti Menganti dan Cerme, diproyeksikan akan mengalami status Terlampaui, sementara kecamatan seperti Kedamean dan Benjeng tetap berada dalam kondisi Belum Terlampaui. Beberapa kecamatan dengan status Terlampaui yang cukup parah, seperti Kebomas dan Gresik, diperkirakan akan mengalami peningkatan kebutuhan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang ada, sehingga memperburuk kondisi ketahanan pangan mereka.

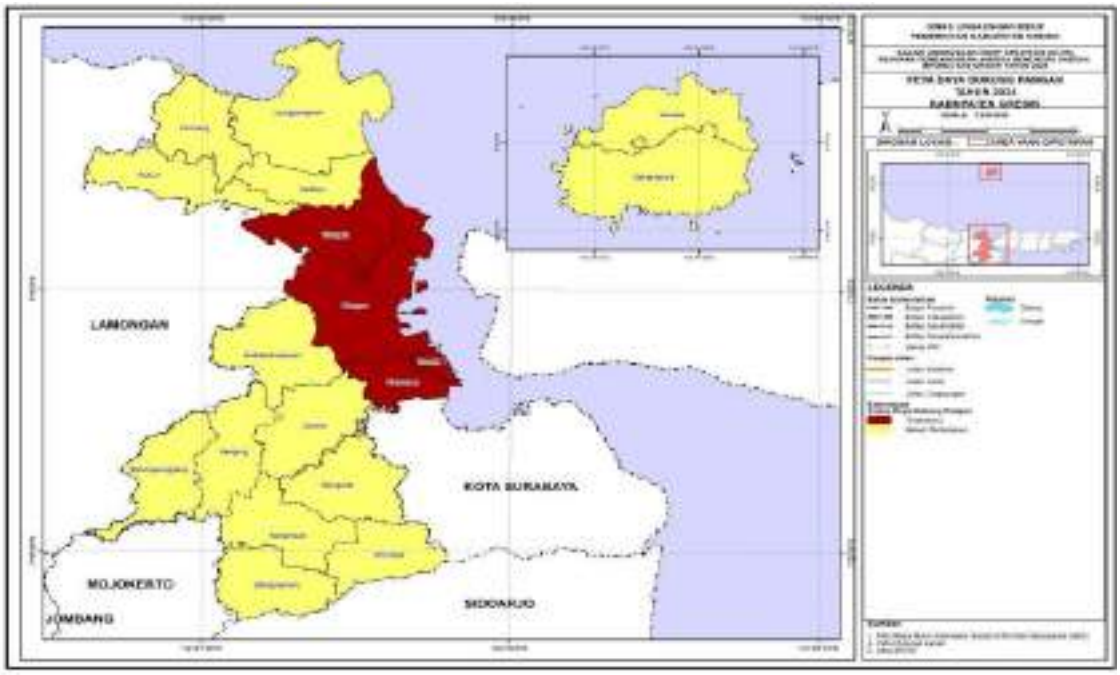

Gambar 2.12 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Secara keseluruhan, tren yang terlihat menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi dan produksi pangan di Kabupaten Gresik. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi yang signifikan,

sementara yang lain menghadapi kesenjangan yang semakin besar antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan distribusi pangan, peningkatan produksi lokal, serta upaya dalam mengatasi kondisi Terlampaui melalui kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berbasis data.

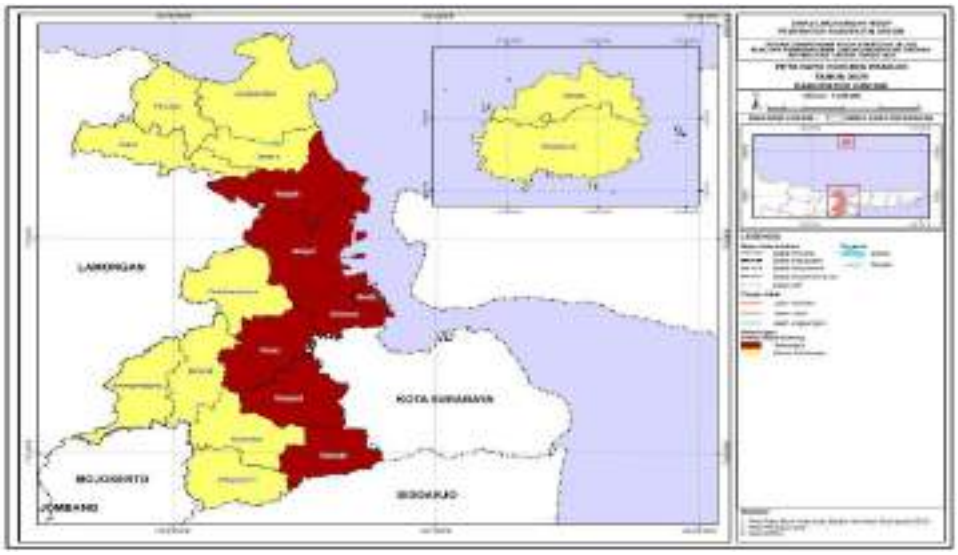

Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik Perkapita

Ketahanan energi di Kabupaten Gresik menjadi aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah distribusi listrik (kWh), yang mengukur jumlah energi listrik yang disalurkan kepada konsumen. Pemakaian tenaga listrik ini mencakup jumlah kWh (kilowatt hours) energi listrik yang digunakan baik secara langsung, seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, maupun secara tidak langsung, seperti untuk sektor komersial dan layanan publik.

Tabel 2.32 Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Listrik yang Terjual (kWh)	2.457.057.631	2.511.110.794	2.644.528.132	2.958.834.111

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Distribusi listrik PLN di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pada 2021, distribusi tercatat sebesar 2.457.057.631 kWh dan meningkat menjadi 2.511.110.794 kWh pada 2022. Pada 2023, distribusi listrik bertumbuh menjadi 2.644.528.132 kWh, dengan kenaikan signifikan pada 2024 mencapai 2.958.834.111 kWh.

b. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang layak dari sumber yang baik. Air minum yang layak adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan air adalah akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 2.33 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak dan Air Siap Minum Perkotaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak	63,38	56,35	53,53	62,15	65,62
Persentase Rumah Tangga Perkotaan yang Memiliki Akses terhadap Air Siap Minum Perkotaan	32,13	26,81	26,70	28,69	31,09

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Data yang digunakan untuk mengukur indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah data sambungan rumah tangga yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Jaringan PDAM adalah jaringan perpipaan yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih dari instalasi pengolahan air ke rumah tangga dan pelanggan lainnya di perkotaan yang tersedia setiap saat dan kualitas air minum yang terjaga. Data tersebut juga kemudian dihitung dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data Bappeda Tahun 2025, rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Gresik tahun 2024 mencapai 65,62%. Artinya bahwa, 7 dari 10 rumah tangga di Provinsi Jawa Timur telah memiliki akses air minum layak secara perpipaan maupun non perpipaan. Sedangkan, akses rumah rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 31,09%.

c. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment* - PoU) di Kabupaten Gresik menggambarkan persentase penduduk yang mengonsumsi pangan kurang dari standar yang dibutuhkan untuk hidup sehat.

Tabel 2.34 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	4,43	4,59	6,60	3,67	2,9

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional pada Tabel 2.34, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,67%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi masalah pangan, tantangan masih ada dalam memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Gresik, dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas atau ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. IKD merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dengan IKD, pemerintah daerah dapat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Setelah diperoleh nilai IKD OPD Kabupaten dan Kota dan IKD OPD Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan perhitungan untuk nilai IRB dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kontribusi nilai IKD OPD Provinsi Jawa Timur terhadap IKD 38 OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.35 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0.57	0.61	0.57	0.65	0.61

Sumber: BPBD Prov Jatim dan BNBP , Tahun 2024

Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks tercatat

sebesar 0,57, meningkat menjadi 0,61 pada tahun 2021, namun kembali menurun ke 0,57 pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana indeks mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 0,65, sebelum kembali turun ke 0,61 pada tahun 2024. Pola naik-turun ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan dan program pembangunan ketahanan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian indeks ketahanan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, antara lain penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, tersedianya infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan risiko bencana. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang berkontribusi pada fluktuasi indeks, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas data dan sistem informasi kebencanaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih tingginya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor pembentuk ketahanan daerah tersebut dan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis serta berbasis data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan ketahanan yang dicapai tidak bersifat sementara, melainkan mampu berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akses rumah tangga terhadap sanitasi aman menunjukkan upaya menjaga

kesehatan masyarakat dan mengurangi pencemaran. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan menilai efektivitas pengelolaan sampah dan pemanfaatan kembali. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mencerminkan kualitas pelayanan kebersihan. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026.

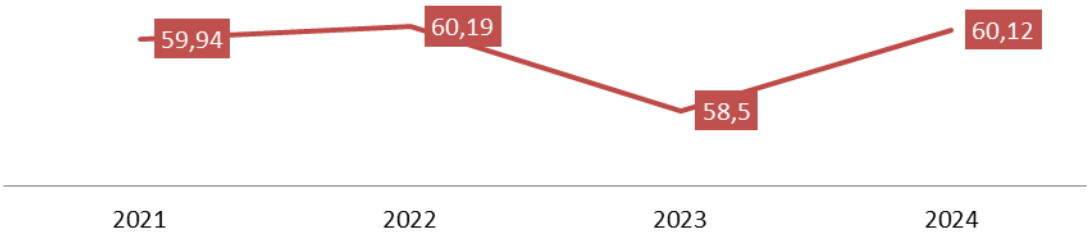

Gambar 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.14 pada tahun 2024, Kabupaten Gresik berhasil mencapai nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 60,12. Nilai IKLH tersebut mencerminkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sempat turun ke angka 58,5. Tren ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengelola kualitas air, udara, dan lahan secara terpadu, sejalan dengan pedoman dan kebijakan nasional dalam perlindungan lingkungan hidup. Tabel 2.36 capaian tiga indikator penilaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Tabel 2.36 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	63.33	48.75	48.24	49.38	50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87.03	80.99	81.03	81.24	82.94
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	72.85	32.94	32.86	32.17	35.3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Pada tahun 2020 terdapat perbedaan metode perhitungan sehingga terjadi perubahan nilai yang cukup signifikan dengan tahun 2021 – 2024 yang menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Selama periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika dalam kualitas lingkungan hidup berdasarkan empat indikator utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar 32,17 menunjukkan bahwa kondisi kualitas lahan masih relatif rendah dan menghadapi tekanan yang cukup besar. Nilai tersebut menggambarkan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan, degradasi tanah akibat intensitas pemanfaatan yang tinggi, serta keterbatasan upaya konservasi lahan. Kondisi IKL yang masih rendah ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan lahan dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan ruang untuk kegiatan ekonomi, serta fungsi ekologis. Oleh karena itu, capaian IKL 32,17 menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, meningkatkan program rehabilitasi dan konservasi, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami sedikit fluktuasi dengan tren peningkatan dari 48,75 pada 2021 menjadi 50,00 pada 2024, yang

mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air meskipun masih di bawah kategori baik. IKU secara konsisten meningkat dari 80,99 menjadi 82,94, menandakan bahwa kualitas udara di Gresik terus membaik dan berada pada level sangat baik. Sementara itu, IKL sempat mengalami penurunan dari 32,94 (2021) ke 32,17 (2023), namun berhasil naik signifikan menjadi 35,30 pada 2024, yang menunjukkan dampak positif dari upaya rehabilitasi lahan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan capaian IKLH yaitu melalui penyusunan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon, dan mewajibkan pelaku usaha dan/atau dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau.

2.1.1.5.1 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Fasilitas tersebut terhubung ke *septic tank* yang disedot secara berkala. Akses aman berarti rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas yang dilengkapi kloset berleher angsa, serta bagian bawah menggunakan tangki septik yang disedot minimal sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau terhubung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini digunakan untuk mengukur akses sanitasi layak dan aman, serta persentase praktik buang air besar sembarangan, yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik terpenuhi, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan pencemaran air akibat limbah domestik. Perhitungan rumah tangga sanitasi aman didasarkan pada jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambahkan dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja dibagi dengan jumlah rumah tangga keseluruhan di Kabupaten

Gresik. Penurunan capaian akses sanitasi aman pada tahun 2022 menjadi 0,99% disebabkan adanya *double counting* dari tahun 2020-2021.

Tabel 2.37 Rumah Tangga Sanitasi Aman (%) Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Sanitasi Aman (%)	1,51	1,51	0,99	1,71	1,72

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian akses sanitasi aman Kabupaten Gresik berdasarkan Tabel 2.37 meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan akses sanitasi, capaian sanitasi aman masih belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman, keterbatasan infrastruktur dan armada penyedotan serta layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal belum berjalan optimal. Saat ini hanya terdapat 1 unit IPLT dengan kapasitas 45 m^3/hari, yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pengolahan di Kabupaten Gresik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya pembangunan SPALD-T melalui berbagai sumber pendanaan, adanya kolaborasi dengan pihak swasta salah satunya dengan pengusaha sedot tinja, serta kampanye sanitasi aman dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), penyuluhan di tingkat desa, serta kerja sama dengan kader kesehatan dan sekolah.

2.1.1.5.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) berdasarkan RPJPD Kabupaten Gresik. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Tahun 2023 dan 2024 berturut – turut sebesar 9,17% dan 24,44%. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan *stakeholder*

terkait dalam melakukan pengolahan sampah melalui bank sampah, komposting skala kecil atau RT/RW, pusat olah organik, rumah kompos, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), daur ulang produk kreatif dan pengepul/pelapak.

Kenaikan capaian ini tergolong cukup tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah di Gresik sudah ditangani secara lebih berkelanjutan sehingga mampu menekan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan capaian tersebut, risiko pencemaran lingkungan akibat sampah dapat ditekan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi melalui praktik *reduce, reuse, recycle* (3R). Namun demikian, masih terdapat sampah yang belum tertangani melalui fasilitas pengolahan. Bagian sampah ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan dengan timbulan sampah tinggi serta wilayah perdesaan yang belum sepenuhnya memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah.

Capaian 24,98% di tahun 2024 dapat dijadikan tolok ukur positif untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dukungan infrastruktur, serta peran pemerintah daerah dan sektor swasta mulai menunjukkan hasil yang nyata. Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan konsistensi capaian dan mengurangi disparitas pengelolaan antarwilayah, agar pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik semakin merata dan berkelanjutan.

Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat pada sektor persampahan melalui kegiatan PROKLIM (Program Kampung Iklim), GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah), adanya inovasi program berbasis komunitas seperti bank sampah dan TPS3R, dukungan regulasi daerah, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah. Sementara itu, faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah, rendahnya

kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kelurahan, belum meratanya layanan pengangkutan sampah, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan.

2.1.1.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Proprosi rumah tangga dengan layanan penuh pengolahan samapah dihitung berdasarkan proporsi jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah (JRTLA) terhadap jumlah total rumah tangga seluruhnya (JRTS) dikalikan dengan 100%.

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 58 %. Artinya, dari setiap 100 rumah tangga, hanya sekitar 58 rumah tangga yang telah terlayani secara rutin oleh sistem pengumpulan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak ketiga, maupun pengelola lingkungan setempat. Sementara itu, 42 % rumah tangga lainnya masih belum memperoleh layanan penuh, sehingga berpotensi membuang sampah secara mandiri, membakar, atau bahkan membuang ke lingkungan sekitar. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pengumpulan sampah belum menjangkau seluruh masyarakat, meskipun lebih dari setengah rumah tangga telah terlayani. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal utama:

1. Lingkungan – masih adanya potensi pencemaran akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.

2. Kesehatan masyarakat – rumah tangga tanpa layanan penuh berisiko lebih tinggi terhadap masalah sanitasi dan penyakit berbasis lingkungan.

Dengan capaian 58 %, posisi ini dapat dijadikan sebagai *baseline* penting untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan di Gresik. Perlu adanya strategi untuk memperluas cakupan layanan, antara lain:

- Perluasan jaringan pengumpulan ke kawasan perdesaan dan permukiman padat yang belum terlayani.
- Peningkatan kapasitas armada dan SDM persampahan agar layanan lebih merata.
- Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (misalnya bank sampah dan pengelola lingkungan) untuk mendukung layanan yang berkelanjutan.
- Edukasi dan partisipasi warga dalam membayar retribusi atau biaya layanan sampah, agar sistem bisa berjalan konsisten.

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas atau ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. IKD merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dengan IKD, pemerintah daerah dapat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Setelah diperoleh nilai IKD OPD Kabupaten dan Kota dan IKD OPD Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan perhitungan untuk nilai IRB dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kontribusi nilai IKD OPD Provinsi Jawa Timur terhadap IKD 38 OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.38 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,57	0,61	0,57	0,65	0,61

Sumber: BPBD Prov. Jatim dan BNBP , Tahun 2024

Tabel 2.38 menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Daerah tercatat sebesar 99.29, menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 96.50, yang diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 menjadi 94.89. Pada tahun 2023, Indeks Ketahanan Daerah mencapai angka 91.42, yang menandakan penurunan signifikan dalam ketahanan daerah. Data ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat ketahanan daerah untuk mencapai kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1 Resiliensi Terhadap Bencana

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Gresik merujuk pada kemampuan masyarakat dan daerah untuk beradaptasi serta bertahan hidup di tengah ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perubahan iklim yang semakin meningkat. Tingkat resiliensi yang tinggi sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim, yang menciptakan kondisi yang semakin ekstrem, dapat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan tsunami, yang pada gilirannya berpotensi mengancam ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan, serta merusak fungsi ekosistem yang esensial bagi kehidupan. Informasi jumlah kejadian bencana di Kabupaten Gresik ditunjukkan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2019 - 2024

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	48	53	62	83	90	22
Tanah Longsor	-	3	7	7	19	1
Puting Beliung	-	4	34	25	27	-

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kekeringan	1	-	53	7	70	6
Cuaca Ekstrem	6	-	-	3	3	22
Gempa Bumi	-	-	22	-	-	1
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	2
Karhutla	-	-	-	-	-	2
Total	**54**	**60**	**156**	**172**	**209**	**56**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan pada akhir periode berdasarkan Tabel 2.39 Pada tahun 2020, nilai indeks berada pada angka 99,29, kemudian mengalami penurunan menjadi 96,50 pada tahun 2021 dan 94,89 pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek pengurangan risiko, yang dapat mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, mitigasi bencana, serta penguatan sistem peringatan dini.

Perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan indeks menurun menjadi 91,42 nilai terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, tren positif ini tidak berkelanjutan. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam Indeks Risiko Bencana hingga mencapai angka 105,07, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Eskalasi tajam ini mencerminkan meningkatnya potensi kerugian akibat bencana, yang dapat disebabkan oleh bertambahnya eksposur wilayah, meningkatnya tingkat kerentanan, atau berkurangnya efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan sebelumnya.

Situasi tersebut menegaskan perlunya penguatan sistem pengelolaan risiko bencana secara terintegrasi dan adaptif. Upaya ini mencakup koordinasi lintas sektor, integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta pelibatan masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara berkelanjutan.

Tabel 2.40 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	99,29	96,50	94,89	91,42	105,07

Sumber: BPBD Prov Jatim dan BNBP , Tahun 2024

A. Kawasan Risiko Bencana Banjir

Banjir adalah suatu kondisi di mana air menggenangi area daratan yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan, meluapnya Sungai, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Banjir biasanya dapat diukur dan diidentifikasi berdasarkan ketinggian air dan lama waktu genangan. Menurut data kejadian banjir dari tahun 2019 – 2023, banjir di Kabupaten Gresik umumnya disebabkan oleh meluapnya dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Muara Sungai Bengawan Solo terletak di Desa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah. Banjir yang disebabkan oleh Sungai Bengawan Solo terjadi karena tingginya intensitas hujan yang mencapai 100 mm dengan durasi curah hujan sekitar 8 jam per hari. Selain itu, Kabupaten Gresik juga mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sungai ini mengalir dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan di bagian hulu hingga perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya di bagian hilir. Kali Lamong memiliki panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 50- 60 meter.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong memiliki luas 720 km^2, dan debit airnya pada musim hujan bisa mencapai 460,282 m^3 per detik, yang sering kali menyebabkan banjir. Banjir dari Kali Lamong menjadi bencana yang kerap terjadi di beberapa kecamatan, seperti Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kedamean. DAS Kali Lamong merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya air Sungai Bengawan Solo, yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Sebelum tahun 1980-an, kondisi Kali Lamong masih dalam keadaan normal. Namun, fungsi sungai ini berubah seiring dengan perkembangan penduduk dan industri, yang ditandai dengan banyaknya bangunan di tepi sungai. Banjir Kali Lamong menyebabkan

kerugian seperti lahan pertanian yang gagal panen, tambak yang rusak, dan luapan air yang merendam jalan arteri.

Tabel 2.41 Luas Kawasan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Wringinanom	2527,23	-	-	2527,23
Driyorejo	1853,11	186,70	-	2039,81
Kedamean	2364,08	350,12	3,98	2718,17
Menganti	2968,71	632,87	1,94	3603,52
Cerme	4034,30	2241,73	510,71	6786,74
Benjeng	2232,74	1695,72	468,86	4397,31
Balongpanggang	2875,93	1754,95	322,99	4953,87
Duduksampeyan	745,56	-	-	745,56
Kebomas	1862,14	590,11	36,48	2488,73
Manyar	1128,21	85,50	29,98	1243,69
Bungah	7870,71	301,04	124,26	8296,02
Sidayu	1985,08	522,59	1,21	2508,87
Dukun	1902,94	535,19	382,32	2820,44
Panceng	21,00	-	-	21,00
Ujungpangkah	4512,36	2238,78	2077,34	8828,49
Total	**38884,09**	**11135,30**	**3960,06**	**53979,46**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.41 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik rentan terhadap banjir meskipun tingkat risikonya rendah, sehingga perlu ada antisipasi, terutama di daerah dengan risiko sedang dan tinggi.

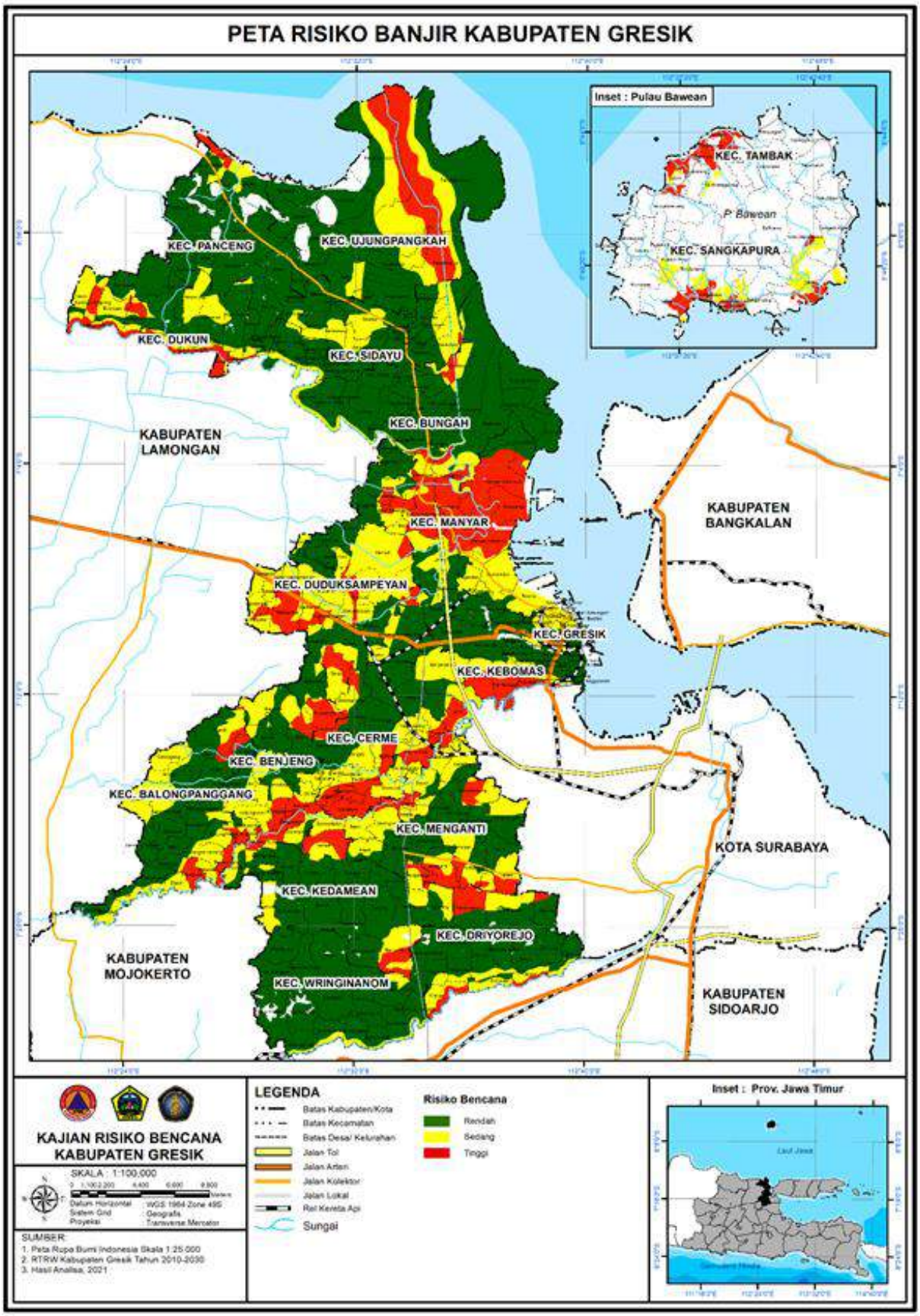

Gambar 2.15 Peta Resiko Bencana Banjir

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

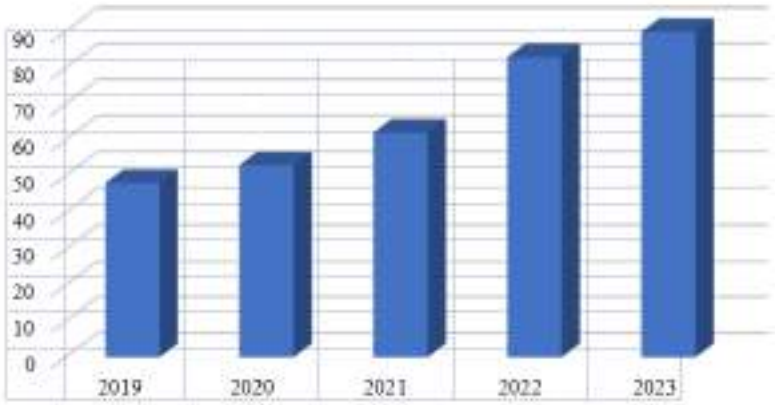

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 2.16, terjadi peningkatan jumlah kejadian banjir setiap tahunnya di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang paling sering mengalami banjir dalam sejarahnya adalah Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Menganti. Berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik pada tahun 2023, tercatat sebanyak 90 kejadian bencana, dengan Kecamatan Benjeng menjadi yang paling banyak mengalami kejadian bencana, yaitu sebanyak 17 kali. Peningkatan frekuensi bencana ini menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang lebih efektif, terutama di kecamatan-kecamatan yang sering terdampak bencana.

B. Kawasan Risiko Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penilaian terhadap ancaman bencana kekeringan dilakukan dengan mengidentifikasi formasi geologi (batuan), memberikan skor, dan mengklasifikasikannya dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Di Kabupaten Gresik, kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang panjang serta penurunan curah hujan. Dampak dari kekeringan ini di beberapa kecamatan meliputi kegagalan panen. Kekeringan biasanya berlangsung sekitar tiga bulan, di

mana warga mengandalkan air dari embung untuk mandi dan mencuci pakaian, sementara untuk kebutuhan air konsumsi, mereka terpaksa membelinya dengan harga yang relatif tinggi.

Tabel 2.42 Luas Kawasan Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Kecamatan Wringinanom	3950,02	2256,28		6206,30
Kecamatan Driyorejo	4883,92	559,00	5,11	5448,03
Kecamatan Kedamean	2398,53	3055,51	1239,20	6693,23
Kecamatan Menganti	6359,38	588,60	6,31	6954,29
Kecamatan Cerme	4084,73	2149,70	905,76	7140,19
Kecamatan Benjeng	2023,02	3866,21	341,32	6230,54
Kecamatan Balongpanggang	1422,85	3151,69	1870,59	6445,14
Kecamatan Duduksampeyan	2131,11	5568,12		7699,23
Kecamatan Kebomas	3365,06	64,23	0,13	3429,42
Kecamatan Gresik	660,55	46,54		707,09
Kecamatan Manyar	8484,31	1950,60		10434,90
Kecamatan Bungah	3938,71	4251,04	342,82	8532,57
Kecamatan Sidayu	1989,29	2074,77	388,29	4452,34
Kecamatan Dukun	2674,04	3037,81	653,10	6364,96
Kecamatan Panceng	3730,47	1767,25	679,64	6177,35
Kecamatan Ujungpangkah	2964,81	9395,18		12359,99
Kecamatan Sangkapura	9397,44	3277,49		12674,93
Kecamatan Tambak	3326,38	3941,30		7267,69
Total	**67784,63**	**51001,32**	**6432,25**	**125218,21**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Secara keseluruhan, total luas area yang berisiko kekeringan adalah 125.218,21, menjadikannya jenis bencana dengan cakupan risiko paling luas di Kabupaten Gresik. Kekeringan menjadi bencana utama yang mengancam daerah, dan perlu adanya langkah- langkah mitigasi yang lebih komprehensif terutama pada risiko kekeringan tinggi.

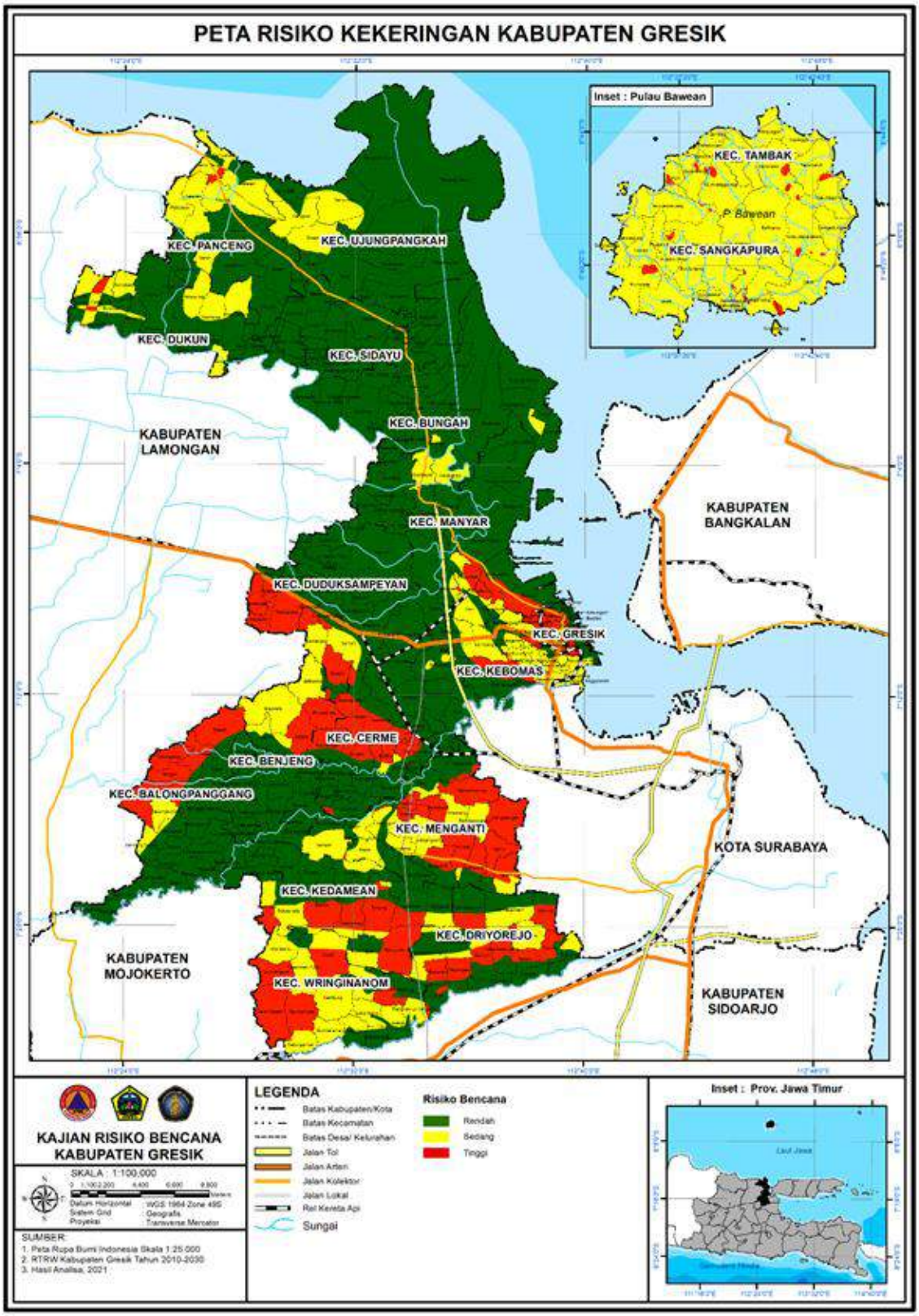

Gambar 2.17 Peta Resiko Bencana Kekeringan

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

C. Kawasan Risiko Bencana Cuaca ekstrim

Cuaca ekstrem adalah kondisi cuaca di mana unsur-unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas tertentu dan umumnya berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Dalam menilai ancaman cuaca ekstrem di Kabupaten Gresik, digunakan indikator seperti curah hujan, kecepatan angin, serta data historis kejadian bencana. Hasil overlay dari parameter ancaman cuaca ekstrem ini menggunakan ketiga indikator tersebut. Cuaca ekstrem yang sering terjadi di Kabupaten Gresik adalah angin kencang atau angin puting beliung. Beberapa kecamatan yang terdampak angin kencang antara lain Kecamatan Balongpanggang, Kebomas, Cerme, Bungah, Kedamean, Wringinanom, Manyar, Driyorejo, Gresik, Menganti, Sangkapura, Tambak, Benjeng, Dukun, dan Sidayu. Bencana angin kencang terjadi setiap tahun namun dampaknya terhadap masyarakat cenderung tidak signifikan. Kerugian utama akibat bencana cuaca ekstrem ini adalah banyaknya nelayan yang tidak dapat melaut, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka. Cuaca ekstrem juga melanda beberapa desa di wilayah pesisir Pulau Bawean, seperti Desa Gunungteguh dan Desa Kota Kusuma di Kecamatan Sangkapura, serta Desa Tanjungori dan Desa Teluk Jatiwadang di Kecamatan Tambak. Bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Gresik ini biasanya terjadi saat peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara.

Tabel 2. 43 Luas Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Total
Wringinanom	6206,30		6206,30
Driyorejo	5448,03		5448,03
Kedamean	6664,97	28,26	6693,23
Menganti	6954,29		6954,29
Cerme	7140,24		7140,24
Benjeng	6075,74	155,09	6230,82
Balongpanggang	5279,76	1165,38	6445,14
Duduksampeyan	7699,23		7699,23
Kebomas	3429,42		3429,42

Kecamatan	Rendah	Sedang	Total
Gresik	707,09		707,09
Manyar	10435,99		10435,99
Bungah	8532,57		8532,57
Sidayu	4452,34		4452,34
Dukun	5718,00	646,96	6364,96
Panceng	6177,35		6177,35
Ujungpangkah	12359,99		12359,99
Sangkapura	12674,93		12674,93
Tambak	7267,69		7267,69
Total	**123223,93**	**1995,69**	**125219,62**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Total keseluruhan luas area yang berisiko terhadap cuaca ekstrem adalah 125.219,62 Ha. Data ini menunjukkan bahwa walaupun risiko cuaca ekstrem tersebar luas, sebagian besar kecamatan hanya memiliki risiko rendah. Namun, kecamatan seperti Tambak dan Ujungpangkah tetap memerlukan perhatian khusus karena memiliki luas risiko yang lebih besar.

Data mengenai jumlah kejadian bencana cuaca ekstrem dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, terjadi enam kejadian bencana cuaca ekstrem, namun tidak ada kejadian yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah kejadian kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan tiga kejadian. Meskipun terdapat peningkatan setelah dua tahun tanpa kejadian, angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa bencana cuaca ekstrem mungkin tidak terjadi secara konsisten, tetapi tetap memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi dampaknya di masa depan. Meskipun bencana angin kencang yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Gresik tidak menyebabkan korban jiwa secara signifikan, dampak yang ditimbulkan tetap dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dampak yang mungkin yang terjadi yaitu kerusakan infrastruktur seperti atap rumah dan fasilitas umum,

penurunan hasil panen dan pendapatan, gangguan layanan publik, risiko kesehatan, menganggu keseimbangan lingkungan. Di samping itu, terjadinya angin kencang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan mendorong masyarakat untuk lebih siap menghadapi situasi darurat.

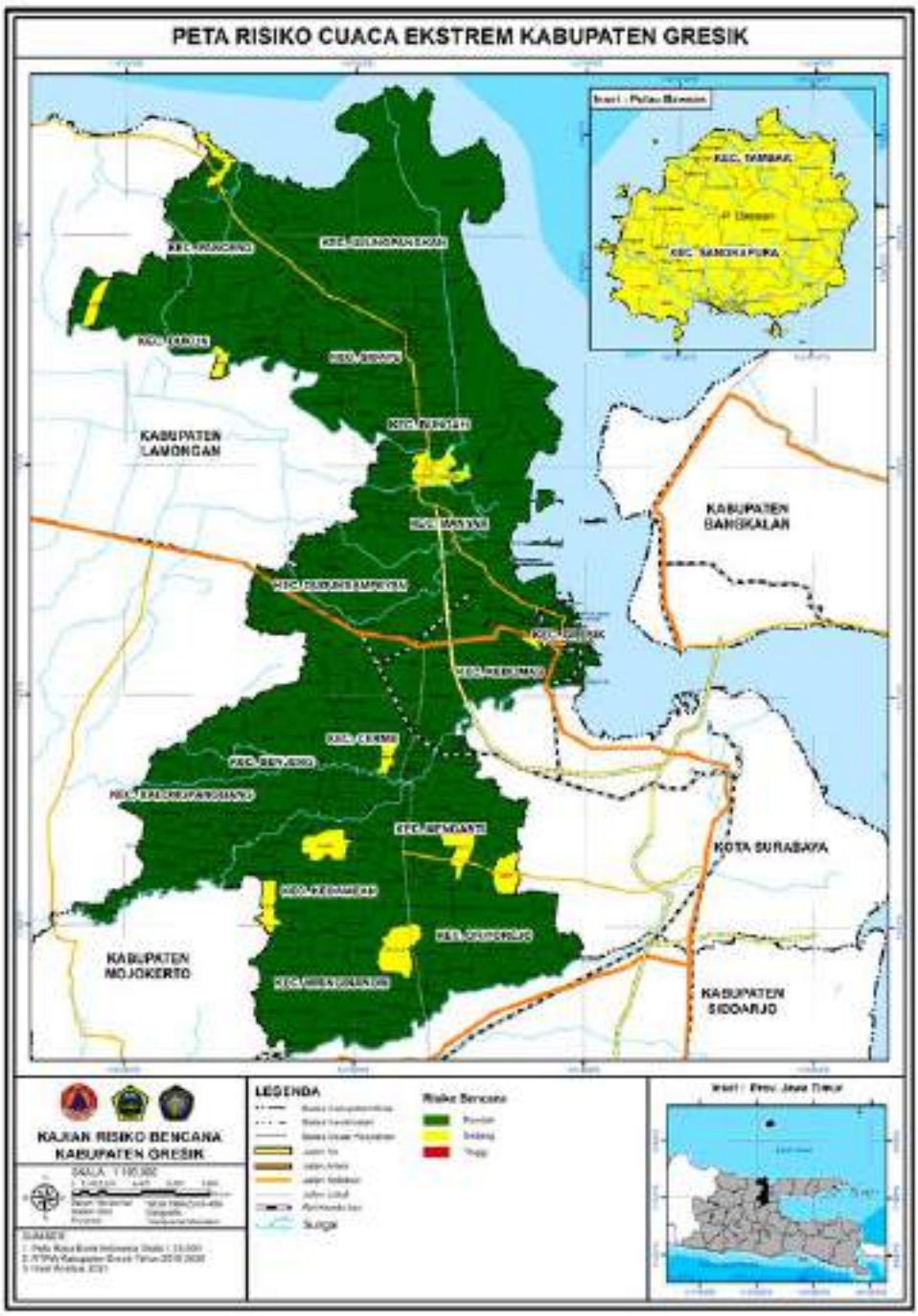

Gambar 2.18 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

D. Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor

Provinsi Jawa Timur memiliki 50 kecamatan yang memiliki potensi tinggi terhadap risiko bencana tanah longsor, dan dari jumlah tersebut, 3 kecamatan berada di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Pulau Bawehan. Hingga tahun 2021, bencana tanah longsor di wilayah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh tanah longsor di Kabupaten Gresik adalah terputusnya akses dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat jalan yang tertimbun oleh material longsoran.

Tabel 2.44 Luas Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Wringinanom	5167,86	1038,44		6206,30
Driyorejo	5242,04	205,99		5448,03
Kedamean	5270,92	1422,31		6693,23
Menganti	6948,95	5,34		6954,29
Cerme	6752,82	387,35		7140,17
Benjeng	6002,50	227,91		6230,41
Balongpanggang	4259,22	1657,13	528,79	6445,14
Duduksampeyan	7568,00	131,23		7699,23
Kebomas	3415,26	14,16		3429,42
Gresik	671,01	36,08		707,09
Manyar	10434,36			10434,36
Bungah	8532,57			8532,57
Sidayu	4452,34			4452,34
Dukun	5718,00	646,96		6364,96
Panceng	6177,35			6177,35
Ujungpangkah	12359,99			12359,99
Sangkapura	12100,08	569,36	5,49	12674,93
Tambak	3615,54	3393,30	395,02	7403,86
Total	**114688,82**	**9735,55**	**929,30**	**125353,67**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Total luas wilayah yang berisiko tanah longsor adalah 114.688,82. Meskipun sebagian besar area berisiko rendah, kecamatan seperti Tambak yang memiliki risiko sedang dan tinggi tetap harus menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana.

Kejadian bencana tanah longsor paling banyak terjadi pada tahun 2023, dengan total 19 kejadian. Di antara kecamatan yang terdampak, Kecamatan Sangkapura mencatat jumlah kejadian terbanyak, yaitu sebanyak 9 kejadian. Selain Sangkapura, kecamatan lain yang juga terdampak adalah Diyorejo, Manyar, Sidayu, dan Tambak. Peningkatan jumlah kejadian ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana tanah longsor di daerah tersebut.

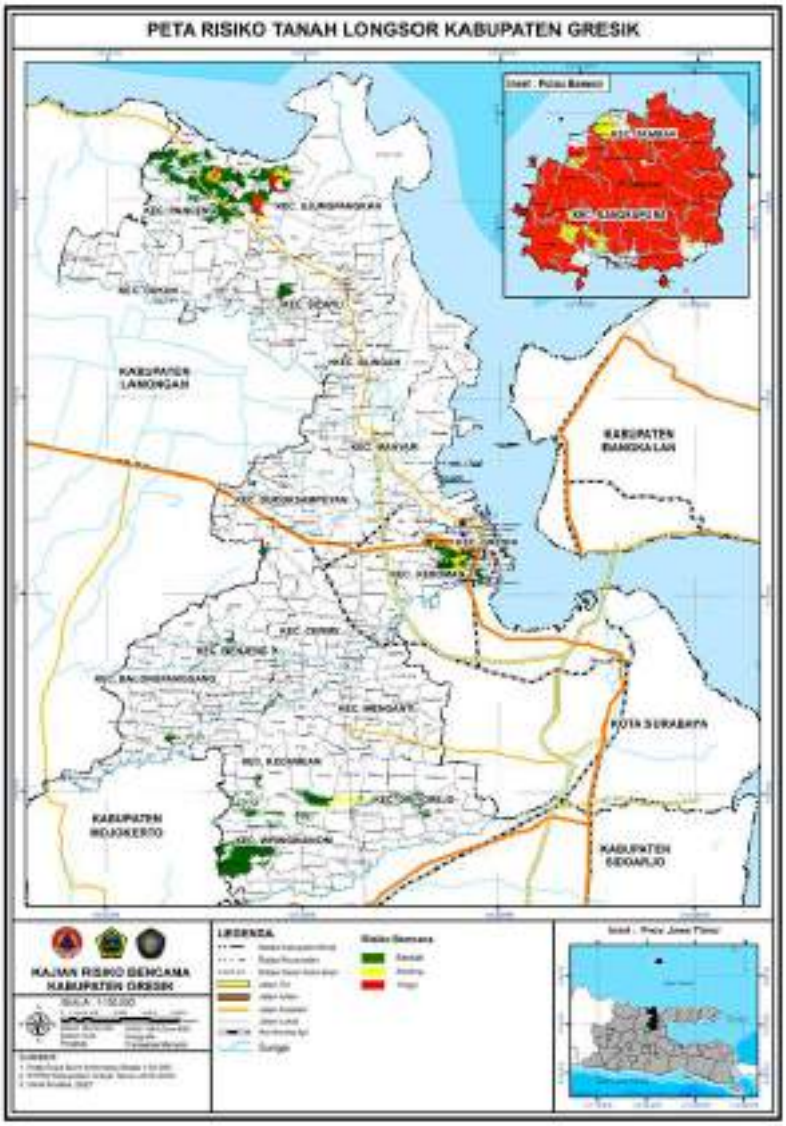

Gambar 2.19 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

E. Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tinggi gelombang dan arus gelombang merupakan faktor utama penyebab bencana abrasi dan gelombang ekstrem di Kabupaten Gresik. Semua wilayah pesisir pantai di Kabupaten Gresik memiliki indeks risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkatan mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Wilayah pesisir ini membentang di sepanjang Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean.

Tabel 2.45 Luas Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Kebomas	2,25		38,60	40,85
Gresik	1,96		51,72	53,68
Manyar	134,66		8,77	143,43
Bungah	152,53	2,32	36,53	191,38
Sidayu	8,68			8,68
Panceng	9,70	64,57		74,27
Ujungpangkah	392,48	104,48		496,97
Sangkapura	397,80	11,95	172,95	582,70
Tambak	188,94	57,61	184,53	431,08
Total	**1288,99**	**240,93**	**493,10**	**2023,03**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombanmg ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

Gambar 2.20 Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

2.1.1.7.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan kebijakan pembangunan yang memuat tentang ketentuan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sangat erat kaitannya dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Melalui perhitungan intensitas emisi GRK dapat diketahui besarnya jumlah emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu wilayah. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu wilayah pada tahun yang sama (diasumsikan dengan data PDRB). Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Melalui implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebagaimana ditetapkan pasca pertemuan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada COP (*Conference of The Parties*) ke 21 di Paris tanggal 30 November - 11 Desember 2015 dari 26% dengan usaha sendiri pada Tahun 2020 menjadi 29% dengan usaha sendiri pada Tahun 2030. Sedangkan berdasarkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), Target penurunan emisi GRK dengan upaya sendiri (unconditional) ditingkatkan dari 29% menjadi 31,89%, sementara target dengan dukungan internasional (conditional) meningkat dari 41% menjadi 43,20% pada tahun 2030. Sebagai dukungan terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK secara nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik secara berkala melaporkan aksi pembangunan rendah karbon melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Indonesia (AKSARA)

Penurunan tingkat emisi Gas GRK di Gresik menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaporan kegiatan pembangunan rendah karbon melalui aplikasi Aksara, baik oleh pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Pelaporan dan

pemantauan kegiatan pembangunan rendah karbon pada aplikasi Aksara dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, dan diharapkan dapat meningkatkan capaian penurunan emisi GRK di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan capaian penurunan emisi GRK tahunan yang menunjukkan fluktuasi, capaian penurunan emisi GRK kumulatif di Provinsi Gresik hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2024, capaian penurunan emisi kumulatif tercatat sebesar 13.813,27 ton CO2eq.

Tabel 2.46 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Gresik Tahum 2020-2024

Indikator	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Air Limbah	150,48	1.593,09	73,58	-	-	1.817,16
Blue Carbon	1.123,35	410,87	30,36	271,98	6.846,36	8.682,92
Energi	-	-	412	-	-	412
Kehutanan dan Lahan Gambut	19,38	-	28,63	-	-	48,01
Persampahan	-	349,10	931,49	4.486,07	-	5.766,67
Pertanian	2.691,75	6.670,49	6,61	4.155,16	6.966,91	20.490,92
Transportasi	-	2.322,75	0,08	-	-	2.322,83
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.984,96	11.346,30	1.482,75	8.913,22	13.813,27	39.540,50

Sumber: Bappenas, Tahun 2024

Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, baik yang mendukung (faktor pendorong) maupun yang menghambat (faktor penghambat). Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi kunci untuk merancang strategi yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di tingkat daerah.

Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat mendukung maupun

menghambat. Dari sisi pendorong, terdapat komitmen pemerintah daerah yang tercermin dalam integrasi isu lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJPD dan RPJMD). Dukungan dari sektor industri juga menjadi kekuatan signifikan, mengingat Gresik merupakan kawasan industri yang berpeluang besar dalam penerapan konsep industri hijau, efisiensi energi, serta pemanfaatan energi terbarukan, seiring dengan tuntutan sertifikasi lingkungan dan standar keberlanjutan global. Selain itu, partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dalam berbagai inisiatif seperti bank sampah, urban farming, dan program penghijauan menunjukkan tumbuhnya kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Ketersediaan teknologi hijau dan inovasi, termasuk pemanfaatan PLTS atap, biomassa, dan transportasi ramah lingkungan, semakin memperkuat kapasitas mitigasi. Di sisi lain, akses pendanaan dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, CSR, serta sinkronisasi dengan program nasional memberikan dukungan kelembagaan yang penting.

Namun demikian, pelaksanaan mitigasi di Gresik juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk sektor lingkungan menyebabkan aksi mitigasi seringkali tidak menjadi prioritas. Kesadaran masyarakat yang masih rendah serta gaya hidup boros energi turut menjadi kendala dalam mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Dominasi industri padat energi dan emisi juga memberikan tekanan besar terhadap lingkungan, sementara penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri belum optimal. Hambatan teknis lainnya seperti tingginya biaya investasi awal dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan turut memperlambat implementasi teknologi hijau. Di samping itu, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta belum konsistennya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan masih adanya celah dalam pengendalian emisi dan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan, disertai dengan penguatan kebijakan dan

insentif untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon di Kabupaten Gresik.

2.1.1.7.3 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu global yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas penggunaan bahan dan perubahan fungsi lahan (deforestasi). Peningkatan konsentrasi beberapa jenis gas rumah kaca menyebabkan penyerapan energi matahari dan refleksi panas matahari menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan suhu udara di Bumi dan memicu perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim terhadap aspek kelautan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan meningkatnya suhu udara dan terjadinya pemanasan global, air laut mengalami pemuaian dan salju abadi di daerah Arktik dan Antarktik mulai mencair. Dampak tidak langsung ini menambah volume air di lautan dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut.

Gresik adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, di sebelah barat laut Kota Surabaya. Kabupaten ini memiliki posisi strategis dan potensi untuk berkembang dalam konteks Surabaya Metropolitan Area. Pemerintah terus berupaya untuk meratakan pembangunan industri dengan mempercepat pengembangan kawasan industri, termasuk 27 kawasan industri yang direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu kawasan tersebut adalah JIIPE, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan luas total 3.000 hektar yang mencakup kawasan industri, pelabuhan, dan area residensial. Pemerintah mengumumkan bahwa KEK Gresik telah resmi beroperasi dan pembangunan tahap III diperkirakan akan selesai pada tahun 2036. Dengan adanya Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion, dan pembangunan kawasan industri baru JIIPE, serta pertumbuhan industri di luar kawasan, nilai investasi di sektor industri pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun sempat mengalami penurunan

akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Nilai investasi ini ditargetkan akan terus tumbuh hingga 7,23% pada tahun 2032 seiring dengan meningkatnya aktivitas industri di Kabupaten Gresik. Namun, industrialisasi di Kabupaten Gresik juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di wilayah tersebut, terutama karena adanya industri besar yang menghasilkan emisi tinggi, seperti industri semen, kimia, kertas, aspal, dan baja. Cerobong asap dari industri berkontribusi sebagai sumber polusi udara sekitar 10-15%.

Di wilayah perkotaan Gresik, yang mencakup Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Duduksampeyan, terjadi perubahan tata guna lahan yang signifikan, terutama dari lahan non-terbangun menjadi lahan untuk perumahan dan industri. Wilayah ini menghasilkan emisi gas CO2 dari berbagai aktivitas, yaitu 215.567 ton/tahun di Kecamatan Gresik, 564.404 ton/tahun di Kecamatan Kebomas, 454.267 ton/tahun di Kecamatan Manyar, dan 104.536 ton/tahun di Kecamatan Duduksampeyan. Total emisi tersebut mencapai 50,37% atau sekitar 1,34 juta ton/tahun dari total 2.657.660 ton/tahun gas CO2 yang dihasilkan di seluruh Kabupaten Gresik. Jumlah emisi CO2 ini belum termasuk emisi yang berasal dari sektor pertanian, yang mencapai 3,89 juta ton/tahun.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer Bumi. Terdapat enam jenis gas yang termasuk dalam kategori GRK, yaitu CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (dinitrogen oksida), HFC (hidrofluorokarbon), PFC (perfluorokarbon), dan SF6 (sulfur heksafluorida). Efek rumah kaca memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan suhu di Bumi. Tanpa adanya gas rumah kaca, suhu planet ini akan sangat dingin, seperti permukaan bulan. Namun, jika konsentrasi gas rumah kaca meningkat secara drastis, hal ini dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak negatif yang ditimbulkan termasuk peningkatan suhu Bumi, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai masalah lingkungan lainnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Gresik memiliki hubungan yang erat dengan risiko terjadinya bencana seperti

banjir, abrasi, dan kekeringan. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang rendah menunjukkan adanya pencemaran yang dapat menyebabkan saluran air tersumbat, sehingga meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi. Selain itu, penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) akibat konversi lahan yang tidak terencana mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air, yang juga berkontribusi pada limpasan permukaan dan potensi banjir. Di sisi lain, kualitas udara yang buruk dapat memperburuk perubahan iklim, meningkatkan frekuensi badai yang berpotensi mempercepat proses abrasi di daerah pesisir. Tanpa vegetasi yang memadai, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi oleh gelombang laut. Selain itu, kualitas air yang buruk mengurangi ketersediaan air bersih untuk irigasi, memperburuk kondisi kekeringan, terutama di musim kemarau. Lahan yang terdegradasi juga memiliki kemampuan resapan air yang rendah, sehingga air hujan tidak dapat disimpan dengan baik, menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Dapat dilihat dari jumlah bencana yang paling mendominasi di Kabupaten Gresik, yaitu banjir, yang di tahun 2023 mencapai 90 kejadian. Angka ini mencerminkan dampak langsung dari rendahnya kualitas lingkungan, di mana pencemaran air dan penurunan kualitas lahan berkontribusi pada meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir. Oleh karena itu, perbaikan IKLH menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan yang merugikan.

2.1.1.8 Aspek Demografi

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

2.1.1.8.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2024 tercatat mencapai 1.327.497 jiwa, yang terdiri dari 667.540 laki-laki dan 659.957 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 23.294 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini, tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti fertilitas dan migrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat mortalitas penduduk.

Di sisi lain, meskipun terdapat kenaikan jumlah penduduk, faktor eksternal seperti dampak pandemi global COVID-19 juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Pandemi ini, yang melanda Indonesia sejak awal 2020, menyebabkan lonjakan angka kematian, terutama di kalangan penduduk usia lanjut yang lebih rentan terhadap infeksi virus. Seperti yang diungkapkan dalam *penelitian The World Bank* (2014), pandemi berpotensi menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas secara langsung, yang dapat berdampak pada struktur demografis suatu wilayah. Tidak hanya itu, dampak tidak langsung dari pandemi juga dapat dilihat pada sektor kesehatan, yang menghadapi tekanan besar untuk menangani lonjakan kasus dan memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun, dapat dilihat lebih jelas pada data yang tercantum dalam Tabel 2.47 dan Tabel 2.49.

Tabel 2.47 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2024

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
2017	661.045	652.581	1.313.626
2018	672.583	663.788	1.336.371
2019	652.982	645.202	1.298.184

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
2020	649.640	642.754	1.292.394
2021	660.624	654.271	1.314.895
2022	648,861	642,657	1,291,518
2023	655.895	648.908	1.304.203
2024	667.540	659.957	1.327.497

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.48 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Kecamatan	Desa	2021	2022	2023	2024
Wringinanom	16	74.178	72.308	73.047	74.154
Driyorejo	16	104.820	103.718	105.501	108.924
Kedamean	15	64.984	63.138	63.709	64.213
Menganti	22	127.882	126.806	129.230	133.875
Cerme	25	82.034	81.093	82.048	83.903
Benjeng	23	67.102	65.424	65.904	66.608
Balongpanggang	25	58.166	56.340	56.397	56.862
Duduksampeyan	23	50.748	49.407	49.597	49.736
Kebomas	21	111.779	111.531	112.665	115.078
Gresik	21	81.494	80.136	79.457	80.005
Manyar	23	117.967	117.475	119.730	122.645
Bungah	22	69.280	67.983	68.598	69.581
Sidayu	21	44.241	43.594	43.835	44.542
Dukun	26	67.483	65.618	65.628	66.086
Panceng	14	53.305	52.340	52.831	53.606
Ujungpangkah	13	52.771	51.720	51.808	52.359
Sangkapura	17	55.190	52.732	53.663	54.311
Tambak	13	31.471	30.155	30.555	31.009
Jumlah	356	1.314.895	1.291.518	1.304.203	1.327.497

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2024

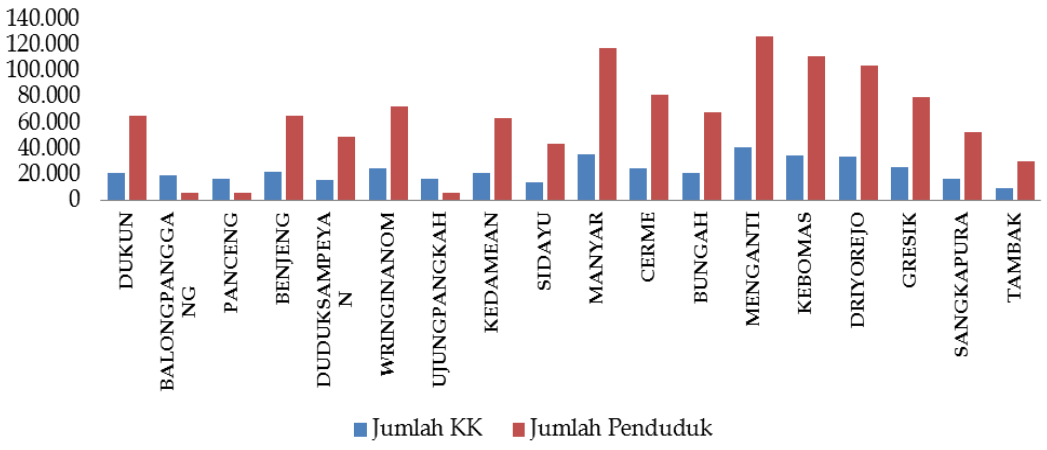

Gambar 2.21 Grafik Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Gambar 2.21, pada tahun 2024 Kecamatan Menganti mencatatkan jumlah keluarga terbanyak, yaitu 43.749 jiwa, yang sejalan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 133.875 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Tambak memiliki jumlah keluarga terendah, yakni 10.032 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 31.009 jiwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kecamatan Menganti menjadi pusat perekonomian Kabupaten Gresik, sehingga jumlah penduduk di daerah tersebut cenderung lebih tinggi. Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	43.648	41.091	84.739
2	5 - 9 Th	51.734	48.213	99.947
3	10 - 14 Th	53.820	50.481	104.301
4	15 - 19 Th	50.764	47.359	98.123
5	20 - 24 Th	54.749	51.855	106.604
6	25 - 29 Th	51.501	50.314	101.815
7	30 - 34 Th	48.245	47.169	95.414

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
8	35 - 39 Th	46.565	46.286	92.851
9	40 - 44 Th	53.837	54.128	107.965
10	45 -49 Th	51.544	51.773	103.317
11	50 - 54 Th	47.176	47.554	94.730
12	55 - 59 Th	39.538	40.815	80.353
13	60 - 64 Th	29.559	31.595	61.154
14	65 - 69 Th	21.437	22.485	43.922
15	70 - 74 Th	13.443	13.554	26.997
16	>75 Th	9.980	15.285	25.265
	JUMLAH	**667.540**	**659.957**	**1.327.497**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.49, penduduk Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan penduduk berusia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun pada tahun 2045 sebesar 69,51%. Proporsi penduduk pada umur tersebut, membutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang cukup, mudah dijangkau dan relatif murah, agar seluruh penduduk usia pendidikan dapat tertampung. Selain itu juga diperlukan lapangan kerja untuk mereka yang baru memasuki pasar kerja.

Meskipun penduduk muda (0-14 tahun) memiliki persentase yang relatif rendah, namun masih tetap dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa penduduk kelompok muda tersebut akan mulai memasuki kelompok umur produktif, sementara kelompok umur produktif yang ada sekarang juga menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Lebih lanjut jika diperhatikan pada kelompok umur 20-29 tahun menunjukkan jumlah yang cukup tinggi.

Sementara itu penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang rendah. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari

sekarang, karena kelompok ini akan terus bertambah di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2.1.1.8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang sangat penting dalam memahami dinamika kependudukan di Kabupaten Gresik, karena dapat memberikan gambaran mengenai perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Indikator ini memiliki peran krusial dalam merencanakan kebijakan yang tepat untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu kabupaten dengan perkembangan yang pesat di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pola pertumbuhan ini dapat dilihat pada Gambar 2.17, yang menggambarkan tren peningkatan jumlah penduduk di daerah ini.

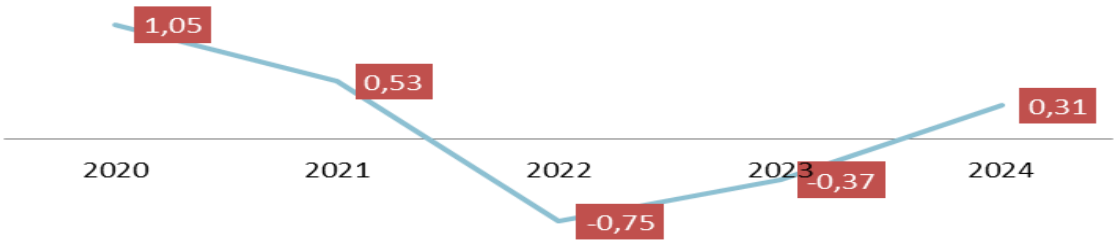

Gambar 2.22 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.22, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,05%. Namun, terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2021, yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun menjadi 0,53%. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk semakin menurun, mencapai angka -0,75%. Pada tahun 2023,

laju pertumbuhan penduduk kembali menurun menjadi -0,37%, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,31%. Informasi persebaran penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Jumlah dan Laju Penduduk per Kecamatan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Wringinanom	74.154	0,45
2	Driyorejo	108.924	-2,94
3	Kedamean	64.213	1,20
4	Menganti	133.875	-1,81
5	Cerme	83.903	0,82
6	Benjeng	66.608	1,46
7	Balongpanggang	56.862	1,45
8	Duduksampean	49.736	1,39
9	Kebomas	115.078	-0,75
10	Gresik	80.005	1,18
11	Manyar	122.645	0,69
12	Bungah	69.581	1,60
13	Sidayu	44.542	0,60
14	Dukun	66.086	1,31
15	Panceng	53.606	1,49
16	Ujungpangkah	52.359	1,69
17	Sangkapura	54.311	1,78
18	Tambak	31.009	1,10
	Total	**1.237.497**	**0,31**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.50, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gresik, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan di setiap kecamatan. Kecamatan Driyorejo mengalami penurunan terbesar dengan laju pertumbuhan -2,94%, yang disebabkan oleh migrasi keluar atau penurunan jumlah penduduk. Sebaliknya, Kecamatan Ujungpangkah, Sangkapura, dan Benjeng

mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi, masing-masing sebesar 1,69%, 1,78%, dan 1,46%, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Beberapa kecamatan seperti Wringinanom, Kebomas, dan Cerme menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih moderat, sementara kecamatan lainnya, seperti Kedamean, Balongpanggang, dan Dukun, mencatatkan angka pertumbuhan yang stabil.

2.1.1.8.3 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2024

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi, seperti kabupaten atau kota, yang menggambarkan bagaimana persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk ini dapat memberikan informasi penting mengenai distribusi populasi di setiap kecamatan, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyediaan fasilitas publik hingga kebijakan pembangunan daerah. Distribusi kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.23 dan Tabel 2.51, yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai tingkat kepadatan di masing-masing kecamatan.

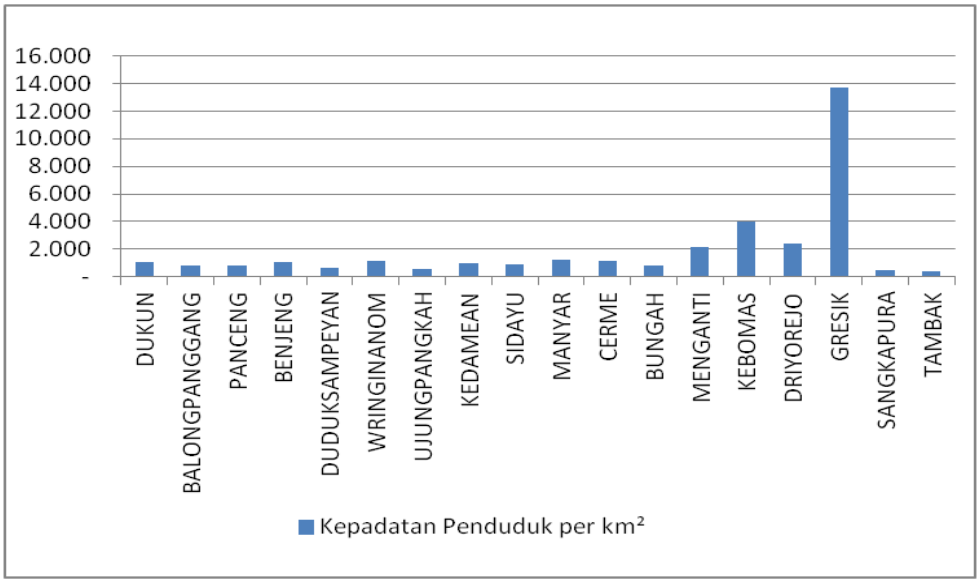

Gambar 2.23 Grafik Kepadatan Penduduk Gresik Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.51 Kepadatan dan Persentase Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan	Luas (km²)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Kepadatan (jiwa/km2)	Persentase Penduduk	Kepadatan (jiwa/km2)	Persentase Penduduk
Wringinanom	5,6	1.166,51	5,59	1.184	5,6
Driyorejo	8,09	2.056,95	8,21	2.124	8,09
Kedamean	4,89	966,02	4,84	974	4,89
Menganti	9,91	1.880,26	10,08	1.948	9,91
Cerme	6,29	1.143,84	6,32	1.170	6,29
Benjeng	5,05	1.075,81	5,02	1.087	5,05
Balongpanggang	4,33	882,86	4,28	890	4,33
Duduksampean	3,8	667,61	3,75	669	3,8
Kebomas	8,64	3748	8,67	3.828	8,64
Gresik	6,09	14.342,42	6,03	14.441	6,09
Manyar	9,18	1.254,77	9,24	1.285	9,18
Bungah	5,26	863,52	5,24	876	5,26
Sidayu	3,36	930,09	3,36	945	3,36
Dukun	5,03	1.110,64	4,98	1.118	5,03
Panceng	4,05	844,08	4,04	856	4,05
Ujungpangkah	3,97	546,38	3,94	552	3,97
Sangkapura	4,12	452,01	4,09	457	4,12
Tambak	2,34	388,25	2,34	394	2,34

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.51, Kecamatan Gresik memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik, yakni 14.441 jiwa per km², yang mencerminkan tingginya konsentrasi penduduk di pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Kecamatan Tambak yang terletak di Pulau Bawean memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 394 jiwa per km², menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki lebih sedikit penduduk yang tersebar di area yang lebih luas. Perbedaan kepadatan penduduk ini memberikan wawasan penting dalam perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, serta penyesuaian kebijakan untuk masing-masing kecamatan, mengingat kebutuhan yang berbeda-beda di wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi maupun rendah.

Tabel 2.52 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik

Proyeksi Kepadatan Penduduk	2024	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1114	1156	1167	1177	11188	1197	1207

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun 2024 hingga 2030. Pada tahun 2024, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1.114 ribu jiwa. Angka ini kemudian naik menjadi 1.156 ribu jiwa pada tahun 2025, dan meningkat lagi menjadi 1.167 ribu jiwa pada tahun 2026.

Tren kenaikan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, yaitu 1.177 ribu jiwa pada 2027, 1.188 ribu jiwa pada 2028, 1.197 ribu jiwa pada 2029, dan mencapai 1.207 ribu jiwa pada tahun 2030.

Kenaikan jumlah penduduk ini mencerminkan adanya pertumbuhan alami maupun migrasi yang masuk ke wilayah Gresik, seiring dengan berkembangnya kawasan industri, perdagangan, dan aktivitas ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk tersebut juga akan berdampak pada kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah Indikator makro yang mengukur seberapa jauh pembangunan suatu daerah berhasil dalam periode waktu tertentu. LPE dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah dan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 6 (enam) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2024

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun, Tahun 2024

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp.108.796,88,-. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69,- pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan

oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 2.54 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia (%)	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03
Jawa Timur (%)	-2,39	3,57	5,34	4,95	4,93
Gresik (%)	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun, Tahun 2024

Pada tahun 2020, ketiga wilayah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat −2,07%, Jawa Timur −2,39%, dan Kabupaten Gresik lebih dalam yaitu −3,68%. Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai bangkit dengan pertumbuhan positif. Indonesia tumbuh 3,69%, Jawa Timur 3,57%, dan Gresik 3,79%. Ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi setelah pembatasan sosial pada tahun sebelumnya. Pemulihan semakin kuat pada tahun 2022, yang menjadi puncak pertumbuhan dalam periode ini. Indonesia tumbuh 5,31%, Jawa Timur 5,34%, dan Gresik melonjak signifikan hingga 7,38%. Lonjakan di Gresik menunjukkan kontribusi besar dari sektor industri pengolahan dan ekspor. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan sedikit melambat. Indonesia tumbuh 5,05%, Jawa Timur 4,95%, dan Gresik 4,62%. Penurunan ini sejalan dengan normalisasi pasca pemulihan cepat tahun 2022. Pada tahun 2024, pertumbuhan relatif stabil dengan angka

yang mirip tahun sebelumnya. Indonesia mencatat 5,03%, Jawa Timur 4,93%, dan Gresik 4,79%. Ini menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih terkendali dan berkesinambungan.

2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur perubahan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ini diperoleh melalui perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, yang memungkinkan untuk melihat perbandingan antarperiode tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga. Secara matematis, laju pertumbuhan PDB dapat diukur dengan cara mengurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dengan pendapatan total ekonomi pada Tahun (n-1), lalu membagi hasilnya dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dan mengalikannya dengan 100%. Dengan kata lain, angka laju pertumbuhan ini mencerminkan seberapa besar perubahan agregat pendapatan yang terjadi antara satu periode tertentu (Tahun n) dibandingkan dengan periode sebelumnya (Tahun n-1). Laju pertumbuhan ini menjadi ukuran yang penting dalam analisis ekonomi, karena dapat memberikan gambaran mengenai dinamika perekonomian, apakah ekonomi sedang berkembang, stagnan, atau mengalami kontraksi, serta bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam periode tersebut.

Tabel 2.55 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	54,8	62,2	71,03	74,96	78,62
Jawa Timur	56,64	59,99	66,25	71,12	75,77
Gresik	74,60	76,63	81,41	84,29	87,44

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dan Kabupaten Gresik pada periode 2020–2024 menunjukkan tren

peningkatan yang konsisten. Pada level provinsi, PDRB Jawa Timur tumbuh dari 56,64 pada tahun 2020 menjadi 75,77 pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta penguatan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang menjadi penopang utama perekonomian Jawa Timur.

Sementara itu, Kabupaten Gresik memperlihatkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, yakni dari 74,60 pada tahun 2020 menjadi 87,44 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Gresik memiliki peran signifikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan dan migas. Namun, laju pertumbuhan tahunan Gresik relatif lebih lambat dibandingkan Jawa Timur, sehingga selisih capaian antara Gresik dan Jawa Timur terus menyempit, dari 17,96 poin pada tahun 2020 menjadi 11,67 poin pada tahun 2024.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Gresik masih unggul dibandingkan rata-rata provinsi, Jawa Timur menunjukkan akselerasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, Gresik perlu memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang lebih beragam, khususnya dengan mendorong sektor non-migas, pengembangan industri hilir, serta penguatan UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Gresik dapat lebih berkelanjutan sekaligus tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan.

Sebagai indikator utama, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi dasar dalam merencanakan kebijakan fiskal dan moneter, serta dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.004,08	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05
B. Pertambangan dan Penggalian	8.582,77	8.705,94	9.385,49	9.293,59	8.783,73
C. Industri Pengolahan	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	543,75	556,66	590,75	611,89	649,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,12	70,67	73,15	76,61	80,33
F. Konstruksi	9.234,80	9.418,46	9.929,74	10.477,02	10.939,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08
H. Transportasi dan Pergudangan	2.209,85	2.284,80	2.603,66	2.915,52	3.169,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Minum					
J. Informasi dan Komunikasi	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.075,75	1.079,42	1.102,43	1.149,29	1.212,97
L. Real Estat	1.383,88	1.445,48	1.527,52	1.585,05	1.642,29
M,N. Jasa Perusahaan	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131,65	1.140,31	1.144,45	1.156,92	1.259,67
P. Jasa Pendidikan	916,57	937,05	939,42	1.002,26	1.050,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	441,85	462,55	452,58	469,68	500,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	250,75	264,62	314,89	329,93	354,3
PDRB	**97.616,60**	**101.318,69**	**108.796,88**	**113.825,43**	**119.274,42**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.56, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik mulai naik dengan nilai yang cukup signifikan setelah pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp108.796,88

miliar. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69 miliar pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.337,08	10.160,48	11.085,25	11.969,33	12.352,11
B. Pertambangan dan Penggalian	8.000,41	10.034,94	13.757,11	12.126,94	11.575,10
C. Industri Pengolahan	66.583,60	72.264,74	81.039,11	88.719,44	96.658,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	682,84	683,07	733,13	765,89	803,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88,8	98,56	105,71	112,58	119,74
F. Konstruksi	12.642,99	12.903,96	14.327,94	15.484,98	16.343,28
G. Perdagangan	16.742,78	18.260,50	20.775,08	22.770,34	24.312,14

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan	3.334,17	3.431,93	4.096,71	4.893,73	5.407,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.785,41	1.958,41	2.232,16	2.495,87	2.724,15
J. Informasi dan Komunikasi	6.021,50	6.470,87	6.790,45	7.335,50	7.920,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.612,73	1.675,36	1.853,62	1.979,39	2.121,85
L. Real Estat	1.874,36	2.015,92	2.170,38	2.285,03	2.396,61
M,N. Jasa Perusahaan	430,9	446,03	482,81	534,48	586,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.893,90	1.896,02	1.961,23	2.069,32	2.358,70
P. Jasa Pendidikan	1.266,38	1.305,95	1.332,16	1.456,29	1.551,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	602,43	646,79	664,82	712,26	766,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	368,27	402,54	500,27	549,62	607,18
PDRB	**134.268,56**	**144.656,07**	**163.907,91**	**176.261,00**	**188.604,51**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar yang komprehensif dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan berbasis pada karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu fokus utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terarah, dengan memperhatikan karakteristik penduduk miskin sebagai faktor penting untuk menyusun kebijakan yang efektif. Salah satu komponen utama dalam strategi penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah implementasi program pro-poor secara komprehensif, yang meliputi berbagai dimensi kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri mengacu pada harga yang diperlukan oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial lainnya, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Tabel 2.58 Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	454.652	472.525	505.469	550.458	582.932

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2025

Tabel 2.59 Garis Kemiskinan Provinsi Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	416.001	429.133	460.909	507.286	536.122

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, garis kemiskinan di tingkat provinsi mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp416.001 per kapita per bulan. Angka ini meningkat menjadi Rp429.133 pada tahun 2021, kemudian naik signifikan menjadi Rp460.909 pada tahun 2022. Selanjutnya, garis kemiskinan kembali melonjak menjadi Rp507.286 pada tahun 2023, hingga akhirnya mencapai Rp536.122 pada tahun 2024.
Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan minimum untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup, yang dipengaruhi oleh inflasi harga pangan maupun non-pangan.

Tabel 2.60 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	492.628	505.499	536.544	588.316	608.828

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan perubahan dalam biaya hidup dan kebutuhan dasar penduduk. Pada tahun 2020, garis kemiskinan per kapita per bulan tercatat sebesar Rp492.628. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp505.499, menunjukkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi yang mempengaruhi standar kehidupan masyarakat. Pada tahun 2022, garis kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp536.544, yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap inflasi dan peningkatan harga barang serta jasa.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan kembali mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp588.316, mencerminkan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Di tahun 2024, garis kemiskinan per kapita per bulan di Kabupaten Gresik mencapai Rp608.828, yang menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam biaya hidup. Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi indikator penting dalam merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, karena angka ini mencerminkan kebutuhan minimal untuk memenuhi standar hidup yang layak di Kabupaten Gresik, serta mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penduduk dengan penghasilan rendah dalam menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.

Garis kemiskinan nasional selalu lebih tinggi daripada Jawa Timur, mencerminkan bahwa kebutuhan hidup rata-rata di Indonesia lebih besar dibandingkan di Jawa Timur . Sedangkan Garis kemiskinan Kabupaten Gresik dari jangka waktu 5 tahun terakhir lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan pokok, lebih besar dibandingkan dengan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan sebagain besar masyarakat Provinsi Jawa Timur.

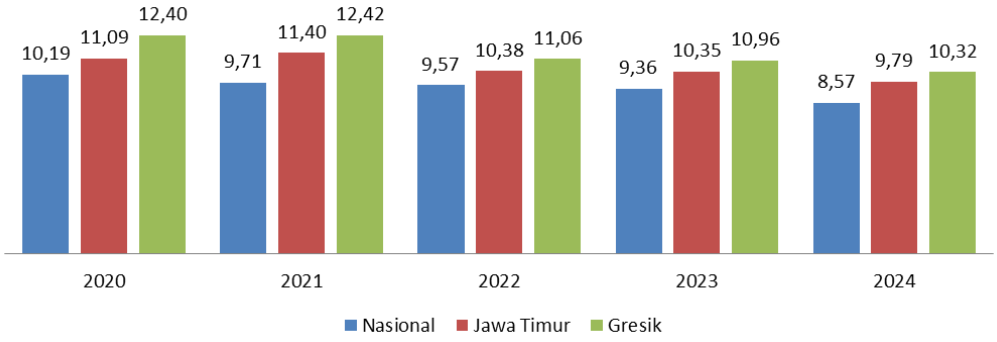

Gambar 2.24 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2010-2024

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan persentase penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 12,42%. Hal tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Berjalan ke tahun 2022 dan 2023 perekonomian berangsur pulih, daya beli masyarakat juga berangsur naik sehingga persentase kemiskinan juga mulai turun hingga angka 11.06%, hingga pada akhir 2024 kembali turun ke angka 10.32%.

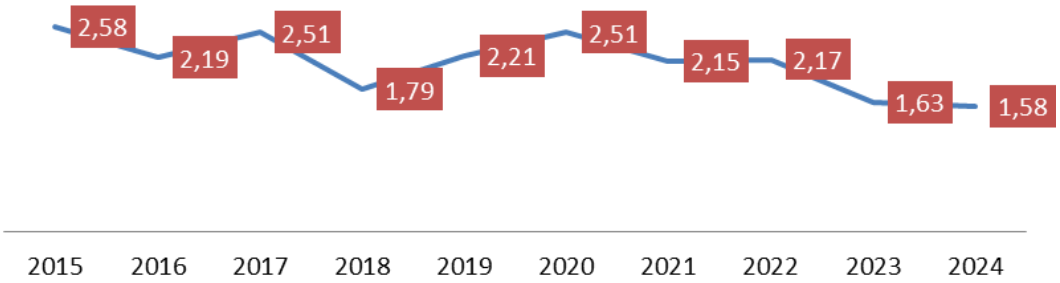

Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Gambar 2.25 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami tren penurunan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik tercatat sebesar 2,51. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 1,84 pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks sebesar 1,62, dan tetap stabil

pada angka 1,63 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik kembali turun sedikit menjadi 1,58. Penurunan indeks ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan di wilayah Gresik, meskipun angka tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang mengalami indeks kedalaman kemiskinan di kisaran 1,46 pada tahun 2024.

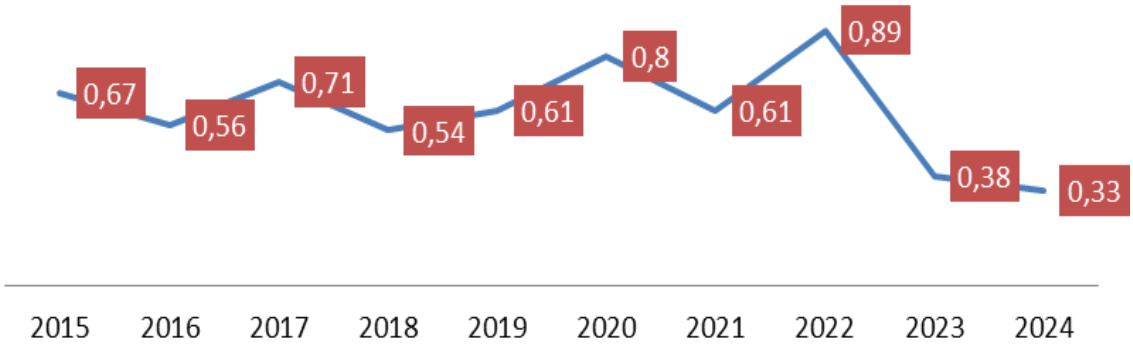

Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang menunjukkan perbedaan pengeluaran di antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020, nilai P2 di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,80, yang menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran yang cukup besar di kalangan penduduk miskin. Meskipun terjadi penurunan menjadi 0,61 pada tahun 2021, nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,89 pada tahun 2022. Namun, antara tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Gresik mengalami penurunan signifikan dalam nilai P2, yang menurun dari 0,89 pada 2022 menjadi 0,38 pada tahun 2023, dan lebih lanjut menjadi 0,33 pada 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran, yang tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan melalui

Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dengan program Go-Tani.

Di sisi lain, Kemiskinan Ekstrem masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data BPS dan hasil pendataan terpadu, masih terdapat rumah tangga di Kabupaten/Kecamatan/Desa yang masuk kategori miskin ekstrem, yaitu dengan pengeluaran per kapita per hari di bawah garis kemiskinan ekstrem. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan bergizi, rumah layak huni, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan ekstrem merujuk pada rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan (harga 2022, BPS). Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berikut ini adalah kondisi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2023 :

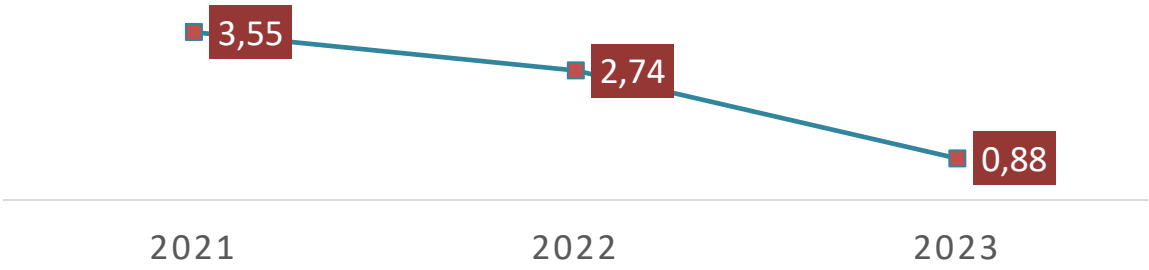

Gambar 2.27 Realisasi Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Gresik mengalami trend penurunan selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, Kemiskinan EKstrem di Gresik tercatat sebesar 3,55. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 2,74 pada tahun 2022. Kemiskinan EKstrem di Gresik kembali turun sebesar 0,88 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya

perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan di wilayah Gresik.

2.1.2.1.4 Indeks Kemiskinan Multidimensi

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) adalah ukuran kemiskinan yang tidak hanya melihat dari sisi pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IKM memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Kemiskinan multidimensi mengakui bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai kekurangan dalam aspek kehidupan lainnya yang penting untuk kesejahteraan. Indikator yang digunakan dalam IKM mencerminkan berbagai dimensi kemiskinan, seperti:

a. Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, dan angka kematian anak.
b. Pendidikan: Akses ke pendidikan dasar dan menengah, lama sekolah, dan partisipasi sekolah.
c. Standar Hidup: Akses ke air bersih, sanitasi layak, perumahan yang layak, energi untuk memasak, dan kepemilikan aset.

IKM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan dibandingkan dengan hanya melihat kemiskinan berdasarkan pendapatan (kemiskinan moneter). IKM membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan. IKM memungkinkan perbandingan kemiskinan antar daerah, kelompok sosial, dan antar waktu, sehingga dapat mengidentifikasi area yang paling membutuhkan intervensi. IKM dihitung dengan menggabungkan prevalensi (persentase orang yang mengalami kemiskinan multidimensi) dan intensitas (tingkat keparahan kemiskinan). Rumus umum untuk IKM adalah: MPI = H x A, di mana H adalah insidensi (prevalensi) kemiskinan, dan A adalah intensitas kemiskinan. Nilai IKM berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan, yang menggambarkan persentase penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang secara aktif bersedia dan mampu bekerja. Penghitungan TPT dilakukan dengan membandingkan jumlah individu yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja. Hasil perbandingan ini kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkannya, termasuk mereka yang baru diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Gambaran TPT Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.28 yang menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran di masing-masing wilayah tersebut.

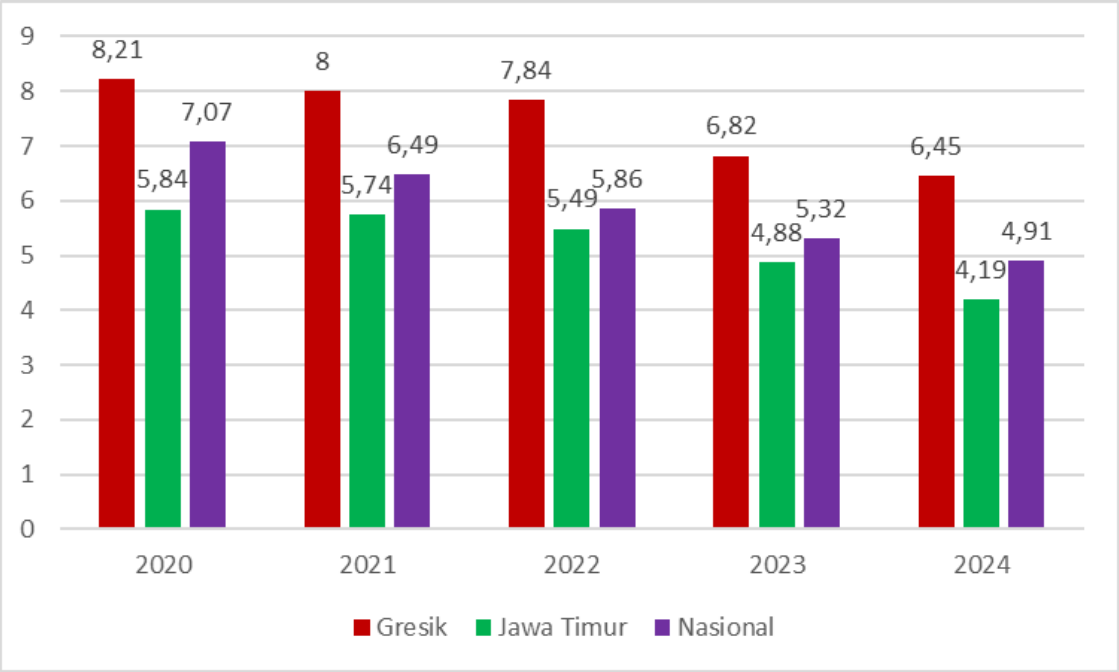

Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.28 dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, TPT Kabupaten Gresik mengalami tren menurun. Namun nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 jika distribusi pendapatan di antara penduduknya sangat merata, sedangkan jika skor mencapai 1, itu berarti seluruh pendapatan di wilayah tersebut dikuasai oleh satu orang. Meskipun indeks ini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, penting untuk dicatat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan, karena kesejahteraan lebih sulit dihitung dibandingkan dengan pendapatan. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.29.

Gambar 2.29 Indeks Gini Kabupaten Gresik

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.29, terlihat bahwa indeks gini Kabupaten Gresik fluktuasi setiap tahunnya, dan pada akhir periode tahun 2024 mencapai 0,32 menurun dari tahun 2023 sebesar 0,33. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik, meskipun masih ada ketimpangan yang perlu ditangani.

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mencakup seluruh dimensi pembangunan manusia, IPM dianggap efektif dalam mengukur tiga dimensi utama dari pembangunan manusia. IPM berperan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Selain itu, IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup yang layak (decent standard of living). Perkembangan IPM Kabupaten Gresik dari Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	76,59	76,98	77,62	78,44	78,93
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.61, capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Dalam periode 2020 hingga 2024, IPM Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan, dimulai dari 76,59 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 78,93 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan angka provinsi Jawa Timur dan nasional, IPM Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi selama lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil melampaui rata-rata provinsi dan nasional dalam hal pembangunan manusia. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Gresik dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak.

Kenaikan yang stabil ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, mulai memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1.8 Rasio Partispasi Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin

Rasio partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin adalah indikator penting untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan manfaat yang mereka butuhkan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio partisipasi dan penggunaan data yang akurat dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Faktor yang Mempengaruhi Rasio Partisipasi adalah sebagaimana berikut:

a. Program Perlindungan Sosial: Jenis program yang tersedia, seperti bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan, PKH), bantuan pangan, subsidi beras, dan jaminan kesehatan, serta bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan.
b. Akses: Kemudahan akses keluarga miskin terhadap program, termasuk informasi, persyaratan, dan proses pendaftaran.
c. Kondisi Geografis: Wilayah tempat tinggal keluarga miskin dapat mempengaruhi akses mereka terhadap program, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
d. Kondisi Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam program.
e. Kualitas Data: Akurasi dan kelengkapan data mengenai keluarga miskin dapat mempengaruhi identifikasi penerima manfaat dan memastikan bahwa program tepat sasaran.

Pentingnya rasio partisipasi adalah untuk:

a. Mengukur Efektivitas: Rasio partisipasi yang rendah dapat menunjukkan bahwa program perlindungan sosial belum efektif dalam mencapai target sasaran dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.

b. Identifikasi Kesenjangan: Rasio partisipasi yang berbeda antar kelompok keluarga miskin dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam akses dan manfaat program.
c. Penyusunan Kebijakan: Data rasio partisipasi dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan.

2.1.2.1.9 Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Rasio penyerapan tenaga kerja lokal adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di suatu wilayah atau perusahaan dengan total tenaga kerja yang ada di wilayah atau perusahaan tersebut. Rasio ini mengukur seberapa besar tenaga kerja lokal terserap dalam pasar tenaga kerja, dan seringkali menjadi indikator penting dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pemban Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah sebagaimana berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang positif cenderung menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
b. Investasi: Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan peluang kerja baru bagi tenaga kerja lokal.
c. Kualitas Sumber Daya Manusia: Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja lokal memengaruhi daya saing mereka di pasar kerja.
d. Kebijakan Ketenagakerjaan: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti program pelatihan kerja, insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, atau pengaturan kuota tenaga kerja asing untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
e. Kondisi Pasar Kerja: Dinamika pasar kerja, seperti permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta struktur industri, juga memengaruhi rasio penyerapan tenaga kerja lokal.

f. Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menciptakan jenis pekerjaan baru dan mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan, yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal.

Adapun Pentingnya Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah sebagaimana berikut:

a. Mengurangi Pengangguran: Tingginya rasio penyerapan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan lebih banyak penduduk yang bekerja, pendapatan rumah tangga dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Tenaga kerja yang produktif dan terserap dalam pasar kerja dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
d. Mengurangi Ketergantungan pada Tenaga Kerja Asing: Rasio penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, terutama dalam sektor-sektor yang potensial diserap oleh tenaga kerja lokal.
e. Peningkatan Kualitas SDM: Program pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.1.10 Indeks Harmoni

Indeks Harmoni merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menekankan pada bagaimana individu maupun kelompok mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, serta bekerja sama meskipun berada dalam keberagaman suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Kehidupan yang harmonis tercermin dari adanya toleransi yang tinggi, kerukunan sosial yang terjaga, serta

kemampuan menyelesaikan perbedaan atau konflik tanpa menimbulkan pertentangan yang merugikan.

Selain itu, Indeks Harmoni juga mencerminkan adanya rasa keadilan dan inklusivitas, di mana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Dengan demikian, Indeks Harmoni tidak hanya menjadi cerminan kondisi hubungan antarindividu dan kelompok, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi sejauh mana masyarakat memiliki ketahanan sosial serta dukungan terhadap pembangunan yang damai, adil, dan berkelanjutan.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan tujuan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolak ukur, di antaranya adalah Usia Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak, serta penanganan tuberkulosis. UHH yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik. Kesehatan ibu dan anak diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan prevalensi stunting pada balita, yang harus ditekan melalui layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau.

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu dalam suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu, dan biasanya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR). Perhitungan UHH dapat dilakukan melalui catatan registrasi mortalitas yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu atau dengan menggunakan program analisis data seperti *Mortpak Lite*. Grafik perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.24

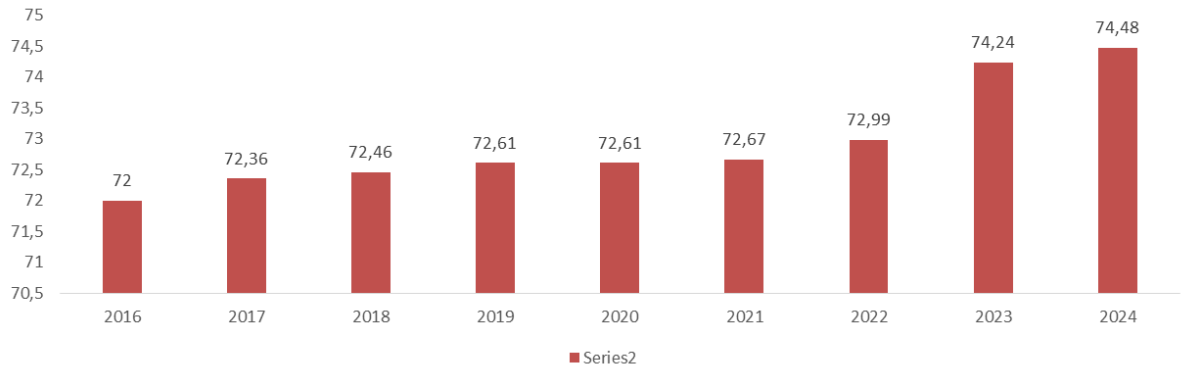

Gambar 2.30 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024.

Sumber: Dinas Kesehatan KabupatenGresik, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.24, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 72,61 tahun, yang kemudian meningkat sedikit menjadi 72,67 tahun pada tahun 2021. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan UHH mencapai 72,99 tahun, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 74,24 tahun. Pada tahun 2024, Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 74,48 tahun, menunjukkan tren positif yang terus berlanjut. Kenaikan UHH ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan layanan kesehatan dan faktor-faktor pendukung lainnya.

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik diarahkan pada beberapa aspek penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Fokus utama kebijakan ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem jaminan kesehatan yang terutama menyasar penduduk miskin. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pada peningkatan sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, pendidikan kesehatan sejak usia dini, serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar serta penyebaran tenaga kesehatan. Penting untuk melibatkan masyarakat dan

berbagai unsur terkait dalam pemberdayaan dan kemitraan untuk mengelola kehidupan lingkungan yang sehat, sehingga tujuan untuk mencapai kesehatan yang paripurna dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan harus melibatkan mereka sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek, agar dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan, setiap faktor yang mengganggu kesehatan masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, derajat kesehatan yang baik merupakan salah satu bentuk investasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah kumpulan indikator kesehatan yang dirancang untuk mengukur dan menggambarkan masalah kesehatan secara langsung dan mudah diukur. Indikator-indikator yang dipilih dalam IPKM mencerminkan dampak dari pembangunan kesehatan pada tahun sebelumnya dan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan program pembangunan kesehatan di masa mendatang. Perkembangan nilai IPKM Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	63,39	67,60	63,39	65,94	82,50

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada tahun 2020, IPKM tercatat sebesar 63,39 dan meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan kembali menjadi 63,39 pada tahun 2022, yang diduga disebabkan oleh gangguan pelayanan kesehatan pasca-pandemi atau faktor sosial ekonomi lainnya. Pada tahun 2023, terjadi perbaikan dengan nilai IPKM mencapai 65,94. Target IPKM tahun 2024 ditetapkan sebesar 69,3, namun realisasi capaian

mencapai 82,5, melampaui ekspektasi sebesar 119,05% dari target. Lonjakan signifikan ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan kesehatan, yang meliputi perluasan akses layanan kesehatan primer, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta peningkatan kualitas intervensi kesehatan masyarakat.

2.1.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator penting dalam memantau derajat kesehatan masyarakat, khususnya status gizi anak usia di bawah lima tahun. Gizi buruk adalah kondisi balita yang mengalami kekurangan gizi tingkat berat sehingga berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan daya tahan tubuh. Kondisi ini biasanya diukur melalui indikator antropometri, seperti berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang berada jauh di bawah standar WHO. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62abel 2.54.

Tabel 2.63 Capaian Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik tahun 2020-2024

Persentase Balita Gizi Buruk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.1.2.2.4 Persentase Balita Gizi Kurang

Persentase balita gizi kurang merupakan indikator kesehatan masyarakat yang menggambarkan proporsi balita dengan status gizi di bawah normal, tetapi belum sampai pada kondisi gizi buruk. Balita dengan gizi kurang biasanya mengalami hambatan pertumbuhan, lebih rentan terhadap penyakit infeksi, serta memiliki risiko perkembangan kognitif dan fisik yang lebih lambat dibandingkan anak dengan gizi baik.

Pengukuran gizi kurang biasanya dilakukan melalui indikator antropometri, terutama berat badan menurut umur (BB/U). Anak yang memiliki nilai z-score di bawah -2 SD hingga -3 SD dari standar

pertumbuhan WHO termasuk kategori gizi kurang, sedangkan di bawah -3 SD masuk kategori gizi buruk. Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62abel 2.55.

Tabel 2.64 Capaian Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Gresik tahun 2020-2024

Persentase Balita Gizi Kurang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3,6	3,6	5,9	3,7	4,5

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.1.2.2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif merupakan indikator yang menggambarkan persentase desa atau kelurahan yang telah melaksanakan program Desa Siaga Aktif. Program ini adalah upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang peduli, tanggap, dan mandiri terhadap masalah kesehatan di wilayahnya.

Sebuah desa disebut siaga aktif apabila memiliki unsur-unsur pokok seperti Forum musyawarah desa siaga yang rutin berjalan, kader kesehatan dan poskesdes (pos kesehatan desa) yang berfungsi optimal, sistem surveilans berbasis masyarakat, termasuk pencatatan kelahiran, kematian, dan penyakit menular, dana sehat atau bentuk pembiayaan gotong royong untuk mendukung pelayanan dasar kesehatan serta kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan seperti bencana, wabah, maupun masalah kesehatan mendesak lainnya. Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62abel 2.67.

Tabel 2.65 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gresik tahun 2020-2024

Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.1.2.2.6 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)

dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3.0
2. Pendek : Zscore ≥- 3.0-Zscore < -2.0

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata tinggi badan penduduk acuan. Stunting pada anak mencerminkan dampak luas dari kekurangan gizi kronis dan penyakit berulang yang sering kali disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Stunting dapat berpengaruh serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Penelitian menunjukkan bahwa efek stunting pada usia dini, terutama yang berkaitan dengan perkembangan otak, sulit diperbaiki di usia dewasa, meskipun anak tersebut kemudian mendapatkan gizi yang cukup. Selain itu, anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa, seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menegaskan betapa pentingnya memberikan gizi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak.

Gambar 2.31 Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.31 terlihat penurunan yang signifikan dalam angka stunting dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 23,0%, namun angka ini terus menurun menjadi 10,7% pada tahun 2022, 9,12% pada tahun 2023, dan mencapai 8,14% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik, yang dapat diatribusikan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta program pemberian gizi yang lebih baik bagi anak-anak. Jika dibandingkan dengan data di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang lebih rendah. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Jawa Timur mencapai 23,5%, sementara di tingkat nasional angkanya juga sama, yaitu 23,5%. Namun, pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur (14,7%) dan Nasional (19,8%), yang menunjukkan keberhasilan program-program kesehatan dan gizi yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik.

2.1.2.2.7 Angka Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tabel 2.66 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	316,37	94.18	79.5	77.59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan ibu. Pada tahun 2022, AKI tercatat sebesar 94,18 per 100.000 kelahiran hidup, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 79,5 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, AKI kembali menurun menjadi 77,59 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal, termasuk peningkatan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, serta upaya yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

2.1.2.2.8 *Tuberculosis*

Penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat keberhasilan pengobatan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyaknya temuan kasus TBC menandakan peningkatan deteksi penyakit yang dilakukan melalui layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemeriksaan dan diagnosis TBC semakin meningkat, yang memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap penderita TBC. Meskipun demikian, semakin tingginya jumlah kasus yang ditemukan memerlukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lonjakan kasus, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang gejala TBC, faktor sosial-ekonomi, atau masalah dalam distribusi obat dan pengobatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setelah deteksi yang tinggi, sangat penting untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang lebih efektif guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut,

memastikan pengobatan yang tepat, dan mengurangi angka kematian akibat TBC.

Tabel 2.67 *Treatment Coverage Tuberculosis* Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Treatment Coverage Tuberculosis	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	61,23	80,42	88,92	90,70

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Berdasarka Tabel 2.67 cakupan pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Coverage Tuberculosis)* di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021, capaian pengobatan TBC masih berada pada angka 61,23%. Namun, pada tahun berikutnya terjadi lonjakan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 80,42% atau meningkat hampir 20 poin persentase. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 88,92%, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 90,70%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik berhasil mencapai standar target global yang ditetapkan WHO, yaitu minimal 90% cakupan pengobatan TBC. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan kesehatan dalam memperluas jangkauan deteksi, pengobatan, dan pendampingan pasien TBC berjalan dengan efektif.

2.1.2.2.9 SPM POSYANDU

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/ lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/ Kelurahan. Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum;
d. Perumahan rakyat;

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan meliputi dukungan:

a. Pendidikan anak usia dini;
b. Identifikasi ketersediaan perpustakaan desa;
c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;

Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan meliputi dukungan: .

a. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
b. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
c. Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
d. Rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
e. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
f. Penjangkauan akses yang terdiri atas: imunisasi; vitamin A; dan tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum meliputi dukungan:

a. Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa;

Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat yakni dukungan:

a. Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
b. Komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yangbersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi dukungan:

a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
b. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
c. Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
e. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

Tugas Posyandu dalam bidang sosial meliputi dukungan:

a. Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
b. Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
c. Memfasilitasi danl atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tabel 2.68 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Rata-rata lama sekolah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	9,3	9,56	9,75	10,01	10,03

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.68 RLS di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 9,56 tahun, yang meningkat menjadi 9,75 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi pendidikan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan lebih lama. Pada tahun 2023, RLS kembali meningkat menjadi 10,01 tahun dan angka ini tetap stabil pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai standar pendidikan yang lebih baik dan setara bagi masyarakatnya. Peningkatan RLS ini menjadi indikator penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, dengan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah indikator yang mengukur durasi pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan, berdasarkan peluang pendidikan yang ada saat ini. AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan menggambarkan proyeksi jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh generasi mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak untuk melanjutkan pendidikan pada usia-usia berikutnya akan serupa dengan peluang yang dimiliki penduduk yang bersekolah pada usia yang sama saat ini. Indikator ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan dan dapat digunakan untuk menilai kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah.

Tabel 2.69 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Harapan Lama Sekolah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	13,73	13,77	13,96	13,97	13,98

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan AHLS di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif dan stabil dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, AHLS tercatat sebesar 13,77 tahun, yang meningkat menjadi 13,96 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka ini sedikit meningkat lagi menjadi 13,97 tahun, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,98 tahun. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Gresik diperkirakan akan menyelesaikan pendidikan mereka dalam waktu yang lebih lama, mencerminkan adanya peningkatan dalam partisipasi pendidikan dan keberhasilan sistem pendidikan di Kabupaten Gresik. Pada Kabupaten Gresik sudah tidak ada siswa yang mengalami putus sekolah baik di jenjang sekolah dasar maupun menengah. Peningkatan AHLS menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi di masa depan.

Berikut ini merupakan indikator yang relevan dalam mengukur optimalnya peningkatan kualitas SDM Guru di Kabupaten Gresik baik tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah yaitu :

Tabel 2.70 Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	90,83%	96,50%	98,24%	98,67%
Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan	79,49%	96,00%	92,92%	98,89%

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
SNP				

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi untuk masing-masing indikator baik di tingkat SD maupun SMP menunjukkan trend kenaikan yang positif menuju 100%. Kedua indikator ini baru dilakukan pengukuran pada Tahun 2021, sehingga tidak terdapat data di Tahun 2020 atau sebelumnya. Pada tahun 2023, Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,08% dikarenakan ada penambahan guru yang kualifikasinya belum sesuai dengan SNP (atau belum memiliki sertifikat pendidik). Dikarenakan tren yang terjadi selalu positif maka menunjukkan bahwa kualitas SDM Guru di Kabupaten Gresik semakin baik.

2.1.2.3.3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Perguruan Tinggi merupakan persentase dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan setelah jenjang SMA/sederajat. Yang mencakup diantaranya Jenjang Diploma I/D1, Diploma II/D2, Diploma III/D3, Strata 1/S1, Strata 2/S2, Magister, Strata 3/S3, dan Pendidikan Profesi. Data ini digunakan untuk menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat, keterkaitan dengan kualitas tenaga kerja, dan untuk perencanaan pembangunan daerah, seperti pelatihan kerja, investasi industri, dan kebijakan pendidikan. Berikut Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024.

Tabel 2.71 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024	Jenjang				
	Tidak Punya Ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
Kabupaten Gresik	9,69	21,46	22,06	36,34	10,45
Provinsi Jawa Timur	18,86	26,62	20,36	25,50	8,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.2.3.4 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk: Literasi Membaca Dan Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) pada Asesmen Nasional menunjukkan seberapa banyak sekolah atau madrasah yang berhasil memenuhi capaian kemampuan dasar literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca dimaknai sebagai kemampuan memahami, menganalisis, serta menggunakan informasi dari teks tertulis, sementara numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

Satuan pendidikan dinyatakan mencapai SKM apabila minimal 50% peserta didiknya mampu berada pada level “cukup” atau “mahir” dalam

literasi membaca maupun numerasi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada perhitungan capaian di tahun sebelumnya.

2.1.2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah instrumen pengukuran tingkat literasi masyarakat Indonesia yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI. IPLM digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan, akses, dan kebiasaan dalam memanfaatkan bahan bacaan serta fasilitas literasi yang tersedia. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Ketersediaan yakni mencakup ketersediaan fasilitas literasi, bahan bacaan, dan tenaga literasi;
2. Aksesibilitas yakni kemudahan masyarakat dalam mengakses bahan bacaan dan fasilitas literasi;
3. Kemampuan yakni tingkat kemampuan dasar membaca, menulis, memahami informasi, dan melek digital; dan
4. Kebiasaan yakni seberapa sering masyarakat membaca, menulis, atau memanfaatkan fasilitas literasi.

Berikut ini merupakan capaian IPLM nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik pada tahun 2023-2024 :

Tabel 2.72 IPLM Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik pada Tahun 2023-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tahun	
	2023	2024
Kabupaten Gresik	54,51	44,46
Provinsi Jawa Timur	75,18	78,60
Nasional	68,19	73,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IPLM Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang signifikan, dimana hal ini sangat berbeda dengan capaian dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional terlihat IPLM mengalami tren naik yang sangat signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian di Kabupaten Gresik

karena mencerminkan kurangnya literasi atau akses terhadap sarana literasi yang kurang. Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dalam hal ini diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yakni dengan pengadaan perpustakaan keliling dan juga berpartisipasi aktif dalam sekolah maupun *event* daerah yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif adalah konsep perlindungan sosial yang dirancang agar lebih fleksibel, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko dan guncangan, baik yang bersifat idiosinkratik (misalnya sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan) maupun sistemik (misalnya pandemi, bencana alam, perubahan iklim, krisis ekonomi). Ciri utama Perlindungan Sosial yang Adaptif (Adaptive Social Protection / ASP):

1. Integratif → menggabungkan perlindungan sosial, pengelolaan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
2. Fleksibel → dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah-ubah (misalnya bantuan tunai reguler bisa diperluas saat krisis).
3. Inklusif → menjangkau kelompok rentan, termasuk yang biasanya sulit terdata atau tercecer dalam program.
4. Berbasis data dan teknologi → memanfaatkan big data, registrasi sosial terpadu, dan sistem digital untuk penyaluran cepat dan tepat sasaran.Berorientasi pada ketahanan (resilience) → tidak hanya melindungi dari dampak langsung, tetapi juga membantu masyarakat pulih dan lebih siap menghadapi risiko di masa depan.

Contoh implementasi di Kabupaten Gresik:

1. Program KeJaring Pengaman Sosial yang diperluas cakupan dan nilainya saat pandemi COVID-19.
2. PKH Inklusif
3. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM saat harga energi meningkat.
4. Pemanfaatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Satu Data Indonesia untuk mempercepat penyaluran bantuan.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih tangguh (resilient), tidak hanya terlindungi dari kemiskinan jangka pendek, tetapi juga mampu beradaptasi dengan guncangan jangka panjang.

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merujuk pada jumlah atau persentase tenaga kerja yang terdaftar dan menjadi peserta program jaminan sosial yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perbandingan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (Peserta terdiri dari 3 Segmen yaitu : PU (Penerima Upah), BPU (Bukan Penerima Upah), JAKON (Jasa Konstruksi)) berdasarkan NIK Kabupaten Gresik dibandingkan jumlah Penduduk usia kerja (>=15 tahun) yang bekerja atau memiliki aktivitas usaha ekonomi (Termasuk ASN/TNI/POLRI) berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik yang disandingkan dengan data penduduk bekerja bukan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.73 Jumlah Penerima Upah, Bukan Penerima upah, Jasa Konstruksi dan Perusahaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Tahun	Kepesertaan Aktif				
	PU	BPU	Jakon	Perusahaan	Total Tenaga Kerja
2020	118.201	11.345	38.450	3.991	167.996
2021	127.053	12.238	96.384	4.830	235.675
2022	140.320	29.587	69.761	5.090	239.668
2023	156.640	61.064	93.368	6.441	311.072
2024	189.807	25.720	106.667	6.648	322.194

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.74 Cakupan Kepersertaan Sosial Tenaga Kerja

Tahun	Total Tenaga Kerja	Penduduk Bekerja	Cakupan
2020	167.996	625.842	26,84%
2021	235.675	620.883	37,96%
2022	239.668	628.952	38,11%
2023	311.072	666.134	46,70%
2024	322.194	664.371	48,50%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan kedua tabel di atas, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengalami trend kenaikan setiap tahunnya. Lonjakan paling tinggi terkadi di tahun 2021 dengan presentase 37,96%, dan selama 5 (lima) tahun terakhir naik secara signifikan sebesar >4% tiap tahunnya dengan total kenaikan 21,66%. Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Kabupaten Gresik melakukan Upaya-upaya sebagai beriku :

1. Menyusun regulasi perlindungan bagi pekerja rentan;
2. Melakukan kolaborasi dengan berbagai stage holder untuk dapat berpartisipasi dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
3. Menggunakan Sebagian dana APBD dan bagi hasil cukai tembakau yang diterima Kabupaten Gresik untuk perlindungan petani tembakau, buruh tani tembakau, pekerja pada sektor rokok, pendamping sosial, relawan Damkar dan BPBD, Ojek, Nelayan, dan UMKM.

Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemerataan akses terhadap jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Gresik.

2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah persentase penduduk yang sudah terdaftar dan aktif sebagai peserta program jaminan kesehatan (misalnya JKN–BPJS Kesehatan) dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan kata lain, indikator ini

menunjukkan berapa banyak penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan dari total populasi.

Fungsinya:

- Mengukur akses penduduk terhadap layanan kesehatan yang terjamin.
- Menjadi salah satu indikator menuju Universal Health Coverage (UHC).
- Menjadi dasar perencanaan kebijakan daerah maupun nasional di bidang kesehatan.

Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, cakupan baru mencapai 64,72% dan meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi 67,94%. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 91,33%, dan pada tahun 2024 cakupan telah melampaui 100% yaitu sebesar 102,44%. Hal ini menunjukkan bahwa target Universal Health Coverage (UHC) telah tercapai bahkan terlampaui, menandakan semakin luasnya masyarakat Gresik yang terlindungi dalam program jaminan kesehatan.

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Indeks Kesalehan Sosial berfokus pada perilaku dan praktik sosial keagamaan yang nyata di masyarakat yang mana mengukur sejauh mana seseorang/kelompok mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator dalam penilaian indeks Kesalehan Sosial diantaranya (1) Kepedulian pada tetangga dan masyarakat; (2) Gotong royong, solidaritas sosial; (3) Toleransi terhadap perbedaan agama/suku; (4) Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Jadi indeks ini lebih menilai aspek praktik/perilaku. Sedangkan Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial berfokus pada pemahaman dan wawasan masyarakat tentang kesalehan sosial yang mana mengukur seberapa jauh masyarakat tahu dan paham mengenai ajaran agama yang mendorong kesalehan sosial. Beberapa indikator dalam penilaian Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial diantaranya (1) Pengetahuan tentang kewajiban menolong sesama; Pemahaman tentang larangan berbuat zalim/merugikan orang lain; Wawasan mengenai pentingnya menjaga kerukunan sosial Berikut merupakan nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.75 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024

Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan		
	2022	2023	2024
Wringinanom	74,7	70,3	74,1
Driyorejo	59,1	55,0	55,2

Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan		
	2022	2023	2024
Kedamean	51,6	72,0	75,8
Menganti	73,2	58,6	62,1
Cerme	68,9	68,9	62,2
Benjeng	49,0	72,9	79,7
Balongpanggang	74,6	66,7	73,3
Duduksampean	41,4	80,3	81,5
Kebomas	51,6	62,2	63,8
Gresik	63,2	75,9	70,8
Manyar	47,5	65,8	65,8
Bungah	85,5	74,2	63,0
Sidayu	85,2	85,2	85,3
Dukun	54,4	80,9	78,0
Panceng	65,2	73,9	82,3
Ujungpangkah	64,1	80,8	83,0
Sangkapura	65,2	69,2	77,8
Tambak	74,7	62,2	62,2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2024

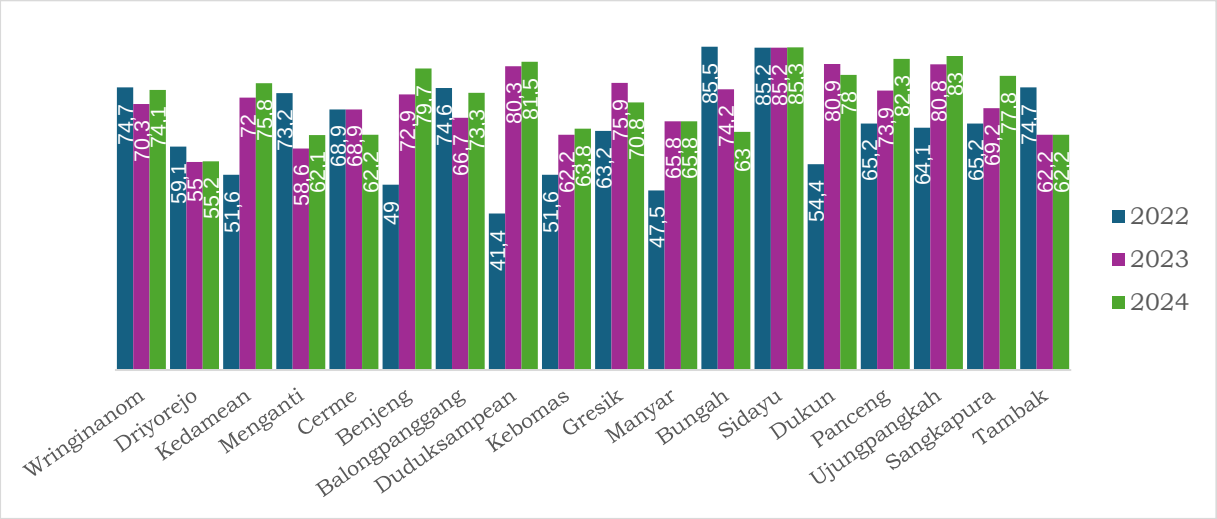

Gambar 2.33 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, pada Tahun 2023 Indeks pengetahuan kesalehan sosial pada dasarnya adalah salah satu komponen dari Indeks Kesalehan Sosial. Beberapa komponen dalam penyusunan

Indeks Kesalahen Sosial oleh Kemenag RI diantaranya (1) Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial (terkait dengan apa yang diketahui masyarakat tentang nilai kesalehan sosial); (2) Indeks Sikap Kesalehan Sosial (terkait bagaimana pandangan/pendapat mereka); dan Indeks Perilaku Kesalehan Sosial (terkait bagaimana praktik nyatanya).

Tabel 2.76 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

	Tahun			
Indikator	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Kesalehan Sosial	76,94	79,16	80,32	80,32

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2024

Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam nilai-nilai sosial dan keharmonisan masyarakat. Pada tahun 2021, Indeks Kesalehan Sosial tercatat sebesar 76,94, yang kemudian meningkat menjadi 79,16 pada tahun 2022. Angka ini terus menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2023 dengan mencapai 80,32, dan tetap stabil pada angka yang sama pada tahun 2024. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

a. Melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
b. Bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan

penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi; dan

c. Melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah tiga pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Keluarga berkualitas menjadi fondasi untuk pembangunan manusia yang berkualitas, sedangkan kesetaraan gender memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat inklusif menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua kelompok, termasuk kelompok terpinggirkan, untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan.

Tabel 2.77 Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

No	Uraian Penilaian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak	64,68	67,07	71,85	71,57	71,57
2	Indeks Pembangunan Gender	89,93	90,2	90,78	91,01	91,25
3	Indeks Pemberdayaan Gender	69,50	71,48	70,13	70,47	62,32
4	Indeks Pemberdayaan Keluarga	54,44	54,44	60,09	64,81	65,72

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Gresik menunjukkan trend yang naik setiap tahun. Capaian tersebut turut didukung dengan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2023. Kabupaten Gresik memiliki sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Regulasi ini tersusun mulai dari tingkat Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati, yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak secara komprehensif.

Sejak tahun 2011, Gresik telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, layanan kesehatan, psikologis, dan hukum bagi korban kekerasan, termasuk anak. Penguatan regulasi kemudian dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini menegaskan sistem perlindungan anak secara menyeluruh, meliputi hak dan kewajiban anak, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan layanan, hingga penganggaran dan pengawasan. Kehadiran perda ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi sudah menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Untuk memperkuat implementasi, Bupati Gresik juga menerbitkan sejumlah Peraturan Bupati. Di antaranya, Perbup Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak, yang memastikan lingkungan pendidikan di Gresik aman dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan. Pada tahun 2025, terbit pula Perbup Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, yang menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka perkawinan usia anak. Selain itu, ada Perbup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak, yang menghadirkan wadah informasi, edukasi, sekaligus ruang aman bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya.

Upaya regulatif tersebut juga diperkuat dengan inisiatif di tingkat akar rumput melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, dengan mendorong partisipasi masyarakat,

membangun lingkungan yang aman dan inklusif, serta memastikan perempuan dan anak memiliki akses terhadap informasi, layanan, dan ruang partisipasi publik. Kehadiran DRPPA di sejumlah desa di Gresik menjadi bentuk konkret penerapan peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain pembentukan DRPPA Kabupaten Gresik juga membentuk Satgas pencegahan perkawinan anak dengan kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, regulasi-regulasi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, keberhasilan implementasi peraturan tersebut tentu membutuhkan dukungan semua pihak, baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, agar perlindungan anak benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

Di Kabupaten Gresik, upaya peningkatan pemberdayaan gender terus dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan daerah. Melalui data yang tersedia, terlihat bahwa akses perempuan terhadap pendidikan relatif terjaga dengan baik, ditandai dengan tingkat partisipasi sekolah yang cukup tinggi di berbagai jenjang. Hal ini menjadi modal utama bagi peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya perempuan di masa depan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah berupaya membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan, salah satunya melalui Musrenbang Perempuan yang secara khusus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi, terlibat dalam perencanaan, serta memastikan isu gender masuk dalam kebijakan daerah.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPG Kabupaten Gresik pada tahun 2023 tercatat sebesar 91,01%, mendekati angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan relatif baik, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan terus meningkat. Upaya peningkatan IPG di Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa strategi utama:

1. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia perempuan, melalui program wajib belajar, beasiswa, serta pengembangan fasilitas pendidikan yang ramah gender. Contoh adanya Program SEKOPER (Sekolah Perempuan).
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan, meliputi pelatihan keterampilan, dukungan terhadap UMKM perempuan, dan akses terhadap modal serta peluang usaha produktif melalu Program Bunda Puspa
3. Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan umum yang ramah perempuan, untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental perempuan.
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan dan Musrenbang Perempuan, sehingga program pembangunan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
5. Penguatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun struktur pemerintahan, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis.

Selain Upaya diatas Pemerintah Kabupaten Gresik juga Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Gresik yang mengatur anggaran gender Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang terbit untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah memastikan anggaran daerah bermanfaat bagi semua gender dengan menganalisis kebutuhan unik setiap orang, serta mengarahkan alokasi sumber daya secara lebih adil untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan IPG sebagai bagian dari pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

2.1.2.6.1 GEDSI

GEDSI adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kesetaraan Gender,

Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Ini adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan implementasi kebijakan. Lebih detailnya, GEDSI mencakup:

1. Kesetaraan Gender: Memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama.
2. Disabilitas: Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, serta tidak mengalami diskriminasi.
3. Inklusi Sosial: Menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan atau rentan, agar dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

GEDSI menjadi penting karena membantu mengatasi berbagai hambatan dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menerapkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam pembangunan. Adapun upaya dan program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG):
   a. Penetapan Regulasi PUG pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
   b. Penetapan regulasi daerah yang mendorong penyusunan anggaran responsif gender (ARG) di setiap perangkat daerah yakni Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;

c. Pelaksanaan analisis Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai dasar penyusunan program/kegiatan yang sensitif gender; dan
d. Program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan akses pembiayaan UMKM Perempuan seperti pada Program Bunda Puspa yang termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa.

2. Perlindungan Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak:
   a. Penetapan regulasi tentang perlindungan anak pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   b. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlandaskan prinsip nondiskriminasi;
   c. Mendorong terbentuknya Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan untuk memberikan ruang partisipasi anak dan Perempuan dalam pembangunan; dan
   d. Program pencegahan perkawinan usia anak dengan pembentukan Satgas pencegahan perkawinan anak dan penguatan forum anak di tingkat kabupaten hingga desa.
3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas:
   a. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemberian bantuan sosial alat bantu adaptif berkelanjutan;
   b. Penyaluran alat bantu (kursi roda, kaki/tangan palsu, alat bantu dengar, dll.) serta layanan permakanan bagi penyandang disabilitas; dan
   c. Program peningkatan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran produk disabilitas.
4. Inklusi Sosial dalam Program Perlindungan Sosial:
   a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang memperluas penerima manfaat kepada lansia dan penyandang disabilitas;

b. Bantuan sosial permakanan untuk kelompok rentan;
c. Penguatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang inklusif dan berbasis pada data desa/kelurahan.

5. Peningkatan Akses Layanan Publik yang Inklusif
   a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang ramah difabel (akses kursi roda, jalur disabilitas, layanan digital inklusif) seperti di taman, halte, trotoa, dan tempat wisata;
   b. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan inklusif bagi anak perempuan, anak disabilitas, dan keluarga miskin melalui UPT Layanan Pendidikan ABK Gresik dan Sekolah Rakyat;
   c. Program Antar-Jemput Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus;
   d. Transformasi Posyandu untuk Pelayanan Masyarakat yang Lebih Baik; dan
   e. Layanan Administrasi Kependudukan yang Mudah Diakses di satu tempat pada Mall Pelayanan Publik.
6. Pemberdayaan dan Partisipasi Kelompok Rentan
   a. Penguatan kapasitas organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas agar lebih aktif dalam advokasi kebijakan;
   b. Pemberdayaan Perempuan melalui Program SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita) ang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, terutama dari kelompok rentan; dan
   c. Pelibatan forum anak, forum disabilitas, dan kelompok masyarakat sipil dalam musrenbang maupun evaluasi pembangunan.

2.1.2.7 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, tetapi tetap bekerja dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Mereka memiliki kemampuan kerja yang sama dengan karyawan lain, meskipun mengalami keterbatasan tertentu. Diskriminasi disabilitas dalam pekerjaan terjadi ketika seseorang yang memiliki disabilitas (baik fisik,

mental, atau kognitif) diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki disabilitas dalam hal kesempatan kerja, promosi, atau lingkungan kerja. Ini bisa termasuk penolakan untuk dipekerjakan, penolakan untuk promosi, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hak dalam Bekerja di sektor formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan mempekerjakan mereka di sektor formal.

Pemerintah Kabupaten Gresik menaruh perhatian besar terhadap pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan kelompok rentan ini. Salah satu langkah strategis adalah terbitnya Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu Adaptif Berkelanjutan untuk Penyandang Disabilitas, yang menjadi payung hukum dalam penyediaan kursi roda, alat bantu dengar, kaki dan tangan palsu, serta berbagai sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan individu. Selain regulasi, Dinas Sosial Kabupaten Gresik secara berkelanjutan menyalurkan bantuan sosial berupa alat bantu adaptif, memberikan layanan permakanan khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang memperluas sasaran penerima manfaat. Program tersebut tidak hanya membantu dari aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat akses mereka terhadap layanan dasar.

Upaya pemberdayaan juga diarahkan pada peningkatan kemandirian penyandang disabilitas. Melalui kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong pengembangan pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, serta fasilitasi akses pemasaran produk yang dihasilkan. Di samping itu, langkah-langkah konkret dilakukan untuk memperkuat aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta

peningkatan kapasitas organisasi penyandang disabilitas agar dapat lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

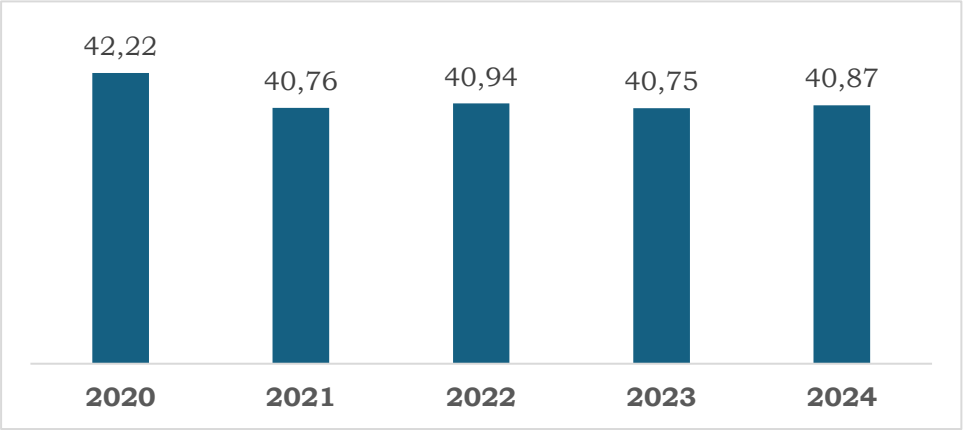

Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.34, Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan yang stabil dari tahun

2020 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam struktur demografis wilayah tersebut. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan tercatat sebesar 42,22%, yang kemudian menurun menjadi 40,76% pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut dengan angka 40,94% pada tahun 2022, dan tetap relatif stabil pada tahun 2023 dengan sedikit penurunan menjadi 40,75%. Pada tahun 2024, Rasio Ketergantungan sedikit meningkat menjadi 40,87%, yang menunjukkan adanya sedikit perubahan dalam struktur penduduk, tetapi tetap berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan padakriteria:

a. Dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
b. Dapat diterapkan pada daerah lain.

Tabel 2.78 Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Inovasi Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3,549	43,04	48,40	45,92	54,43

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik pada Tabel 2.78 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak tahun 2021, yakni sebesar 43,04, kemudian meningkat menjadi 48,4 pada 2022, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 45,92 pada 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi mencapai 54,43.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah melalui pengembangan produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dua sektor prioritas yang menjadi fokus adalah perikanan (bandeng) dan pertanian (kunyit), yang keduanya memiliki potensi besar serta relevansi langsung dengan permasalahan utama daerah.

Permasalahan utama daerah dalam sektor perikanan adalah keterbatasan hilirisasi, rendahnya nilai tambah, serta fluktuasi harga yang merugikan nelayan. Melalui pengembangan bandeng sebagai produk unggulan, pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas budidaya, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Upaya ini diarahkan pada pengembangan produk olahan bandeng yang bernilai ekonomi tinggi, peningkatan akses pasar domestik maupun ekspor, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, pengembangan bandeng tidak hanya menjawab isu rendahnya nilai tambah, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nelayan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya diversifikasi produk, rendahnya pemanfaatan lahan potensial, serta minimnya industrialisasi hasil pertanian. Kunyit dipilih sebagai produk unggulan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik sebagai komoditas rempah, bahan baku industri jamu dan farmasi, maupun produk ekspor. Pengembangan kunyit diarahkan pada peningkatan kapasitas petani, penerapan sistem pertanian berkelanjutan, serta pembentukan klaster industri pengolahan. Dengan strategi ini,

diharapkan nilai tambah hasil pertanian meningkat, daya saing produk lokal menguat, dan kesejahteraan petani terdorong secara signifikan.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makanan dan minuman mengacu pada kontribusi nilai tambah dari sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar PDRB suatu wilayah dihasilkan dari aktivitas penyediaan penginapan dan kuliner, serta dapat menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam perekonomian regional.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman adalah jumlah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman meliputi usaha penyediaan penginapan (hotel, akomodasi lainnya) dan usaha penyajian makanan serta minuman (restoran, katering).

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman merupakan perbandingan antara nilai PDRB dari sektor akomodasi dan makanan minuman dengan total PDRB daerah. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman memberikan gambaran tentang seberapa penting sektor akomodasi dan makan minum bagi perekonomian daerah. Indikator Pertumbuhan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman dengan membandingkan rasio dari tahun ke tahun, dapat diketahui tren pertumbuhan, dampak dari peristiwa (seperti pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi sektor ini), serta resiliensi sektor tersebut. Berikut merupakan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.79 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik dari Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penyediaan Makan dan Minum	1,33	1,35	1,36	1,42	1,44

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.3.2.3 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah Tamu Wisatawan mencerminkan tingkat daya tarik destinasi dalam menangkap peluang dari pasar domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadi indikasi bahwa destinasi wisata tersebut berhasil memenuhi harapan pengunjung, baik dari segi fasilitas, atraksi, maupun pelayanan. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sektor terkait, serta keberhasilan dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik. Selain itu, jumlah wisatawan yang terus meningkat berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, karena sektor pariwisata sering kali menjadi sumber utama pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi destinasi wisata untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga kelestarian lingkungan, dan berinovasi dalam menawarkan pengalaman baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional.

Tabel 2.80 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024

Wisatawan	Jumlah Wisatawan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	4.320	37	12.599	18.281	18.655
Domestik	2.098.995	2.106.133	4.120.683	4.280.847	4.513.723
Jumlah	**2.103.355**	**2.106.170**	**4.133.282**	**4.299.128**	**4.532.378**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2.80 wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.532.723 orang, meningkat sebesar 5,4% dari tahun 2023.

2.1.3.2.4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi sektor berbasis kreativitas, inovasi dan pemanfaatan nilai budaya terhadap total PDRB. Sektor ini berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi berkekelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. dengan kontribusi yang semakin besar, ekonomi kreatif dapat menjadi pendiring diserfikasi struktur ekonomi, serta memperkuat resiliensi terhadap perubahan global dan disrupsi teknologi.

Tabel 2.81 Jumlah PDRB ADHK Terhadap Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 20202-2024

Lapangan Usaha (Proksi Ekraf)	PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
Perdagangan Besar & Eceran	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08
Akomodasi & Makan Minum	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02

Lapangan Usaha (Proksi Ekraf)	PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Informasi & Komunikasi	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
Jasa Perusahaan	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
Jasa Lainya	250,75	264,62	314,89	329,93	354,30

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2025 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik (Kabupaten Gresik Dalam Angka 2025)**,** subsektor yang menjadi proksi ekonomi kreatif menunjukkan tren positif sepanjang 2020–2024. Industri pengolahan sebagai basis utama ekonomi kreatif (kuliner, kriya, fesyen) tumbuh dari Rp47.703,86 miliar menjadi Rp60.317,76 miliar, diikuti perdagangan besar dan eceran dari Rp11.509,21 miliar menjadi Rp14.649,08 miliar, serta akomodasi dan makan minum dari Rp1.158,99 miliar menjadi Rp1.504,02 miliar. Subsektor informasi dan komunikasi juga meningkat signifikan dari Rp5.113,94 miliar menjadi Rp6.497,16 miliar, sementara jasa perusahaan dan jasa lainnya turut mengalami kenaikan meski dalam skala lebih kecil. Perkembangan ini menunjukkan bahwa subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik tumbuh konsisten dan memiliki potensi besar dalam mendukung diversifikasi serta kontribusi terhadap PDRB daerah.

2.1.3.2.5 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ekonomi daerah pada level kabupaten. Indikator ini mencerminkan kapasitas sektor non pertanian dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung

transformasi struktur dalam pembangunan. Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan perubahan ekonomi daerah. dalam berbagai kenijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

2.1.3.2.6 ICOR

Nilai *Incremental Capotal Output Ratio* (ICOR) mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan antara tambahan kapital dan tambahan output. Nilai ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu investasi. Koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil menunjukkan kondisi investasi yang efisien, sedangkan koefisien ICOR yang bernilai negatif atau bernilai relatif besar menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi dalam suatu investasi. Pemenuhan investasi bisa dibantu oleh sektor swasta, bila APBD setempat tidak bisa menunjang pemenuhan kebutuhan investasi tersebut, maka dari itu sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi pemenuhan investasi yang ditetapkan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diperlukan adanya koefisien ICOR tiap sektor untuk menentukan kebutuhan investasi tiap sektor tersebut.

Tabel 2.82 Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik Tahun 2024

***Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)**	**Tahun**			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	-	-	-	4,96

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.3.2.7 Rasio Goverment Expenditure

Pada tahun 2024, Rasio Government Expenditure Kabupaten Gresik tercatat sebesar 1,91% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap keseluruhan perekonomian relatif kecil. Dengan kata

lain, dari setiap Rp100 nilai tambah ekonomi yang dihasilkan Kabupaten Gresik, belanja pemerintah daerah hanya menyumbang sekitar Rp1,91.

Nilai rasio ini mencerminkan bahwa peran fiskal pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi masih terbatas, sementara struktur perekonomian Gresik lebih banyak digerakkan oleh sektor industri, perdagangan, dan investasi swasta. Meski demikian, rendahnya rasio ini juga mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik secara optimal.

Rasio 1,91% juga menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dengan porsi yang relatif kecil terhadap PDRB, setiap rupiah belanja pemerintah harus diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Ke depan, tantangan bagi Kabupaten Gresik adalah meningkatkan kualitas belanja sekaligus memperluas ruang fiskal. Hal ini dapat ditempuh melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kerja sama investasi dengan sektor swasta, serta memastikan bahwa belanja modal memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi tersebut, meskipun rasio belanja pemerintah relatif kecil, pemerintah daerah tetap mampu memainkan peran signifikan sebagai katalis pembangunan di tengah dominasi aktivitas ekonomi oleh sektor swasta.

Tabel 2.83 Rasio Government Expenditure terhadap PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah	Rasio Government Expenditure (%)
2024	3.697.575.974.929,23	188.604,51	2,31
2023	3.418.637.234.689,96	176.261,00	2,21
2022	3.554.078.352.827,67	163.907,91	2,17
2021	3.192.751.693.289,33	144.656,07	1,94

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah	Rasio Government Expenditure (%)
2020	3.095.541.249.535,02	134.268,56	1,96

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.2.8 Pertumbuhan Usaha Mikro

Peningkatan Usaha Mikro menjadi krusial karena sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Gresik. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya lokal, peningkatan kewirausahaan juga memperkuat ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, potensi ekonomi berbasis kearifan lokal semakin optimal dan struktur ekonomi daerah semakin resilience serta adaptif terhadap tantangan global.

Tabel 2.84 Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase Usaha Mikro (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	1,92	1,08	1,92	33,81

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perinduatrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2.84, Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2019–2024. Dinamika ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Gresik, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta daya saing pelaku usaha. Penurunan tajam pada 2022 kemungkinan besar merupakan dampak residual pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi sektor usaha, sedangkan pemulihan pada 2023 mengindikasikan efektivitas strategi revitalisasi ekonomi. Namun, kecenderungan penurunan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa

pertumbuhan Usaha Mikro masih belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, termasuk penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta optimalisasi ekosistem bisnis guna mendorong pertumbuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

2.1.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin banyak penduduk yang bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga perekonomian rata-rata angkatan kerja akan membaik. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya menunjukkan jumlah angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, dibandingkan dengan seluruh penduduk usia produktif di suatu wilayah. TPAK belum dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai jumlah penduduk yang benar-benar bekerja dalam angkatan kerja di wilayah tersebut.

Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki	84,85	85,55	85,78	85,82	86,80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48,82	53,86	51,42	54,37	56,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61

Sumber: BPS Kabuapten Gresik, Tahun 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin baik Angkatan kerja Laki-laki maupun Perempuan menunjukkan trend positif yang selalu meningkat tiap tahunnya, sedangkan untuk TPAK secara keseluruhan juga

mengalami trend yang terus meningkat tiap tahunnya meskipun di Tahun 2022 sempatmengalami penurunan akibat dari pandemi covid-19.

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Kabupaten Gresik antara lain :

1. Budaya dan Tradisi (faktor kultural)

   Norma sosial di Gresik masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Stigma ini membuat banyak perempuan, terutama yang sudah menikah, lebih memilih mengutamakan peran domestik ketimbang berkarier di luar rumah. Akibatnya, motivasi perempuan untuk bekerja berkurang bahkan ada keluarga yang melarang perempuan bekerja.

2. Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga

   Perempuan memikul beban ganda: mengurus rumah tangga sekaligus menopang ekonomi keluarga. Kewajiban domestik, seperti mengasuh anak dan merawat keluarga, menghalangi mereka masuk ke sektor formal yang menuntut jam kerja panjang dan rigid. Ketidaktersediaan pilihan kerja fleksibel mempersempit peluang perempuan untuk masuk angkatan kerja.

3. Pendidikan dan Keterampilan

   Rata-rata lama sekolah masih relatif rendah bagi sebagian perempuan, khususnya di perdesaan. Minimnya pelatihan keterampilan teknis maupun digital mengurangi daya saing perempuan untuk masuk ke industri modern. Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung lebih mudah memasuki pasar kerja formal dengan posisi dan kualitas pekerjaan lebih baik. Faktor pendidikan menjadi determinan penting dalam membuka akses perempuan ke pasar kerja formal.

4. Struktur Pasar Kerja dan Hambatan Ekonomi

   Struktur ekonomi Gresik didominasi industri berat dan padat modal (semen, petrokimia, logam) yang lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Kesempatan kerja formal yang ramah perempuan masih terbatas, misalnya dengan jam kerja fleksibel,

lingkungan kerja aman, dan adanya perlindungan maternitas. Walaupun pertumbuhan ekonomi Gresik positif (7,38% di 2022; 4,62% di 2023), pertumbuhan ini tidak otomatis menciptakan peluang kerja yang inklusif bagi perempuan.

5. Upah dan Kondisi Kerja

   Upah minimum yang meningkat bisa mendorong perempuan masuk pasar kerja karena insentif finansial lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya tidak selalu berpengaruh signifikan karena faktor non-ekonomi (budaya, peran ganda, akses kerja) lebih dominan dalam memengaruhi keputusan perempuan bekerja.

6. Akses Internet dan Informasi

   Internet membuka peluang perempuan untuk mengakses informasi, literasi digital, dan kerja berbasis online. Bagi perempuan muda di Gresik, hal ini menjadi penunjang signifikan untuk keterlibatan di angkatan kerja. Namun, kesenjangan digital masih ada, terutama di wilayah perdesaan dengan infrastruktur terbatas.

7. Kesehatan dan Jaminan Sosial

   Kondisi kesehatan dan kepemilikan jaminan kesehatan atau jaminan sosial kerja berpengaruh terhadap partisipasi kerja perempuan. Perempuan tanpa jaminan menghadapi risiko finansial lebih besar, sehingga memilih untuk tidak bekerja atau hanya bekerja informal demi fleksibilitas.

Beberapa upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Kabupaten Gresik antara lain :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

   Pemerintah daerah bersama lembaga terkait telah melaksanakan program peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Bentuk kegiatan antara lain pelatihan vokasional melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Tenaga Kerja, meliputi keterampilan tata boga, menjahit, hingga digital marketing. Tujuan dari kegiatan ini yakni membekali perempuan dengan kompetensi

praktis sehingga mampu memasuki pasar kerja maupun berwirausaha secara mandiri dari rumah.

2. Kebijakan Perlindungan dan Fasilitasi Pekerja Perempuan

   Evaluasi dan penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan kepentingan pekerja perempuan. Penyediaan fasilitas ramah gender, misalnya tempat penitipan dan perawatan anak di lingkungan kerja, serta jaminan perlindungan maternitas.

3. Penguatan Akses Lapangan Kerja Formal Ramah Gender dan Peningkatan Akses Literasi Digital

   Perusahaan di kawasan industri didorong untuk membuka kesempatan kerja yang inklusif bagi perempuan. Fokus pengembangan diarahkan pada sektor non-produksi, seperti administrasi, keuangan, pelayanan pelanggan, dan logistik, yang lebih memungkinkan keterlibatan tenaga kerja perempuan. Program literasi digital yang ditujukan bagi perempuan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin berbasis teknologi

4. Kampanye Kesetaraan Gender dan Sosialisasi Partisipasi Ekonomi Perempuan dan Sinergi Lintas Sektor

   Sosialisasi melalui forum PKK, posyandu, serta kegiatan desa untuk mengubah pola pikir masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengurangi hambatan kultural yang membatasi peran perempuan di dunia kerja. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi ini ditujukan agar program pemberdayaan perempuan berjalan berkelanjutan dan berdampak luas.

Dampak yang diharapkan dari berbagai kegiatan di atas adalah perempuan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi keluarga maupun daerah dan meningkatkan kesetaraan gender di pasar kerja lokal serta memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiriin dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia adalah indikator yang mengukur sejauh mana sektor ekonomi kelautan dan pesisir dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Indeks ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi, sehingga ekonomi dapat berkembang tanpa merusak ekosistem laut. ndeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah pesisir di Indonesia menerapkan prinsip ekonomi biru, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi maritim terbesar di Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang

lebih dari 2.800 km, provinsi ini memiliki sektor perikanan, pariwisata bahari, dan industri maritim yang menjadi pilar utama ekonomi pesisir. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, tantangan keberlanjutan juga menjadi perhatian, sehingga indeks ekonomi biru menjadi tolak ukur penting dalam menilai pengelolaan sumber daya laut di Jawa Timur.

2.1.3.3.3 Intensitas Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi di Indonesia memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, provinsi ini mulai mempercepat transisi energi dengan meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer. Saat ini, Jawa Timur telah mengembangkan berbagai proyek energi bersih, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gresik dan Sidoarjo, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Arjuno dan Ijen. Selain itu, pemanfaatan biomassa dari limbah pertanian dan biogas dari peternakan juga menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kontribusi EBT.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas bandwith besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat

digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata.

2.1.3.4.1 Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Dalam menyusun perencanaan nasional ke depan yang sinergis akan memerlukan acuan ukuran yang bisa dimonitor bersama. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Tabel 2.86 Indeks Transformasi Digital Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	49,89	51,64	53,96	55,34	56,38
Nasional	43,67	44,83	47,14	48,40	49,20
Kabupaten Gresik	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, Tahun 2022

Pada periode 2018-2022, sebanyak 10 Provinsi mengalami peningkatan klasifikasi dari C ke B dalam Indeks TDN, termasuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Salah satu provinsi yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah Provinsi Jawa Timur, dengan pendorong utama perolehan skor Indeks TDN adalah Pilar Pemerintah, yang mencatatkan skor 69,85 dan masuk dalam klasifikasi B (Baik). Selain Pilar Pemerintah, Pilar Jaringan dan Infrastruktur juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan skor Indeks TDN Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Komdigi tahun 2022, sekitar

94,61% wilayah Jawa Timur sudah tercakup jaringan 4G, yang mendukung kemajuan dalam sektor infrastruktur digital.

Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian untuk perbaikan lebih lanjut, terutama pada Pilar Bisnis dan Pilar Masyarakat. Pada Pilar Bisnis, skor yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor fundamental, seperti lingkungan bisnis yang kurang kondusif dan kurangnya perkembangan iklim investasi. Meskipun demikian, perkembangan startup lokal dan adopsi teknologi digital di sektor usaha sudah menunjukkan kemajuan. Di sisi Pilar Masyarakat, terdapat kekurangan pada dukungan terhadap literasi digital, keterampilan digital, dan kualitas pendidikan vokasi yang perlu diperbaiki. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu fokus pada penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan digital yang merata untuk seluruh kelompok masyarakat serta menyusun kurikulum digital yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk mendukung kemajuan sektor ini di masa depan.

2.1.3.4.2 Indeks Masyarakat Digital

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan dilaksanakan setiap tahun. Berikut merupakan capaian IMDI di Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.87 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

Wilayah	Tahun		
	2022	2021	2022
Kabupaten Gresik	31,15	44,80	48,38

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, IMDI Kabupaten Gresik mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Kabupaten Gresik dinas yang mengampu IMDI berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.3.4.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indeks komposit yang menggabungkan 11 indikator, yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: Akses dan Infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, dan Keahlian TIK. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau dan membandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu, serta untuk mengukur kesenjangan digital antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mengukur potensi pembangunan TIK dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan, berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia di masing-masing wilayah.

Sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Timur terus mengembangkan infrastruktur dan ekosistem digitalnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan TIK. Dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan pendidikan, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung daya saing provinsi ini. Akses internet di Jawa Timur semakin luas, berkat proyek perluasan jaringan fiber optik dan penguatan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah pedesaan. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menjadi pusat perkembangan ekonomi digital, didukung oleh ekosistem startup, e-commerce, dan layanan berbasis teknologi. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital, melalui pelatihan untuk UMKM agar dapat beradaptasi dengan bisnis digital, serta program smart city yang diterapkan di beberapa kota. Selain itu, integrasi layanan publik berbasis digital semakin diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) didefinisikan sebagai perubahan dalam jumlah aset tetap suatu unit produksi, yang mencakup baik penambahan maupun pengurangan barang modal. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (baik baru maupun bekas), perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset dari sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer, atau barter barang modal ke pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Namun, kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan barang modal.

Tabel 2.88 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	32.2801,76	34.548,61	39.489,56	41.840,39	44.480,90
b. ADHK (Miliar Rupiah	22.624,65	23.038,88	24.466,84	25.806,50	27.047,97
Proporsi terhadap PDRB	24,43	23,91	24,09	23,74	23,58

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(% ADHB)					
Pertumbuhan (Persen)					
a. Total PMTB	-4,32	1,83	6,20	5,48	4,81

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

Tabel 2.89 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023.

Uraian	Tahun				
	2019	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ADHB (Miliar Rp)	14.457,09	16,00	17,81	16,34	15,91
ADHK 2010 (Miliar Rp)	14.937,10				
Proporsi Terhadap PDRB % ADHB	10,41	11,20	11,82	10,55	10,06

*) Angkia Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ini bertujuan untuk mengukur kinerja layanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Gresik serta mengetahui persepsi masyarakat dan tingkat kepuasan atas kinerja pembangunan infrastruktur. Selain itu juga untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga diperoleh rekomendasi atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kajian, capaian IKLI Tahun 2024 sebesar 89,62% (Kategori Kinerja Sangat Baik), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 89,04%. Indikator yang dinilai terdiri dari jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, Infrastruktur Jaringan Irigasi, Irigasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Infrastruktur Ruang Publik.

Tabel 2.90 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	87,39	89,04	89,62	89,71

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Perhitungan IKLI didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Bappeda melalui survei primer pengisian kuisioner terhadap 6 Indikator sebagaimana di atas dan dipengaruhi oleh 6 unsur yang terdiri dari 1) Kualitas; 2) Ketersediaan; 3) Kesesuaian; 4) Kontribusi terhadap perekonomian 5) Pemanfaatan; serta 6) Kontribusi terhadap pembangunan. Berdasarkan 6 unsur tersebut dilakukan pembobotan terhadap variabel komposit yang kemudian diperoleh nilai keseluruhan dan ketegori mutu pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2.1.3.6.2 Indeks Konektivitas

Indeks Konektivitas merupakan indikator baru yang akan diperhitungkan tahun 2025. Indikator tersebut untuk mengukur keterhubungan antarwilayah dan pemenuhan sarana prasarana penunjang sistem transportasi. Komposit indeks konektivitas terdiri atas indeks aksesibilitas, persentase kemantapan jalan, persentase lebar jalan yang memenuhi standar, persentase pemenuhan sarana dan prasarana terminal tipe B, persentase terpenuhinya sarana prasarana pelabuhan laut, persentase terpenuhinya sarana prasarana pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyebrangan, persentase pemenuhan fasilitas keselamatan perkeretapian.

Kemantapan jalan merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan infrastruktur wilayah, khususnya pada sektor pekerjaan umum sub-urusan jalan. Indikator ini menggambarkan tingkat kemantapan ruas jalan berdasarkan kondisi fisik dan rusak berat, yang dihitung dalam bentuk persentase jalan mantap terhadap total panjang jalan. Data kemantapan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah dan menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kondisi jalan Kabupaten Gresik memiliki tingkat kemantapan yang cukup tinggi, mencapai 70,74%

Tabel 2.91 Capaian Indikator Indeks Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024

Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	73,54	74,00	74,33	74,61	70,74

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada keluarga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan beberapa aspek utama, di antaranya adalah luas bangunan yang

memadai, ketersediaan akses air bersih, fasilitas sanitasi yang baik, serta tingkat keamanan yang terjaga. Kelayakan hunian ini sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang sehat dan nyaman bagi penghuni, dengan memastikan bahwa mereka memiliki lingkungan yang mendukung kebutuhan dasar seperti kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, rumah tangga dapat tinggal dengan lebih aman dan sejahtera, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.

Hunian layak memiliki empat kriteria antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses terhadap akses layanan sumber air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak. Indikator tersebut merupakan indeks komposit dalam mencapai hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ketahanan bangunan yang dimaksud adalah bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhin syarat. Sedangkan kecukupan luas tempat tinggal adalah luas lantai per kapita minimal 7,2 m2. Adapun perhitungan akses terhadap hunian layak dihitung dari jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dibagi dengan jumlah rumah tangga dan dikali seraturs persen.

Tabel 2.92 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik.

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	59,54	60,9	60,66	63,15	65,25
Jawa Timur	68,08	66,93	66,28	70,74	73,40
Kabupaten Gresik	80,25	71,30	72,00	78,00	81,47

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa akses terhadap rumah layak huni baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Walaupun ada penurunan di tahun 2021 dan tahun 2022

dikarenakan adanya penyesuaian jumlah rumah tangga dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Capaian di Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2021, angka akses rumah layak huni di Gresik tercatat 71,30% dan terus meningkat hingga mencapai 81,47% pada tahun 2024.

2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sejak tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur, hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam membangun daerah perdesaan. Seiring dengan hal tersebut, persentase desa mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hingga pada Tahun 2024 lebih dari separuh desa di Jawa Timur telah menjadi desa mandiri. Hal ini didorong oleh pulihnya kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pasca COVID-19, sehingga pembangunan di desa dapat berjalan lebih cepat.

Selanjutnya, mulai Tahun 2025 IDM digantikan oleh Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur kinerja pembangunan desa. Berbeda dengan IDM yang hanya meninjau tiga dimensi pembangunan (sosial, ekonomi dan lingkungan), pada Indeks Desa terdapat enam dimensi pembangunan yang ditinjau (1) Layanan Dasar, (2) Sosial, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan, (5) Aksesibilitas, dan (6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Sehingga desa mandiri berdasarkan Indeks Desa diinterpretasikan sebagai desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

Tabel 2.93 Persentase Desa Mandiri di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	9,02	19,29	36,26	52,05
Kabupaten Gresik	84,24	93,64	100,00	100,00

Sumber : Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Berikut merupakan tabel rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

Tabel 2.94 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik

URAIAN		2020		KENAIKAN	2021		KENAIKAN	2022		KENAIKAN	2023		KENAIKAN	2024	
KODE REKENING		TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH														
4.1.01	Pajak Daerah	631.745.430.000,00	677.106.005.845,15	-13,74	835.318.663.807,00	867.143.325.919,57	28,07	1.082.498.771.261,00	907.533.604.112,06	4,66	1.148.267.116.098,00	942.497.544.442,23	3,85	1.170.450.215.622,00	1.101.355.865.221,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.900.000.000,00	3.432.148.928,05	-3,91	5.000.000.000,00	3.875.010.190,59	12,90	5.200.000.000,00	4.030.506.375,63	4,01	6.500.000.000,00	5.639.185.066,00	39,91	10.000.000.000,00	7.783.058.019,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.080.000.000,00	1.116.974.183,60	-8,00	1.200.000.000,00	1.255.623.557,00	12,41	2.750.000.000,00	2.125.064.895,00	69,24	5.183.082.376,00	6.705.992.427,00	215,57	8.700.000.000,00	6.967.335.242,00
4.1.01.14	Pajak MBLB	2.500.000.000,00	2.509.957.600,00	-49,82	4.800.000.000,00	2.218.610.800,00	-11,61	8.000.000.000,00	2.251.649.925,00	1,49	20.000.000.000,00	3.840.891.875,00	70,58	8.000.000.000,00	4.352.435.000,00
4.1.01.15	PBB	105.000.000.000,00	122.889.265.628,00	1,73	130.000.000.000,00	132.192.298.604,00	7,57	140.000.000.000,00	148.984.819.094,00	12,70	195.000.000.000,00	168.121.466.475,00	12,84	250.000.000.000,00	204.389.112.455,00
4.1.01.16	BPHTB	190.000.000.000,00	214.008.204.638,00	-18,01	426.318.663.807,00	324.489.139.661,00	51,62	454.715.683.770,00	342.114.201.637,00	5,43	433.532.000.000,00	309.257.375.637,20	-9,60	435.000.000.000,00	407.576.657.510,00
4.1.01.19	PBJT														
4.1.01.19.01	PBJT Makanan-Minuman	21.260.000.000,00	17.999.276.639,43	-23,24	26.000.000.000,00	20.148.003.136,75	11,94	30.350.000.000,00	26.922.495.355,43	33,62	42.000.000.000,00	33.311.079.002,03	23,73	42.000.000.000,00	39.355.268.944,00
4.1.01.19.02	PBJT Tenaga Listrik	208.000.000.000,00	217.926.493.873,37	2,75	225.000.000.000,00	225.094.286.367,23	3,29	235.000.000.000,00	240.597.551.084,00	6,89	241.000.000.000,00	246.524.138.974,00	2,46	260.000.000.000,00	269.653.244.700,00
4.1.01.19.03	PBJT Jasa Perhotelan	4.500.000.000,00	5.030.187.787,70	-10,10	10.000.000.000,00	7.907.199.517,00	57,19	10.650.000.000,00	9.517.372.625,00	20,36	12.800.000.000,00	11.575.690.413,00	21,63	17.000.000.000,00	12.973.185.049,00

URAIAN		2020		KENAIKAN	2021		KENAIKAN	2022		KENAIKAN	2023		KENAIKAN	2024	
KODE REKENING		TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI
4.1.01.19.04	PBJT Jasa Parkir	5.000.000.000,00	4.135.270.918,00	-24,33	6.000.000.000,00	4.230.162.300,00	2,29	6.000.000.000,00	5.222.265.470,00	23,45	8.500.000.000,00	5.175.166.000,00	-0,90	3.500.000.000,00	3.346.693.618,00
4.1.01.19.05	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.360.000.000,00	1.039.985.654,00	-70,38	1.000.000.000,00	457.472.925,00	-56,01	3.300.000.000,00	2.078.159.911,00	354,27	3.900.000.000,00	3.171.687.573,00	52,62	4.500.000.000,00	4.058.945.384,00
4.1.01.20	Opsen PKB														
4.1.01.20.01	Opsen PKB	56.701.000.000,00	54.128.300.360,00	-35,44	112.787.800.475,00	94.644.185.328,00	74,85	109.488.532.006,00	72.164.342.320,00	-23,75	104.931.314.839,00	95.170.082.800,00	31,88	95.800.215.622,00	88.657.318.300,00
4.1.01.21.	Opsen BBNKB														
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	31.444.430.000,00	32.889.939.635,00	-44,63	63.300.000.000,00	50.631.333.533,00	53,94	77.044.555.485,00	51.525.175.420,00	1,77	74.920.718.883,00	54.004.788.200,00	4,81	35.950.000.000,00	52.242.611.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.276.573.617,50	266,64	8.160.040.000,00	3.156.899.691,50	-3,65	15.000.000.000,00	11.178.082.553,00	254,08	114.000.000.000,00	35.512.171.084,00	217,69	100.000.000.000,00	53.731.339.249,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.95 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2024	1.101.355.865.221,00	188.604,51	0,58
2023	942.497.544.442,23	176.261,00	0,53
2022	907.533.604.112,06	163.907,91	0,55
2021	867.143.325.919,57	144.656,07	0,60
2020	677.106.005.845,15	134.268,56	0,50

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2025

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil namun konsisten, berada pada kisaran 0,50% hingga 0,60%. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,50%**,** kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,60%**.** Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,55%, dan kembali turun di tahun 2023 pada angka 0,53%**.** Namun demikian, pada tahun 2024 rasio ini kembali meningkat menjadi 0,58%**.**

Perkembangan ini mencerminkan bahwa meskipun penerimaan pajak daerah secara nominal terus meningkat setiap tahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik juga cukup signifikan sehingga kontribusi pajak daerah terhadap PDRB relatif stabil di bawah 1%. Kondisi ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah agar perannya terhadap perekonomian daerah dapat semakin besar di masa mendatang.

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga

Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).

Tabel 2.96 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Inflasi	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
	0,81	0,60	0,44	1,85	0,81

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.3.7.3 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

Sektor keuangan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus (penabung dan investor) ke pihak yang membutuhkan dana (peminjam dan pelaku usaha). Efektivitas intermediasi ini menentukan sejauh mana sektor keuangan dapat mendukung produktivitas, investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan terdiri dari 3 indikator, Total

Dana Pihak Ketiga/PDRB, Aset Dana Pensiun/PDRB, Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi, Total Kredit/PDRB.

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja. Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 94 regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. Nilai transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

2.1.3.7.4 Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai enabler dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.97 Tingkat Inklusi dan Keuangan di Jawa Timur dan Nasional

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	-	92,99	-	-
Nasional	-	85,11	-	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata,

pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten tahun 2024 tercatat sebesar 85,55 dengan predikat A. Capaian tersebut mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien dalam mewujudkan visi pemerintahan berkelas dunia yaitu pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan pelayanan publik yang prima. Tahun 2024 merupakan akhir dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dengan konsep Dynamic Governance yang berfokus pada pelaksanaan Double Track (Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik). Selanjutnya konsep Reformasi Birokrasi akan ditekankan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan Human Base Public Governance dengan mengembangkan Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital Structure, Digital Process, Digital Infrastructure dan Digital Service. Berikut ini merupakan realisasi dari Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik hingga nasional selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana berikut:

Tabel 2.98 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Gresik	69,40	69,47	68,93	86,84	85,55

Sumber : Kemenpan RB, Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Gresik terus menunjukkan progres yang sangat positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sejak beberapa tahun terakhir, Gresik berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi secara signifikan, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang lebih

baik. Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Pemerintah Kabupaten Gresik dihadapkan pada berbagai tantangan. Proses reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan administratif, namun merupakan transformasi menyeluruh terhadap pola pikir, tata kelola, serta budaya kerja yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah perlunya memastikan seluruh indikator keberhasilan dapat mendukung tercapainya dampak tematik, memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah, serta memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari pengawasan, penganggaran, dan inovasi. Guna menjawab tantangan yang ada, Pemerintah kabupaten Gresik berupaya untuk menguatkan Komitmen Pimpinan dan Kepemimpinan Perubahan, menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan yang lebih berdampak pada capaian indikator RB tematik, serta melakukan penguatan Monitoring dan Evaluasi Indeks RB.

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Pada tahun 2024 capaian IRH Provinsi Jawa Timur sebesar 98,12. Namun di Kabupaten Gresik indikator Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang baru digunakan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sehingga belum ada realisasi maupun capaian yang bisa ditampilkan.

2.1.4.1.3 Indeks Integritas Nasional (KPK)

Indeks Integritas Nasional (SPI) adalah skor yang dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan mengukur dan memetakan tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Skor ini penting untuk mengetahui efektivitas upaya pencegahan korupsi dan sebagai dasar perumusan kebijakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Perhitungan Indeks Integritas Nasional berdasarkan kategori sebagai berikut :

00.00 - 67,90 : Sangat Rentan

68,00 – 73,60 : Rentan

73,70 – 77,40 : Waspada

77,50 – 100 : Terjaga

Perhitungan Indeks Intergritas Nasional (IIN) Kabupaten Gresik dari KPK selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana berikut:

Tabel 2.99 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Integritas Nasional (IIN)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	74,26	70,21	74,67	59,78

Sumber : Komisi Pemberentasan Korupsi, Tahun 2025

Indeks Intergritas Nasional didapat dari 3 (tiga) nilai diantaranya nilai internal, nilai eksternal, dan nilai eksper. Pada nilai internal berkaitan dengan 7(tujuh) dimensi antara lain perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, transparansi, dan sosialisasi antikorupsi. Nilai eksternal berkaitan dengan 3 (tiga) dimensi antara lain upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai, dan

transparansi dan keadilan, sedangkan untuk nilai eksper berkaitan dengan dimensi integritas instansi. Pada Tahun 2024, Kabupaten Gresik mengalami penurunan dalam capaian Indeks Integritas Nasional dikarenakan beberapa dimensi yang mengalami penurunan diantaranya pada pada nilai internal yakni dimensi pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas; nilai eksper pada integritas instansi. Pemerintah Kabupaten Gresik terus berbenah dalam meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, meningkatnya sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas.

2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Penerapan SPBE berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif, Oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Dalam Pasal 2 Perpres SPBE juga tertuang bahwa SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Tabel 2.100 Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : Kementrerian PAN RB, Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 4,32 dengan Predikat Memuaskan. Capaian Kabupaten Gresik naik 0,04 poin dari tahun 2023 dengan perolehan nilai 4,28. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik yang berkinerja tinggi.

Tabel 2.101 Hasil Penilaian Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024

NAMA INDEKS	2023	2024
SPBE	4.28	4.32
Kebijakan Internal SPBE	**5.00**	**5.00**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5.00	5.00
Tata Kelola SPBE	**3.90**	**3.70**
Perencanaan Strategis SPBE	3.00	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.50	4.00
Penyelenggara SPBE	4.50	4.00
Manajemen SPBE	**2.82**	**3.18**
Penerapan Manajemen SPBE	3.00	3.38
Pelaksanaan Audit TIK	2.33	2.67
Layanan SPBE	**4.82**	**4.88**
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	4.70	4.80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5.00	5.00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Gambar 2.35 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2023

Gambar 2.36 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023 dan 2024 di atas terlihat bahwa beberapa aspek mendapat nilai yang fluktuatif bahkan stagnan. Nilai stagnan terdapat pada aspek kebijakan internal SPBE dengan tingkat kematangan 5,00. Sedangkan pada aspek penilaian tata kelola SPBE menurun sebesar 0,20 poin ke tingkat kematangan 3,70 pada Tahun 2024. Adapun aspek manajemen dan layanan SPBE, keduanya mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan pada aspek manajemen SPBE dengan kenaikan sebesar 0,36 poin sehingga tingkat kematangan menjadi 3,18 di Tahun 2024. Aspek layanan SPBE juga mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin sehingga tingkat kematangan menjadi 4,88 pada Tahun 2024 dari Tahun sebelumnya yakni 4,82 poin. Beberapa rekomendasi perbaikan Penerapan SPBE dari Kementerian PANRB, diantaranya :

a. Memperkuat pelaksanaan audit TIK melalui penyusunan kebijakan audit yang lebih komprehensif dan fokus pada seluruh aspek SPBE, khususnya keamanan informasi dan infrastruktur;
b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait audit SPBE;
c. meningkatkan kapabilitas manajemen SPBE dengan menyusun panduan rinci untuk delapan area manajemen SPBE, terutama pada aspek manajemen aset TIK dan perubahan;
d. Integrasi layanan publik berbasis elektronik perlu diperkuat dengan memastikan interoperabilitas antar aplikasi dan sistem untuk mendukung efektivitas dan efisiensi layanan.

Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap dijalankan oleh instansi baik

kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh predikat Pelayanan Sangat Baik.

Indeks pelayanan publik merupakan indikator baru yang digunakan oleh Kabupaten Gresik mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sehingga belum ada realisasi maupun capaian yang bisa ditampilkan. Penerapan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui IPP, pemerintah dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada instansi pemerintah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, IPP berperan penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penegakan Perda yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan supremasi hukum, keadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi yang substansial. Persentase penegakan Perda mengacu pada proporsi Perda yang berhasil diterapkan dan ditegakkan secara efektif dibandingkan dengan total Perda yang ada. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penegakan Perda di Kabupaten Gresik ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Persentase Penegakan Perda diukur capaiannya dengan Penyelesaian Pelanggaran Perda. Berikut realisasi Persentase Penegakan Perda Tahun 2021-2024 :

Tabel 2.102 Capaian Aksi HAM Kabupaten Gresik Tahun 2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100	100

Sumber: Kementerian HAM, Tahun 2024

Berdasarkan dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Gresik maksimal yang menunjukkan bahwa semua pelanggaran Perda dapat diatasi dengan baik dan Perda dapat ditegakkan. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas aparat dalam melaksanakan ketentuan hukum di daerah yang tinggi. Melalui penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur penegak perda, serta partisipasi masyarakat, diharapkan capaian penegakan perda terus meningkat dari

tahun ke tahun sehingga mendukung terciptanya ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. RANHAM memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 merupakan penjabaran dari RANHAM untuk dilaksanakan dan dilaporkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Adapun tujuan pelaporan bagi daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan HAM di daerah (khususnya 4 kelompok sasaran: hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat);
2. Untuk menjawab permasalahan dan tantangan terkait implementasi RANHAM di daerah;
3. Untuk menilai capaian dan dampak pelaksanaan aksi ham di daerah (provinsi, dan kab/kota);
4. Sebagai bahan pelaporan capaian RANHAM kepada Presiden;
5. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM Internasional lainnya;
6. Sebagai bahan evaluasi penyusunan RANHAM dan penyempurnaan Aksi HAM pada periode berikutnya;
7. Sebagai bentuk perwujudan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di daerah.

Berikut merupakan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara lain:

Aksi 1 : Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah

Aksi 2 : Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum

Aksi 3 : Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Aksi 4 : Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Aksi 5 : Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.

Aksi 6 : Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai permenhub 98/2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.

Tabel 2.103 Capaian Aksi HAM Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	AKSI HAM	B-04	B-08	B-12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
1	Aksi 1	100	100	100	100
2	Aksi 2	100	90	100	96.7
3	Aksi 3	100	100	100	100
4	Aksi 4	100	100	100	100
5	Aksi 5	100	100	30	76.7
6	Aksi 6	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN		100	98.33	83.33	95.6

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Nilai capaian Aksi HAM sebesar 95,6, ini menunjukkan komitmen yang tinggi dan mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), juga menjadi bukti nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dan kendala pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2024:

1. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait Aksi HAM sebagai Program Prioritas Nasional yang merupakan program percepatan sehingga Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab terkadang bukan program rutin.
2. Kurang relevannya Ukuran Keberhasilan yang ditetapkan oleh pelaksana Rencana Aksi Nasional HAM yang berasal dari Pemerintah Daerah terhadap Kriteria Keberhasilan dari Target Aksi HAM.
3. Pelaksana Aksi HAM masih belum memahami terkait urgensi P5HAM oleh Pemerintah terhadap warga negara.

RANHAM adalah kewajiban negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), maka untuk mewujudkan P5HAM melalui Aksi HAM dibutuhkan komitmen pimpinan dalam menjalankan rencana aksi HAM. Selain itu dengan meningkatkan koordinasi dan pemahaman terkait Aksi HAM melalui rapat-rapat koordinasi Tim RANHAM Kabupaten dan Perangkat Daerah penanggungjawab masing-masing Aksi HAM.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 khususnya agenda ketangguhan diplomasi diharapkan mampu secara adaptif dan agile untuk menjawab tantangan. Ketangguhan diplomasi dapat ditempuh dengan peningkatan kelembagaan secara komprehensif dengan memperhatikan proses bisnis, organisasi, dan penerapan digitalisasi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui digitalisasi layanan yang terintegrasi merupakan hal yang harus

dilakukan dalam upaya untuk percepatan pembangunan. Dengan meningkatnya indeks SPBE maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya penilaian indeks lainnya seperti indeks korupsi dan kemudahan berusaha maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Arah kebijakan penguatan tata kelola organisasi pemerintah terkait reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi. Berikut merupakan realisasi SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024:

Tabel 2.104 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,55	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : KemenPAN-RB Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Indeks SPBE mengalami trend kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Kenaikan terbesar pada Tahun 2023 yakni sebesar 1,01 dari nilai 3,27 menjadi 4,28. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Gresik selalu diatas target yang ditetapkan sehingga ini menunjukkan komintmen Pemerintah yang serius dalam tata kelola organisasi pemerintah terkait reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya penggerak untuk perubahan. Melalui reformasi birokrasi tematik diharapkan perubahan yang dilakukan dapat dirasakan dan berdampak oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran yang disusun untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi serta kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas suatu wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. IDSD Tahun 2023, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdiri atas empat komponen

utama pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Dengan demikian, IDSD berfungsi sebagai acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.105 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Daya Saing Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	-	2,59	3,42	3,38	3,77

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2024

Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Gresik tercatat sebesar 2,59 akibat tekanan pandemi terhadap sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022, ketika indeks meningkat signifikan menjadi 3,42. Pada tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tercatat sebesar 3,38, dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 3,77.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.1.4.4.1.1 Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada jenjang Pendidikan dibagi dari TK hingga SMA. Pada tingkatan Pendidikan terbanyak dari segi siswa dan guru ada pada SD dengan jumlah sekolah negeri ataupun swasta sejumlah 76.040 siswa dan 4.975 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 15,28. Kemudian pada tingkatan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 34.287 siswa dan 2.764 guru dengan rasio murid terhadap guru 12,40. Sementara untuk SMA baik negeri maupun swasta sebanyak 19.855 siswa dan 1.727 guru. Sedangkan SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 20.334 siswa dan 1.699 guru. Sehingga rasio murid terhadap guru untuk SMA adalah 11,50 dan 11,97 untuk SMK.

Tabel 2.106 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	-	30	30
Driyorejo	-	62	62
Kedamean	-	20	20
Menganti	1	61	62

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Cerme	-	48	48
Benjeng	-	38	38
Balongpanggang	1	32	33
Duduksampeyan	-	23	23
Kebomas	-	45	45
Gresik	-	31	31
Manyar	1	38	39
Bungah	-	22	22
Sidayu	-	23	23
Dukun	-	27	27
Panceng	-	27	27
Ujungpangkah	-	21	21
Sangkapura	-	35	35
Tambak	-	21	21
Jumlah	3	604	607

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.107 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	23	5	28
Driyorejo	26	14	40
Kedamean	21	-	21
Menganti	26	13	39
Cerme	25	2	27
Benjeng	25	3	28
Balongpanggang	26	4	30
Duduksampeyan	16	-	16
Kebomas	20	6	26
Gresik	15	8	23
Manyar	16	4	20
Bungah	19	1	20
Sidayu	14	2	16

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Dukun	20	2	22
Panceng	16	1	17
Ujungpangkah	16	2	18
Sangkapura	36	2	38
Tambak	29	1	30
Jumlah	389	70	459

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.108 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	2	4	6
Driyorejo	2	8	10
Kedamean	1	3	4
Menganti	2	11	13
Cerme	2	3	5
Benjeng	2	4	6
Balongpanggang	3	2	5
Duduksampeyan	1	2	3
Kebomas	2	5	7
Gresik	4	7	11
Manyar	3	7	10
Bungah	1	10	11
Sidayu	4	2	6
Dukun	1	1	2
Panceng	1	5	6
Ujungpangkah	1	6	7
Sangkapura	2	3	5
Tambak	1	2	3
Jumlah	35	116	120

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.1.2 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially.*

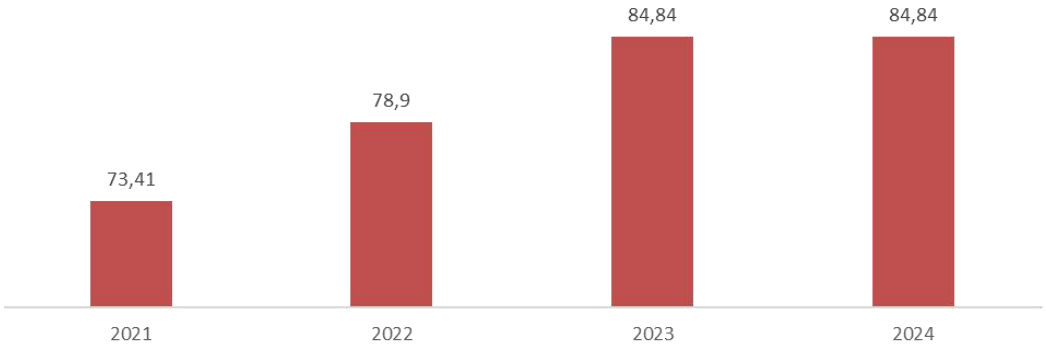

Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 13.98 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Gresik

diperkirakan dapat menempuh pendidikan formal selama hampir 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Gresik memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas, dan sebagian besar mungkin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

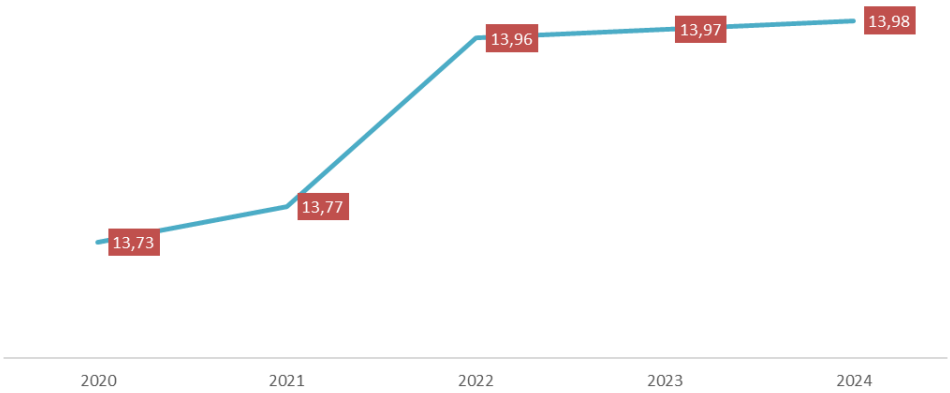

Gambar 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dijalani penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan RLS ini dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan mengalami penurunan. Batas maksimum RLS adalah 15 tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai adalah setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan batas minimum adalah 0 tahun, yang mengindikasikan tidak ada pendidikan formal yang dijalani. Berdasarkan data, Kabupaten Gresik menunjukkan angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun angka nasional. Pada tahun 2022, RLS di Provinsi Jawa Timur tercatat 8,03 tahun, dan di tingkat nasional sebesar 8,69

tahun, sementara Kabupaten Gresik telah mencapai 9,75 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik rata-rata telah menempuh pendidikan setara dengan kelas 3 SMP, yang mencerminkan tercapainya program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Selanjutnya, ini menunjukkan perlunya upaya untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA atau setara.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan angka RLS di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,13 tahun per tahun dari 2017 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk lebih meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, yang memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan, berdasarkan peluang mereka untuk tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya. HLS dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, dengan batas maksimum 18 tahun, yang menggambarkan harapan untuk anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. HLS ini digunakan untuk menilai kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, serta untuk mengetahui lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dalam suatu wilayah.

Tabel 2.109 Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	9,3	9,56	9,75	10,01	10,01
Jawa Timur	7,78	7,88	8,03	8,11	8,11
Nasional	8,49	8,54	8,69	11,04	11,04

Sumber : *BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025*

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) antara Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Gresik tercatat sebesar 9,3 tahun, dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 10,01 tahun pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan di Kabupaten Gresik, yang berhasil melampaui angka RLS Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Sementara itu, RLS di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dengan 7,78 tahun pada tahun 2020 dan mencapai 8,11 tahun pada tahun 2024. Di tingkat nasional, RLS juga mengalami peningkatan, dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur, dari 8,49 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,04 tahun pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun angka RLS Kabupaten Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

2.1.4.4.1.5 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.110 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI/sederajat	102,88	103,00	101,81	96,99	102,59
APK SMP/MTS/sederajat	93,68	94,99	94,51	75,02	94,12
APK anak yang mengikuti PAUD	75,95	80,00	82,93	85,28	83,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.1.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.111 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/ sederajat	96,67	97,00	96,00	96.99	97,10
APM SMP/MTS/ sederajat	74.77	75,00	74,24	75.02	76,12
APM perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	72,58	95,00	98,97	93.45	92,24
APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	0,00	75,00	97,68	92.8	91,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.1.7 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Gresik untuk tingkat SD dan SMP sederajat menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten

selama periode 2020 hingga 2024. Pada setiap tahun, angka kelulusan untuk SD sederajat tercatat mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa semua siswa di tingkat SD di Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Begitu pula dengan angka kelulusan di tingkat SMP sederajat, yang juga tetap mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan di Kabupaten Gresik dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua siswa.

Tabel 2.112 Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SD Sederajat	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP Sederajat	100	100	100	100	100

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025*

2.1.4.4.1.8 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kecakapan baca-tulis penduduk di suatu wilayah. Indikator ini mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, yang merupakan keterampilan dasar dalam memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mengakses peluang pendidikan dan pekerjaan. Semakin tinggi angka melek huruf di suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.113 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Angka Melek Huruf	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	97,28	97,20	98,03	98,15	98,31

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Melek Huruf di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan kemajuan dalam upaya peningkatan literasi di masyarakat. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 97,28%, dan angka ini sedikit menurun menjadi 97,20% pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022, angka melek huruf kembali meningkat, mencapai 98,03% pada tahun 2022, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya, dengan 98,15% pada tahun 2023 dan 98,31% pada tahun 2024.

2.1.4.4.1.9 Angka Partipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.114 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS SD Sederajat	100,00	101,00	104,71	111.85	107,44
APS SMP Sederajat	94,00	94,99	88,87	92.24	95,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang menarik, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada tingkat SD sederajat, APS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan angka 100,00 pada tahun 2020, APS SD sederajat terus menunjukkan kenaikan yang stabil, mencapai 101,00 pada tahun 2021, 104,71 pada tahun 2022, dan 111,85 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 107,44 pada tahun 2024.

2.1.4.4.1.10 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah rencana biaya dan pendanaan terperinci untuk satu periode tahun anggaran. Dokumen anggaran sekolah resmi ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan komite sekolah, kepala sekolah, dan penanggung jawab perumusan RAPBS untuk kemudian diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. RAPBS terdiri atas dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di dalamnya sudah mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, terutama untuk tahun anggaran selanjutnya. Pendapatan yang dimasukkan RAPBS hanya dana berupa uang yang akan diterima dan dikelola sekolah secara langsung. RAPBS ibarat pilar manajemen sekolah karena melalui dokumen inilah seluruh perencanaan kegiatan sekolah dilakukan, mulai dari hal teknis hingga non teknis. Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, maupun dana bantuan lain harus diatur secara transparan dan terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Tabel 2.115 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun 2021-2024

Persentase Sekolah yang merumuskan APBS (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di Kabupaten Gresik tercatat mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap sekolah di Kabupaten Gresik telah secara konsisten merumuskan dan mengelola APBS dengan baik, yang merupakan indikator penting dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat pendidikan.

2.1.4.4.2 Kesehatan

2.1.4.4.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur *(Age Spesifik Date Rate/ASDR)* diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mencapai 74,48 tahun mengalami kenaikan 0,24 dari tahun 2023. Berikut ini merupakan grafik Perkembangan Angka Harapan hidup Kabupaten Gresik

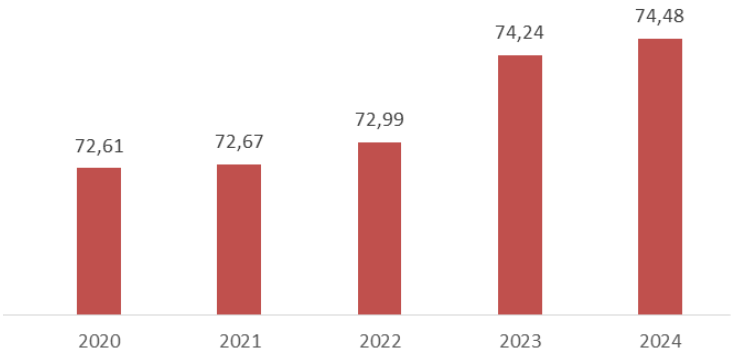

Gambar 2.39 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: Dinas Kesehatan KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan utuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan prasarana adalah merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan.

Tabel 2.116 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	34,38%	55,00%	100,00%	100,00%
Persentase RS terakreditasi	90,48%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada tahun 2021 dan 2022, pemenuhan sarana pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Gresik telah mencapai 100% di 32 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah tersebut memenuhi kriteria pelayanan yang optimal. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pada tahun 2022, sekitar 55% dari 32 Puskesmas berhasil memperoleh akreditasi Utama dan Paripurna, sementara RSUD telah memperoleh akreditasi Paripurna dengan 100%. Pencapaian akreditasi ini memastikan bahwa prosedur standar pelayanan kesehatan diterapkan dengan baik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh Puskesmas di Kabupaten Gresik berhasil meraih akreditasi Utama dan Paripurna, serta RSUD mempertahankan akreditasi Paripurna dengan 100%, mencerminkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan tentu didukung dengan faktor pendukung lainnya seperti tenaga kesehatan sebagaimana indikator berikut:

Tabel 2.117 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100%	100%	100%	100%
Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	61%	89%	90.47%	100%
Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	59,00%	61,30%	78.8%	100%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	84.24%	86.73%	86.9%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu daerah, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka kematian ibu mencerminkan keberhasilan dalam memperbaiki akses dan kualitas perawatan selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Sementara itu, angka kematian bayi yang lebih rendah menunjukkan peningkatan dalam upaya pencegahan penyakit dan pemberian perawatan kesehatan yang memadai untuk bayi. Meskipun ada kemajuan, angka kematian ibu dan bayi yang masih ada mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki

layanan kesehatan, pendidikan, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah kematian yang dapat dicegah.

Tabel 2. 118 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	316,37	94,18	79,50	77,59
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3,22	4,34	4,62	4,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang berbeda selama periode 2021 hingga 2024. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan signifikan, dari 316,37 pada tahun 2021 menjadi 94,18 pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 79,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini sedikit menurun lagi menjadi 77,59, mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya penanggulangan kematian ibu, yang dapat diatribusikan pada perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan maternal dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada tahun 2021, angka kematian bayi tercatat sebesar 3,22, kemudian meningkat menjadi 4,34 pada tahun 2022 dan 4,62 pada tahun 2023, sebelum turun kembali menjadi 4,34 pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit kenaikan dalam angka kematian bayi pada tahun 2023, secara keseluruhan angka ini tetap berada pada tingkat yang perlu perhatian untuk memastikan bahwa semua upaya dilakukan untuk mengurangi kematian bayi. Penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai angka yang lebih rendah lagi.

2.1.4.4.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan

Penyebab stunting menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan pendek atau stunting dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Selain disebabkan oleh lingkungan, stunting dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar stunting disebabkan oleh kekurangan gizi.

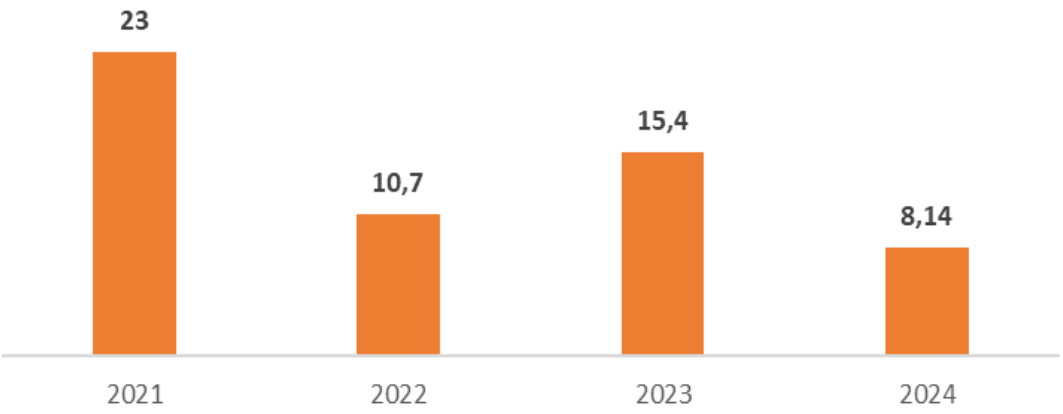

Gambar 2.40 Angka Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

Sumber: SSGI, Tahun 2021-2025

Stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 10,7%, namun pada tahun 2023 Kabupaten Gresik mengalami peningkatan ke angka 15,4 %. Angka ini jauh jika dibandingan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 17,7% dan Indonesia 21,5%. Penurunan angka tersebut diiringi dengan Penanganan Balita Stunting di Kabupaten Gresik yang sudah 100%.

Tabel 2.119 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase balita stunting mendapatkan penanganan (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.5 Penanganan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit. Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik dilakukan kepada Seseorang dengan penyakit menular Demam Berdarah, tuberkulosis dan Orang dengan HIV/AIDS.

Tabel 2.120 Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Case Fatality Rate (CFR) DBD	0,00	0,00	0,56	0,82
Penemuan Kasus Baru (CDR) TB	61,03	79,60	94,09	85,83
ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	37,64	86,75	89,51	81,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Penanganan penyakit menular di Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan beberapa indikator yang mencerminkan upaya penanggulangan yang dilakukan. Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Case Fatality Rate (CFR) tercatat 0,00 pada tahun 2021 dan 2022, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,56 dan 0,82 pada tahun 2024. Meskipun angka ini tetap relatif rendah, peningkatan CFR pada

tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengendalikan wabah DBD, terutama pada musim hujan.

Sementara itu, untuk penanganan Tuberkulosis (TB), Penemuan Kasus Baru (CDR) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dari 61,03 menjadi 94,09, meskipun sedikit menurun menjadi 85,83 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa deteksi kasus TB semakin baik, namun tantangan tetap ada dalam menurunkan angka penemuan kasus baru tersebut. Adapun untuk pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV), terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan angka mencapai 86,75%, meskipun sedikit menurun menjadi 81,54% pada tahun 2024.

A. HIV/AIDS

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan menargetkan sel-sel yang disebut sel CD4 atau sel T-helper. Sel-sel ini penting dalam membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang parah, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit yang umumnya tidak akan berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan yang sehat. AIDS adalah tahap lanjut infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh telah sangat melemah sehingga tubuh tidak dapat secara efektif melawan infeksi. Orang yang mengalami AIDS dapat mengalami berbagai infeksi serius dan masalah kesehatan kronis. AIDS juga dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Berikut merupakan grafik pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Gresik.

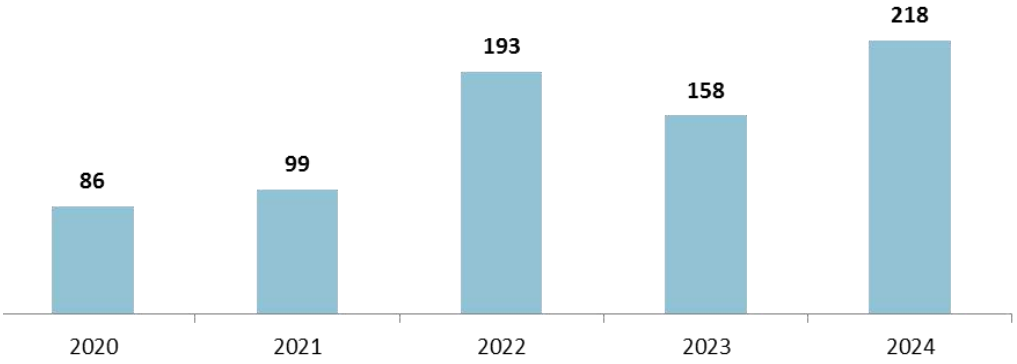

Gambar 2.41 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik menurun di tahun 2023. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik adalah adanya terapi pasien yang mengdap HIV/AIDS, sosialisasi, serta berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Gresik.

B. Demam Berdarah Dengue

Demam berdarah, juga dikenal sebagai demam dengue, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam berdarah umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Berikut merupakan grafik demam berdarah di Kabupaten Gresik.

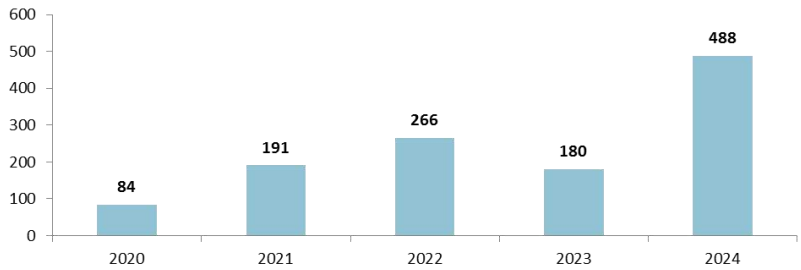

Gambar 2.42 Jumlah Demam Berdarah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, jumlah demam berdarah Kabupaten Gresik menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah demam berdarah mencapai 180 kasus. Pemerintah Kabupaten Gresik, seperti banyak pemerintah daerah lainnya di daerah tropis yang rentan terhadap demam berdarah, memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit ini seperti pengawasan dan pemantauan, pemberantasan sarang nyamuk, monitoring kasus, dan sosialisasi serta kampanye.

C. Tuberculosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menginfeksi paru-paru (tuberkulosis paru), tetapi juga dapat menyerang organ lain dalam tubuh seperti ginjal, tulang, dan otak. Tuberkulosis dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Berikut merupakan grafik pengidap TB di Kabupaten Gresik. Berdasarkan grafik , pengidap Tubercolosis yang ada di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, pengidap tubercolosis mencapai 3.633 orang. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengidap TB dengan cara pemberian vitamin dan sembako.

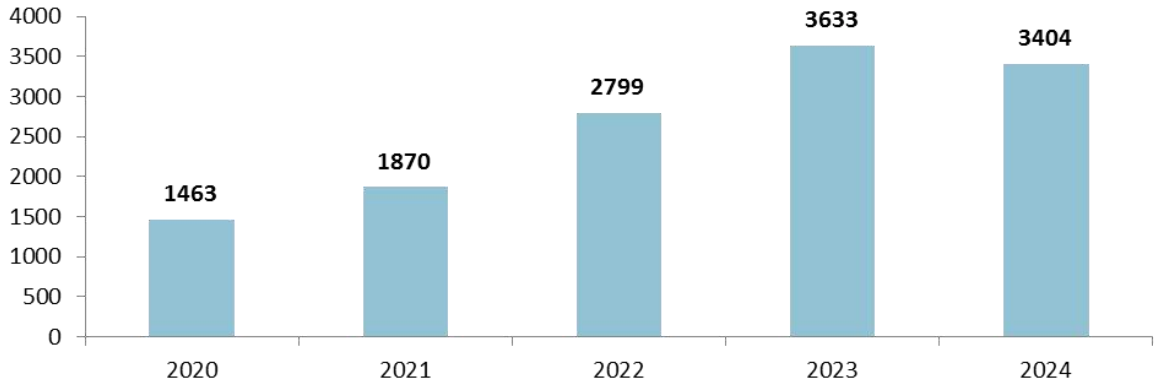

Gambar 2.43 Jumlah Pengidap Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

D. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Malaria dapat menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam tinggi, menggigil, nyeri tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan anemia berat, gangguan organ, dan bahkan kematian. Berdasarkan Publikasi BPS Kabupaten Gresik, Kasus malaria pada tahun 2024 sebanyak 7 kasus.

2.1.4.4.2.6 *Universal Health Coverage (UHC)*

Cakupan Kesehatan Universal (UHC) adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap individu dalam suatu populasi mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, mencakup promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, dengan kualitas yang tinggi dan biaya yang terjangkau. Tujuan utama dari UHC adalah untuk menghapus hambatan ekonomi dan sosial yang menghalangi akses terhadap layanan kesehatan, sehingga setiap orang dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan tanpa terkendala biaya. Di Kabupaten Gresik, penerapan UHC tercermin dalam tingginya persentase masyarakat miskin yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan tingkat kepesertaan mencapai 99,65% pada tahun 2022, yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat miskin di wilayah tersebut telah terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan, mewujudkan upaya pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 2.121 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS (%)	**Tahun**			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	100,00	99,65	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.7 Vaksinasi Covid-19

Tujuan utama pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh infeksi virus ini. Meskipun vaksin tidak dapat memberikan perlindungan 100% terhadap infeksi COVID-19, vaksin ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko munculnya gejala berat serta komplikasi yang dapat memperburuk kondisi pasien. Selain itu, vaksinasi juga berperan penting dalam menekan penyebaran virus di masyarakat, sehingga dapat mengurangi beban pada sistem kesehatan. Di Kabupaten Gresik, hal ini tercermin dalam capaian vaksinasi yang mencapai 100% dari jumlah penduduk, yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi. Selain itu, data juga menunjukkan penurunan signifikan dalam rasio pemeriksaan, yang turun dari 101,28% pada tahun 2021 menjadi 78,27% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan vaksinasi dalam mengurangi angka infeksi dan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, serta menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 memiliki dampak positif dalam mengendalikan pandemi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.122 Realisasi Pemeriksaan dan Pemberian Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu (%)	101,28	78,27	100,00
Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19 (%)	80,46	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI)

Selain menilai pelayanan di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan di tingkat Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren, dan Pos Kesehatan Desa dengan

mengukur persentase peningkatan tingkat kemandirian, yang dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 2.123 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	98,00%	95,65%	99,41%	100,00%
Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	64,70%	72,09%	64,00%	60,00%
Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	84,24%	71,38%	94,00%	87,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indikator peningkatan strata kemandirian pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi hasil dari tahun 2021 hingga 2024. Posyandu Balita (PURI) menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan peningkatan signifikan, dari 98% pada 2021, sedikit menurun menjadi 95,65% pada 2022, namun kembali naik menjadi 99,41% pada 2023 dan mencapai 100% pada 2024. Sebaliknya, Pos Kesehatan Pesantren (PURI) mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dari 64,70% pada 2021 menjadi 72,09% pada 2022, namun menurun menjadi 64% pada 2023 dan 60% pada 2024. Pos Kesehatan Desa (PURI) mengalami penurunan dari 84,24% pada 2021 menjadi 71,38% pada 2022, tetapi berhasil meningkat kembali menjadi 94% pada 2023 dan 87% pada 2024, mencerminkan usaha yang berkesinambungan meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan kemandirian di beberapa sektor.

2.1.4.4.2.9 Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029

Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) merupakan Dokumen arah kebijakan dan perencanaan penganggaran sektor kesehatan 5 (lima)

tahunan yang ditetapkan dalam Perpres yang disusun berdasarkan hasil koordinasi Menteri Kesehatan bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor kesehatan di pusat dan daerah, serta dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ruang lingkup meliputi Visi dan tujuan strategis, Indikator kinerja pembangunan (ISS, IKP, IK), Program dan kegiatan prioritas, Pembagian peran antar pemangku kepentingan serta kerangka pendanaan.

RIBK digunakan sebagai acuan perencanan daerah yang didalamnya terdapat pengaturan bagi Pemerintah Daerah untuk mencantumkan indikator kinerja RIBK di dokumen perencanaan daerah.

Adapun indikator – indikator pada RIBK yang termuat dalam Sasaran Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Usia Harapan Hidup;
2. Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total);
3. Angka Kematian Ibu (AKI);
4. Angka Kematian Ibu;
5. Angka Kematian Balita;
6. Prevalensi Stunting;
7. Cakupan Uhc;
8. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap;
9. Persentase Survei Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Sedangakan indikator indikator pada RIBK yang termuat dalam Indikator Program Perangkat Daerah antara lain :

1. Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri;
2. Treatment Success Rate TB;
3. Persentase RS terakreditasi.

2.1.4.4.2.10 Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Indikator pelayanan rumah sakit merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Penilaian terhadap indikator

pelayanan ini penting untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat memberikan perawatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Tabel 2.124 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Bed Occupancy Rate (BOR)	65,04	62,42	68.49	65,78
Average Lenght of Stay (ALOS)	5,57	4,46	4.66	4,48
Turn Over Internal (TOI)	3,6	2,53	2.04	2,2
Bed Turn Over (BTO)	35,44	55,32	56.25	56,74
Gross Death Rate (GDR)	139,25	105,04	102.04	99,1
Net Death Rate (NDR)	91,53	63,63	66.59	65,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM

Urusan Keciptakaryaan didukung oleh pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum secara kuantitas minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan kualitas parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum dihitung dengan jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target Pencapaian SPM

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tahun 2022 di Kabupaten Gresik sebesar 100 % terlayani.

Tabel 2.125 Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih dan Limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	39.45	38.47	41.8	43.24	44.34

Sumber : DCKPKP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian akses air minum/bersih mengalamai penurunan di tahun 2022 yakni sebesar 60,83%, hasil yang didapat untuk persentase ini masih jauh dari SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani. Turunnya capaian di tahun 2022 disebabkan beberapa kendala yaitu pada aspek teknis dimana kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada, sehingga persentase cakupan pelayanan air minum yang belum optimal di Kabupaten Gresik.

Masih belum optimalnya capaian layanan penyediaan akses air bersih/minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/*Sustainabele Development Goals* (SDGs) Indonesia Bappenas Tahun 2020, nilai SPM pengolahan air limbah diukur dengan indikator persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) yakni apabila menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik/IPALD

dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target pencapaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 sebesar 100 % tertangani. Capaian persentase sanitasi aman dan layak Kabupaten Gresik cukup baik, dimana capaian akses air limbah domestik Kabupaten Gresik tahun 2021 yang masuk dalam kategori akses layak sebesar 96,45%, sedangkan untuk capaian 2022 adalah sebesar 96,52% dan sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

Tabel 2.126 Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	55.160	39.367
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	6.370	2.818

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Gresik, Tahun 2025

Persentase Akses Air Bersih/Minum jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah mencapai 39,13% atau 158.360 rumahtangga dan Akses Air Bersih/Minum bukan jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 21,70% atau 87.820 rumahtangga. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, didukung dengan indikator Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 96,52% atau 390.335 rumahtangga dari total 404.702 rumahtangga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022.

2.1.4.4.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan nomenklatur salah satu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang pada suatu lahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ataupun oleh Bupati Gresik melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum disahkannya UUCK, nomenklatur untuk dokumen kesesuaian kegiatan dengan peruntukan ruang adalah Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Realisasi persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang berdasarkan dokumen SIPR dan KKPR adalah sebagai berikut.

Tabel 2.127 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020- 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang	100%	95%	99,11%	99,11%	109%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.3 Normalisasi Waduk

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Fungsi Waduk utamanya untuk untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Waduk antara lain sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk

budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Persentase waduk milik Pemerintah Daerah sebesar 6,41% pada tahun 2024 yang berhasil di normalisasi.

Tabel 2.128 Indikator Persentase Waduk yang Dinormalisasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Waduk yang dinormalisasi	2,56%	5,77%	6,41%	7.69%	6,41%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah. Hal ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani. Realisasi persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara pada tahun 2024 sebesar 7,43%. Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diprioritaskan untuk Program Prioritas Nawakarsa yaitu penanganan banjir Kali Lamong. Mengingat permasalahan banjir merupakan isu strategis yang berdampak langsung pada keselamatan, kenyamanan, serta produktivitas masyarakat. Prioritas ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam melindungi infrastruktur, mendukung ketahanan pangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, alokasi anggaran diarahkan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Tabel 2.129 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	16,24%	4,30%	7,60%	8,31%	7,43%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD-T merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman tahun 2024 sebesar 44,34% yang menurun dari tahun 2023 dengan persentase sebesar 54,62%.

Tabel 2.130 Indikator Prosentase Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	52,74	45,55	52,72	54.62	44.34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Ada 2 macam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yaitu :

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

Tabel 2.131 Indikator capaian akses layak air limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	94,44	94,87	96,52	100	100

Sumber : Dinas CKPKP dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/201/013/2025 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan

Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data panjang jalan di Kabupaten Gresik, terdapat 1.398 ruas jalan yang terdiri dari 3 ruas jalan provinsi sepanjang 24,6 km dan 1.395 ruas jalan kabupaten/kota sepanjang 1.538,7 km.

Tabel 2.132 Rekapitulasi dan Daftar Ruas Jalan Menurut Fungsinya

Kabupaten/ Kota	Jumlah				Sistem Primer					Sistem Primer			
	Ruas		Panjang (Km)		Panjang (Km)					Panjang (Km)			
	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	JKP 2	JKP 3	JKP 4	JLP	J.Ling.P	JAS	JKS	JLS	J.Ling. S
Kabupaten Gresik	3	1.395	24,557	1.538,71	21,079	3,478	255,275	658,185	503,031	11,880	60,594	14,333	35,409

Sumber: Dinas PUTR Provinsi Jawa Timur, Tahun 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban tanggung jawab terbesar dalam pengelolaan infrastruktur jalan berada pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Dari sisi sistem jaringan, panjang jalan primer lebih dominan dibandingkan jalan sekunder, dengan komposisi terbesar pada jalan lokal primer (658,2 km). Artinya, secara umum konektivitas antar pusat kegiatan utama relatif terlayani, namun distribusi akses di tingkat lokal masih terbatas, terutama jalan lokal sekunder yang hanya sepanjang 14,3 km. Oleh karena itu, peningkatan kualitas serta pemerataan penanganan ruas jalan kabupaten/kota menjadi penting, agar konektivitas antar wilayah, pusat kegiatan, dan permukiman dapat berjalan optimal serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial Masyarakat. Berikut merupakan realisasi Efektifitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024:

Tabel 2.133 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan		24,78	25,13	38,01	10,31

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Gresik Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indikator Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan menunjukkan trend yang positif sejak Tahun 2020 -2023 namun turun signifikan di Tahun 2024. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia di Tahun 2024 dialokasikan untuk kegiatan lain dan pada Tahun 2024 berfokus pada pelebaran jalan. Kondisi jalan di Kabupaten Gresik secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat kemantapan sebesar 70,74% atau sepanjang 400,85 km dalam kondisi baik dan sedang. Namun demikian, masih terdapat sekitar 29,25% jalan yang mengalami kerusakan, dengan dominasi rusak ringan sepanjang 146,32 km dan rusak berat 19,45 km. Tingginya proporsi jalan rusak ringan menunjukkan perlunya perhatian pada pemeliharaan rutin dan berkala agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya perbaikan lebih besar. Dengan strategi pemeliharaan yang tepat, kualitas infrastruktur jalan dapat dipertahankan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.134 Kondisi Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2024

KONDISI	PANJANG (KM)	PERSENTASE (%)
Baik	273,66	48,30
Sedang	127,19	22,45
Rusak Ringan	146,32	25,82
Rusak Berat	19,45	3,43
Kemantapan	400,85	70,74

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.1.4.4.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 alokasi SPM urusan Perumahan dan Permukiman ditekankan kepada 2 indikator kinerja utama yakni Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui rehabilitasi, pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah. Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan ketentuan terjadi pada saat masa pasca bencana yang ditetapkan dalam surat penetapan bencana dari bupati/walikota, serta terdapat dampak bencana yang merugikan bagi masyarakat. Mutu pelayanan terhadap spm persentase capaian penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah dihitung berdasarkan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan dilakukan pembangunan pembali maupun rehabilitasi dan atau direlokasi.

Tabel 2.135 SPM Penyediaan Rumah layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Output	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
Fasilitasi penydaiaan rumah layah huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

Sumber : SPM Kabupaten Gresik, Tahun 2021 – 2024

Pada tahun 2022 data capaian spm penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tercatat sebesar 100 %, Dimana hasil pencatatan data dilapangan terdapat total 4 jiwa yang rumahnya terdampak bencana angin puting beliung yang berlokasi di Desa Pucung, Hulaan dan Kesamben kulon, dari total 4 jiwa tersebut sudah terlayani secara optimal 100 %. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususkan pada "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya". Mutu pelayanan dasar capaian spm fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah dihitung berdasarkan rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.

Tabel 2.136 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	16,59	1,87	5,21	2,80	2,04

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Realisasi capaian persentase rumah swadaya yang tidak layak huni yang ditangani di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah swadaya yang diperbaiki mencapai 16,59%. Namun, angka ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021, yakni hanya 1,87%. Pada tahun 2022, penanganan rumah swadaya sedikit meningkat menjadi 5,21%, menandakan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi rumah swadaya yang tidak layak huni. Meski demikian, pada tahun 2023, persentase penanganan kembali turun menjadi 2,80%, dan pada tahun 2024, jumlah rumah yang ditangani tercatat hanya 2,04%.

2.1.4.4.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani.

Tabel 2.137 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Backlog Perumahan	16.73%	7%	12,89%	9.72%	16,60%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan penataan kawasan kumuh guna mencapai target 0% kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satunya adalah kawasan Gresik Kota Lama yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Tabel 2.138 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	2,41%	12,64%	14.13%	12,19%
Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	2,61%	1,04%	7.39%	10,30%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Sesuai dengan kewenangannya dalam penanganan kawasan kumuh, pada tahun 2021, persentase panjang jalan lingkungan yang ditangani mencapai 12,64%, yang mengalami kenaikan sebesar 10,23% dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan persentase mencapai 14,13%. Namun, pada tahun 2024, persentase ini mengalami penurunan menjadi 12,19%. Sementara itu, persentase penanganan panjang saluran lingkungan kawasan kumuh pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar 2,61% dan 1,04%. Angka ini meningkat pada tahun 2023 dengan persentase 7,39%, dan terus naik menjadi 10,30% pada tahun 2024.

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/417/HK/437.12/20121 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, total luasan Kumuh di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 874 Ha yang dibagi menjadi beberapa Tematik Kawasan yang meliputi Kawasan Kota Pesisir Timur, Kawasan Kota Pesisir Barat, Kawasan Kota Pesisir Selatan, Kawasan Wisata Religi, Kawasan Industri Kebomas, Kawasan Pertanian Kebomas, Kawasan Industri Perdagangan Manyar, Kawasan Pertanian Manyar, Kawasan Das Bengawan Solo, Kawasan Balongpanggang Benjeng, Kawasan Munggugianti, Kawasan Cerme, Kawasan Semampir, Kawasan Sidomukti, Kawasan Das

Bengawan Solo Dukun, Kawasan Tiremenggal, Kawasan Panceng Ujungpangkah, Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu, Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo, Kawasan Driyorejo Kota Baru, Kawasan Pertanian Driyorejo, Kawasan Permukiman Menganti, Kawasan Industri Pergudangan Menganti, Kawasan Pertanian Menganti, Kawasan Tulung, Kawasan Tanjung, Kawasan Pertanian Wringinanom, Kawasan Industri Pergudangan Wriginanom, Kawasan Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Timur Bawean. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

2.1.4.4.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah harus dipastikan kelayakannya. Berikut ini merupakan capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan PSU di Wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2.139 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	71.11%	0,94%	0,92%	0.45%	0,82%
Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi	9.93%	0,54%	0,71%	10.63%	0%

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
baik					
Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	99.30%	0,04%	0,05%	0.12%	0,54%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Adapun Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020–2024 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.140 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT

Sumber : Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2022 sampai 2024 mencapai 100%. Dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2022 sampai tahun 2024 penananganan terhadap gangguan tibumtranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya dengan realisasi mencapai 100% sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT dengan target 1 Linmas per RT sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas

belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini menandakan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah berhasil melaksanakan kegiatannya secara baik dan humanis, sehingga tidak ada warga kabupaten yang terdampak akibat penegakan peraturan daerah dan perbup, maupun dalam kegiatan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas).

2.1.4.4.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.141 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dibina di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	92,15	110,13	123,80	95,95	98,48
Persentase Data Urusan Sosial yang Dimutakhirkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Puskesos yang Terbentuk	4,93	14,79	33,71	97,19	97,19
Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi	0,39	0,78	0,40	0,42	0,63
Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang	2,07	2,66	0,01	3,26	3,89

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti					
Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,87	37,11	0,00	55,67	64,38
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	70,29	63,43	97,12	100,46	69,32

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.5.1 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK di suatu wilayah, semakin banyak penduduk yang bekerja dan memiliki pendapatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian rata-rata angkatan kerja.

Tabel 2.142 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan, yang menggambarkan persentase penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64

tahun, yang secara aktif bersedia dan mampu bekerja. Penghitungan TPT dilakukan dengan membandingkan jumlah individu yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja. Hasil perbandingan ini kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkannya, termasuk mereka yang baru diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Gambaran TPT Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.27 yang menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran di masing-masing wilayah tersebut.

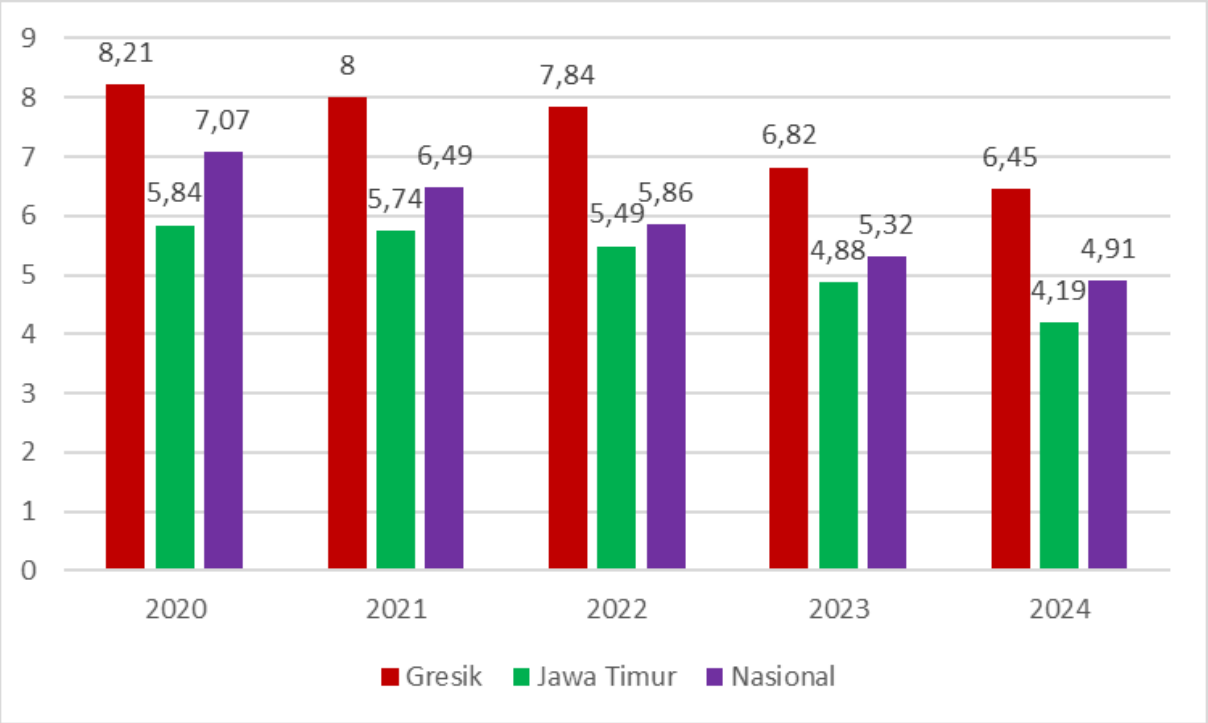

Gambar 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.44 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, TPT Kabupaten Gresik mengalami tren menurun. Namun nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan

Nasional. Berikut ini merupakan gambaran kondisi TPT Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir :

Pada tahun 2020 terjadi lonjakan TPT yang dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Pada Tahun 2021 TPT sedikit menurun seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan penyesuaian sektor ketenagakerjaan. Pada Tahun 2022, TPT kembali turun, memperlihatkan perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Gresik pasca pandemi. Selanjutnya pada Tahun 2024, sampai Agustus tercatat TPT menunjukkan tren penurunan berkelanjutan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir antara lain adalah:

1. Ketidaksesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Industri:
   Banyak pencari kerja di Gresik memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia, sehingga menciptakan ketimpangan antara pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Hal ini menyebabkan banyak pencari kerja belum dapat terserap di sektor industri besar di daerah ini.
2. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Meningkat:
   dalam beberapa tahun terakhir, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gresik terus meningkat, sementara penyerapan tenaga kerja tidak selalu sebanding dengan peningkatan ini sehingga menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi.
3. Faktor Pendidikan:
   Tingkat pendidikan pencari kerja juga berpengaruh, terutama yang memiliki pendidikan menengah atas (SMA) kejuruan yang cukup mendominasi dan seringkali persaingan sangat ketat sehingga lebih banyak yang belum memperoleh pekerjaan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat:

Meskipun Gresik memiliki sektor industri yang besar, pertumbuhan ekonomi menurun dari 7,38% pada 2022 menjadi sekitar 4,6% pada 2023, yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja baru.

5. Ketimpangan Gender dan Sektor Pekerjaan:

   Pengangguran laki-laki cenderung meningkat sedangkan perempuan mengalami penurunan, menunjukkan adanya perbedaan dinamika pasar kerja yang berpengaruh pada total TPT.

6. Faktor Demografi:

   Mayoritas penduduk Gresik berada pada usia produktif, namun dengan pertumbuhan populasi yang tidak tinggi, persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Berikut merupakan rekomendasi kebijakan prioritas guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik yang meliputi beberapa strategi utama diantaranya:

1. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Industri

   Pemerintah Kabupaten Gresik menerapkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 yang mewajibkan minimal 60% tenaga kerja di perusahaan harus berasal dari warga lokal Gresik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga mengurangi angka pengangguran.

2. Peningkatan Kompetensi dan Pendidikan Vokasi

   Program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja difokuskan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja industri di Gresik. Kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan juga diintensifkan untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan mendukung penurunan pengangguran.

3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

   Pengembangan KEK Gresik yang memiliki potensi investasi besar dan daya serap tenaga kerja tinggi jadi fokus utama. KEK ini diharapkan menyerap tenaga kerja di sektor industri berbasis teknologi dan ekspor, serta memberikan peluang kerja baru dalam jumlah besar.

4. Pelaksanaan Job Fair/Walk in Interview (Redinaker) dan Program Sertifikasi

   Disnaker Rutin menggelar Job Fair/Walk in Interview (Redinaker) untuk membantu pencari kerja mendapatkan informasi dan akses pekerjaan, serta program sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja.
5. Pengembangan Kewirausahaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

   Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan kewirausahaan untuk membuka peluang kerja baru dan usaha mandiri, selain sektor industri.
6. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

   Pengawasan ketat terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau non-local agar prioritas penyerapan tenaga kerja lokal benar-benar terlaksana dengan baik, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang memenuhi target penyerapan tenaga kerja lokal.

Dengan kombinasi kebijakan di atas, Kabupaten Gresik diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan

2.1.4.5.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja untuk para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan sedangkan tingkat kesempatan kerja adalah peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memastikan warga gresik memperoleh Kesempatan kerja digambarkan dalam peningkatan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dengan realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 2.143 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,79	92	92,16	93.18	93,55
Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	36,90	25,03	7,56	79.33	9,23
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	46,60	57,62	26,82	39.04	13,52

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pencari Kerja yang tidak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja dengan Persentase 9,23% pada Tahun 2024. Realisasi Indikator ini menurun drastis jika dibangdingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 79,33%, diikuti dengan penempatan Pencari Kerja yang juga menunjukkan tren yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dengan persentase tahun 2024 sebesar 13,52%.

2.1.4.5.1.3 Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2024 sebesar 97,53% atau meningkat sebesar 2,97% dari tahun 2023.

Tabel 2.144 Indikator Hubungan Industrial Kabupaten GresikTahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,13	15,44	24,19	94.56	97,53

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.5.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Tabel 2.145 Indikator Pengendalian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	1,92	2,03	1,89	1.89	1,94
Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76,00	76,53	74.19	78.42	67,78
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	16,45	15,04	13,65	13.65	9,27
Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	-	100	100	100	100
Unmet Need ber-KB	13,88	10,08	9,55	13.02	9,18
Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	6,16%	27,25	27,25	37.08	10,11

Sumber : Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.3 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Gresik. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Tabel 2.146 Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83,00	83,37	85,00	92.60	93,60

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Untuk memastikan Pangan Utama tersedia, penting untuk menilai ketahanan pangan di suatu wilayah melalui beberapa indikator, yaitu rasio ketersediaan pangan (kg per kapitaper tahun), stabilitas harga pangan utama (beras), dan persentase keamanan pangan segar. Rasio ketersediaan pangan menunjukkan apakah kebutuhan pangan masyarakat tercukupi, dengan semakin tinggi angkanya menandakan pasokan yang cukup. Stabilitas harga pangan utama, seperti beras,

mengukur kestabilan harga yang mempengaruhi daya beli masyarakat, dimana fluktuasi harga dapat mengganggu ekonomi. Sementara itu, persentase keamanan pangan segar mengukur tingkat keamanannya terhadap kontaminasi, yang penting untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman. Capaian indikator pangan Kabupaten Gresik secara detail sebagai berikut.

Tabel 2.147 Indikator Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	180,10	167.38	180,73	183.27	184,04
Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	9,99%	9,89%	9,58%	9,19%	9,39%
Persentase Keamanan Pangan Segar	80,00%	83,33	83,33%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit dari berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, seperti kabupaten/kota atau provinsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian ketahanan pangan dan gizi, serta menjadi alat penentu prioritas intervensi program di daerah yang rentan pangan. IKP mengacu pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan (termasuk keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial), serta pemanfaatan pangan dan gizi. Aspek-aspek yang Diukur dalam IKP IKP disusun berdasarkan tiga pilar utama konsep ketahanan pangan:

1. Ketersediaan Pangan: Mencakup kecukupan persediaan dan stabilitas pasokan pangan.
2. Akses Pangan: Melihat keterjangkauan pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial, termasuk kemampuan masyarakat menjangkau dan membeli pangan.

3. Pemanfaatan Pangan: Merujuk pada kecukupan asupan gizi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, termasuk kondisi gizi balita dan kualitas air minum.

Tujuan dan Penggunaan IKP Adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Kondisi Wilayah
2. Menentukan Prioritas Pembangunan
3. Mengevaluasi Program
4. Menurunkan Angka Kerentanan:

Skor IKP kemudian dikelompokkan menjadi beberapa tingkat prioritas untuk menunjukkan tingkat kerentanan wilayah:

1. Prioritas 1: Sangat Rentan
2. Prioritas 2: Rentan
3. Prioritas 3: Agak Rentan
4. Prioritas 4: Agak Tahan
5. Prioritas 5: Tahan
6. Prioritas 6: Sangat Tahan

Tabel 2.148 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	88,019	88,251	86,806	90,393	90,896

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, IKP Kabupaten Gresik bergerak fluktuatif namun mulai stabil di 2 (dua) tahun terakhir.

2.1.4.5.4 Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang, dengan indikator pertanahan mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan pengelolaan tanah yang efisien dan adil, terutama dalam konteks pembangunan dan kepentingan umum. Persentase lokasi tanah yang

dibebaskan mengukur sejauh mana proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik. Persentase konflik/kasus tanah garapan yang diselesaikan menggambarkan efektivitas penyelesaian sengketa atau masalah terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, yang penting untuk mengurangi ketegangan sosial. Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum menunjukkan tingkat keadilan dalam proses pembebasan tanah, di mana masyarakat yang terkena dampak menerima kompensasi yang layak. Sementara itu, persentase tanah kosong/terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola tanah yang tidak terpakai untuk tujuan pembangunan atau kepentingan publik, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Secara lengkap realisasi Indikator pada urusan pertanahan sebagaimana berikut.

Tabel 2.149 Indikator Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	-	53,06%	80%	80%	50%
Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	100	42%	90%	100%	100%
Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	50%	65%	18%	80.77%	1,56%
Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	100%	47%	99,14%	85.5%	10,31%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.5.5 Lingkungan Hidup

2.1.4.5.5.1 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam. Persentase Penambahan Ruang Terbuka hijau Pada Tahun 2024 sebesar 11,65%.

Tabel 2.150 Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Penambahan RTH	1,31%	2,48%	2,50%	9.64%	11,65%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

2.1.4.5.5.2 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya, pengendalian lingkungan adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, culture budaya), baik dampak primer maupun dampak sekunder sebagai konsekuensi pembangunan industri. Berikut ini merupakan indikator pendukung dalam pelaksanaan Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Dinas lingkungan Hidup.

Tabel 2.151 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40	97	64	72.31	64,21

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	30	33	101,1	114.67	60,50
Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25	36	118	45	67,26
Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30	33	3,50	265	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.5.3 Pengelolaan Persampahan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berikut merupakan Indikator dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.152 Indikator Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan Sampah	59	46,76	67,46	76.52	77,21
Persentase Penanganan Sampah	50	100	65,68	61.7	58,7

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengurangan sampah	9	47	11,70	15.5	11,74
Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	-	319	125	125	132
Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	1	2	4
Jumlah bank sampah yang terbentuk	301	330	231	231	334

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penataan, penertiban, dan penerbitan dokumen serta pengelolaan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan informasi tersebut untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Sistem POEDAK (Online Dokumen Kependudukan) merupakan inovasi digital yang mendukung kelancaran administrasi ini dengan memungkinkan masyarakat mengakses dan memproses dokumen kependudukan secara online, sehingga mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan data. Pencatatan sipil, yang mencakup pendaftaran peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, menjadi dasar hukum identitas seseorang dan referensi bagi pengambilan keputusan administrasi lainnya. Dengan sistem yang terintegrasi, administrasi kependudukan yang efisien ini dapat meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan, dan memastikan pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu.

Tabel 2.153 Indikator Pendaftaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perekaman KTP-el	98,43	98,24	99,47	99.17	99,60
Persentase kepemilikan KIA	54,51	72,97	79,74	67.77	99,31

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	93,58	98,60	100	100	100,00
Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	89,12	100	100	100	100,00
Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	100	22,30	40,54	75.82	83,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menjawab capaian sasaran "Mewujudkan Desa Mandiri". Capaian sasaran tersebut dinilai berdasarkan persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.154 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai	60,30	84,24	93,64	100,00	100,00

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah

Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.155 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	47	86	153	222	222
2	Maju	152	192	156	108	108
3	Berkembang	131	52	21	-	-
4	Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa jumlah desa dengan status mandiri menujukkan peningkatan setiap tahunnya, yang mana Desa yang semula memiliki status Desa Berkembang atau Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Dapat terlihat bahwa status Desa Berkembang dan Desa Maju yang setiap tahun mengalami penurunan dikarenakan menjadi status Desa Mandiri. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pembangunan desa, pemberdayaan,

kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dan partisipasi masyarakat, maupun semakin meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa.

Indikator lain dalam Urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.156 Indikator Penataan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14,00	33,27	33,27	36,12
Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33	5,76	5,76	6,36
Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	62,67	72,36	68,29	92,13
Persentase Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha milik desa (Bumdes) dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	17,82	26,36	36,06	46,97
Persentase Desa Cepat Berkembang	79,09	90,91	93,82	96,36
Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	18,18	100,00	100,00	100,00
Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	90,91	100,00	100,00	100,00
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	36,88	47,02	52,65	49,91

Sumber: DPMD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Beberapa inklusivitas dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (KLINIK DESAKU);
3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa; dan
4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

   Fasilitasi Tim Penggerak PKK merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat peran PKK dalam meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan yang terintegrasi. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan PKK, dukungan sarana prasarana, serta pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan 10 Program Pokok PKK (seperti pola asuh anak, pendidikan, kesehatan, sandang-pangan, lingkungan hidup, usaha peningkatan pendapatan keluarga).

2.1.4.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.157 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usulan Perempuan yang telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes	-	-	43,28	23,91	40,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
dan Forum OPD (%)					
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Berhasil Diselesaikan (%)	96,00	63,20	87,50	88,78	90,48
Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (Poin)	-	100,00	111,50	125,50	152,65
Persentase Kasus Kekerasan Anak terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan (%)	-	82,00	83,42	74,00	83,77

Sumber: Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 Persentase Usulan Perempuan yang telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD mencapai 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan perempuan bisa tertampung dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik Pada Tahun 2024 mencapai 90,48%, dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 juga mencapai 83,77%. Dari dua persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa semua kasus perempuan maupun kasus anak yang terjadi mendapatkan penanganan dengan baik.

2.1.4.5.9 Perhubungan

Perhubungan berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur serta layanan transportasi yang efisien. Salah satu indikator kinerjanya adalah ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan, yang diukur dari jumlah trayek aktif, cakupan wilayah yang dilayani, serta kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah trayek beroperasi dengan kebutuhan

berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan wilayah, dan pusat kegiatan. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan angkutan umum tersedia dan terjangkau masyarakat. Kinerja transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sendiri selaras dengan RPJMD 2021–2026 melalui indikator-indikator yang ditetapkan dalam Renstra dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.158 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Prasarana angkutan laik fungsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan	17,65	35,29	64,71	64,71	66,67
Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik	41,67	41,67	41,67	50,00	52,17

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara umum ketiga sasaran rencana strategis di bidang perhubungan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Prasarana angkutan terdiri dari terminal dan halte. Persentase prasarana angkutan yang laik fungsi mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh prasarana terminal dan halte angkutan umum telah beroperasi secara optimal, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.159 Data Prasarana Perhubungan Kabupaten Gresik

NO.	NAMA ASET	LOKASI	STATUS	KONDISI
HALTE				
1.	HALTE GREEN GARDEN	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
2.	HALTE ICON MALL	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
3.	HALTE ABR	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
4.	HALTE GKA	Jl. DR. Wahidin S.	jalan nasional	Baik/ Berfungsi

NO.	NAMA ASET	LOKASI	STATUS	KONDISI
		Husodo, Kebomas		
5.	HALTE GKB BUNDARAN	Jl. Sulawesi GKB, Kebomas	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
6.	HALTE RANDU AGUNG	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
7.	HALTE BNI '46	Jl. RA. Kartini, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
8.	HALTE SMAN 1 GRESIK	Jl. A.R. Hakim, Gresik	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
9.	HALTE SMPN 1 MANYAR	Jl. Kalimantan GKB, Manyar	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
10.	HALTE MIE SEDAP	Jl. Raya Manyar, Sukomulyo, Manyar	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
11.	HALTE SMPN 2 KEBOMAS	Jl. Mayjen Sungkono, Kebomas	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
12.	HALTE SDN BANJARSARI	Jl. Raya Banjarsari, Cerme	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
13.	HALTE MAKAM CAGAKAGUNG	Jl. Raya Cerme, Cerme	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
14.	HALTE SMPN BALONGPANGGANG	Jl. Raya Balongpanggang	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
15.	HALTE SMPN BENJENG	Jl. Raya Benjeng	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
16.	HALTE AMBENG-AMBENG	Jl. Ry Lamongan-Gresik, Ds Ambeng2, Duduk S.	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
17.	HALTE DR. SUTOMO	Jl. Dr. Sutomo, Gresik	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
18.	Shelter Terminal Type C Bunder	Jl. Lamongan - Bunder	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
TERMINAL TIPE C				
1	Terminal TIPE C Bunder	Jl. Lamongan - Bunder	Tipe C	Baik/ Berfungsi
2	Terminal TIPE C Gubernur Suryo	Jl. Gubernur Suryo Kec. Gresik	Tipe C	Baik/ Berfungsi
3	Terminal TIPE C Menganti	Jl. Raya Sidomulyo	Tipe C	Baik/ Berfungsi
4	Terminal TIPE C Gulomantung	Jl. Mayjend. Sungkono	Tipe C	Baik/ Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Sementara itu, indikator ketersediaan dan aksesibilitas trayek hingga tahun 2024 telah mencapai 66,67%, yang mana indikator tersebut merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan yang terintegrasi antar moda dengan jumlah trayek angkutan yang beroperasi, sehingga capaian yang didapatkan mencerminkan bahwa lebih dari separuh trayek telah terintegrasi dengan sistem perpindahan antar moda, sebagaimana tercantum dalam data berikut:

Tabel 2.160 Data Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
1	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Dukun – Kr. Cangkring – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	75	
2	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sungon Legowo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	7	
3	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sidayu – Ujung Pangkah – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	35	
4	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sedayu – Panceng – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	53	
5	Ds.Metatu – Ds. Cerme – T. Bunder – Kebomas – T. Gub. Suryo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	72	Integrasi Antar Moda Layanan Angkutan Perdesaan - Layanan Bis Antar Kota Antar Kabupaten
6	B.Panggang–Benjeng–Metatu-D.Sampeyan–T.Bunder–Tengger–T.Gub. Suryo- PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	64	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
7	Ds. Ngasinan – Ds. Kepatihan – Ds. Pelemwatu – Ds. Hulaan – Ds. Wedoroanom – Ds. Mojolebak – Ds. Sumput – Ds. Semambung - PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	27	
8	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Ra.Kartini – Jl.P.Sudirman – Jl. Pahlawan – Alun Alun – Jl.R.Santri – Jl.B.Rachmad – Jl. Kh.Kholil – Jl.Sindujoyo – Jl.Gub.Suryo : Jl.Samanhudi – Jl.Y.A.Pinatih – Jl.B.Rachmad – Jl.R.Santri – Alun Alun – Jl.Pahlawan – Jl.P.Sudirman – Jl.Veteran – T.S.Madu – Jl.Veteran – Jl. Ra.Kartini – Jl.Dr Wahidin Shd – T.Bunder - PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	40	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
9	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl.Dr.Sutomo –Jl.J.A.Suprapto – Jl.Malik Ibrahim – Jl.S.Budi – Jl.Aks.Tubun – Jl.Kh Kholil – Jl. Sindujoyo – Jl.Gub.Suryo : Jl.Samanhudi- Jl.Ya Pinatih – Jl.Kh.Agus Salim – Jl.Kh Zubair – Jl. Ja Suprapto – Jl. Dr.Sutomo – Jl. Ra Kartini – Jl.Kap.Dulasim – Jl.Ra.Kartini -Jl.Dr Wahidin Shd – T. Bunder - PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	39	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
10	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Ra Kartini – Jl.P.Sudirman – Jl. Ja. Suprapto – Jl. Usman Sadar – T.Gub.Suryo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	31	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
11	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Sunan Giri – Jl.Ra Kartini - Jl.P.Sudirman – Jl.Pahlawan –	Antar Kota Dalam Kabupaten	22	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
	Jl.Akim Kayat – Jl.Usman Sadar – Jl.Gub Suryo: Jl.Usman Sadar – Jl.Akim Kayat – Jl.Pahlawan – Jl.P. Sudirman – Jl.Ar. Hakim – Jl.Proklamasi – Jl.Ra. Kartini – Jl.Sunan Giri – T. Sekarkurung (Jl. Mj.Sungkono) – Ds.Gulomantung – Jl.Dr. Wahidin Shd – T.Bunder - PP			Antar Kota Antar Kabupaten
12	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Ds Sumber – Perum Gkb – Jl. Sunan Giri – Jl. Sunan Prapen – Perum Kedanyang – Jl. Mayjend Sungkono – Jl. Veteran – Jl. Kapt Dulasim – Jl. Darmo Sugondo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	36	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
13	Bp. Wetan – Jl. P.Sudirman – Jl.Ar Hakim – Jl. Proklamasi – Jl. Dr Wahidin Shtr Randuagung – Jl. Sumatra – Jl. Jawa – Jl. Salak – Jl. Lontar – Jl. Palem – Jl. Baja Xi – Jl. Beton Raya – Jl. Pembangunan – Jl. Kh Syafi'I – Ds Pongangan – Jl. Ry Roomo Manyar – T.Gub. Suryo – Jl. Samanhudi – Jl. Kh Kholil – Jl. Harun Thohir – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	38	
14	Terminal Bunder Gresik - Terminal Bungurasih - Terminal Porong Sidoarjo PP	Antar Kota Antar Kabupaten	36	Integrasi Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Antar Moda Angkutan Perkotaan
15	Terminal Bunder Gresik - Terminal Kertajaya Mojokerto PP	Antar Kota Antar Kabupaten	14	Integrasi Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Antar Moda Angkutan

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
				Perkotaan
16	Terminal Bunder Gresik - Terminal Paciran PP	Antar Kota Antar Kabupaten	14	Integrasi Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Antar Moda Angkutan Perkotaan
17	Terminal Bunder Gresik - Bandara Udara Juanda	Antar Kota Antar Kabupaten	4	Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Integrasi Antar Moda Angkutan Udara
18	Terminal Khusus Malik Ibrahim (Lumpur) - Wisata Religi Malik Ibrahim	Angkutan Wisata	18	Integrasi Antar Moda Angkutan Wisata

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara volume lalu lintas yang melewati suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Adapun nilai Volume to Capacity (VC) jalan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 52,17%. Nilai Volume to Capacity (VC) digunakan untuk menunjukkan apakah ruas jalan tersebut sudah mendekati kapasitas maksimalnya dan berpotensi mengalami kemacetan.

Seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, maka dapat dilihat dari nilai rasio konektivitas, dengan memperhatikan formula perhitungan (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan). Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.161 Rasio Konektivitas Kabupaten Gresik

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas	1.0	1.0	0,94	1,0	0,97

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Rasio konektivitas tahun 2020 dan 2021 bernilai 1,0 menunjukkan bahwa seluruh trayek yang tersedia di Kabupaten Gresik sudah terlayani oleh angkutan. Tahun 2022 rasio konektivitas menurun menjadi 0,94. Hal ini disebabkan karena pada jalur lintas penyeberangan terjadi penurunan frekuensi yang sebelumnya lebih dari 5 kali dalam seminggu menurun menjadi 3-4 kali dalam seminggu. Tahun 2023 rasio konektivitas kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan mencapai angka 1,0, menandakan seluruh konektivitas yang didukung layanan trayek sudah terkoneksi penuh. Tahun 2024 rasio konektivitas mengalami penurunan menjadi 0,97. Hal ini dikarenakan adanya trayek yang sudah tidak beroperasi atau tidak dilayani oleh angkutan.

2.1.4.5.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Gresik hingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.162 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	-	77,35	65,20	71,50	72,16
Persentase ketersediaan trayek angkutan darat	-	60,34	56,03	55,10	66,98
Persentase kendaraan lulus uji	-	98,63	98,92	99,18	99,24
Cakupan layanan tertib lalu lintas	-	75,00	100,00	97,50	100,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan rekayasa lalu lintas	-	66,67	100,00	100,00	100,00
Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir	-	50,00	75,00	104,17	128,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada akhir tahun 2026, Dinas Perhubungan menargetkan terpasang 2000 unit fasilitas keselamatan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan perkotaan di Kabupaten Gresik dan pada tahun 2024 telah terealisasi 72,16% atau sebanyak 1.443 unit PJU. Adapun kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara keseluruhan sebanyak 11.338 unit dan terealisasi sebanyak 7.392 Unit PJU untuk seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Persentase ketersediaan trayek angkutan darat, Dinas Perhubungan menargetkan 497 angkutan umum dalam trayek yang beroperasi dari 539 angkutan umum dalam trayek yang tersedia, dan pada Tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 66,98%. Rendahnya pencapaian target disebabkan oleh masih banyaknya pemilik angkutan umum yang belum melakukan peremajaan kendaraannya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dioperasikan. Selain itu, meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan angkutan berbasis daring turut berkontribusi terhadap menurunnya jumlah angkutan konvensional yang beroperasi. Sementara itu, total kendaraan yang lulus uji kendaraan sebesar 99,24%.

Cakupan layanan tertib lalu lintas, Dinas Perhubungan menargetkan layanan tertib lalu lintas dengan penempatan petugas di 40 lokasi persimpangan rawan kemacetan dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 40 lokasi sehingga capaian menjadi 100%.

Persentase layanan rekayasa lalu lintas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % yang terdiri dari 11 jenis layanan meliputi pengadaan dan pemeliharaan APILL, marka dan rambu telah terealisasi dan terlaksana dengan baik.

Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir pada tahun 2024 Dinas Perhubungan menargetkan tersedia 24 lokasi tempat khusus parkir, dan terealisasi sebanyak 32 Tempat Khusus Parkir atau sebesar 128.00% dan melebih target yang ditetapkan.

Tabel 2.163 Data Lokasi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Gresik Tahun 2024.

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	NAMA PETUGAS PARKIR	JENIS KENDARAAN		
				R2	R4	R6
1	TKP PUDAK GALERI	Jl. Pahlawan	HERU KERISTIAWAN	v	v	
2	TKP HALAMAN PASAR BARU	Jl. Gubernur Suryo	DEDIK SUSANTO			
3	TKP SAMPING WEP	Jl. Jaksa Agung Suprapto	RONY KURNIAWAN	v	v	
4	TKP PUSKESMAS CERME	Jl. Raya Cerme Kidul No. 52	SUPRAPTO	v		
5	TKP PUSKESMAS SUKOMULYO	Jl. Kalimantan Gkb	HONGKY KRISTIANTO	v		
6	TKP DALAM ALUN-ALUN SIDAYU	Jl. Bhayangkara	IMAM BASHORI/ABD.MUFIK	v		
7	TKP PUSKESMAS GENDING	Jl. Veteran	M. YUNUS ANIS	v		
8	TKP SAMPING SOR KROMO WIJOYO SIDAYU	Samping Sor Kromo Wijoyo Sidayu	SUGENG FITRIYANTO	v		
9	TKP SOR KROMO WIJOYO SELATAN	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	SUGENG FITRIYANTO	v		
10	TKP SOR KROMO WIJOYO BARAT	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	JUNAIDI	v		
11	TKP SOR KROMO WIJOYO TIMUR	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	WASIS	v	v	

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	NAMA PETUGAS PARKIR	JENIS KENDARAAN		
				R2	R4	R6
12	TKP RUKO PERUMAHAN GRIYA KEMBANGAN ASRI	Ruko Perumahan Griya Kembangan Asri	HENDRA PURWANTO	v	v	
13	TKP PUJASERA GKB	Pujasera Gkb	M. SUKRI	v	v	
14	TKP PUSKESMAS ALUN - ALUN GRESIK	Jl. Pahlawan	ABDUL LATIF/MUBAROK AFIF	v		
15	TKP HALAMAN UPT PUSKESMAS MANYAR	Jl.Raya Manyar Timur No. 1	ISMAIL	v	v	
16	TKP PASAR GIRI	Jl. Sunan Giri	BADRIYATUL CAMILIYA	v		
17	TKP PASAR SIDOMORO	Jl. Kapten Dulasim	NUR AINI	v		
18	TKP RSUD UMAR MAS'UD BAWEAN	Jl. Pendidikan No. 2	H. MOH NUR	v		
19	TKP HALAMAN PASAR DRIYOREJO	Halaman Pasar Driyorejo	WAKHID	v		
20	TKP ALUN-ALUN GRESIK	Jl. Kh. Wahid Hasyim	MOHAMMAD TAUFIK	v	v	
21	TKP PUSKESMAS INDUSTRI	Jl.Arif Rahman Hakim	HERI KISWANTO	v		
22	TKP TAMAN BUNDER	Jl.Raya Banjarsari	HENDRA PURWANTO	v		
23	TKP DEPAN UPT PENDIDIKAN SIDAYU	Depan Upt Pendidikan Sidayu	MUSYAFIK	v		
24	TKP PUSKESMAS DRIYOREJO	Puskesmas Driyorejo	AGUS PURNOMO	v		
25	TKP PUSKESMAS BALONGPANGGANG	Puskesmas Balongpanggang	ROFI'IN	v		
26	TKP PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	Puskesmas Duduk Sampeyan	SUPRIYADI SANTOSO	v		
27	TKP PUSKESMAS KEBOMAS	Puskesmas Kebomas	REBONAJI	v		
28	TKP PUSKESMAS DAPET	Puskesmas Dapet Balongpanggang		v		

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	NAMA PETUGAS PARKIR	JENIS KENDARAAN		
				R2	R4	R6
	BALONGPANGGANG					
29	TKP PUSKESMAS UJUNGPANGKAH	Puskesmas Ujungpangkah	SHOHIB	v		
30	TKP TERMINAL BUS MAULANA MALIK IBRAHIM	Jl. RE. Martadinata	HERU KERISTIAWAN			v
31	TKP TERMINAL SUNAN GIRI	Jl. Mayjen Sungkono	SURATMI			v
32	TKP NGAWEN (Potensi)	Jl. Raya Ngawen Sidayu		v	v	v

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.9.2 Pengelolaan Pelayaran

Pengelolaan pelayaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi laut yang berfungsi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Ketersediaan angkutan penyeberangan hingga akhir tahun 2026 ditargetkan sebanyak 4 armada, dan saat ini telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap target ketersediaan angkutan penyeberangan telah terpenuhi dengan baik, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.164 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan ASDP	-	62,50	100,00	75,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian tersebut didukung dengan keberadaan armada angkutan penyeberangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik. Untuk

memberikan gambaran lebih rinci mengenai jenis, rute, kapasitas, serta jadwal operasional angkutan penyeberangan, dapat dilihat pada Tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.165 Daftar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Gresik

NO	NAMA ANGKUTAN	JENIS ANGKUTAN	RUTE	KAPASITAS	JADWAL
1	KM. EXPRESS BAHARI 3 F	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	400 org	Selasa, Kamis, Sabtu Minggu (Gresik - Bawean) Senin, Rabu, Sabtu, Minggu (Bawean - Gresik)
2	KM. EXPRESS BAHARI 6F	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	250 org	Selasa, Kamis, Sabtu Minggu (Gresik - Bawean) Senin, Rabu, Sabtu, Minggu (Bawean - Gresik)
3	KMP. GILI IYANG	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	251 org	Kamis (Gresik - Bawean) Jum'at (Bawean - Gresik)
4	PERAHU PENYEBERANGAN SUNGAI DS. CANGKIR	Angkutan Penyeberangan Sungai	Kec.Driyorejo Gresik - Taman Sdioarjo	20 org	Senin - Minggu
5	PERAHU PENYEBERANGAN P.GILI	Angkutan Penyeberangan Laut	Pamona P.Bawean - P.Gili	17 org	Senin Minggu

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.9.3 Pengelolaan Perkeretaapian

Pengelolaan perkeretaapian merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran transportasi darat serta peningkatan keselamatan masyarakat. Perkeretaapian tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas orang dan barang.

Tabel 2.166 Indikator Pengelolaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang	-	-	50,00	57,14	60,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab, Gresik Tahun 2025

Berdasarkan capaian peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan sebidang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.166, dapat dilihat bahwa hingga tahun 2024 realisasi telah mencapai 60,00%. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, berikut disajikan daftar perlintasan kereta api sebidang di wilayah Kabupaten Gresik beserta kondisi, sarana keselamatan, serta dukungan anggarannya yang tercantum pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167 Daftar Perlintasan Kereta Api Sebidang di Wilayah Kabupaten Gresik

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
1	LMG-SBY	JL. SETROHADI	JALAN KABUPATEN	342	199 + 780	4.5	ASPAL	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
2	LMG-SBY	JL. TUMAPEL	JALAN KABUPATEN	338	196 + 530	4.5	BETON COR	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
3	LMG-SBY	JL. SUMARI	JALAN KABUPATEN	347	202 + 705	5	BETON COR	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM	LEBAR	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS		SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
					PERLINTASAN	LINTASAN (M)		INSTANSI	JUMLAH		
4	LMG-SBY	JL. TAMBAK REJO	JALAN KABUPATEN	339	197 + 169	4.5	BETON COR	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
5	LMG-SBY	JL. HENDROSALAM	JALAN DESA	365	212 + 539	4	ASPAL	DISHUB / SWADAYA	7	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
6	LMG-SBY	JL. PADEG	JALAN DESA	349	206 + 100	5	ASPAL	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
7	LMG-SBY	JL. JAMBU	JALAN DESA	356	208 + 800	5	PAVING	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2023
8	LMG-SBY	JL. CERME	KABUPATEN GRESIK	361	210 + 378	9	ASPAL	PT. KAI	-		
9	LMG-SBY	JL. DUDUK SAMPEYAN	KABUPATEN GRESIK	344	200 + 5	7	ASPAL	PT. KAI	-		
10	KDA-IDO	JL. PT SUMBER WARAS (SUMBERWARAS INDAH PLYWOOD)	PABRIK	17	8+637	7.6	MAKADAM	PT SUMBER WARAS	3		
11	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (UTARA)	JALAN DESA	16	8+487	1.5	ASPAL	-	-		
12	KDA-IDO	JL. DESA	JALAN DESA	15	8+302	1.5	ASPAL	-	-		

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
		KARANG KIRING (SELATAN)									
13	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (PGN)	JALAN DESA	14	8+143	4.75	ASPAL	SWADAYA	1	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	BK Provinsi 2024
14	KDA-IDO	JL. DARMO SUGONDO DESA KARANG KIRING (PT. GARAM)	JALAN DESA	11	7+639	4.6	MAKADAM	-	-	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	BK Provinsi 2024
15	KDA-IDO	JL. PT. KALINDO (DEPAN PT. TULUS TRI TUNGGAL)	JALAN DESA	9	6+916	4.5	ASPAL	PT KALINDO	2		

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM	LEBAR	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS		SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
					PERLINTASAN	LINTASAN (M)		INSTANSI	JUMLAH		
16	KDA-IDO	JL. INDRA BARU (PT. WILMAR)	KABUPATEN GRESIK	17A	9+175	6.5	MAKADAM	PT WILMAR	3		
17	KDA-IDO	JL. PT NUSANTARA PLY WOOD (PT. WILMAR)	PABRIK	18	9+296	9	MAKADAM	PT WILMAR	3		

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2025

2.1.4.5.10 Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

2.1.4.5.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeksi SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*3*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin ke angka 4,32 dengan predikat “Baik” sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam dan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.168 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tahun 2024

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE; dan beberapa aspek yang menunjang domain tersebut. Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;

1. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
2. Penilaian Indeks SPBE 2024 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
3. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD

Tabel 2.169 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100,00 (37/37)	100,00 (47/47)	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	-	64,00 (31/48)	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan	-	10,00 (2)	20,00 (10/48)	65,00	50,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SPBE					

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.5.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Tahun 2024 pada Informasi dan Komunikasi Publik digambarkan pada capaian indikator Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi 100%, Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi 100%, Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID 100%.

Tabel 2.170 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	90,54 (287/317)	100,00	100,00 (213/213)	100,00 (213/213)	100,00
Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	-	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00
Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100,00 (3/3)	100,00 (13/13)	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.5.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan koperasi, usaha

kecil dan menengah "Meningkatnya Pengelolaan Koperasi" dan "Meningkatnya Usaha Mikro" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut.

Tabel 2.171 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif	44,30	45,40	49,70	51,17	52,01
Pertumbuhan Usaha Mikro	0,18	0,09	0,43	1,92	33,81

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Persentase koperasi aktif dihitung dari jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi dikalikan 100 persen. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dihitung dari jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah usaha mikro tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah koperasi aktif di tahun 2024 sejumlah 815 koperasi. Pertumbuhan usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya memberikan sentimen positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi di daerah. Pada tahun 2024 pertumbuhan usaha mikro mengalami kenaikan signifikan menjadi 33,81%. Hal tersebut, selaras dengan persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 52,01%. Indikator lain dalam Urusan Koperasi, Usaha Mikro sebagaimana berikut:

Tabel 2.172 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase koperasi aktif	44,30	45,40	49,70	51,17	52,01
Pertumbuhan usaha mikro	0,18	0,09	1,08	1,92	33,81

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah koperasi aktif *grade* b, c1, c2 dan d menjadi koperasi aktif *grade* a	64,72	65,94	69,83	51,16	52,01
Persentase jumlah ksp/usp koperasi yang dinilai kesehatannya	40,27	83,56	33,42	3,80	4,17
Persentase pengurus koperasi yang dilatih	13,81	26,72	9,52	13,92	7,20
Pertumbuhan omzet koperasi	2,71	-15,62	1,40	>100	3,21
Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0,17	0,0013	0,46	0,12	0,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan data pada table diatas, langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan koperasi serta meningkatkan kinerja usaha mikro antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi yang diimplementasikan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase koperasi yang memperoleh fasilitasi pelatihan. Selain itu, diberikan pula penguatan akses permodalan yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan fokus pada meningkatnya koperasi yang mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dengan pelaksanaan program-program tersebut secara konsisten, koperasi dan usaha mikro diharapkan semakin berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

2.1.4.5.12 Penanaman Modal

2.1.4.5.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2024 sebesar 22,66%.

Tabel 2.173 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52	35,52	24,11	41,99	22,66
Persentase Peningkatan Jumlah Investor	84,18	21,90	117,88	258,51	55,76
Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	16,67	57,14	70,00	17,65	15,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T. Pada tahun 2024 pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Gresik sebesar 22,66%. Sementara itu, persentase peningkatan jumlah investor dan pertumbuhan promosi

penanaman modal pada tahun 2024 sebesar 55,76% dan 15,00%. Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini menandakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

Tabel 2.174 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Ijin	90,00	81,20	117,55	94,27	93,89
Persentase Kepatuhan Perusahaan	103,00	31,70	53,42	68,42	69,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.5.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Parekrafbudpora) memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga "Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.175 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	39	41	39,98	42,91	42,98

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025

Persentase pemuda berprestasi dihitung dari jumlah pemuda yang berprestasi dibagi dengan jumlah pemuda yang mengikuti lomba dan dikalikan dengan 100%. Jumlah pemuda berprestasi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pemuda berprestasi.

Tabel 2.176 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda Yang Meraih Penghargaan	0,25	39,61	33,00	27,78	41,67
Persentase Cabor Berprestasi	95,00	96,55	96,00	87,88	84,21
Persentase Sarana Prasarana Yang Terpelihara	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	52,57	59,46	96,53	96,51	94,002
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	-	-	-	-	30
Jumlah Wirausaha Muda	-	-	-	55.210	17.217
Jumlah Atlet Berprestasi	-	-	66	264	48
Jumlah Prestasi Olahraga	-	-	508	304	114

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025.

2.1.4.5.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus

berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.177 Indikator Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	-	7,00	13,00	27,00	43,00

Sumber: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.15 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Adapun dalam urusan persandian digambarkan dalam indikator Penanganan Serangan *Cyber*.

Tabel 2.178 Indikator Persandian Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Serangan *Cyber*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.16 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan kebudayaan dengan sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.179 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Budaya yang Dilestarikan	100,00	94,93	13,50	1,93	2,67

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025.

Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain dengan mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kabupaten Lain serta menetapkan warisan budaya non bendawi tersebut. Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel 2.180 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik

No	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bengunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. Di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga.
2	Babad	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk

No	Objek	Uraian
	Sindujoyo	naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf Pegon Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. Gambar-Gambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena menyuguhkan makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/ piring kecil, baru kemudian diminum. Cara yang kedua adalah menambahkan krimer dan menikmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasik/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut.
7	Sego Krawu	Sego Krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta serundeng dari parutan kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit, yang merah berasal dari cabai merah besar. Sambal terasi

No	Objek	Uraian
		agak gelap karena diberi campuran petis. Asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa "Krawuk" artinya meraih/mengambil dengan tangan.
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Gili. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate.

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Adapun indikator pendukung lain dalam urusan kebudayaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.181 Indikator Pendukung Lain dalam Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase objek budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase WBTB berketetapan nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cagar budaya terkelola lestarikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase obyek diduga cagar budaya terdaftar	100,00	0,00	15,00	15,75	13,16
Persentase cagar budaya ditetapkan	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan kunjungan museum	20,52	306,09	38,88	35,17	42,03
Efektifitas Dokumen Sejarah	100	100	100	100	
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-	-	-	-	280.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Untuk indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal baru tersedia pada Tahun 2024 dan digunakan sebaga baseline dalam perhitungan target 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.4.5.17 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat.

Tabel 2.182 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektifitas Penguatan Literasi	14,68	24,37	36,38	14,68	68,98
Persentase Pemustaka	51,87	42,83	57,00	43,09	70,69
Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	49,43	39,78	52,12	48,93	71,50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada tahun 2024, persentase pemustakan mengalami peningkatan sebesar 43,09% manjadi 70,69% dibandingkan tahun 2023 yang mempunyai persentase 43,09%, Persentase tingkat ketercukupan bahan pustaka juga mengalami peningkatan sebesar 48,93% menjadi 71,50% di tahun 2024. Namun untuk Efektifitas Penguatan Literasi mengalami kenaikan sebesar 68,98% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 14,68%. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perpustakaan yang dibina	56,01	64,08	73,39	94,79	95,82
Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	-	50,00	55,00	70,00	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal Indikator ini digunakan untuk mengukur upaya pelestarian koleksi pustaka yang memiliki nilai penting, baik dari sisi nasional, sejarah, budaya, maupun lokal. Koleksi Nasional merupakan bahan pustaka yang

menjadi rujukan dan memiliki nilai penting secara nasional. Naskah Kuno merupakan karya tulis lama yang bernilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sedangkan untuk muatan lokal merupakan koleksi yang berisi kearifan lokal, budaya daerah, atau sejarah daerah tertentu.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan perpustakaan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Indeks ini diperoleh melalui pengukuran persepsi pengguna layanan terhadap sejumlah indikator pelayanan, seperti:

1. Kesesuaian Persyaratan meliputi kejelasan dan kemudahan persyaratan layanan.
2. Prosedur Layanan meliputi alur pelayanan, kemudahan, dan tidak berbelit.
3. Waktu Pelayanan meliputi ketepatan waktu sesuai standar.
4. Biaya/Tarif meliputi keterjangkauan dan kejelasan biaya (jika ada).
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan meliputi kesesuaian hasil layanan dengan kebutuhan.
6. Kompetensi Petugas → kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan petugas.
7. Perilaku Petugas → keramahan, kesopanan, dan sikap dalam melayani.
8. Sarana dan Prasarana → ketersediaan fasilitas fisik, kenyamanan, aksesibilitas.
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan → kecepatan dan kejelasan tindak lanjut.

Tabel 2.184 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan perpustakaan	98	96	84,59	90,88	88,25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.18 Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip , alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Realisasi Indikator dalam Urusan Kearsipan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.185 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresikk Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan (%)	12,11	12,83	15,49	18,89	20,82
Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah (%)	1,48	13,95	1,88	2,69	5,00
Persentase Pencipta Arsip yang dibina (%)	28,48	32,89	46,14	46,80	58,72
Nilai Pengawasan Kearsipan	66,25(BAIK)	68,03 (BAIK)	81,26 (MEMU-ASKAN)	88,07 (MEMU-ASKAN)	88,41 (MEMU-ASKAN)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal adalah skor atau angka yang menunjukkan hasil penilaian atas kepatuhan, efektivitas, dan kualitas pengelolaan kearsipan di suatu instansi pemerintah atau lembaga, yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal. Secara umum, pengawasan kearsipan internal merupakan bagian dari sistem pengawasan yang bertujuan:

1. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan (misalnya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP No. 28 Tahun 2012, serta peraturan ANRI);
2. Mengukur kinerja pengelolaan arsip, baik dari aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip;
3. Mendorong perbaikan tata kelola, agar arsip dapat menjadi bukti autentik dan sah serta mendukung akuntabilitas kinerja instansi; dan
4. Memberikan nilai atau predikat (misalnya: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Buruk) yang menjadi dasar pembinaan lebih lanjut.

Persentase Pencipta Arsip yang dibina biasanya dipakai sebagai salah satu indikator kinerja di bidang kearsipan berdasarkan Peraturan ANRI No 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Daerah.

Merupakan ukuran persentase jumlah pencipta arsip (organisasi/perangkat daerah/lembaga/instansi yang menghasilkan arsip dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya) yang telah mendapatkan pembinaan kearsipan oleh lembaga kearsipan dibandingkan dengan total pencipta arsip yang menjadi target pembinaan.

2.1.4.6 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.6.1 Kelautan dan Perikanan

2.1.4.6.1.1 Perikanan Tangkap dan Budidaya

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Perikanan budidaya difokuskan pada pembudidayaan di perairan payau, pesisir pantai dan perairan tawar. Pada Tahun 2024 pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya tumbuh 3,00% dengan nilai produksi 155.972 Ton.

Tabel 2.186 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	-50,00	3,01	1,60	1,92	3,22

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan tangkap (ton)	11.115	11.459	11.451	13.124	13.547

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tingkat produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Pada tahun 2024 pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap tumbuh 3,22% dengan nilai produksi 13.540 Ton.

Tabel 2.187 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	1,80	3,01	2,99	3,02	3,00
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	138.579	142.746	146.698	152.557	155.972

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 155.972 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 13.547 ton. Tingginya produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa jumlah nelayan perikanan budidaya atau petani tambak air tawar dan payau di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan nelayan perikanan tangkap. Jumlah jenis ikan yang dibudidaya selama lima tahun terakhir tetap sama yakni terdiri dari 8 jenis, sedangkan jenis perikanan tangkap yang diperoleh selama lima tahun terakhir terdiri dari 42 jenis.

Tabel 2.188 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Mas	2.289.080
2	Jelawat	
3	Lampan	
4	Tawes	4.128.852
5	Mujair	8.867.487
6	Nila	5.109.253
7	Jambal	
8	Gabus	
9	Lais	
10	Lele	1.611.588
11	Nilem	
12	Toman	
13	Sepat Siam	
14	Tambakan	
15	Belida	
17	Betutu	
18	Betok	
19	Keting	
20	Patin Jambal	1.038
21	Ikan lainnya/Wader	5.325.537
22	Udang Galah	
23	Udang Tawar	
24	Udang Grago	
25	Udang Lainnya	
26	Siput/bekicot	
27	Remis	
28	Binatang lunak lainnya	
30	Kura-kura	
31	Buaya	
32	Binatang air lainnya/Belut	
	Jumlah	27.332.835

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktiatif. Hasil laut ikan bandeng menjadi

komoditas paling banyak yang didapatkan sepanjang lima tahun terakhir yakni pada tahun 2023 sebesar 90.504.550 kg, disusul dengan hasil kerang hijau sebesar 17.469.780 kg dan hasil udang vaname sebesar 15.747.825 kg.

Tabel 2.189 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s.d 2024

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)
1	Bandeng	90,397,836	1,437,679,059	90,488,037	1,691,395,665	90,504,550	1,832,581,667	90.557.954	2.069.016.876
2	Gracilaria verrucosa			14,500	87,000	147,920	861,076		
3	Gurame, Gurami	2,491	50,795	2,456	52,510	2,982	70,990	3.263	83.924
4	Kakap Putih	9,851	289,321	9,811	287,040	12,389	390,881	13.894	454.336
5	Kepiting Bakau	122,140	4,744,757	123,139	4,623,216	131,182	7,248,656	135.951	8.959.407
6	Kerang Hijau	11,240,652	57,040,230	16,766,346	67,645,286	17,469,780	66,211,409	21.778.873	71.335.977
7	Kerapu	131,431	15,328,353	127,449	12,363,585	134,922	16,665,410	136.702	17.377.058
8	Lele	1,215,415	17,160,346	1,278,759	19,181,384	1,469,704	22,505,333	1.616.153	25.773.010
9	Mas, Ikan Mas, Karper	2,326,095	26,504,787	2,352,537	23,855,883	2,381,957	30,953,756	2.410.389	33.450.905
10	Mujair	9,847,173	101,060,288	9,579,902	87,634,464	8,973,172	71,351,679	8.565.707	59.953.705
11	Nila	5,432,185	69,877,088	5,486,252	80,086,422	5,052,316	74,280,961	4.872.462	76.585.909
12	Patin	10,442	146,135	10,330	52,097,319	11,409	14,675,724	11.926	147.069.353
14	Tawes	4,946,744	52,490,001	5,036,984	56,588,192	4,383,675	56,191,852	4.126.652	58.139.558
15	Udang Vaname	11,185,709	558,182,396	14,077,790	703,889,496	15,747,825	793,388,658	18.685.259	945.890.609
16	Udang Windu	2,381,527	190,522,131	2,402,218	198,530,533	2,542,834	235,222,069	2.627.540	261.363.167
17	Udang Putih	580	29,000	-	-	-	-		
18	Ikan Lainnya	3,486,636	14,367,556	3,942,392	17,150,959	3,950,859	16,200,955	4.205.658	17.203.605
	SUB JUMLAH	142,736,908.87	2,545,472,244	151,698,901	3,015,468,955	152,917,476	3,238,801,077	159.748.383	3.792.657.399

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2024

Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 90.504.550 kg. Luas areal tambak payau, tambak tawar, kolam air, dan waduk pada tahun 2024 sebesar 15.601,26 Ha; 13.052,01 Ha; 1.177,50 m^2; dan 618,23 Ha. Jumlah perikanan budidaya Gresik terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar 152.917.476 kg dan 2024 sebesar 155.980.000 kg. Sedangkan, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 10.793.753 kg dan 11.949.510 kg. Namun, kenaikan tersebut tidak bertahan karena angka produksi mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah di tahun 2024 dengan jumlah sebesar 7.354.300 kg.

Tabel 2.190 Indikator Perikanan yang diolah dan dipasarkan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan (%)	84,61	85,00	78,00	80,00	86,50

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Meskipun data target produksi perikanan laut terus mengalami tren penurunan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, angka konsumsi ikan Kabupaten Gresik sebesar 56,61 kg/kapita/tahun. Hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 55,67 kg/kapita/tahun. Hal tersebut selaras dengan produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan di Gresik yaitu 86,50% yang meningkat daripada tahun 2023 (80,00%). Kelompok nelayan di Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah nelayan di

Kabupaten Gresik sejumlah 10.440 orang dan meningkat sebesar 3,12% pada tahun 2024 sejumlah 10.766 orang.

2.1.4.6.2 Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dampak positif pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat beragam, diantaranya dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pariwisata melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran "Terwujudnya Jumlah Kunjungan Wisata sebagai Bagian Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.191 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Kunjungan Wisata	2-3	3,5	96,24	4,01	5

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata. Pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu,

percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata. Berikut ini merupakan realisasi indikator pada urusan Pariwisata.

Tabel 2.192 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	71	25	70	27,45	18
2	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100	100	100	100	100
3	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	40	20	45	10,75	16,50
4	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100	100	100	100	100
5	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	21,77	4	95	3,89	5,44
6	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	0	0	339	45,10	(98,03)
7	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	11,49	7	2,4	20,54	46,79

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.4.6.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya : penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri,

sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan.

2.1.4.6.3.1 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengan komoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Tanaman hortikultura bergerak fluktuatif dan cenderung turun pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2.193 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2024

Komoditas (Ton)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	683,547.8	692,575.7	696,461.3	700,123.9	785,165.4	788,678.42	811.570,4
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	599,562.0	580,530.3	558,376.7	531,942.2	616,853.6	624,593.4	629.723,7
Padi	428,755.5	419,167.4	413,995.6	391,460.6	422,680.4	422,686.0	421.482,5
Jagung	158,136.6	145,856.2	132,555.1	125,041.0	176,773.1	185,961.8	192.088,8
Kedelai	279.9	107.7	103.8	164.5	433.6	1,030.6	1.337,5
Kacang Tanah	1,582.0	1,580.1	1,303.3	2,058.3	1,569.0	1,912.1	1.986,0
Kacang Hijau	1,854.5	347.9	8,710.9	332.4	684.6	1,656.8	1.619,9
Ubi kayu	8,775.0	13,059.3	972.1	11,914.5	14,712.9	11,281.0	11.862,3
Ubi jalar	178.5	411.7	736.0	970.9	-	65.1	50,6
Jumlah produksi hortikultura (ton)	83,985.8	112,045.4	138,084.6	168,181.7	168,311.8	164,085.1	187.603,9
a. Sayur (ton)	18,016.4	31,001.3	31,001.3	29,925.1	30,055.3	18,533.8	18.639,1
a.1 Sawi	300.4	204.8	204.8	322.0	323.4	1,097.7	1.422,5
a.2 Kacang panjang	541.3	521.6	521.6	317.2	318.6	296.3	262,7
a.3 Cabe	13,089.9	25,994.7	25,994.7	27,812.2	27,933.2	14,805.7	15.175,0
a.4 Tomat	829.3	1,107.1	1,107.1	152.3	153.0	433.6	380,9
a.5 Terong	1,775.8	1,744.4	1,744.4	279.1	280.3	519.9	406,7
a.6 Ketimun	423.8	351.5	351.5	13.1	13.2	-	5,6
a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-	-	
a.8 Kangkung	619.7	659.4	659.4	646.1	648.9	1,046.5	1.162,1
a.9 Bayam	436.2	417.8	417.8	383.1	384.8	334.1	316,8

Komoditas (Ton)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. Buah (Ton)	50,166.5	61,679.0	87,718.2	114,930.6	114,930.6	125,841.7	151.254,0
b.1 jambu biji	498.8	515.0	515.0	1,556.4	1,556.4	1,428.0	1.762,3
b.2 Jeruk	143.0	518.8	518.8	628.8	628.8	689.5	944,4
b.3 Mangga	27,203.0	37,922.7	63,961.9	78,706.7	78,706.7	83,104.5	103.902,5
b.4 Pepaya	515.8	848.6	848.6	2,017.8	2,017.8	6,829.9	11.449,9
b.5 Pisang	20,093.0	19,513.5	19,513.5	28,255.5	28,255.5	31,312.3	34.217,6
b.6 Belimbing	378.0	539.9	539.9	692.6	692.6	697.8	788,8
b.7 Sawo	176.9	246.1	246.1	991.5	991.5	1,137.0	1.649,6
b.8 Sirsak	78.0	74.4	74.4	567.7	567.7	337.2	451,9
b.9 Buah Naga	1,080.0	1,500.0	1,500.0	1,513.6	1,513.6	305.5	237,3
c. Obat (Ton)	15,802.9	19,365.1	19,365.1	23,325.9	23,325.9	19,709.55	20.599,9
c.1 Kunyit	15,696.7	19,259.3	19,259.3	23,219.2	23,219.2	19,709.25	20.627,3
c.2 Jahe	106.3	105.8	105.8	106.8	106.8	0.3	0,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman padi, jagung kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Produksi terbesar dari tahun 2018-2024 yakni tanaman padi dengan rerata produksi per tahun sebesar 417.000 Ton. Produksi terendah yakni kedelai dan ubi jalar dengan rerata produksi per tahun sebesar 493 Ton untuk kedelai dan sebesar 344 Ton per tahun untuk ubi jalar.

Produksi holtikultura dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori diantaranya golongan sayuran, golongan buah-buahan, dan golongan obat. Pada golongan sayuran, produksi tertinggi cabe dengan produksi tertinggi di Tahun 2022 sejumlah 27.933,2 Ton dan rerata jumlah produksi per tahun sebesar 21.500 Ton per tahun, sedangkan produksi terendah pada ketimun dengan rerata produksi sebesar 1.100 Ton per tahun. Produksi terbesar di golongan buah yakni buah mangga dengan produksi tertinggi di Tahun 2024 sebesar 103.902,5 dengan rerata produksi per tahun sebesar 67.600 Ton per tahun. Sedangkan produksi terendah yakni buah sirsak dengan rerata produksi tiap tahun sebesar 300 Ton per tahun. Pada produksi obat kunyit lebih unggul dari jahe dengan rerata produksi per tahun sebesar 20.000 Ton per tahun.

2.1.4.6.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Secara kumulatif, jumlah produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan terbesar berasal dari komoditas tanaman tembaku dari produksi 1.628,40 ton di tahun 2023 menjadi 3.248,89 ton di tahun 2024. Sedangkan penurunan produksi paling signifikan terjadi pada komoditas tebu dari produksi 159.622,71 ton di tahun 2023 menjadi 158.589,19 ton di tahun 2024. Komoditas tebu menjadi penyumbang terbesar produksi perkebunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program

Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 2.194 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No	Komoditas (Ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tembakau	285,00	375,00	900,00	1.628,40	3.248,89
2.	Tebu	159.298,63	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158.589,19
3.	Kelapa	5.052,86	5.050,58	5.049,77	5.044,73	5.044,75
4.	Cengkeh	-	-	-	-	-
5.	Jambu mete	-	-	-	-	-
Jumlah kumulatif		164.627,49	165.216,08	165.755,22	166.295,84	166.882,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.6.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 5,68% dari tahun 2023 sejumlah 6.154.200 ekor menjadi 6.722.821 ekor pada tahun 2024

Tabel 2.195 Data Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Produksi Daging/KG	11.134.312	11.134.312	11.468.491	11.868.275	12.417.705
1.	Sapi potong	2.434.826	2.434.826	2.521.392	2.521.392	2.487.803
2.	Kambing	846.860	846.860	1.072.341	1.139.075	1.222.553
3.	Domba	121.680	121.680	141.492	148.278	155.954
4.	Itik	107.150	107.150	107.050	107.875	93.528
5.	Ayam ras petelur	332.750	332.750	332.970	338.250	314.218

No.	Komoditas	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Ayam ras pedaging	5.889.293	5.889.293	5.890.500	6.154.200	6.722.821
7.	Ayam buras	1.301.400	1.301.400	1.300.800	1.359.650	1.396.753
8.	Babi	1.711	1.711	2.979	-	2.839
9.	Entok	98.450	98.450	98.775	99.359	90.832
10.	Puyuh	30	30	30	32	39
11.	Burung Dara	162	162	162	164	210
b	Produksi Susu/KG konversi dari liter	974.390	974.390	807.110	645.362,72	588.254
1	Susu sapi	974.390	974.390	807.110	645.362,72	588.254
c	Produksi Telur	3.349.487	3.349.487	3.388.314	3.423.288	3.621.217
1.	Telur entok	16.328	16.328	38.521	38.598,49	44.319
2.	Telur burung puyuh	12.497	12.497	12.574	12.260,40	12.425
3.	Telur ayam buras	270.498	270.498	418.120	439.416,57	444.147
4.	Telur ayam ras petelur	2.827.019	2.827.019	2.668.534	2.703.038,91	2.897.544
5.	Telur itik	223.145	223.145	250.565	229.973,39	230.460
Jumlah kumulatif		15.458.189	15.458.189	15.663.915	15.936.925	16.580.434

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian sebagai berikut : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam

buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 12.417.705 kg pada tahun 2024. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi ayam ras pedaging dari jumlah produksi sebesar 6.154.200 pada tahun 2023 menjadi 6.722.821 pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

2.1.4.6.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pemerintah kabupaten gresik sendiri memiliki BUMD yang bergerak dibidang energy yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas. Untuk Gas Pipa Dedicated Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk Compresed Natural Gas berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, PT. Gresik Migas tidak ada pembangunan Fasilitas Pipa, karena semua fasilitas pipa yang terpasang sudah ada sejak 2010 sepanjang 157 meter sehingga belum ada penambahan pipa yang terpasang selama 5 (lima) tahun ke belakang.

2.1.4.6.5 Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industri dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar *sampai home industry*, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan "Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2.196 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

Indikator Sasaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	-	-35,17	0.06	-35.17	33,34

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Pertumbuhan nilai neraca perdagangan tahun 2021 mengalami penurunan -35,17% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,06% dan masih menurun di tahun 2023 sebesar -35,17% kemudian mulai naik pada tahun 2024 sebesar 33,34%.

Tabel 2.197 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637	414.778.152	1.734.417.711
6	2022	2.263.534.770	880.208.587	1.383.326.183
7	2023	2.389.111.479	1.867.907.344	521.204.134
8	2024	2.521.654.950	2.124.209.489	397.445.461

Sumber: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara *year on year* menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2024, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19. Dalam menunjang Indikator Sasaran tersebut didukung dengan indikator dibawahnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.198 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100	100	100	100	0
2	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	-	0,23	6,59	3,03	1,85
3	Pertumbuhan nilai ekspor	1,37	47,13	3,54	-3,78	-12,24
4	Persentase Alat UTTP bertera sah	99,87	100	157,4	141	207

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.4.6.6 Perindustrian

Industri kecil dan menengah berkembang sebagai motor perekonomian karena berperan sangat signifikan dalam menopang ekonomi kerakyatan nasional, dan tersebar di banyak daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga berperan dalam menekan urbanisasi karena karakteristiknya mandiri dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam rangka pemulihan ekonomi IKM berperan besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan perindustrian melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran “Meningkatkan dan

Mengembangkan Produk-produk Kerajinan IKM" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.199 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2018-2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan IKM	0,77	0,79	0,81	1,02	1,14
2	Persentase IKM yang terdata dan terbina	1,40 (100 IKM)	0,63	3,72	1,61	1,28
3	Persentase IKM yang mendapat fasilitasi	2,06 (145 IKM)	1,28	1.31	1,63	1,28
4	Persentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,62 (6 IKM)	0,31	0,81	1,14	1,24

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Pertumbuhan industri ini dihitung dengan cara jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah IKM tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah IKM selalu mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun sempat surut pada masa industri Covid 19, akan tetapi IKM mulai bangkit kembali bersamaan dengan peningkatan pemulihan ekonomi pasca industri. Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) terus menunjukkan tren peningkatan secara *year on year*. Pada tahun 2024 pertumbuhan IKM sebesar 1,14%. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,02%. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah IMKM beserta pembinaan yang pernah dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 2.200 Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2017-2024

No	Tahun	Jumlah IKM	Pembinaan	Merek	Halal
1	2017	7086	702	60	-
2	2018	7207	233	40	5
3	2019	7275	312	126	32
4	2020	7336	261	75	15
5	2021	7389	-	72	40
6	2022	7467	188	75	40
7	2023	7546	135	78	42
8	2024	7626	97	81	45

Sumber: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Peningkatan jumlah IKM dapat menunjukkan perbaikan perekonomian suatu daerah, karena terjadi pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah IKM telah meningkat 4,26% dari tahun dasar 2016. Namun, peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Gresik selama 2016 sampai dengan 2021 tidak berbanding lurus dengan pembinaan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari fluktuasi jumlah pembinaan yang cenderung menurun.

2.1.4.7 Urusan Penunjang

2.1.4.7.1 Sekretariat Daerah

2.1.4.7.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 2.201 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2024

NO	Tahun	Nilai Sakip
1	2015	40,09
2	2016	60,08
3	2017	71,48
4	2018	80,12
5	2019	80,69
6	2020	81,31
7	2021	80,86
8	2022	81,59
9	2023	81,93
10	2024	80,60

Sumber: Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Hasil evaluasi Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 2.202 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26.33
2	Pengukuran Kinerja	30	23.80
3	Pelaporan Kinerja	15	12.91
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81.59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

2.1.4.7.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skroring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Tabel 2.203 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas penyusunan LPPD	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan perolehan skoring LPPD yang sangat baik. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.204 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemenuhan data dukung IKK (%)	100	100	100	100	100
2	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	baik
3	Persentase Perda yang diproses (%)	90	100	100	100	200
4	Persentase Perbup yang diproses (%)	90	71	100	100	81,44
5	Persentase Keputusan Bupati yang diproses (%)	90	85	100	91	118,64
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan (%)	100	100	100	100	100
7	Nilai evaluasi kinerja TPID	60	67	67	68	84,36
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	3	3,51

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.2 Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dengan sasaran ”Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya”. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun 2024 tercapai 95% pada bagian penyusunan regulasi DPRD, 100% pada penganggaran DPRD, dan 282% pada pengawasan DPRD. Lebih lanjut indikator pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.205 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD (%)	73	100	72	72	95
2	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD (%)	180	100	102	102	100
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD (%)	70	100	143	143	282
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.3 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada Tahun 2024 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2024 dengan Sasaran "Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah" sebagaimana berikut:

Tabel 2.206 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang artinya disetiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras. Indikator Pendukung dalam urusan perencanaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.207 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100
2	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100	100	100	100	100
3	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76	76	76	76	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan indikator utama pertumbuhan capaian inovasi daerah. Pertumbuhan capaian inovasi daerah pada tahun 2024 sebesar 54,43% atau dengan predikat inovatif. Secara lengkap berikut ini merupakan realisasi kinerja pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.208 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	17,65 (40 Inovasi)	47,37 (66 Inovasi)	11,29	20,29
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81,26 (sangat baik)	>81,26 (sangat baik)	>81,26 (sangat baik)	100 (sangat baik)
3	Capaian Indeks Inovasi Daerah	43,04 (inovatif)	48,4 (inovatif)	45,92 (inovatif)	54,43 (inovatif)
4	Persentase Kajian Penelitian	100	100	100	100

No	Indikator	Realisasi (%)			
		2021	2022	2023	2024
	dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)				
5	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	-	-	-	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.5 Keuangan

Capaian indikator kinerja urusan keuangan dengan sasaran ”Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah” dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kemandirian Fiskal	51,68	53,45	74,27	77,95	86,68

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio kemandirian fiskal

merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1,598 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 1,355 triliun dengan Rasio Kemandirian 86,68% atau naik dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan kemampuan Kabupaten Gresik dalam membiayai kegiatan dan program di daerah meningkat. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-90% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau eksternal termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.4.7.6 Inspektorat

Pada Tahun 2024 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2024 dengan sasaran ”Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik” dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.210 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tindak Lanjut Selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi (%)	79,00	78,30	80,98	90,02	90,66
2	Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD	81,65	82,75	72,47	85,80	86,37
3	Level Kapabilitas APIP	2,000	3,000	3,000	3,000	3,085
4	Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gresik	3,000	3,000	3,000	3,000	3,343
5	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal (%)	100,00	100,00	94,29	100,00	100,00
6	Persentase Tindak Lanjut Audit Eksternal (%)	74,57	76,26	78,76	87,32	88,41

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Nilai Evaluasi Internal AKIP OPD dengan Persentase Minimal A (%)	100	100	79,17	89,13	86,96
9	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.7.7 Kepegawaian

Pada Tahun 2024 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2024 dengan Sasaran "Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas" dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.211 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	47,00	49,62	53,08	89,71	88,87

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Tabel 2.212 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100,00	99,90	99,90	99,90	99,00
2	Persentase Kedisiplinan ASN	100,00	95,69	96,50	97,00	96,30
3	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	77,00	66,00	87,00	90,00	93,00
4	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100,00	100,00	80,00	95,00	100,00
5	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	100,00	88,00	88,00	91,00	99,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.8 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.213 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gresik	81,00	85,19	85,28	89,08	90,50
2	Kebomas	90,00	91,30	82,63	82,63	87,84
3	Manyar	90,00	90,19	88,68	88,68	92,23
4	Cerme	90,83	90,83	82,32	82,32	88,88
5	Duduksampeyan	88,15	89,01	89,01	89,01	92,92
6	Wringinanom	85,00	97,36	92,00	92,00	99,99
7	Sidayu	90,00	98,90	84,83	98,77	98,02
8	Ujung Pangkah	90,00	97,67	96,55	96,40	96,50
9	Panceng	90,00	98,66	84,74	88,11	95,95
10	Driyorejo	80,00	95,36	88,40	90,70	93,25
11	Menganti	91,00	86,49	83,31	93,56	92,92
12	Kedamean	-	91,53	82,18	85,90	98,87
13	Sangkapura	-	92,00	82,71	100,00	92,67
14	Balongpanggang	98,00	98,00	99,00	97,00	89,73
15	Benjeng	75,61	79,53	84,41	96,25	88,98
16	Bungah	79,60	98,00	87,55	88,86	93,04
17	Dukun	89,91	92,64	92,64	92,20	86,77
18	Tambak	85,00	90,00	88,24	100,00	95,29

Sumber: Bagian Ortala Setda. Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.7.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2024, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 2.214 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	81,83	100,00	33,33	10,00	16,60

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 6,60%, dengan capaian 16,60% dari target tahun 2024. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Gresik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Rentra Perubahan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, indikator sasaran menjadi persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial. Nilai SAKIP Kesbangpol mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 3,34%, dengan capaian 82,16% dari target tahun 2024. Persentase ketercapaian sasaran program OPD, persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, persentase Target Partisipasi Masyarakat, persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar, persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dan persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa memiliki nilai yang tetap di tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2024.

Tabel 2.215 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100	100	100
2	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100	100	100	100	100
4	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	100	100	100	100
5	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.5.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Paud dan Pendidikan Dasar serta Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Hal ini mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2023 dan 2024 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan sekolah. Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas. Capaian Indikator SPM urusan Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.216 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target			Realisasi				Keterangan
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	100	100	100	88,94	91	84,23	77,79	
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	100	100	100	93,42	91,1	91,35	91,36	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	100	100	100	91,04	91,44	91,5	91,51	
4	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	2,03	2,13	65,64	99,34	99,32	99,1	99,29	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
5	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	1,85	1,95	47,55	57,29	60,55	69,4	70,47	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
6	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi SMP	2,01	2,11	74,87	66,28	68,83	77,08	80,76	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
7	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Numerasi SD	1,83	1,93	61,05	39,01	44,64	53,87	60,19	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
8	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Numerasi SMP	74,58	74,61	91,16	55,37	57,08	66,88	69,13	
9	Pendidikan Dasar	Iklim Inklusivitas SD	92,64	93,62	93,54	69,68	77,78	57,87	62,3	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target			Realisasi				Keterangan
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
10	Pendidikan Dasar	Iklim Inklusivitas SMP	0	0	92,68	67,19	76,65	58,31	61,11	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
11	Pendidikan Dasar	Iklim Keamanan SD	0	0	96,74	74,27	85,6	74,66	78	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
12	Pendidikan Dasar	Iklim Keamanan SMP	0	0	83,98	79,34	82,36	71,53	73	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
13	Pendidikan Dasar	Iklim Kebinekaan SD			89,04	64,98	91,76	74,91	75,57	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
14	Pendidikan Dasar	Iklim Kebinekaan SMP	0	0	90	65,56	85,58	74,03	72,67	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
15	Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	0	0	82,85	6,35	9,4	23,74	24,54	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.2 Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.217 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	21.993	22.058	22.136	20.032	19.298	18.856	18.437	16.166	87,75%	85,48%	83,29%	80,70%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (difasilitas kesehatan)	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	20.994	21.056	21.130	20.032	18.941	18.751	18.678	16.687	90,22%	89,05%	88,40%	83,30%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	19.994	20.053	20.124	19.333	18.901	18.602	18.415	16.585	94,53%	92,76%	91,51%	85,79%
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	82.641	82.914	83.264	77.157	84.528	18.602	88.337	71.151	102,28%	22,44%	106,09%	92,22%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sd Kelas 9)	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	157.528	177.669	178.412	182.781	108.414	162.652	178.412	175.618	68,82%	91,55%	100,00%	96,08%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia	Jumlah Warga Negara Usia	893.447	902.513	908.044	902.130	121.053	369.351	855.839	921.721	13,55%	40,92%	94,25%	102,17%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	15-59 Tahun)	Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan												
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (>60 Tahun)	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	92.471	96.460	157.129	218.742	78.443	90.501	151.544	164.175	84,83%	93,82%	96,45%	75,05%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (>=15 Tahun)	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	373.067	383.331	236.030	96.820	46.862	98.180	220.546	97.053	12,56%	25,61%	93,44%	100,24%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (>=15 Tahun)	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	44.071	45.284	48.366	48.407	40.004	45.284	48.366	48,882	90,77%	100,00%	100,00%	0,10%
10	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara	2.520	2.520	2.601	2.586	2.520	2.102	2.215	2,515	100,00%	83,41%	85,16%	0,10%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan												
11	Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	15.590	16.416	18.112	20.583	7.809	16.416	18.112	24.389	50,09%	100,00%	100,00%	118,49%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) =HIV	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	15.468	26.059	25.760	24.154	13.826	22.613	28.828	21.244	89,38%	86,78%	111,91%	87,95%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut rincian capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.218 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	838.005	246.191	55.160	39.367
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	730.761	390.150	6.370	2.818

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.219 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	relokasi program pemerintah kabupaten					

Sumber: Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.220 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi
			2021
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	0

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi 2021
	dan pelayanan ganti rugi	hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu	76
3	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Kabupaten yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.314.895
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	442

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Tabel 2.221 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2022 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi		
			`2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.311.215	5.186	997

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi		
			`2022	2023	2024
		Kabupaten/kota			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71.200	137.763	462.807
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaam terhadap bencana	Jumah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.674	42.770	566
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	297.256	381.421	213.625
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	582	580	580

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.222 Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2024

No	Output	Realisasi
		2024
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	43
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan	33

No	Output	Realisasi 2024
	kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaa	
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	242
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2
5.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1
6.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	462.087
7.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	462.087
8.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2
9.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	81
10.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	566
11.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1
12.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	213.625
13.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3
14.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0
15.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	213.625
16.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak	173

No	Output	Realisasi 2024
	diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	
17.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	2
18.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	425
19.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5
20.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1
21.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.6 Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rhabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;

3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.223 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	1.442	555	737	6.309
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	7.012	13.953	6.877	7.351
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	28.977	19.196	17,825	19.529
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	300	1.024	101	224
5.	Perlindnungan dan	Jumlah korban	6.419	2.532	5,545	9.829

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	jaminnan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca				

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Gresik merupakan bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Secara regulatif, implementasi TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian target-target TPB.

Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Gresik berperan sebagai salah satu entitas daerah yang turut mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini menempatkan Gresik tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan lokal, tetapi juga sebagai kontributor nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Pada bab ini dipaparkan capaian kinerja TPB Kabupaten Gresik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Analisis capaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemajuan yang telah dicapai, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan

penyusunan strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan pada periode mendatang.

Tabel 2.224 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8.8	%	9.,0	9.56	9.75	10.01	10.16
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0.03	%	0.17	0.13	0.09	0.05	0.04
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17	%	3.6	3.6	7.53	6	0.04
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,7-4,5	%	-3.68	3.79	7.38	4.62	4.47
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat	Rupiah	134,268,558.00	144,656,069.86	163,907,912.34	176,071,089.93	184624449.7
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	21.6	%	49.59	50.03	49.44	49.93	50.34
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkat	%	-1.32	4.41	8.74	4.74	41.91

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	14	%	12.4	12.42	11.06	10.96	10.88
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	%	18.76	21.85	20	24.28	26.06
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat		Rp1,785,411	Rp1,959,412	Rp1,967,000	Rp1,975,000	1951285.57
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100	%	100	100	100	100	100
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 95,2; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	%	83	83.7	85%	92.6	95.17
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	%	99.48	99.65	99.88	99.94	100.07

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96.1	%	99.48	99.65	99.88	99.94	100.07
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.2	Angka	75.95	80	82.93	85.28	89.09
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	94.78	Angka	96.67	97	96	96.99	97.38
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	Meningkat	Angka	96.67	95.7	97.39	97.66	98.19
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24 per 1000	%	2.7	3.82	4.34	4.34	4.45
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0.18	Angka	4.78	3.25	3.29	4.78	4.78
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70	%	92.01	92.7	93.39	94.08	94.6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	95	%	92.01	92.7	93.39	94.08	94.6

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.							
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85	%	100	100	100	100	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63	%	113.65	117.82	121.99	126.16	130.34
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Menurun	%	3.6	3.6	6.6	3.67	3.6
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8.5	%	12	12	11	11	10.81
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245 per 100.000	per 100.000 penduduk	104	134	213	104	96
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	300	Per 1000 orang	0.003	0.001	0.00387141	0.00617	0.0041
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per	18,8 per 100.000	%	2.7	3.22	4.34	4.62	4.8

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	1000 kelahiran hidup.	kelahiran hidup						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<0,5	%	0.06	0.08	0.15	0.06	0.05
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7 per 100.000 kelahiran hidup	%	2.51	3.62	3.89	4.62	3.74
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306 per 100ribu	per 100.000 penduduk	83.32	315.76	94.18	99.38	110.27
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	100	%	94.63	88.99	91.5	92.54	93.99
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80	%	50	100	65.68	61.7	65.03
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100	%	90.7	86.61	90.71	95	97
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	%	4.65	4.67	6	6.64	6.41
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses	Meningkat	%	80.25	71.3	72	78	81.04

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap hunian yang layak dan terjangkau.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.2	per 100.000 orang	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00102
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17.12	%	0.06	0.39	0.35	0.37	0.58
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	74.57% untuk pekerja formal (62,4juta). 25.94% untuk pekerja informal (1,3 juta)	Orang	25.17	30.84	58.66	45.62	51.87
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	74.57	%	25.17	30.84	58.66	45.62	51.87
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	75.7	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	75.70%	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Perkotaan 71%; pedesaan 49%	%	100	100	100	100	100
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	82	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Perkotaan 100%; pedesaan 52%	%	100	100	100	100	100
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Perkotaan 71%; pedesaan 49%	%	100	100	100	100	100
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	82	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	%	18	18	18	18.75	18.9
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan	16.6	%	18	18	18	18.75	18.9

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	%	0.0116	0.0182	0.017320329	0.009500546	0.01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70	%	100	100	100	100	100
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	85	%	90.6	92.75	98.91	99.1	99.91
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85	%	90.6	92.75	98.91	99.1	99.91

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77.4	%	96.16	95.66	97.92	99.1	99.91
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	77.4	%	96.16	91.5	98.21	99.1	99.91
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65	%	76.53	76.53	74.19	78.42	79.37
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat	%	76.53	76.53	74.19	78.42	79.37
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38	Angka		10.8	10.8	9.8	9.61

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38	Tahun		10.8	10.8	9.8	9.61
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	a) sebelum umur 15 tahun 0,11%; b) sebelum 18 tahun 6,94%	%	0.024	0.024	0.016	0.004	0.01
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.9	%	11.48	10.08	9.55	13.02	12.85
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat	%	11.48	10.08	9.55	15.81	16.23
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21	%	21.07	21.29	21.53	21.77	21.89
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkat	%	38	46.76	61.58	61.7	72.26

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95	%		98.65	99.65	100	100.15
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	per 100.000 orang	0.00002	0.00001	0	0	0
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat	%	0	1	3	5	9
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	118.6	Indeks	99.29	96.5	94.89	91.42	89.92
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	%	0.59	0.47	0.49	0.07	0.04
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tersedia	Dokumen	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	tersedia
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak	9.5	%			9.61	10.7	10.64

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	di bawah lima tahun/balita.			11.04	10.9			
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	28	%	11.04	10.9	9.61	10.7	10.64
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28	%		41.5	22.75	4	1.83
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50	%	71		72.68	75.9	76.56
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	rupiah/tenaga kerja	Rp10,337,080	Rp10,160,484	Rp11,324,417	Rp12,227,581	12658004.68
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	35	Orang	0.5	0.5	0.36666667	0.26666667	0.22
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	24.3	%	27.2	36.65	35.6	24.3	22.43
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15.4	%	2.85	3.44	4.03	4.62	5.32
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.02	%	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	(liter per kapita)	0.23	0.22	0.18	0.17	0.15
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Orang		98.65	99.65	99.96	100.16
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95	%		64.72	67.94	91.33	102.44
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	18%	%	0	0	0	0	0
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat		100	100	97	100	103.3
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84.2	%	96.94	97.33	98.33	98.15	98.52
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81	%	87.45		89.95	92.71	92.75

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	%	100	100	100	100	100
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat		89.07	96.13	97.45	96.51	96.86
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkat	%	4	4	4	4	4.24
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun	%	19	23.7	17.8	14.29	17.42

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	%	18.75	20.41	18	18.75	18.9
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat	%	66.27	38.47	99.11	274.44	65.57
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	%	45.55	66.67	87.79	83.37	88.51
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Desa/Kelurahan	100	100	111.4	119.95	129.15

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	%	52.74	45.55	52.75	54.62	55.1
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tersedia	%	105	105	99.78	104	103.8
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51	%	65.64	66.52	69.43	68.3	68.5
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	%	10.78	15.73	15.41	14.21	15.64
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25	%	85.44	86.3574352	83.98	82.65	83.5
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Rp	21859.53	22380.36	22770.99	23552.24	24299.9
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun		2	1	1	1	1
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Tersedia	KM	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Meningkat	Isu 4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor	17.98	%	46.55	49.28	50.2	38.02	36.21

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	industri manufaktur.							
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	meningkat 5%	%	9.83	7.02	19.62	33.94	25.18
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0.63	%	0.76	0.86	0.99	0.76	0.76
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Menurun	Angka	0	0	0	0	0
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	Angka	0	0	0	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat	Angka	47	86	153	222	392
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	%		3.79	4.38	4.62	4.94
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat	%	80.51	88.11	88.48	87.29	94.18
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Meningkat	%	73.37	73.727	74.084	74.441	74.85
1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat	35 Daerah	63	76	104	126	149
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat	%	70.29	63.43	97.12	99.46	108.48

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Tersedia	Ada	16	16	16	16	16
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun	Indeks	99.29	96.5	94.89	91.42	89.92
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Meningkat	EWS	0	0	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	%	0.59	0.47	0.49	0.07	0.03
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Tersedia	Dokumen		1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.2	Orang	0.001	0.001	0.001	0.001	0
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tersedia		1	1	1	1	1
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Orang			7	2	1.32

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	%	33	39	22	58.18	81.18
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	%	0.00457	0.01476	0.00008	0.00011	0.00011
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	4	Indeks					0
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	60	WTP		80.53	100	100	107.48

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	50	Nilai	81.11	80.86	91.34	92.07	94.53
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80	%			100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	45	%	69.4	69.47	68.93	71.01	69.5
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	80	%		57.65	57.65	87.64	100.77

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkat	%	3	13	3	3	4
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	12	%	20.07	23.04	23.28	24.01	24.77
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	%	22.31	25.04	25.98	26.01	26.62
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedia	Angka	146	167	109	33	29.94
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama	Tersedia		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	%		71.43	92.1	92.4	100.67 82702
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	Pengunjung	24247	27758	28747	37975	44113
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebagaimana disajikan pada Lampiran II RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Gresik. Capaian indikator tahun 2024 menghadapi beberapa faktor penghambat, terutama karena kebijakan efisiensi belanja APBD sesuai Surat Sekda Nomor 050/245/437.21/2024, yang membatasi perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta menunda belanja modal dan pekerjaan konstruksi. Selain itu, sebagian anggaran dialokasikan untuk menutup kurang bayar tahun 2023, sehingga target kinerja, khususnya di bidang infrastruktur jalan, tidak maksimal.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa ketepatan jadwal pelaksanaan kegiatan meskipun pencairan anggaran terlambat, serta koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara rutin antar pihak terkait. Pada RKPD tahun berikutnya perlu dilakukan reviu potensi pendapatan daerah, terutama pajak dan retribusi, serta memperkuat koordinasi dengan

perangkat daerah dan instansi terkait dalam pengawasan dan penyelesaian kendala pemungutan PAD.

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Rata-rata Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota
1	Kabupaten Gresik	98,29	Sangat Tinggi	93,02	Sangat Tinggi

Tabel 2.225 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2024
Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dalam pelaksanaan program prioritas RKPD. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,29% dengan predikat *Sangat Tinggi* serta rata-rata capaian anggaran sebesar 93,02% yang juga mendapatkan predikat *Sangat Tinggi*. Capaian ini mencerminkan konsistensi antara realisasi kinerja dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Artinya, program prioritas tidak hanya terealisasi hampir sesuai target, tetapi juga dikelola dengan tingkat serapan anggaran yang optimal. Kinerja ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan stakeholder terhadap efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kgegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja embangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Prioritas di Kabupaten Gresik

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
1.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir yang memiliki tingkat risiko tinggi sebesar 74%. Potensi bahaya banjir di Kabupaten Gresik sangat besar dengan dampak yang mencakup area seluas 82.809 hektar. Kali Lamong adalah sungai utama di wilayah Gresik dengan Daerah Aliran Sungai sekitar 720 km2 dan panjang sungai sekitar 103 km. Kabupaten Gresik mencakup sekitar 44% dari DAS Kali Lamong dengan luas sekitar 310,12 km^2. Panjang aliran Kali Lamong di wilayah Gresik sendiri diperkirakan sekitar 58 km. Kali Lamong melewati beberapa daerah seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas, yang semuanya menjadi daerah yang rentan terhadap banjir. Kali Lamong adalah sungai intermittent yang memiliki penampang relatif datar. Sungai ini juga memiliki 34 anak sungai. Keadaan hidrologi DAS Kali Lamong dianggap kritis, dengan aliran sungai mencapai 700 m3/detik selama musim hujan, yang jauh melampaui kapasitas aliran normal sekitar 250 m3/detik. Namun, selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah. Selain bencana hidrometeororlogi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60,12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal. Selanjutntya, reklamasi pasca-tambang Semen Indonesia di Gresik menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, proses reklamasi yang rumit, dan aspek sosial-ekonomi. Upaya reklamasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dipulihkan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.
2.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75.35) dan Nasional (75.02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis a. dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20% (179 bayi) dibandingkan tahun sebelumnya 103 bayi. Angka kematian Ibu masih mencapai 77.59 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4.34 per 1000 kelahiran hidup. Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8.14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara year on year, Demam Berdarah Dengue meiningkat 488 kasus, Tubercolosis meningkat 3.404 kasus. b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di bawah rerata nasional (11,04 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di bawah. Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah rerata Jawa Timur (14,56 tahun) ; c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409. Angka ini naik dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan.
3.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan kemiskinan multidimensi	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik megalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10.96% pada tahun 2023 menjadi 10.32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa pada tahun 2023 dan 142.390 pada tahun 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat. Kabupaten Gresik adalah wilayah perkotaan yang menjadi hiterland Surabaya Metropolitan Area dan berpotensi menyimpang kantong-kantong kemiskinan.

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Individu yang terjebak dalam kemiskinan kronis sering kali menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin sulit dicapai oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kronis sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses ke peluang kerja yang baik, dan ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Selain kemiskinan kronis, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kemiskinan multidimensi. Di Kabupaten Gresik, jika pendidikan dan keterampilan terbatas, maka individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi, memperburuk kemiskinan. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, jika penduduk miskin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk keadaan ekonomi mereka. Selanjutnya, Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia.

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
4.	Tingkat Pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4.19%) dan Nasional (4.91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan. Gresik memiliki banyak perusahaan manufaktur, tetapi penempatan tenaga kerja ke dalam posisi yang sesuai masih merupakan tantangan. Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan yang efektif dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur.
5.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan	Kemantaban kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 70.74% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah (10.31%). Nilai VC (Volume-

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
	infrastruktur Daerah	Capacity) sebesar 52.17% mengindikasikan kategori Jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatas konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai Hinterland Surabaya Metropolitan Area. Secara spesifik, keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang mempengaruhi daya saing produk dan profitabilitas. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86 dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun.Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun
6.	Rendahnya Kemandirian Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,2% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20% terhadap APBDes. Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Bumdes (17,3%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum. Fasilitasi potential matching antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal
7.	Ketidakoptimalan implementasi Smart City	Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis Smart City. Dimensi Gresik smart city menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (smart *governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (s*mart economy),* ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharan lingkungan (smart environment). Akan tetapi, pencapaian di setiap dimensi masih belum optimal. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniatur (*miniaturization), big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing).* Pemerintah daerah belum memiliki keterampilan digital yang memadai (Kegagapan dgitalisasi) sehingga menghambat pemanfaatan teknologi informasi yang efektif di ilar smart city lainnya. Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal
8.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 86,94 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian Penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh. Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022. Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi hingga mencapai 62,87% pada tahun 2024 atau tertinggi sejak 1 (satu) dekade terakhir. Kapasitas fiskal Gresik semakin lesu bahkan pada Tahun 2023, Gresik tidak mendapat Dana Insentif Daerah untuk pertama kalinya sejak 12 (dua belas) tahun berturut-turut yang menunjukkan minimnya inovasi pemerintahan. Pada tahun 2023-2024, ketika Kabupaten/Kota lainnya

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		merangkak pulih dari resesi namun Gresik justru terjerembab dengan tunggakan pembayaran tahun 2022 dan 2023. Gresik harus refocusing 30% untuk membayar hutang Pada Tahun 2024, Kapasitas Fiskal Kabupaten Gresik dapat terealisasi sebesar 3.730.420.012.925,76, dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp1.385.028.684.600,76, pendapatan transfer daerah sebesar Rp2.345.205.328.325,00 dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp186.000.000,00

Tabel 2.227 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Fokus dan Urusan Pembangunan di Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75,35) dan Nasional (75,02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan
2.	Pemenuhan	Gresik telah mendapatkan apresiasi Kabupaten

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Hak Asasi Manusia	Peduli HAM. Akan tetapi, terdapat permasalahan fundamental dalam penegakan HAM diantaranya : a. Kesadaran yang rendah terhadap HAM menyebabkan pelanggaran HAM sering tidak dilaporkan atau tidak diperhatikan, serta sulitnya membangun budaya penghormatan terhadap HAM di masyarakat. b. Sistem hukum dan peradilan yang lemah, termasuk kurangnya independensi peradilan, korupsi, serta kapasitas yang terbatas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. c. Kurangnya akuntabilitas menyebabkan impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga memicu pelanggaran lebih lanjut. d. Diskriminasi berbasis gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan. e. Konflik berbasis kekerasan domestik, dan kekerasan berbasis gender sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius. f. Sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun manusia, untuk mendukung program-program penegakan dan perlindungan HAM.
3.	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2024 mencapai 0,409. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2023 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2024, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan. a. Kesehatan Reproduksi. Meskipun telah ada perbaikan, kesehatan reproduksi masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan akses wanita melahirkan di fasilitas kesehatan yang belum optimal di seluruh wilayah. b. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan. Meskipun persentase perempuan yang berpendidikan SMA ke atas meningkat, masih terdapat ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Banyak perempuan yang belum mendapatkan akses pendidikan tinggi dan pemberdayaan yang memadai. c. Partisipasi Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja masih rendah, dan mereka yang bekerja sering kali menghadapi diskriminasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak. d. Peran dan Keterwakilan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan posisi pengambilan keputusan masih rendah. Perempuan sering kali kurang terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan dan organisasi. e. Akses Terhadap Pelatihan dan Keterampilan. Akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum masih terbatas.
4.	Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tahun 2024 secara year on year mencapai 4,79 dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4,62. Pertumbuhan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan Surabaya (5,76%) Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Gresik mencakup dampak pandemi COVID-19, fluktuasi di sektor-sektor kunci, ketergantungan pada sektor industri pengolahan, penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas, serta masalah pada pengeluaran konsumsi.
		Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan laju inflasi yang lebih rendah dari nasional pada tahun-tahun awal, tetapi meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 1.81%. Fluktuasi inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan baik bagi individu maupun bisnis. Kabupaten Gresik menggunakan data inflasi Kota Surabaya karena kurangnya data spesifik untuk Gresik. Ketergantungan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan inflasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik
5.	Ketimpangan	Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia. Kesenjangan pendapatan juga mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini dapat mengurangi mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi rendah sulit meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, kesenjangan ini bisa menjadi permanen dan menghambat potensi ekonomi individu dan komunitas secara keseluruhan.
		Indeks Williamson di Kabupaten Gresik berada pada kategori Sedang dengan nilai 0,35 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 0,35 pada tahun 2023 dan 2024 Meskipun terjadi sedikit penurunan, nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah masih cukup signifikan. Ketimpangan antar kecamatan mengindikasikan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal distribusi pembangunan dan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang berada dekat dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo seperti Kecamatan Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, dan Driyorejo menunjukkan tingkat disparitas tinggi karena adanya pusat infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sementara kecamatan lainnya, yang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini dapat mengurangi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya di daerah dengan ketimpangan tinggi
6.	Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10.96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,79%) dan provinsi (8.57%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 142.390 jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat.
7.	Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19% dan Nasional (4,91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan.
8.	Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,94 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian Penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022 Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60.12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori “sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal.
10.	Ketahanan	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Bencana	dari tahun 2021 hingga 2024 berada dalam kategori Risiko Sedang. IRB menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 (96,50) dan terendah pada tahun 2024 (91,42). Kategori Risiko Sedang"menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik menghadapi risiko bencana yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak rendah. Ini mencerminkan bahwa daerah ini memiliki potensi untuk terkena bencana dengan dampak yang signifikan. Jika IRB tetap stabil dalam kategori Sedang, ada kemungkinan bahwa upaya mitigasi bencana belum sepenuhnya efektif atau tidak terimplementasi dengan baik. Ini bisa terjadi jika strategi mitigasi tidak memperhitungkan seluruh faktor risiko atau tidak dilaksanakan secara menyeluruh.
	Aspek Pelayanan Umum	
11.	Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di atas rerata nasional (8.85 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di bawah rerata Jawa Timur (13.43 tahun)
		Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah
		Fasilitas sekolah yang terstandarisasi nasional belum optimal
		Masih tingginya Angka Anak Putus Sekolah, yaitu sebanyak 14.247 anak usia 7-18 tahun pada tahun 2023 atau sekitar 4,21 % dari total penduduk usia sekolah
12.	Kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 237 bayi dibandingkan tahun sebelumnya 171 bayi.
		Angka kematian Ibu masih mencapai 77.59 per

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,34 per 1000 kelahiran hidup
		Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8.14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
		Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara year on year, Demam Berdarah Dengue meiningkat 488 kasus Tubercolosis meningkat 3.404.
13. 280	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan hanya mencapai 43,24%
		Persentase Akses Air Bersih/Minum (Jaringan Perpipaan) hanya mencapai 39,12% sedangkan Persentase Akses Air Bersih/Minum (Bukan Jaringan Perpipaan) mencapai 21,70%
		Terdapat 193 Waduk milik pemerintah Kabupaten namun hanya 6.41% yang berhasil dinormalisasi pada Tahun 2024
		Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) hanya mencapai 56.93%.
		Terdapat sebesar 25.27% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat
14.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertumbuhan rumah umum pada tahun 2024 mencapai 22.86% sedangkan penanganan rumah swadaya yang tidak layak huni hanya mencapai 2,04% sedangkan luasan kawasan kumuh masih mencapai 571,12 Ha
15.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Intensitas bencana Kebakaran Gresik sangat tinggi mencapai 580 kejadian sedangkan jumlah personil dan infrastruktur sangat terbatas. Kondisi ini berbenturan dengan fakta bahwa jumlah Industri di Gresik yang beresiko tinggi

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		dalam menyebabkan kebakaran sangat tinggi.
		Intensitas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terhadi di ranah digital dan konvensional yang membutuhkan penguatan pengawasan dan penindakan
16.	Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hanya berkuta pada kisaran 0,39 sampai dengan 0,42% per tahun.
		Masih tingginya tingkat kesenjangan, keterlantaran, kekerasan kepada anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya dengan Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS 65,06
		Cakupan Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial masih rendah sebesar 55,67%
17.	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19 dan Nasional (4.91%).
		Rasio penempatan pencari kerja masih rendah mencapai 39,04%
18.	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun masih tinggi mencapai 9.27%
		Unmeet Need ner KB masih tinggi mencapai 9.18%
19.	Pangan	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH) 93,6, Rasio ketersediaan pangan 184.04 kg/kapita/th, dan Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras) mencapai 9,39%
		Infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian masih belum optimal.
		Lahan pertanian di Kabupaten Gresik semakin terbatas akibat alih fungsi lahan untuk

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		pembangunan industri dan perumahan.
		Perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat berdampak negatif pada produksi pangan.
		Sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang kurang efisien dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan.
20.	Pertanahan	Masih terjadi konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah terkait kepemilikan dan penggunaan lahan yang belum termediasi
		Pemanfaatan lahan terutama aset Pemerintahan Kabupaten Gresik seringkali tidak efisien, dengan banyak lahan yang dibiarkan kosong atau digunakan secara suboptimal.
		Belum optimalnya layanan sertifikasi pertanahan dengan masih adanya mafia tanah
21.	Lingkungan Hidup	Volume timbulan sampah Tahun 2023 143.408,50 Ton/Tahun sedangkan Volume sampah yang dikelola 110.711,36 Ton/Tahun dengan persentase pengelolaan sampah 77.21% dan penanganan sampah hanya 58.7%.
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih kategori yang rendah dengan nilai 60.12%
		Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan masih mencapai 64.21%
22.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	kepemilikan Kartu Identitas Anak masih rendah (99.31%), validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif yang terselesaikan masih 17% pada Tahun 2024.
23.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,2% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20% terhadap APBDes.
		Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57 Bumdes (17,3%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum
		Fasilitasi potential matching antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal
24.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2024 (91.61) dibawah capaian Provinsi Jawa Timur.
		Masih terdapat Perempuan Gresik yang tidak hidup sejahtera atau terjerat dalam lingkaran kemiskinan seperti temuan sekolah perempuan di Desa Sooko, Mondoluku, Sumbergede, Kesamben Kulon, Dungus, Dooro, Kedungsumber, Pulopancikan, Sidomukti, Kramat, Kramatinggil, Brangkal dan Wonorejo bahwa 13 Kepala Keluarga Lansia (hidup sendiri) perempuan dihapus sebagai penerima PKH dan BPNT karena kesalahan administrasi, 44 penerima KIS yang datanya tidak sama dengan KTP mengakibatkan tidak dapat menerima manfaat KIP, penerima manfaat KPG (Kartu Gresik Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) selama 2 tahun sampai sekarang tidak mendapatkan pencairan dana, dan 20 perempuan disabilitas tidak menerima PKH.
25. ‘	Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		keamanan transportasi
		Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 66.67%
		Nilai Volume-Capacity (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 52.17 mengindikasikan kategori Jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.
		Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata
26.	Komunikasi dan Informatika	Perkembangan massif dunia digital baik arus mainstream maupun *social media* yang menyentuh lansung generasi millenial dan Gen Z di Gresik (16-41 Tahun pada tahun 2022) mencapai 58,15% dari total potensial penduduk 17 Tahun ke atas pada Tahun 2024. Tingginya literasi digital selaras dengan rasio pengguna gadget mencapai 78,11% berdasarkan survey dari APJII pada Tahun 2022. Kondisi menghadapi berbagai ancaman seperti asimetris Informasi, Hoaks, Gelembung Informasi (*filter bubble),* dan berita buruk yang menjadi sisi gelap perkembangan dunia digital.
		Peningkatan kualitas Pers dan pengendalian pers yang belum tersertifikasi
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan sistem informasi yang interoperable dan pembangunan basis data terpadu belum optimal
27.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Koperasi aktif pada tahun 2024 hanya mencapai 52.01% (815 dari total 1567 Koperasi)
		Rata rata pertumbuhan usaha mikro selama lima tahun terakhir hanya sekitar 1%
		Penyalahgunaan dana hibah UMKM sebesar Rp

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		19 miliar yang diperuntukkan 782 UMKM pada tahun 2023-2024
		Belum adanya monitoring berkelanjutan terhadap hasil pembinaan usaha mikro
28.	Penanaman Modal	Penyederhanaan birokrasi berbasis *easy of doing bussiness* perlu dioptimalkan
		Kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian regulasi penanaman modal di Daerah
		Kepatauhan perusahaan dalam pengendalian penanaman modal masih mencapai 69.42%
		Keterbatasan akses ke pembiayaan dan insentif finansial untuk mendukung investasi baru dapat menghambat penanaman modal.
29.	Kepemudaan dan Olahraga	Ketebatasan partisipasi pemuda dalam pembangunan baik pada jenjang Desa hingga Kabupaten
		Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga kompetisi dan rekreasi masih belum optimal
		Rendahnya tingkat pemuda wirausaha disbanding jumlah pemuda usia produktif
		Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi social dan kemasyarakatan pada tahun 2023 masih menunjukkan angka 12,7% lebih rendah disbanding rata – rata Jawa Timur sebesar 15,3%
		Masih banyak pemuda yang terlibat masalah social, pada tahun 2023 kasus kenakalan remaja/pemuda tercatat sebanyak 127 kasus yang meliputi tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas ringan.
		Rendahnya partisiapasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan pengembangan olahraga prestasi

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
30.	Statistik	Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal
		Pengembangan standar yang konsisten dalam metodologi pengumpulan data untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan; Kebutuhan untuk prosedur validasi yang ketat untuk memastikan akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan.
31.	Persandian	Pengembangan keamanan informasi, manajemen sandi, dan teknologi enkripsi bleum optimal terutama dalam menghadapi peningkatan ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS yang dapat mengkompromikan keamanan informasi pemerintah dan masyarakat. Perangkat Daerah belum menerapkan teknologi enkripsi secara menyeluruh untuk melindungi data sensitif.
32.	Kebudayaan	Pelestarian dan apresiasi kebudayaan belum partisipatif
		Obyek cagar budaya yang terdaftarkan masih mencapai 13.16%
		Tradisi, bahasa, dan praktik budaya lokal yang mulai menghilang karena pengaruh modernisasi dan globalisasi.
		Keterbatasan pendanaan dan jejaring kerja untuk mendukung program-program kebudayaan, termasuk pelestarian situs bersejarah dan penyelenggaraan acara budaya
33.	Perpustakaan	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat dengan efektifitas penguatan literasi masih mencapai 68,98% dan ketercukupan bahan pustaka masih 75.50%, serta kurangnya

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		upaya digitalisasi koleksi buku dan materi lainnya, sehingga sulit diakses secara online.
34.	Kearsipan	Pemenuhanan standar dan prosedur yang baku dalam pengelolaan arsip, termasuk dalam proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip di level pemerintah Daerah dan Desa masih perlu ditingkatkan
35.	Kelautan dan Perikanan	Praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi termasuk penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem serta overfishing (Penangkapan Ikan Berlebihan)
		Pencemaran perairan akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang mencemari habitat ikan dan mengurangi kualitas air.
		Kurangnya pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti tempat penyimpanan yang sesuai standar (cold storage).
		Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya tidak diikuti dengan pengukuran kualitas kesejahteraan nelayan (nilai tukar nelayan, produktivitas,,dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental
36.	Pariwisata	Keterbatasan fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum menghambat perkembangan pariwisata.
		Kurangnya strategi pemasaran dan promosi yang efektif mengurangi daya tarik destinasi wisata.
37.	Pertanian	Kebutuhakan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan perubahan suhu yang dapat mempengaruhi hasil panen dan produktivitas.
		Keterbatasan akses ke teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien.
		Produktivitas tanaman pangan dan holtikulturan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan (nilai tukar oetani, produktivitas, dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental
38.	Perdagangan	Neraca perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 mencapai surplus 3.34%
		Pertumbuhan ekspor mengalami penurunan mencapai -3,78%
		Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan
		Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
39.	Perindustrian	Rerata pembinaan terhadap industri kecil dan menengah hanya mencapai 0,77 smapai dengan 1,71% selama 5 tahun terakhir
		IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas hanya 1,114%
		Belum optimalnya ebijakan adaptasi dalam menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan karena risiko tinggi dan keterbatasan jaminan serta sulitnya membangun jaringan distribusi yang luas untuk pentrasi pasar dan ekspansi.
40.	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dapat mempertahankan nilai A selamai 6 tahun terakhir namun mengalami stagnasi atau perlambatan dalam perbaikan ke level AA
		Kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD belum optimal untuk menggali dan memanfaatkan potensi bisnis. Belum optimlnya kontribusi BUMD terhada pendapatan asli Daera serta ketergantungan yang tinggi pada APBD

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		menghambat fleksibilitas keuangan dan operasional BUMD.
		Belum optimalnya kebijakan administrasi pembangunan dalam penggalian pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), *Limited Concession Scheme* (LCS), Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), dan CSR
		Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan bersasaran berbasis kemiskinan kronis dan multidimensi sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan masih didominasi karitatif
		Kerjasama pemerintah Daerah dengan pemerintah dan instansi lainnya perlu dioptimalkan untuk peningkatan kebermanfaatan di sektor sektor prioritas
41.	Sekretariat Dewan	Kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD masih mencapai 72%
42.	Perencanaan	Keselarasan prioritas pembangunan Daerah antar sektor dan dokumen perencanaan perlu dipotimalkan dalam arsitektur kinerja dari level strategis hingga output
		Pembangunan basis data terpadu untuk perencanaan
		Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar wilayah dan wilayah Kabupaten Gresik dengan wilayah sekitar serta proyek strategis nasional
43.	Keuangan	Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan rasio kemandirian fiskal mencapai 62,87%
		Selama pelaksanaan anggaran pada tahun 2021-

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		2024, Kabupaten Gresik melaksanakan beberapa kali *refocusing* anggaran pada tiap tahun anggaran berkenaan. Praktek refocusing anggaran mengindikasikan beberapa potensi kelemahan dalam manajemen anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.
		Optimaliasi penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
44.	Kepegawaian	Optimalisasi indeks profesionalitas ASN
		Optimalisasi manajemen sumber daya manusia ASN berbasis sistem Merit yang berfokus pada penilaian, promosi, dan pengembangan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi merek
		Subjektivitas dalam penilaian kinerja
		Kebutuhan untuk pengembangan budaya ASN berakhlak yang merupakan inisiatif dan pedoman yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN melalui penerapan nilai-nilai akhlak dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja ASN dan memastikan bahwa mereka melayani publik dengan cara yang etis dan profesional.
45.	Pengawasan	Keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan
46.	Kewilayahan	Penguatan peningkatan kapasitas, manajemen ASN, pendanaan terhadap kecamatan dalam mendukung intermediery penyelenggaraan pelayanan publik
47.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Politisasi identitas dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok.
		Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau perencanaan kebijakan.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Tantangan dalam memperkuat institusi demokrasi seperti pemilihan yang adil, kebebasan pers, dan hak asasi manusia.
	Aspek Daya Saing Daerah	
48.	Kemampuan Ekonomi Daerah	Ditinjau dari perekomian (makro ekonomi Daerah). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami kenaikan pada tahun 2024 secara year on year mencapai 4,79 dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4.62 Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan Surabaya (5,76%) Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Tingkat Kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10.96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,79%) dan provinsi (8.57%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 142.390 jiwa.
		Ditinjau dari infasrtuktur, terdapat sebesar 29,26% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat . Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 66.67%. Nilai Volume-Capacity (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 52.17% mengindikasikan kategori Jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Angka kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 2.184 meningkat 121,1% dibandingkan tahun sebelumnya (1.803 kasus)
		Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) menurun kembali di tahun 2023 menjadi 40,75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.
		Rasion lulusan D4/S1/S2/S3 mencapai atau 5,12% dari total penduduk
		Optimalisasi dan pmenuhan secara progressif pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik yang telah mencapai target nasional masih sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2026. Dalam perumusannya, arah kebijakan ekonomi daerah tidak hanya diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, tetapi juga memperhatikan kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, dinamika dan permasalahan perekonomian daerah dijadikan landasan penting dalam menetapkan arah kebijakan yang tepat sasaran.

Arah kebijakan dan pengembangan ekonomi Kabupaten Gresik dirancang dengan memperhatikan potensi unggulan daerah, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pertanian, kelautan, serta pariwisata. Optimalisasi potensi tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 hingga 2025

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang diperoleh dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB dapat dihitung dengan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari output dari seluruh produksi barang dan jasa di wilayah tersebut yang dikurangi dengan nilai biaya antara pada masing-masing kegiatan ekonomi menurut lapangan usahanya.

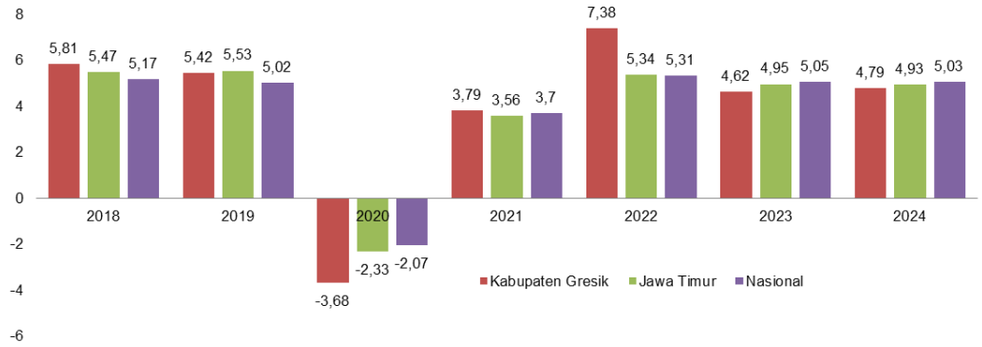

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024, data diolah

Selama tahun 2019 – 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 sebesar 5.42 persen dan menurun tajam atau terkontraksi di angka -3.68 persen pada tahun 2020. Selanjutnya tahun 2024 kembali menguat ke angka 4.79.

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp.108.796,88,-. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69,- pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan

ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 – 2024

Lapangan Usaha	**PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)**					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.053,85	6.004,08	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05
B. Pertambangan dan Penggalian	9.844,45	8.582,77	8.705,94	9.385,49	9.293,59	8.783,73
C. Industri Pengolahan	48.340,37	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	544,26	543,75	556,66	590,75	611,89	649,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61,84	64,12	70,67	73,15	76,61	80,33
F. Konstruksi	9.893,28	9.234,80	9.418,46	9.929,74	10.477,02	10.939,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	12.805,93	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Motor						
H. Transportasi dan Pergudangan	2.337,38	2.209,85	2.284,80	2.603,66	2.915,52	3.169,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.281,89	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02
J. Informasi dan Komunikasi	4.722,78	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.084,15	1.075,75	1.079,42	1.102,43	1.149,29	1.212,97
L. Real Estat	1.362,86	1.383,88	1.445,48	1.527,52	1.585,05	1.642,29
M,N. Jasa Perusahaan	285,25	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.136,24	1.131,65	1.140,31	1.144,45	1.156,92	1.259,67
P. Jasa Pendidikan	891,62	916,57	937,05	939,42	1.002,26	1.050,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	405,46	441,85	462,55	452,58	469,68	500,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	294,94	250,75	264,62	314,89	329,93	354,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**101.346,55**	**97.616,60**	**101.318,69**	**108.796,88**	**113.825,43**	**119.274,42**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan	10.285,30	10.337,08	10.160,48	11.085,25	11.969,33	12.352,11

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan						
B. Pertambangan dan Penggalian	10.584,41	8.000,41	10.034,94	13.757,11	12.126,94	11.575,10
C. Industri Pengolahan	66.603,47	66.583,60	72.264,74	81.039,11	88.719,44	96.658,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	709,65	682,84	683,07	733,13	765,89	803,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85,45	88,8	98,56	105,71	112,58	119,74
F. Konstruksi	13.484,20	12.642,99	12.903,96	14.327,94	15.484,98	16.343,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.294,82	16.742,78	18.260,50	20.775,08	22.770,34	24.312,14
H. Transportasi dan Pergudangan	3.509,13	3.334,17	3.431,93	4.096,71	4.893,73	5.407,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.947,23	1.785,41	1.958,41	2.232,16	2.495,87	2.724,15
J. Informasi dan Komunikasi	5.507,90	6.021,50	6.470,87	6.790,45	7.335,50	7.920,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.621,61	1.612,73	1.675,36	1.853,62	1.979,39	2.121,85
L. Real Estat	1.832,87	1.874,36	2.015,92	2.170,38	2.285,03	2.396,61
M,N. Jasa	415,3	430,9	446,03	482,81	534,48	586,18

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perusahaan						
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.817,32	1.893,90	1.896,02	1.961,23	2.069,32	2.358,70
P. Jasa Pendidikan	1.219,47	1.266,38	1.305,95	1.332,16	1.456,29	1.551,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	548,12	602,43	646,79	664,82	712,26	766,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	427,35	368,27	402,54	500,27	549,62	607,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	138.893,60	134.268,56	144.656,07	163.907,91	176.261,00	188.604,51

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

3.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industry dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar sampai home industry, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan "Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

No	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	0,02 %	21,14 %	0.06 %	-35.17%	33,34

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2025

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Jumlah nilai neraca perdagangan tahun 2018 sebesar 1.790.348.804,57 USD dan sedikit menurun pada tahun 2019 sebesar 1.663.116.258,25 USD dan masih menurun sedikit dampak dari pembatasan aktivitas perdagangan selama pandemi covid 19 pada tahun 2020 sebesar 1.431.784.855,09 USD kemudian mulai naik pada tahun 2021 sebesar 1.734.417.711 USD. Adapun Realisasi pada Tahun 2022 sebesar 2.288.229.997.55 USD.

Tabel 3.4 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637,19	414.778.152,33	1.734.417.711,00
6	2022			2.288.229.977.09
7	2023			1.483.390.516.58
8	2024			

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2024

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara year on year menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19.

3.1.1.3 Kinerja Investasi

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia

lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah meningkatnya pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2022 sebesar 24,11%

Tabel 3.5 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017 sd Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52%	35,52%	24,11%	41.99	22,66
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	84,18%	21,90%	117,88 %	258.51	55,76
3	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	16,67%	57,14%	70,00%	17.65	15,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T dan terendah sebesar 4,59 T pada tahun 2019. Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola sebaliknya, dimana realisasi investasi terus bergerak naik dan stabil setiap tahunnya. Realisasi investasi Provinsi Jawa Timur secara berurutan sebesar 51,2 T pada 2018; 58,4 T pada 2019; 66,5 T pada 2020; dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79,5 T. Secara Nasional, jumlah realisasi investasi bergerak fluktuatif cenderung naik, meskipun sempat terjadi kontraksi sebesar minus 24,46 % pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan realisasi investasi kumulatif Nasional sudah mencapai angka 4.349,1 T, Jawa Timur 314,9 T, dan Kabupaten Gresik mencapai 77,12 T atau meningkat sebesar 14,74% dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi investasi kumulatif pada tahun 2019. Pada Tahun Pertumbuhan Realisasi Investasi pada tumbuh 24,11%. Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mendakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Pada bulan Januari 2024, Kabupaten Gresik mengalami inflasi bulanan sebesar 0,19 persen dan inflasi tahunan sebesar 1,81 persen. Menurut data

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, angka inflasi tersebut merupakan yang terendah di kawasan Provinsi Jawa Timur. Meski terbilang rendah perlu adanya pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPS Gresik. Sehingga dapat mengendalikan laju inflasi secara seimbang. Salah satu penyumbang inflasi utama bulan Januari 2024 secara month to month (m-to-m) atau bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,23 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain tomat, semangka, bawang putih, kontrak rumah, dan ikan mujair. Sedangkan komoditas peyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, dan bensin. Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai macam langkah pencegahan dalam menghadapi inflasi. Seperti penyesuaian subsidi pupuk untuk petani tambak. Ada pula gerakan tanam cabai massal yang telah digaungkan sejak 2023.

Pada April 2025 secara year on year Kabupaten Gresik mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,77. Secara month to month (m-to-m) nilai inflasi sebesar 0,39 persen dan secara year to date (y-to-d) mengalami inflasi sebesar 0,97 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran.

3.1.1.5 Daya Saing Daerah

3.1.1.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.1.1.5.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gresik pada tahun 2010 adalah sebesar 44,86. Rasio Ketergantungan ini menurun menjadi 42,76 di tahun

2016. Kemudian, Rasio Ketergantungan ini menurun kembali di tahun 2022 menjadi 40,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio tersebut naik sebesar 0,18% dari tahun 2021 dengan nilai sebesar 40.76%. Secara keseluruhan, Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik mengalami trend turun untuk 12 tahun terakhir.

Gambar 3.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2024

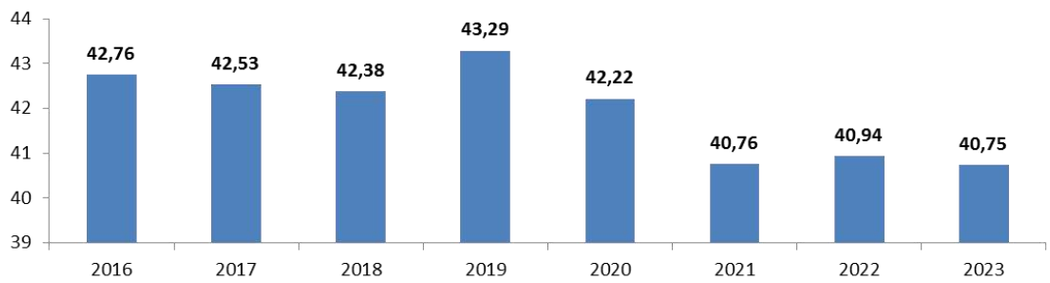

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2023

3.1.1.5.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

3.1.1.5.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan padakriteria:

a. Dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
b. Dapat diterapkan pada daerah lain.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
-	Indeks Inovasi Daerah	43.04	48.4	45.92	54.43

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan di setiap tahun. Pada Tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 8.51 mencapai 54,43 dari tahun 2023 dengan predikat Inovatif sebagaimana Keputusan

3.1.1.5.2.2 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan tabel diatas wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebanyak 18.281 orang, meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.280.847 orang, meningkat hanya 3,9 persen dari tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan tabel destinasi wisata di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 terdaoat 132 destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Tabel 3.7 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2021-2024

Tahun	Wisatawan	Mancanegara	Jumlah
2021	37	2.106.133	2.106.170
2022	12.599	4.120.683	4.133.282
2023	18.281	4.280.847	4.299.128
2024	18.655	4.495.426	4.514.084

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, 2024

Tabel 3.8 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri Cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	132	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, 2024

3.1.1.5.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi sektor berbasis kreativitas, inovasi dan pemanfaatan nilai budaya terhadap total PDRB. Sektor

ini berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi berkekelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. dengan kontribusi yang semakin besar, ekonomi kreatif dapat menjadi pendiring diserfikasi struktur ekonomi, serta memperkuat resiliensi terhadap perubahan global dan disrupsi tekhnologi.

3.1.1.5.2.4 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ekonomi daerah pada level kabupaten. Indikator ini mencerminkan kapasitas sektor non pertanian dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung transformasi struktur dalam pembangunan. Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan perubahan ekonomi daerah. dalam berbagai kenijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

3.1.1.5.2.5 ICOR

Nilai ICOR mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan antara tambahan kapital dan tambahan output. Nilai ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu investasi. Koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil menunjukkan kondisi investasi yang efisien, sedangkan koefisien ICOR yang bernilai negatif atau bernilai relatif besar menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi dalam suatu investasi.

Dengan adanya nilai ICOR akan mempermudah perencana pembangunan untuk menentukan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pemenuhan investasi bisa dibantu oleh sektor swasta, bila APBD setempat tidak bisa menunjang pemenuhan kebutuhan investasi tersebut, maka dari itu sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi pemenuhan investasi yang ditetapkan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diperlukan adanya koefisien ICOR tiap sektor untuk menentukan kebutuhan investasi tiap sektor tersebut.

Tabel 3.9 Capaian Indikator ICOR Tahun 2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
-	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	-	-	-	5,11*

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

3.1.1.5.2.6 Pertumbuhan Usaha Mikro

Peningkatan Usaha Mikro menjadi krusial karena sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Gresik. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya lokal, peningkatan kewirausahaan juga memperkuat ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, potensi ekonomi berbasis kearifan lokal semakin optimal dan struktur ekonomi daerah semakin resilience serta adaptif terhadap tantangan global.

Tabel 3.10 Pertumbuhan Usaha Mikro

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Usaha Mikro (%)	1.92%	1.08%	1.92%	33.81 %

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perinduatrian dan Perdagangan

Berdasarkan data dalam tabel, Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2019–2024. Dinamika ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Gresik, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta daya saing pelaku usaha. Penurunan tajam pada 2022 kemungkinan besar merupakan dampak residual pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi sektor usaha, sedangkan pemulihan pada 2023 mengindikasikan efektivitas strategi revitalisasi ekonomi. Namun, kecenderungan penurunan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro masih belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, termasuk penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta optimalisasi ekosistem bisnis guna mendorong pertumbuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

3.1.1.5.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin banyak penduduk yyang bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga perekonomian rata-rata angkatan kerja akan membaik.

Tabel 3.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tahun	TPAK Total (%)	TPAK Laki-laki (%)	TPAK Perempuan (%)
2021	69,43	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
2022	68,3	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
2023	70,12	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
2024	71,61	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia

Kekurangan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah, hanya menunjukkan jumlah angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang telah bekerja dibandingkan dengan seluruh penduduk usia produktif di suatu wilayah, Indikator TPAK belum dapat menunjukkan secara spesifik jumlah penduduk bekerja dalam angkatan kerja di suatu wilayah, Untuk itu, pada periode selanjutnya penggunaan indikator TPAK digantikan dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, Indikator TKK mengindikasikan secara spesifik besarnya angkatan kerja yang bekerja, Semakin tinggi TKK, maka kesempatan kerja di wilayah tersebut semakin tinggi.

3.1.1.6 Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan 2026

Perekonomian global masih penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan di 2024. Pertumbuhan global diperkirakan masih tumbuh positif mencapai 3,2 persen di tahun 2024. Kelompok negara berkembang khususnya wilayah Asia diperkirakan menjadi penggerak pertumbuhan dan perdagangan internasional di tahun 2024. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok (reopening) pasca kebijakan Zero-Covid yang sudah dimulai sejak 2023 serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) menjadi beberapa faktor pendorong yang menopang pertumbuhan global ke depan. Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter.

Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023, dan terus terkendali hingga tahun 2025. Indonesia masih berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2024 dengan Salah satu faktor pendorongnya adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi penyumbang proporsi yang tinggi dalam produk domestik bruto Indonesia. Pada tahun 2024 potensi konsumsi masih terlihat

dari aktivitas ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, serta adanya momen Pemilu.

Tabel 3.12 Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2027

No	Indikator	Baseline 2024	Satuan	2025	2026	2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	Angka (0-100)	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07
2	Indeks Pembangunan Gender	91,01*	Angka (0-100)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76
3	Indeks Kesalehan Sosial	80,32*	Angka (0-100)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72
4	Pertumbuhan ekonomi	4,79	Persen (%)	4,72-5,32	5,8-6,3	4,80-5,88
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58*	Persen (%)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	39.540,50	Ton CO_2eq per tahun	40.331,31	41.137,93	41.960,69
7	Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	Angka (0-100)	86.17	86.71	87.24
8	Tingkat kemiskinan	10,32	Persen (%) (Burden)	8,47-9,95	6,50-7,50	8,26-9,21
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	Persen (%) (Burden)	6,91 - 6,00	4,44-4,96	6,88-5,39
10	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	Tahun	10,37	10,49	10,62
11	Harapan Lama Sekolah	13,97*	Tahun	13,99	14,01	14,08
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	Tahun	74,57	74,82	75,08
13	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	Angka (0-100)	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00
14	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	Angka (0-100)	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50
15	Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	Angka (0-1)	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385
16	Indeks Inklusi (GEDSI)	56,2	Angka (0-100)	60	64	68
17	Indeks Harmoni	3,77	Angka (1-5)	3,78	3,79	3,80
18	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	Persen (%)	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00
19	Rasio Net Ekspor	10,51*	Persen (%)	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20
20	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5,11*	Angka (<3->6)	4,6	5,11	5,11

No	Indikator	Baseline 2024	Satuan	2025	2026	2027
21	Rasio *Government Expenditure*	11,79	Persen (%)	35-40	40-45	40-45
22	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	Angka (0-5)	3,75	3,85	3,95
23	Indeks Infrastuktur	61,62	Angka (0-100)	63,23	67,86	69,07
24	Indeks Konektivitas Wilayah	0,725	Angka (0-1)	0.745	0.765	0.785
25	Indeks Risiko Bencana	91,42*	Angka (>100-0) (Burden)	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	Angka (0-100)	65,09	65,16	65,24
27	Indeks Pemerintah Digital	4,32**	Angka (0-5)	4,37**	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25
28	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62	Predikat	80,9	81,2	81,5
29	Indeks Sistem Merit	310,5	Angka (0-410)	315	330	345
30	Indeks Pelayanan Publik	1.66	Angka (>2,01)	2,25	2,51	2,75
31	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	100-0 (Burden)	48	46	44
32	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80	Persen (%)	80-95	85-95	90-95
33	Rasio gini	0,330	1-0 (burden)	0,311 - 0,351	0,377-0,380	0,295 - 0,335
34	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32	Persen (%)	25-35	30-40	35-45

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Gresik selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan berlaku pada tahun 2025, persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2025-2026 seharusnya diproyeksikan mengalami peningkatan. Berdampak pada beralihnya mekanisme "Bagi Hasil Pajak Daerah" menjadi "Opsen Pajak Daerah". Di samping perubahan mekanisme, juga terdapat prosentase pembagian dari bagi hasil menjadi opsen pajak, dimana sebelumnya pada mekanisme Bagi Hasil Pajak Daerah, Prosentase Provinsi sebesar 70% dan Prosentase Kab/Kota sebesar 30%, sedangkan pada mekanisme Opsen Pajak Daerah prosentase Kab/Kota sebesar 66%. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memanfaatkan bagi hasil pajak daerah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah kabupaten/kota diminta dapat menggali dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga, bagi hasil yang diterima dapat benar-benar berdampak nyata untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing- masing.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2026 didasarkan target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025-2026, serta data APBD Tahun 2020-2024 dan data APBD tahun 2025 semester pertama. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah yaitu kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik cukup tinggi, dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2025 memiliki nilai sebesar 40.13%. Adapun untuk proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada Pergeseran APBD tahun 2025 naik menjadi 40.56% disebabkan karena terdapat Penurunan Dana Transfer. Dengan berlakunya Undang-Undang terkait HKPD, terdapat perubahan mekanisme dan formulasi Bagi Hasil Pajak PKB dan BBNKB menjadi Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dirumuskan berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan harapan nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dikelompokan atas:

a. Pendapatan asli daerah;
   (1) pajak daerah;
   (2) retribusi daerah;
   (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan Transfer;
   (1) Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana perimbangan;
      2) dana insentif daerah;
      3) dana otonomi khusus;
      4) dana keistimewaan; dan
      5) dana desa.
   (2) Transfer antar-daerah.
      1) pendapatan bagi hasil;
      2) bantuan keuangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   (3) hasil kerja sama daerah;
   (4) jasa giro;
   (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
   (6) pendapatan bunga;
   (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   (11) pendapatan denda pajak daerah;
   (12) pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   (13) pendapatan dari pengembalian;
   (14) pendapatan dari BLUD; dan
   (15) pendapatan lainnya sesuai

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan umum;
b. Ketertiban dan ketentraman;
c. Ekonomi;
d. Lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum;
f. Kesehatan;
g. Pariwisata dan budaya;
h. Pendidikan; dan
i. Perlindungan sosial.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

   Belanja operas merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   (1) belanja pegawai;
   (2) belanja barang dan jasa;
   (3) belanja bunga;
   (4) belanja subsidi;
   (5) belanja hibah; dan
   (6) belanja bantuan sosial.

b. belanja modal;

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(1) belanja bagi hasil; dan

(2) belanja bantuan keuangan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah;
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi / Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 – 2027

Uraian	2022	2023	2024	APBD 2025	Target 2026	Target 2027
a. Pendapatan	**1.212.314.323.822**	**3.416.390.957.965**	**3.730.420.012.926**	**3.807.610.991.713,60**	**3.878.537.215.995,09**	**3.986.399.785.150,25**
1. Pendapatan Asli Daerah	1.191.799.202.154,29	1.171.022.355.999	1.385.028.684.601	1.544.422.292.713,60	1.574.612.321.995,09	1.682.474.891.150,25
2. Pendapatan Transfer		2.241.478.601.966	2.345.205.328.325	2.263.188.699.000,00	2.303.924.894.000,00	2.303.924.894.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	20.515.121.668,00	3.890.000.000	186.000.000	0	0	0
b. Belanja	**3.551.253.716.920**	**3.417.454.106.968**	**3.695.507.021.522**	**3.809.501.438.593,60**	**4.181.401.623.869,01**	**3.986.399.785.150,25**
1. Belanja Operasi	**2.336.052.115.276**	**2.202.478.442.331**	**2.495.363.606.434**	**2.572.461.793.291,72**	**2.712.897.722.476**	**2.691.222.641.051**
a. Belanja Pegawai	978.449.069.438	1.009.787.854.449	1.085.231.199.034	1.236.413.965.328,93	1.247.209.411.168	1.293.887.466.180
b. Belanja Barang dan Jasa	1.077.667.277.561	868.397.712.028	1.011.011.166.180	1.022.511.711.679,16	1.122.333.775.314	1.069.993.156.180
b. Belanja Bunga	-	-	964.120.370	0	-	-
c. Belanja Subsidi	-	-	-	0	-	-
d. Belanja Hibah	255.072.373.102	303.819.808.882	382.505.675.850	298.983.759.700,00	328.171.861.455	312.867.396.074
e. Belanja Bantuan Sosial	24.863.395.175	20.473.066.972	15.651.445.000	13.832.304.500,00	15.182.674.539	14.474.622.618
2. Belanja Modal	**310.157.730.143**	**431.340.278.246**	**424.418.337.238**	**430.537.471.153,00**	**472.568.421.363**	**450.529.947.335**
a. Tanah	18.343.184.523	11.021.176.466	1.727.306.005	61.742.872.000,00	67.770.481.100	64.609.969.478
b. Peralatan dan Mesin	102.990.160.803	123.664.589.654	86.126.274.741	81.437.732.897,00	89.388.040.422	85.219.382.682
c. Gedung dan Bangunan	36.726.692.945	149.832.834.297	118.126.274.741	113.390.842.979,20	124.460.552.807	118.656.270.217

Uraian	2022	2023	2024	APBD 2025	Target 2026	Target 2027
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.378.850.813	133.679.243.538	208.508.996.188	165.997.792.074,80	182.203.222.266	173.706.080.265
e. Aset Tetap Lainnya	4.637.798.060	10.702.434.291	8.617.485.563	7.968.231.202,00	8.746.124.768	8.338.244.693
f. Aset Lainnya	81.043.000	2.440.000.000	1.312.000.000	-		-
3. Transfer	**905.043.871.500**	**783.635.386.391**	**775.725.077.850**	**786.260.503.074,76**	**995.935.480.030**	**844.647.196.763**
Belanja Bagi Hasil	66.996.357.000	96.552.366.600	115.413.727.850	121.094.968.894,76	132.916.789.176	126.718.145.607
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	66.996.357.000	96.552.366.600	115.413.727.850	108.368.591.237,60	118.948.006.893	113.400.804.748
b. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	12.726.377.657,16	13.968.782.283	13.317.340.858
c. Bantuan Keuangan	838.047.514.500	687.083.019.791	660.311.350.000	665.165.534.180,00	730.101.901.678	591.210.905.550
(Defisit)	(2.338.939.393.098)	(1.063.149.003)	34.912.991.404	(1.890.446.880)	-302.864.407.873,92	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

3.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif

Sebuah pembangunan infratruktur selalu bertujuan untuk meningktkan kesejahteraan maasyarakat serta meningkatkan daya saing daerah yang nantinya mampu menghasilkan siklus ekonomi daerah yang semakin berkembang. Dalam hal pembangunan daerah, pemerintah daerah selalu mempunyai berbagai mekanisme untuk sampai pada kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak. Dengan begitu pemerintah juga menyiapkan beberapa regulai atau skema kerjasama untuk mencapai pembangunan tersebut,

a. Obligasi Daerah

Merupakan salah satu bentuk Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi Daerah merupakan pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. Sesuai PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda :

- Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.
- Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut

b. Pemanfaatan Barang Daerah

Pemerintah telah melakukan revisi terhadap regulasi tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014),

sedangkan hasil revisinya diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020). Berbagai ketentuan baru diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan baik secara langsung maupun tidak berimplikasi pada keseluruhan siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pada awal penyusunannya, KPIP memperkenalkan mekanisme dengan istilah Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada anggaran Pemerintah mengingat bahwa anggaran Pemerintah masih perlu dialokasikan untuk berbagai sektor non-infrastruktur seperti kesehatan dan pendidikan. Terakhir, mekanisme HPT khusus terhadap BMN diakomodir dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk Pemanfaatan BMN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, digunakan istilah Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur dengan definisinya yaitu optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya. Sehingga saat ini ragam bentuk Pemanfaatan BMN melingkupi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

c. Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. (Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015).

Gambar 3.3 Skema KBPU

Sumber : DJPK KEMENKEU 2018

d. Kerjasama Pemanfaatan

PINA merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta, hal ini semakin meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah karena perannya perannya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur termasuk pada daerah Kabupaten Gresik yang dalam salah satu tujuannya meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dengan masif.

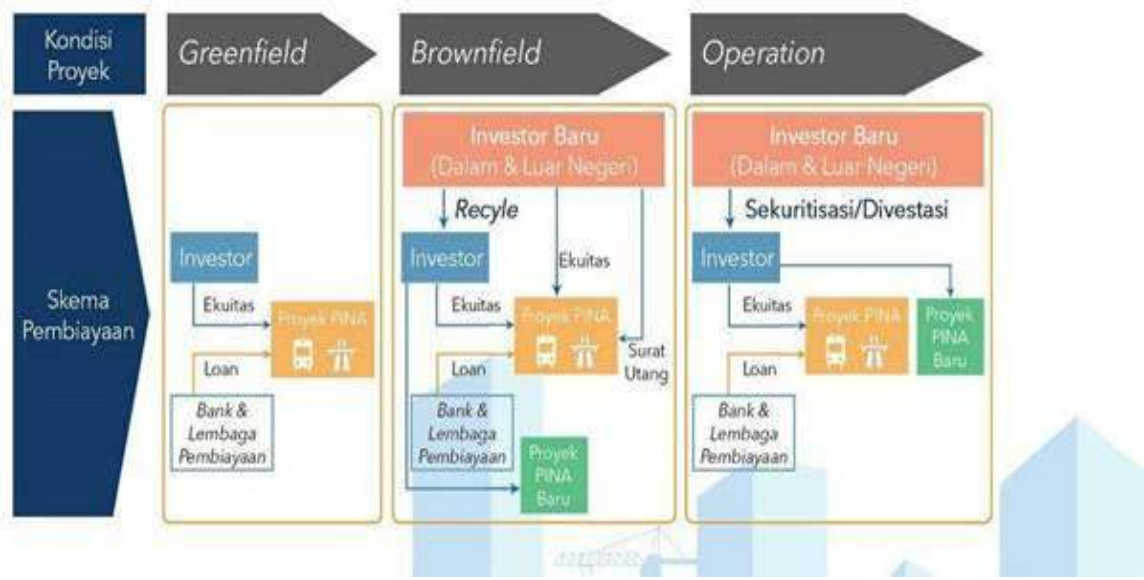

Gambar 3.4 Skema PINA

Sumber : DJPK KEMENKEU 2018

e. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) merupakan bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi sumber pendapatan negara dari pengelolaan aset. Hal ini mengingat KSP dapat dijalankan dengan pendekatan bisnis atau komersial secara penuh. Pendekatan bisnis dalam pemanfaatan BMN merupakan upaya yang dilakukan guna memaksimalkan potensi aset dalam menghasilkan pendapatan. Pendekatan bisnis pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan. Pertimbangan saling menguntungkan tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Skema bagi hasil yang adil dan disepakati masing-masing pihak merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar kerja sama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Dalam praktik bisnis yang berlaku saat ini terdapat berbagai macam bentuk skema bagi hasil kerja sama. Bentuk yang paling umum ialah skema bagi hasil pada kerja sama dalam bentuk patungan usaha (joint venture). Dalam skema ini, pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha didasarkan pada proporsi risiko dan beban kerja para pihak. Selain patungan usaha, skema bagi hasil yang jauh lebih tua dilakukan dalam bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam skema ini bagi hasil didasarkan pada proprosi yang disepakati di awal atas hasil panen yang diperoleh. Dalam tulisan ini, Penulis mencoba menguraikan mengenai bentuk-bentuk kerja sama dan skema bagi hasil yang digunakan serta membandingkannya dengan skema bagi hasil pada kerja sama pemanfaatan aset yang berlaku saat ini. Pemahaman akan skema bagi hasil dari berbagai bentuk kerja sama usaha diharapkan dapat memberi pandangan yang lebih luas atas skema bagi hasil yang sebaiknya diterapkan pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara. Bentuk-bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), sebagai berikut :

1. Patungan Usaha (Joint Ventures)
2. Pengusahaan Aset (Asset Partnership)
3. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

f. Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

Sebagai mekanisme yang baru diperkenalkan dalam PP 28/2020, HPT memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan mekanisme-mekanisme Pemanfaatan BMN lainnya. Salah satu karakteristik yang secara prinsip berbeda adalah mitra kerja sama menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan BMN kepada BLU sekaligus di awal. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan seluruh dana hasil pengelolaan aset BMN ke dalam rekening BLU, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset. Selain itu, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam PP 28/2020, pendapatan dari skema Pemanfaatan BMN berupa HPT hanya dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya, bukan untuk keperluan lain.

g. Bangun Serah Guna (BILD, OPERATE, and Transfer)

Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah yang biasa disebut BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain melalui cara pembangunan konstruksi dalam bentuk bangunan dan/atau sarana serta fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dengan tenggat waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan, yang nantinya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana juga fasilitasnya setelah jatuh tempo. Sedangkan Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bangun Serah Guna merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

h. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

KSPI adalah pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha. KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMN yang menjadi objek kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sedangkan Pihak yang menjadi mitra KSPI adalah:

1. Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
2. Badan Hukum Asing, merupakan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia sebelum ditetapkan sebagai mitra KSPI;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Koperasi

i. Pemanfaatan green financing dan perdagangan karbon

Pemanfaatan green financing (keuangan hijau) dan perdagangan karbon memungkinkan pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan transportasi hijau, serta menciptakan pasar untuk kredit karbon guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Green financing menyediakan dana untuk inisiatif hijau, sedangkan perdagangan karbon menetapkan harga emisi dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada teknologi rendah karbon, keduanya saling mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan Green Financing (Keuangan Hijau), digunakan sebagai berikut :

a. Mendanai Proyek Lingkungan.

   Green financing digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti pengembangan energi

terbarukan (surya, angin), efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan (kendaraan listrik), pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.

b. Mendorong Inovasi

Pembiayaan hijau membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan teknologi hijau yang menciptakan solusi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan

c. Meningkatkan Reputasi dan Keterlibatan Investor

Perusahaan yang memanfaatkan green financing menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, yang dapat meningkatkan reputasi mereka dan menarik investor yang berfokus pada faktor ESG (Environmental, Social, and Governance).

d. Memberikan Insentif

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk proyek-proyek berkelanjutan, serta bank dapat menawarkan produk seperti KPR hijau dengan bunga lebih rendah untuk properti yang efisien energi.

j. Optimalisasi TSLP

Optimalisasi dana TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) melalui Forum TJSLP melibatkan pemetaan kebutuhan daerah berbasis data, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen dana CSR. Tujuannya adalah memastikan dana tersebut tepat sasaran, tidak hanya pada lingkungan sekitar perusahaan tetapi juga menyentuh kantong-kantong kemiskinan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan. Strategi Optimalisasi Dana TJSLP antara lain :

1. Pemetaan Kebutuhan dan Potensi Daerah

   Identifikasi sektor yang paling membutuhkan bantuan dan area yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Gunakan data yang akurat, seperti data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), untuk memastikan penargetan yang tepat.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

   Tetapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan untuk memastikan dana digunakan secara efektif. Pastikan penyaluran dana CSR tidak hanya fokus pada lingkungan perusahaan, tetapi juga menyentuh kantong-kantong kemiskinan yang berada di luar kawasan industri.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

   Berikan pelatihan dan pengetahuan yang memadai kepada aparatur daerah mengenai manajemen keuangan publik, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program.

4. Kolaborasi dan Sinergi

   Perkuat sinergi antara pemerintah dan perusahaan melalui Forum TJSLP untuk merancang program yang berdampak nyata.

   Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan mereka.

5. Fokus pada Dampak Nyata

   Pastikan program CSR tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan manfaat yang jelas dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup dan dukungan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan (goal) pembangunan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab isu strategis Pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan program-program Pembangunan di Kabupaten Gresik tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dua tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dan menjadi tahun pertama pelaksanaan tahapan pertama RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2045. Dengan memperhatikan hasil evaluasi berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani serta isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama, Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development), yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan

b. Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan
c. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif

2. Tujuan Kedua, Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (advanced indigenous economy) yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju
    b. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal
    c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi
3. Tujuan Ketiga, Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (strategic infrastructure resilience) yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah
    b. Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing
    c. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah
    d. Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
4. Tujuan Keempat, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (smart governance) yang dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit

5. Tujuan Keempat, Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan
    b. Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan
    c. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi
    d. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal

Tabel 4.1 Keselarasan Visi Misi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
	VISI	
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat	Jawa Timur Yang Adil, Makmur, Unggur, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
	MISI	
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (sdm), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;	MISI 1 Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan
		Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas,

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
		Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	MISI 2 Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	MISI 3 Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;		Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	MISI 4 Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.	Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	MISI 5 Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
		Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 melalui strategi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (*Inclusive Human Development*)	1.	Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis data spasial, perluasan akses infrastruktur dan konektivitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan, integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan revolusi industri 5.0, serta penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk mewujudkan generasi emas Gresik yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.
	2.	Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
	3.	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi kelompok rentan, pemenuhan hak-hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, nondiskriminatif, dan berkeadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.
	4.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.
	5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok, revitalisasi peran lembaga adat dan komunitas budaya, serta fasilitasi ruang-ruang interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif, guna membangun solidaritas, saling menghargai, dan identitas kolektif yang kokoh dalam kerangka masyarakat madani yang berkeadaban.

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing *(advanced indigenous economy)*	6.	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi, akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan kualitas SDM industri melalui kemitraan vokasi dan dunia usaha, insentif investasi sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan infrastruktur pendukung dan jaringan logistik terpadu guna menciptakan iklim industri yang adaptif, produktif, dan berorientasi ekspor.
	7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Penguatan ekosistem wirausaha lokal, digitalisasi rantai pasok dan pemasaran UMKM, pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendorong ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.
	8.	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung perekonomian Daerah	Penguatan transformasi tata kelola BUMD berbasis prinsip good corporate governance, optimalisasi lini bisnis yang selaras dengan potensi dan kebutuhan strategis daerah, peningkatan kompetensi manajerial dan profesionalisme SDM BUMD, penguatan modal dan akses pembiayaan inovatif, serta perluasan sinergi usaha dengan sektor swasta dan antar BUMD untuk mendorong kinerja yang sehat, kompetitif, dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
	9.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, pengembangan kawasan

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
		kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang investasi, fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal, serta insentif investasi yang mendorong adopsi teknologi tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (strategic infrastructure resilience)	10.	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan terpadu lintas sektor dan wilayah, optimalisasi pembiayaan kreatif, penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik yang prima.
	11.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.
	12.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan green infrastructure, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
	13.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (smart governance)	14.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Ppercepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, penguatan sinergi kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable	15.	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, penguatan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, perbaikan deprivasi sosial-materiil, peningkatan kapabilitas dan ketahanan keluarga miskin,

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Society Empowerment)			serta perluasan akses terhadap keadilan, pemberdayaan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan, yang didukung dengan integrasi data kemiskinan terpadu, serta tata kelola program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis bukti hingga tingkat desa.
	16.	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Pembangunan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan melalui perluasan cakupan program perlindungan sosial berbasis data terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam menjangkau kelompok miskin dan rentan, penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program perlindungan sosial secara transparan dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
	17.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Percepatan transformasi sosial ekonomi yang berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, optimalisasi distribusi program perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis data terpadu, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			pembangunan Kabupaten Gresik.
	18.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Mengintegrasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi; penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM; optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam investasi daerah; serta kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi.

Untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran tersebut diatas tentunya dibutuhkan tolak ukur yang dapat megukur pencapaian keberhasilannya dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024-2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat											
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia		Indeks Pembangunan Manusia	78,93	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07	80,44 - 81,64	80,70 - 82,90	81,07 - 83,63	
			Indeks Pembangunan Gender	91,01 (2024*)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76	91.21-92.01	91.26-92.26	91.31-92.51	
			Indeks Kesalehan Sosial	80,32 (2024)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72	81.12-83.52	81.32-84.32	81.52-85.12	
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.											
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	10,37	10,49	10,62	10,81	10,92	10,99	
			Harapan Lama Sekolah	13,97*	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
		Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat. MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		- hak anak secara inklusif									
		Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50	
			Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	0,402	0,38	0,369	0,358	0,347	0,336	
			Indeks Inklusi (GEDSI)	56,2	60	64	68	72	76	80	
		Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah		Pertumbuhan ekonomi	4,79	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	4,82-5,50	4,85-5,52	4,83-5,43	
		Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00	50.65-52.40	50.77-52.80	50.88-53.20	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10,51*	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80	
		Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5,11*	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58 (2024*)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60	22,90 - 23,61	22,93 - 23,63	22,95 - 23,64	
			Penurunan Emisi GRK	13.813,27	40.331,31	41.137,93	41.960,69	42.799,90	43.655,90	44.529,02	
		Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	1,91	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tangguh dan berkelanjutan	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25	
			Indeks Infrastuktur	61,62	63,23	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66	
			Indeks Konektivitas Wilayah	0,725	0,745	0,765	0,785	0,805	0,827	0,85	
		Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	91,42*	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42	126,42-123,55	123,55-120,79	120,79 - 117,17	
		Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	65,09	65,16	65,24	65,32	65,4	65,48	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	86,17	86,71	87,24	87,76	88,28	88,8	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Pemerintah Digital**	4,32	4,37	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25	1,99 - 2,39	2,09 - 2,54	2,19 - 2,68	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
			Indeks Sistem Merit	310,5	315	330	345	360	375	390	
			Indeks Pelayanan Publik	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan		Tingkat kemiskinan	10,32	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21	8,08-8,9	5,61-8,37	5,29-7,31	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39	6,74-5,16	6,67-5,02	6,59-4,93	
		Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	48	46	44	42	40	38	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80-95	80-95	85-95	90-95	95-100	95-100	95-100	
		Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0,33	0,311 - 0,351	0,303 - 0,343	0,295 - 0,335	0,287 - 0,327	0,279 - 0,319	0,271 - 0,311	
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32	32-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

4.2 Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap penting, prioritas, berdampak luas, serta harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan diantaranya :

1. Pengentasan Kemiskinan
   Meliputi Penanggulangan Kemiskinan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat, Pembangunan 3 Juta Rumah.
2. Ketahanan Pangan
   Meliputi Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan), Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*).
3. Kesehatan untuk semua
   Meliputi Stunting, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Jaminan Kesehatan Nasional, Penuntasan TBC, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota.
4. Perluasan Akses Pendidikan
   Meliputi Pembangunan dan Revitalisasi PAUD, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran, Makan Bergizi Gratis.
5. Pertumbuhan Ekonomi
   Meliputi Pengendalian Inflasi, Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,), Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah.

Kegiatan yang tercantum dan ProSN telah diakomodir menjadi program-program yang ada di daerah khususnya Kabupaten Gresik. Beberapa program yang sudah berjalan diantaranya pada program untuk mengatasi balita stunting dengan pembentukan TPPS (tim Percepatan Penurunan

Stunting), pemberian tablet tambah darah, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, pemberian imunisasi dasar lengkap, dan dalam hal inovasi digitalisasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yakni melalui aplikasi GUS (Gresik Urus Stunting) dan Detak Keris (Deteksi, Tanggulangi, Kurangi Keluarga Risiko Stunting) yang keduanya akan diintegrasikan untuk mengetahui keluarga penerima hingga tren kenaikan kasus per tahun; Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tiap bulan kelahiran yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Gresik; JKN (Jaminan Kesehatan Nasional); penuntasan TBC; perluasan akses pendidikan seperti penyediaan transportasi sekolah atau subsidi transportasi di daerah Bawean yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, dan bantuan biaya pendidikan seperti BOS dan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu; Pembangunan dan Revitalisasi PAUD; pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar. Sedangkan untuk program yang sedang berlangsung diantaranya digitalisasi pembelajaran, dan makan bergizi gratis.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2026 adalah **"Percepatan transformasi sosial, ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung dengan tata kelola Pemerintahan yang Adaptif".** Untuk mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 maka arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan pada Prioritas Pembangunan Nawakarsa sebagai berikut:

Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, Nawakarsa.

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
1.	**Gresik Tuntas** Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable	1.	*Gresik Integrated Smart System*	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah *(One Data, One Portal, And Open Access)*
		2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.
		3.	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa
		4.	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.
2.	**Gresik Seger** Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	5.	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya
		6.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza
		7.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		8.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik
		9.	Gresik Sporti	Program santunan dalans upaya bentuk dukungan pada olahraga, atlit dan pelatih hingga e-sport
		10.	Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga
3.	**Gresik Mapan** Maju, Pintar, dan Aman	11.	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisası program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan
		12.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari gresik bagian utara hingga ke bagian selatan
		13.	Pembangunan Pasar Modern Tematik	Membangun pasar tematik modern yang terintegrasi dengan pariwisata
		14.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan
		15.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro
		16.	Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk gresik
		17.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi *feeder* Transjatim
		18.	Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program bantuan untuk dusun dengan mengintegrasikan bk, dana hibah, bansos secara tematik
		19.	Gresik Kota Santri 4.0	Pembangunan kota modern yang terintegrasi dengan GISS

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		20.	Memastikan KetersediaanAir Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa
4.	**Gresik Agropolitan**	21.	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi
		22.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU
		23.	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut
		24.	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka
		25.	Pembangunan *Techno Park* berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang
5.	**Gema Karya** Gresik mandiri dan berkarya	26.	Gresik Hub	Kolektifitas Peningkatan Skill Anak Muda dalam Bentuk Workshop Bisnis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kesenian Tradisi dan Modern
		27.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta memperkuat branding produk UMKM, UKM dan IKM Gresik
		28.	Program Pelatihan Intensif	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			Bersertifikat BNSP	vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen mesin), orientasi pengenalan dunia industri
		29.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana dan industri *(deman driven)*
6.	**Gresik Cemerlang** Cerdas, efisien, menarik, relevan, global	30.	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi
		31.	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas
		32.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD Dan TK Yang Non Sertifikasi	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi serta untuk guru pembimbing siswa inklusi
		33.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK
		34.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas
		35.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji
		36.	Peningkatan Kualitas Guru	Motalui beasiswa guru berprestasi, pelatihan dan workshop
		37.	BOP (Biaya Operasional Pesantren)	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			untuk TPQ dan Madin	
		38.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
		39.	Literasi Digital Tingkat Desa	Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi digital pada siswa TK, SD, dan SMP yang bertujuan untuk 1. budaya bermedia digital, 2. cakap bermedia digital, 3. etis bermedia digital
		40.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi / Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi
		41.	Bawean Pulau Pendidikan	Meningkatkan potensi serta infrastruktur pendidikan di pulau Bawean, sebagai rintisan Bawean sebagai pulau pendidikan
7.	**Gresik Sehati** Pelayanan kesehatan integratif	42.	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan pelayanan di atasnya.
		43.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat
		44.	Memperkuat Posyandu, Polindes, dan Poskestren	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren
		45.	Peningkatan Tunjangan	Memberikan Peningkatan Tunjangan Kinerja untuk

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			Kinerja Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan Kabupaten Gresik
		46.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi
		47.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan akta lahir melalui digital.
		48.	Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
8.	**Gresik Barokah**	49.	Membangkitkan Kesetia Kawanan Sosial, Kepahlawanan, dan Kepeloporan Warga Gresik	
		50.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha	
		51.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS	
		52.	Menguatkan Pembentukan Karakter Pemuda yang didasarkan pada Nilai-Nilai Agama Nilai Budaya Lokal dan Toleransi	
		53.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial	
		54.	Gresik *Probono*	Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan
9.	**Pesona Gresik** Pelestarian dan naturalisasi alam	55.	Pengembangan dan revitalisasi ekowisata, yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap desa maupun wilayah	
		56.	Naturalisasi Tanah Bekas Galian atau Tambang	Melakukan rehabilitasi tanah bekas galian atau tambang, guna meningkatkan nilai ekonomis lahan dan mencegah bencana alam.
		57.	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan	

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		58.	Revitalisasi fasilitas kota seperti area pedestrian, jalan utama, terminal, alun-alun, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung aktifitas wisatawan dan pentas seni pertunjukan	
		59.	*Green Industry*	Mendorong industri berkelanjutan untuk ekosistem sehat dengan mengedepankan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah

4.3.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 antara Kabupaten Gresik dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Dalam proses penyusunan dokumen perencanan sangat diharuskan untuk selaras dengan dokumen perencaan pusat agar pembangunan antara pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan daerah selaras. Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Gresik merupakan kunci dalam rangka mensinergikan pembangunan antara pusat dan daerah dalam upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional. Tujuan dari penyelarasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah;
1. Mewujudkan RKPD yang harmonis dengan RKP Tahun 2026;
2. Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan pada RKPD dengan RPJMN Tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.
3. Menjamin hadirnya dukungan Perencanaan Daerah terhadap Sasaran, Program, dan Target Pembangunan Nasional.

4.3.1.01 Indikasi Intervensi RPJMN

Agar prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda nasional, maka RKPD Tahun 2026 harus mempertimbangkan indikasi intervensi RPJMN, antara lain:

1. Pembangunan Jalan Tol Gresik – Lamongan – Tuban;
2. Perencanaan dan penyiapan pembangunan jalur Kereta Api Duduksampeyan – Pelabuhan JIIPE Manyar, serta pengembangan dryport kereta api;
3. Pembangunan Jalan Tol Gresik – Lamongan – Tuban – Rembang;
4. Preservasi jalan pada ruas Bojonegoro – Babad – Lamongan – Gresik serta Tuban – Babad.

Selain itu, agar prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dapat merespons tema kewilayahan yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, Kabupaten Gresik diposisikan sebagai bagian dari:

1. Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik – Surabaya – Sidoarjo – Mojokerto – Pasuruan; dan
2. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur.

Dalam kerangka tema kewilayahan tersebut, pembangunan di Kabupaten Gresik diarahkan untuk menimbang hal-hal berikut:

1. Perluasan coverage jaringan transportasi publik perkotaan pada jaringan utama dan jaringan pengumpan (*feeder*) yang terintegrasi, peningkatan konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara), serta penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi;
2. Peningkatan infrastruktur kepelabuhanan untuk mendukung penguatan industri transportasi dan logistik maritim;
3. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis;
4. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.

Adapun keselarasan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik dengan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Keselarasasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2026

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026	**Tema pembangunan Provinsi jawa timur tahun 2026**	**Tema pembangunan Kabupaten gresik Tahun 2026**
Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Percepatan transformasi sosial, ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung dengan tata kelola Pemerintahan yang Adaptif
Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	**Prioritas Pembangunan Provinsi (PP)**	**Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik (PP)**
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	1. Jatim Sejahtera Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu 2. Jatim Kerja Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif,	1. **Gresik Tuntas,** Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable 2. **Gresik Seger,** Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari 3. **Gresik Mapan,** Maju, Pintar, dan Aman 4. **Gresik Agropolitan** 5. **Gema Karya,** Gresik mandiri dan berkarya 6. **Gresik Cemerlang,** Cerdas, efisien, menarik, relevan, global 7. **Gresik Sehati** Pelayanan kesehatan integratif 8. **Gresik Barokah** 9. **Pesona Gresik,** Pelestarian dan

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing 3. Jatim Akses Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 4. Jatim Agro Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. 5. Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan	naturalisasi alam

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 6. Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC). 7. Jatim Berkah Amanah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila. 8. Jatim Harmoni Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender,	

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
	sertamemajukan seni budaya dan prestasi olahraga. 9. Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	

Tabel 4.6 Keselarasan Indikator Makro Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target Nasional 2026	Target 2026 Jawa Timur	Target 2026 Kab. Gresik
1	Tingkat Kemiskinan	6,5–7,5	7,95 - 9,10	8,42-9,64
2	Rasio Gini	-	0,370 -0,380	0,303 -0,343
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44–4,96	3,70 - 4,48	6,90-5,70
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,2–5,8	4,90 - 5,40	4,78 – 5,35
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	75,80 -76,40	79,91 - 80,51
6	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	-	76,40 –77,90	-
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,315 -0,332	0,380
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	74,08 -74,25	65,16

4.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

Menindaklanjuti amanat undang-undang 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	SPM Bidang Pendidikan												
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia 3–6 tahun yang mengakses pendidikan usia dini	%	79,27	79,30	79,33	79,36	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	38.156	38.042	39.172	40.335
2	Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7–12 tahun yang mengakses pendidikan dasar	%	102,59	102,62	102,65	102,68	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	Orang	164.451	174.736	174.928	175.121
		Persentase anak usia 13–15 tahun yang mengakses pendidikan dasar	%	94,12	94,15	94,18	94,21						
3	Pendidikan Kesetaraan	Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	%	100	100	100	100	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	1.137	610	640	672

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
		Pendidikan kesetaraan											
	SPM Bidang Kesehatan												
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan.	%	80.7	100	100	100	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	Orang	-	-	17	21
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (difasilitas kesehatan)	Persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan).	%	100	100	100	100	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	16	21
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Persentase bayi yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	100	100	100	100	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Bayi Baru Lahir	-	-	16	20
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan yang	%	100	100	100	100	Jumlah Balita Yang Mendapatkan	Balita	-	-	71	82

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
		memperoleh pelayanan						Layanan Kesehatan					
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sd Kelas 9)	Persentase Anak Pendidikan Usia Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	166	174
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun)	Persentase Usia Produktif Usia 15-59 Tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	874	874
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (>60 Tahun)	Persentase Usia Lanjut >60 Tahun yang memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	174	182
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi >=15 Tahun	Persentase Penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun yang memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	97	97
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus >=15 Tahun	Persentase Penderita Diabetes Usia >= 15 Tahun yang memperoleh	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan	Orang	-	-	46	46

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
		Pelayanan Kesehatan						Layanan Kesehatan					
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	3	3
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Pasien TBC yang Dilaksanakan Investigasi Kontak	%	75	75	80	85	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	17	15
		Penemuan Kasus Baru TBC (CDR)	%	81	85,0	85,5	86,0						
		Persentase Pasien TBC yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100						
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) =HIV	Persentase Pasien HIV yang Dilaksanakan Notifikasi Pasangan	%	75	75	80	85	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	26	27

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan	Rasio RT	N/A	0,36	0,36	0,36	Jumlah rumah tangga yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	SR	1.095	977	480	1.057
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	93,22	94,29	95,36	96,43	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	SR	1335	1098	839	830
	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanm												
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	%	N/A	100	100	100	Jumlah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	Rumah	0	234	3	55
2	Fasilitasi penyediaan rumah layah huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	%	N/A	100	100	100	Jumlah Rumah yang terdampak relokasi program pemerintah daerah yang difasilitasi	Rumah	0	55	50	55

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat												
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	Orang	1039	651	580	580
		Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	%	100	100	100	100						
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/ Kota	Orang	997	1490	1525	1550
		Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	%	100	100	100	100						

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
3	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	462.087	462.087	463.587	465.087
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100%	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	99.861	99.861	101.361	102.861
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	213.625	200.000	1.000	800
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	78	78	78	78	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Orang	213.625	200.000	1.000	800
	SPM BIdang Sosial												
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang		%	100	57%	59	61	Jumlah Penyandang Disabilitas	orang	27.451	17.457	17.745	17.870

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	Disabilitas terlantar diluar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya						Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani					
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	12	12	12						
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	47	51	60						
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	92	92	95						

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2025

4.3.2.1 Strategi dan Kebijakan SPM.

Dalam memenuhi ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENDIDIKAN

   Dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 59 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan strategi dan arah kebijakan pencapaian SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut: Strategi pencapaian SPM Kabupaten Gresik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

   a. Pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi bekerja sama dengan puskesos yang ada di desa desa untuk mengverifikasi dan memvalidasi data anak tidak sekolah beserta alasan tidak sekolahnya;
   b. Penetapan oleh bupati data yang berhak mendapat intervensi biaya APBD;
   c. Memudahkan perijinan pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
   d. Pemenuhan peerlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
   e. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
   f. Pemberian insentif untuk guru PAUD yang masih berstatus honorer;
   g. Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;
   h. Pemenuhan standar guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;
   i. Pendampingan proses akreditasi PAUD;
   j. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang SMP;

k. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
l. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
m. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
n. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
o. Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;
p. Penambahan kuota seleksi dan diklat calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
q. Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
r. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP;
s. Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;
t. Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
u. Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;
v. Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

a. Akses Layanan Pendidikan Dasar dan PAUD
b. Penguatan Mutu Sarana, Prasarana, dan SDM
c. Integrasi Data dan Sistem Pemantauan
d. Pendanaan Berbasis Kinerja dan Inovasi
e. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

2. BIDANG KESEHATAN

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah daerah perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Subbab ini menguraikan strategi serta arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya

memenuhi target pelayanan dasar bidang kesehatan, termasuk peningkatan akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan yang menyasar seluruh kelompok sasaran sesuai indikator SPM. Penyusunan strategi ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar tercipta keterpaduan antar program dan kegiatan lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif;
b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan;
c. Pengembangan pembiayaan kesehatan;
d. Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring;
e. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular;
f. Penguatan manajemen kesehatan.

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas.
b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin
c. Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA
d. Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes
e. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
f. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan , serta kualitas obat dan alat Kesehatan
g. Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
h. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya

revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat

i. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat
j. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisesi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.
k. Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi
l. Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan
m. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak
n. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat
o. Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko
p. Meningkatkan Penanganan Kasus
q. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD
r. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
s. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi.

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. Penyediaan SaranaSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
f. Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni;
b. Penanganan Permukiman Kumuh;
c. Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman;
d. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintah Daerah;
e. Optimalisasi Pembiayaan dan Kemitraan.

5. BIDANG TRANTIBUM

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Gresik Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
   - Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM;
   - Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada;
   - Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada
b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   - Pra Bencana

     Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana
   - Saat Terjadi Bencana

     Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.
   - Pasca Bencana

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
   - Pencegahan dan pengendalian kebakaran
   - Penyiapan tugas pemadaman termasuk komando dan pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran
   - Siap akan tugas penyelamatan termasuk penyelamatan harta benda dan pemindahan korban serta identifikasi korban
   - Pemberdayaan Masyarakat
   - Penanganan bahan berbahaya dan beracun

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang trantibum berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP dengan prioritas pada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penegakan Perda/perkada;
b. Pengalokasian rencana penanganan korban;
c. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada, dengan prioritas pada anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat yang memiliki tugas utama dalam penegakan Perda/perkada;
d. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis bidang kebencanaan dan pemadam kebakaran;
e. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

6. BIDANG SOSIAL

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Gresik Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Gresiksecara berkala dan dilakukan secara online.
b. Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.
c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan

4.3.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Dari usulan yang telah diusulkan, sesuai dengan keweangan dan jenis belanjanya Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026, disajikan pada tabel sebagai berikut :

4.3.3.01 Rekomendasi Capaian IKU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DPRD Kabupaten Gresik merekomendasikan beberapa kebijakan dalam mencapai target IKU tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Target IKU tahun 2026

IKU	Realisasi 2023	Target 2026	Rekomendasi
Indeks Reformasi Birokrasi	86,84	88,6	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur daerah didukung efektifitas sistem pemerintahan berbasis elektronik
Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,72	Percepatan pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung konektifitas antar wilayah

IKU	Realisasi 2023	Target 2026	Rekomendasi
Pertumbuhan ekonomi	4,62	5,5	Pemberian stimulasi sarana prasarana dan alat produksi dan pelatihan bagi UMKM
Indeks Pembangunan Manusia	78,44	81,12	Pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, khususnya Puskesmas untuk efektifitas capaian UHC bagi masyarakat
Tingkat Kemiskinan	10,96	9 – 9,4	Optimalisasi program bantuan sosial bagi masyarakat miskin berbasis data by name, by adrras, dan by case (BNBABC)
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,82	5 – 5,4	Peningkatan kepatuhan dunia industri pada peraturan terkait penjaminan sosial ketenagakerjaan

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

4.3.3.02 Rekomendasi Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2026

Beberapa rekomendasi dalam penyusunan arah kebijakan daerah pada tahun 2026, perlu diprioritaskan pada:

1. Peningkatan anggaran perlindungan sosial dan ketertiban masyarakat;
2. Peningkatan tata kelola bantuan keuangan berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes);
3. Pengkajian ulang terhadap kenaikan tarif dasar pajak pada Sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi sampah, dan retribusi parkir;
4. Penggalian sumber-sumber pendapatan dari BUMD untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam upaya mewujudkan akurasi data kependudukan;
6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lokasi fokus (lokus);
7. Percepatan realisasi bantuan keuangan untuk sektor pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik;

8. Pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan lineritas kualitas SDM dengan pasar tenaga kerja, serta peningkatan daya saing;
9. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
10. Peningkatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.

4.3.3.03 Rekomendasi DPRD Terhadap Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan telaah dokumen perencanaan pembangunan baik RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, maupun RPJMN Tahun 2025 – 2029, maka DPRD Kabupaten Gresik merekomendasikan tematik pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut:

1. Rumusan tematik pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2026 harus menjadi Pondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tematik pembangunan harus mengedepankan pada pemecahan masalah utama dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta menghilangkan *ego sectoral*.
3. Penguatan transformasi tata kelola dititiberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang berprinsip pada *good governance* dan berbasis teknologi.
4. Tematik pembangunan seharusnya memperhatikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun terdahulu.

4.3.3.04 Rekomendasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan inventarisasi masalah dan isu strategis yang dihimpun oleh DPRD Kabupaten Gresik dalam rangkaian kegiatan reses, audiensi, Rapat Dengar Pendapat maupun penyebaran jajak pendapat

aspirasi masyarakat, serta penelaahan rencana program pembangunan daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 pada tahapan perencanaan tahun 2026, maka DPRD Kabupaten Gresik memberikan rekomendasi program prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai pokok-pokok pikiran di bawah ini:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, khususnya rehabilitasi gedung sekolah rusak, baik sekolah negeri maupun swasta.
2. Peningkatan standar layanan Puskesmas untuk secara keseluruhan menjadi puskesmas rawat inap, didukung pemenuhan 12 Standar Pelayanan Minimal yang berkualitas.
3. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak berat, sekaligus intensifikasi perawatan jalan.
4. Pemerataan penerangan jalan umum di setiap wilayah guna mendukung aktifitas masyarakat;
5. Penanggulangan banjir luapan Kalimas Surabaya, Bengawan Solo dan Kali Lamong melalui percepatan pembebasan lahan, pembangunan tanggul dan waduk atau kolam retensi.
6. Penataan saluran air dan drainase untuk mencegah banjir di kawasan industri maupun permukiman.
7. Pembangunan jalan poros desa, usaha tani, jaringan irigasi usaha tani, dan jaringan irigasi desa dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian.
8. Perluasan cakupan layanan air bersih atau bantuan sumur bor pada desa rawan kekeringan pada musim kemarau.
9. Penanganan sampah dengan menambah TPS3R didukung pendampingan bisnis terhadap kelompok pengelola sampah
10. Penambahan kuota solar dan pembangunan SPBN bagi nelayan.

4.3.3.05 Rekomendasi Penyusunan Kamus Usulan dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026

Penelaahan Konsep Kamus Usulan dalam rangka penyusunan rancangan awal RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dilakukan untuk mengukur keselarasan antara pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan RKPDesa. Beberapa rekomendasi DPRD terhadap penyusunan kamus usulan sebagai bahan penyusunan RKPD, antara lain:

1. Penyusunan Kamus Usulan hendaknya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Perhitungan pagu minimum anggaran program dan kegiatan hendaknya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 38 Tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Kamus Usulan harus mengakomodir seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah pada setiap urusan pemerintahan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan tahun 2026 terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2026, maka dialokasikan anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik untuk tahun 2026.

5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. rencana program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah. Arah Kebijakan dalam RPJPD. isu strategis yang berkembang. aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi. dunia usaha. komunitas. pemerintahan. dan masyarakat. Berikut Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam RKPD.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN	1.102.207.142.700,00
2	DINAS KESEHATAN	738.214.450.214,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	404.300.652.872,00
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	89.742.053.970,00
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.674.719.870,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.508.541.676,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.081.912.099,00
8	DINAS SOSIAL	26.358.279.925,00
9	DINAS TENAGA KERJA	15.612.361.748,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	59.955.844.570,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	13.224.384.021,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.534.471.017,00
13	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.775.657.453,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	67.811.844.824,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.122.822.105,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	67.966.997.836,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.474.080.073,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.379.594.894,00
19	DINAS PERIKANAN	9.197.549.893,00
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	45.535.272.970,00
21	DINAS PERTANIAN	40.359.805.463,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	118.225.519.531,69
23	SEKRETARIAT DEWAN	96.724.031.618,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20.264.763.301,32
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	912.958.925.652,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.623.387.574,00
27	INSPEKTORAT	30.186.200.538,00
28	KECAMATAN GRESIK	25.682.058.022,00
29	KECAMATAN KEBOMAS	19.723.761.686,00
30	KECAMATAN MANYAR	4.047.343.086,00
31	KECAMATAN CERME	3.641.048.343,00
32	KECAMATAN BENJENG	4.692.936.072,00
33	KECAMATAN BALONGPANGGANG	4.866.742.295,00
34	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.050.425.635,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
35	KECAMATAN DRIYOREJO	3.709.020.704,00
36	KECAMATAN WRINGINANOM	3.815.859.566,00
37	KECAMATAN KEDAMEAN	3.559.900.237,00
38	KECAMATAN MENGANTI	3.770.974.586,00
39	KECAMATAN SIDAYU	5.111.856.788,00
40	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	3.830.788.483,00
41	KECAMATAN PANCENG	4.282.413.151,00
42	KECAMATAN BUNGAH	4.400.310.746,00
43	KECAMATAN DUKUN	4.767.778.636,00
44	KECAMATAN SANGKAPURA	4.145.272.318,00
45	KECAMATAN TAMBAK	3.619.090.009,00
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.662.775.098,00

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 yang sudah dirincikan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD.RI) sebagaimana terlampir pada lampiran Bab V.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja merupakan langkah strategis yang krusial dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Kabupaten Gresik, penyusunan indikator kinerja untuk periode 2026 merupakan instrumen vital dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun kebutuhan riil masyarakat. Secara substansial, indikator kinerja terbagi menjadi dua kategori utama meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1 PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) memegang peran sentral karena merepresentasikan capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah Daerah sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Dalam konteks penjenjangan kinerja, IKU pada tujuan RPJMD merupakan ultimate outcome yang dijabarkan pencapaiannya dalam sasaran-sasaran sebagai critical succes factor. Selanjutnya, penjabaran indikator kinerja utama ini dijabarkan dalam penjenjangan kinerja yang lebih operasional pada tingkatan sasaran Renstra OPD sebagai jembatan dokumen perencanaan strategis Daerah dan perangkat Daerah, capaian immediate outcome dalam program pembangunan, dan capaian operasional dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Lebih lanjut, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (1) menegaskan bahwa sasaran RPJMD dan RKPD menjadi dasar penilaian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Artinya, indikator yang melekat pada sasaran RPJMD akan menentukan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, penetapan Indikator Kinerja Utama harus bersifat relevan, terukur, dan berorientasi hasil (outcome-

based), sekaligus mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemerintahan. Dengan adanya IKU yang tersusun secara tepat dan terstruktur, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kompas strategis yang akan memandu seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik Tahun 2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja		
		2024		2025	2026	2027
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	Angka (0-100)	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07
2.	Indeks Pembangunan Gender	91,01*	Angka (0-100)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76
3.	Indeks Kesalehan Sosial	80,32	Angka (0-100)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72
4.	Pertumbuhan ekonomi	4,79	Persen (%)	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58*	Persen (%)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60
6.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	39.540,50	Ton CO_2eq per tahun	40.331,31	41.137,93	41.960,69
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	Angka (0-100)	86.17	86.71	87.24
8.	Tingkat kemiskinan	10,32	Persen (%) (Burden)	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	Persen (%) (Burden)	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39
10.	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	Tahun	10,37	10,49	10,62

No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja		
		2024		2025	2026	2027
11.	Harapan Lama Sekolah	13,97*	Tahun	13,99	14,01	14,08
12.	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	Tahun	74,57	74,82	75,08
13.	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	Angka (0-100)	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	Angka (0-100)	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50
15.	Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	Angka (0-1)	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385
16.	Indeks Inklusi (GEDSI)	56,2	Angka (0-100)	60	64	68
17.	Indeks Harmoni	3,77	Angka (1-5)	3,78	3,79	3,8
18.	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	Persen (%)	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00
19.	Rasio Net Ekspor	10,51*	Persen (%)	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20
20.	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	4.96*	Angka (<3->6)	4,6	5,11	5,11
21.	Rasio *Government Expenditure*	1,91	Persen (%)	1,95	2	2,05
22.	Indeks Daya Saing Daerah	3,77	Angka (0-5)	3,75	3,85	3,95
23.	Indeks Infrastuktur	61,62	Angka (0-100)	63,23	67,86	69,07
24.	Indeks Konektivitas Wilayah	0,725	Angka (0-1)	0.745	0.765	0.785
25.	Indeks Risiko Bencana	91,42*	Angka (>100-0) (Burden)	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42
26.	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	Angka (0-100)	65,09	65,16	65,24

No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja		
		2024		2025	2026	2027
27.	Indeks Pemerintah Digital	4,32**	Angka (0-5)	4,37**	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25
28.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62	Angka	80,9	81,2	81,5
29.	Indeks Sistem Merit	310,5	Angka (0-410)	315	330	345
30.	Indeks Pelayanan Publik	1.66	Angka (>2,01)	2,25	2,51	2,75
31.	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	100-0 (Burden)	48	46	44
32.	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80	Persen (%)	80-95	85-95	90-95
33.	Rasio gini	0,33	1-0 (burden)	0,311 - 0,351	0,303 - 0,343	0,295 - 0,335
34.	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	13.52	Persen (%)	25-35	30-40	35-45

Keterangan: * angka sementara
** Tahun

6.2 PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan pengukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek meliputi kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian

kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh validitas indikator kinerja serta keterkaitan indikator kinerja tersebut dengan tujuan pembangunan. Dalam konteks pecapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indicators dan leading indicators. Lagging indicators adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun leading indicators adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (outcome measures) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (performance drivers). Perumusan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen (%)	23.41	23.41	25.35	27.3	Sasaran PD
	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen (%)	24.44	25.66	26.65	27.63	Sasaran PD
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen (%)	58.7	58.72	58.92	59.12	Sasaran PD
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dasar	Persen (%)	98	98	98	98	Program PD
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi	Persen (%)	2.9	2.88	2.85	2.83	Sasaran PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Pangan (Prevalence of Undernourishment)						
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen (%)	78.81	78.81	80.14	81.46	Sasaran PD
	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	Angka	105.07	132.58	129.42	126.42	Sasaran PD
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Angka	60.12	65.09	65.16	65.24	Sasaran PD
	Penurunan Emisi GRK	Ton CO_2eq per tahun	39.540,50	40.331,31	41.137,93	41.960,69	Tujuan Kab
2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
2.1	Kesejahteraan Ekonomi						
	Pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	4,79	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	Tujuan Kab
	PDRB per kapita	Juta Rupiah	87,44	139,48 - 144,93	140,94 - 148,85	142,14 - 150,01	Indikator Program
	Tingkat kemiskinan	Persen (%) (Burden)	10,32	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21	Tujuan Kab
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%) (Burden)	6,45	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39	Tujuan Kab
	Rasio gini	1-0 (burden)	0,33	0,311 - 0,351	0,303 - 0,343	0,295 - 0,335	Tujuan Kab
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka (0-100)	78,93	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07	Tujuan Kab
2.2	Kesehatan untuk Semua						
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.48	74,57	74,82	75,08	Sasaran Kab
	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	77.59	76.59-86.99	74.59-85.99	72.59-84.99	Sasaran PD
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen (%)	15.40	11.03	10.64	10.24	Sasaran PD
	Insidensi Tuberkulosis (per	Per 100.000	265	250	235	220	Sasaran PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	100.000 penduduk)	Penduduk					
	Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri	Persen (%)	100	60	62	64	Program PD
2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	10.01	10.37	10.49	10.62	Sasaran Kab
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97*	13,99	14,01	14,08	Sasaran Kab
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen (%)	10.45	11.22	11.32	11.46	Sasaran PD
	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan	Persen (%)	93.07	93.09	93.11	93.12	Sasaran PD
2.4	Perlindungan sosial yang adaptif						
	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah (Rasio)	Persen (%)	47.64	47.64	48.59	49.56	Sasaran PD
	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	Persen (%)	80-95	80-95	85-95	90-95	Sasaran Kab
2.5	Beragama, maslahat dan berkebudayaan maju						
	Indeks Kesalehan Sosial	Angka (0-100)	80,32 (2024*)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72	Tujuan Kab

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Indeks Harmoni	Angka (0-10)	3.77	3.78	3.79	3.80	Sasaran Kab
2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
	Indeks Perlindungan Anak	Angka (0-100)	71,57*	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	Sasaran Kab
	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	Angka (0-100)	65.72	66.72	67.72	68.72	Sasaran PD
	Indeks Ketimpangan Gender	Angka (0-1)	0,407*	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	Sasaran Kab
	Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)	Persen (%)	42.98	43	43	43	Sasaran PD
	Rasio pekerja penyandang disabilitas (Rasio)	Persen (%)	0.0012	0.0013	0.0014	0.0014	Sasaran PD
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia						
3.1.1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen (%)	10,45	11,22	11,32	11,46	Sasaran Renstra
3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54.53	54.71	55.79	56.88	Sasaran Renstra
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen (%)	90	93	94	95	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen (%)	1,63	0,73 - 2,30	0,85 - 2,60	0,92 - 2,90	Belum terpakai
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	Persen (%)	1,44	1,39 - 1,55	1,40 - 1,62	1,41 - 1,67	Belum terpakai

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Makan dan Minum						
	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen (%)	5	7	2	2	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif unggulan daerah	Persen (%)	2	2	2	2	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen (%)	33,81	0,63	0,72	0,77	Sasaran Renstra
	ICOR	Persen (%)	4,96	4,6	5,11	5,11	Sasaran RPJMD
	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi	Persen (%)	5,94	5,94	5,94	5,94	Sasaran RPJMD
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen (%)	56,37	56,84	57,3	57,76	Sasaran Renstra
3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Persen (%)	37,29	22,77-23,48	22,80-23,59	22,86-23,60	Sasaran RPJMD
3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen (%)	82,4	82,4	83,28	84,82	Sasaran Renstra
	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen (%)	100	47.58	49.39	51.52	Sasaran Renstra
3.7	Stabilitas Ekonomi Makro						
	Angka Inflasi	Angka	1,85	3,5	3,5	3,5	Sasaran Renstra
	Rasio Pajak terhadap PDBB	Persen (%)	0,7	0,7	0,7	0,7	Sasaran Renstra
4	ASPEK PELAYANAN UMUM						
4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,24	96,3	96,35	96,4	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85,94	86,17	86,71	87,24	Tujuan Kab
	Indeks Pemerintah Digital	Angka	4,32	4,37	1,79-2,1	1,89-2,25	Sasaran Kab
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	1,66	2,25	2,51	2,75	Sasaran Kab
4.2	Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, Demokrasi Substansial						
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	7,05	7,15	7,25	7,35	Indiukator Program
	Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang difasilitasi	Persen (%)	100	100	100	100	Indikator Program
	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup (Rasio)	Persen (%)	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan						
	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,77	3,75	3,85	3,95	Sasaran Kab
4.4	Kinerja setiap urusan pemerintah daerah						
4.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar						
4.4.1.1	Pendidikan						
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	Persen (%)	77,79	80,76	83,73	86,7	Sasaran Renstra
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	Persen (%)	99,29	99,4	99,52	99,63	Sasaran Renstra
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Persen (%)	24,54	29,51	34,49	39,47	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Rata-rata Kemampuan Literasi	Persen (%)	75,62	77,42	79,22	81,02	Sasaran Renstra
	Rata-rata Kemampuan Numerasi	Persen (%)	64,66	66,86	69,06	71,31	Sasaran Renstra
	Iklim Inklusivitas SD	Persen (%)	78	78,9	79,8	80,7	Sasaran Renstra
	Iklim Inklusivitas SMP	Persen (%)	73	74,5	76	77,5	Sasaran Renstra
	Iklim Kebinekaan SD	Persen (%)	75,57	76,57	77,57	78,57	Sasaran Renstra
	Iklim Kebinekaan SMP	Persen (%)	72,67	73,67	74,67	75,67	Sasaran Renstra
	Iklim Keamanan SD	Persen (%)	62,3	64,8	67,3	69,8	Sasaran Renstra
	Iklim Keamanan SMP	Persen (%)	61,11	63,51	65,91	68,31	Sasaran Renstra
	Angka Putus Sekolah	Persen (%)	1,44	1,42	1,4	1,38	Sasaran Renstra
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen (%)	91,51	94,28	94,78	95,28	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	Sasaran Renstra
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen (%)	91,36	91,77	92,18	92,59	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.1.2	Kesehatan						
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1000)	Per 1000 kelahiran hidup	4.29	4.25	4.20	4.15	Sasaran Renstra
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	Persen (%)	100	95	95	96	Sasaran Renstra
	Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus (%)	Persen (%)	103.3	60	62	64	Sasaran Renstra
	Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%)	Persen (%)	93.4	70	72	74	Sasaran Renstra
	Net Death Rate (NDR) (%)	Persen (%)	39	37	35	33	Sasaran Renstra
	Cakupan Universal Health Coverage (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Gross Death Rate (GDR) (%)	Persen (%)	66	62	59	56	Sasaran Renstra
	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%)	Persen (%)	91.9	92.4	92.7	93	Sasaran Renstra
	Persentase Desa/Kelurahan STBM (%)	Persen (%)	21.91	25	29	36	Sasaran Renstra
	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan pemerintah dengan nilai SKM >=80% (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Puskesmas Ramah Anak (Rasio)	Persen (%)	18:32	26:32:00	32:32:00	32:32:00	Sasaran Renstra
	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Realisasi Belanja Infrastruktur	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Urusan Kesehatan (%)						
	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	0.13	0.125	0.120	0.115	Sasaran Renstra
	Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	0.698	0.680	0.670	0.660	Sasaran Renstra
	Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin (Angka)	Angka	317	317	300	285	Sasaran Renstra
	Persentase keluarga miskin yg telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Cakupan ODHIV on ART (%)	Persen (%)	70	72	74	76	Sasaran Renstra
4.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)	Persen (%)	72.88	73	74	75	Sasaran Renstra
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	Persen (%)	49.85	50.47	51.09	51.71	Sasaran Renstra
	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten (%)	Persen (%)	65.86	66.37	66.88	67.39	Sasaran Renstra
	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)	Persen (%)	9.82	9.82	22.77	26.34	Sasaran Renstra
	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	Persen (%)	70.74	70.94	70.29	70.54	Sasaran Renstra
	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)	Persen (%)	69.86	69.48	69.58	69.68	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	Persen (%)	1.34	3.33	5.32	7.31	Sasaran Renstra
	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung (%)	Persen (%)	56.98	50.11	15.57	15.57	Sasaran Renstra
	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik (%)	Persen (%)	56.96	64.13	71.30	78.48	Sasaran Renstra
4.4.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani (%)	Persen (%)	0.06	0.06	0.06	0.10	Sasaran Renstra
	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan (%)	Persen (%)	26.05	7	7.63	8.38	Sasaran Renstra
	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	Persen (%)	11.32	0.01	0.01	0.02	Sasaran Renstra
4.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	Persentase Penangangan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Linmas terhadap RT (per RT) (Rasio)	Persen (%)	1.	1.1	1.2	1.4	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Rerata respon time rate penanganan kebakaran (menit)	Menit	48,83	48,83	48,83	48,83	Sasaran Renstra
	penurunan kerugian pasca bencana (%)	Persen (%)	30	30	32.5	35	Sasaran Renstra
	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	Persen (%)	0.40	0.46	0.52	0.57	Sasaran Renstra
	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	Persen (%)	0.28	0.28	0.29	0.31	Sasaran Renstra
4.4.1.6	Sosial						
	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	28	28	37	45	Sasaran Renstra
	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	Persen (%)	3	-	3	5	Sasaran Renstra
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	15	16	27	29	Sasaran Renstra
	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	18	22	30	37	Sasaran Renstra
	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	Persen (%)	21	20	19	18	Sasaran Renstra
4.4.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar						
4.4.2.1	Tenaga Kerja						
	Rasio pencari kerja perempuan yang	Persen (%)	30.00	30.60	31.21	31.84	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan informal (Rasio)						
	Rasio pelatihan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi (Rasio)	Persen (%)	13	13.33	13.33	13.33	Sasaran Renstra
	Rasio penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur (Rasio)	Persen (%)	21.65	42.11	42.78	44.44	Sasaran Renstra
	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	Persen (%)	1.15	1.17	1.20	1.22	Sasaran Renstra
	Rasio penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih (%)	Persen (%)	72.12	70-73	70.5-73.5	71-74	Sasaran Renstra
	Rasio pekerja dari keluarga miskin yang telah dijamin dalam jaminan sosial ketenagakerjaan (Rasio)	Persen (%)	40.0	40.0	40.8	41.6	Sasaran Renstra
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen (%)	71.61	72.16	72.72	73.28	Sasaran Renstra
	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial (%)	Persen (%)	97.5	98.5	99.5	100	Sasaran Renstra
	Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum (Rasio)	Persen (%)	100	90-100	90-100	90-100	Sasaran Renstra
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen (%)	52.69	52.69	55.23	59.39	Sasaran Renstra
4.4.2.2	Lingkungan Hidup						

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Persentase RTH (Persentase)	Persen (%)	11.65	12.07	12.49	12.91	Sasaran Renstra
	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	14	14	29	29	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Angka	82.94	77.83	77.85	77.87	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Angka	50	50	50.01	50.02	Sasaran Renstra
	Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (Rasio)	Persen (%)	5.26	6.67	7.14	8.33	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Angka	35.3	44.8	44.8	44.8	Sasaran Renstra
	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Pers ampahan (%)	Persen (%)	67	67	67	67	Sasaran Renstra
	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)	Persen (%)	80	80	80	80	Sasaran Renstra
4.4.2.3	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil						
	Pertumbuhan Kepemilikan KIA (%)	Persen (%)	0.08	0.024	0.026	0.028	Sasaran Renstra
	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan (%)	Persen (%)	83.00	84.00	85.00	86.00	Sasaran Renstra
	Persentase Kepemilikan e-KTP (%)	Persen (%)	99.53	99.56	99.58	99.60	Sasaran Renstra
	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	Persen (%)	61.04	65.00	68.00	70.00	Sasaran Renstra
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Angka	90.60	90.61	90.62	90.63	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Administrasi Kependudukan (Indeks)						
	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	88.33	88.33	88.70	90.39	Sasaran Renstra
	Persentase kepemilikan AKta Kelahiran untuk Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	88.67	88.67	88.70	88.72	Sasaran Renstra
	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.2.4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)	Persen (%)	1.94	2.09	2.24	2.39	Sasaran Renstra
	Rasio Pendapatan Asli Desa (Rasio)	Persen (%)	0.0534	0.0541	0.0549	0.0557	Sasaran Renstra
	Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)	Persen (%)	25.07	25.29	25.51	25.73	Sasaran Renstra
	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)	Angka	60	60	64	68	Sasaran Renstra
	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)	Persen (%)	91.81	91.81	92.26	93.08	Sasaran Renstra
	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (Rasio)	Persen (%)	0.84	0.84	0.86	0.88	Sasaran Renstra
4.4.2.5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)	Persen (%)	9.27	9.27	9.07	8.87	Sasaran Renstra
	Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	(Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	1.92	1.92-2	1.92-2	1.92-2	Sasaran Renstra
	Unmet Need ber - KB (Angka)	Persen	9,18	9,17	9,16	9,15	Sasaran Renstra
4.4.2.6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)	Persen (%)	10	5,1	5,2	5,3	Sasaran Renstra
	Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (Rasio)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin (%)	Persen (%)	9	9	9	9	Sasaran Renstra
	Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan (Rasio)	Persen (%)	6.86	6.86	6.86	6.86	Sasaran Renstra
	Rasio realisasi usulan	Persen (%)	40	30	40	40	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (%)						
	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender (%)	Persen (%)	30.43	30	40	50	Sasaran Renstra
	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.2.7	Perhubungan						
	Cakupan layanan transportasi (%)	Persen (%)	36.31	36.31	40.78	40.78	Sasaran Renstra
	Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)	Persen (%)	80.43	80.43	82.61	84.78	Sasaran Renstra
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)	Persen (%)	50	50	60	70	Sasaran Renstra
4.4.2.8	Persandian						
	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian (%)	Persen (%)	15.78	15.78	20	23.80	Sasaran Renstra
4.4.2.9	Statistik						
	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Pembangunan (%)						
4.4.2.10	Komunikasi dan Informatika						
	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)	Nilai	35.77	40	45	50	Sasaran Renstra
	persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)	Persen (%)	97.10	97.10	97.10	97.10	Sasaran Renstra
	Persentase digitalisasi layanan (%)	Persen (%)	41	43	45	48	Sasaran Renstra
4.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	Pertumbuhan Koperasi aktif (%)	Persen (%)	8.96	1.84	2.05	2.24	Sasaran Renstra
4.4.2.12	Penanaman Modal						
	Realisasi investasi sektor manufaktor (triliun rupiah)	Triliun Rupiah	32.5	13.00	13.13	13.33	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan realisasi investasi (%)	Persen (%)	22.66	0.50	1.00	1.49	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan investasi sektor manufaktur (%)	Persen (%)	-28.52	65	65	65	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	51.25	50.33	51.28	51.29	Sasaran Renstra
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (Rasio)	Persen (%)	00:00	25:800	35:800	40:800	Sasaran Renstra
	Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perijinan dan penanaman modal (Predikat)	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sasaran Renstra
4.4.2.13	Perpustakaan						
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	Nilai	67.51	69.51	71.51	73.51	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Tingkat ketercukupan bahan pustaka (%)	Persen (%)	0.27	2	2.04	2.08	Sasaran Renstra
4.4.2.14	Perpustakaan						
	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (Nilai)	Nilai	88.41	90-100	90-100	90-100	Sasaran Renstra
4.4.2.15	Pangan						
	Rasio ketersediaan pangan per kapita (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	184.04	184.88	185.73	186.59	Sasaran Renstra
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Nilai	93.6	94.17	94.75	95.32	Sasaran Renstra
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Angka	90.9	80.61	81.32	82.03	Sasaran Renstra
	stabilitas harga pangan utama (%)	Persen (%)	9.39	4.68	4.68	4.7	Sasaran Renstra
4.4.2.16	Pertanahanan						
	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)	Persen (%)	50	60	60	60	Sasaran Renstra
4.4.2.17	Kebudayaan						
	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)	Persen (%)	4	4	6.25	6.25	Sasaran Renstra
4.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan						
4.4.3.1	Kelautan dan Perikanan						
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	56.6	57.73	58.94	60.24	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	Persen (%)	3.22	3.23	3.24	3.25	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	Persen (%)	2.24	2.43	2.44	2.45	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	Persen (%)	-31.2	0.96	1.21	1.30	Sasaran Renstra
	Persentase penurunan konflik nelayan (%)	Persen (%)	-18.29	2.78	2.86	2.94	Sasaran Renstra
	Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	Angka	15	20	25	30	Sasaran Renstra
	Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	Persen (%)	42.8	43	43.2	43.5	Sasaran Renstra
	Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	Persen (%)	58.8	17.6	65	68	Sasaran Renstra
4.4.3.2	Pariwisata						
	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas (%)	Persen (%)	10	10	10	10	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	Persen (%)	5	7	2	2	Sasaran Renstra
4.4.3.3	Pertanian						
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	Persen (%)	2.87	0.46	0.46	0.47	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	Persen (%)	0.46	0.45	0.48	0.52	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (%)	Persen (%)	2.02	1.85	1.87	1.9	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Persen (%)	0.73-2.30	0.73-2.30	0.85-2.60	0.92-2.90	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
4.4.3.4	Perdagangan						
	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%)	Persen (%)	33.34	0.05	0.03	0.03	Sasaran Renstra
4.4.3.5	Perindustrian						
	Pertumbuhan IKM (%)	Persen (%)	1.14	0.92	0.97	0.20	Sasaran Renstra
4.4.4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan						
4.4.4.1	Kesekretariatan Daerah						
	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (Rasio)	Persen (%)	0.87	0.87	0.89	0.91	Sasaran Renstra
	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Angka)	Angka	96.8	96.8	97	97.2	Sasaran Renstra
	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Angka	95.88	96	96.25	96.50	Sasaran Renstra
	Nilai LPPD (Nilai)	Nilai	3.3	3.4	3.410	3.415	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))	Angka	84.45	84.50	84.55	84.60	Sasaran Renstra
	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))	Angka	88.19	88.23	88.25	88.28	Sasaran Renstra
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	Angka	76.93	77	78	79	Sasaran Renstra
	Nilai Peduli HAM (Nilai)	Nilai	90.95	90.96	90.97	90.98	Sasaran Renstra
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4.58	4.62	4.64	4.66	Sasaran Renstra
4.4.4.2	Sekretariat Dewan						
	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	Persen (%)	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	Persen (%)	96.25	96.25	96.50	96.75	Sasaran Renstra
4.4.4.3	Perencanaan Pembangunan						
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	Angka	80	80.5	81	81.5	Sasaran Renstra
4.4.4.4	Keuangan						
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)	Persen (%)	70	70	70	70	Sasaran Renstra
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rasio)	Persen (%)	85	85	85	85	Sasaran Renstra
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Sasaran Renstra
4.4.4.5	Kepegawaian						
	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah (%)	Persen (%)	30.57	31	31.5	32	Sasaran Renstra
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks (Skala 0-100))	Angka	88.87	89	89.25	89.5	Sasaran Renstra
4.4.4.6	Pengawasan						
	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)	Persen (%)	88.41	90.05	90.10	90.15	Sasaran Renstra
	Rata-rata kategori hasil	Nilai	86.37	86.57	86.77	86.97	Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN			KETERANGAN
				2025	2026	2027	
	Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)						
	Nilai maturitas SPIP (Nilai)	Nilai	3.34	3.35	3.40	3.45	Sasaran Renstra
	Nilai kapabilitas APIP (Nilai)	Nilai	3.085	3.095	3.105	3.115	Sasaran Renstra
4.4.4.7	Kewilayahan						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	85	90	91	92	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	Sasaran Renstra
4.4.4.8	Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Indeks Kesadaran Berbangsa (Indeks)	Angka	72,89	73,09	73,29	73,49	Sasaran Renstra
	Indeks Kemandirian Partisipatif (Indeks)	Angka	3.94	3.95	3.96	3.97	Sasaran Renstra

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, selain itu, secara substansial, prioritas pembangunan RKPD Tahun 2026 menselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik, pelbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang telah selaras terhadap tema nasional maupun Jawa Timur yaitu "**Percepatan transformasi sosial, ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung dengan tata kelola Pemerintahan yang Adaptif"** Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian akan terwujud dokumen perencanaan yang konsisten dan saling berkaitan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 melalui berbagai tahapan antara lain forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah hingga Musrenbang Kabupaten dengan pendekatan inovatif Pembangunan Semesta Inklusif dan Terencana (Pestainca).

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E, M.MB

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Gresik
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
.....

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17= 16/7x100		18	19
	DINAS PENDIDIKAN																												
			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				6.031.589.355.093		2.414.601.847.792		994.721.793.158		80.060.950.252		218.699.216.595		293.163.905.858		402.005.026.034		993.929.098.740		100		3.408.530.946.531		56,51		
		Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Jumlah lama sekolah seluruh penduduk di Kabupaten Gresik / jumlah penduduk di Kabupaten Gresik	Tahun	9,14		10,01		9,11		10,01		10,01		10,01				10,01	591.932.709.405	109,88		10,01		109,52			
			Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah penduduk yang bersekolah di Kabupaten Gresik / jumlah penduduk di Kabupaten Gresik	Tahun	13,82		13,97		13,78		13,97		13,97		13,97				13,97	- 401.996.389.334	101,38		13,97		101,09			
		Peningkatan Capaian SNP	Prosentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Gresik / jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Gresik	%	32,54		77,93														-		77,93		239,49			
			Prosentase satuan pendidikan SD (Sekolah Dasar) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Gresik / Jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gresik	%	94,59		97,01		63,64		97,01		96,54		96,54				97,01		152,44		97,01		102,56			
			Prosentase satuan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Gresik / jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik	%	100,00		87,41		72,16		87,41		84,45		84,45				87,41		121,13		87,41		87,41			
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	%	100,00	3.061.051.909.426	100,00	1.395.057.859.250	100,00	523.437.380.430	20,00	74.628.678.624	38,00	176.858.278.746	80,37	112.780.091.441	100,00	155.560.146.116	100,00	519.827.194.928	100,00	99,31	100,00	1.914.885.054.178	100,00	62,56		
	1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jenis Dokumen	4,00	3.199.395.602	4,00	1.132.659.552	4,00	235.000.000	-	-	2,00	54.404.095	2,00	42.415.300	4,00	211.084.655	4,00	307.904.050	100,00	131,02	4,00	1.440.563.602	100,00	45,03		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21,00	157.625.000			7,00	50.000.000	-		3,00	10.188.130	1,00	7.434.000	3,00	26.703.200	7,00	44.325.330	100,00	88,65	7,00	44.325.330	33,33	28,12	SUBBAG TATA USAHA	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	215.250.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6,00	161.438.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	33,00	472.875.000			11,00	185.000.000	-		5,00	44.215.965	2,00	34.981.300	4,00	184.381.455	11,00	263.578.720	100,00	142,47	11,00	263.578.720	33,33	55,74	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan	Bulan	72,00	3.010.701.370.747	36,00	1.372.735.544.690	12,00	517.791.721.077	3,00	73.760.352.942	3,00	175.600.534.283	3,00	111.650.696.475	3,00	153.322.295.569	12,00	514.333.879.270	100,00	99,33	48,00	1.887.069.423.960	66,67	62,68		
	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah lembaga swasta Penerima Hibah	Lembaga	863,00		863,00												-	-	-	-	863,00	-	100,00	-		
	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Mahasiswa miskin penerima bansos	Orang	387,00		117,00												-	-	-	-	117,00	-	30,23	-		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	#######	1.569.556.002.468			######	517.791.721.077	######	73.760.352.942	4.368,00	175.600.534.283	#####	111.650.696.475	4.368,00	153.322.295.569	4.368,00	514.333.879.270	100,00	99,33	4.368,00	514.333.879.270	33,33	32,77	SUBBAG TATA USAHA	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat listrik dan ATK	Jenis	60,00	5.082.452.562	61,00	3.913.119.844	60,00	460.406.698	-	-	30,00	205.097.700	30,00	96.227.267	60,00	303.167.630	60,00	604.492.597	100,00	131,30	61,00	4.517.612.441	101,67	88,89		
	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis mamin dan barang cetakan	Jenis	25,00		24,00		24,00				24,00		24,00		24,00		24,00	-	100,00	-	24,00	-	96,00	-		
	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	738,00		369,00		369,00				150,00		69,00		150,00		369,00	-	100,00	-	738,00	-	100,00	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45,00	63.050.000			15,00	15.739.400	-		-	-	14,00	15.634.400	1,00	170.000	15,00	15.804.400	100,00	100,41	15,00	15.804.400	33,33	25,07	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	147,00	78.813.000			49,00	25.000.000	-		49,00	23.958.600	-	-	-	49.699.000	49,00	73.657.600	100,00	294,63	49,00	73.657.600	33,33	93,46	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	157.625.000			8,00	138.150.649	-		2,00	34.970.500	3,00	35.551.000	3,00	76.664.200	8,00	147.185.700	100,00	106,54	8,00	147.185.700	33,33	93,38	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45,00	472.875.000			15,00	139.550.649	-		11,00	102.660.000	2,00	18.192.900	2,00	131.095.850	15,00	251.948.750	100,00	180,54	15,00	251.948.750	33,33	53,28	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	18,00	47.288.000			6,00	75.000.000	-		2,00	24.030.600	1,00	13.864.600	3,00	15.517.300	6,00	53.412.500	100,00	71,22	6,00	53.412.500	33,33	112,95	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	780,00	236.438.000			260,00	66.966.000	-		96,00	19.478.000	92,00	12.984.367	72,00	30.021.280	260,00	62.483.647	100,00	93,31	260,00	62.483.647	33,33	26,43	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi dan lemari penyimpan arsip	Jenis	4,00	1.804.363.658	4,00	1.086.879.236	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.086.879.236	100,00	60,24		
	1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gedung arsip dan pagar kantor	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	Bulan	72,00	33.075.337.707	36,00	12.544.246.445	12,00	4.879.508.704	3,00	867.425.682	3,00	985.032.873	3,00	967.036.093	3,00	1.611.822.944	12,00	4.431.317.592	100,00	90,81	48,00	16.975.564.037	66,67	51,32		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Suptir Bis Sekolah selama 1 th	Bulan	72,00	-	36,00	-	12,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	12,00	-	100,00	-	48,00	-	66,67	-		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	108,00	4.762.923.000			36,00	1.362.689.704	9,00	188.361.062	9,00	180.967.193	9,00	170.841.643	9,00	218.782.049	36,00	758.951.947	100,00	55,70	36,00	758.951.947	33,33	15,93	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15,00	78.813.000			5,00	162.465.000	2,00	137.465.000	-				3,00	315.154.435	5,00	452.619.435	100,00	278,60	5,00	452.619.435	33,33	574,30	SUBBAG TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	288,00	12.122.152.000			96,00	3.354.354.000	24,00	541.599.620	22,00	804.065.680	38,00	796.194.450	12,00	1.077.886.460	96,00	3.219.746.210	100,00	95,99	96,00	3.219.746.210	33,33	26,56	SUBBAG TATA USAHA	
	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Sub Kegiatan Pemerihar aan	3,00	7.188.989.150	9,00	3.645.409.482	3,00	70.743.951	3,00	900.000	3,00	13.209.795	3,00	23.716.306		111.775.318	3,00	149.601.419	100,00	211,47	9,00	3.795.010.901	300,00	52,79		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	183,00	630.500.000			61,00	70.743.951	1,00	900.000	17,00	13.209.795	24,00	23.716.306	19,00	111.775.318	61,00	149.601.419	100,00	211,47	61,00	149.601.419	33,33	23,73	SUBBAG TATA USAHA	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168,00	430.500.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banaunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	1.076.250.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SUBBAG TATA USAHA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,31			100,00	62,56		
																				Predikat Kinerja		ST	ST			ST	R		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	%	100,00	2.693.056.264.054	97,00	911.507.873.189	99,68	431.268.462.728	97,00	434.771.628	96,99	34.313.447.581	96,99	172.900.151.354	97,10	235.560.841.028	97,10	443.209.211.592	97,41	102,77	97,10	1.354.717.084.780	97,10	50,30		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	%	84,16		75,00		83,16		75,00		75,02		75,02		76,12		76,12	-	91,53	-	76,12	-	90,45	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	%	108,00		103,00		106,76		103,00		101,86		#####		102,59		102,59	-	96,09	-	103,00	-	95,37	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/mts/sederajat	%	98,00		95,00		97,01		95,00		93,52		93,52		94,12		94,12	-	97,02	-	95,00	-	96,94	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	%	106,00		104,71		104,00		104,71		105,75		#####		110,40		110,40	-	106,15	-	110,40	-	104,15	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	%	98,00		95,00		97,00		95,00		98,36		98,36		98,54		98,54	-	101,59	-	98,54	-	100,55	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	85,89		81,89		83,78		81,89		85,28		85,28		83,79		83,79	-	100,01	-	83,79	-	97,56	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	%	98,00		96,00		97,00		96,00		93,45		93,45		92,24		92,24	-	95,09	-	96,00	-	97,96	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	%	80,00		75,00		78,00		75,00		92,80		92,80		91,79		91,79	-	117,68	-	91,79	-	114,74	-		
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		#####		100,00		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitasi	Lembaga	######	1.036.865.265.484	2.469,00	335.074.158.825	823,00	166.610.445.248	823,00	428.750.000	823,00	16.136.514.967	#####	65.649.434.221	823,00	89.755.528.796	823,00	171.970.227.984	100,00	103,22	3.292,00	507.044.386.809	66,67	48,90		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	30,00	315.250.000			10,00	1.972.248.347	-	-	2,00	1.280.000	5,00	712.494.484	3,00	1.088.844.437	10,00	1.802.618.921	100,00	91,40	10,00	1.802.618.921	33,33	571,81	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	30,00	8.933.287.000			10,00	3.283.919.779	-	-	2,00	-	6,00	1.901.855.080	2,00	1.359.137.194	10,00	3.260.992.274	100,00	99,30	10,00	3.260.992.274	33,33	36,50	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	99,00	15.068.950.000			33,00	6.330.470.440	-	-	7,00	63.349.501	19,00	2.339.098.480	7,00	3.404.224.444	33,00	5.806.672.425	100,00	91,73	33,00	5.806.672.425	33,33	38,53	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1,00	1.082.767.000			1,00	1.212.121.434	-	-	-	-	-	651.622.080	1,00	559.869.354	1,00	1.211.491.434	100,00	99,95	1,00	1.211.491.434	100,00	111,89	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	28,00	613.463.000			1,00	428.750.000	1,00	428.750.000	-	-	-	-	-	-	1,00	428.750.000	100,00	100,00	1,00	428.750.000	3,57	69,89	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	Pembayaran sisa kontrak
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	#######	9.745.279.000			######	1.655.000.000		-	2.108,00	-	#####	714.326.400	6.324,00	2.781.851.800	21.080,00	3.496.178.200	100,00	211,25	21.080,00	3.496.178.200	33,33	35,88	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	#######	152.618.151.500			######	35.521.890.000		-	39.671,00	12.444.600.000	#####	15.122.350.000	########	16.626.120.000	66.118,00	44.193.070.000	100,00	124,41	66.118,00	44.193.070.000	33,33	28,96	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidika n	#######	703.008.000			453,00	223.000.000		-	272,00	9.860.000	#####	161.196.500	45,00	32.315.000	453,00	203.371.500	100,00	91,20	453,00	203.371.500	33,33	28,93	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Satuan Pendidika n	493,00	1.076.250.000			385,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	#######	157.625.000			700,00	50.000.000		-	350,00	-	#####	5.625.000	35,00	29.604.500	700,00	35.229.500	100,00	70,46	700,00	35.229.500	33,33	22,35	SEKSI KELEMBAGAAN SD	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	750,00	315.250.000			250,00	100.000.000		-	88,00	19.747.400	#####	44.320.000	-	33.890.100	250,00	97.957.500	100,00	97,96	250,00	97.957.500	33,33	31,07	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	600,00	354.341.000			200,00	254.332.930		-	70,00	26.852.250	48,00	84.716.750	82,00	341.711.150	200,00	453.280.150	100,00	178,22	200,00	453.280.150	33,33	127,92	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	#######	34.680.088.318			549,00	8.429.721.318		-	203,00	-	#####	-	225,00	7.867.267.960	549,00	7.867.267.960	100,00	93,33	549,00	7.867.267.960	33,33	22,69	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	#######	263.265.842.000			389,00	106.971.991.000		-	146,00	3.570.825.816	#####	43.911.829.447	85,00	55.515.819.357	389,00	102.998.474.620	100,00	96,29	389,00	102.998.474.620	33,33	39,12	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	#######	557.993.000			460,00	177.000.000		-	92,00	-	#####	-	230,00	114.873.500	460,00	114.873.500	100,00	64,90	460,00	114.873.500	33,33	20,59	SEKSI KELEMBAGAAN SD	
	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitasi	Lembaga	#######	834.454.356.444	758,99	250.988.620.510	253,00	116.342.245.000	253,00	-	253,00	16.160.389.737	#####	48.216.086.790	253,00	61.162.459.982	253,00	125.538.936.509	100,00	107,90	1.011,99	376.527.557.019	66,67	45,12		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	2.185.774.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	33,00	5.757.257.000			11,00	5.168.702.082		-		-	3,00	3.300.543.120	7,00	1.863.278.696	11,00	5.163.821.816	100,00	99,91	11,00	5.163.821.816	33,33	89,69	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	20,00	1.150.558.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	2.047.809.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	26,00	3.797.758.000			2,00	761.732.022		-	-	-	1,00	515.172.770	1,00	236.384.252	2,00	751.557.022	100,00	98,66	2,00	751.557.022	7,69	19,79	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	90,00	7.723.625.000			30,00	2.947.461.896		-	4,00	3.803.000	15,00	424.042.362	11,00	2.335.752.109	30,00	2.763.597.471	100,00	93,76	30,00	2.763.597.471	33,33	35,78	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2,00	16.256.951.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	#######	7.820.092.000			######	3.208.000.000		-	1.897,00	-	-	-	5.689,00	3.406.610.600	7.586,00	3.406.610.600	100,00	106,19	7.586,00	3.406.610.600	33,33	43,56	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	6,00	662.669.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	363,00	642.290.000			121,00	203.740.000		-	121,00	4.172.000	-	197.411.950	-	-	121,00	201.583.950	100,00	98,94	121,00	201.583.950	33,33	31,39	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan	363,00	461.526.000			121,00	146.400.000		-	81,00	19.755.800	31,00	25.312.000	9,00	62.252.000	121,00	107.319.800	100,00	73,31	121,00	107.319.800	33,33	23,25	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	#######	157.625.000			######	50.000.000		-	2.975,00	25.309.300	-	21.720.000	-	-	2.975,00	47.029.300	100,00	94,06	2.975,00	47.029.300	33,33	29,84	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	#######	157.625.000			500,00	50.000.000		-	75,00	-	#####	32.109.900	25,00	16.829.500	500,00	48.939.400	100,00	97,88	500,00	48.939.400	33,33	31,05	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	363,00	25.146.859.000			121,00	4.072.689.000		-	18,00	-	42,00	3.950.000	61,00	3.683.628.590	121,00	3.687.578.590	100,00	90,54	121,00	3.687.578.590	33,33	14,66	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	105,00	134.668.717.000			35,00	69.031.440.000	-	-	4,00	2.911.139.637	15,00	27.470.114.688	16,00	33.266.241.385	35,00	63.647.495.710	100,00	92,20	35,00	63.647.495.710	33,33	47,26	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	#######	149.999.664.000			######	30.655.820.000		-	19.444,00	13.196.210.000	#####	16.225.710.000	1.414,00	16.260.000.000	35.353,00	45.681.920.000	100,00	149,02	35.353,00	45.681.920.000	33,33	30,45	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	732,00	145.835.000			244,00	46.260.000		-	51,00	-	71,00	-	122,00	31.482.850	244,00	31.482.850	100,00	68,06	244,00	31.482.850	33,33	21,59	SEKSI KELEMBAGAAN SMP	
	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,00	356.504.037.360	60,00	144.378.873.806	60,00	62.557.805.000		-	60,00	1.936.584.979	60,00	21.868.992.914		38.682.090.916	60,00	62.487.668.809	100,00	99,89	60,00	206.866.542.615	100,00	58,03		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	4,00	506.233.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	30,00	1.878.320.000			10,00	630.596.000		-	2,00	-	5,00	353.217.200	3,00	370.056.926	10,00	723.274.126	100,00	114,70	10,00	723.274.126	33,33	38,51	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					######	14.100.156.000		-	-	-	-	-	########	13.950.250.000	55.953,00	13.950.250.000	100,00	98,94	55.953,00	13.950.250.000	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	Sub kegiatan usulan baru
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	720,00	564.298.000			240,00	179.000.000		-	48,00	12.984.979	48,00	27.049.614	144,00	278.067.447	240,00	318.102.040	100,00	177,71	240,00	318.102.040	33,33	56,37	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	230,00	81.795.000													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	#######	21.812.778.000			######	7.694.400.000		-	1.297,00	1.923.600.000	#####	1.923.600.000	1.009,00	3.845.400.000	2.883,00	7.692.600.000	100,00	99,98	2.883,00	7.692.600.000	33,33	35,27	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	#######	630.500.000			######	200.000.000		-	400,00	-	#####	139.333.000	200,00	301.176.050	1.000,00	440.509.050	100,00	220,25	1.000,00	440.509.050	33,33	69,87	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	#######	157.924.022.600			######	38.881.320.000		-	803,00	-	#####	18.985.680.000	80,00	19.506.162.000	1.606,00	38.491.842.000	100,00	99,00	1.606,00	38.491.842.000	33,33	24,37	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	9,00	1.317.276.000			3,00	872.333.000		-	1,00	-	2,00	440.113.100	-	430.978.493	3,00	871.091.593	100,00	99,86	3,00	871.091.593	33,33	66,13	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NON FORMAL	
	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Prosentase lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku	%	100,00	465.232.604.766	100,00	181.066.220.048	100,00	85.757.967.480	100,00	6.021.628	100,00	79.957.898	#####	37.165.637.429		45.960.761.334	100,00	83.212.378.289	100,00	97,03	100,00	264.278.598.337	100,00	56,81		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					######	39.407.702.000		-	-	-	#####	25.597.140.000	########	13.775.972.000	203.750,00	39.373.112.000	100,00	99,91	203.750,00	39.373.112.000	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	Sub kegiatan usulan baru
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	36,00	157.625.000			12,00	50.000.000		-	7,00	18.810.000	5,00	28.915.300	-	1.920.000	12,00	49.645.300	100,00	99,29	12,00	49.645.300	33,33	31,50	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	#######	163.544.436.833			######	31.992.525.480	2,00	6.021.628	904,00	61.147.898	#####	82.932.129	2.638,00	30.893.959.334	3.938,00	31.044.060.989	100,00	97,04	3.938,00	31.044.060.989	33,33	18,98	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	#######	90.264.040.700			######	4.302.740.000		-	1.112,00	-	#####	1.451.650.000	44,00	1.288.910.000	2.223,00	2.740.560.000	100,00	63,69	2.223,00	2.740.560.000	33,33	3,04	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang					######	10.005.000.000		-	-	-	#####	10.005.000.000	-	-	3.101,00	10.005.000.000	100,00	100,00	3.101,00	10.005.000.000	-	-	SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL	Sub kegiatan usulan baru
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		97,41	102,77			97,10	50,30		
																				Predikat Kinerja		ST	ST			ST	SR		
	1.01.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	Karya Siswa Dan Guru	60,00	236.438.000	48,00	116.634.600	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	116.634.600	80,00	49,33		
	1.01.06.2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan guru peserta GFSG	Siswa Dan Guru	#######	236.438.000	200,00	116.634.600	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	116.634.600	16,67	49,33		
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	340,00	161.438.000			-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-			80,00	49,33		
																				Predikat Kinerja		SR	SR			T	SR		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	%	90,00	4.514.345.713	85,00	1.225.445.673	88,00	-		-		-		-		-	-	-	-	-	85,00	1.225.445.673	94,44	27,15		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	%	94,00		89,00		92,00										-	-	-	-	89,00	-	94,68	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	%	85,00		80,00		83,00										-	-	-	-	80,00	-	94,12	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kehlusaannya sesuai dengan SNP	%	100,00		100,00		100,00										-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kehlusaannya sesuai dengan SNP	%	100,00		100,00		100,00										-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Kehlusaannya sesuai dengan SNP	%	-		-		-										-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	%	89,00		84,00		87,00										-	-	-	-	84,00	-	94,38	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	%	93,00		88,00		91,00										-	-	-	-	88,00	-	94,62	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	%	85,00		80,00		83,00										-	-	-	-	80,00	-	94,12	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	%	88,00		83,00		86,00										-	-	-	-	83,00	-	94,32	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	%	92,00		87,00		90,00										-	-	-	-	87,00	-	94,57	-		
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	%	-		-		-										-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki kurikulum muatan lokal	%	100,00	2.657.187.485	100,00	539.072.173	100,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	100,00	539.072.173	100,00	20,29		
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Terusun	Dokumen	918,00	107.625.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	918,00	107.625.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	918,00	161.438.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	918,00	430.500.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase PAUD dan lembaga pendidikan non formal yang memiliki kurikulum muatan lokal	%	100,00	1.857.158.228	100,00	686.373.500	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	686.373.500	100,00	36,96		
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2,00	322.875.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	2,00	118.388.000													-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	2,00	334.581.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-			94,44	27,15		
																				Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai denean SNP	%	100,00	271.807.520.900	95,37	106.459.996.235	98,87	40.015.950.000	95,37	4.997.500.000	95,37	7.527.490.268	95,37	7.483.663.062	97,03	10.884.038.890	97,03	30.892.692.220	98,14	77,20	97,03	137.352.688.455	97,03	50,53		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	%	100,00		96,50		99,20		96,50		96,50		96,50		98,67		98,67	-	99,47	-	98,67	-	98,67	-		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	%	100,00		96,00		99,00		96,00		96,00		96,00		98,89		98,89	-	99,89	-	98,89	-	98,89	-		
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	%	100,00		91,00		97,00		91,00		91,00		91,00		92,17		92,17	-	95,02	-	92,17	-	92,17	-		
	1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	Guru	#######	271.807.520.900	40.909,00	106.459.996.235	######	40.015.950.000	######	4.997.500.000	19.088,00	7.527.490.268	#####	7.483.663.062	########	10.884.038.890	19.088,00	30.892.692.220	100,00	77,20	59.997,00	137.352.688.455	61,11	50,53		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	#######	126.150.283.000			######	40.015.950.000	927,00	4.997.500.000	409,00	7.527.490.268	#####	7.483.663.062	1.112,00	10.884.038.890	3.710,00	30.892.692.220	100,00	77,20	3.710,00	30.892.692.220	33,33	24,49	-	
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	-	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,14	77,20			97,03	50,53		
																				Predikat Kinerja		ST	T			ST	SR		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	100,00	922.877.000	99,88	234.038.845	99,33	-		-	-		-		-		-	-	-	-	99,88	234.038.845	99,88	25,36		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	%	100,00		89,95		94,45										-	-	-	-	89,95	-	89,95	-		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	%	100,00		98,50		100,00										-	-	-	-	98,50	-	98,50	-		
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	%	92,00		87,00		89,00										-	-	-	-	87,00	-	94,57	-		
	1.01.05.2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumah lembaga SD yang izin operasionalnya masih berlaku	Lembaga	#######	461.438.000	1.622,00	117.843.710	817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.622,00	117.843.710	39,73	25,54		
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	30,00	53.813.000			-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	30,00	107.625.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.05.2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumah lembaga PAUD yang izin operasionalnya masih berlaku	Lembaga	#######	461.439.000	392,00	116.195.135	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,00	116.195.135	31,44	25,18		
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	30,00	53.813.000			-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40,00	53.813.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40,00	53.813.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-			99,88	25,36		
																				Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											994.721.793.158		80.060.950.252		218.699.216.595		293.163.905.858		402.005.026.034		993.929.098.740								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						98,52	93,09			98,04	54,46		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS KESEHATAN																												

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																										
	1		DINAS KESEHATAN				97		97,34		691.059.604.406		106.456.933.382		170.275.595.852		205.081.042.611				710.547.619.525	100,00	93,69						
	1		1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				98		98,03		497.572.698.131		79.525.215.017		129.837.286.666		131.647.165.877		127.413.749.284		468.423.416.845		94,14						
				Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99		99,40		605.002.439		-		29.213.150		27.536.000		113.872.000		170.621.150								SEKRETARIAT
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100		25,00		25,00		25,00		25		100		100,00							Persen
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100		25,00		25,00		25,00		25		100		100,00							Persen
	1		1.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				99		99,03		324.599.475		-		9.650.000		6.750.000		-		16.400.000		5,05						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4		1		1		1		1		4		100,00							dokumen
	1		1.02.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100		99,58		158.000.000		-		9.423.150		16.731.000		62.254.000		88.408.150		55,95						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		1.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99		98,77		122.402.964		-		10.140.000		4.055.000		51.618.000		65.813.000		53,77						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		1.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95		95,32		188.457.969.287		34.241.256.464		57.847.366.018		40.075.718.131		39.002.943.766		171.167.284.378								SEKRETARIAT
				Tersedianya Gaji dan Tunianean ASN						100		100		100		100		100		100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				95		95		188.457.969.287		34.241.256.464		57.847.366.018		40.075.718.131		39.002.943.766		171.167.284.378		90,83						SUBBAG KEUANGAN
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1454 org/bln				1454		1454		1454		1454		1.454		100							Org/bulan
	1		1.02.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah				99		99		990.098.400		49.544.271		137.094.377		241.484.768		653.088.250		1.081.211.666								SEKRETARIAT
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100		-						100		100		100							persen
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						100		-						100		-		0							persen
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor						100		21		21		21		37		100		100							persen
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						100								100		100		100							persen
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100								100		100		100							persen
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100		30		30		30		30		119		119							persen
	1		1.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99		99		263.600.000		-				62.381.600		389.220.500		451.602.100		171,32						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3		3		3		3		3		12		100,00							Paket
	1		1.02.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		36.000.000		-				66.397.000		40.972.950		107.369.950		-						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						0										-		0,00							tahun
	1		1.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100		100		249.594.000		-		74.950.000		35.850.000		119.660.500		230.460.500		92,33						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						95		20		20		20		35		95		100,00							kali
	1		1.02.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100		100		50.000.000		-						-		-		-						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12		3		3		3		3		12		100,00							tahun
	1		1.02.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100		100		9.604.400		-		4.293.500		1.517.400		3.793.500		9.604.400		100,00						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12								12		12		100,00							jenis
	1		1.02.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99		99		300.000.000		49.544.271		57.850.877		63.188.768		86.760.220		257.344.136		85,78						SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						411		122		122		122		45		411		100,00							kali
	1		1.02.01.2.06.0011. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				99		99		81.300.000		-				12.150.000		12.680.580		24.830.580		30,54					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						411		122		122		122		122		100		100,00							kali
	1		1.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99		99		22.532.423.400		3.828.449.625		5.460.203.144		4.574.513.992		6.475.050.957		20.338.217.718							SEKRETARIAT	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97		96,52		483.079.000		101.071.443		157.720.148		189.922.790		187.891.041		636.605.422		131,78					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12		3		3		3		3		12		100,00							bulan
	1		1.02.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelavanan Umum Kantor				99		98,98		22.049.344.400		3.727.378.182		5.302.482.996		4.384.591.202		6.287.159.916		19.701.612.296		89,35					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12		3		3		3		3		12		100,00							bulan
	1		1.02.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98		97,73		562.190.000		9.012.093		19.334.255		92.044.014		1.030.234.961		1.150.625.323							SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100		25		25		25		25		100		100,00							
	1		1.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				94		93,68		182.000.000		9.012.093		14.954.255		43.616.289		58.544.184		126.126.821		69,30					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						8		0		2		3		3		8		100,00							liter
	1		1.02.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100		99,76		130.190.000		-		4.380.000		14.520.000		60.893.000		79.793.000		61,29					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara						25		25		25		25		25		100		100,00							bulan
	1		1.02.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banunan Lainnya				100		99,94		250.000.000		-				33.907.725		910.797.777		944.705.502		377,88					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2						1		1		2									bangunan
	1		1.02.01.2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD				99		99,26		284.425.014.605		41.396.952.565		66.344.075.723		86.635.868.972		80.138.559.350		274.515.456.610							SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelavanan						100		100								100		100,00							persen
	1		1.02.01.2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD				99		99,26		284.425.014.605		41.396.952.565		66.344.075.723		86.635.868.972		80.138.559.350		274.515.456.610		96,52					SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelavanan						34		34		34		34		34		34		100,00							liter
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		94,52	88,92						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi						
	1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				96		96,03		183.332.108.682		26.811.728.515		37.615.332.386		71.217.047.824		96.986.737.992		232.630.846.717		126,89						
				Persentase FKTP terakreditasi (Puskesmas)						100		25								25		25,00							persen
				AKI						80		20								20		25,00							per 100000 Kkl
				Persentase FKTP dengan nilai SKM Minimal 80%						95		0																	persen
				Persentase RS terakreditasi						100		25								25		25,00							persen
	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				95		95,29		42.284.626.200		-		2.664.890.410		3.926.407.741		49.395.383.619		55.986.681.770		132,40					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000						100										-		0,00							persen
				Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)						100										-		0,00							persen
				Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100																			
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center						100																			
				Tersedianya Obat dan Vaksin						100																			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Tersedianya Bahan Habis Pakai						100																			
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar						100																			
	1		1.02.02.2.01.02. Pembangunan Puskesmas				78		78,41		95.215.000		-						91.172.902		91.172.902		95,75					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Pustu)						1										-		0,00							Unit (Pustu)
	1		1.02.02.2.01.0003. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				78		78,41		6.044.300.000		-		28.530.375		1.253.965.000		4.233.749.743		5.516.245.118		91,26					SEKSI ALKES, SARANA, PRASARANA	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Pustu)						1										-		0,00							Unit (Pustu)
			1.02.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								10.430.139.030		-				449.263.000		23.920.567.753		24.369.830.753								
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						11										-		0,00							Paket
			1.02.02.2.01.15. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								29.200.000		-						22.000.000		22.000.000								Paket
				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Fasilitas Kesehatan						1										-		0,00							
			1.02.02.2.01.20. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								57.536.000		-		28.862.000						28.862.000								
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Termelihara Sesuai Standar						1										-		0,00							
			1.02.02.2.01.0022. Pengembangan Rumah Sakit								19.475.001.000		-						19.043.601.263		19.043.601.263								
				Jumlah Rumah sakit yang dikembangkan						1										-		0,00							
			1.02.02.2.01.0023. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								6.153.235.170		-		2.607.498.035		2.223.179.741		2.084.291.958		6.914.969.734								
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar						1										-		0,00							
	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				97		96,76		140.019.913.482		26.811.728.515		34.934.282.501		67.269.420.583		47.560.373.373		176.575.804.972		126,11					TIGA BIDANG	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar						100		25								25		25,00							persen
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar						100				25		25		25		75		75,00							persen
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar						100		25		25		25		25		100		100,00							persen
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar						100										-									persen
	1		1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				96		95,63		786.600.000		-		130.355.000		385.478.300		197.179.200		713.012.500		90,64					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						20123										18.437		91,62							orang
	1		1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UKM dan UKP			99		98,59		337.333.500		-		69.851.000		122.030.500		112.032.450		303.913.950		90,09					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						20032										18.678		93,24							orang

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1		1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				93		92,54		1.130.695.000		-		142.842.500		380.462.500		41.399.150		564.704.150		49,94					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						19333										18.415		95,25							Bayi
	1		1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				96		96,32		401.033.500		-		113.200.000		138.079.750		128.772.000		380.051.750		94,77					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						77157										88.837		115,14							Balita
	1		1.02.02.2.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				92		91,74		627.071.900		-		147.058.500		247.911.150		224.848.650		619.818.300		98,84					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						182781										178.412		97,61							orang
	1		1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				88		88,22		224.434.000		-		39.472.000		76.341.000		99.816.000		215.629.000		96,08					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						902130										855839,00		94,87							orang
	1		1.02.02.2.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				96		95,81		148.345.000		10.600.000		39.885.000		29.162.000		37.561.000		117.208.000		79,01					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						218742										151.544		69,28							orang
	1		1.02.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				94		93,78		25.000.000		-		6.198.600		5.109.100		7.968.668		19.276.368		77,11					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						96821										220.546		228							orang
	1		1.02.02.2.02.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				79		78,72		2.527.256.530		-		2.870.000		7.327.450		2.236.463.500		2.246.660.950		88,90					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						48406										48.366		100							orang
	1		1.02.02.2.02.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				93		92,75		25.000.000		-		5.882.450		2.460.000		15.070.470		23.412.920		93,65					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						2585										2.215		86							orang
	1		1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				89		88,55		2.956.699.500		-		2.789.760.700		61.502.200		72.465.000		2.923.727.900		98,88					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						20583										18.112		87,99							orang
	1		1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				93		93,32		679.100.000		-		302.660.000		278.584.500		40.498.700		621.743.200		91,55					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						24154										28.828		100,00							orang
	1		1.02.02.2.02.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				58		58,05		89.090.000		-		360.000		580.000		1.200.000		2.140.000		2,40					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				97		96,63		49.999.360		-		11.403.150		5.000.000		29.666.000		46.069.150		92,14					SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						12		3								12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								6.965.309.250		39.920.000		382.125.500		5.222.673.659		1.185.210.030		6.829.929.189								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				96		96,06		77.358.000		-		6.525.000		15.932.600		41.736.200		64.193.800		82,98					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				93		92,50		1.521.173.000		-		65.415.000		1.182.912.500		265.629.700		1.513.957.200		99,53					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linekunsan						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				97		96,80		463.540.605		-		24.205.000		207.803.000		186.066.500		418.074.500		90,19					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				96		96,47		30.000.000		-		1.780.000		3.000.000		24.553.650		29.333.650		97,78					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan				86		86,27		631.296.000		7.323.200		142.634.250		171.186.450		260.269.050		581.412.950		92,10					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				89		89,46		26.601.415		-				138.199.000		2.824.550		141.023.550		530,14					SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA	
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						6										-		0,00							kali
	1		1.02.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				91		91,21		4.125.092.657		-		516.754.471		2.034.663.120		1.201.927.858		3.753.345.449		90,99					SEKSI PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100		99,94		106.384.445.960		26.735.051.000		28.904.580.412		50.591.113.504		36.803.968.712		143.034.713.628		134,45					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12		3								12		100,00							orang
	1		1.02.02.2.02.0028. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				64		63,97		2.520.000		-		206.000		248.000		120.800		574.800		22,81					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						12										-		0,00							orang
	1		1.02.02.2.02.29. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				99		99,27		70.000.000		-		9.750.000		8.659.500		37.003.100		55.412.600		79,16					SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas				90		89,68		3.021.424.600		1.207.400		354.822.050		217.735.800		2.237.754.938		2.811.520.188		93,05					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				99		99,37		3.030.213.840		6.335.915		203.384.918		3.664.860.900		1.346.064.147		5.220.645.880		172,29					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.35. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				92		92,07		20.207.000		-				2.650.000		10.957.000		13.607.000		67,34					SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota						34		34				34		34		34		100,00							Unit
	1		1.02.02.2.02.36. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				93		92,71		1.655.704.970		291.000		48.143.450		1.385.665.200		40.077.950		1.474.177.600		89,04					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						12		3								12		100,00							Dokumen
	1		1.02.02.2.02.37. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				87		86,52		36.340.000				8.490.000		19.392.000		19.130.000		47.012.000		129,37					SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1		1.02.02.2.02.38. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				100		99,81		189.121.515		6.200.000		27.450.000		30.576.600		71.045.000		135.271.600		71,53						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						34		34								34		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.40. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				92		92,19		112.682.000		4.800.000		25.490.600		38.872.950		30.777.800		99.941.350		88,69							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.41. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				87		86,99		70.460.000		-		6.640.900		21.958.150		17.870.000		46.469.050		65,95							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.42. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				74		73,89		18.010.380		-		11.005.050		1.870.000		920.000		13.795.050		76,59							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan Malaria						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.0044. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				74		73,89		220.422.500		-		36.007.000		97.487.600		79.885.200		213.379.800		96,80							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan Reproduksi						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
			1.02.02.2.02.0046. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				74		73,89		1.340.331.500		-		357.074.000		471.931.600		451.640.400		1.280.646.000		95,55							
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				86		85,57		936.112.000				3.035.475		15.319.500		6.843.000		25.197.975		2,69						SEKRETARIAT	
				Persentase puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi						100		25		25		25		25		100		100,00								persen
				Persentase pemenuhan data dan informasi bidang kesehatan						100		25		25		25		25		100		100,00								persen
	1		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				86		86,37		936.112.000		-		3.035.475		15.319.500		6.843.000		25.197.975		2,69						SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						12		3		3		3		3		12		100,00							Dokumen
	1		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota				81		81,09		91.457.000				13.124.000		5.900.000		24.138.000		-		47,19						BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
				Persentase rumah sakit yang diterbitkan rekomendasi ijin operasional RS						100		100		100		100		100		100		100,00								persen
				Jumlah rumah sakit yang diberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian						20		20		20		20		20		20		100,00								RS
	1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D				100		99,68		10.000.000		-				2.720.000		3.680.000		6.400.000		64,00						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya						107		107								107		100,00								Unit
	1		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				77		77,46		81.457.000		-		13.124.000		3.180.000		20.458.000		36.762.000		45,13						SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						34		34		34		34		34		34		100,00								Unit
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	82,16	83,00						
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi						
	1		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				88,44		88,44		7.120.621.350		81.000.000		2.047.050.450		1.167.075.650		2.712.831.113		6.007.957.213		84,37							
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin						100		25								25		25,00								persen
	1		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota				90,39		90,39		5.640.800.000		81.000.000		2.047.050.450		1.091.559.400		1.379.164.250		4.598.774.100		81,53						BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan						100		25								25		25,00								persen
				Persentase jumlah sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan						100		25								25		25,00								persen
	1		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				90,48		90,48		5.583.900.000		81.000.000		2.038.485.000		1.062.600.000		1.370.227.500		4.552.312.500		81,53						SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)						6263		6263								6.263		100,00								kali

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				78,44		78,44		56.900.000		-		8.565.450		28.959.400		8.936.750		46.461.600		81,65					SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						12		3								3		25,00							kali
	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				83,65		83,65		1.479.821.350		-		-		75.516.250		1.333.666.863		1.409.183.113		95,23					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100																			persen
	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				83,65		83,65		1.479.821.350		-				75.516.250		1.333.666.863		1.409.183.113		95,23					SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya						80																			kali
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	87,00	92%						
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah						
	1		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				96,25788433		96,26		535.884.000		38.989.850	-	195.827.350		141.032.660		137.836.000		513.685.860		95,86						
				Persentase sarana kefarmasian yang beriiin						100										-		0,00							persen
	1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				96		95,63		58.172.000		1.800.800		7.103.000		20.655.300		25.845.950		55.405.050		95,24					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Jumlah sarana kefarmasian yang divisitasi / dibina						25										-		0,00							sarana
				Persentase visitasi sarana kefarmasian / sarana pelayanan kefarmasian						100										-		0,00							persen
	1		1.02.04.2.01.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100		100,00		58.172.000		1.800.800		7.103.000		20.655.300		25.845.950		55.405.050		95,24					SEKSI KEFARMASIAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						36										-		0,00							kali
	1		1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				98		97,60		294.001.000		36.659.050		121.590.250		80.557.900		47.071.050		285.878.250		97,24					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Jumlah penyuluhan utk jasa boga, kantin, rumah makan						2										-		0,00							kali
				Persentase Tempat Pengelolaan makanan yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi						100		25,00								25		25,00							persen
	1		1.02.04.2.03.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				98		97,60		294.001.000		36.659.050		121.590.250		80.557.900		47.071.050		285.878.250		97,24					SEKSI KEFARMASIAN	
				Jumlah Dokumen Hasil engendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						2										-		0,00							kali
	1		1.02.04.2.06. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				94		94,10		183.711.000		530.000		67.134.100		39.819.460		64.919.000		172.402.560		93,84					BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
				Jumlah penyuluhan / Pertemuan						2										-		0,00							kali
				Persentase produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diperiksa						60		15,00								15		25,00							persen
	1		1.02.04.2.06.01. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				94		94,10		183.711.000		530.000		67.134.100		39.819.460		64.919.000		172.402.560		93,84					SEKSI KEFARMASIAN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan						100										-		0,00							IRTP
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	95,44						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	1		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				96,1		96,05		2.498.292.243		-		580.099.000		908.720.600		1.285.815.561		2.774.635.161		111,06						
				Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						100		25								25		25,00							persen
				Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100		25								25		25,00							persen
				Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100		25								25		25,00							
	1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				91,9		91,89		108.455.500		-		24.540.000		65.638.000		164.502.500		254.680.500		234,82					BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						100										-		-							persen
	1		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				91,9		91,89		108.455.500		-		24.540.000		65.638.000		164.502.500		254.680.500		234,82					SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						12										-		-							kali
	1		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				96,1		96,06		1.016.109.493		-		304.100.000		276.900.000		608.908.461		1.189.908.461		117,10					BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						100		25								25		25,00							kali
	1		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				96,1		96,06		1.016.109.493		-		304.100.000		276.900.000		608.908.461		1.189.908.461		117,10					SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						12		3								3		25,00							kali
			1.02.05.2.03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.373.727.250		-		251.459.000		566.182.600		512.404.600		1.330.046.200								
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						100																				
			1.02.05.2.03.01. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				98,1		98,05		1.373.727.250		-		251.459.000		566.182.600		512.404.600		1.330.046.200		96,82						
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12		3								3		25,00								
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	90,00						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					94,98		691.059.604.406		106.456.933.382		170.275.595.852		205.081.042.611		228.536.969.950		710.350.541.795								
																				Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program		100,00	93,69			100,00	93,69		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											264.045.832.872,00		88.211.593.127,53		68.018.529.155,86		24.344.320.032,06		62.465.881.308,08		243.040.323.623,53								
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																													
1		Terwujudnya tertib administrasi																											
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persen	92,5	151.198.057.818	100	62.901.590.816	91	21.473.617.869	0	4.327.130.086	0	5.697.187.791	0	4.300.077.186	51,55	5.088.588.023	51,55	19.412.983.085,5	56,64835	90,40	152	82.314.573.902	163,84	54,44	Sekretariat	
	1.03.01.2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dokumen	180	3.899.599.575	90	1.293.371.123	30	671.658.009	6	70.603.738	5	55.765.424	9	130.128.930	10	87.350.850	30	343.848.942	100	51,19	120	1.637.220.065	66,67	41,98	Sekretariat	
	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun	Dokumen	72	2.099.999.725	36	794.380.456	12	315.201.979	3	50.413.100	3	35.743.000	3	40.252.000	3	10.685.350	12	137.093.450	100	43,49	48	931.473.906	66,67	44,36	Sekretariat	
	1.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	899.999.950	15	196.387.879	5	133.873.445	1	6.865.200	2	20.022.424	1	24.123.080	1	10.650.500	5	61.661.204	100	46,06	20	258.049.083	66,67	28,67	Sekretariat	
	1.03.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	78	899.599.900	39	302.602.788	13	222.582.585	2	13.325.438	0	-	5	65.753.850	6	66.015.000	13	145.094.288	100	65,19	52	447.697.076	66,67	49,77	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	6	94.753.921.046	3	42.266.309.184	1	13.041.748.153	0,25	2.822.757.818	0,25	4.076.060.413	0,25	2.918.815.062	0,25	2.870.177.567	1	12.687.810.860,03	100	97,29	4,00	54.954.120.044	66,67	58,00	Sekretariat	
	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	149	94.453.921,166	106	42.077.196.480	106	12.942.697.553	106	2.808.168.818	106	4.067.963.213	106	2.882.747.561,8	106	2.850.916.517,04	106	12.609.796.110,03	100	97,43	149	54.686.992.590	66,67	57,90	Sekretariat	
	1.03.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	48	299.999.880	24	189.112.704	8	99.050.600	2	14.589.000	2	8.097.200	2	36.067.500	2	19.261.050	8	78.014.750	100	78,76	32	267.127.454	66,67	89,04	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dokumen	36	78.000.000	6	11.296.000	6	13.000.000	-	-	6	4.000.000	-	1.440.000	-	-	6	5.440.000	100	41,85	12	16.736.000	33,33	21,46	Sekretariat	
	1.03.01.2.03.0004		Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	78.000.000	6	11.296.000	1	13.000.000	-	-	1	4.000.000	-	1.440.000	-	-	1	5.440.000	100	41,85	7	16.736.000	19,44	21,46	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	Orang	149	214.979.525	149	39.619.900	105	39.968.880	-	-	105	4.125.000		5.250.000	-	18.900.000	105	28.275.000	100	70,74	254	67.894.900	170,47	31,58	Sekretariat	
	1.03.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	214.979.525	3	39.619.900	1	39.968.880	-	-	1	4.125.000	-	5.250.000	-	18.900.000	1	28.275.000	100	70,74	4	67.894.900	88,89	31,58	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis	36	10.831.914.245	36	2.852.800.038	36	1.205.374.712	-	37.480.461	10	576.324.729	10	314.908.606	16	171.901.096	36	1.100.614.892	100	91,31	64	3.869.230.905	177,78	35,72	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2021-2022)	Jenis	2	27.742.936	2	27.724.160	-	-	-	-	-	-						-			2	27.724.160	100	99,93	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2023)	Paket	4	60.000.000	2	33.522.475	1	35.201.593	-	1.667.900	1	9.564.500	1	3.619.900	1	12.719.900	1	27.572.200	100	78,33	1	61.094.675	25	101,82	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	44	7.577.790.698	32	1.670.317.977	2	732.382.048	-	500.000	2	425.344.000	2	213.216.500	2	39.167.600	2	678.228.100	100	92,61	34	2.348.546.077	77,27	30,99	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	54	349.172.710	9	58.981.500	2	59.464.800	-	-	2	57.025.000	2	1.700.000	2	-	2	58.725.000	-	0,00	-	-	-	-	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	191.259.776	6	166.301.350	1	31.835.951	-	1.620.000	1	2.164.000	1	16.611.250	1	11.390.650	1	31.785.900	100	99,84	7	198.087.250	70	103,5697386	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0008		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	120.000.000	2	132.382.159	2	19.998.200	-	3.220.000	2	5.550.000	2	3.675.000	2	5.900.000	2	18.345.000	100	91,73	4	150.727.159	66,67	125,61	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.0009		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	14	265.499.125	6	138.504.234	2	44.992.120	-	8.375.050	2	1.510.000	2	15.339.550	2	19.347.500	2	44.572.100	100	99,07	8	183.076.334	57,14	68,96	Sekretariat	
	1.03.01.2.06.11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	22	1.400.449.000	6	658.588.658	4	281.500.000	-	22.097.511	2	75.167.229	2	60.746.406	2	83.375.446	2	241.386.592	50	85,75	8	899.975.250	36,36	64,26	Sekretariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	900.000.000	-	-	-	-									-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jenis	39	15.200.000.000	1	4.911.859.000	9	169.107.075	-	-	-	400.000	6	110.175.000	3	57.472.800	9	168.047.800	100	99,37	10	4.911.859.000	25,64	32,31	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	4.500.000.000	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah penyediaan Alat besar/berat	Unit	5	9.700.000.000	7	4.911.859.000	-	-	-	-			-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7	4.911.859.000	140	50,63772165	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	200.000.000	-	-	4	49.154.175	-	-	-		4	48.795.000	-	-	4	48.795.000	-	0,00	-	48.795.000	-	-	Sekretariat	
	1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	800.000.000	-	-	7	119.952.900	-	-	-	400.000	2	61.380.000	5	57.472.800	7	119.252.800	-	0,00	-	119.252.800	-	-	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja									
	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	20	15.519.668.993	20	6.187.642.454	20	2.646.972.553	3	384.801.278	3	536.866.292	7	531.843.948	7	811.196.098	20	2.264.707.616	100	85,56	40	8.452.350.070	200	54,46	Sekretariat	
	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	20	2.000.000.000	5	445.830.574	4	500.000.000	1	95.432.059	1	88.771.721	1	93.292.510	1	93.935.576	4	371.431.866	100	74,29	9	817.262.440	45	40,86	Sekretariat	
	1.03.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Laporan	40	880.000.000	10	98.328.100	7	219.999.803	1	8.794.289	1	13.461.041	1	23.359.528	4	145.825.545	7	191.440.403	100	87,02	17	289.768.503	42,5	32,93	Sekretariat	
	1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis	7	3.730.464.745	7	3.287.818.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	3.287.818.500	100	88,13	Sekretariat	
					Laporan	24	7.540.000.000	5	1.579.574.360	9	1.926.972.750	1	280.574.930	1	434.633.530	5	415.191.910	2	571.434.977	9	1.701.835.347	100	88,32	14	3.281.409.707	58,33	43,52002264	Sekretariat	
	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit	340	10.699.974.434	357	5.338.693.117	340	3.685.788.487	13	1.011.486.790	25	443.645.933	22	287.515.640	236	1.071.589.612	296	2.814.237.975,51	87,06	76,35	653	8.152.931.092	192,06	76,20	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	1.499.998.325	25	940.275.347	50	295.120.735	1	52.150.554	2	41.982.467	3	32.496.358	50	71.296.539	56	197.925.918	112	67,07	81	1.138.201.265	368,18	75,88	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15	6.049.986.800	24	2.371.536.005	25	955.554.237	1	143.593.922	2	106.509.890	3	175.230.241	24	509.897.198	30	935.231.251	120	97,87	54	3.306.767.256	240	54,66	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	749.998.037	305	462.344.070	200	214.725.000	10	23.960.700	20	55.082.000	15	27.676.100	160	30.626.500	205	137.345.300	102,5	63,96	510	599.689.370	170	79,96	Sekretariat	
	1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.399.991.272	3	1.564.537.695	3	2.220.388.515	1	791.781.614	1	240.071.576	1	52.112.941	2	459.769.375	5	1.543.735.506,51	166,6667	69,53	8	3.108.273.201	266,67	129,51	Sekretariat	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		97,84	83,51	148,5	13.662.951.862,76	121,47	49,78		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2	1.03.02	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	9,62	192.156.985.135	6,41	58.036.796.786	8,33	30.716.134.630	0	9.096.663.584	0	1.560.629.230	0	4.429.733.868	6,41	12.393.095.989	6,41	27.480.122.670	76,95	89,46	12,82	105.174.474.388	133,26	54,73	Sumber Daya Air	
				Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	10,52		7,6		9,02		0		0		0		7,43		7,43		82,37		15,03		142,87		Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	76,62	106.060.807.132	62,14	35.920.850.109	70,00	20.730.392.414	-	6.855.316.004	-	701.272.756	-	2.396.444.867	71,04	8.063.584.461	71,04	18.016.618.088	101,4857	86,91	133,18	53.937.468.197	173,82	50,86	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0026		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	5	10.975.126.180	5	1.875.064.168,20	7	983.423.640	-	653.423.640	-	7.471.400	-	13.030.200	7	300.083.549	7	974.008.789,29	100,00	99,04	12	2.849.072.957	240	25,96	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0051		Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	8.185.106.757	1	1.776.043.270	1	425.890.301	1	62.975.212	1	97.627.202	1	117.261.132	1	130.679.278	1	408.542.824	100	95,93	2	2.184.586.094	200	26,69	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0075		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	HIPPA	14	332.847.565	15	336.251.701	-	-	-	-	-	-						-			15	336.251.701	107,14	101,02	Sumber Daya Air	
					Orang	660	1.117.515.000	144	128.304.750											0	-	0	0	144	128.304.750	21,82	11,48	Sumber Daya Air	
				Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	4	869.515.000	-	0	4	150.000.000	-	17.900.000	8	45.737.600	-	6.944.800	-	76.402.858	8	146.985.258	200	97,99017	8	275.290.008	200	31,66	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	1.615.085.800	4	499.425.962,39	2	610.038.738	-	411.268.089	-	16.646.000	-	18.160.500	2	13.219.500	2	459.294.089,28	100	75,29	6	958.720.052	200	59,36	Sumber Daya Air	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	103	59.087.953.860	134,74	22.357.067.745,72	81	16.901.954.954	-	4.907.114.070,15	-	504.429.304,42	22,19	2.069.620.790,77	52,81	7.074.332.600,97	75	14.555.496.766,31	92,59	86,12	209,74	36.912.564.512	203,63	62,47	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0114		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Volume waduk yang dinormalisasi (2021-2022)	m^3	58012	5.809.395.480	58200	3.098.894.596,31	-	-	-	-	-	-						-			58200	3.098.894.596	100,32	53,34	Sumber Daya Air	
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (2023)	Unit	15	10.299.277.000	8	752.150.669	13	1.131.084.993	-	801.084.993	-	725.350	-	16.107.248,0	7	157.376.098,4	7	975.293.689,35	53,85	86,23	15	1.727.444.359	100,00	16,77	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.0120		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	65	5.500.000.000	13	2.690.812.290	13	353.000.000	-	-	-	12.074.900,0	1	98.040.404,0	14	240.239.576,0	15	350.354.880,00	115,3846	12,41	28	3.041.167.170	43,08	55,29	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.01.55		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Direlihara	Unit	5	2.148.499.902	4	2.106.090.828	-	-										-					0	0	Pindah ke CKPKP	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum (2021-2023)	Kecamatan	8	299.999.800	8	90.374.700											-			8		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024)	Unit	30				30	50.000.000	-	1.550.000	10	8.533.000	10	16.481.450	10	22.668.870	30	49.233.320	100	98,47	30	139.608.020	100	46,54	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum (2021-2023)	Kecamatan	6	240.000.000	6	67.431.800												-			6		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024)	Unit	64				64	50.000.000	-	-	64	6.078.000	64	9.541.000	64	15.834.630	64	31.453.630	100	62,91	64	98.885.430	100	41,20	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum (2021-2023)	Kecamatan	2	449.999.788	2	142.937.628															2		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
	1.03.02.2.01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (2024)	Unit	17				17	74.999.788	-	-	17	1.950.000	17	31.257.342	17	32.747.500	17	65.954.842	100	87,94004	17	208.892.470	100	46,42	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	Meter	14.358	86.096.178.003	12.136,9	22.115.946.677	13.294	9.985.742.216	0	2.241.347.579	0	859.356.474	0	2.033.289.001	10950	4.329.511.528	10950	9.463.504.582,09	82,37	94,77017	23086,9	31.579.451.259	160,79	36,68	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Meter	3796,41	18.364.564.000	4106,5	7.297.102.015	-	-										-			4106,5	7.297.102.015	108,17	39,73	Sumber Daya Air	
					KM	10,413	32.272.000.000	2,63	1.171.814.420	2,55	6.842.637.263	-	1.405.418.564	-	9.356.350	1,75	1.523.612.850	-	3.452.293.036	1,75	6.390.680.799,34	68,59	93,39	4,379	7.562.495.220	42,05	23,43	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	18054	4.718.561.153	14365,9	6.668.410.636,5	-	-										-			14365,9	6.668.410.637	79,57	141,32	Sumber Daya Air	
					KM	48,244	16.693.000.000	6,61	3.354.442.395	6,61	3.063.104.953	-	835.929.016	2,42	848.830.673,8	-	496.551.098,1	4,78	811.581.772,1	7,2	2.992.892.559,75	108,9	97,7	13,81	6.347.334.955	28,63	38,02	Sumber Daya Air	
	1.03.02.2.02.0035		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	142	14.048.052.850	40	3.624.177.210	28	80.000.000	-	-	-	1.169.450,0	-	13.125.053	3	65.636.720,0	3	79.931.223,00	10,7	99,9	43	3.704.108.433	30,28	26,37	Sumber Daya Air	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	91,93	90,83968	11610,04	42.758.459.728,02	167,31	43,77		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3	1.03.10	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persen	80,1	1.972.503.128.726	25,13	336.555.517.938	59,2	199.878.252.470	0	74.646.959.537	0	60.533.343.850	0	15.115.443.817	10,31	42.383.424.213	10,31	192.679.171.418	17,42	96,40	35,44	529.234.689.356	44,25	26,83	Bina Marea	
	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	KM	90,36	1.972.503.128.726	44,376	336.555.517.938	79,92	199.878.252.470	0	74.646.959.537	0	60.533.343.850	0	15.115.443.817	17,26	42.383.424.213	17,26	192.679.171.418	21,60	96,40	61,64	529.234.689.356	68,21	26,83	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0028		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan (2021-2022)	Ruas	61	5.856.514.936	43	4.256.224.741	-	-	-	-	-	-					-	-		43	4.256.224.741	70,49	72,68	Bina Marga	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (2023)	Dokumen	83	21.000.000.000	4	237.769.750	0	1.409.389.101	-	68.288.310	-	1.293.911.288	-	2.342.750	-	21.547.691	-	1.386.090.039	0	98,35	4	1.623.859.789	4,82	7,73	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Penendalian	Dokumen	252	32.773.198.625	223	14.408.018.361	12	7.772.025.965	-	377.356.955	12	3.934.336.359	2	1.026.443.990	26	2.354.041.750	40	7.692.179.054	333,3333	98,97	263	22.100.197.415	104,37	67,43	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dibangun Pelengkap Jalan (2021-2022)	Ruas	35	22.023.004.875	34	9.901.882.649	-	-	-	-	-	-					-	-		34	9.901.882.649	97,14	44,96	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dibangun (2023)	KM	37,5	345.210.000.000	20,896	58.898.847.536,8	0,8	69.323.225.574	-	42.401.528.677	-	21.195.980.861	-	1.516.079.782,4	1,09	3.425.438.911,2	1,09	68.539.028.231,39	136	98,87	21,984	127.437.875.768	58,62	36,92	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas yang dibangun (2021-2022)	Ruas	2	11.554.475.649	2	14.081.581.249	-	-	-	-	-	-					-	-		2	14.081.581.249	100	121,87	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (2023)	KM	5,6	46.217.902.596	3,03	5.011.339.935	1,2	13.705.588.194	-	2.550.757.550	-	2.863.230.933	-	1.641.464.014	1,3	5.589.055.676	1,30	12.644.508.172,08	108,3333	92,26	4,3309	17.655.848.107	77,34	38,20	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara (2021-2022)	Ruas	6	12.724.549.997	6	2.388.566.075	-	-			-	-					-	-			6	2.388.566.075	100	18,77	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (2023)	KM	16,87	28.416.923.751	1,49	269.038.763	0	1.891.487.737	-	899.833.333	-	967.793.400	-	8.274.850	-	6.388.600	-	1.882.290.183,44	0	99,51	1,49	2.151.328.946	8,83	7,57	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0037		Pelebaran Jalan Menuju Sta	Jumlah ruas Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (2021-2022)	Ruas	43	52.433.247.506	42	37.682.262.151	-	-	-	-	-	-					-	-		42	37.682.262.151	97,67	71,87	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (2023)	KM	80,6	646.910.000.000	18,056	48.603.278.466	1,8	51.328.748.564	-	16.250.091.053	-	18.710.726.525	-	2.647.003.893,70	1,82	12.407.030.279,51	1,82	50.014.851.750,85	101,1111	97,44023	19,876	98.618.130.217	24,66	15,24	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembat	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (2021-2022)	M	22	5.001.835.900	19	4.262.570.916	-	-	-	-	-	-					-	-		19	4.262.570.916	86,36	85,22	Bina Marga	
				Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (2023-2024)	Jembatan	1187,25	15.505.022.215	430,7	1.626.754.370	0	1.897.044.573	-	648.578.749	-	1.207.979.468	-	-	-	-	-	1.856.558.217,47	0	97,87	430,7	3.483.312.587	36,28	22,47	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0039		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (2021-2022) dan 2024	Jembatan	4	3.509.983.450	4	2.225.233.507	0	2.559.947.053	-	2.433.194.195	-	98.215.290	-	2.191.950,00	-	3.001.500,00	-	2.536.602.935,13	0	99,09	4	4.761.836.443	100	135,67	Bina Marga	
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (2023)	M	147,74	42.120.220.330	90	973.230.599															90	973.230.599	60,92	2,31	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (2021-2022)dan 2024	Jembatan	17	19.024.483.362	14	9.854.328.112	2	11.731.660.601	-	4.227.015.004,9	-	1.326.553.608	-	2.562.710.830,32	2	3.167.458.829,81	2	11.283.738.273,08	100	96,18	16	21.138.066.385	94,12	111,1098051	Bina Marga	
				Panjang Jembatan yang Dibangun (2023)	M	118,34	110.030.000.000	137	25.793.948.553															139	37.077.686.826	117,46	33,70	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.02		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	titik lokasi	1	143.897.450	1	97.677.580	-	-	-	-	-	-					-	-					0,00	0,00	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (2021-2023)	Dokumen	94	4.973.949.925	39	3.138.247.830											-	-	0	0	39	3.138.247.830	41,49	63,09	Bina Marga	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (2024)	KM	1000	4.500.000.000	0	-	8	2.530.359.920	-	-	-	390.462.420	-	27.010.200	21	1.877.999.014	21	2.295.471.633,50	262,5	90,72	21	2.295.471.634	2,1	51,01	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0044		Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Direhabilitasi (2021-2022)	Ruas	78	51.176.571.250	76	31.560.189.861	-	-	-	-	-	-				-	-			76	31.560.189.861	97,44	61,67	Bina Marga	
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi (2023)	KM	108,44	220.064.180.749	3	1.590.303.822	0	3.210.064.648	-	956.260.209	-	2.176.318.131	-	3.223.200	-	15.438.500	-	3.151.240.039,61	0	98,17	3,22	4.741.543.862	2,97	2,15	Bina Marga	
				Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara (2021-2022)	Ruas	19	26.132.933.564	19	21.603.922.321	-	-	-	-	-	-					-	-			19	21.603.922.321	100	82,67	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (2023)	KM	102,74	248.140.232.702	30,821	37.698.866.749	7	32.268.711.721	1,57	3.832.405.502	3,09	6.343.968.568	3,28	5.608.638.701	5,11	13.439.937.412	13,05	29.224.950.182,93	186,3714	90,57	43,87	66.923.816.932	42,70	26,97	Bina Marga	
	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Kecamatan	8	310.000.000	8	114.492.450															8		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	12				12	50.000.000	-	1.650.000	12	7.980.000	12	15.248.000	12	23.554.000	12	48.432.000	100	96,86	12	162.924.450	100	52,56	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Selatan	
	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Kecamatan	6	350.000.000	6	57.646.000															6		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	12				6	50.000.000	-	-	12	5.800.000	12	10.133.000	12	18.344.500	12	34.277.500	200	68,56	12	91.923.500	100	26,26	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Utara	
	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	Kecamatan	2	899.999.895	2	219.295.592															2		100	0,00	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	68				68	149.998.819	-	-	68	10.087.000	68	44.678.656	68	34.187.550	68	88.953.206	100	59,30	68	308.248.798	100	34,25	UPT Jalan Jembatan dan SDA Wilayah Bawean	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	21,60	96,40	61,64	529.234.689.356,34	68,21	26,83		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah		
4	1.03.12	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Persen	100	20.967.195.991	99,11	4.748.690.783	98	1.102.827.903	21,4	49.741.821	36,4	164.080.284	24,1	311.110.861	26,7	526.380.705	108,6	1.051.313.671	110,8163	95,33	207,71	5.800.004.453	207,71	27,66	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	41	12.966.247.215	18	2.531.729.970	6	491.720.000	-	6.595.500	-	15.037.662	-	94.898.080	6	352.126.349	6	468.657.591	100	95,30985	24	3.000.387.561	58,54	23,13998423	Tata Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	-	-	-	61.524.945	-	-	-	-	-	-	-					-			0	61.524.945	0	7,69	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.01			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	4	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-			0	-	0	0,00	Tata Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif wilayah/Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi/ ditetapkan (2021-2022)	wilayah/ Kecamatan	13	2.288.497.591	14	1.882.579.456	-	-	-	-	-	-					-			14	1.882.579.456	107,69	82,26	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.02			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten /Kota (2023)	Dokumen	8	6.200.000.000	9	658.566.134	0	-									-	-	0	0	9	658.566.134	112,5	10,62	Tata Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten /Kota (2024)	Dokumen	5	6.200.000.000	0	-	5	402.160.000	-	5.941.500	-	14.337.662	2	9.378.580	3	351.386.349	5	381.044.091	100	94,75	5	381.044.091	100	6,15	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.0003		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	10	2.957.749.766	3	419.117.569	1	89.560.000	-	654.000	-	700.000	1	85.519.500	-	740.000	1	87.613.500	100	97,83	4	506.731.069	40	17,13	Tata Ruang	
	1.03.12.2.01.04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	6	719.999.858	4	168.508.000	-	-	-	-	-	-					-			4	168.508.000	66,7	23,40	Tata Ruang	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)								
																					Predikat Kinerja								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan/kawasan yang disinkronisasi dengan perencanaa tata ruang	Kecamatan	9	651.849.559	21	566.635.941	-	-	-	-	-	-					-			21	566.635.941	233,33	86,93	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02			Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaa tata ruang	Dokumen	28	2.250.000.000	-	-	7	296.107.903	-	13.647.921	-	104.450.903	-	90.937.550	7	84.852.300	7	293.888.674	100	99,25	7	293.888.674	25	13,06	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	12	840.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-			0	-	0	0,00	Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Wilayah perencanaan (2021-2022)	wilayah/ Kecamatan	2	254.849.821	19	214.237.290	-	-	-	-	-	-					-			19	214.237.290	950	84,06	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.02			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (2023)	Dokumen	4	570.000.000	1	131.887.710											-	-	0	0	1	131.887.710	25	23,14	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.0005		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (2024)	Dokumen	4	570.000.000	-	-	1	291.107.903	-	13.647.921	-	104.450.903	1	86.285.550	-	84.504.300	1	288.888.674	100	99,24	1	288.888.674	25	50,68	Tata Ruang	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang telah dilakukan diseminasi informasi tata ruang (2021-2022)	Kecamatan	7	396.999.738	32	187.639.491	-	-	-	-	-	-					-			32	187.639.491	457,1	47,26	Tata Ruang	
	1.03.12.2.02.0003			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (2023)	Dokumen	12	840.000.000	1	32.871.450	1	5.000.000	-	-	-	-	1	4.652.000	-	348.000	1	5.000.000	100	100	2	37.871.450	16,7	4,51	Tata Ruang	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)								
																					Predikat Kinerja								
	1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dokumen	967	2.411.199.650	3	1.198.964.562	241	175.000.000	0	12.469.000	0	22.670.580	-	103.032.150	241	25.573.000	241	163.744.730	100	93,57	244	1.362.709.292	25,2	56,52	Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan laporan rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas (2021-2022)	Layanan	40	606.649.809	407	678.921.158,7	-	-	-	-	-	-					-			407	678.921.159	1017,5	111,91	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.01			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembanunan Daerah (2023)	Dokumen	4	1.340.000.000	1	122.032.366											-	-	0	0	1	122.032.366	25	9,11	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (2024)	Dokumen	4	1.340.000.000	-	-	1	80.000.000		12.469.000	-	19.800.080	-	19.301.500	1	23.962.000	1	75.532.580	100	94,42	1	75.532.580	25	5,64	Tata Ruang	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.03.12.2.03.02		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi (2021-2022)	Laporan	700	304.549.841	661	282.145.261	-	-	-	-	-	-					-	-	0	0	661	282.145.261	94,4	92,64	Tata Ruang	
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (2023)	Dokumen	1	160.000.000	1	115.865.776															661	282.145.261	66100	176,34	Tata Ruang	
	1.03.12.2.03.0006		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (2024)	Dokumen	3	510.000.000	0	0	1	95.000.000		-	-	2.870.500	1	83.730.650	-	1.611.000	1	88.212.150	100	92,85	2	204.077.926	66,7	40,02	Tata Ruang	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)								
																					Predikat Kinerja								
	1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rekomendasi teknis tata ruang	Layanan	960	587.899.567	668	451.360.311												-			668	451.360.311	69,6	76,78	Tata Ruang	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Dokumen	524	2.100.000.000			1	140.000.000	-	17.029.400	-	21.921.139	-	22.243.081	1	63.829.056	1	125.022.676	100	89,30	1	125.022.676	0,19	5,95	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-						-							Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang (2021-2022)	Lokasi	360	277.899.774	380	226.892.829,8	-	-	-	-	-	-					-	-			380	226.892.830	105,56	81,65	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.02			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (2023)	Dokumen	480	800.000.000	1	118.916.056											-	-	0	0	1	118.916.056	0,21	14,86	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.0007		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (2024)	Kasus	1	800.000.000			1	100.000.000		8.969.400	-	12.782.839	1	14.307.100	-	52.529.302	1	88.588.641	100	88,59	1	88.588.641	100	11,07	Tata Ruang	
	1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi teknis tata ruang (2021-2022)	Rekomendasi teknis	600	309.999.793	288	224.467.481	-	-	-	-	-	-					-	-			288	224.467.481	48	72,41	Tata Ruang	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (2023)	Dokumen	40	980.000.000	1	66.313.105	1	40.000.000		8.060.000	-	9.138.300	-	7.935.981	1	11.299.754	1	36.434.035	100	91,09	2	102.747.140	5	10,48	Tata Ruang	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100	94,36	69	1.195.502.050,54	27,24	24,67		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5	2.10.04	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda	Persen	100	2.191.199.770	90	36.838.300	100	34.990.000	-	6.217.000	-	3.710.000	8,33	1.212.500	-	-	8,33	11.139.500	8,33	31,84	98,33	47.977.800	98,33	2,19	Pertanahan	
	2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Sengketa	64	2.191.199.770	9	36.838.300	12	34.990.000	-	6.217.000	-	3.710.000	1	1.212.500	-	-	1	11.139.500	8,33	31,84	10	47.977.800	15,63	2,19	Pertanahan	
	2.10.04.2.01.0001		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satui Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	64	1.030.000.000	3	13.973.000	10	34.990.000	-	6.217.000	-	3.710.000	1	1.212.500	-	-	1	11.139.500	10	31,84	4	25.112.500	6,25	2,44	Pertanahan	
	2.10.04.2.01.02		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan yang di Mediasi	Kasus	74	1.161.199.770	9	22.865.300	-	-	-	-	-	-						-							Pertanahan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	8,33	31,84	10	47.977.800	15,63	2,19		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	2.10.05	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	100	700.000.000.000	18	33.628.219.627	100	10.840.010.000	-	84.881.100	-	59.578.000	-	186.741.800	1,56	2.074.392.379	1,56	2.405.593.279	1,56	22,1918	19,56	36.033.812.906	19,56	5,15	Pertanahan	
	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan	m2	50.000	700.000.000.000	2,8135	33.628.219.627	40.950	10.840.010.000	-	84.881.100	-	59.578.000	-	186.741.800	398	2.074.392.379	398	2.405.593.279	0,97	22,19	400,81	36.033.812.906	0,80	5,15	Pertanahan	
	2.10.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	700.000.000.000	7	33.628.219.627	2	10.840.010.000	-	84.881.100	-	59.578.000	-	186.741.800	1	2.074.392.379	1	2.405.593.279	50	22,19	8	36.033.812.906	80	5,15	Pertanahan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0,97	22,19	400,81	36.033.812.906	0,80	5,15		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											264.045.832.872		88.211.593.128		68.018.529.156		24.344.320.032		62.465.881.308		243.040.323.623,53								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						53,45	69,86			66,78	25,40		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Rendah	Sedang			Sedang	Sangat Rendah		
	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN																												
	01.0000		DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						433.554.226.970		162.019.121.255		38.838.910.410,32		14.302.129.279		40.236.404.354		62.400.902.485		155.441.958.809	#DIV/0!	95,94		588.996.185.779				
	1.03.00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						294.887.965.189		114.398.310.068		33.449.272.865		9.142.693.468		18.439.727.203		50.088.811.253		111.120.504.788				401.793.819.917				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	Persentase	100,00	1.800.000.000			100	700.000.000	100	36.872.108,00	100	143.264.204	100	78.225.920		400.393.642	100	658.755.873	0,00	0,00	100,00	658.755.873	100	37		
			PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Jumlah layanan pengelolaan limbah cair domestik	Laporan	2	1.800.000.000			2	700.000.000	2	36.872.108,00	2	143.264.204	2	78.225.920		400.393.642	2	658.755.873	100,00	94,11	2	658.755.873	100	37		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (2024)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1.800.000.000,00			1	700.000.000	1	36.872.108,00	1	143.264.204	1	78.225.920		400.393.642	1	658.755.873	100	94,11	1	658.755.873	100	36,60		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	94,11	1	658.755.873	100	37		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Stasiun Pompa Banjir yang Dipelihara	Unit	83,33	4.011.468.452	66,67	4.214.650.060	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	66,67	4.214.650.060	80	105		
			PENGELOLAHAN SDA dan BANGANUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lokasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	5	4.011.468.452	4	4.214.650.060	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	4	4.214.650.060	80	105		
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (2021-2022)	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	5	4.011.468.452	4	4.214.650.060	0	-	0								0	-	0,00	0,00	4	4.214.650.060	80	105,07	Bidang Cipta Karya	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00	4	4.214.650.060	80	105		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= =6/7x100		18	19
	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Persentase	23,43	157.713.285.091	24,10	122.999.965.157	20,32	25.785.806.975,00		4.729.578.416,55		115.337.248,00		3.966.391.943,87	19,12	15.821.029.969,04	19,12	24.632.337.577,46	94,09	95,53	43,22	147.632.302.734	184,46	93,61		
	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun	SR	294.815	157.713.285.091	56,277	122.999.965.157	59.513	25.785.806.975,00		4.729.578.416,55		115.337.248,00	110	3.966.391.944	985	15.821.029.969	1095	24.632.337.577,46	1,84	95,53	57372	147.632.302.734	19,46	93,61		
	1.03.03.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (2021)	Jumlah Dokumen Teknis Sarana Prasarana Air Bersih	Dokumen	41	5.599.989.636	53	4.882.466.645	0	-									0	-	0,00	0,00	53	4.882.466.645	129,27	87,19	Bidang Cipta Karya	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (2022)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		41	5.295.099.088	6	800.507.183	0	-								0	-	0,00	0,00	6	800.507.183	14,63	14,29		
	1.03.03.2.01.0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (2023-2026)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		41	25.006.082.131	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.02		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perfuasan/Perbaikan SPAM (2021-2022)	jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan supervisi pengembangan SPAM	Dokumen	13	2.118.039.635	7	1.128.281.957	0	-									0	-	0,00	0,00	7	1.128.281.957	53,85	53,27	Bidang Cipta Karya	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perfuasan/Perbaikan SPAM (2023-2026)	jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan supervisi pengembangan SPAM	Dokumen	13	1.792.547.652	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2021-2022)	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangun di perdesaan	Sumur	9	4.159.519.635	12	2.116.836.516	0	-									0	-	-	0,00	12	2.116.836.516	133,33	50,89	Bidang Cipta Karya	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2023)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	100	1.792.547.652	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2024-2026)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	30	13.053.029.524																						
	1.03.03.2.01.06	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur sanitasi layak dan aman	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2021-2022)	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang	SR	940	8.030.888.131	1754	5.078.430.457											0	-	0,00	0,00	1754	5.078.430.457	186,60	63,24	Bidang Cipta Karya	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2023)	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	100	6.796.732.896	10	70.985.080	0										0	-			10	70.985.080	10,00	1,04		
	1.03.03.2.01.05		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (2021)	Jumlah sarana dan prasarana air bersih terbangun	m	707	7.688.514.000	1754	5.078.430.457	0	-									0	-	0,00	0,00	1754	5.078.430.457	248,09	66,05	Bidang Cipta Karya	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (2023)	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	20	834.062.839	10	3.513.777.174	0										0	-			10	3.513.777.174	0,00	421,28		
	1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (2024)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	15	5.699.880.899			10	4.414.619.878		3.472.853.922,38		12.464.900	2	178.532.212		638.463.982	2	4.302.315.016	20,00	97,46	2	4.302.315.016				
	1.03.03.2.01.11		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dibangun oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat (2021-2022)	Kegiatan	24	89.330.891	20	82.720.748	0	-									0	-	0,00	0,00	20	82.720.748	83,33	92,60	Bidang Cipta Karya	
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi (2023 subkegiatan tidak ada)	Kelompok Masyarakat	12	44.813.691	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.03.2.01.07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	4500	8.378.887.910	5052	34.986.468.714	0										0	-			5052	34.986.468.714	0,00	417,56	Bidang Cipta Karya	
	1.03.03.2.01.12		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM (2021-2022)	Jumlah sambungan Rumah Tangga yang terakses air bersih melalui kerjasam SPAM	SR	2000	10.554.118.831	4494	10.080.041.932	0										0	-	0,00	0,00	4494	10.080.041.932	224,70	95,51	Bidang Cipta Karya	
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM (2023-2026)	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	2250	5.065.895.538	1986	4.366.608.330	0										0	-			1986	4.366.608.330	88,27	86,20		
	1.03.03.2.01.0030		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM (2024-2026)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	8250	32.681.375.898			1500	1.193.133.722		815.507.719		34.254.961		60.352.968	0	280.064.322	0	1.190.179.970	0,00	99,75	0	1.190.179.970				
	1.03.03.2.01.19		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perpipaan (2021-2023)	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang (kinerja sd 2022, 2023 hanya untuk kurang bayar)	SR	500	13.031.928.614	5680	50.814.409.964	0										0	-			5680	50.814.409.964	1136,00	389,92	Bidang Cipta Karya	
	1.03.03.2.01.0032		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	10500	67.056.932.131			410	20.178.053.375		441.216.775		68.617.387	110	3.727.506.764	830	14.902.501.664	940	19.139.842.591	229,27	94,85	940	19.139.842.591	8,95	28,54		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		124,63	96,16	1089,00	7381615136,72	128,72	103,75		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	Persentase	50,00	549.620.652.365.082	107,34	14.556.523.767	57,48	7.614.824.583,00		134.934.301,00		339.296.115,00		1.730.362.855	56,93	5.243.605.547	56,93	7.448.198.818,08	99,04	97,81	164,27	22.004.722.585	328,54	0,00		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara (Unit)	Unit	143		598		139		82		94		117		135		135		97,1223		733		512,59			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	umah Tang	2704		2883		385		349		259		425		583		583		151,43		3466		128,18			
	1.03.05.2.01.05		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perfuasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (2021-2022)	Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk SPALD-T	Unit	108	150.000.000	64	791.292.104											0	-	0,00	0,00	64	791.292.104	59,26	527,53	Bidang Cipta Karya	
			Rehabilitasi/Peningkatan/ Perfuasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (2023-2026)	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	umah Tang	350	195.099.355	0	648.578.015											0	-			0	648.578.015	0,00	332,43		
	1.03.05.2.01.06		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2021)	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Unit	58	445.305.000	0	442.707.889											0	-	0,00	0,00	0	442.707.889	0,00	99,42	Bidang Cipta Karya	
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2022)	Jumlah truck tinja	Unit	1	1.164.670.260	1	3.511.687.740											0	-	0,00	-	1	3.511.687.740	100,00	301,52		
				Jumlah IPAL skala komunal kapasitas 80 KK	KK	80		85												0		0,00		85		106,25			
				Jumlah IPAL skala permukiman 50 KK	Unit	3		3												0		0,00		3		100,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		Meningkatnya Pelayanan infrastruktur sanitasi layak dan aman		Jumlah tangki septic skala individual	Unit	114		99												0		0,00		99		86,84			
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2023-2026)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	75	465.708.749	45	785.629.982											0	-			45	785.629.982	60,00	168,70		
	1.03.05.2.01.10		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2021-2022)	Jumlah layanan penyedotan Limbah Domestik (2021-2022)	Pelanggan	3135	549.612.620.603.342	2106	2.789.873.638	0	-									0	-	0,00	0,00	2106	2.789.873.638	67,18	0,00	Bidang Cipta Karya	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2023)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	143	542.165.726	463	625.228.833											0	-			463	625.228.833	323,78	115,32		
	1.03.05.2.01.12		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (2023)	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	300	712.999.128	0	3.336.508.170											0	-			0	3.336.508.170	0,00	467,95		
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (2023)	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1	500.000.000	0	-											0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.05.2.01.0022		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (2024-2026)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	1.500.000.000																						
	1.03.05.2.01.14		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (2023)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	300	141.125.106	1862	352.206.624											0	-			1862	352.206.624	620,67	249,57		
	1.03.05.2.01.16		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT (2021-2022)	jumlah sarana prasarana IPLT yang dirahabilitasi	Unit	4	1.323.439.504	2	1.057.084.289											0	-	0,00	0,00	2	1.057.084.289	50,00	79,87	Bidang Cipta Karya	
			Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT (2023)	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M^3/Hari	45	891.248.911	45	215.726.484											0	-			45	215.726.484	100,00	24,20		
	1.03.05.2.01.0022		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (2024-2026)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	2	813.598.431			1	200.001.000	0		0	45.084.810	0	17.424.082	0	56.779.752	0	119.288.644	0,00	59,64	0	119.288.644	0,00	14,66		
	1.03.05.2.01.0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman (2024-2026)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M^3/Hari	240	1.301.757.490			120	5.579.130.000						1.366.250.000	220	4.193.832.420	220	5.560.082.420	183,33	99,66	220	5.560.082.420	91,67	427,12		
	1.03.05.2.01.0032		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	M^3/Hari	72	327.959.095			12	200.000.000				84.196.788		70.910.000	0	42.458.603	0	197.565.391	0,00	98,78	0	197.565.391	0,00	60,24		
	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (2024-2026)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	umah Tangg	225	1.557.910.050			60	685.690.000				4.037.000		37.281.980	33	605.509.348	33	646.828.328	55,00	94,33	33	646.828.328	14,67	41,52		
	1.03.05.2.01.0033		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (2024-2026)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Unit	1050	472.098.110			325	300.000.000	349	52.770.000	259	65.972.500	425	86.670.453	752	94.568.853	752	299.981.806	231,38	99,99	752	299.981.806	71,62	63,54		
	1.03.05.2.01.0022		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (2024-2026)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	456	1.567.423.825			139	650.003.583	82	82.164.301	94	140.005.017	117	151.826.340	135	250.456.571	135	624.452.229	97,12	96,07	135	624.452.229	29,61	39,84		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	94,47	45,71	281,67	1.222.484.588	89,60	167,41		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Prosentase	60,35	91.707.039.958	112,96	22.727.390.134	57,81	8.310.079.096,00		3.018.415.973,60		1.268.689.613,00		1.262.524.591,00	56,96	2.209.587.061,00	56,96	7.759.217.238,60	98,53	93,37	169,92	30.486.607.372	281,5576	33,2435		
	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang saluran drainase yang ditingkatkan, direhab dan dipelihara	M1	3647,79	91.707.039.958	80.203	22.727.390.134	500	8.310.079.096,00	500	3.018.415.973,60	500	1.268.689.613,00	500	1.262.524.591,00	500	2.209.587.061,00	500	7.759.217.238,60	100,00	93,37	80703	30.486.607.372	2212,3796	33,2435		
	1.03.06.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (2021-2022)	jumlah dokumen perencanaan teknis dan investigasi sistem saluran drainase yang disusun	Dokumen	5	199.999.946	3	221.170.925											0	-	0,00	0,00	3	221.170.925	60,00	0,00	Bidang Cipta Karya	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (2023-2026)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	16	1.208.673.792	0	221.170.925	0										0	-			0	221.170.925	0,00	0,00		
	1.03.06.2.01.03		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2021-2022)	Jumlah jasa konsultasi supervisi/ pengawasan pengelolaan saluran drainase perkotaan	Dokumen	13	659.584.494	5	396.856.712											0	-	0,00	0,00	5	396.856.712	38,46	60,17	Bidang Cipta Karya	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2023-2026)	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	24	2.417.347.585	0	-	0										0	-			0	-	0,00	0,00		
	1.03.06.2.01.06		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan (2021-2022	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	m1	1750	10.012.796.717	1500	4.116.304.224											0	-	0,00	0,00	1500	4.116.304.224	85,71	41,11	Bidang Cipta Karya	
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan (2023-2024)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	m1	3500	38.006.224.555	0	-											0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.03.06.2.01.07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (2021-2022)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m1	7104	15.910.053.881	2645,6	4.648.020.289	0										0	-			2645,6	4.648.020.289	37,24	29,21	Bidang Cipta Karya	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (2024)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan					2	1.065.900.478		1.065.900.478		-			4	-	4	1.065.900.478	200,00	100,00	4	1.065.900.478				
	1.03.06.2.01.09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m1	6000	23.292.358.988	1000	13.345.037.985	0										0	-			1000	13.345.037.985	16,67	57,29	Bidang Cipta Karya	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (2024)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan					21	7.244.178.618	21	1.952.515.496	21	1.268.689.613	21	1.262.524.591	27	2.209.587.061	27	6.693.316.761	128,57	92,40	27	6.693.316.761				
Rata - rata capaian kinerja (%)																						164,29	96,20	518,46	3.070.777.830	29,76	23,47		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	Prosentase	60	473.338.588.958	180	115.496.141.509	60	70.613.460.150,00		24.119.197.928,38		7.222.601.599,89		11.294.942.119,98	75	26.054.255.202,12	75	68.690.996.850,37	125	97,28	255	184.187.138.360	425,00	38,91		
	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Kumulatif Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan	Sertifikasi	3420	473.338.588.958	820	115.496.141.509	150	70.613.460.150,00	115	24.119.197.928,38	322	7.222.601.599,89	429	11.294.942.119,98	232	26.054.255.202,12	1098	68.690.996.850,37	732,00	97,28	1918	184.187.138.360	56,08	38,91		
	1.03.08.2.01.01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (2021-2022)	Jumlah sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan	Sertifikasi	270	876.264.069	320	422.242.962											0	-	0,00	0,00	320	422.242.962	118,52	48,19	Bidang Cipta	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (2023)	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	600	1.866.742.108	326	200.012.436											0	-			326	200.012.436	54,33	10,71	Karya	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SIBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (2024)	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SIBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen					150	300.000.000	115	1.109.625	322	32.813.500	429	32.235.000	232	102.827.450	1098	168.985.575	732,00	56,33	1098	168.985.575				
	1.03.08.2.01.02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (2021-2022)	Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun	Unit	21	77.419.731.063	20	54.918.695.704											0	-	0,00	0,00	20	54.918.695.704	95,24	70,94	Bidang Cipta Karya	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	40	72.216.006.892	5	59.955.190.407											0	-			5	59.955.190.407	12,50	83,02		
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2024)	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					6	70.313.460.150		24.118.088.303		7.189.788.100		11.262.707.120	5	25.951.427.752	5	68.522.011.275	83,33	97,45	5	68.522.011.275				
Rata - rata capaian kinerja (%)																						407,67	76,89	353,80	23.133.025,417	70,15	53,21		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
	1.03.09	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebiakan Strategis	Prosentase	60	13.423.039.940	300	12.872.366.266	100	1.639.781.264,00		1.410.274.137,01		20.627.788,00		13.810.674,00	100	191.224.435,44	100	1.635.937.034,45	100	99,77	400	14.508.303.300	666,67	108,09		
	1.03.09.2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang direvitalisasi		1	13.423.039.940	16	12.872.366.266	1	1.639.781.264,00		1.410.274.137,01		20.627.788,00		13.810.674,00	1	191.224.435,44	1	1.635.937.034,45	100	99,77	17	14.508.303.300	1700,00	108,09		
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (2021-2022)	Jumlah bangunan yang dipelihara	Unit	1	5.753.967.940	4	9.421.627.374											0	-	0,00	0,00	4	9.421.627.374	400,00	163,74	Bidang Cipta Karya	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (2023)	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	7.669.072.000	14	3.450.738.892	0										0	-			14	3.450.738.892	1400,00	45,00		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (2024)	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan					1	1.639.781.264		1.410.274.137		20.627.788		13.810.674	1	191.224.435	1	1.635.937.034	100,00	99,77	1	1.635.937.034				
Rata - rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00	9	6.436.183,133	900,00	104,37		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	at Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	Prosentase	60	8.887.530.942	94,08	2.020.928.296	58,82	434.358.000,00		-		32.876.900,00	38,286	93.469.100,00	82,73	168.715.396,00	121,02	295.061.396,00	205,74	67,93	215,0947076	2.315.989.692	358,49	26,06		
	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Teraselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Gresik	Kali	28	3.914.478.826	14	690.332.593	6	105.000.000,00	0	-	62	2.687.500,00	228	34.778.350,00	172	17.366.600,00	462	54.832.450,00	7700,00	52,22	476	745.165.043	1700,00	19,04		
	1.03.11.2.01.04		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (2021-2022)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi (sertifikat)	Sertifikat	250	650.060.591	191	446.338.405											0	-	0,00	0,00	191	446.338.405	76,40	68,66	Bidang Jasa Kontruksi	
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (2023)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	620	2.207.683.459	121	88.542.888											0	-			121	88.542.888	19,52	4,01		
	1.03.11.2.01.06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (2021-2022)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi untuk ASN	Sertifikat	110	264.918.407	100	137.861.300											0	-	0,00	0,00	100	137.861.300	90,91	52,04	Bidang Jasa Kontruksi	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (2023)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	290	791.816.368	198	17.590.000											0	-			198	17.590.000	68,28	2,22		
			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis (2024)	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang					30	105.000.000	0		62	2.687.500	228	34.778.350	172	17.366.600	462	54.832.450	1540,00	52,22	462	54.832.450				
	1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Gresik	media	4	240.797.128	12	278.685.150	4	10.000.000,00	4	-	4	1.460.000,00	4	5.905.000,00	1	815.000,00	4	8.180.000,00	100	81,80	16	286.865.150	400,00	119,13		
	1.03.11.2.02.01		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	ata informa	400	39.079.876	200	273.331.150	0	-	0	-							0	-	0,00	0,00	200	273.331.150	50,00	699,42	Bidang Jasa Kontruksi	
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	800	201.717.253	496	5.354.000											0	-			496	5.354.000	62,00	2,65		
			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi (2024)	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi					1	10.000.000	1		1	1.460.000	1	5.905.000	1	815.000	1	8.180.000	100,00	81,80	1	8.180.000				
	1.03.11.2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang diterbitkan	Regulasi	28	1.717.495.782	11	738.264.271	6	227.109.000,00		-		23.928.400,00	2	35.318.750,00	1	127.608.750,00	3	186.855.900,00	50,00	82,28	14	925.120.171	50,00	53,86		
	1.03.11.2.03.01	Meningkatkan	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota (2021-2022)	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang di susun	Dokumen	15	381.461.838	5	354.285.562											0	-	0,00	0,00	5	354.285.562	33,33	92,88	Bidang Jasa Kontruksi	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		kualitas SDM Jasa Konstruksi yang mendorong perekonomian lokal	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Pertinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Dokumen	36	869.301.039	2	232.008.609	50										0	-	0,00		2	232.008.609	5,56	26,69	Bidang Jasa Kontruksi	
	1.03.11.2.03.03		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah Masyarakat jasa Konstruksi yang dibina	Orang	90	94.741.422	285	149.361.600											0	-	0,00	0,00	285	149.361.600	316,67	157,65		
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	291	371.991.483	124	2.608.500	50										0	-	0,00		124	2.608.500	42,61	0,70		
			Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (2024)	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					2	227.109.000				23.928.400	2	35.318.750	1	127.608.750	3	186.855.900	150,00	82,28	3	186.855.900				
	1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan bidang Jasa Konstruksi (Pengawasan)	Pengawasan	1000	3.014.759.206	348	313.646.282	120	92.249.000,00		-	5	4.801.000,00	104	17.467.000,00		22.925.046,00	109	45.193.046,00	90,83	48,99	457	358.839.328	45,70	11,90		
	1.03.11.2.04.02		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontrsuksi bersertifikat	Sertifikat	220	436.562.345	5	184.208.162	0	-									0	-		0	5	184.208.162	2,27	42,20	Bidang Jasa Kontruksi	
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	orang	545	1.093.010.722	110	31.839.820											0	-			110	31.839.820	20,18	2,91		
	1.03.11.2.04.03		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2021-2022)	Jumlah objek pengawasan yang dievaluasi	Objek	260	780.910.463	285	94.088.300	0	-									0	-		0,00	285	94.088.300	109,62	12,05	Bidang Jasa Kontruksi	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (2023)	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	840	704.275.676	208	3.510.000											0	-			208	3.510.000	24,76	0,50		
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota (2024-2026)	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	360	385.295.136			100	32.249.000			5	4.501.000	104	33.500		6.243.773	109	10.778.273	109,00	33,42	109	10.778.273				
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	6	358.425.194			1	30.000.000				300.000	1	10.693.500		12.244.273	1	23.237.773	100,00	77,46	1	23.237.773				
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	53	358.425.194			15	30.000.000			3		64	6.740.000		4.437.000	67	11.177.000	446,67	37,26	67	11.177.000				
Rata - rata capaian kinerja (%)																						65,57	0,00	166,43	144.352.021	65,86	83,18		
Predikat Kinerja																						Sedang	angat Rend	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi		
			URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				325.189.365.577		138.666.261.780,71		47.620.811.187,00		5.389.637.545,78		5.159.435.811,02		21.796.677.150,97		12.312.091.232,44		44.321.454.021,21				182.987.715.802				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	Prosentase	100	63.896.438.084,87	100	40.897.615.826,38	100	15.814.118.876,00	100	3.185.265.576,64	100	4.419.924.370,02		3.388.188.052,64	0	4.209.952.102,51	100,00	15.203.330.101,81	100,00	96,14	100,00	56.100.945.928	100,00	87,80		
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	54	1.022.875.486,31	29	531.906.223,00	9	700.892.266,00	9	10.476.000,00	9	63.127.680,00	9	44.098.582,00	0	288.173.736,00	6,75	405.875.998,00	75,00	57,91	35,75	937.782.221	66,20	91,68		
	1.04.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	516.281.306,07	6	437.991.789	9	700.892.266	9	10.476.000	9	63.127.680	9	44.098.582		288.173.736	9	405.875.998	100	57,91	15	843.867.787	125,00	163,45	Seketariat	
	1.04.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2021-2023)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	506.594.180,24	23	93.914.434											0	-			23	93.914.434	44,23	18,54	Seketariat	
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Laporan	135	46.485.825.737,11	47	28.238.286.339	14	10.542.397.685,00	14	2.363.603.514,64	14	3.321.354.347,02	14	2.369.761.191,64		2.352.077.382,57	14	10.406.796.435,87	100,00	98,71	61,00	38.645.082.775	45,19	83,13		
	1.04.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	135	201.029.648,01	47	34.408.255	14	24.999.663	14	2.940.500	14	4.586.500,00	14	10.005.000		7.137.500	14	24.669.500	100,00	98,68	61,00	59.077.755	45,19	29,39	Seketariat	
	1.04.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	87	46.284.796.089,10	87	11.093.638.830	85	10.517.398.022	85	2.360.663.015	85	3.316.767.847,02	85	2.359.756.192		2.344.939.883	85	10.382.126.936	100,00	98,71	87,00	21.475.765.766	100,00	46,40	Seketariat	
			ADMINISTRASI UMUM PER	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	180	6.037.441.482,70	69	2.967.721.635	34	1.243.900.456,00	34	180.346.633,00	34	273.899.253,00	34	305.741.701,00		455.964.164,00	34	1.215.951.751,00	100,00	97,75	103,00	4.183.673.386	57,22	69,30		
	1.04.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	59.125.558,96	3	14.016.100	1	10.153.599	1	420.000	1	501.700,00	1	954.400		8.244.800	1	10.120.900	100,00	99,68	4,00	24.137.000	57,14	40,82	Seketariat	
	1.04.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	133	4.296.747.490,09	75	2.016.093.684	20	531.075.501	20	126.718.000	20	64.989.000,00	20	169.209.275		168.399.000	20	529.315.275	100,00	99,67	95,00	2.545.408.959	71,43	59,24	Seketariat	
	1.04.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	47	216.486.584,77	15	87.601.948	1	20.680.332	1	3.103.500	1	6.006.200,00	1	4.026.000		7.501.000	1	20.636.700	100,00	99,79	16,00	108.238.648	34,04	50,00	Seketariat	
	1.04.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38	187.182.409,81	8	207.036.758	5	150.058.560	5	19.177.101	5	40.964.800,00	5	30.945.435		53.079.313	5	144.166.649	100,00	96,07	13,00	351.203.407	34,21	187,63	Seketariat	
	1.04.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	272.596.072,44	9	256.903.350	2	95.948.564	2	1.401.650	2	5.860.400,00	2	17.515.900		71.012.200	2	95.790.150	100,00	99,83	11,00	352.693.500	68,75	129,38	Seketariat	
	1.04.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	966	25.731.820,76	4	9.513.500	1	1.620.000	1	270.000	1	499.500,00	1	424.000		426.500	1	1.620.000	100,00	100,00	5,00	11.133.500	0,52	43,27	Seketariat	
	1.04.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	979.571.545,87	120	376.556.295	40	250.001.000	40	13.051.582	40	71.056.380,00	40	52.710.907		31.068.517	40	167.887.386	100,00	67,15	160,00	544.443.681	66,67	55,58	Seketariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2024)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	184.362.900	1	16.204.800	1	84.021.273,00	1	29.955.784		116.232.834	1	246.414.691	100,00	133,66	1,00	246.414.691				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021-2022)	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	Bulan	12	2.317.129.172,84	12	3.208.195.427															12,00	3.208.195.427	100,00	138,46		
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	361	6.563.440.813,30	89	1.994.968.723	89	2.391.093.000,00	89	413.448.654,00	89	542.355.603,00	89	531.465.749,00		756.723.437,00	89	2.243.993.443,00	100,00	93,85	178,00	4.238.962.166	49,31	64,58		
	1.04.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2021-2022	Jumlah Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	14	384.000.000,00	11	469.856.577															11	469.856.577	78,57	122,36	Seketariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	Laporan	36	1.435.357.140,72	36	196.168.017	30	230.160.000	30	46.313.298	30	42.042.963,00	30	42.227.409		51.379.279	30	181.962.949	100,00	79,06	66,00	378.130.966	183,33	26,34		
	1.04.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021-2022)	Jumlah Fasilitas Perbaikan Peralatan Kerja	jenis	4	39.757.820,46	9	63.518.850												-	0,00	0,00	9,00	63.518.850	225,00	159,76	Seketariat	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	25	106.028.228,10	5	58.614.170	5	95.378.000	5	12.786.000	5	4.827.500,00	5	10.784.500		66.325.850	5	94.723.850	100,00	99,31	10,00	153.338.020	40,00	144,62		
	1.04.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2021-2022)	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Orang	31	1.885.930.110,75	31	2.674.820.000												-	0,00	0,00	31,00	2.674.820.000	100,00	141,83	Seketariat	
				Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Orang	1		1														0,00		1,00		100,00			
				Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jenis	3		3														0,00		3,00		100,00			
				Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Orang kali	24		24														0,00		24,00		100,00			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2021-2022)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.029.496.686,11	48	1.740.186.536	48	2.065.555.000	48	354.349.356	48	495.485.140,00	48	478.453.840		639.018.308	48	1.967.306.644	100,00	95,24	96,00	3.707.493.180	200,00	73,71		
	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021-2022)	Jumlah Kendaraan dan gedung yang mendapatkan perawatan rutin	Jenis	5	1.144.288.569,91	5	2.092.942.156														0,00	5,00	2.092.942.156	100,00	182,90		
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2023-2026)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	27	3.051.648.381,42	27	1.816.459.323	27	935.835.469	27	217.390.775	27	219.187.487	27	137.120.829		357.013.383	27	930.712.474	50,00	99,45	54,00	2.747.171.797	200,00	90,02		
	1.04.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	484.442.064,56	31	477.817.278	25	240.797.625	25	18.208.490	25	102.829.286,00	25	61.675.114		57.027.757	25	239.740.647	100,00	99,56	56,00	717.557.925	200,00	148,12	Seketariat	
	1.04.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	328.053.909,18	2	717.576.785	1	589.611.285	1	199.182.285	1	66.468.355,00	1	75.445.715		248.483.126	1	589.579.481	100,00	99,99	3,00	1.307.156.266	300,00	398,46	Seketariat	
	1.04.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3.383.440.977,59	3	2.714.007.416	1	105.426.559	1		1	49.889.846,00	1	0		51.502.500	1	101.392.346	100,00	96,17	4,00	2.815.399.762	200,00	83,21	Seketariat	
	1.04.01.2.09		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (2021-2022)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan	4	3.905.511.319,00	3	751.000.000													0	-	3,00	751.000.000	75,00	19,23		
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (2023-2026)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan	18	6.809.545.218,00	0	-		-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00		
	1.04.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lananean (2021)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan	2	1.352.109.424,00	3	751.000.000	0	-									0	-	0	-	3,00	751.000.000	150,00	55,54	Seketariat	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2022-2026)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	9.362.947.113,00	0	-	0	-									0	-	0	-	-	-	0,00	0,00		
	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pakaian kerja lapangan	Jenis	12	79.332.418,00	4	47.136.000	0	-		-		-		-		-	-	-	0	-	4,00	47.136.000	33,33	59,42		
	1.04.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (2021-2022)	Dihitung Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	Jenis	4	79.332.418,00	4	47.136.000	0	-									0	-	0,00	-	4,00	47.136.000	100,00	59,42	Seketariat	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (2023-2026)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	211.567.824,46	0	-	0	-									0	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		60,00	63,99	28,23	1.680.317.584	94,70	90,80		
																				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	Prosentase	25,38	173.772.835.870,13	18,22	67.754.139.677	4,99	19.237.015.451		892.803.949		356.696.904,00		13.181.764.496,00	12,19	4.277.650.973	12,19	18.372.528.603	244,29	95,51	30,41	86.126.668.280	119,82	49,56		
				Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani		31,78		3,18		3,98								10,11		10,11		254,02		13,29		41,82			
				Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani		14,95		8,63		2,49								2,04		2,04		81,93		10,67		71,37			
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2021-2022)	Optimalisasi Biaya Operasional dan Realisasi Fisik Pemugaran/Rehab RTLH (GAKIN, BRS, dan BSPS)	BNBA	2001	52.978.604.000,00	2.710	33.801.199.161										336.387.719	0		0	#DIV/0!	2.710	33.801.199.161	135,43	63,80		
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2023-2026)	Optimalisasi Biaya Operasional dan Realisasi Fisik Pemugaran/Rehab RTLH (GAKIN, BRS, dan BSPS) (2023-2026)	Prosentase	31,54	107.619.783.623,42	75	19.688.077.995	26,55	19.187.005.451		891.499.349		350.964.172		13.173.619.996		3.924.632.734	0	18.340.716.251	0,00	95,59	75	38.028.794.246	237,12	35,34		
	1.04.03.2.03.01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (2021-2022)	Laporan Pemutakhiran Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Laporan	4	353.650.212,61	4	120.932.807	0	-									-	-	100	-	4,00	120.932.807	100,00	34,20	Bidang Kawasan Permukiman	
				Lokasi Sosialisasi Usulan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan	2		2		0										-	-	100		2,00		100			
				Penyusunan Usulan Rumah Tidak Layak Huni	Usulan Kegiatan	4		4		0										-		100		4,00		100			
				Sinkronisasi Data	Kecamatan	18		18		0										-		100		18,00		100			
	1.04.03.2.03.02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (2023)	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	6000	155.824.292.430,08	3225	44.179.632.037	0										-	-	100		3.225	44.179.632.037	53,75	28,35	Bidang Kawasan Permukiman	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (2024)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah					300	8.024.000.000		95.000.000		36.826.220	58	6.775.007.100	235	336.387.719	293	7.243.221.039	98	90,27	293	7.243.221.039				
	1.04.03.2.03.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh (2021-2022)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemugaran Permukiman Kumuh	Kecamatan	18	146.195.840,37	18	208.811.980											-	-	-	-	18	208.811.980	100	142,83	Bidang Kawasan	
				Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi	Buku	4		4												-		-		4		100			
				Jumlah Sistem Informasi Rumah Swadaya	Sistem Informasi	2		2												-		-		2		100			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.04.03.2.03.04	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah yang layak huni	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh (2023-2026)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	8	1.333.015.516,94	2	224.277.060	1	732.463.451	0	682.463.449		5.687.150,00		24.556.989	2	13.109.170	2	725.816.758	200	99,09	4	950.093.818	50	71,27	Bidang Permukiman	
	1.04.03.2.03.06		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (2023)	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	875,44	2.941.233.623,42	218,86	8.755.623.272											0,00	-	100		219	8.755.623.272	25	297,69		
			Pelaksanaan Pembangunan Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan	ha					7,47	371.464.000		55.055.195		108.928.660,00		80.017.500	7,47	121.075.680	7,47	365.077.035	100	98,28	7	365.077.035				
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha					218,86	10.059.078.000		58.980.705		199.522.142,00		6.294.038.407		3.454.060.165	0,00	10.006.601.419	-	99,48	-	10.006.601.419				
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kecamatan yang ditunjang pembangunan Infrastruktur	Kecamatan	18	1.072.570.677,03	18	1.063.075.407	0	-		-		-		-		-	-	-	0	-	18,00	1.063.075.407	0,00	99,11		
	1.04.03.2.01.02		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (2021)	Jumlah kecamatan yang ditunjang pembangunan Infrastruktur	Kecamatan	18	449.010.430,56	18	394.808.069											-	-			18,00	394.808.069	100,00	87,93	Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (2021-2022)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kecamatan	18	623.560.246,47	18	668.267.338											-	-	0,00	-	18,00	668.267.338	100,00	107,17	Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2021-2022)	Meningkatkan kualitas permukiman untuk menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Kecamatan	2	12.101.877.569,68	2	14.888.257.827											-	-	0	-	2,00	14.888.257.827	100,00	123,02		
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (2023-2026)	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	52	30.670.317.376,58	12	5.515.277.084	13	50.010.000	-	1.304.600	-	5.732.732,00	-	8.144.500,00	-	16.630.520	-	31.812.352	0	63,61	12,00	5.547.089.436	23,08	18,09		
	1.04.03.2.02.01		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (2021-2022)	Laporan pekerjaan perencanaan detail infrastruktur penataan permukiman	Dokumen	4	454.229.235,51	4	307.679.499											-	-	0,00	-	4,00	307.679.499	100,00	67,74	Bidang Kawasan Permukiman	
			Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (2023-2026)	Laporan pekerjaan perencanaan detail infrastruktur penataan permukiman	Dokumen	8	1.245.600.246,69	0	-													0,00	-	-	-	0,00	0,00		
	1.04.03.2.02.02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	28	3.148.904.220,11	15	1.586.066.681	4										-	-	0,00		15,00	1.586.066.681	53,57	50,37	Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02.03		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (2021-2022)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	KPP	19	626.100.608,61	6	106.072.094													0,00	-	6,00	106.072.094	31,58	16,94	Bidang Kawasan Permukiman	
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (2023)	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	16	228.318.124,42	2	28.603.500	1										-	-	0,00		2,00	28.603.500	12,50	12,53		
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (2024)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan					1	50.010.000		1.304.600		5.732.732,00		8.144.500	1	16.630.520	1	31.812.352	100,00	63,61	1,00	31.812.352				
	1.04.03.2.02.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (2021-2022)	Meningkatkan kualitas permukiman untuk menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	Kecamatan	4	9.318.625.756,96	4	8.931.656.898	0	-									-	-	0,00	-	4,00	8.931.656.898	100,00	95,85	Bidang Kawasan Permukiman	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (2023)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	8	27.750.416.753,96	4	4.999.346.984	2										-	-	0,00		4,00	4.999.346.984	50,00	18,02		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		47,51	23,00	175,68	4.618.389.904	68,82	68,72		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang		
	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Prosentase	53,83	12.587.364.121,30	19	8.944.067.095	10,43	1.573.479.036		236.914.389		319.550.507		464.382.540	16,6	479.172.937	16,60	1.500.020.373	159,16	95,33	36,04	10.444.087.468	66,95	82,97		
	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	13	118.400.725,78	19	195.251.366	1	215.000.000		-		17.181.500		141.284.323	1	25.934.810	1	184.400.633	100	85,77	20,00	379.651.999	153,85	320,65		
	1.04.02.2.01.01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	13	118.400.725,78	7	84.252.640	3										0	-	0		7,00	84.252.640	53,85	71,16	Bidang Perumahan	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (2024)	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					1	215.000.000				17.181.500		141.284.323	1	25.934.810	1	184.400.633	100	85,77	1,00	184.400.633				
	1.04.02.2.02		SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarananya	Pengembang	21	417.518.797,00	18	417.518.776	0	-		-		-		-		-	-	-	0	-	18,00	417.518.776	85,71	100,00		
	1.04.02.2.02.03		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (2021-2022)	Jumlah pengusul rumah subsidi program FLPP dan BP2PT	Pengembang	21	417.518.797,00	18,,	417.518.776	0	-									-	-	0,00	-	18,00	417.518.776	85,71	100,00	Bidang Perumahan	
	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang Dibina dan Dikelola	Rusun	7	3.644.732.643,49	14,,	4.729.971.908	7	1.200.000.209	7	226.969.689	7	289.589.907,00	7	294.115.067,00	7	388.775.877	7	1.199.450.540	100	99,95	21,00	5.929.422.448	300,00	162,68		
	1.04.02.2.05.02	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui	Penataausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2021-2022)	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional (administrasi, kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, pemenuhan sarana dasar umum)	Rusun	7	3.644.732.643,49	6	1.369.591.900											0	-	0,00	-	6,00	1.369.591.900	85,71	37,58	UPT RUSUN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		penyediaan rumah umum	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2023-2026)	Jumlah Dokumen Penanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	2.050	9.695.133.109,83	1.400	3.360.380.008											-		#DIV/0!		1.400,00	3.360.380.008	68,29	34,66		
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2024)	Jumlah Dokumen Penanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen					505	1.200.000.209	570	226.969.689	64	289.589.907,00	8	294.115.067		388.775.877	642	1.199.450.540	127,13	99,95	642,00	1.199.450.540				
	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarananya	Unit Rumah	4	7.541.542.062,20	10	2.977.123.728	4	158.478.827	0	9.944.700		12.779.100,00		28.983.150,00	0	64.462.250	0	116.169.200	0	73,30	10,00	3.093.292.928	250,00	41,02		
	1.04.02.2.03.06		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	4	7.541.542.062,20	10	2.977.123.728	1	9.944.700		9.944.700					0		0	9.944.700	0,00	100,00	10,00	2.987.068.428	250,00	39,61	Bidang Perumahan	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (2024)	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah					50	148.534.127	0		0	12.779.100,00	0	28.983.150	0	64.462.250	0	106.224.500	0,00	71,52	-	106.224.500				
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (2024)	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah					17	-									0	-	0,00		-	-				
	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah persil rumah dari beberapa pengembang yang dikendalikan	Unit	9975	865.169.892,83	82	624.201.318		-		-		-		-		-	0,00	-	0	-	82,00	624.201.318	0,82	72,15		
	1.04.02.2.06.01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik (2021-2022)	Jumlah pengembang yang dibina	Pengembang	199	284.209.652,75	133	250.413.696											-	-	0,00	-	133,00	250.413.696	66,83	88,11	Bidang Perumahan	
	1.04.02.2.06.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (2021-2022)	Jumlah persil rumah yang dikendalikan	Unit	84	580.960.240,08	82	373.787.622											-	-	0,00	-	82,00	373.787.622	97,62	64,34	Bidang Perumahan	
Rata - rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00	207,00	1.105.376.634	88,50	54,43		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	Prosentase	2,40	74.932.727.500,25	2,20	21.070.439.182	0,52	10.296.197.824		1.074.653.631		63.264.030		4.762.342.063	0,82	3.345.315.220	0,82	9.245.574.944	157,69	89,80	3,02	30.316.014.126	126,02	16,53	40,46		
				Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik		8,59		1,42		3,31										0,00		0,00		1,42					
				Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik		0,40		0,18		0,52								0,18		0,18		18		0,36		36,10			
			URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN (2021-2022)	Persentase Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di perumahan yang di Rehabilitasi atau ditingkatkan	Prosentase	0,32	11.224.687.500	1,85	13.230.113.244	-	-									-	-	-	-	1,85	13.230.113.244	579,52	117,87		
			URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN (2023-2026)	Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan	lokasi	104	63.708.040.000,25	-	7.840.325.939	26	10.296.197.824	0,00	1.074.653.631	0	63.264.030		4.762.342.063	4,00	3.345.315.220	4,00	9.245.574.944	15,38	89,80	4,00	17.085.900.883	3,85	26,82		
				Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU makam Perumahan	lokasi	28		-		7		0,00		0						0,00		0,00		0,00		0,00			
	1.04.05.2.01.01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	31	2.571.489.225,92	13	1.053.857.837	10										-	-	0,00		13,00	1.053.857.837	41,94	40,98	Bidang Perumahan	
	1.04.04.2.01.02	Menrujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan PSU perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (2021)	Jumlah penerangan jalan lingkungan terbangun	Unit	153	6.350.086.564,55	255	3.769.230.605	0	-									-	-	0,00	-	255,00	3.769.230.605	166,67	59,36	Bidang Perumahan	
				Jumlah tangki septik terbangun	Unit	100				0												0,00							
				Panjang jalan lingkungan terbangun	Meter	625		625		0										-		0,00		625,00		100,00			
				Panjang saluran lingkungan terbanrun	Meter	282		362		0										-		0,00		361,75		128,28			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (2022)	Panjang Jalan Lingkungan beserta kelengkapannya yang Terbanrun	Meter	842	3.665.676.398,00	4.877		0	-									-		0,00		4.876,71	-	579,18	-		
				Jumlah infrastruktur makam Terbangun	Unit	7		6		0										-		0,00		6,00		85,71			
				Jumlah infrasturkur bipori terbangun (Perumahan dan Permukiman)	Unit	2000		9.853		0										-		0,00		9.853,00		492,65			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (2023-2026)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	104	60.434.170.053,62	20	7.331.881.495	9	10.288.697.824		1.067.153.631		63.264.030,00		4.762.342.063	4	3.345.315.220	4	9.238.074.944	44,44	89,79	24,00	16.569.956.439	23,08	27,42		
	1.04.04.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	60	1.213.373.993,91	92	1.049.291.017	24										-	-	0,00		92,00	1.049.291.017	153,33	86,48	Bidang Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	60	697.931.264,26	10	86.136.107	24	7.500.000		7.500.000					4		4	7.500.000	16,67	100,	14,00	93.636.107	23,33	13,42		
Rata - rata capaian kinerja (%)																						30,56	94,89	1.612,05	3.755.995,334	179,42	37,94		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program:																						108,59	92,96	100,63	53.485.220,901	60,52	60,52		
Predikat Kinerja:																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																												
			Urusan KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
	1.05.01		*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	115.531.955.110	100	56.987.375.462	100	19.414.719.786	100	3.806.435.891	100	5.891.295.629		4.693.390.673		4.773.898.812	100	19.165.021.005	100	99	100	76.152.396.468	100	66	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD.	Dokumen	41	74.499.812	9	36.483.600	7	11.532.000		-	5	11.325.000		-	2	-	7	11.325.000	100	98	16	47.808.600	39	64		
	1.05.01.2.01.0001		*Penjusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	74.499.812	9	36.483.600	7	11.532.000	-	-	5	11.325.000	-	-	2	-	7	11.325.000	100	98	16	47.808.600	145	64		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	Bulan	12	83.383.507.960	12	43.738.941.747	12	14.239.915.398	3	3.105.725.089	3	4.542.895.540	3	3.206.428.245	3	3.179.462.511	12	14.034.511.385	100	99	12	57.773.453.133	100	69	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.02.0001		*Pengadaian Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	122	83.383.507.960	122	43.738.941.747	111	14.239.915.398	109	3.105.725.089	109	4.542.895.540	108	3.206.428.245	107	3.179.462.511	111	14.034.511.385	100	99	107	57.773.453.133	88	69		
																				Rata - rata capaian kinrja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	5	2.750.000.000	1	786.898.275	1	356.776.826		-		-	1	350.192.000	-	3.185.500	1	353.377.500	100	99	1	1.140.275.775	20	41	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.05.0002		*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.300	2.750.000.000	508	786.898.275	260	356.776.826		-		-	260	350.192.000		3.185.500	260	353.377.500	100	99	768	1.140.275.775	59	41		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.01.2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	Jenis	30	3.383.744.305	11	1.382.522.578	6	420.884.762		-	6	224.929.352	6	84.614.094	6	108.759.464	6	418.302.910	100	99	17	1.800.825.488	57	53	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.06.0001		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	287	97.999.800	85	29.838.100	9	10.335.600	-	-	9	10.230.000					9	10.230.000	100	99	94	40.068.100	33	41		
	1.05.01.2.06.0002		*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	42	170.604.840	64	553.820.045	62	61.974.240	-	-	30	31.489.860	30	25.158.645	2	4.151.250	62	60.799.755	100	98	126	614.619.800	300	360		
	1.05.01.2.06.0004		*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10.200	486.999.865	3.350	180.848.680	1.500	82.626.736	-	-	550	22.418.550	600	28.796.100	350	31.410.600	1.500	82.625.250	100	100	4.850	263.473.930	48	54		
	1.05.01.2.06.0005		*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.500	330.000.000	343	49.375.350	11	19.889.414	-	-	3	2.226.800	4	8.068.700	4	9.096.914	11	19.392.414	100	98	354	68.767.764	24	21		
	1.05.01.2.06.0006		*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	18	98.140.000	9	48.836.400	180	21.558.000	-	-	65	8.186.000	60	7.337.000	55	5.475.000	180	20.998.000	100	97	189	69.834.400	1.050	71		
	1.05.01.2.06.0009		*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	2.199.999.800	225	519.804.003	100	224.500.772	-	-	75	150.378.142	20	15.253.649	5	58.625.700	100	224.257.491	100	100	325	744.061.494	72	34		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,0							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.08		*Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	Jenis	2	24.790.203.033	2	10.544.658.474	2	4.040.994.500	2	682.663.020	2	998.907.785	2	989.738.022	2	1.341.288.851	2	4.012.597.678	100	99	2	14.557.256.152	100	59	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.08.0002		*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.543.003.033	3	570.069.540	3	165.000.500	3	39.185.120	3	33.689.315	3	24.516.312	3	53.913.201	3	151.303.948	100	92	3	721.373.488	100	28		
	1.05.01.2.08.0004		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	126	22.247.200.000	133	9.974.588.934	133	3.875.994.000	133	643.477.900	133	965.218.470	133	965.221.710	133	1.287.375.650	133	3.861.293.730	100	100	266	13.835.882.664	211	62		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,0							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.01.2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	Tahun	1	1.150.000.000	1	497.870.788	1	344.616.300	1	18.047.782	1	113.237.952	1	62.418.312	1	141.202.486	1	334.906.532	100	97	2	832.777.320	200	72	SEKRETARIS	
	1.05.01.2.09.0002		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tahun	1	440.951.000	1	497.870.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	497.870.788	100	113		
					Unit	44	1.150.000.000	44	173.281.324	44	344.616.300	44	18.047.782	44	113.237.952	44	62.418.312	44	141.202.486	44	334.906.532	100	97	88	508.187.856	200	44		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,0							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.02		*PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*	Persentase Linmas yang dibina	Persen	7	52.113.672.000	100	11.741.928.702	5	7.459.417.200	100	95.986.700	100	314.662.743	100	1.041.864.989	100	5.919.108.652		7.371.623.084	100	99	100	19.113.551.786	1.538	37	KABID TIBUM	
				Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	Persen	100		100		100		100		100		100		100				-	-	100	-	100	-		
				Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina	Persen	100		100		100		100		100		100		100				-	-	100	-	100	-		
				Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	100		100		100		100		100		100		100				-	-	100	-	100	-		
	1.05.02.2.01		*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kali	2.536	39.048.143.675	736	8.160.625.715	450	5.195.780.000	50	81.686.700	100	166.865.093	100	500.360.489	200	4.444.737.800	450	5.193.650.082	100	100	1.186	13.354.275.797	47	34		
	1.05.02.2.01.0004		*Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*	jumlah linmas yang di bina	Orang	2.874	3.478.799.960	3.561	1.762.829.855											-	-	-	-	3.561	1.762.829.855	124	51	KABID BINUM LINMAS	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	440	9.434.150.000	2	18.125.500	6	4.700.000.000	1	3.000.000	2	62.088.600	1	316.675.771	2	4.317.656.000	6	4.699.420.371	100	100	8	4.717.545.871	2	50		
	1.05.02.2.01.0005		*Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia*	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	464	1.948.799.771	734	474.289.360	750	92.000.000	55	22.984.700	-	-	695	63.820.000	-	3.906.000	750	90.710.700	100	99	1.484	565.000.060	320	29	KABID TIBUM	
	1.05.02.2.01.0015		*Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2.053	15.049.999.760	703	4.987.691.500	135	264.515.000	25	40.308.600	40	95.603.034	30	56.909.604	40	71.644.600	135	264.465.838	100	100	838	5.252.157.338	41	35	KABID TIBUM	
	1.05.02.2.01.0016		*Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masssa*	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	2.702	9.136.394.184	474	935.815.000	38	139.265.000	5	15.393.400	5	9.173.459	15	62.955.114	13	51.531.200	38	139.053.173	100	100	512	1.074.868.173	19	12	KABID TIBUM	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.02.2.02		*Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Kali	2.500	11.401.728.325	650	3.296.592.187	400	2.233.847.200	20	13.400.000	85	143.137.650	150	526.214.500	145	1.462.508.852	400	2.145.261.002	100	96	1.050	5.441.853.189	42	48		
	1.05.02.2.02.0010		*Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah soialisasi perda dan perbup	Orang	521	1.796.399.850	421	1.423.684.430						-		-	-	-	-	-	-	-	421	1.423.684.430	81	79	KABID BINUM LINMAS	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	36	1.796.399.850	11	2.151.861.702	9	751.788.500	-	-	1	24.253.650	2	139.608.200	6	575.805.360	9	739.667.210	100	98	20	2.891.528.912	56	161		
	1.05.02.2.02.0011		*Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	3.186	8.477.098.475	376	1.571.353.507	163	1.402.058.700	61	10.400.000	25	110.574.000	40	357.436.300	37	853.711.492	155	1.332.121.792	95	95	531	2.903.475.299	17	34	KABID GAKDA	
	1.05.02.2.02.0012		*Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	287	1.128.230.000	146	301.554.250	55	80.000.000	19	3.000.000	16	8.310.000	18	29.170.000	2	32.992.000	55	73.472.000	100	92	201	375.026.250	70	33	KABID GAKDA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,4							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
	1.05.02.2.03		*Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	Jumlah pembinaan PPNS	Kali	6	1.663.800.000	2	284.710.800	2	29.790.000	-	900.000	1	4.660.000	1	15.290.000	-	11.862.000	2	32.712.000	100	110	4	317.422.800	67	19		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.02.2.03.0006		*Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	21	1.663.800.000	43	284.710.800	33	29.790.000	6	900.000	9	4.660.000	10	15.290.000	8	11.862.000	33	32.712.000	100	110	76	317.422.800	362	19	KABID GAKDA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKAAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	67%	3.675.693.000	67%	2.655.755.696											-	-	-	-	1	2.655.755.696	100	72		
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran	Kejadian	341	3.375.693.168	200	2.357.467.946											-	-	-	-	200	2.357.467.946	59	70		
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kejadian	341	3.375.693.168	200	2.357.467.946											-		-	-	200	2.357.467.946	59	70		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeliharaan peralatan kebakaran	Jenis	7	294.999.832	7	256.050.000											-	-	-	-	7	256.050.000	100	87		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah peralatan yang lengkap dan suku cadang yang baik	Jenis	7	294.999.832	7	256.050.000											-	-	-	-	7	256.050.000	100	87		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kegiatan	4	5.000.000	4	42.237.750											-	-	-	-	4	42.237.750	100	845		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melaluiSosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran	Kegiatan	4	5.000.000	4	42.237.750											-	-	-	-	4	42.237.750	100	845		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)									
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											26.874.136.986		3.902.422.591		6.205.958.372		5.735.255.662		10.693.007.464		26.536.644.089		98,74%						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						99,81822	98,8			51,3	51,3		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																												
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				99.237.288.000,00		24.899.659.597,59		6.924.757.811,00		1.553.326.556,87		1.508.109.472,65		1.376.375.792,58		1.798.709.068,45		6.236.520.890,55		90,06		31.136.180.488,14				
	1.05.01	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	66.007.828.000,00	100	16.676.101.839,59	100	4.921.001.326,00	25,00	1.007.102.556,87	25,00	1.320.955.022,65	25	1.054.738.792,58	25	1.332.655.810,45	100,00	4.715.452.182,55	100,00	95,82	50,00	21.391.554.022,14	50,00	32,41		
	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	550.538.970,00	3	158.809.765,00	1	14.656.294,00	2	7.861.250,00	2	4.012.000,00	2	1.477.500,00		1.024.300,00	1	14.375.050,00	100	98,08	3	173.184.815,00	100	31,46	Sekretariat	
	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	387.043.930,00	2	115.055.965,00	2	14.656.294,00	2	7.861.250,00	2	4.012.000,00	2	1.477.500,00		1.024.300,00	1	14.375.050,00	50	98,08	2	129.431.015,00	100	33,44		
	1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	42.777.540,00	3	14.151.400,00	-	-				-					0	-	0	0,00	3	14.151.400,00	100	33,08		
	1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	3	75.717.500,00	3	28.654.400,00												-	-	-	3	28.654.400,00	100	37,84		
	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	45.000.000,00	3	948.000,00	-	-				-					0	-	0	0,00		948.000,00	0	2,11		
	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	21	18.417.695.268,00	21	9.308.418.062,78	18	2.993.460.000,00	18	612.768.185,34	18	935.998.535,65	18	665.558.394,58		659.781.593,45	18	2.874.106.709,02	100,00	96,01	21	12.182.524.771,80	100	66,15	Sekretariat	
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21	18.417.695.268,00	21	9.308.418.062,78	18	2.993.460.000,00	18	612.768.185,34	18	935.998.535,65	18	665.558.394,58		659.781.593,45	18	2.874.106.709,02	100,00	96,01	21	12.182.524.771,80	100	66,15		
	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Jenis	2	1.464.730.850,00	2	637.521.350,00	-	-	-	-	-	-		-		-		-	0,00	0,00	2	637.521.350,00	100	43,52	Sekretariat	
	1.05.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	98	130.681.000,00	98	150.239.200,00												-			98	150.239.200,00	100	114,97		
	1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200	450.000.000,00	55	109.556.400,00	-	-				-				-		-	0,00	0,00	55	109.556.400,00	28	24,35		
	1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	884.049.850,00	50	377.725.750,00	-	-											-			50	377.725.750,00	100	42,73		
	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan	Jenis	7	4.804.480.834,00	7	1.844.420.373,80	8	494.397.917,00	5	70.580.089,00	7	99.424.035,00	8	106.143.267,00		207.635.222,00	8	483.782.613,00	100,00	97,85	7	2.328.202.986,80	100	48,46	Sekretariat	
	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	109.497.527,00	1	50.424.340,00	1	12.885.398,00			1	12.580.000,00					1	12.580.000,00	100,00	97,63	1	63.004.340,00	100	57,54		
	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.097.729.030,00	1	497.917.275,80	1	26.282.286,00					1	25.630.500,00		-	1	25.630.500,00	100,00	97,52	1	523.547.775,80	100	47,69		
	1.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	121.997.572,00	1	40.878.650,00	1	6.013.208,00			1	5.341.000,00					1	5.341.000,00	100,00	88,82	1	46.219.650,00	100	37,89		
	1.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	4	143.046.825,00	4	117.238.076,00												-			4	117.238.076,00	100	81,96		
	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	328.000.000,00	1	58.220.760,00	1	52.697.640,00	1	4.300.200,00	1	7.535.035,00	1	19.092.780,00		21.674.708,00	1	52.602.723,00	100,00	99,82	1	110.823.483,00	100	33,79		
	1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	4	79.999.930,00	4	83.017.485,00												-			4	83.017.485,00	100	103,77		
	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	160.000.000,00	1	31.624.900,00	1	20.501.466,00	1	2.441.000,00			1	13.177.000,00		4.783.850,00	1	20.401.850,00	100,00	99,51	1	52.026.750,00	100	32,52		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2	20.960.000,00	2	14.660.000,00												-			2	14.660.000,00	100	69,94		
	1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	51.300.000,00	1	5.445.000,00	1	10.304.000,00	1	1.719.900,00	1	1.701.000,00	1	2.244.000,00		2.187.000,00	1	7.851.900,00	100,00	76,20	1	13.296.900,00	100	25,92		
	1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	721.949.950,00	1	586.957.803,00												-			1	586.957.803,00	100	81,30		
	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.370.000.000,00	1	358.036.084,00	1	341.249.219,00	1	59.968.989,00	1	72.267.000,00	1	45.998.987,00		157.074.414,00	1	335.309.390,00	100,00	98,26	1	693.345.474,00	100	50,61		
	1.02.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	600.000.000,00			1	24.464.700,00	1	2.150.000,00						21.915.250,00	1	24.065.250,00	100,00	98,37	0	24.065.250,00	0	4,01		
	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	32.328.983.053,00	3	1.216.926.715,00	-	-	-	-	-	-		-		-		-	0,00	0,00	3	1.216.926.715,00	100	3,76	Sekretariat	
	1.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11	1.912.400.000,00	7	245.242.000,00	-	-										-			7	245.242.000,00	64	12,82		
	1.05.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	6	607.141.375,00	6	406.831.750,00												-			6	406.831.750,00	100	67,01		
	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	450.000.000,00	7	319.346.000,00	-	-				-		-				-	0,00	0,00	7	319.346.000,00	100	70,97		
	1.02.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	29.359.441.678,00	1	245.506.965,00	-	-										-			1	245.506.965,00	100	0,84		
	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	5.171.149.700,00	2	2.168.628.818,00	2	870.935.100,00	2	147.571.158,00	2	205.925.245,00	2	193.203.015,00		279.647.485,00	2	826.346.903,00	100,00	94,88	2	2.994.975.721,00	100	57,92	Sekretariat	
	1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	4	314.999.700,00	4	172.803.684,00												-			4	172.803.684,00	100	54,86		
	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	740.000.000,00		145.864.814,00	1	159.335.100,00	1	29.729.938,00	1	28.584.025,00	1	19.010.985,00		39.953.835,00	1	117.278.783,00	100,00	73,61	1	263.143.597,00	100	35,56		
	1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	4	1.276.150.000,00	4	1.198.000.000,00												-			4	1.198.000.000,00	100	93,88		
	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.840.000.000,00		651.960.320,00	1	711.600.000,00	1	117.841.220,00	1	177.341.220,00	1	174.192.030,00		239.693.650,00	1	709.068.120,00	100,00	99,64	1	1.361.028.440,00	100	47,92		
	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jenis	3	3.270.249.325,00	3	1.341.376.755,01	3	547.552.015,00	3	168.321.874,53	3	75.595.207,00	3	88.356.616,00		184.567.210,00	3	516.840.907,53	100,00	94,39	3	1.858.217.662,54	100	56,82	Sekretariat	
	1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jenis	3	496.413.875,00	3	548.609.202,00												-			3	548.609.202,00	100	110,51		
	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	1.560.000.000,00		366.205.127,00	38	366.645.785,00	38	19.615.645,00	38	75.595.207,00	38	62.776.616,00		178.550.960,00	38	336.538.428,00	100,00	91,79	38	702.743.555,00	100	45,05		
	1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	4	151.835.450,00	4	137.780.995,00												-			4	137.780.995,00	100	90,74		
	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	400.000.000,00		82.610.050,00	5	36.640.000,00	5	4.440.000,00			5	25.580.000,00		6.016.250,00	2	36.036.250,00	40,00	98,35	5	118.646.300,00	100	29,66		
	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	662.000.000,00	1	206.171.381,01	1	144.266.230,00	1	144.266.229,53			1			-	1	144.266.229,53	100,00	100,00	1	350.437.610,54	100	52,94		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		71,43	68,75			100,00	44,01		
																				Predikat Kinerja		Sedang	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.03	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan pra ben	Persen	100%	33.229.460.000,00	100%	8.223.557.758,00	100%	2.003.756.485,00	100%	546.224.000,00	100%	187.154.450,00	100%	321.637.000,00	100%	466.053.258,00	100,00	1.521.068.708,00	100	75,91	100,00	9.744.626.466,00	100	20,95		
		Menurunnya risiko bencana		Persentase Desa Tangguh Benc	Persen	100%		59,09%		79,55%		0,00%		73,86%		81,82%				81,82%		100,00		81,82%		100,00			
		Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana		Persentase Penanganan saat be	Persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100,00		100,00			
		Meningkatnya pemulihan pasca bencana		Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100,00		100,00			
	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	300.000	2.101.920.570,00	71.200	634.564.210,00	355.869	28.939.118,00		-		24.300.800,00			355.869	-	355.869	24.300.800,00	100,00		427.069	658.865.010,00	142	31,35	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
				2. Jumlah sekolah yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	Sekolah	6		4		1				1										5		5			
	1.05.03.2.01.01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / lega	Persen	100%	394.505.800,00	100%	350.402.000,00												-			100%	350.402.000,00	100	88,82		
	1.05.03.2.01.0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	617.415.000,00			-	-										-				-		-		
	1.05.03.2.01.02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah warga negara dikawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana per jenis ancaman bencaan	Persen	100%	229.999.770,00	100%	225.431.410,00												-			100%	225.431.410,00	100	98,01		
	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan Tempat tinggalnya	Orang	726	860.000.000,00		58.730.800,00	66	28.939.118,00			66	24.300.800,00			66	-	66	24.300.800,00	100,00			83.031.600,00		9,65		
	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	3.000	11.430.335.529,00	1000	2.920.819.040,00	99861	407.639.104,00		-		112.847.000,00		252.370.000,00	99861	40.486.800,00	99.861	405.703.800,00	100,00	99,53	100861	3.326.522.840,00	3362	29,10	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.03.2.02.06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	100%	183.399.700,00	100%	163.378.100												-			100%	163.378.100,00	100	89,08		
	1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	4	640.000.000,00		20.151.200,00	-	-								-		-				20.151.200,00		3,15		
	1.05.03.2.02.07		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	Persen	100%	193.643.800,00	100%	164.988.680												-			100%	164.988.680,00	100	85,20		
	1.05.03.2.02.08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kapasitas TRC	Persen	100%	165.983.250,00	100%	82.464.000												-			100%	82.464.000,00	100	49,68		
	1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Managerialnya	Orang	400	445.000.000,00		65.499.000,00	-	-								-		-				65.499.000,00		14,72		
	1.05.03.2.02.09		Penyusunan rencana kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	100%	300.000.000,00	100%	114.865.500												-			100%	114.865.500,00	100	38,29		
	1.05.03.2.02.0009		Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	4	1.000.000.000,00			-	-										-						-		
	1.05.03.2.02.10		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah masyarakat yg ikut pelatihan	Persen	100%	428.090.631,00	100%	164.095.000												-			100%	164.095.000,00	100	38,33		
	1.05.03.2.02.0010		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	1.000	1.200.000.000,00		113.070.600,00	100	32.390.000,00				6.450.000,00				25.715.500,00	100	32.165.500,00	100,00	99,31	400	145.236.100,00	40	12,10		
	1.05.03.2.02.0011		Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	250.000.000,00	-	-	-	-										-				-		-		
	1.05.03.2.02.0012		Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	750	600.000.000,00	-	-	-	-										-				-		-		
	1.05.03.2.02.01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	100%	194.548.898,00	100%	190.335.000												-			100%	190.335.000,00	100	97,83		
	1.05.03.2.02.0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	500.000.000,00			-	-										-				-		-		
	1.05.03.2.02.04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah masyarakat yg mendapat peralatan perlindungan	Persen	100%	100.000.000,00	-	-												-				-		-		
	1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	4	880.000.000,00		61.780.000,00	-	-								-		-				61.780.000,00		7,02		
	1.05.03.2.02.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yg ikut pelatihan	Persen	56,82%	972.872.990,00	56,82%	1.088.170.870												-			56,82%	1.088.170.870,00	100	111,85		
	1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kawasan	1.900	2.480.000.000,00		560.519.840,00	400	359.984.100,00			120	106.397.000,00	280	252.370.000,00			400	358.767.000,00	100,00	99,66	378	919.286.840,00	20	37,07		
	1.05.03.2.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah masyarakat yg mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	100%	218.296.260,00	100%	102.035.050												-			100%	102.035.050,00	100	46,74		
	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	678.500.000,00		29.466.200,00	1	15.265.004,00				-			1	14.771.300,00	1	14.771.300,00	100,00	96,77	1	44.237.500,00	100	6,52		
	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	#######	15.817.204.265,00	373.246	3.870.965.467,00	213.625	882.478.352,00	46.367	544.304.000,00	886	45.025.650,00	#####	67.627.000,00	109.536	202.912.700,00	213.625	859.869.350,00	100,00	97,44	586.871	4.730.834.817,00	49	29,91	Bidang Kedaruratan & Logistik	
	1.05.03.2.03.0001		Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	488.000.000,00	-	-	-	-										-				-		-		
	1.05.03.2.03.02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	100%	209.999.810,00	100%	99.999.640,00												-			100%	99.999.640,00	100	47,62		
	1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1.000.000.000,00		184.937.300,00	1	152.160.000,00	1	27.040.000,00	1	38.040.000,00	1	38.040.000,00		49.040.000,00	1	152.160.000,00	100,00	100,00	1	337.097.300,00	100	33,71		
	1.05.03.2.03.04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah logistik dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	3.582.457.525,00	100%	2.349.571.477,00												-			100%	2.349.571.477,00	100	65,59		
	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	18.200	9.216.747.000,00		624.983.050,00	400	730.318.352,00	400	517.264.000,00		6.985.650,00		29.587.000,00		153.872.700,00	400	707.709.350,00	100,00	96,90	4400	1.332.692.400,00	24	14,46		
	1.05.03.2.03.06		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status bencana non alam	Persen	100%	699.999.930,00	100%	477.824.000,00												-			100%	477.824.000,00	100	68,26		
	1.05.03.2.03.0010		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	510.000.000,00		1.650.000,00	-	-		-		-						-	0,00	0,00	1	1.650.000,00	100	0,32		
	1.05.03.2.03.0011		Aktivasi sistem komando penanganan darurat	Persentase jumlah petugas yg aktif dlm penanggunan darurat bencana	Laporan	100%	110.000.000,00	100%	132.000.000,00	-	-										-			100%	132.000.000,00	100	120,00		
	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah lembaga kebencanaan/Perangkat Daerah yang melaksanakan penanggulangan kebencanaan	Lembaga	3	3.879.999.636,00	3	797.209.041,00	3	684.699.911,00	3	1.920.000,00	3	4.981.000,00	3	1.640.000,00		222.653.758,00	3	231.194.758,00	100,00	33,77	3	1.028.403.799,00	100	26,51	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	
	1.05.03.2.04.01		Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	100%	399.999.866,00	100%	284.383.366,00												-			100%	284.383.366,00	100	71,10		
	1.05.03.2.04.0001		Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	650.000.000,00														-				-		-		
	1.05.03.2.04.02		Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yg ikut pelatihan	Persen	100%	100.000.000,00	100%	62.008.000,00												-			100%	62.008.000,00	100	62,01		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.05.03.2.04.0002		Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	4	480.000.000,00		32.852.500,00	-	-								-		-			1	32.852.500,00	25	6,84		
	1.05.03.2.04.03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan penanggulangan bencana	Persen	100%	269.999.820,00	100%	243.454.100,00												-			100%	243.454.100,00	100	90,17		
	1.05.03.2.04.0003		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	12	450.000.000,00														-				-		-		
	1.05.03.2.04.05		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	179.999.950,00	100%	33.755.700,00												-			100%	33.755.700,00	100	18,75		
	1.05.03.2.04.0005		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	510.000.000,00		19.097.000,00	1	684.699.911,00	1	1.920.000,00	1	4.981.000,00	1	1.640.000,00		222.653.758,00	1	231.194.758,00	100,00	33,77	1	250.291.758,00	100	49,08		
	1.05.03.2.04.06		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	690.000.000,00		121.658.375,00	-	-						-				-	0,00	0,00	1	121.658.375,00	100	17,63		
																				Rata - rata canaian kinerja (%)		100,00	57,68			913,32	29,22		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								6.924.757.811,00										6.236.520.890,55								
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		100,00	90,06			75,00	26,68		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB /KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Prosentase	100	45.184.657.630	100	10.177.243.440	100	8.448.668.703		1.303.021.443		2.345.680.875		1.915.558.697		2.288.156.376	-	7.852.417.391,57	0	92,94	99,92	18.029.660.832	99,92	39,90		
	1.05.01.2.01.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	485.000.000	100	31.248.000	100	13.819.416		-		8.800.000		600.000		1.827.800	-	11.227.800,00	100,00	81,25	100,00	42.475.800,00	100,00	0,09		
(1)	1.05.01.2.01.01	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	315.000.000	100	25.143.000	5	13.819.416	3		1	8.800.000		600.000	1	1.827.800,00	5,00	11.227.800,00	100	81,25	12	36.370.800,00	46,19	11,55		
(2)	1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	170.000.000	12	6.105.000											-	-			4	6.105.000,00	35,91	3,59		
	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Fasilitasi administrasi keuangan OPD	Prosentase	100	22.483.639.012	100	7.304.657.684	100	4.301.259.280		888.921.443		1.339.272.902		912.816.880		903.907.723	-	4.044.918.948,62	100	94,04	100,00	11.349.576.632	100,00	0,50		
(3)	1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	22.268.639.012	12	7.289.897.684	12	4.294.016.000	3	888.921.443	3	1.339.272.902	3	912.116.880	3	902.723.023,34	12,00	4.043.034.248,62	100	94,16	51	11.332.931.932,37	84,82	50,89		
(4)	1.05.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	125.000.000	-	8.920.000	2	3.035.530							2	847.500,00	2,00	847.500,00	100	27,92	8	9.767.500,00	78,14	7,81		
(5)	1.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	27	90.000.000	4	5.840.000	2	4.207.750						700.000	2	337.200,00	2,00	1.037.200,00	100	24,65	8	6.877.200,00	28,30	7,64		
	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase	100	6.505.121.800	99	821.475.020	100	637.935.007		-		214.672.069		67.381.581		82.970.490	-	365.024.140	100	57,22	99,10	1.186.499.160,00	99,10	0,18		
(6)	1.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	291.000.000	5	25.968.680	1	35.451.675			1	35.300.775					1,00	35.300.775,00	100	99,57	21	61.269.455,00	421,10	21,05		
(7)	1.05.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.070.000.000	12	129.006.975											-	-			12	129.006.975,00	241,13	12,06		
(8)	1.05.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	906.121.800	6	74.510.215	4	171.726.248			3	83.404.623	1	11.757.300			4,00	95.161.923,00	100	55,41	19	169.672.138,00	374,50	18,73		
(9)	1.05.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	655.000.000	12	114.779.500	1	56.179.128			1	9.680.000		10.325.900	0,37	18.074.500,00	1,00	38.080.400,00	100	67,78	23	152.859.900,00	466,75	23,34		
(10)	1.05.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	536.000.000	6	101.795.800	1	66.623.970			1	4.928.000		12.394.000	0,44	14.264.500,00	1,00	31.586.500,00	100	47,41	25	133.382.300,00	497,70	24,88		
(11)	1.05.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	187.000.000	4	20.640.000											-	-			11	20.640.000,00	220,75	11,04		
(12)	1.05.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	260.000.000	30	46.685.839	1	44.096.211			1	36.951.956		1.896.250		3.943.250,00	1,00	42.791.456,00	100	97,04	34	89.477.295,00	688,29	34,41		
(13)	1.05.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	450.000.000	-	-															-	-				
(14)	1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.300.000.000	100	308.088.011	21	235.958.000	1		7	17.856.940		31.008.131	13	46.688.240,00	21,00	95.553.311,00	100	40,50	31	403.641.322,00	51,75	31,05		
(15)	1.05.01.2.06.10		Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Dokumen	24	150.000.000	-	-								-			-	-			-	-				
(16)	1.05.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronil pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronil pada SKPD	Dokumen	24	700.000.000	-	-	4	27.899.775			4	26.549.775					4,00	26.549.775,00	100	95,16	4	26.549.775,00	15,80	3,79		
	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	4.073.199.400	100	912.699.942	100	2.740.839.000		414.100.000		669.345.816		690.932.809		936.937.115	-	2.711.315.740	100	98,92	100,00	3.624.015.682,00	100,00	0,89		
(16)	1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	2.033.199.400	12	235.413.203	12	233.259.000	2		4	43.723.536	3	66.589.399	3	100.346.765,00	12,00	210.659.700,00	100	90,31	22	446.072.903,00	36,57	21,94		
(17)	1.05.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.040.000.000	100	677.286.739	90	2.507.580.000	15	414.100.000	27	625.622.280	23	624.343.410	25	836.590.350,00	90,00	2.500.656.040,00	100	99,72	156	3.177.942.779,00	259,64	155,78		
	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	11.637.697.418	100	1.107.162.795	100	754.816.000		-		113.590.088		243.827.427		362.513.248	-	719.930.763	100	95,38		1.827.093.557,54	-	0,16		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
(18)	1.05.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	1.303.450.000	20	431.673.922	7	182.990.000	1		2,5	64.661.611	2	36.706.000	1,5	80.735.900,00	7,00	182.103.511,00	100	99,52	47	613.777.433,00	235,44	47,09		
(19)	1.05.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasonal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Unit	40	1.200.000.000	-	-	4	27.600.000							4	26.129.200,00	4,00	26.129.200,00	100		2	26.129.200,00				
(20)	1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	Unit	411	1.455.196.900	5	64.951.355	116	61.580.000	26		30	13.562.900	15	3.175.000	45	19.266.050,00	116,00	36.003.950,00	100	58,47	7	100.955.305,00	1,69	6,94		
(21)	1.05.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	22	7.679.050.518	100	610.537.518	2	482.646.000			1	35.365.577		203.946.427	1	236.382.097,95	2,00	475.694.101,95	100	98,56	14	1.086.231.619,54	64,30	14,15		
																						100	85			79,83	0		
																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	01:05:04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)	Prosentase	100	39.537.085.458	100	7.842.888.207	100	2.202.002.943		-		521.511.789		447.202.757		711.169.485	-	1.679.884.031	0	76,29	100	9.522.772.238	100,00	24,09		
	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kebakaran	Prosentase	100	30.760.167.665	100	7.065.547.409	100	1.727.591.419		-		421.385.589		344.611.237		585.378.145	-	1.351.374.971	262	78,22	100,00	8.416.922.380	100,00	0,27		
				jumlah pencegahan dan penanggulangan kebakaran		341	3.375.693.168	200	2.357.467.946															200	2.357.467.946				
(22)	1.05.04.2.01.01	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Pencegahan Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	389	3.519.693.865	-	2.114.760.000	12										-	-	-		-	2.114.760.000,00	-	60,08		
(23)	1.05.04.2.01.02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	389	14.634.504.600	581	3.978.350.965	100	477.327.700	199		194	131.500.889	376	60.332.677	267	173.022.680,00	1.036,00	364.856.246,00	1.036	76,44	1.617	4.343.207.211,00	415,68	29,68		
(24)	1.05.04.2.01.04		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	2.119.373.000	-	-	-										-	-			-	-	-	-		
(25)	1.05.04.2.01.05		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	48	2.135.650.000	-	333.149.838	100	444.295.700			25	45.385.000	25	64.689.500	50	328.192.000,00	100,00	438.266.500,00	100	98,64	100	771.416.338,00	208,33	36,12		
(26)	1.05.04.2.01.06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai Standart Teknis Terkait	Unit	600	2.805.514.200	-	600.156.000	100	622.424.329			50	244.499.700	25	75.586.560		65.473.905,00	75,00	385.560.165,00	75		75	985.716.165,00	12,50	35,13		
(27)	1.05.04.2.01.07		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur aparatur pemadam kebakaran yang memiiki sertifikat keterampilan teknis dan alaisa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	393	1.975.000.000	-	39.130.606	60	183.543.690						144.002.500	60	18.689.560,00	60,00	162.692.060,00	100	88,64	60	201.822.666,00	15,27	10,22		
(28)	1.05.04.2.01.08		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Keluahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	350	1.907.925.000	-	-												-	-			-	-	-	-		
(29)	1.05.04.2.01.09		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi atar wilayah Kabupaten/kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Desa/Kelurahan	36	1.662.507.000	-	-												-	-			-	-	-	-		
	1.05.04.2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Prosentase	100	2.594.999.800	100	209.394.174	100	72.814.000		-		36.676.800		-		22.152.500	-	58.829.300	100	80,79	100,00	268.223.474	100,00	0,10		
				jumlah peralatan yang lengkap dan suku cadang yang baik		7	294.999.832	7	256.050.000																				
(30)	1.05.04.2.02.01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	60	594.999.800	7	209.394.174	12	72.814.000			8	36.676.800			4,2	22.152.500,00	12,00	58.829.300,00	100	80,79	19	268.223.474,00	31,67	45,08		
(31)	1.05.04.2.02.02		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	Dokumen	36	2.000.000.000	-	-	12																			
	1.05.04.2.03		IInvestigasi Kejadian Kebakara	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Prosentase	100	150.000.000	100	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
(32)	1.05.04.2.03.01		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilaksukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	36	150.000.000	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	Prosentase	100	2.498.683.003	100	567.946.624	100	249.696.700		-		41.669.400		85.671.520		76.208.840	-	203.549.760	55	81,52	100,00	771.496.384	100,00	0,31		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran		4	5.000.000	4	42.237.750																				
(33)	1.05.04.2.04.01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	330	797.304.000	5	567.946.624	300	109.756.400			75			34.329.800		52.307.690,00	75,00	86.637.490,00	25	78,94	80	654.584.114,00	24,24	82,10		
(34)	1.05.04.2.04.02		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	350	675.000.000	-	-	356	139.940.300			106	41.669.400		51.341.720	194	23.901.150,00	300,00	116.912.270,00	84	83,54	300	116.912.270,00				
(35)	1.05.04.2.04.03		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	3	1.026.379.003	-	-															-	-				
	1.05.04.2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan yang tertangani	Prosentase	100	3.533.234.990	100	-	100	151.900.824				21.780.000		16.920.000		27.430.000		66.130.000	100	43,53	100,00	66.130.000	100,00	0,02		
(36)	1.05.04.2.05.01		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan, dan / atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Laporan	48	483.234.990	-	-	100	151.900.824	10		5	21.780.000	5	16.920.000	80	27.430.000,00	100,00	66.130.000,00	100	43,53	100	66.130.000,00	208,33	13,68		
(37)	1.05.04.2.05.03		Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	101	2.000.000.000	-	-											-	-			-	-	-	-		
(38)	1.05.04.2.05.04		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Laporan	36	1.050.000.000	-	-											-	-			-	-	-	-		
																						103	71			100,00	0		
																						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							84.721.743.088		18.020.131.647		10.650.671.646									89,50	9.532.301.422,57	101,68	78,19			89,91	0,25		
																						101,68	78,19			89,91	0,25		
																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	DINAS SOSIAL																												
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				176.339.492.397,00		61.623.231.920,64		31.769.993.294,00		1.111.867.606,28		11.056.122.987,95		3.435.233.269,92		5.932.086.953,53		24.233.411.237,01				85.856.643.157,65				
							176.339.492.397,00		61.623.231.920,64		31.769.993.294,00		1.111.867.606,28		11.056.122.987,95		3.435.233.269,92		5.932.086.953,53		24.233.411.237,01				85.856.643.157,65				
1	1.06.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	Persen	100	35.700.491.373,00	100	15.328.329.123,54	100	5.781.172.339,00	25	918.103.500,28	25	1.583.446.896,95	20	1.512.391.360,92	30	1.289.503.449,86	100	5.493.610.408,01	100	95,03	100	20.821.939.531,55	100,00	58,32		
	1.06.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persen	100	417.524.155,00	100	155.731.965,00	100	53.500.000,00	-	-	50	22.762.800,00	20	14.789.900,00	30	2.924.000,00	100	40.476.700,00	100	75,66	100	196.208.665,00	100,00	46,99	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	12	22.903.895,00	12	36.047.800,00															12	36.047.800,00	100,00	157,39		
	1.06.01.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23	135.571.000,00	5	28.478.775,00	6	33.500.000,00	0	-	3	17.412.900,00	3	11.308.050,00	0	0,00	6	28.720.950,00	100	85,73	11	57.199.725,00	47,83	42,19		
	1.06.01.2.01.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	12	19.529.870,00	12	15.514.800,00															12	15.514.800,00	100,00	79,44		
	1.06.01.2.01.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	44.019.000,00	6	8.635.800,00	6	10.000.000,00	0	0,00	2	4.420.400,00	2	2.551.850,00	2	1.403.000,00	6	8.375.250,00	100	83,75	12	17.011.050,00	50,00	38,64		
	1.06.01.2.01.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	9	49.349.890,00	8	35.146.800,00															8	35.146.800,00	88,89	71,22		
	1.06.01.2.01.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	146.150.500,00	4	31.907.990,00	5	10.000.000,00	0	0,00	1	929.500,00	1	930.000,00	3	1.521.000,00	5	3.380.500,00	100	33,81	9	35.288.490,00	47,37	24,15		
	1.06.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi keuangan	Persen	100	23.622.700.000,00	100	10.766.604.866,24	100	3.933.910.794,00	100	852.866.537,28	100	1.210.356.522,95	100	854.765.565,92	100	801.779.694,86	100	3.719.768.321,01	100	94,56	100	14.486.373.187,25	100,00	61,32	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.02.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	57	6.497.716.000,00	52	6.970.438.922,00															52	6.970.438.922,00	91,23	107,28		
	1.06.01.2.02.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	108	17.124.984.000,00	27	3.796.165.944,24	27	3.933.910.794,00	27	852.866.537,28	27	1.210.356.522,95	25	854.765.565,92	25	801.779.694,86	27	3.719.768.321,01	100	94,56	54	7.515.934.265,25	50,00	43,89		
	1.06.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian Dinas Sosial	Persen	100	413.750.000,00	0	0,00		0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	1.06.01.2.05.10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	150	413.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	1.06.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum	Persen	100	4.159.251.482,00	100	1.387.498.297,00	100	386.391.745,00	-	-	40	37.390.063,00	27	196.317.106,00	33	124.174.660,00	100	357.881.829,00	100	92,62	100	1.745.380.126,00	100,00	41,96	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.06.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	Jenis	10	20.151.670,00	10	24.420.632,00															10	24.420.632,00	100,00	121,18		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.01.2.06.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	121.052.000,00	2	19.559.000,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	-	1	9.754.000,00	0	-	1	9.754.000,00	100	65,03	3	29.313.000,00	75,00	24,22		
	1.06.01.2.06.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	Jenis	100	314.999.488,00	91	521.932.515,00															91	521.932.515,00	91,00	165,69		
	1.06.01.2.06.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	28	657.945.000,00	7	27.688.500,00	2	81.971.755,00	0	-	1	5.735.500,00	1	59.272.500,00	0	13.750.000,00	2	78.758.000,00	100	96,08	9	106.446.500,00	32,14	16,18		
	1.06.01.2.06.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis	64	125.994.676,00	51	108.932.000,00															51	108.932.000,00	79,69	86,46		
	1.06.01.2.06.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	16	226.001.000,00	2	42.980.000,00	4	30.000.000,00	0	0,00	0	-	4	29.697.500,00	0	0,00	4	29.697.500,00	100,00	98,99	6	72.677.500,00	37,50	32,16		
	1.06.01.2.06.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan minuman	Jenis	10	393.472.500,00	11	75.304.803,00															11	75.304.803,00	110,00	19,14		
	1.06.01.2.06.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	104.988.690,00	3	59.022.216,00	3	74.320.000,00	0	-	1	8.658.200,00	1	27.331.000,00	1	25.957.000,00	3	61.946.200,00	100,00	83,35	6	120.968.416,00	50,00	115,22		
	1.06.01.2.06.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis	18	31.499.979,00	16	22.751.713,00															16	22.751.713,00	88,89	72,23		
	1.06.01.2.06.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Buku	26	31.499.979,00	28	22.751.712,00															28	22.751.712,00	107,69	72,23		
	1.06.01.2.06.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	242.751.000,00	4	13.291.000,00	3	18.289.650,00	0	-	0	1.000.000,00	1	6.669.950,00	2	8.537.300,00	3	16.207.250,00	100,00	88,61	7	29.498.250,00	58,33	12,15		
	1.06.01.2.06.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eksemplar	4	7.246.000,00	4	4.045.550,00															4	4.045.550,00	100,00	55,83		
	1.06.01.2.06.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan	Buku	70	7.246.000,00	19	4.045.550,00															19	4.045.550,00	27,14	55,83		
	1.06.01.2.06.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	172	23.445.000,00	43	2.170.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0,00	0,00	0,00	43	2.170.000,00	25,00	9,26		
	1.06.01.2.06.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa	Hari	98	69.374.750,00	86	116.401.385,00															86	116.401.385,00	87,76	167,79		
	1.06.01.2.06.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam kota	Hari	20	69.374.750,00	56	116.401.385,00															56	116.401.385,00	280,00	167,79		
	1.06.01.2.06.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	291	1.447.209.000,00	96	205.800.336,00	50	144.316.875,00	0	-	8	21.996.363,00	22	63.592.156,00	20	54.266.360,00	50	139.854.879,00	100,00	96,91	146	345.655.215,00	50,17	23,88		
	1.06.01.2.06.11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	265.000.000,00	0	0,00	1	22.493.465,00	0	-	0	-	0	-	1	21.664.000,00	1	21.664.000,00	100,00	96,31	1	21664000,00	33,33	0,00		
	1.06.01.2.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.448.172.500,00	100	262.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	100	262.800.000,00	100,00	18,15		
	1.06.01.2.07.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4	1.448.172.500,00	1	262.800.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	1	262.800.000,00	25,00	18,15		
	1.06.01.2.08	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3.448.048.602,00	100	1.780.587.504,00	100	796.465.800,00	100	65.236.963,00	100	250.500.958,00	100	190.921.229,00	100	281.612.088,00	100	788.271.238,00	100,00	98,97	100	2.568.858.742,00	100,00	74,50	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.08.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik	Rekening	5	61.998.602,00	5	37.720.761,00															5	37.720.761,00	100,00	60,84		
	1.06.01.2.08.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	5	183.550.000,00	5	29.490.903,00	5	33.091.800,00	5	4.410.263,00	5	6.440.108,00	5	7.687.079,00	5	7.137.888,00	5	25.675.338,00	100,00	77,59	10	55.166.241,00	200,00	30,06		
	1.06.01.2.08.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Orang	40	1.008.000.000,00	46	1.040.160.000,00															46	1.040.160.000,00	115,00	103,19		
	1.06.01.2.08.04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	80	2.194.500.000,00	26	673.215.840,00	29	763.374.000,00	26	60.826.700,00	26	244.060.850,00	26	183.234.150,00	29	274.474.200,00	29	762.595.900,00	100,00	99,90	55	1.435.811.740,00	68,75	65,43		
	1.06.01.2.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	2.191.044.634,00	100	975.106.491,30	100	610.904.000,00	-	-	35	62.436.553,00	50	255.597.560,00	15	79.013.007,00	100	587.212.320,00	100,00	96,12	100	1.562.318.811,30	100,00	71,30	Sekretaris Dinas	
	1.06.01.2.09.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan	Unit	14	184.995.774,00	12	242.913.572,00															12	242.913.572,00	85,71	131,31		
	1.06.01.2.09.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	34	834.128.000,00	13	155.494.413,00	9	146.690.000,00	0	-	3	29.924.653,00	2	25.853.000,00	4	72.598.007,00	9	128.375.660,00	100,00	87,51	22	283.870.073,00	64,71	34,03		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.01.2.09.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara	Jenis	6	59.650.000,00	6	47.885.000,00															6	47.885.000,00	100,00	80,28		
	1.06.01.2.09.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	120	132.561.500,00	37	21.710.000,00	30	20.000.000,00	0	0,00	0	-	20	12.300.000,00	10	6.415.000,00	30	18.715.000,00	100,00	93,58	67	40.425.000,00	55,83	30,50		
	1.06.01.2.09.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung	Unit	1	269.999.780,00	1	242.688.186,30															1	242.688.186,30	100,00	89,88		
	1.06.01.2.09.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	709.709.580,00	1	264.415.320,00	2	444.214.000,00	0	-	0	32.511.900,00	1	217.444.560,00	1	190.165.200,00	2	440.121.660,00	100,00	99,08	3	704.536.980,00	300,00	99,27		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	91,59			85,71	44,89		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
2	01:06:02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yg dibina	Persen	78,32	6.798.672.803,00	69,4	1.995.256.838,67	61,54	974.668.000,00	61,54	11.303.666,67	61,54	757.865.896,67	61,54	73.844.316,67	0	105.026.498,33	61,54	948.040.378,33	100,00	97,27	65	2.943.297.217,00	83,59	43,29		
	01:06:02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persen	97,67	6.798.672.803,00	97,5	1.995.256.838,67	96	974.668.000,00	90	11.303.666,67	3	757.865.896,67	1	73.844.316,67	0	-	94	948.040.378,33	97,92	97,27	96	2.943.297.217,00	98,03	43,29		
	01:06:02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Puskesos yang terbentuk	Persen	21,84	6.798.672.803,00	20,13	1.995.256.838,67	15,17	974.668.000,00	5	11.303.666,67	8	757.865.896,67	1	73.844.316,67	0	-	14	948.040.378,33	92,29	97,27	17	2.943.297.217,00	78,14	43,29		
	1.06.02.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengumpulan sumbangan	Persen	100	152.712.947,50	100	38.337.333,00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	100	21.366.254,00	100,00	13,99	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	1.06.02.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan sumbangan sesuai aturan yang berlaku	Kali	16	152.712.947,50	4	4.395.175,00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	21.366.254,00	0,00	13,99		
	1.06.02.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah	Kali	16	104.999.995,00	2	33.942.158,00															2	33.942.158,00	12,50	32,33		
	1.06.02.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Dokumen	16	200.425.900,00	4	8.790.350,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	4	8.790.350,00	25,00	4,39		
	1.06.02.2.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terbina	Persen	90,96	10.045.296.257,00	83,70	2.971.519.004,00	95,89	1.462.002.000,00	95,89	16.955.500,00	95,89	1.136.798.845,00	95,89	110.766.475,00	95,89	157.539.747,50	95,89	1.422.060.567,50	100,00	97,27	90	4.393.579.571,50	98,72	43,74	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	1.06.02.2.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	Lembaga	13	10.045.296.257,00	13	2.971.519.004,00	13	1.462.002.000,00	13	16.955.500,00	13,00	1.136.798.845,00	13,00	110.766.475,00	13	157.539.747,50	13	1.422.060.567,50	100,00	97,27	26	4.393.579.571,50	200,00	43,74		
	1.06.02.2.03.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota PSM yang terbina	Orang	200	439.999.922,00	180	61.926.776,00															180	61.926.776,00	90,00	14,07		
	1.06.02.2.03.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten Gresik	Orang	160	205.715.000,00	40	19.684.000,00	40	100.000.000,00	0	0,00	40	17.990.000,00	40	26.148.000,00	40	20.870.000,00	40	65.008.000,00	100,00	65,01	80	84.692.000,00	50,00	41,17		
	1.06.02.2.03.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TKSK yang terbina	Orang	18	219.999.760,00	18	150.680.000,00															18	150.680.000,00	100,00	68,49		
	1.06.02.2.03.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten Gresik	Orang	18	392.022.400,00	18	80.098.800,00	18	111.000.000,00	18	9.000.000,00	18	36.000.000,00	18	29.512.450,00	18	36.000.000,00	18	110.512.450,00	100,00	99,56	36	190.611.250,00	200,00	48,62		
	1.06.02.2.03.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang terbina	Orang	165	349.999.975,00	165	1.195.459.331,00															165	1.195.459.331,00	100,00	341,56		
	1.06.02.2.03.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota WKSBM yang terbina	Orang	90	349.999.975,00	90	1.195.459.331,00															90	1.195.459.331,00	100,00	341,56		
	1.06.02.2.03.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten Gresik	Lembaga	13	17.286.879.600,00	13	3.017.931.200,00	13	2.631.504.000,00	13	18.411.000,00	13	2.193.227.690,00	13	144.457.500,00	13	231.240.445,00	13	2.587.336.635,00	100,00	98,32	26	5.605.267.835,00	200,00	32,42		
	1.06.02.2.03.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	150	299.999.882,00	88	143.000.000,00															88	143.000.000,00	58,67	47,67		
	1.06.02.2.03.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	6	545.976.000,00	1	78.798.570,00	1	81.500.000,00	0	6.500.000,00	0	26.380.000,00	0	21.415.000,00	1	26.969.050,00	1	81.264.050,00	100,00	99,71	2	160.062.620,00	33,33	29,32		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	97,27			66,68	38,86		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
3	1.06.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen	63,92	29.454.202.782,50	52,8	10.094.752.853,05	95	3.289.000.000,00	30	34.504.711,50	20	2.529.763.878,50	-	270.018.079,50	45,00	200.388.840,00	95,00	3.034.675.509,50	100,00	92,27	148	13.129.428.362,55	231,23	44,58		
	1.06.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	19,86	29.454.202.782,50	8,68	10.094.752.853,05	23,66	3.289.000.000,00	-	34.504.711,50	15	2.529.763.878,50	5	270.018.079,50	8,00	200.388.840,00	23,00	3.034.675.509,50	97,21	92,27	32	13.129.428.362,55	159,52	44,58		
	1.06.04.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	Persen	1,37	18.012.838.932,67	0,97	15.175.744.034,10	1,38	2.664.274.475,00	-	32.062.250,00	1	2.484.173.305,50	-	128.038.919,67	0,38	20.000.000,00	1,38	2.664.274.475,17	100,00	100,00	2	17.840.018.509,27	171,53	99,04	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	1.06.04.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	Orang	158.402	18.012.838.932,67	38797	2.008.431.601,00	39.461	2.652.212.225,00	-	-	22.588	2.484.173.305,50	153	128.038.919,67	224	40.000.000,00	22965	2.652.212.225,17	58,20	100,00	61762	4.660.643.826,17	38,99	25,87		
	1.06.04.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Nilai Kabupaten Layak Lansia	Nilai	78,5	18.012.838.932,67	77	2.008.431.601,00	78	906.742.463,00	-	-	-	-	-	128.038.919,67	78	271.919.180,00	78	399.958.099,67	100,00	44,11	155	2.408.389.700,67	197,45	13,37		
	1.06.04.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	Orang	37	129.999.790,00	53	295.599.842,10															53	295.599.842,10	143,24	227,38		
	1.06.04.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	206	1.510.000.000,00	28	179.617.572,00	30	174.420.750,00	0	7.388.250,00	0	1.115.000,00	27	147.565.000,00	0	1.150.000,00	27	157.218.250,00	90,00	90,14	55	336.835.822,00	26,70	22,31		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima santunan	Orang	74492	3.109.679.824,80	59766	4.126.719.333,33															59766	4.126.719.333,33	80,23	132,71		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima layanan dukungan Psikosial	Orang	200	3.109.679.824,80	75	4.126.719.333,33															75	4.126.719.333,33	37,50	132,71		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Karang Werda yang dibentuk dan dikembangkan	Orang	4	3.109.679.824,80	0	-															0	-	0,00	-		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Perbup Lansia yang ditetapkan	Perbup	1	3.109.679.824,80	0	-															0	-	0,00	-		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta pembinaan dan Sosilisasi	Orang	440	3.109.679.824,80	100	4.126.719.333,33															100	4.126.719.333,33	22,73	132,71		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1550	11.053.637.300,00	874	796.219.881,00	254	1.175.200.000,00	0	7.872.000,00	19	390.596.440,00	83	209.901.909,00	152	265.176.480,00	254	873.546.829,00	100,00	74,33	1128	1.669.766.710,00	72,77	15,11		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak yatim yang mendapat santunan	Orang	30270	11.053.637.300,00	6628	1.325.600.000,00	4872	974.400.000,00	0	-	4674	934.800.000,00	0	-	0	-	4674	934.800.000,00	95,94	95,94	11302	2.260.400.000,00	37,34	20,45		
	1.06.04.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah janda miskin yang mendapat santunan	Orang	123798	11.053.637.300,00	17775	3.555.000.000,00	18252	3.650.400.000,00	0	-	17799	3.559.800.000,00	0	-	0	-	17799	3.559.800.000,00	97,52	97,52	35574	7.114.800.000,00	28,74	64,37		
	1.06.04.2.01.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan	Orang	75	124.999.420,00	175	156.571.095,00															175	156.571.095,00	233,33	125,26		
	1.06.04.2.01.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	990	996.650.000,00	215	49.950.000,00	67	100.000.000,00	10	9.602.000,00	15	15.467.080,00	25	-	17	43.654.150,00	67	68.723.230,00	100,00	68,72	282	118.673.230,00	28,48	11,91		
	1.06.04.2.01.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak yang terlayani	Anak	240	104.999.864,00	55	107.262.100,00															55	107.262.100,00	22,92	102,15		
	1.06.04.2.01.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	601	402.472.000,00	48	22.266.200,00	28	27.329.413,00	0	-	28	26.602.550,00	0	-	0	-	28	26.602.550,00	100,00	97,34	76	48.868.750,00	12,65	12,14		
	1.06.04.2.01.08	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah peserta	Orang	65	109.999.000,00	85	135.078.032,00															85	135.078.032,00	130,77	122,80		
	1.06.04.2.01.08	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	834.214.000,00	25	53.108.350,00	16	60.000.000,00	0	-	11	14.060.450,00	5	7.909.700,00	0	14.336.550,00	16	36.306.700,00	100,00	60,51	41	89.415.050,00	20,50	10,72		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.04.2.01.12	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan	Orang	60	94.999.800,00	45	92.643.364,00															45	92.643.364,00	75,00	97,52		
	1.06.04.2.01.12	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan	Orang	787	1.020.871.900,00	93	43.532.800,00	100	61.479.000,00	7	7.200.000,00	25	25.905.091,00	13	18.740.150,00	55	7.602.000,00	100	59.447.241,00	100,00	96,70	193	102.980.041,00	24,52	10,09		
	1.06.04.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertanganiı	Persen	0,4	2.434.944.383,50	0,41	896.275.880,00	0,41	177.385.418,50	0,41	18.473.586,50	0,41	45.590.573,00	0,41	77.959.700	0,41	34.429.250,00	0,41	176.453.109,50	100,00	99,47	0,41	1.072.728.989,50	102,50	44,06	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	1.06.04.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	Orang	2745	2.434.944.383,50	235	100.622.590,00	715	177.385.418,50	49	18.473.586,50	171	45.590.573,00	195	77.959.700	300	34.429.250,00	715	176.453.109,50	100,00	99,47	475,00	277.075.699,50	17,30	11,38		
	1.06.04.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	190	234.998.000,00	25	4.767.000,00	45	9.869.000,00	-	-	5	2.418.000,00	15	7.382.100,00	25	-	45	9.800.100,00	100,00	99,30	70	14.567.100,00	36,84	6,20		
	1.06.04.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah layanan yang diberikan	Orang	340	314.999.997,00	206	187.781.750,00															206	187.781.750,00	60,59	59,61		
	1.06.04.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	900	1.117.896.000,00	104	41.692.980,00	200	164.901.837,00	20	19.990.997,00	38	39.422.794,00	100	92.151.300,00	42	12.288.000,00	200	163.853.091,00	100,00	99,36	304	205.546.071,00	33,78	18,39		
	1.06.04.2.02.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan	Orang	330	881.024.960,00	130	433.452.040,00															130	433.452.040,00	39,39	49,20		
	1.06.04.2.02.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	940	1.175.370.000,00	57	63.869.200,00	275	80.000.000,00	0	-	80	24.388.176,00	50	28.653.000,00	145	26.398.500,00	275	79.439.676,00	100,00	99,30	332	143.308.876,00	35,32	12,19		
	1.06.04.2.02.13	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan rujukan	Orang	306	315.599.810,00	120	174.419.500,00															120	174.419.500,00	39,22	55,27		
	1.06.04.2.02.13	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	715	830.000.000,00	81	90.916.000,00	170	100.000.000,00	29	16.956.176,00	48	24.952.176,00	30	27.733.000,00	63	30.172.000,00	170	99.813.352,00	100,00	99,81	251	190.729.352,00	35,10	22,98		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		91,64	88,61			105,56	38,74		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4	1.06.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga terdaftar DTKS yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	68,77	58.125.532.067,00	54,84	19.139.696.175,00	80,06	15.699.863.955,00	15	43.081.175,00	0	1.943.836.000,00	13	956.197.700	32,00	4.194.986.765,33	60,00	9.235.595.023,00	74,94	58,83	57	28.375.291.198,00	83,50	48,82	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.05.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	Persen	100	1.554.925.000,00	100	412.232.120,00	100	125.575.625,00	0	0,00	0	6.701.200,00	0	-	0	-	0	6.701.200,00	0,00	5,34	50	418.933.320,00	50,00	26,94		
	1.06.05.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat hibah	Panti Asuhan	2	40.000.000,00	5	218.695.100,00															5	218.695.100,00	250,00	546,74		
	1.06.05.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	750	438.425.000,00	150	55.485.000,00	150	125.575.625,00	0	0,00	0	6.701.200,00	0	-	0	-	0	6.701.200,00	0,00	5,34	150	62.186.200,00	20,00	155,47		
	1.06.05.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	Panti Asuhan	104	225.000.000,00	52	46.800.000,00															52	46.800.000,00	50,00	20,80		
	1.06.05.2.01.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	695	851.500.000,00	150	91.252.020,00	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	0,00	0,00	150	91.252.020,00	21,58	40,56		
	1.06.05.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementrian Sosial	Persen	97,5	22.787.767.108,00	92,62	13.879.162.055,50	95	5.191.429.443,33	-	43.081.175,00	50	968.567.400,00	-	478.098.850	45	2.097.493.382,67	95,00	3.587.240.807,67	100,00	69,10	94	13.978.178.939,00	96,22	1.641,59		
	1.06.05.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) yang dipadankan dengan data DTKS	Persen	100	19.307.767.691,00	94,99	4.848.301.999,50	100	5.191.429.443,33	-	-	100	968.567.400,00	100	478.098.850	100	2.097.493.382,67	100,00	3.544.159.632,67	100,00	68,27	97	13.978.178.939,00	97,50	61,34		
	1.06.05.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Layanan Publik	Nilai	2,5	14.475.072.268,00	0	-	2	5.191.429.443,33	-	-	-	-	-	-	2	2.097.493.382,67	2	2.097.493.382,67	100,00	40,40	1	-	40,00	-		
	1.06.05.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi bantuan pangan	Kecamatan	18	629.999.910,00	18	221.237.910,00															18	221.237.910,00	100,00	35,12		
	1.06.05.2.02.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	2440000	511.900.000,00	559422	63.150.000,00	580000	124.325.630,00	0	0,00	290000	50.808.500,00	0	3.045.700	4292	9.223.900,00	294292	63.078.100,00	50,74	50,74	853714	126.228.100,00	34,99	20,04		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.05.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin	Persen	95%	1.049.999.707,00	95%	791.690.846,00															95%	791.690.846,00	100,00	75,40		
	1.06.05.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210000	872.193.350,00	45000	85.670.500,00	50000	294.785.000,00	0	-	500	4.880.300,00	100	6.350.000	13455	54.950.450,00	14055	66.180.750,00	28,11	22,45	59055	151.851.250,00	118,11	14,46		
	1.06.05.2.02.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	Orang	340	1.799.999.800,00	340	8.017.931.300,00															340	8.017.931.300,00	100,00	445,44		
	1.06.05.2.02.03	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	13000	51.706.514.300,00	3697	9.547.783.499,00	3200	15.155.177.700,00	0	43.081.175,00	1354	1.881.446.000,00	0	946.802.000,00	2866	6.228.305.798,00	4220	9.099.634.973,00	131,88	60,04	7917	18.647.418.472,00	60,90	1.035,97		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		75,00	45,78			70,93	432,47		
																				Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi		
5	1.06.06	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	Persen	45,61	1.168.976.400,00	50,19	442.253.000,00	23,53	536.953.800,00	10,00	35.294.950,00	2,00	139.060.400,00	1,00	118.075.900,00	11	116.248.700,00	23,53	408.679.950,00	100,00	76,11	100	850.932.950,00	219,25	72,79		
	1.06.06.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	184.998.500,00	100	177.576.250,00															100	177.576.250,00	100,00	95,99	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.06.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial	Persen	100	261.417.500,00	100	45.617.500,00	100	120.000.000,00	10	17.647.475,00	20	10.616.850,00	20	26.109.950,00	50	22.464.350,00	100	76.838.625,00	100,00	64,03	0	122.456.125,00	0,00	46,84		
	1.06.06.2.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	Persen	100	261.417.500,00	100	45.617.500,00	100	120.000.000,00	10	17.647.475,00	20	10.616.850,00	35	26.109.950,00	35	22.464.350,00	100	76.838.625,00	100,00	64,03	0	122.456.125,00	0,00	46,84		
	1.06.06.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Makanan	Jumlah penyediaan Makanan (Dapur Umum) Korban Banjir	Kali	9	104.998.500,00	8	135.098.500,00															8	135.098.500,00	88,89	128,67		
	1.06.06.2.01.01	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5520	225.000.000,00	4	50.000.000,00	1200	175.000.000,00	186	27.064.950,00	0	717.700,00	150	39.819.900,00	2014	23.232.700,00	2350	90.835.250,00	195,83	51,91	2354	140.835.250,00	42,64	62,59		
	1.06.06.2.01.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah pemulangan Orang Terlantar	Orang	100	40.000.000,00	9	21.238.875,00															9	21.238.875,00	9,00	53,10		
	1.06.06.2.01.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah penanganan Mr. X (Mayat tanpa Identitas)	Orang	30	40.000.000,00	7	21.238.875,00															7	21.238.875,00	23,33	53,10		
	1.06.06.2.01.04	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	205	174.500.000,00	31	27.900.000,00	45	35.000.000,00	3	8.230.000,00	15	5.620.000,00	12	12.400.000	0	8.600.000,00	30	34.850.000,00	66,67	99,57	61	62.750.000,00	29,76	35,96		
	1.06.06.2.01.05	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	310	123.335.000,00	68	13.335.000,00	75	30.000.000,00	0	-	33	14.896.000,00	0	-	119	13.096.000,00	152	27.992.000,00	202,67	93,31	220	41.327.000,00	70,97	33,51		
	1.06.06.2.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan Tagana	Persen	100	461.142.900,00	100	173.441.750,00	100	296.953.800,00	-	-	100	117.826.700,00	100	65.856.000	100	71.320.000,00	100	255.002.700,00	100,00	85,87	100	428.444.450,00	100,00	92,91	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.06.06.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberi pembinaan	Orang	60	199.999.900,00	65	137.607.500,00															65	137.607.500,00	108,33	68,80		
	1.06.06.2.02.02	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	148	261.143.000,00	37	35.834.250,00	37	296.953.800,00	0	-	37	117.826.700,00	37	65.856.000,00	37	71.320.000,00	37	255.002.700,00	100,00	85,87	74	290.836.950,00	50,00	111,37		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	71,31			50,00	70,65		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sedang		
6	1.06.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persen	100	2.040.068.583,00	100	537.677.400,00	100	249.999.200,00	25	12.467.558,00	25	56.654.244,00	25	86.999.200	25	25.932.700,00	100	182.053.702,00	100,00	72,82	100	719.731.102,00	100,00	35,28		
	1.06.07.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	Persen	100	240.191.283,00	100	494.700.050,00	100	124.999.600,00	25	6.233.779,00	25	28.327.122,00	25	43.499.600	25	12.966.350,00	100	91.026.851,00	100,00	72,82	100	719.731.102,00	100,00	299,65	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	1.06.07.2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	TMP	11	1.799.877.300,00	11	42.977.350,00	11	124.999.600,00	2	6.233.779,00	2	28.327.122,00	4	43.499.600	3	12.966.350,00	11	91.026.851,00	100,00	72,82	22	134.004.201,00	200,00	7,45		
	1.06.07.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhab	TMP	2	135.191.483,00	2	102.766.600,00															2	102.766.600,00	100,00	76,02		
	1.06.07.2.01.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana TMP Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	4	183.887.500,00	0	-	1	37.387.500,00	0	-	0	4.275.094,00	0	22.659.000,00	1	7.200.000,00	1	34.134.094,00	100,00	91,30	1	34.134.094,00	25,00	18,56		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah legiun veteran, janda veteran dan keluarga pahlawan nasional yang diberi tali asih	Orang	110	26.249.950,00	140	87.239.025,00															140	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan wawasan nilai-nilai kepahlawanan	Orang	300	26.249.950,00	60	87.239.025,00															60	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaga Makam yang mendapat bansos	Orang	1250	26.249.950,00	1034	87.239.025,00															1034	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	TMP	11	26.249.950,00	11	87.239.025,00															11	87.239.025,00	100,00	332,34		
	1.06.07.2.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP Kabupaten/Kota	TMP	11	1.481.567.000,00	11	84.525.700,00	11	208.189.700,00	11	12.467.558,00	11	50.945.150,00	11	62.975.700,00	11	18.732.700,00	11	145.121.108,00	100,00	69,71	22	229.646.808,00	200,00	874,85		
	1.06.07.2.01.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan TMP Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	4	134.422.800,00	1	1.429.000,00	1	4.422.000,00	0	-	0	1.434.000,00	0	1.364.500,00	1	-	1	2.798.500,00	100,00	63,29	2	4.227.500,00	50,00	16,10		
																						100,00	72,82			150,00	153,55		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program											31.769.993.294,00										24.233.411.237,01								
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		97,99	86,67			75,43	48,95		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	DINAS TENAGA KERJA																												
	2.07		DINAS TENAGA KERJA				65.164.682.285		14.249.296.838		11.540.775.900		1.156.530.810		2.199.592.655		2.360.497.538		4.932.832.732		10.649.453.736		92,28		35.033.733.185		53,76		
A.	*2.07.01*		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	32.816.295.285	100	11.045.682.024	100	7.103.820.500	100	1.156.530.810	100	1.873.252.700	100	1.788.009.166	100	2.032.483.724	100	6.850.276.401			100	25.510.526.045			Sekretariat	
i	*2.07.01.2.01.*		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jenis	91	113.300.000	46	50.554.600	6	24.755.000	1	0	1	8.446.000	1	2.693.500	1	5.954.600	6	17.094.100	100,00	69,05	52	67.648.700	57,14	59,71	Sekretariat	
1.	2.07.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	19	65.000.000	10	39.740.600	3	18.950.000	1	0	1	8.446.000	1	1.368.500		2.379.200	3	12.193.700	100,00	64,35	13	51.934.300	68,42	79,90	Sekretariat	
2.	2.07.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	buku	24	15.000.000	24	10.129.000															24	10.129.000	100,00	67,53	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48	33.300.000	12	685.000	3	5.805.000	0	0	0	0	2	1.325.000	1	3.575.400	3	4.900.400	100,00	84,42	15	5.585.400	31,25	16,77	Sekretariat	
ii	*2.07.01.2.02.*		Administrasi Keuangan	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuanaan	bulan	237	22.627.852.000	127	14.453.120.119	39	4.840.006.000	29	1.065.930.810	29	1.514.011.519	37	1.069.282.115	31	1.061.960.132	39	4.711.184.577	100,00	97,34	166	19.164.304.696	70,04	84,69	Sekretariat	
3.	2.07.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	24	6.811.530.000	24	9.365.920.096															24	9.365.920.096	100,00	137,50	Sekretariat	
				Jumlah Pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN	orang	33	15.768.022.000	33	5.074.853.023	29	4.832.006.000	29	1.065.930.810	29	1.513.486.519	29	1.066.075.115	29	1.057.703.932	29	4.703.196.377	100,00	97,33	62	9.778.049.400	187,88	62,01	Sekretariat	
4.	2.07.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	buku	60	15.000.000	60	6.598.000															60	6.598.000	100,00	43,99	Sekretariat	
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	120	33.300.000	10	5.749.000	10	8.000.000	0	0	0	525.000	8	3.207.000	2	4.256.200	10	7.988.200	100,00	99,85	20	13.737.200	16,67	41,25	Sekretariat	
iii	*2.07.01.2.06.*		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	paket	375	3.962.500.000	170	1.029.089.879	125	965.231.327	4	0	11	92.412.418	94	415.053.897	24	390.701.432	133	898.167.747	106,40	93,05	303	1.927.257.626	80,80	48,64	Sekretariat	
5.	2.07.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	18	12.000.000	21	14.554.400															21	14.554.400	116,67	121,29	Sekretariat	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	paket	4	40.600.000	1	16.035.500	1	16.051.000	0	0	0	3.940.000	1	5.767.500	0	6.318.000	1	16.025.500	100,00	99,84	2	32.061.000	50,00	78,97	Sekretariat	
6.	2.07.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	8	485.000.000	8	167.973.523															8	167.973.523	100,00	34,63	Sekretariat	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	16	997.000.000	12	218.359.550	4	700.144.587	0	0	0	41.872.500	10	325.428.600	0	278.474.350	10	645.775.450	250,00	92,23	22	864.135.000	137,50	86,67	Sekretariat	
7.	2.07.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	bulan	12	250.000.000	12	166.148.242															12	166.148.242	100,00	66,46	Sekretariat	
				Jumlah paket penyediaan bahan logistik	paket	172	550.000.000	43	58.451.689	43	93.685.000	2	0	6	23.881.500	30	28.763.000	5	38.810.028	43	91.454.528	100,00	97,62	86	149.906.217	50,00	27,26	Sekretariat	
8.	2.07.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan Jumlah penggandaan	jenis	14	64.600.000	14	51.426.200															14	51.426.200	100,00	79,61	Sekretariat	
				Jumlah paket bahan cetak dan Jumlah penggandaan	paket	8	139.500.000	2	33.196.500	3	38.508.540	0	0	0	2.009.500	1	9.217.800	4	21.490.000	5	32.717.300	166,67	84,96	7	65.913.800	87,50	47,25	Sekretariat	
9.	2.07.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis	16	34.000.000	14	20.397.900															14	20.397.900	87,50	59,99	Sekretariat	
				Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	dokumen	32	75.300.000	7	3.540.000	7	7.500.000	2	0	2	1.475.000	2	885.000	1	1.180.000	7	3.540.000	100,00	47,20	14	7.080.000	43,75	9,40	Sekretariat	
10.	2.07.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	24	250.000.000	24	184.365.435															24	184.365.435	100,00	73,75	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	48	550.000.000	12	94.640.940	66	98.342.200	0	0	3	19.233.918	50	42.501.997	13	36.186.554	66	97.922.469	100,00	99,57	78	192.563.409	162,50	35,01	Sekretariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	514.500.000			1	11.000.000	0	0	0	0	0	2.490.000	1	8.242.500	1	10.732.500	100,00	97,57	1	10.732.500	33,33	2,09	Sekretariat	
v	*2.07.01.2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	188	4.629.700.000	110	2.195.741.830	46	808.428.173	28	90.600.000	28	211.753.613	28	214.171.810	28	256.273.161	46	772.798.584	100,00	95,59	83	2.968.540.414	44,15	64,12	Sekretariat	
11.	2.07.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	24	20.000.000	24	12.658.000															12	12.658.000	50,00	63,29	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	48	47.000.000	9	3.127.200	12	5.000.000	3	0	3	1.055.600	3	971.000	3	601.000	12	2.627.600	100,00	52,55	9	5.754.800	18,75	12,24	Sekretariat	
12.	2.07.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	bulan	24	240.000.000	24	264.271.131															9	264.271.131	37,50	110,11	Sekretariat	
				jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Laporan	48	413.500.000	9	162.755.659	12	172.314.173	3	0	3	60.102.553	3	56.008.410	3	46.548.961	12	162.659.924	100,00	94,40	9	325.415.583	18,75	78,70	Sekretariat	
13.	2.07.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan tenaga administrasi kantor Non ASN	orang	22	1.209.200.000	22	1.167.950.000															22	1.167.950.000	100,00	96,59	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	22	2.700.000.000	22	584.979.840	22	631.114.000	22	90.600.000	22	150.595.460	22	157.192.400	22	209.123.200	22	607.511.060	25,00	96,26	22	1.192.490.900	100,00	44,17	Sekretariat	

Mewujudkan pelayanan administrasi sarana prasarana yang professional dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dataker

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
vi	2.07.01.2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	170	1.482.943.285	95	931.743.216	25	465.400.000	2	0	4	46.629.150	15	86.807.844	4	317.594.399	25	451.031.393	100,00	96,91	120	1.382.774.609	70,59	93,25	Sekretariat	
14.	2.07.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	unit	34	260.000.000	34	213.052.720															34	213.052.720	100,00	81,94	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	68	570.000.000	17	159.647.224	17	143.000.000	2	0	3	37.689.150	10	36.293.744	2	59.210.200	17	133.193.094	100,00	93,14	34	292.840.318	50,00	51,38	Sekretariat	
15.	2.07.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	jenis	12	80.000.000	12	67.456.650															12	67.456.650	100,00	84,32	Sekretariat	
				Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	24	202.450.000	6	33.671.200	6	40.050.000	0	0	1	4.940.000	4	13.915.000	1	20.579.250	6	39.434.250	100,00	98,46	12	73.105.450	50,00	36,11	Sekretariat	
16.	2.07.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	bulan	24	260.000.000	24	263.739.032															24	263.739.032	100,00	101,44	Sekretariat	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	8	110.493.285	2	194.176.390	2	282.350.000	0	0	0	4.000.000	1	36.599.100	1	237.804.949	2	278.404.049	100,00	98,60	4	472.580.439	50,00	427,70	Sekretariat	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											101,28	90,39			64,54	58,40		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
B.	2.07.02	Meningkatnya tata kelola penyelenggaran penempatan kerja dan perhasan kerjasama multipihak didukung memperkuat kerjasama multipihak	*PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA*	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik dan Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	%	100%	589.699.000	40%	163.573.075	40%	79.438.800	70%	0	0%	2.168.750	0%	22.203.900	40%	30.323.144	40%	54.695.794			55%	263.983.162			IPK	
vii	2.07.02.2.01		*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	dokumen	6	589.699.000	2	163.573.075	1	79.438.800	0	0	0	2.168.750	0	22.203.900	1	30.323.144	1	54.695.794	100	68,85	4	263.983.162	66,67	44,77	IPK	
17.	2.07.02.2.01.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah aplikasi ketenaagakerjaan	aplikasi	2	178.838.000	2	163.573.075															2	163.573.075	100,00	91,46	IPK	
				Jumlah buku profil ketenagakerjaan	buku	30		30																30					
				Jumlah aplikasi ketenagakerjaan dan Jumlah buku profil ketenagakerjaan	dokumen	4	410.861.000	1	45.714.293	1	79.438.800	0	0	0	2.168.750	0	22.203.900	1	30.323.144	1	54.695.794	100,00	68,85	2	100.410.087	50,00	24,44	IPK	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											100,00	68,85			50,00	24,44		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
C.	2.07.03	Meningkatnya tata kelola penyelenggaran penempatan kerja dan perhasan kerjasama multipihak didukung memperkuat kerjasama multipihak	*PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA*	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	%	38,41	7.419.028.000	36,91%	1.586.936.115	37,28%	2.800.000.100	38,03%	0	0,00%	182.741.250	0,00%	95.111.877	37,32%	2.190.440.150	37,28%	2.468.293.277			37,65%	6.104.577.302			LATTAS	
viii	2.07.03.2.01		*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS*	orang	1.010	6.969.028.000	240	1.389.747.190	232	2.730.000.000	0	0	40	177.230.250	136	95.111.877	216	2.170.197.250	392	2.442.539.377	168,97	89,47	812	5.861.335.577	80,40	84,11	LATTAS	
18.	2.07.03.2.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta	orang	200	2.059.179.000	180	1.389.747.190															180	1.389.747.190	90,00	67,49	LATTAS	
				Jumlah Peserta Pembinaan LPKS	orang	60		60																60					
				Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	orang	750	4.909.849.000	180	2.029.049.010	232	2.730.000.000	0	0	40	177.230.250	136	95.111.877	216	2.170.197.250	392	2.442.539.377	168,97	89,47	572	4.471.588.387	76,27	91,07	LATTAS	
ix	2.07.03.2.04		*Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	perusahaan	675	450.000.000	125	197.188.925	100	70.000.100	0	0	0	5.511.000	0	0	52	20.242.900	52	25.753.900	52,00	36,79	252	243.241.725	37,33	54,05	LATTAS	
19.	2.07.03.2.04.01		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi Produktivitas	perusahaan	205	110.000.000	125	197.188.925															125	197.188.925	60,98	179,26	LATTAS	
				Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	perusahaan	470	340.000.000	75	20.298.900	100	70.000.100	0	0	0	5.511.000	0	0	52	20.242.900	52	25.753.900	52,00	36,79	127	46.052.800	27,02	13,54	LATTAS	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											110,48	63,13			51,64	52,31		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Rendah		
D.	2.07.04	Meningkatnya tata kelola penyelenggaran penempatan kerja dan perhasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	*PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA*	Persentase Pencari Kerja yang ditemnatkan	%	56,65%	2.698.345.000	46,61%	518.765.074	48,94%	757.516.500	53,96%	0	0,00%	110.675.465	0,00%	204.889.100	46,10%	267.374.120	48,94%	582.938.685			51,39%	1.470.908.759			PENTA	
x	2.07.04.2.01		*Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pelayanan antar kerja	orang	1.925	1.721.345.000	566	199.086.166	320	408.355.125	25	0	50	83.819.890	60	137.255.500	302	65.474.020	437	286.549.410	136,56	70,17	626	733.746.076	68,85	51,13	PENTA	
20.	2.07.04.2.01.02		Pelayanan antar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	orang	530	190.000.000	530	150.618.166															530	150.618.166	100,00	79,27	PENTA	
				Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	1.180	475.000.000	285	223.680.500	285	312.550.005	25	0	50	83.819.890	60	132.496.500	241	25.136.570	376	241.452.960	131,93	77,25	661	465.133.460	56,02	97,92	PENTA	
21.	2.07.04.2.01.05		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri	orang	65	260.499.000	36	48.468.000															36	48.468.000	55,38	18,61	PENTA	
				Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	150	795.846.000	35	24.430.000	35	95.805.120	0	0	0	0	0	4.759.000	61	40.337.450	61	45.096.450	174,29	47,07	96	69.526.450	64,00	8,74	PENTA	
xi	2.07.04.2.03		*Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	Jumlah pendaftar AK 1	orang	1.630	407.000.000	130	113.794.550	1.500	135.956.375	250	0	300	23.936.075	3.724	11.186.000	3.223	96.630.100	7.497	131.752.175	499,80	96,91	9.127	298.942.725	559,94	73,45	IPK	
22.	2.07.04.2.03.02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	buku	130	125.000.000	130	113.794.550															130	113.794.550	100,00	91,04	IPK	
				Terlaksananya Job Fair	paket	2		2																2		100,00		IPK	
				Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	1.500	282.000.000	1.500	53.396.000	1.500	135.956.375	250	0	300	23.936.075	3.724	11.186.000	3.223	96.630.100	7.497	131.752.175	499,80	96,91	8.997	185.148.175	599,80	65,66	IPK	
xii	2.07.04.2.04		*Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	orang	675	570.000.000	185	205.884.358	110	213.205.000	0	0	0	2.919.500	80	56.447.600	92	105.270.000	172	164.637.100	156,36	77,22	467	438.219.958	69,19	76,88	PENTA	
23.	2.07.04.2.04.01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	orang	205	160.000.000	185	205.884.358															185	205.884.358	90,24	128,68	PENTA	
				Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetisinya	orang	470	410.000.000	110	67.698.500	110	213.205.000	0	0	0	2.919.500	80	56.447.600	92	105.270.000	172	164.637.100	156,36	77,22	282	232.335.600	60,00	56,67	PENTA	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											264,24	81,43			232,66	67,16		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
E.	2.07.05	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	*PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL*	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	24,06%	21.641.315.000	23,13%	934.340.550	23,36%	800.000.000	23,83%	0	22,11%	30.754.490	25,20%	250.283.495	28,86%	412.211.594	23,83%	693.249.579			23,59%	1.683.737.917			HI	
xiii	2.07.05.2.01		*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	Laporan	58	17.551.315.000	11	525.222.700	1	329.673.570	0	0	0	0	0	51.995.295	1	229.303.094	1	281.298.389	100,00	85,33	12	806.521.089	20,69	4,60	HI	
24.	2.07.05.2.01.03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja	orang	800	5.753.099.000	495	339.841.200															495	339.841.200	61,88	5,91	HI	
				Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah	orang	105		105																105		100,00		HI	
				Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	Laporan	10		10																10		100,00		HI	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Laporan	48	11.798.216.000	1	185.381.500	1	329.673.570	0	0	0	0	0	51.995.295	1	229.303.094	1	281.298.389	100,00	85,33	2	466.679.889	4,17	3,96	HI	
xiv	2.07.05.2.02		*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	kasus	555	4.090.000.000	311	594.499.350	121	470.326.430	18	0	16	30.754.490	83	198.288.200	36	182.908.500	153	411.951.190	126	87,59	1.118	877.216.828	104,48	71,79	HI	
25.	2.07.05.2.02.01		Pencegahan Perselisihan	Jumlah peserta pembinaan	orang	605	650.000.000	654	360.780.850															654	360.780.850	108,10	55,50	HI	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV													
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		Meningkatnya	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	perkara	105	370.000.000	66	194.492.038	66	411.417.000	10	0	9	21.407.490	35	172.126.000	20	164.352.000	74	357.885.490	112,12	86,99	140	552.377.528	133,33	149,29	HI	
26.	2.07.05.2.02.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	perkara	450	3.070.000.000	245	270.773.600	55	58.909.430	8	0	7	9.347.000,0	48	26.162.200	16	18.556.500	79	54.065.700	143,64	91,78	324	324.839.300	72,00	10,58	HI	
											Rata - rata capaian kinerja (%)											113,22	86,46			62,58	38,19		
											Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							11.540.775.900		1.156.530.810		2.199.592.655		2.360.497.538		4.932.832.732		10.649.453.736								
																	Total rata - rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program selanjutnya)					137,85	92,28			92,29	53,76		
																					Predikat Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d Program selanjutnya)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																														
I	2.11.01	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi dan Perkantoran Urusan LH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Program Urusan LH		100	Rp 69.767.913.000	100	Rp 40.565.792.319	100	Rp 15.071.883.323	100	Rp 2.795.109.426	100	Rp 4.242.496.362	100	Rp 3.516.555.018	100	Rp 4.084.843.046	100	Rp 14.648.692.050	100,0	97,19	100	Rp 55.214.484.369	100	79,14	Bid sekretariat	
	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen	jenis	11	Rp 90.000.000	11	Rp 150.732.380															11	Rp 150.732.380	100	167,48		
				Jumlah laporan dokumen	dokumen	28	445.000.000	7	Rp 74.507.620	7	Rp 175.002.473	2	Rp -	3	Rp 24.894.000	2	Rp 103.907.560	2	Rp 27.039.350	7	Rp 155.840.910	100,0	89,05	14	Rp 230.348.530	50	51,76		
			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen	jenis	5	Rp 45.000.000	5	Rp 120.324.180	0		0													5	Rp 120.324.180	100	267,39		
	2,11,01,2,01,01			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	12	190.000.000	3	Rp 19.865.800	3	Rp 50.002.973	0	Rp -	1	Rp 13.093.000	1	Rp 8.828.000	1	Rp 15.396.350	3	Rp 37.317.350	100,0	74,63	6	Rp 57.183.150	50	30,10		
			KOORDINASI & PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN	jumlah dokumen	jenis	6	45.000.000	6	Rp 30.408.200															6	Rp 30.408.200	100	67,57		
	2,11,01,2,01,06			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	16	255.000.000	4	Rp 54.641.820	4	Rp 124.999.500	0	Rp -	2	Rp 11.801.000	1	Rp 95.079.560	1	Rp 11.643.000	4	Rp 118.523.560	100	94,82	8	Rp 173.165.380	50	67,91		
	2,11,01,2,.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	73	44.960.140.600	73	Rp 25.504.943.936	73	Rp 9.135.965.489	73	Rp 2.019.268.788	73	Rp 2.889.290.423	73	Rp 2.018.475.379	72	Rp 1.987.453.157	73	Rp 8.914.487.747	100	97,58	73	Rp 34.419.431.683	100	76,56		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	74	44.960.140.600	73	Rp 25.504.943.936	73	Rp 9.135.965.489	73	Rp 2.019.268.788	73	Rp 2.889.290.423	73	Rp 2.018.475.379	72	Rp 1.987.453.157	72	Rp 8.914.487.747	100	97,58	73	Rp 34.419.431.683	99	76,56		
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah fasilitas perkantor yang terpenuhi	paket	5	730.000.000	5	Rp 977.432.982															5	Rp 977.432.982	100	133,89		
	2.11.01.2.06.			Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan internal PD yang terlayani	jenis	5	1.880.786.700	5	Rp 272.075.186	4	Rp 643.851.262	0	Rp -	4	Rp 95.191.618	4	Rp 150.837.755	4	Rp 264.880.003	4	Rp 510.909.376	100	79,35	9	Rp 782.984.562	180	41,63		
			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah alat	Jenis	90	220.000.000	90	Rp 366.599.576															90	Rp 366.599.576	100	166,64		
	2.11.01.2.06.02.			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	595.786.700		Rp 116.429.735	14	Rp 261.971.567	0	Rp -	5	Rp 39.216.618	8	Rp 60.896.473	6	Rp 158.243.925	19	Rp 258.357.016	135,71	98,62	12	Rp 374.786.751	60	62,91		
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Barang Cetakan	jenis	14	30.000.000	14	Rp 39.078.638															14	Rp 39.078.638	100	130,26		
	2.11.01.2.06.05.			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	6	95.000.000	3	Rp 15.516.860	1	Rp 19.941.849	0	Rp -	1	Rp 8.596.000	1	Rp 8.814.516	1	Rp 2.530.000	1	Rp 19.940.516	100	99,99	4	Rp 35.457.376	67	37,32		
			PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan	jenis	11	20.000.000	11	Rp 18.371.000															11	Rp 18.371.000	100	91,86		
	2.11.01.2.06.06.			Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Undang-Undang yang disediakan	dokumen	17	Rp 60.000.000	10	Rp 6.254.000	1825	Rp 7.391.250	152	Rp -	450	Rp 1.642.500	93	2.463.750	93	Rp 2.463.750	788	Rp 6.570.000	43,18	88,89	798	Rp 12.824.000	4694	21,37		
			PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Manmin dann Perdin	paket	5	Rp 460.000.000	12	Rp 553.383.768															12	Rp 553.383.768	240	120,30		
				Jumlah Jenis Manmin dan Perdin	jenis	22																							
	2.11.01.2.06.09.			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	laporan	13	Rp 830.000.000	7	Rp 133.874.591	11	Rp 354.546.596	0	Rp -	5	Rp 45.736.500	3	78.663.016,00	8	Rp 101.642.328	16	Rp 226.041.844	145,45	63,76	23	Rp 359.916.435	177	43,36		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik konsultasi SKPD	Dokumen	1	300.000.000																	0	Rp -	0	0,00		
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah rekening	rekening	3	6.491.875.000	3	Rp 8.134.536.005															3	Rp 8.134.536.005	100	125,30		
				Jumlah rekening	paket	7		7																7		100			
	2.11.01.2.08.			Jumlah prosentase Jasa yang dimanfaatkan	persentase	100	12.852.148.200	100	Rp 4.231.712.244	100	Rp 4.584.109.500	100	Rp 762.697.838	100	Rp 1.133.866.182	100	Rp 1.184.016.459	100	Rp 1.638.717.305	100	Rp 4.538.375.287	100	99,00	200	Rp 8.770.087.531	200	68,24		
			PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah rekening	rekening	3	270.000.000	7	Rp 217.746.005															7	Rp 217.746.005	233	80,65		
	2.11.01.2.08.02.			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang disediakan	laporan	3	783.616.100	7	Rp 111.697.764	48	Rp 130.741.500	12	Rp 21.762.785	12	Rp 36.125.588	12	35.191.324	12	Rp 33.831.516	48	Rp 126.911.213	100	97,07	55	Rp 238.608.977	1833	30,45		
			PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Petugas	paket	7	6.221.875.000	15	Rp 7.916.790.000															15	Rp 7.916.790.000	214	127,24		
	2.11.01.2.08.04.			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	4	12.068.532.100	4	Rp 4.120.014.480	84	Rp 4.453.368.000	84	Rp 740.935.053	84	Rp 1.097.740.594	84	Rp 1.100.186.320	84	Rp 1.472.602.107	84	Rp 4.411.464.074	100	99,06	99	Rp 8.531.478.554	2475	70,69		
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah aset terpelihara	paket	13	310.000.000	13	Rp 914.812.408															13	Rp 914.812.408	100	295,10		
					lokasi	2		2																2					
	2.11.01.2.09.			Jumlah aset terpelihara	jenis	381	2.007.962.500		Rp 305.039.558	3	Rp 532.954.599	3	Rp 13.142.800	3	Rp 99.254.139	3	Rp 59.317.865	3	Rp 166.753.231	12	Rp 529.078.730	400	99,27	12	Rp 834.118.288	3	41,54		
			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan	paket	7	170.000.000	125	Rp 325.049.422															125	Rp 325.049.422	1786	191,21		
	2.11.01.2.09.02.			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	240	685.000.000		Rp 238.007.118	127	Rp 273.750.795	7	Rp 13.142.800	22	Rp 76.466.981	20	48.638.815	39	Rp 132.283.682	88	Rp 270.532.278	69,29	98,82	88	Rp 508.539.396	37	74,24		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan	paket	6	140.000.000	70	Rp 105.108.000															70	Rp 105.108.000	1167	75,08		
	2.11.01.2.09.06.			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	140	372.962.500		Rp 67.032.440	81	Rp 59.213.746	0	Rp -	27	Rp 13.931.578	19	Rp 10.679.050	24	Rp 34.469.549	70	Rp 59.080.177	86,42	99,77	70	Rp 126.112.617	50	33,81		
	2.11.01.2.09.09.		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	lokasi	1	950.000.000	1	Rp 484.654.986	3	Rp 199.990.058	0	Rp -	0	Rp 8.855.580	3	Rp 190.610.695	0	Rp -	3	Rp 199.466.275	100	99,74	4	Rp 684.121.261	400	72,01		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				160,00	92,85	70	Rp11.042.896.874	207	200,30		
							-														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
II	2.11.03	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Air	persentase	65	9.159.601.000	50	Rp 3.232.452.052	55	Rp 1.617.363.735	28,55	Rp 2.500.000	28,55	Rp 479.918.132	28,55	Rp 424.748.273	28,551336	Rp 549.064.415	28,55	Rp 1.456.230.820	51,91	90,04	79	Rp 4.688.682.872	121	51,19	Bid. PPKLH, Tata Lingkungan, UPT LAB	
	-			Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Udara	persentase																								
			PENCEGAHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK	Jumlah Uji	sampel	67	1.999.910.000	67	Rp 2.012.164.227															67	Rp 2.012.164.227	100	100,61		
				Jumlah Kajian	paket	9		3																3					
				Jumlah alat	alat	13		13																13					
				Jumlah bahan kimia	paket	6		6																6					
	2.11.03.2.01			Jumlah lokasi yang taat terhadap standart baku mutu	lokasi	1000	7.159.691.000		Rp 1.014.570.177	700	Rp 1.617.363.735	200	Rp 2.500.000	200	Rp 479.918.132	200	Rp 424.748.273	100	Rp 549.064.415	700	Rp 1.456.230.820	100	90,04	767	Rp 2.470.800.997	77	34,51		
			KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT	Jumlah uji	lokasi	67	294.106.337	69	Rp 279.316.000															69	Rp 279.316.000	103	94,97		
	2.11.03.2.01.01			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	200	1.450.466.000	37	Rp 81.262.200	40	Rp 129.999.735	12	Rp -	14	Rp 6.387.000	16	52.862.632	10	Rp 70.677.930	52	Rp 129.927.562	1,30	99,94	89	Rp 211.189.762	45	14,56		
			KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	jumlah kajian	paket	3	212.056.900	3	Rp 236.841.320															3	Rp 236.841.320	100	111,69		
				Jumlah peserta	orang	125		125																125		100			
	2.11.03.2.01.02.			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	215	1.190.000.000		Rp 91.551.643	11	Rp 284.964.000	3	Rp -	0	Rp 18.389.000	5	Rp 35.817.636	5	Rp 82.135.848	13	Rp 136.342.484	118	47,85	13	Rp 252.772.219	6	21,24		
			PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah alat	alat	13	1.283.746.763	13	Rp 1.496.006.907															13	Rp 1.496.006.907	100	116,53		
				Jumlah bahan kimia	paket	6		6																6		100			
				jumlah peserta serttifikasi & kalibrasi	orang	10		10																10		100			
	2.11.03.2.01.03			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	3370	4.519.225.000	6	Rp 841.756.334	800	Rp 1.202.400.000	263	Rp 2.500.000	256	Rp 455.142.132	270	336.068.005	280	Rp 396.250.637	1069	Rp 1.189.960.774	133,63	98,97	1075	Rp 2.031.717.108	32	44,96		
	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah Unit Bangunan	Unit	1	210.000.000	1	Rp 205.717.648	0	Rp -	0	Rp -	0		0				0	Rp -	0	0,00	1	Rp 205.717.648	100	97,96		
	2.11.03.2.03.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR	Jumlah Unit Bangunan	paket	2	210.000.000	1	Rp 205.717.648	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	0,00	1	Rp 205.717.648	50	97,96		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				50,00	45,02	429	Rp 2.344.341.436	138	116,54		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
III	2.11.04	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan Luas RTH	persentase	3	43.101.288.000	2	Rp 17.899.929.757	2	Rp 7.359.973.677	2	Rp 711.653.372	2	Rp 1.240.463.261	2	Rp 1.257.709.578	2	Rp 2.199.687.956	2	Rp 5.409.514.167	100,00	73,50	4,48	Rp 23.309.443.924	149	54,08	Bidang Pertamanan dan Dekorasi	
			PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Luas Penambahan RTH	lokasi	4	10.024.087.000	129	Rp 12.494.089.429															2	Rp 12.494.089.429	62	124,64		
	2.11.04.2.01			Luas RTH yang terkelola	Ha.	148,9	33.077.201.000		Rp 5.405.840.328	135,9	Rp 7.359.973.677	135,9	Rp 711.653.372	135,9	Rp 1.240.463.261	135,9	Rp 1.257.709.578	135,9	Rp 2.199.687.956	135,9	Rp 5.409.514.167	100	73,50	129,48	Rp 10.815.354.495	87	32,70		
			PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah Petugas RTH	petugas	196	8.580.487.000	196	Rp 9.234.296.162															196	Rp 9.234.296.162	100	107,62		
				Jumlah lokasi terkelola	lokasi	98		98																98					
	2.11.04.2.01.04			Jumlah RT yang dikelola lingkup kewenangan Kab/Kota	Ha.	148,9	27.302.703.323	129,48	Rp 5.090.418.361	135,9	Rp 5.551.973.677	135,9	Rp 711.653.372	135,9	Rp 1.187.714.761	135,9	1.109.122.168	135,9	Rp 1.875.123.746	135,9	Rp 4.883.614.047	104,9583	87,96	129,48	Rp 9.974.032.408	87	36,53		
			PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA	Jumlah Lokasi RTH/ Taman	lokasi	5	743.600.000	5	Rp 1.297.069.007															5	Rp 1.297.069.007	100	174,43		
	2.11.04.2.01.05			Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha.	1554,05	355.840.677	1554,05	Rp 281.160.277															1554,05	Rp 281.160.277	100	79,01		
				Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	350	6.474.753.000			298	Rp 1.308.000.000	298	Rp -	298	Rp 28.078.500	298	Rp 78.281.060	298	Rp 226.789.210	298	Rp 333.148.770	100,00	25,47	1852,05	Rp 614.309.047	529	9,49		
			PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah Lokasi KEHATI	lokasi	5	700.000.000	6	Rp 1.962.724.260																6	Rp 1.962.724.260	120	280,39		
	2.11.04.2.01.07			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	103	5.418.657.000		Rp 34.261.690	73	Rp 500.000.000	73	Rp -	75	Rp 24.670.000	75	Rp 70.306.350	75	Rp 97.775.000	73	Rp 192.751.350	100	38,55	73	Rp 227.013.040	71	4,19		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	73,50	129	Rp 10.815.354.495	87	32,70		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		
IV	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	persentase	60	2.163.302.000	40	Rp 896.968.150	50	Rp 199.999.830	31,25	Rp -	25,00	Rp 60.941.000	25,00	Rp 43.551.317	25,0	Rp 45.315.173	26,56	Rp 149.807.490	53,13	74,90	67	Rp 1.046.775.640	111	48,39	Bidang PPKLH	
	2.11.05.2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang memiliki izin Limbah B3	Pelaku	350	2.163.302.000	199	Rp 896.968.150	80	Rp 199.999.830	25	Rp -	20	Rp 60.941.000	20	Rp 43.551.317	20	Rp 45.315.173	80,00	Rp 149.807.490	100,00	74,90	279	Rp 1.046.775.640	80	48,39		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV													
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
			FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah usaha yang terawasi	pelaku	160	735.317.000	199	Rp 783.229.050																199	Rp 783.229.050	124	106,52		
	2.11.05.2.01.01.			Jumlah Fasilitasi persetujuan izin/pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terntegrasi secara elektronik	Dokumen	350	1.427.985.000	285	Rp 113.739.100	85	Rp 199.999.830	25	Rp -	20	Rp 60.941.000	20	43.551.317	20	Rp 45.315.173	85	Rp 149.807.490	100,00	74,90	284	Rp 263.546.590	81	18,46		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	74,90	279	Rp 1.046.775.640	80	48,39		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tingg	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah		
V	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	prosentase	65	1.518.110.000	50	Rp 631.928.335	55	Rp 261.035.530	36,36	Rp -	40,91	Rp 15.927.175	41,82	Rp 80.502.100	21,82	Rp 123.645.992	35,23	Rp 220.075.267	64,05	84,31	85	Rp 852.003.602	77	56,12	Bid. PPKLH dan Tata Lingkungan	
			PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP USAHA & KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan	pelaku	480	474.519.000	345	Rp 461.605.183																				
	2.11.06.2.01						1.043.591.000		Rp 170.323.152	110	Rp 261.035.530	40	Rp -	45	Rp 15.927.175	46	Rp 80.502.100	24	Rp 123.645.992	155	Rp 220.075.267	140,91	84,31	500	Rp 681.680.450	104	65,32		
			FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH	Jumlah Usaha yang berijin LH	dokumen	200	197.405.000	200	Rp 184.469.115															200	Rp 184.469.115	100	93,45		
	2.11.06.2.01.01			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan SLO yang diberikan	dokumen	260	907.151.000		Rp 70.711.362	50	Rp 125.000.000	20	Rp -	7	Rp 7.919.175	16	41.792.677	9	Rp 51.329.135	52	Rp 101.040.987	104	80,83	52	Rp 171.752.349	20	18,93		
			PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah usaha yang terawasi	pelaku usaha	101	Rp 277.114.000	145	Rp 277.136.068															145	Rp 277.136.068	144	100,01		
	2.11.06.2.01.03			Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, SLO oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	dokumen	85	136.440.000	44	Rp 99.611.790	0			Rp -											44	Rp 99.611.790	51,764706	73,00776165		
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan usaha	280	770.509.000			60	Rp 136.035.530	20	Rp -	38	Rp 8.008.000	30	Rp 38.709.423	15	Rp 72.316.857	103	Rp 119.034.280	171,67	87,50	147	Rp 218.646.070	173	160,25		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				140,91	84,31	500	Rp 681.680.450	104	65,32		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
VI	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase	60	3.577.274.000	30	Rp 709.753.977	50	Rp 296.000.000	23,33	Rp -	23,33	Rp 72.652.000	23,33	Rp 35.184.600	30,00	Rp 159.378.122	25,00	Rp 267.214.722	50,00	90,28	55	Rp 976.968.699	175	27,31	Bid. Tata Lingkungan	
	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Prosentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase	60	3.577.274.000	30	Rp 709.753.977	150	Rp 296.000.000	35	Rp -	35	Rp 72.652.000	35	Rp 35.184.600	45	Rp 159.378.122	150,00	Rp 267.214.722	100,00	90,28	180	Rp 976.968.699	300	27,31		
			PENINGKATAN KAPASITAS & KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah kelompok yang terbina	lembaga	400	704.937.000	400	Rp 593.512.743															400	Rp 593.512.743	100	84,19		
	2.11.08.2.01.01			Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	180	2.872.337.000	400	Rp 116.241.234	150	Rp 296.000.000	35	Rp -	35	Rp 72.652.000	35	35.184.600,00	45	Rp 159.378.122	150	Rp 267.214.722	100,00	90,28	550	Rp 383.455.956	306	13,35		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				100,00	90,28	180	Rp 976.968.699	300	27,31		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
VII	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	persentase	60	559.348.000	30	Rp 112.055.882	50	Rp 37.999.975	24,00	Rp -	10,00	Rp 6.189.650	50,0	Rp 11.063.500	130,00	Rp 20.744.425	53,50	Rp 37.997.575	1,07	99,99	84	Rp 150.053.457	139	26,83	Bid. PPKLH	
	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH) KAB/KOTA	Jumlah aduan lingkungan hidup yang tertanagani / jumlah aduan lingkungan yang ada	Dokumen	60	559.348.000	30	Rp 112.055.882	25	Rp 37.999.975	12	Rp -	5	Rp 6.189.650	12	Rp 11.063.500	13	Rp 20.744.425	42	Rp 37.997.575	168	99,99	72	Rp 150.053.457	120	26,83		
				Jumlah Aduan	kasus	40	78.699.000	45	Rp 83.852.882															45	Rp 83.852.882	113	106,55		
	2.11.10.2.01.01		PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yg Ditindaklanjuti	Pengaduan	110	480.649.000		Rp 28.203.000	25	Rp 37.999.975	12	Rp -	5	Rp 6.189.650	12	Rp 11.063.500	13	Rp 20.744.425	42	Rp 37.997.575	168	99,99	42	Rp 66.200.575	38	13,77		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				168	99,99	42	Rp 66.200.575	38	13,77		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VIII	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	persentase	58	85.997.677.100	68	Rp 60.184.304.251	55	Rp 24.232.479.224	77,20	Rp 2.286.131.751	77,20	Rp 2.635.209.984	77,20	Rp 3.798.593.893	77,70	Rp 4.778.711.924	77,70	Rp 19.723.037.106	141,27	81,39	67,76	Rp 79.907.341.357	117	92,92	Bid. Kebersihan	
				Persentase Pengurangan Sampah	persentase	12		11		11		15,50		15,50		15,50		15,90		15,90		144,5455		11		92			
				Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	unit	410		231		390		231		231		231		224		224		57,44		330		80			
				Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	unit	170		125		156		125		125		125		125		125		80,13		125		74			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV													
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah TPA/TPST yanh berbangun dan terkelolaa	lokasi	3		3		3		3		3		3		3		3		100,00		3		100			
	2.11.11.2.01	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah lokasi yang tertangani	kecamatan	100	85.997.677.100	18	Rp 60.184.304.251	18	Rp 24.232.479.224	18	Rp 2.286.131.751	18	Rp 2.635.209.984	18	Rp 3.798.593.893		Rp 4.778.711.924	18	Rp 19.723.037.106	100	81,39	18	Rp 79.907.341.357	18	92,92		
				jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah	kelompok	19		19		19		19		19		19		19		19		100		19		100			
				Jumlah sarpras yang layak	unit	15		15		15		15		15		15		15		15		100		15		100			
			PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (KEBERSIHAN)	Jumlah petugas	petugas	205	11.793.228.687	205	Rp 13.500.048.082															205	Rp 13.500.048.082	100	114,47		
	2.11.11.2.01.03			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabunaten/Kota	ton/hari	210	8.413.037.500	205	Rp 6.769.684.267															205	Rp 6.769.684.267	98	80,47		
			Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	158	21.888.526.600			127	Rp 7.568.426.624	127	Rp 1.321.230.582	127	1.882.641.811,00	127	1.673.042.311	127	Rp 2.474.608.201	127	Rp 7.351.522.905	100	97,13	127	Rp 7.351.522.905	80	33,59		
	2.11.11.2.01.03		PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (UPT TPA)	Lokasi TPA	lokasi	1	7.094.680.000	1	Rp 8.419.913.386															1	Rp 8.419.913.386	100	118,68		
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabunaten/Kota	ton/hari	210	3.474.730.000	210	Rp 7.611.041.331	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -								
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	ton/hari	210	13.893.500.000			206	Rp 7.800.000.000	210	Rp 672.544.924	210	776.930.689	210	3.526.376.172	210	Rp 1.921.082.693	210	Rp 6.896.934.478	101,9417	88,42	210	Rp 6.896.934.478	100	49,64		
			PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Bank Sampah	unit	301	392.282.313	14	Rp 490.402.460															14	Rp 490.402.460	5	125,01		
	2.11.11.2.01.04			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	30	2.992.658.500	27	Rp 196.459.452	9	Rp 237.220.750	0	Rp 5.000.000	3	Rp 56.326.631	3	51.995.015	3	Rp 103.036.591	9	Rp 216.358.237	100	91,21	36	Rp 412.817.689	120	13,79		
			KOORDINASI & SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sarpras	unit	51	3.141.095.000	34	Rp 4.872.695.490															34	Rp 4.872.695.490	67	155,13		
	2.11.11.2.01.05			Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Persampahan	Dokumen	3	Rp 3.704.965.000		Rp 18.324.059.783	1	Rp 287.356.245	1	Rp 287.356.245	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 287.356.245	100,00	100,00	1	Rp 18.611.416.028	33	502,34		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15	9.208.973.500			15	Rp 8.339.475.605	15	Rp -	15	Rp 696.241.542	0	Rp 2.073.556.567	5	Rp 2.201.067.132	20	Rp 4.970.865.241	100,00	59,61	20	Rp 4.970.865.241	133	53,98		
																		Rata - rata capaian kinerja (%)				200,00	81,39	37	Rp 79.907.341.357	118	92,92		
																		Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							-	Rp 49.076.735.294		Rp 5.795.394.549		Rp 8.753.797.564		Rp 9.167.908.279		Rp 11.961.391.053	85,40	Rp 41.912.569.197				Rp	0			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						105,44	86,45	126	Rp166.145.753.920	154	54,50		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																												
	2		*Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*																										
	2.12		*Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*																										
1	2.12.01		*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase ketercapaian sasaran program OPD*	%	100	50.850.066.000	100	30.443.615.052	100	10.901.139.897	25	2.432.758.554	25	2.404.270.307	25	2.175.905.679	25	2.783.870.482	100	9.799.227.023	100,00	89,89	100	40.242.842.075	100,00	79,14		
1	2.12.01.2.01	Terwujudnya pelayanan prima	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Macam	18	259.096.543	18	70.827.600															18	70.827.600	100,00	27,34		
				Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Dokumen	41	510.595.475	10	13.753.000	10	24.385.550	4	0	4	8.898.800	0	4.622.200	2	7.032.800	10	20.553.800	100,00	84,29	20	31.746.300	48,78	6,22		
	2.12.01.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	10	25.534.504	10	21.263.600															10	21.263.600	100,00	83,27		
	2.12.01.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	66.796.306	4	7.428.000																				
1	2.12.01.2.01.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	66.796.306	4	7.428.000	6	17.491.600	3	-	2	8.504.800	0	2.771.200	1	4.473.800	6	15.749.800	100,00	90,04	10	23.177.800	58,82	34,70	Dispendukcapil	Subbag. Perencanaan
	2.12.01.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah asistensi / koordinasi yang diadakan	Kali	4	172.225.580	4	17.409.000															4	17.409.000	100,00	10,11		
	2.12.01.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8	311.004.956	2	2.560.500															4	2.560.500	100,00	1,49	Dispendukcapil	Subbag. Perencanaan
	2.12.01.2.01.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8	311.004.956	2	2.560.500	0	0			0	-	0		0											
	2.12.01.2.01.06	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Macam	8	61.336.459	8	32.155.000															8	32.155.000	100,00	52,42		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.12.01.2.01.06	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	132.794.213	4	3.764.500																				
2	2.12.01.2.01.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	132.794.213	4	3.764.500	4	6.893.950	1	-	2	394.000	0	1.851.000	1	2.559.000	4	4.804.000	100,00	69,68	8	8.568.500	50,00	6,45	Dispendukcapil	Subbag. Perencanaan
2	2.12.01.2.02	Terwujudnya pelayanan prima	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi keuangan PD	Bulan	24	9.215.828.514	24	8.647.980.173															24	8.647.980.173	100,00	93,84		
				Terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan OPD	Dokumen	52	17.218.040.392	13	4.568.456.138	13	4.743.534.238	3	1.026.130.979	0	1.448.730.814	0	1.023.319.890	0	999.909.790	3	4.500.513.474	23,08	94,88	16	9.068.969.612	30,77	52,67		
	2.12.01.2.02.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Pegawai	38	9.208.355.545	38	8.642.153.273															38	8.642.153.273	100,00	93,85		
	2.12.01.2.02.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	38	17.169.256.714	31	4.565.681.538																				
3	2.12.01.2.02.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	38	17.169.256.714	31	4.565.681.538	38	4.738.026.438	31	1.026.130.979	31	1.447.183.864	31	1.022.269.890	29	999.909.790	29	4.495.494.523,64	100,00	94,88	34	9.061.176.062	89,47	52,78	Dispendukcapil	Subbag. Keuangan
	2.12.01.2.02.05	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penatausahaan dan laporan keuangan tersusun	Macam	28	7.472.969	28	5.826.900															28	5.826.900	100,00	77,97		
	2.12.01.2.02.05	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	52	48.783.678	13	2.774.600																				
4	2.12.01.2.02.0005	Terwujudnya pelayanan prima	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	52	48.783.678	13	2.774.600	13	5.507.800	3	-	3	1.546.950	4	1.050.000	3	2.422.000	13	5.018.950	100,00	91,12	0	7.793.550	0,00	15,98	Dispendukcapil	Subbag. Keuangan
3	2.12.01.2.05	Terwujudnya pelayanan prima	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	372.647.119	100	164.462.491															100	164.462.491	100,00	44,13		
				Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai	%	100	672.809.103	100	8.717.000	100	58.881.200	0	0	0	0	50	47.648.000	0	0	50	47.648.000	50,00	80,92	150	56.365.000	150,00	8,38		
	2.12.01.2.05.10	Terwujudnya pelayanan prima	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksa	Macam	6	372.647.119	3	164.462.491															3	164.462.491	50,00	44,13		
	2.12.01.2.05.10	Terwujudnya pelayanan prima	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	580	672.809.103	50	8.717.000																				
5	2.12.01.2.05.0010	Terwujudnya pelayanan prima	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	580	672.809.103	50	8.717.000	580	58.881.200	0	-	0	-	356	47.648.000	0	-	356	47.648.000	100,00	80,92	406	56.365.000	70,00	8,38	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
4	2.12.01.2.06	Terwujudnya pelayanan prima	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	24	4.650.981.327	24	4.412.117.826															24	4.412.117.826	100,00	94,86		
				Terpenuhinya daya dukung sarana kantor dan rapat koordinasi	%	100	9.662.655.703	100	1.962.233.058	100	3.079.612.584	0	988.036.957	0	284.519.937	0	440.136.505	0	812.553.251	0	2.525.246.650	0,00	82,00	100	4.487.479.708	100,00	46,44		
	2.12.01.2.06.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat/bahan kebersihan yang tersedia	macam	22	3.678.347.010	22	3.224.210.007															22	3.224.210.007	100,00	87,65		
				- Jumlah alat listrik yang tersedia	macam	18		18																18		100,00			
				- Jumlah ATK yang tersedia	macam	20		20																20		100,00			
				- Jumlah perlengkapan RT	macam	4		4																4		100,00			
				- Jumlah cetak blangko KIA	keeine	100.000		100.000																100000		100,00			
				- Jumlah cetak formulir pelayanan	macam	26		26																26		100,00			
				- Jumlah cetak sampul KK/Akta	lembar	78.000		78.000																78000		100,00			
				- Jumlah kertas HVS/blangko diadakan	rim	1.200		1.200																1200		100,00			
				- Jumlah peralatan kerja	macam	6		6																6		100,00			
				- Jumlah tinta untuk cetak KIA	set	400		400																400		100,00			
				- Jumlah tinta untuk cetak KTP-el	set	260		260																260		100,00			
	2.12.01.2.06.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	7.177.180.089	11	1.466.890.900																				
6	2.12.01.2.06.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	7.177.180.089	11	1.466.890.900	8	2.266.634.019	3	933.541.200	1	78.140.925	2	339.839.530	2	496.236.340	6	1.847.757.995	75,00	81,52	17	3.314.648.895	45,95	46,18	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan mamin untuk kebutuhan dinas	Bulan	24	49.914.973	24	72.911.000															24	72.911.000	100,00	146,07		
	2.12.01.2.06.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	119.056.028	2	25.591.000																				
7	2.12.01.2.06.0004	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	119.056.028	2	25.591.000	2	36.362.000	0	-	1	8.527.000	0	2.255.500	1	10.338.500	2	21.121.000	100,00	58,09	4	46.712.000	50,00	39,24	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.05	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang te	Macam	4	39.394.324	4	63.240.100															4	63.240.100	100,00	160,53		
	2.12.01.2.06.05	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	55.310.444	1	42.268.900																				
8	2.12.01.2.06.0005	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	55.310.444	1	42.268.900	1	50.894.715	0	-	0	879.000	0	539.000	1	38.410.300	1	39.828.300	100,00	78,26	2	82.097.200	50,00	148,43	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.06	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Macam	6	6.464.843	6	4.740.000															6	4.740.000	100,00	73,32		
	2.12.01.2.06.06	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	14.556.686	1	700.000																				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
9	2.12.01.2.06.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	14.556.686	1	700.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			1	700.000	25,00	4,81	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.06.09	Terwujudnya pelayanan prima	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bulan	24	876.860.177	24	1.047.016.719															24	1.047.016.719	100,00	119,41		
				Fasilitasi Pelayanan jemput bola	%	100		100																100		100,00			
				Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi	%	100		100																100		100,00			
	2.12.01.2.06.09	Terwujudnya pelayanan prima	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	2.296.552.456	12	426.782.258																				
10	2.12.01.2.06.0009	Terwujudnya pelayanan prima	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	2.296.552.456	12	426.782.258	12	510.684.600	3	54.495.757	3	196.973.012	3	57.662.475	3	118.303.111	12	427.434.355	100,00	83,70	24	854.216.613	50,00	37,20	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
11	2.12.01.2.06.0011	Terwujudnya pelayanan prima	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			0	0	1	215.037.250	0	-	0	-	0	39.840.000	1	149.265.000	1	189.105.000	100,00	87,94	1	189.105.000			Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
5	2.12.01.2.07	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Macam	14	5.109.952.200	14	1.787.885.528															14	1.787.885.528	100,00	34,99		
				Terpenuhinya daya dukung peralatan kantor	Unit	17	9.884.889.836	17	1.196.586.000	5	15.063.150	0	0	0	0	0	0	5	11.530.000	0	11.530.000	0,00	76,54	17	1.208.116.000	100,00	12,22		
				Tersedianya akses untuk pelayanan bagi Difabel	%			100		100		100		100		100		100		100									
	2.12.01.2.07.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Macam	14	5.109.952.200	14	1.787.885.528															14	1.787.885.528	100,00	34,99		
	2.12.01.2.07.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58	9.884.889.836	17	1.196.586.000																				
12	2.12.01.2.07.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58	9.884.889.836	17	1.196.586.000	5	15.063.150	0	-	0	-	0	-	5	11.530.000	5	11.530.000	100,00	76,54	22	1.208.116.000	37,93	12,22	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
6	2.12.01.2.08	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Bulan	24	5.197.122.736	24	4.415.220.071															24	4.415.220.071	100,00	84,96		
				Tersedianya jasa kantor	%	100	11.379.357.049	100	2.307.001.522	100	2.576.453.597	30	414.047.818	30	614.678.900	20	607.633.702	20	828.228.971	100	2.464.589.391	100,00	95,66	200	4.771.590.913	200,00	41,93		
				Persentase layanan yang menyediakan penterjemah bahasa isyarat	%			0		0		0		0		0		0		0									
				Tersedianya media edukasi dan form untuk tuna netra dengan huruf braille	%			0		0		0		0		0		0		0									
	2.12.01.2.08.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya kegiatan surat menyurat	%	100	40.305.503	100	9.115.920															100	9.115.920	100,00	22,62		
	2.12.01.2.08.01	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48	106.590.741	12	4.411.772																				
13	2.12.01.2.08.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48	106.590.741	12	4.411.772	12	11.054.000	3	-	3	1.229.332	3	1.767.481	3	3.574.143	12	6.570.956	100,00	59,44	24	10.982.728	50,00	10,30	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.08.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan internet	Jaringan	3	117.404.741	3	83.664.258															3	83.664.258	100,00	71,26		
				Jumlah pesawat telepon	Unit	4		4																4		100,00			
				Jumlah SMS Gateway	Jaringan	1		1																1		100,00			
	2.12.01.2.08.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	257.902.844	12	32.579.030																				
14	2.12.01.2.08.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	257.902.844	12	32.579.030	12	48.855.197	3	6.744.390	3	6.790.776	3	4.799.929	3	9.853.372	12	28.188.467	100,00	57,70	24	60.767.497	50,00	23,56	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.08.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	orang	1	5.039.412.492	1	4.322.439.893															1	4.322.439.893	100,00	85,77		
				Jumlah Instruktur senam	orang	1		1																1		100,00			
				Jumlah jasa kebersihan	rekanan	1		1																1		100,00			
				Jumlah jasa THL	orang	67		67																67		100,00			
	2.12.01.2.08.04	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	11.014.863.464	12	2.270.010.720																				
15	2.12.01.2.08.0004	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	11.014.863.464	12	2.270.010.720	12	2.516.544.400	3	407.303.428	3	606.658.792	3	601.066.292	3	814.801.456	12	2.429.829.968	100,00	96,55	24	4.699.840.688	50,00	42,67	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
7	2.12.01.2.09	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pemeliharaan BMD / Sarana Pra sarana kantor	Bulan	24	794.371.561	24	725.970.683															24	725.970.683	100,00	91,39		
				Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Unit	23	1.521.718.442	23	162.403.962	23	403.209.578	1	4.542.800	2	47.441.856	2	52.545.382	5	124.615.670	10	229.145.708	43,48	56,83	33	391.549.670	143,48	25,73		
	2.12.01.2.09.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara	Unit	3	170.579.323	3	183.708.089															3	183.708.089	100,00	107,70		
				Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara	Unit	7		7																7		100,00			
	2.12.01.2.09.02	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	404.935.537	10	90.243.212																				
16	2.12.01.2.09.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	404.935.537	10	90.243.212	10	168.209.000	1	4.542.800	2	35.376.856	2	17.772.382	5	71.732.140	10	129.424.178	100,00	76,94	20	219.667.390	200,00	54,25	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.09.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	24	159.924.754	24	198.059.907															24	198.059.907	100,00	123,85		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
	2.12.01.2.09.06	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	288.202.040	12	51.206.750																				
17	2.12.01.2.09.0006	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	288.202.040	12	51.206.750	8	91.523.500	0	-	1	11.565.000	1	16.773.000	4	50.417.530	6	78.755.530	96,61	86,05	18	276.815.437	150,00	96,05	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	2.12.01.2.09.09	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung / bangunan yang diperbaiki	Paket	1	463.867.484	1	344.202.687															1	344.202.687	100,00	74,20		
	2.12.01.2.09.09	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	828.580.865	1	20.954.000																				
18	2.12.01.2.09.0009	Terwujudnya pelayanan prima	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	828.580.865	1	20.954.000	1	143.477.078	0	-	0	500.000	0	18.000.000	0	2.466.000	0	20.966.000	24,41	14,61	1	41.920.000	100,00	5,06	Dispendukcapil	Subbag. Umum dan Kepegawaian
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		99,01	88,25						
																				Predikat Kinerja		ST	T						
II	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Persentase Perekaman KTP-El*	%	99,7	1.649.933.000	99,74	72.649.355	99,37	149.452.600		0		39.296.250		24.321.500	99,99	80.463.300	99,99	144.081.050	100,62	96,41	200	216.730.405	200,33	13,14		
				Persentase kepemilikan KIA	%	92,68		67,77		64,16								75,49		75,49		117,66		143		154,57			
8	2.12.02.2.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan KK	Keluarga	407.567	234.343.000		53.547.955															0	53.547.955	0,00	22,85		
				Tersedianya dokumen pencatatan, penatausahaan dan pendaftaran penduduk terkini	Dokumen	757.000	1.649.933.000	317.463	19.101.400	185.450	149.452.600	73.154	0	72.283	39.296.250	75.794	24.321.500	70.850	80.463.300	292.081	144.081.050	157,50	96,41	609.544	163.182.450	80,52	9,89		
				Persentase LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mendapat layanan Adminduk)	%	0		0		0		0		0		0		0		0									
	2.12.02.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan yg terdata	org	100	34.320.571	876	15.238.955															876	15.238.955	876,00	44,40		
				Jumlah penduduk yg mutasi	org	40.000		48.799																48.799		122,00			
				Jumlah penerbitan kartu pddk non permanen	buah	2.000		512																512		25,60			
	2.12.02.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2.000	181.703.051	489	7.918.400																				
19	2.12.02.2.01.0001	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2.000	181.703.051	489	7.918.400	450	13.660.100	86	-	137	12.550.750	100	-	63	-	386	12.550.750	85,78	91,88	875	20.469.150	43,75	11,27	Dispendukcapil	Bidang Dafduk
	2.12.02.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP-el	orang	70.000	200.022.429	46.597	38.309.000															46.597	38.309.000	66,57	19,15		
				Jumlah cetak KTP-el	keping	100.000		163.925																163.925		163,93			
				Jumlah KIA terbit	keping	90.000		136.096																136.096		151,22			
				Jumlah KK terbit	buah	110.000		257.864																257.864		234,42			
				Jumlah KTP OA / SKTT terbit	buah	152		585																585		384,87			
	2.12.02.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	755.000	1.468.229.949	316.974	11.183.000																				
20	2.12.02.2.01.0002	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	755.000	1.468.229.949	316.974	11.183.000	185.000	135.792.500	73.068	-	72.146	26.745.500	75.694	24.321.500	70.787	80.463.300	291.695	131.530.300	157,67	96,86	608669	142.713.300	80,62	9,72	Dispendukcapil	Bidang Dafduk
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		157,50	96,41						
																				Predikat Kinerja		ST	ST						
III	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	%	99	401.129.000	100	74.090.331	100	79.997.950	100	0	100	17.488.950	100	11.099.100	100	34.506.000	100	63.094.050	100	78,87	100	137.184.381	101,01	34,20		
				Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	%	95,62		100		100		100		100		100		100		100		100		100		104,58			
9	2.12.02.2.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta	Kutipan	72.545	80.172.000	72.545	56.529.831															72.545	56.529.831	100,00	70,51		
				Tercapainya pelayanan prima dan daya dukung dokumen administrasi kependudukan	%	100	401.129.000	100	17.560.500	100	79.997.950	100	0	100	17.488.950	100	11.099.100	100	34.506.000	100	63.094.050	100,00	78,87	200	80.654.550	200,00	20,11		
	2.12.03.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kutipan Akta Kelahiran yg terbit	Kutipan	61.000	46.750.709	61.060	30.710.000															61.060	30.710.000	100,10	65,69		
				Jumlah kutipan Akta Kematian yg terbit	Kutipan	11.380		34.075																34.075		299,43			
	2.12.03.2.01.01	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	163385	235.013.119	51701	11.950.500																				
21	2.12.03.2.01.0001	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	163385	235.013.119	51701	11.950.500	40.595	40.147.950	12.325	-	12.340	9.878.950	12.104	9.309.100	10.610	14.938.000	47.379	34.126.050	116,71	85,00	99.080	46.076.550	60,64	19,61	Dispendukcapil	Bidang Capil
	2.12.03.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kutipan Akta perkawinan Non Muslim yg terbit	Kutipan	165	33.421.291	266	25.819.831															266	25.819.831	161,21	77,26		
	2.12.03.2.01.02	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5	166.115.881	3	5.610.000																				
22	2.12.03.2.01.0002	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5	166.115.881	3	5.610.000	4	39.850.000	3	-	3	7.610.000	3	1.790.000	4	19.568.000	4	28.968.000	100,00	72,69	7	34.578.000	140,00	20,82	Dispendukcapil	Bidang Capil

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	78,85						
																				Predikat Kinerja		ST	T						
IV	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebermanfaatan data Kependudukan	instansi / desa / kel	425	2.897.878.000	427	1.283.170.749																				
				Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan	instansi / desa / kel					420	300.852.800	427	0	427	54.138.925	428	60.856.500	437	89.876.800	427	218.192.225	101,67	72,52	369	1.501.362.974	86,82	51,81		
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	instansi					11		11		11		11		11		11		100,00							
				Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		100,00			
10	2.12.04.2.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah layanan ber-SPP	Layanan	63	231.300.610	63	182.505.916															63	182.505.916	100,00	78,90		
				Jumlah arsip akta kelahiran yang dialihmedia (total)	Data	584.100		81.272																81.272					
				Terpenuhinya data kenendudukan terkini	Persen	100	734.274.808	100	98.478.633	100	101.209.800	0	0	30	47.298.925	30	46.776.500	40	5.227.800	100	99.303.225	100,00	98,12	200	197.781.858	200,00	26,94		
	2.12.04.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya sarana website yang beroperasi	Tahun	2	41.182.170	2	6.117.500															2	6.117.500	100,00	14,85		
	2.12.04.2.01.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disaikan	Dokumen	480	130.863.384	0	0																				
	2.12.04.2.01.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disaikan	Dokumen	480	130.863.384	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-												
	2.12.04.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yg bekerjasama dalam pelayanan/memanfaatkan data kerendudukan	Instansi	32	40.142.643	94	30.144.450															94	30.144.450	293,75	75,09		
	2.12.04.2.01.02	Terwujudnya pelayanan prima	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kenendudukan	Dokumen	425	170.012.338	427	4.910.000																				
23	2.12.04.2.01.0002	Terwujudnya pelayanan prima	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kenendudukan	Dokumen	425	170.012.338	427	4.910.000	11	20.006.800	11	-	11	10.000.000	11	8.150.000	11	450.000	11	18.600.000	100,00	92,97	428	23.510.000	100,71	13,83	Dispendukcapil	Bidang PDIP
	2.12.04.2.01.03	Terwujudnya pelayanan prima	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah arsip Akta Kelahiran yang dialihmedia (per-tahun)	Data	160.122	149.975.797	105.841	146.243.966															105.841	146.243.966	66,10	97,51		
				Jumlah fasilitasi pemeliharaan arsip	Bulan	24		24																24		100,00			
	2.12.04.2.01.03	Terwujudnya pelayanan prima	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk	Laporan	8	433.399.086	2	93.568.633																				
24	2.12.04.2.01.0003	Terwujudnya pelayanan prima	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	8	433.399.086	2	93.568.633	2	81.203.000	0	-	1	37.298.925	1	38.626.500	0	4.777.800	2	80.703.225	100,00	99,38	4	174.271.858	50,00	40,21	Dispendukcapil	Bidang PDIP
11	2.12.04.2.03	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi IT untuk penyelenggaraan Adminduk	Lokasi	19	416.906.771	17	329.952.900															17	329.952.900	89,47	79,14		
				Terwujudnya daya dukung fungsi informasi kependudukan sesuai perkembanan	%	100	887.341.416	100	37.745.000	100	92.597.600	10	0	30	420.000	30	1.730.000	30	0	100	15.470.000	100,00	16,71	200	53.215.000	200,00	6,00		
	2.12.04.2.03.03	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi pelayanan JemHol, dll	%	100	78.159.757	100	15.125.000															100	15.125.000	100,00	19,35		
				Jasa internet (zoom meeting & paket data) utk pelayanan	Bulan	24		24																24		100,00			
				Fasilitasi koord dan konsultasi	%	100		100																100		100,00			
	2.12.04.2.03.03	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	437.003.208	2	6.665.000																				
25	2.12.04.2.03.0003	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	437.003.208	2	6.665.000	2	24.508.400	0	-	0	420.000	1	1.730.000		13.320.000	1	15.470.000	100,00	63,12	3	22.135.000	37,50	5,07	Dispendukcapil	Bidang PIAK
	2.12.04.2.03.08	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah aplikasi yg disusun/dibuat	Paket	5	338.747.014	6	314.827.900															6	314.827.900	120,00	92,94		
				Jumlah jaringan SIAK yg direlihara	Lokasi	19		17																17		89,47			
				Jumlah perangkat penyimpanan data digital yg diadakan	Unit	1		1																1		100,00			
	2.12.04.2.03.08	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	8	450.338.208	2	31.080.000																				
26	2.12.04.2.03.0008	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	8	450.338.208	2	31.080.000	2	68.089.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2	31.080.000	25,00	6,90	Dispendukcapil	Bidang PIAK
12	2.12.04.2.04	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kenendudukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan Pelayanan Adminduk	Paket	4	523.794.620	4	469.057.800															4	469.057.800	100,00	89,55		
				Terpenuhinya pengelolaan informasi kependudukan	%	100	1.276.261.776	0	165.430.500	100	107.045.400	0	0	0	6.420.000	0	12.350.000	100	84.649.000	100	103.419.000	100,00	96,61	100	268.849.500	100,00	21,07		
	2.12.04.2.04.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Sertifikasi ISO	Paket	2	141.661.844	2	145.859.000															2	145.859.000	100,00	102,96		
				Terlaksananya kegiatan survey SKM	Paket	2		2																2		100,00			
	2.12.04.2.04.01	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	315.600.099	2	76.368.000																				
27	2.12.04.2.04.0001	Terwujudnya pelayanan prima	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	8	315.600.099	2	76.368.000	2	80.765.400	0	-	0	-	0	-	2	79.289.000	2	79.289.000	100,00	98,17	4	155.657.000	50,00	49,32	Dispendukcapil	Bidang PDIP
	2.12.04.2.04.03	Terwujudnya pelayanan prima	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah pegawai dinas dan atau petugas desa / kelurahan yg dibintek	Orang	356	382.132.776	356	323.198.800															356	323.198.800	100,00	84,58		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
	2.12.04.2.04.03	Terwujudnya pelayanan prima	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	8	960.661.677	2	89.062.500																				
28	2.12.04.2.04.0003	Terwujudnya pelayanan prima	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	8	960.661.677	2	89.062.500	2	26.280.000	0	-	0	6.420.000	1	12.350.000	1	5.360.000	2	24.130.000	100,00	91,82	4	113.192.500	50,00	11,78	Dispendukcapil	Bidang PDIP
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		77,37	72,52						
																				Predikat Kinerja		T	S						
V	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase validasi Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	%	98	422.048.000	75,82	162.380.100	80,29	100.308.940	77,15	0	79,77	900.000	81,38	56.961.000	83	35.090.000	83	92.951.000		92,66	159	255.331.100	162,06	60,50		
13	2.12.05.2.01	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil dan / proyeksi kependudukan tersusun	Buku	100	126.347.000	0	100.035.100															0	100.035.100	0,00	79,17		
				Tersedianya dokumen data kependudukan sesuai perkembangan	Dokumen	4	422.048.000	1	62.345.000	1	100.308.940	0	0	0	900.000	1	56.961.000	0	35.090.000	1	92.951.000	100,00	92,66	2	155.296.000	50,00	36,80		
	2.12.05.2.01.01	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data ganda dan anomali yg tervalidasi	Data	50.000	58.558.221	70.432	27.733.600															70.432	27.733.600	140,86	47,36		
	2.12.05.2.01.01	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	59.987	208.073.360	39.553	23.255.000																				
29	2.12.05.2.01.0001	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	59.987	208.073.360	39.553	23.255.000	15.000	56.256.700	1.488	-	2.934	900.000	1.802	18.870.000	1.822	32.830.000	8.046	52.600.000	53,64	93,50	47599	75.855.000	79,35	36,46	Dispendukcapil	Bidang PIAK
	2.12.05.2.01.02	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah data kependudukan yang tersusun	Macam	2	67.788.779	2	72.301.500															2	72.301.500	100,00	106,66		
	2.12.05.2.01.02	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	213.974.640	1	39.090.000																				
30	2.12.05.2.01.0002	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	213.974.640	1	39.090.000	1	44.052.240	0	-	0	-	1	38.091.000	0	2.260.000	1	40.351.000	100,00	91,60	2	79.441.000	50,00	37,13	Dispendukcapil	Bidang PIAK
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	92,66						
																				Predikat Kinerja		SR	SR						
							53.323.176.000		30.752.734.838		11.230.899.387																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											11.531.752.187		2.432.758.554		2.516.094.432		2.329.143.779		3.023.806.582		10.317.545.347,64								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						98,44	89,47			80,00	77,02		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																												
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN																										
	2.13		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
	2.13		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				111.809.591.000		44.634.055.198		19.018.005.713		3.296.469.741		4.379.490.076,39		3.898.208.502		6.239.657.751		17.813.826.070,40		93,67		62.447.881.268,79		55,85		
A	2.13.01	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen (%)	100	40.262.400.000	100	15.785.061.597	100	5.492.431.086	100	1.075.315.959	100	1.617.239.199		1.204.114.135		1.321.700.845		5.218.370.138,40	-	95	100	21.003.431.736	100	52		
I	2.13.01.201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	18	375.969.404	9	91.245.081	3	32.404.955	-	-	1	12.637.885	2	3.873.109		-	3	16.510.994	100	51	12	107.756.075	67	29		
1	2.13.01.201.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	16	48.399.800	16	36.679.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16	36.679.800	100	76	SEKRETARIAT	
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	135.000.000	8	15.138.000	8	14.999.661	-	-	4	8.821.325	2	2.255.719	2		8	11.077.044	100	74	16	26.215.044	50	19	SEKRETARIAT	
2	2.13.01.201.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	39	17.569.604	39	19.623.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			39	19.623.981	100	112	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	80.000.000	20	3.617.800	20	8.010.600	-	-	5	1.787.930	5	1.617.390	10		20	3.405.320	100	43	40	7.023.120	50	9	SEKRETARIAT	
3	2.13.01.201.0007		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Buku	5	10.000.000	5	14.270.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5	14.270.300	100	143	SEKRETARIAT	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	85.000.000	5	1.915.200	5	9.394.694	-	-	1	2.028.630	-		4		5	2.028.630	100	22	10	3.943.830	50	5	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	45,98	21,00	17959345,83	75,00	60,50		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
II	2.13.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	36	32.992.364.000	35	13.078.164.678,39	36	4.442.591.444	9	994.277.798,72	9	1.395.261.359,39	9	978.933.444,08	9	952.659.215,21	36	4.321.131.817,40	100	97	30	17.399.296.495,79	83	53		
4	2.13.01.202.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35	32.992.364.000	35	13.078.164.678,39	36	4.442.591.444	9	994.277.798,72	9	1.395.261.359,39	9	978.933.444,08	9	952.659.215,21	36	4.321.131.817,40	100	97	30	17.399.296.495,79	86	53	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	97,27	30	17399296496	86	53		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah		
III	2.13.01.205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	Orang	35	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
5	2.13.01.205.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	36	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
IV	2.13.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapun Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Paket - Paket - Laporan	- 460 - 50 - 516	2.871.473.152	- 155 - 20 - 240	960.447.735	- 95 - 10 - 90	398.464.287		-		73.565.600		74.917.271		145.798.300	-	294.281.171		74		1.254.728.906		44		
6	2.13.01.206.0002		Penyediaan Peralatan dan Prrlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	60	285.713.332	60	484.782.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	484.782.298	100	170	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	395	913.000.000	90	93.394.888	95	184.817.963	-	-	20	45.684.500	20	36.106.500	55	101.071.000	95	182.862.000	100	99	185	276.256.888	47	30	SEKRETARIAT	
7	2.13.01.206.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Jenis	11	45.998.190	11	56.274.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11	56.274.040	100	122	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	259.000.000	10	17.464.500	10	25.175.722	-	-	3	6.205.000	3	4.597.000	4	9.011.500	10	19.813.500	100	79	20	37.278.000	50	14	SEKRETARIAT	
8	2.13.01.206.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis	22	24.999.630	22	24.139.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			22	24.139.580	100	97	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	38	119.000.000	8	10.474.180	10	16.890.852	-	-	1	150.000	3	7.625.000	6	9.110.600	10	16.885.600	100	100	18	27.359.780	47	23	SEKRETARIAT	
9	2.13.01.206.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jenis	10	10.745.000	10	9.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10	9.125.000	100	85	SEKRETARIAT	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	14	71.234.000	3	1.810.000	3	4.434.750	-	-	1	1.093.500	1	741.150	1	2.600.100	3	4.434.750	100	100	6	6.244.750	43	9	SEKRETARIAT	
10	2.13.01.206.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Kali	10	5.000.000	10	6.095.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10	6.095.000	100	122	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	86.000.000	12	2.915.000	12	7.056.000	-	-	-	-	4	1.590.000	8	1.325.000	12	2.915.000	100	41	24	5.830.000	50	7	SEKRETARIAT	
11	2.13.01.206.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	PerDin	156	126.582.000	156	164.534.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			156	164.534.100	100	130	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	355	534.201.000	80	30.331.649	90	160.089.000	-	-	10	20.432.600	20	24.257.621	60	22.680.100	90	67.370.321	100	42	170	97.701.970	48	18	SEKRETARIAT	
12	2.13.01.206.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website yang dikelola	Paket	1	60.000.000	1	59.107.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	59.107.500	100	99	SEKRETARIAT	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	330.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	76,83	49,50	89623493,29	70,35	66,10		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang		
V	2.13.01.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	30	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
13	2.13.01.207.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	180	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VI	2.13.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	2.778.240.000	15	1.179.318.960	15	424.830.000	15	70.780.160	15	106.170.240	-	106.170.240	-	139.460.680	15	422.581.320	100	99	30	1.601.900.280	200	58		
14	2.13.01.208.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	Orang	15	869.568.000	15	784.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			15	784.800.000	100	90	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	1.908.672.000	15	394.518.960	15	424.830.000	15	70.780.160	15	106.170.240	15	106.170.240		139.460.680	15	422.581.320	100	99	15	817.100.280	100	43	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,47	15,00	800950140,00	100,00	66,53		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
VII	2.13.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Jenis	3	1.064.353.444	6	475.885.143	62	194.140.400		10.258.000		29.604.115		40.220.071		83.782.650	-	163.864.836	-	84	6	639.749.979	200	60		
15	2.13.01.209.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	675.608.200	7	403.749.143	7	143.960.000	7	10.258.000	7	24.524.115	7	38.800.071		40.972.650	7	114.554.836	100	80	7	518.303.979	100	77	SEKRETARIAT	
16	2.13.01.209.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	130	69.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SEKRETARIAT	
17	2.13.01.209.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Ruang	30	50.964.000	30	30.472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	30.472.000	100	60	SEKRETARIAT	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	146.000.000	-	-	5	29.870.400	-	-	-	-	-	-	5	29.000.000	5	29.000.000	100	97	5	29.000.000	19	20	SEKRETARIAT	
18	2.13.01.209.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	105	122.781.244	45	41.664.000	20	20.310.000	-	-	5	5.080.000	5	1.420.000	10	13.810.000	20	20.310.000	100	100	65	61.974.000	62	50	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	92,22	26,75	159937494,75	70,28	51,71		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
B	2.13.02	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	Persen (%)	29,15	3.388.185.000	33,27	1.022.327.750	23,09	299.991.582	33,27	299.991.582	-	-	-	-	-	-	-	299.991.582			33,27	1.322.319.332	114	39		
VI	2.13.02.201		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	Infrastruktur	108	3.388.185.000	36	1.022.327.750	18	299.991.582	18	299.991.582	-	-	-	-	-	-	18	299.991.582			54	1.322.319.332	50	39		
19	2.13.02.201.0006		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi TMMD	Titik	36	1.048.945.000	36	1.022.327.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			36	1.022.327.750	100	97	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	2	2.339.240.000	-	-	2	299.991.582	2	299.991.582	-	-		-	-	-	2	299.991.582	100	100	2	299.991.582	100	13	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00	19,00	1022327750,00	100,00	97,46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
C	2.13.03	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	Persen (%)	7,78	590.662.000	5,76	163.144.450	6,06	99.999.954	-	-	-	31.869.750	-	40.265.700		14.195.950	-	86.331.400	-	86	5,15	249.475.850	66	42		
VII	2.13.03.201		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	Desa	26	590.662.000	19	163.144.450	20	99.999.954	-	-	-	31.869.750	-	40.265.700	20	14.195.950	20	86.331.400	100	86	19	249.475.850	73	42		
20	2.13.03.201.0003		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang menjadi kawasan perdesaan	Desa	15	118.915.000	19	136.031.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			19	136.031.350	127	114	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	471.747.000	1	27.113.100	1	99.999.954	-	-	-	31.869.750	1	40.265.700		14.195.950	1	86.331.400	100	86	2	113.444.500	200	24	BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	86,33	10,50	12473792 5,00	163,33	69,22		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
D	2.13.04	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	- Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa - Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju - Persentase Desa Cepat Berkembang - Persentase Desa pengelolaan aset desa - Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa	- Persen (%) - Persen (%) - Persen (%) - Persen (%) - Persen (%)	- 87,61 - 59,4 - 80 - 95 - 85	58.845.093.000	- 68,29 - 36,06 - 93,82 - 100 - 100	23.838.001.397	- 74,61 - 39,4 - 69,07 - 85 - 75	10.369.183.716	-	1.741.609.400	-	2.112.572.088	-	1.991.807.236		3.977.829.211	-	9.823.817.935		95		33.661.819.332		57		
VIII	2.13.04.201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan - Jumlah bumdes dengan kategori maju - Jumlah desa cepat berkembang - Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES - Jumlah desa yang merencanakan pembangunan	- Orang - BUMDes - Desa - Desa - Desa	- 5.164 - 196 - 264 - 314 - 281	58.845.093.000	- 4.025 - 119 - 334 - 330 - 330	23.838.001.397	- 4.398 - 130 - 228 - 281 - 248	10.369.183.716	-	1.741.609.400	-	2.112.572.088	-	1.991.807.236		3.977.829.211	-	9.823.817.935	100	95		33.661.819.332		57		
21	2.13.04.201.0001		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	Orang	348	7.156.294.500	348	12.635.848.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			348	12.635.848.282	100	177	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	12	1.040.000.000	3	1.778.656.300	3	2.444.999.841	-	-	2	248.307.598	1	70.115.416		1.978.691.535	3	2.297.114.549	100	94	6	4.075.770.849	50	392	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
22	2.13.04.201.0002		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	Orang	348	150.000.000	348	65.438.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			348	65.438.500	100	44	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	1.500.000.000	1	1.627.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1.627.500	100	0	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
23	2.13.04.201.0003		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	Orang	330	238.600.000	330	161.575.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	161.575.500	100	68	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	330	1.180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
24	2.13.04.201.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	Orang	348	516.800.000	348	253.811.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			348	253.811.630	100	49	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	330	2.000.000.000	330	51.468.500	330	150.000.000	-	-	100	42.830.000	100	10.751.400	130	78.767.400	330	132.348.800	100	88	660	183.817.300	200	9	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
25	2.13.04.201.0005		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	330	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
26	2.13.04.201.0007		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	PerDes	330	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	10	860.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
27	2.13.04.201.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju	Desa	330	628.515.104	330	627.439.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	627.439.551	100	100	*BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA*	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1.660.000.000	1	135.524.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	135.524.350	100	8	*BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA*	
28	2.13.04.201.0009		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepala desa	Desa	47	441.896.686	47	69.717.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			47	69.717.900	100	16	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kesala Desa	Laporan	1	1.100.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
29	2.13.04.201.0010		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Peranakat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	75	85.750.000	75	554.756.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			75	554.756.461	100	647	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	465.000.000	1	26.943.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	26.943.000	100	6	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
30	2.13.04.201.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemutakhiran Data Profil Desa	Desa/Kel	356	166.800.000	356	134.674.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			356	134.674.800	100	81	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	810.000.000	1	2.833.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	2.833.000	100	0	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
31	2.13.04.201.0012		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Desa	330	6.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	26.798.369.000	1	6.705.192.215	1	7.335.184.000	-	1.741.609.400	-	1.741.198.040	-	1.753.288.160	1	1.816.337.817	1	7.052.433.417	100	96	2	13.757.625.632	200	51	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
32	2.13.04.201.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	Desa	200	166.799.860	200	214.869.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			200	214.869.400	100	129	*BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA*	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	933.108.000	1	27.564.300	1	199.999.951	-	-	-	-	-	41.630.250	1	74.745.835	1	116.376.085	100	58	2	143.940.385	200	15	*BIDANG PEMBANGUNAN DAN ASET DESA*	
33	2.13.04.201.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	330	868.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
34	2.13.04.201.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi desa berhasil	Desa	330	337.999.850	330	288.151.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	288.151.808	100	85	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	Dokumen	1	1.140.000.000	1	101.908.400	1	238.999.924	-	-	-	80.236.450	1	116.022.010	-	29.286.624	1	225.545.084	100	94	2	327.453.484	200	29	BIDANG BINA PEMERINTAH DESA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		420,00	355,39	188,22	1870101074,00	125,00	105,85		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
E	2.13.05	MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang	Persen (%)	43,67	8.723.251.000	52,65	3.825.520.004	39,11	2.756.399.375	-	179.552.800	-	617.809.039		662.021.431		925.931.745		2.385.315.015	-	87	53	6.210.835.019	121	71		
IX	2.13.05.201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	6	8.723.251.000	4	3.825.520.004	6	2.756.399.375	-	179.552.800	-	617.809.039	3	662.021.431	3	925.931.745	6	2.385.315.015	100	87	10	6.210.835.019	167	71		
35	2.13.05.201.0003		Penunggaran Aspirasi Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang	Orang	300	130.000.000	300	162.572.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	162.572.850	100	125	BIDANG PEMBERDAYAAN	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	6	797.000.000	6	1.070.164.500	6	1.381.399.650	1	172.702.800	1	282.024.650	2	285.749.350	2	447.452.100	6	1.187.928.900	100	86	12	2.258.093.400	200	283	BIDANG PEMBERDAYAAN	
36	2.13.05.201.0005		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	330	216.015.320	330	336.857.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			330	336.857.975	100	156	BIDANG PEMBANGUNAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan	Dokumen	1	758.000.000	1	87.148.900	1	130.000.000	-	-	-	14.826.389	1	74.867.501		83.593.150	1	173.287.040	100	133	2	260.435.940	200	34	BIDANG PEMBANGUNAN	
37	2.13.05.201.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	Orang	300	205.199.900	300	190.547.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	190.547.751	100	93	BIDANG PEMBERDAYAAN	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa	Laporan	3	885.000.000	3	73.968.500	3	170.000.045	-	-	-	19.845.450	1	43.123.500	2	54.552.125	3	117.521.075	100	69	6	191.489.575	200	22	BIDANG PEMBERDAYAAN	
38	2.13.05.201.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanangan BBGRM	Kali	2	89.999.790	1	936.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	936.000	50	1	BIDANG PEMBERDAYAAN	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	Laporan	4	945.921.000	1	6.864.250	1	74.999.900	-	-	-	10.856.500	-	428.500	1	40.767.500	1	52.052.500	100	69	2	58.916.750	50	6	BIDANG PEMBERDAYAAN	
39	2.13.05.201.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang difasilitasi	PKK	375	999.999.990	375	1.378.128.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			375	1.378.128.798	100	138	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	19	3.696.115.000	19	518.330.480	19	999.999.780	1	6.850.000	6	290.256.050	5	257.852.580	7	299.566.870	19	854.525.500	100	85	38	1.372.855.980	200	37	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI DESA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	88,66	136,60	621.083.501,90	130,00	89,54		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											19.018.005,713		3.296.469,741		4.379.490.076,39		3.898.208,502		6.239.657,751		17.813.826.070,40								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						100,00	84,12			101,64	69,58		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																												
	2.14.208.0.00.05.0000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				18.059.894.532,72		23.486.406.139		25.083.594.977		1.578.893.557		4.941.746.624		6.551.330.452		10.644.601.869	-	24.015.259.111	115	95,74		47.501.665.250		263,02		
1	2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Diimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.059.894.532,72		23.486.406.139		25.083.594.977		1.578.893.557		4.941.746.624		6.551.330.452		10.644.601.869	-	24.015.259.111	115	95,74	84	47.501.665.250	102	263,02		
I	2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.926.794.532,72		3.264.251.285		3.612.616.000		266.738.917,00		387.634.810,00		877.115.095,00		1.519.754.876,00		3.051.243.698,00	124	84,46	35,23	6.315.494.983	123,76	35,23		
	2.08.02.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	Persen	35	1.206.883.043,85	43,28	605.709.750	20,00	898.000.000	20,00	117.767.500	23,91	76.805.130	24	289.648.500	40	199.557.880	60,00	683.779.010	300	76,14	102	1.289.488.760	291,43	106,84	Kepala Bidang PP dan PUG	
a	2.08.02.2.01.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	Perangkat Daerah	55	292.820.000,00	55	182.923.750	30,00	276.000.000	30,00	117.767.500	30,00	26.094.600	30	25.138.000	30,00	11.428.380	30	180.428.480	100	65,37	102	363.352.230,00	185,45	124,09		
1	2.08.02.2.01.03.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	55	304.549.000,00	55	182.923.750	55	276.000.000	47	117.767.500	47	26.094.600	47	25.138.000	47	11.428.380	47	180.428.480	85	65,37	102	363.352.230,00	185,45	119,31	Kepala Bidang PP dan PUG	
b	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes	Desa	65	621.243.043,85	5,00	146.286.000	45	230.000.000	0	-	0	-		128.484.000	34	91.587.500	34	220.071.500	76	95,68	17	366.357.500,00	116	58,97		
2	2.08.02.2.02.01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	255.956.660,00	4	17.718.000	4	-	0	0	0	0				0	0	0	0		4	17.718.000,00	100	6,92		
3	2.08.02.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	17	128.568.000,00	17,00	128.568.000	17	230.000.000,00	0	-	0	-	17	128.484.000	17	91.587.500	17	220.071.500	100	95,68	17	348.639.500,00	100	271,17		
c	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	orang	10	292.820.000,00	10,00	276.500.000	10	392.000.000,00	0	-	3	50.710.530	3	136.026.500	3	96.542.000	3	283.279.030	30	72	10	559.779.030,00	100,00	191,17		
	2.08.02.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	675	276.500,00	994	276.500.000	675	392.000.000,00	0	-	0	50.710.530	675	136.026.500	675	96.542.000	0	283.279.030	0	72,27	994	559.779.030,00	147,26	202.451,73		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.08.03	Peningkatan inkluasivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	Persen	96%	854.400.635,50	88,78	592.809.266,00	96	353.379.000,00	80	15.272.000	80	41.611.050		43.890.240	89,94	174.375.180	94	275.148.470	98	77,86	182,47	867.957.736,00	96,33	101,59	Kepala Bidang PP	
	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	OPD				68.606.396,00	30	50.750.000,00	30,00	-	30,00	4.900.000,00	30	5.390.000	30,00	37.235.500	30,00	47.525.500,00	100	93,65		116.131.896,00		#DIV/0!		
	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				68.606.396	1	50.750.000,00	1,00		1,00	4.900.000	1	5.390.000	1,00	37.235.500	1,00	47.525.500	100	93,65		116.131.896,00		#DIV/0!		
	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan	kasus	115	463.259.000,00	100,00	318.897.056	115	199.544.000,00	23	5.261.450,00	31	35.505.250,00	46	26.956.540,00	52	99.942.430,00	152,00	167.665.670,00	132	84,02	232	486.562.726,00	202	105,03		
	2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	100	448.618.000,00	125	318.897.056	100	92.305.000,00	10	5.261.450	30	4.402.450	30	26.956.540	30	25.773.930	100,00	62.394.370	100	67,60		381.291.426,00	100,00	84,99	Kepala UPT	
	2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	10	25.116.635,50	100	0	20	107.239.000,00	0	-	10	31.102.800	20	-	20	74.168.500	0	105.271.300	0	98,17		105.271.300,00	50,00	419,13		
	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	lembaga	10	366.025.000,00	10,00	205.305.814	10	103.085.000,00	10	10.010.550	10	1.205.800	10	11.543.700	10	37.197.250	10	59.957.300	100	58,16	10	265.263.114,00	100,00	72,47		
	2.08.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	angkat Dae	10		100	48.917.800	95	27.420.000,00		0		0		-	40	26.536.300	40	26.536.300	42	96,78		75.454.100,00	40,00	-		DAK; tidak ada target Ren
	2.08.03.2.03.03		Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kab/ kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	orang	100	146.410.000,00	98	156.388.014	100	75.665.000,00	23	10.010.550	41	1.205.800	38	11.543.700	50	10.660.950	152	33.421.000	152	44,17	250	189.809.014,00	250	129,64	Kepala UPT	
	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya	Persen	10%	14.641.000.000,00	77	1.458.098.307	10	1.500.000.000,00	27,25	3.127.500	27,25	118.148.980	27	412.050.400	9,58	822.910.836	9,58	1.356.237.716	96	90,42	0,00	2.814.336.023,00	91,33	19,22	Kepala Bidang PP	
	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan	orang	16	14.641.000.000,00	16	1.458.098.307	16	1.500.000.000,00	16	3.127.500	16	118.148.980	16	412.050.400	23	822.910.836	23	1.356.237.716	144	90,42	16,00	2.814.336.023,00	100,00	19,22		
	2.08.04.2.01.03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	16	14.641.000.000,00	16	1.458.098.307	16	1.500.000.000,00	8	3.127.500	8	118.148.980	8	412.050.400	8	822.910.836	16	1.356.237.716	100	90,42	16	2.814.336.023,00	100,00	19,22		
	2.08.2.14.2.08.5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator Permen‌PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Persen	90	43.923.000,00	0,91	0	70	-	61,25	0	61,25	0	61				61,25	0	88	0,00		-	0,00	-		
	2.08.2.14.2.08.5.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang tersedia	variabel	2	43.923.000,00	2,00	0	2	-		0		0					0	0	0	0,00	2	-	100,00	-		
	2.08.2.14.2.08.5.2.01.2		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	dokumen	1	43.923.000,00	0	0	1	-		0		0					0	0	0	0,00		-		0		
	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	poin	140	636.883.500,00	25,24%	310.474.710	140	430.468.000,00	125,50	93.316.500	125,50	36.377.900	125	115.765.605	152,65	121.784.000	109,04	367.244.005	78	85,31	78	677.718.715,00	55,63	106,41	Kepala Bidang PA	
	2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat	Indikator	12	183.012.500,00	7	310.474.710	8	152.021.000,00	7	24.001.500	7	20.557.900	7	50.917.505	7,00	33.355.000	7,00	128.831.905	88	84,75		439.306.615,00	-	240,04		
	2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	82	109.807.500,00	82	30.340.000	82	152.021.000,00	20	24.001.500	40	20.557.900	22	50.917.505	-	33.355.000	82,00	128.831.905	100	84,75	164	159.171.905,00	200,00	144,96		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.08.2.14.2.08.6.2.01.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	73.205.000,00		0	4	-		-	55	-	55				0	0	0			-		-		
	2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan	jenis	7	453.871.000,00	7	280.134.710	7	278.447.000,00	68	69.315.000	68	15.820.000	68	64.848.100	68,00	88.429.000	68,00	238.412.100	971	85,62		518.546.810,00		114,25		
	2.08.06.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	279.510.000,00	240	102.095.250	100	-	0	-	0	-					0	0	0		240	102.095.250,00	240,0	36,53		
	2.08.06.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	7	133.100.000,00	7	178.039.460	7	278.447.000,00	2	69.315.000,00	2	15.820.000,00	2	64.848.100	7	88.429.000	7	238.412.100	100	85,62	14	416.451.560,00	200,00	312,89		
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan	Persen	100	543.704.353,37	0,52	297.159.252	100	430.769.000,00	20	37.255.417,00	20	114.691.750,00	20	15.760.350,00	83,77	201.126.980,00	84	368.834.497,00	84	85,62	84,30	665.993.749,00	84,30	122,49	Kepala Bidang PA	
	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	lembaga	30	18.071.652,50		49.283.250	30	50.750.000,00	0	0	0	6375000	30	4160000	30,00	37512500	0,00	48.047.500	0	94,67		97.330.750,00	-	538,58		
	2.08.07.2.01.04.		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang			0,00		17	50.750.000,00	0	0	0	6375000	0	4.160.000	17	37.512.500	17,00	48.047.500	100	94,67		48.047.500,00				DAK; tidak ada target Ren
	2.08.07.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	18.071.652,50	0	0	3	-	0	0	0	0				0	0	0	0			-	-	-		
	2.08.07.2.01.01	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang			6	49.283.250	6	-	0	0	0	0					0	0	0		6	49.283.250,00	-			DAK; tidak ada target Renstra
	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	Kasus	100	525.632.700,87	0,89	247.876.002	80	338.419.000,00	19	37.255.417	20	85.416.750	21	11.600.350	31	144.914.480	91,00	279.186.997	114	82,50		527.062.999,00	-	100,27	Kepala UPT	
	2.08.07.2.02.01		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/ kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	365.912.700,87	249	247.876.002	100	210.178.000,00	25	35.807.417	25	31.998.300	25	11.600.350	25	71.985.867	100,00	151.391.934	100	72,03	349	399.267.936,00	349,00	109,12	Kepala UPT	
	2.08.07.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	kasus	20	18.071.652,50	0		20	-	0	0	0	0					0	0	0			-	-	-		
	2.08.07.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	133.100.000,00	0		5	-	0	0	0	0					0	0	0			-	-	-		
	2.08.07.2.02.06		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	anak			0		100	128.241.000,00	25	1.448.000	25	53.418.450	25	-	25	72.928.613	100,00	127.795.063	100	99,65		127.795.063,00		-		
	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan perlindungan khusus	lembaga			1		2	41.600.000,00		0	1	22.900.000,00	1	-	1,00	18.700.000,00	2	41.600.000,00	100	100,00		41.600.000,00	-			DAK; tidak ada target Ren
	2.08.07.2.03.02	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Lembaga	kali			0					0		-				0	0	0	0	0,00		-	-	-		
	2.08.07.2.03.06		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang			0		5	41.600.000,00		0	40	22.900.000,00		-	40	18.700.000	40	41.600.000	800	100,00		41.600.000,00		-		
																									-		-		
																									-		-		
	2,14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERKENCANA																										
	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	Persen	100	43.212.065.975,00	100,00	5.989.982.037,00	100	6.481.033.997,00	100,00	1.226.229.049	100,00	1.870.573.527	100	1.417.174.520	88,89	1.648.783.315	89	6.162.760.411	89	95,09	89,00	12.152.742.448,06	94,50	28,12		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen	5	33.275.000,00	1,00	13.574.123	1	35.950.380,00	1,00	-	1,00	9.542.200	1	4.790.700	1,00	10.590.566	1,00	24.923.466	100	69,33	2,00	38.497.589,00	40,00	115,70		
	2.14.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	26.620.000,00	6	5.405.000	1	10.890.000,00	1	-	1	8.232.200	1	-	1,00	0	1,00	8.232.200	100	75,59	7,00	13.637.200,00	350,00	51,23		
	2.14.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	999.800,00	9	8.169.123	12	25.060.380,00	3	-	3	1.310.000	3	4.790.700	3,00	10.590.566	12,00	16.691.266	100	66,60	21,00	24.860.389,00	175,00	2.486,54		
	2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	bulan	12	4.603.922.000,00	1,94	4.141.986.000,00	12	4.066.998.946,00	3,00	910.358.566	6,00	1.239.021.940	9	878.816.080	12,00	889.067.881	3,00	3.917.264.467	25	96,32	4,94	8.059.250.467,06	41,18	175,05		
	2.14.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	26	4.603.922.000,00	27	4.141.986.000	26	4.066.998.946,00	23	910.358.566	23	1.239.021.940	23	878.816.080	23	889.067.881	23	3.917.264.467	88	96,32	50,00	8.059.250.467,06	192,31	175,05		
	2.14.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	orang	55	4.980.000,00	1,00	3.720.000	55	-	-	0	-	0		-			0,00	0,00	0	0,00	1,00	3.720.000,00	1,82	74,70		
	2.14.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	55	4.980.000,00	55	3.720.000	55		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	55,00	3.720.000,00	100,00	74,70		
	2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	jenis	15	224.423.850,00	15,00	313.127.364	30	270.167.308,00	0,000	-	10,000	155.629.117	10	29.112.367	10	35.676.180	30,00	220.417.664	100	81,59	45,00	533.545.028,00	300,00	237,74		
	2.14.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	30	3.999.624,00	11	60.107.000	15	2.938.375,00	0	0	0	0	15	2.823.500		0	15,00	2.823.500	100	96,09	26,00	62.930.500,00	86,67	1.573,41		
	2.14.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15	19.773.000,00	10	55.435.818	15		0	0	0	0				0	-	0	0	0,00	10,00	55.435.818,00	66,67	280,36		
	2.14.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	99.985.621,00	8	111.252.991	10	136.726.153,00	0	-	10	123.112.400	10	1.640.000		11.695.900	10,00	136.448.300	100	99,80	18,00	247.701.291,00	180,00	247,74		
	2.14.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	8	9.232.605,00	6	4.779.900	8	6.378.780,00	0	-	4	526.000	4	1.390.000		2.195.000	8,00	4.111.000	100	64,45	14,00	8.890.900,00	175,00	96,30		
	2.14.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1900	8.460.000,00	1422	5.670.000	0		0	-	0	-				0	-	0	0	0,00	1422,00	5.670.000,00	74,84	67,02		
	2.14.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	600	82.973.000,00	245	75.881.655	600	124.124.000,00	100	-	200	31.990.717	200	23.258.867	100	21.785.280	600,00	77.034.864	100	62,06	845,00	152.916.519,00	140,83	184,30		
	2.14.01.2.06.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang	orang	46	1.258.750.000,00	93	1.380.350.000	46	1.861.674.000,00	46,00	309.020.483	46,00	450.109.070	46	458.456.073	46	602.753.538	46,00	1.820.339.164	100	97,78	46,00	3.200.689.164,00	100,00	254,28		
	2.14.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	109.200.000,00	9	152.040.000	3	143.916.000,00	3	24.808.923	3	22.671.690	3	27.301.833	3	33.212.858	3	107.995.304	100	75,04	12,00	260.035.304,00	400,00	238,13		
	2.14.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	43	1.149.550.000,00	7	1.228.310.000	43	1.717.758.000,00	43	284.211.560	43	427.437.380	43	431.154.240	43	569.540.680	43	1.712.343.860	100	99,68	50,00	2.940.653.860,00	116,28	255,81		
	2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	jenis	4	41.242.290,00	4,00	137.224.550	4	246.243.363,00	4,00	6.850.000	4,00	16.271.200	4	45.999.300	4	110.695.150	4,00	179.815.650	100	73,02	8,00	317.040.200,00	200,00	768,73		
	2.14.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	29.624.025,00	12	26.575.000	1	76.083.000,00	1	3.300.000	1	6.600.000		13.120.000		30.800.500	1	53.820.500	100	70,74	13,00	80.395.500,00	325,00	271,39		
	2.14.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	24.911.000,00	8	83.869.550	30	86.930.000,00	30	3.550.000	30	9.671.200		20.297.300		48.031.650	30	81.550.150	100	93,81	38,00	165.419.700,00	1.266,67	664,04		
	2.14.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direlihara/Direhabilitasi	gedung	5	26.183.724,00	3	2.000.000	1	34.155.363,00	0	0	0	0		-		0	0	0	0	0,00	3,00	2.000.000,00	60,00	7,64		
	2.14.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gendung kantor	sarana	5	26.183.724,00	9	24.780.000	5	49.075.000,00	0	-	0	-	5	12.582.000	5	31.863.000	5	44.445.000	100	90,57	14,00	69.225.000,00	280,00	264,38		
	2.14.02	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	persen	100	1624713366	100	538.876.000	100	461.400.000,00	100	-	100	1.320.000	100	71.690.500	100	28.089.000	100	399.786.109	100	86,64632	200	938.662.109,00	100	57,77401286	Kepala Bidang Dalduk dan KB	
	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK	unit	153	355.254.667,00	153	35.340.000	153	112.200.000,00	153	0	153	1.320.000,00	153	40.251.500,00	153	28.089.000,00	153	69.660.500,00	100	62,09	153,00	105.000.500,00	100,00	29,56		
	2.14.02.2.01.07		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	dokumen	6	355.254.667,00	1	35.340.000	1	32.200.000,00	0	0	0	1.320.000,00		1.370.000		420.000	1	3.110.000	100	9,66	2,00	38.450.000,00	33,33	10,82		
	2.14.02.2.01.023		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan			0		4	80.000.000,00	0	0	0	0	4	38.881.500	4	27.669.000	4	66.550.500	100	83,19		66.550.500,00		-		
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data	dokumen	58	1.269.458.699,00	43,17	503.536.000	1	349.200.000,00	0	-	0	-	1	31.439.000,00			1,00	330.125.609,00	100	94,54	44,17	833.661.609,00	76,16	65,67		
	2.14.2.2.02.3		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	300	213.152.878,00	0		50	-	0	0	0	0					0	0	0	0,00	0,00	-	-	-		
	2.14.02.2.02.09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem	laporan	17	69.999.872,00	12	85.800.000	18	60.000.000,00	0	-	8	14.126.609	10	19.139.000	18	14.460.000	-	47.725.609	0	79,54268	12,00	133.525.609,00	70,59	190,75		
	2.14.02.2.02.11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	dokumen	6	986.305.949,00	29	50.536.000	1	-	0	-	0	-					0	0	0	0,00	29,00	50.536.000,00	29,00	5,12		
	2.14.02.2.02.12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan			18	280.800.000	18	75.600.000,00	0	-	12	21.500.000	8	12.300.000		36.500.000	-	70.300.000	0	92,99	18,00	351.100.000,00	-	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
	2.14.02.2.02.13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pemgendalian lapangan dan pelayanan	dokumen			18	86.400.000	12	213.600.000,00	3	-	3	-	3		3	212.100.000	3,00	212.100.000	25	99,30	21,00	298.500.000,00	0	-		
	2.14.03	Peningkatan peran dan fungsi keharga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need ber-KB	persen	0,085	57985125711	87	5.101.834.020	9,6	5.335.245.000	9,55	85.925.591	9,55	563.056.887	10	1.392.581.037	9,18	3.325.317.678	9	5.366.881.193	105	100,593	9	10.468.715.213	105	18,05413903	Kepala Bidang Dalduk dan KB	
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	alai penyuluh	18	22.531.646.185,32	18,000	1.061.899.920	18	1.173.000.000,00	18,00	52.705.591	18,00	258.126.887	18	303.718.237	18	480.534.578	18,00	1.095.085.293	100	93,36	18,00	2.156.985.213,00	100,00	9,57		
	2.14.03.2.01.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	164	355.254.970,00	64	120.000.000	32		32	0	32	0	32			0	32	0	100	0,00	96,00	120.000.000,00	58,54	33,78		
	2.14.03.2.01.014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi			-		32	200.000.000,00	32	33.802.000	32	91.093.300		247.000		58.692.000	32	183.834.300	100	92		183.834.300		#DIV/0!		
	2.14.3.2.01.13		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	6	100.000.000,00	3	0	18		1		1					0	1	0	6	0,00	4,00	-	66,67	-		
	2.09.2.14.3.2.01.3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	lembaga	18	9.667.843.137,32	54	0	18		18	0	18	0				0	18	0	100	0,00	72,00	-	400,00	-		
	2.14.03.2.01.04		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	18	353.200.000,00	4	150.000.000	18	100.000.000,00	1	-	1	-				62.027.910	1	62.027.910	6	62,03	5,00	212.027.910,00	27,78	60,03		
	2.14.03.2.01.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	90	1.264.800.000,00	19	234.000.000	18	270.000.000,00	1	-	1	53.969.200		76.052.400		138.481.597	1	268.503.197	6	99,45	20,00	502.503.197,00	a	39,73		
	2.14.03.2.01.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	108	12.508.548.078,00	18	477.899.920	18	603.000.000,00	18	18.903.591	18	113.064.387	18	227.418.837	18	221.333.071	18	580.719.886	100	96,31	36,00	1.058.619.806,00	33,33	8,46		
	2.14.03.2.01.08		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	dokumen	18	200.000.000,00	4	80.000.000	18		2	0	2	0					0	0	0	0,00	4,00	80.000.000,00	22,22	40,00		
	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang te	alai penyuluh	18	6.677.657.184,00	2,00	968.000.100	18	1.569.840.000,00	18	33.220.000	18	218.240.000		777.840.000		449.240.000	18	1.478.540.000	100	94,18	20,00	2.446.540.100,00		36,64		
	2.14.03.2.02.01		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	-	0	263.120.100	18	630.000.000,00	0	-	0	-	18	630.000.000		0	0	630.000.000	0	0,00	0,00	893.120.100,00	-			DAK; tidak ada target Renstra
	2.14.03.2.02.04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	356	6.677.657.184,00	356	704.880.000	356	939.840.000,00	356	33.220.000	356	218.240.000	356	147.840.000	356	449.240.000	356	848.540.000	100	90,29	712,00	1.553.420.000,00	200,00	23,26		
	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani	akseptor	15900	20.943.160.101,30	5110	2.818.936.000	2700	2.575.155.000,00	1019	-	1117	86.690.000	1989	311.022.800	894	1.708.200.500	5.019	2.105.913.300	186	81,78	10129,00	4.924.849.300,00	63,70	23,52		
	2.14.03.2.03.01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	18	822.273.223,00	18	51.300.000	18		18	0	18	0				0	18	0	100	0,00	36,00	51.300.000,00	200,00	6,24		
	2.14.03.2.03.03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	15000	11.837.595.785,00	4829	1.412.082.000	2500	1.266.253.000,00	1019	0	1117	86.690.000,00	1989	311.022.800	894	426.780.500	5.019	824.493.300	201	65,11	9848,00	2.236.575.300,00	65,65	18,89		
	2.14.03.2.03.06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	18	8.283.291.093,30	28	1.327.654.000	18	1.308.902.000,00	0	0	0	0				1.281.420.000	0	1.281.420.000	0	97,90	28,00	2.609.074.000,00	155,56	31,50		
	2.14.03.2.03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	55	74.400.000,00	72	27.900.000	55		62	-	62	-				0	0	0	0	0,00	72,00	27.900.000,00	130,91	37,50		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yg berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya	kampung KB	53	7.832.662.240,00	0,976	252.998.000	53	17.250.000,00	46	-	46	-	46	-	356	687.342.600	356	687.342.600	672	3984,59	356,98	940.340.600,00	673,54	12,01		
	2.14.03.2.04.01		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Ber- KB	Organisasi		-	16	155.388.000	16		0	-	0	-					0	0	0	0,00	16,00	155.388.000,00	-	-		
	2.14.03.2.04.02		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen		-	166	0	166	17.250.000,00	0	0	0	0			356	10.000.000	356	10.000.000	214	57,97	522,00	10.000.000,00	-	-		
	2.14.03.2.04.03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	53	3.657.000.000,00	166	97.610.000	117		0	0	0	0				677.342.600	0	677.342.600	0	0,00	166,00	774.952.600,00	313,21	21,19		
																									-				
																									-				
	2.14.04	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	persen	11	29615416925	0,9376671	8.591.462.797,00	9	9.193.299.980,00	27,25	-	27,25	2.119.161.400		2.792.769.300	10,11	4.122.657.000	10	9.034.587.700	112	98,274	11,0476671	17.626.050.497,00		59,51646921	Kepala Bidang KS dan Advokasi	
	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	kelompok	7	29.615.416.925,32	7,000	8.591.462.797	7	2.830.299.980,00	7,00	-	7,00	670.871.400	7	894.689.300	7	1.109.757.000	7	2.675.317.700	100	94,52	14,00	11.266.780.497,00	200,00	38,04		
	2.14.04.2.01.02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	unit	18	1.421.020.000,00	18	360.000.000	0		0	-	0	-		-		0	0	0	0	0,00	18,00	360.000.000,00	100,00	25,33		
	2.14.04.2.01.03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	374	355.254.900,00	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-		
	2.14.04.2.01.04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	748	710.510.000,00	187	0	0		187	-	187	-				0	187	0	0	0,00	374,00	-	50,00	-		
	2.14.04.2.01.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	2920	24.034.381.130,32	2920	8.175.581.000	0		2920	-	2920	-				0	2920	0	0	0,00	5840,00	8.175.581.000,00	200,00	34,02		
	2.14.04.2.01.06		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan biaya operasional.	kelompok	715	1.850.878.550,00	90,00	18.594.000	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	90,00	18.594.000,00	12,59	1,00		
	2.14.04.2.01.07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	30	532.882.500,00	5	22.960.297	5		0	0	0	0				0	0	0	0	0,00	5,00	22.960.297,00	16,67	4,31		
	2.14.04.2.01.08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	6	710.489.845,00	0	0	5	98.190.000,00	0	0	3	49.305.000,00	2	46.635.000		0	5	95.940.000	100	0,00	5,00	95.940.000,00	83,33	13,50		
	2.14.04.2.01.016		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan			0		5	48.000.000,00					2	6.875.000	3	9.720.600	5	16.595.600	100	34,57		16.595.600,00	-	-		
	2.14.04.2.01.018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit			0		18	300.000.000,00				-	18	232.750.000		0	18	232.750.000	100	77,58		232.750.000,00		-		
	2.14.04.2.01.024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang			0		2920	2.282.688.000,00			2920	616.166.400,00	2920	574.294.800		1.064.846.400	0	2.255.307.600	0	98,80		2.255.307.600,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.14.04.2.01.026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahterraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok			0		715	101.421.980,00			192,00	5.400.000,00	277	34.134.500	246	35.190.000	715,00	74.724.500	100	73,68		74.724.500,00				
	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile	Desa / Kelurahan			0		356	6.363.000.000,00		0	356	1.448.290.000,00	356	1.898.080.000,00	356	3.012.900.000,00	356	6.359.270.000,00	100	99,94		6.359.270.000,00				
	2.14.04.2.02.05		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan			0		18	3.030.000.000,00			6	784.000.000,00	6	899.500.000	6	1.346.400.000	18	3.029.900.000	100	100,00		3.029.900.000,00				
	2.14.04.2.02.06		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Ketahanan Dokumen Keluarga Hasil Melalui Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan			0		18	3.333.000.000,00			6	664.290.000,00	6	998.580.000	6	1.666.500.000	18	3.329.370.000	100	99,89		3.329.370.000,00				
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																													
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		114,83	95,74			102,01	263,02		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		ST	ST			ST	ST		
	DINAS PERHUBUNGAN																												
-			PERHUBUNGAN				450.939.875.594,00		115.204.700.043,21		70.327.454.107,00		11.686.619.733,86		16.192.477.374,15		15.911.190.215,12		17.002.695.617,98		60.792.982.941,11				175.997.682.984,32				
			DINAS PERHUBUNGAN				450.939.875.594,00		115.204.700.043,21		70.327.454.107,00		11.686.619.733,86		16.192.477.374,15		15.911.190.215,12		17.002.695.617,98	79,7	60.792.982.941,11								
	2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD Dinas Perhubungan	%	100	253.346.939.142,00	100	68.627.745.447,21	100	56.470.618.787,00	25	11.328.119.284	25	12.912.175.014	25	12.214.885.237	25	13.367.994.538	100	49.823.174.073,11	100,00	88,23	100	118.450.919.520,32	100,00	46,75		
	2 15 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	658.955.602,00	100	293.539.700,00	100	99.999.471,00	25	-	25	38.761.000,00	25	24.082.000,00	25	36.260.000,00	100	99.103.000,00	0,00	0,00	100	392.642.700,00	100,00	59,59	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	5	123.957.000,00	5	115.179.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5	115.179.540,00	100,00	92,92	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	276.441.165,00	-	31.174.400,00	2	49.074.851,00	-	-	1	20.127.000	1	12.090.000	-	16.170.000	2	48.387.000,00	100,00	98,60	2	79.561.400,00	25,00	28,78	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun *(dokumen)*	Dokumen	3	14.250.000,00	3	40.344.660,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3	40.344.660,00	100,00	283,12	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	64.417.500,00	-	33.110.700,00	3	50.924.620,00	2	-	-	18.634.000	-	11.992.000	1	20.090.000	3	50.716.000,00	100,00	99,59	3	83.826.700,00	25,00	130,13	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja yang tersusun *(dokumen)*	Dokumen	8	93.999.937,00	8	73.730.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	73.730.400,00	100,00	78,44	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	85.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.669.568.590,00		13.808.886.572,00	100	7.429.787.958,00	25	1.585.044.954,86	25	2.326.108.311,15	25	1.627.034.668,12	25	1.606.134.647,98	100	7.144.322.582,11	0,00	-						
	2 15 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan *(orang)*	Orang	57	13.154.908.898,00	57	13.808.886.572,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	13.808.886.572,00	98,25	104,97	Sekretariat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	57	27.514.659.692,00	0	-	57	7.429.787.958	57	1.585.044.955	57	2.326.108.311	57	1.627.034.668	57	1.606.134.647,98	57	7.144.322.582,11	100,00	96,16	57	7.144.322.582,11	100,00	25,97	Sekretariat	
	2 15 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1.840.588.555,00	241	461.107.600,00		-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	241	461.107.600,00	241,00	25,05		
	2 15 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas beserta atributnya *(orang)*	Orang	341	404.639.950,00	241	461.107.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	241	461.107.600,00	70,67	113,96	Sekretariat	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	684	1.435.948.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	7.866.861.366,00	100	2.801.911.015,00	100	1.110.416.960,00	25	14.045.520,00	25	206.532.837,00		236.321.406,00		355.753.689,00	50	812.653.452,00	0,00	0,00	150	3.614.564.467,00	150,00	45,95		
	2 15 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan *(unit)*	unit	28	160.499.900,00	28	149.059.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	28	149.059.750,00	100,00	92,87	Sekretariat	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	56	436.486.050,00	-	61.424.500	4	110.059.277	-	-	1	14.624.000	1	8.817.000	2	5.397.500	4	28.838.500,00	100,00	26,20	4	90.263.000,00	7,14	20,68	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan *(unit)*	unit	28	345.999.874,00	28	278.760.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	28	278.760.620,00	100,00	80,57	Sekretariat	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	56	796.395.600,00	-	147.954.682	4	158.015.146	-	-	1	3.645.900	1	28.928.000	2	51.461.000	4	84.034.900,00	100,00	53,18	4	231.989.582,00	7,14	29,13	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan *(unit)*	unit	26	152.649.836,00	26	162.721.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	26	162.721.610,00	100,00	106,60	Sekretariat	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	52	421.936.515,00	-	22.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	22.067.000,00	0,00	5,23	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi terhadap kebutuhan Makanan Minuman Kantor *(bulan)*	bulan	24	224.149.600,00	24	253.794.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	253.794.440,00	100,00	113,23	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	606.230.625,00	-	87.500.000	12	124.689.800	3	-	-	23.533.740	6	21.939.600	3	47.158.500	12	92.631.840,00	100,00	74,29	12	180.131.840,00	25,00	29,71	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi terhadap kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan *(bulan)*	bulan	24	287.750.050,00	12	286.362.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	286.362.145,00	50,00	99,52	Sekretariat	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	703.227.525,00	-	136.843.000	2	136.837.010	-	-	2	135.929.200	-	-	-	-	2	135.929.200,00	100,00	99,34	2	272.772.200,00	4,17	38,79	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Bacaan	Fasilitasi terhadap kebutuhan Bahan Bacaan / Surat Kabar *(bulan)*	bulan	24	55.875.000,00	24	24.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	24.994.000,00	100,00	44,73	Sekretariat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2 15 01 2.06 06		dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	48	157.619.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi terhadap kebutuhan ATK Kantor *(bulan)*	bulan	24	330.999.988,00	15	330.153.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	15	330.153.680,00	62,50	99,74	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	48	872.972.100,00	-	147.256.900	2	158.196.085	-	-	-	1.085.000	2	113.440.500	-	42.058.765	2	156.584.265,00	100,00	98,98	2	303.841.165,00	4,17	34,81	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Rapat koordinasi *(bulan)*	bulan	24	439.999.870,00	24	293.107.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	293.107.838,00	100,00	66,62	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	969.969.000,00	-	126.803.012	12	186.287.000	3	-	3	11.449.500	3	46.917.000	3	113.862.808	12	172.229.308,00	100,00	92,45	12	299.032.320,00	25,00	30,83	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang disusun	bulan	24	439.999.870,00	24	293.107.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	293.107.838,00	100,00	66,62	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48	464.100.000,00	-	-	1	236.332.642	-	14.045.520	-	16.265.497	-	16.279.306	1	95.815.116	1	142.405.439,00	100,00	60,26	1	142.405.439,00	2,08	30,68	Sekretariat	
	1 15 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.767.660.598,00	100	4.322.956.617,00	-	-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	100	4.322.956.617,00	100,00	90,67		
	2 15 01 2.07 10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	unit	1	280.000.000	1	343.044.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	343.044.945,00	100,00	122,52	Sekretariat	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	4	2.834.496.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	25	587.474.943	25	3.979.911.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25	3.979.911.672,00	100,00	677,46	Sekretariat	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan	48	1.065.689.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	1 15 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	199.125.414.443,00	100	49.793.003.955,14	100	46.829.439.498,00	25	9.724.454.209,00	25	10.270.735.119,00	25	10.264.442.394	25	10.922.861.385	100	41.182.493.107,00	0,00	0,00	200	90.975.497.062,14	200,00	45,69		
	2 15 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitasi terhadap proses Surat menyurat kedinasan *(bulan)*	bulan	24	7.105.000,00	24	777.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	777.000,00	100,00	10,94	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	20.369.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasi terhadap Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *(bulan)*	bulan	12	327.500.000,00	12	334.675.667	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	334.675.667,00	100,00	102,19	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	175.000.000.000,00	-	36.687.429.013	12	41.071.250.723	3	8.861.066.959	3	8.885.921.019	3	8.890.254.644	3	8.759.539.735	12	35.396.782.357,00	100,00	86,18	12	72.084.211.370,00	25,00	41,19	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fasilitasi terhadap JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	bulan	12	346.650.000,00	12	136.383.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	136.383.600,00	100,00	39,34	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	872.972.100,00	-	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	37.500.000,00	0,00	4,30	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN yang di kontrak *(orang)*	Orang	236	6.835.883.794,00	236	7.292.457.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	236	7.292.457.220,14	100,00	106,68	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	472	15.714.934.200,00	-	5.303.781.455	12	5.758.188.775	-	863.387.250	6	1.384.814.100	3	1.374.187.750	3	2.163.321.650	12	5.785.710.750,00	100,00	100,48	12	11.089.492.205,00	2,54	70,57	Sekretariat	
	1 15 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.026.139.141,00	100	1.930.404.205,07	100	1.000.974.900,00	25	4.574.600,00	25	70.037.747,00	25	63.004.769	25	446.984.816	100	584.601.932,00	0,00	0,00	200		200,00			
	2 15 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara *(unit)*	Unit	10	266.000.000,00	10	257.094.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	10	257.094.122,00	100,00	96,65	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48	800.000.000,00	-	147.040.055	5	194.240.000	-	4.496.900	1	43.848.773	2	29.911.720	2	106.646.278	5	184.903.671,00	100,00	95,19	5	331.943.726,00	10,42	41,49	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional yang dipelihara *(unit)*	Unit	24	442.500.000,00	24	472.333.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	472.333.991,00	100,00	106,74	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	1.027.001.953,00	-	212.296.313	18	180.760.000	-	77.700	5	26.188.974	8	33.093.049	5	110.016.313	18	169.376.036,00	100,00	93,70	18	381.672.349,00	32,14	37,16	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	Unit	1	19.000.000,00	1	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	19.000.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	125.000.000,00	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	800.000,00	0,00	0,64	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhabilitasi *(unit)*	Unit	2	872.853.360,00	2	821.839.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	821.839.724,07	100,00	94,16	Sekretariat	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi / Direhabilitasi	Unit	4	1.473.783.828,00	-	-	1	625.974.900	-	-	-	-	-	-	1	230.322.225	1	230.322.225,00	0,00	0,00	1	230.322.225,00	25,00	15,63	Sekretariat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	83,90			75,92	80,95		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
	2 15 02	Persentase Prasarana Perhubungan yang laik fungsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tersedianya Fasilitas Keselamatan jalan	%	100	181.572.753.782,00	85	42.340.499.744,00	90	12.511.925.834,00	-	308.078.600,00	-	3.115.946.560,00	-	3.438.242.428,00	90	3.106.880.160,00	90	9.969.147.748,00	100,00	79,68	175	52.309.647.492,00	175,00	28,81		
				Tersedianya Angkutan Umum dalam Travek	%	92,28		85,91		88,59		-		-				88,59		89		100,00	79,68	175		189,10	21,78		
				Persentase Kendaraan Lulus Uji	%	100		100		100		25		-				100		125		125,00	79,68	225		225,00	21,78		
				Terlaksanakannya Layanan Tertib Lalu Lintas	%	100		87,5		92,5		-		-		-		93		93		100,00	79,68	180		180,00	21,78		
				Terlaksananya Layanan Rekayasa Lalu Lintas	%	100		100		100		-		-		-		100		100		100,00	79,68	200		200,00	21,78		
				Tersedianya Tempat Parkir Khusus	%	100		66,67		75		-		-		-		75		75		100,00	79,68	142		141,67	21,78		
	2 15 02 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	%	100	109.282.535.427,00	100	23.378.864.979,00	100	4.518.764.605,00	25	127.236.000,00	25	1.771.495.150,00	25	1.729.148.450,00	25	306.162.590,00	100	3.934.042.190,00	0,00	0,00	200	27.312.907.169,00	200,00	24,99		
	2 15 02 2.02 01		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang disediakan *(unit)*	Unit	6	1.085.362.600,00	1	188.372.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	188.372.400,00	16,67	17,36	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	6	3.581.467.800,00	1	188.372.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	188.372.400,00	16,67	5,26	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
			Penyediaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) yang disediakan *(unit)*	Unit	1.253	17.677.823.510,00	300	6.176.930.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	300	6.176.930.374,00	23,94	34,94	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2 15 02 2.02 02		Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1.253	51.139.904.757,00	-	3.362.845.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	3.362.845.773,00	0,00	6,58	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.02 03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang dipelihara *(unit)*	Unit	39	272.499.920,00	12	173.324.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	173.324.350,00	30,77	63,61	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	39	579.598.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.02 04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terselihara	Unit	2.000	10.477.500.000,00	500	10.407.419.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	500	10.407.419.702,00	25,00	99,33	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2.000	24.468.378.000,00	-	2.881.599.980	350	4.518.764.605	10	127.236.000	200	1.771.495.150	50	1.729.148.450	90	306.162.590	350	3.934.042.190,00	100,00	87,06	350	6.815.642.170,00	17,50	27,85	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Type C yang dikelola	unit	3	8.280.460.000,00	3	1.379.391.198,00	3	910.120.000,00		-	-	32.430.000,00		63.933.000,00	3	335.735.000,00	3	432.098.000,00	0,00	0,00	6	1.811.489.198,00	200,00	21,88		
	2 15 02 2.03 03		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Fasilitas Terminal yang dikembangkan	Unit	15	399.000.000,00	6	299.403.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	299.403.680,00	40,00	75,04	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Penyembanaan	Unit	15	2.445.000.000,00	-	339.179.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	339.179.322,00	0,00	13,87	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03 04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal yang dipelihara *(unit)*	Unit	16	1.070.000.000,00	6	571.153.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	571.153.303,00	37,50	53,38	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	16	2.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03 05		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM terminal yang difasilitasi *(orang)*	Orang	45	153.100.000,00	18	138.399.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	18	138.399.893,00	40,00	90,40	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kanasitasnya	Orang	45	633.000.000,00	-	31.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	31.255.000,00	0,00	4,94	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.03 11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	unit	3	1.380.360.000,00	-	-	3	910.120.000	-	-	-	32.430.000	-	63.933.000	3	335.735.000	3	432.098.000,00	100,00	47,48	3	432.098.000,00	100,00	31,30	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2.15 02 2 04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir	%	100	27.776.914.993,00	100	6.427.377.245,00	100	3.397.689.180,00	25	79.858.900,00	25	446.439.970,00	25	896.965.200,00	25	1.328.280.900,00	100	2.751.544.970,00	0,00	0,00	200	9.178.922.215,00	200,00	33,05		
	2.15 02 2 04 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Petugas Parkir	Laporan	12	3.985.252.473,00	4	328.158.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4	328.158.925,00	33,33	8,23	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2.15 02 2 04 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Parkir *(bulan)*	Laporan	72	2.850.000.000,00	12	2.230.082.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	2.230.082.015,00	16,67	78,25	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	72	20.941.662.520,00	-	3.869.136.305	12	3.397.689.180	3	79.858.900	3	446.439.970	3	896.965.200	3	1.328.280.900	12	2.751.544.970,00	100,00	80,98	12	6.620.681.275,00	16,67	31,61	Tata Kelola Prasarana Perhubungan	
	2 15 02 2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100	3.271.232.217,00	100	1.395.013.210,00	100	1.110.433.550,00	25	-	25	107.278.900,00	25	305.545.888	25	246.544.300	100	659.369.088,00	0,00	0,00	200	2.054.382.298,00	200,00	62,80		
	2 15 02 2.05 04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Uji Kendaraan Bermotor yang disediakan *(unit)*	Dokumen	39.400	185.000.000,00	19700	492.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	19.700	492.500.000,00	50,00	266,22	UPT PKB	
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	39.400	500.000.000,00	-	250.000.000	4.000	100.035.000	-	-	1.000	25.000.000	1.000	25.000.000	2.000	50.000.000	4.000	100.000.000,00	100,00	99,97	4.000	350.000.000,00	10,15	70,00	UPT PKB	
	2 15 02 2.05 07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara *(unit)*	Unit	22	506.232.217,00	11	476.082.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	11	476.082.010,00	50,00	94,04	UPT PKB	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	22	2.080.000.000,00	-	176.431.200	10	792.090.550	-	-	2	78.078.900	6	261.660.000	2	59.926.500	10	399.665.400,00	100,00	50,46	10	576.096.600,00	45,45	27,70	UPT PKB	
	2 15 02 2.05 10		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian kendaraan Bermotor *(bulan)*	Unit	22	226.529.016,00	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	11	-	50,00	-	UPT PKB	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	22	590.000.000,00	-	-	12	218.308.000	3	-	3	4.200.000	3	18.885.888	3	136.617.800	12	159.703.688,00	100,00	73,16	12	159.703.688,00	54,55	27,07	UPT PKB	
	2 15 02 2.06	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dengan Nilai VC Ratio ≤ 0,75	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	24.385.474.322,00	100	6.336.770.585,00	100	1.350.118.840,00	25	97.402.860,00	25	170.933.800,00	25	383.723.240,00	25	526.517.630,00	100	1.178.577.530,00	0,00	0,00	200	7.515.348.115,00	200,00	30,82		
	2 15 02 2.06 01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang disusun *(dokumen)*	Laporan	23	592.499.744,00	4	297.212.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4	297.212.200,00	17,39	50,16	Lalu Lintas	
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	23	1.825.000.000,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas eselamatan lalu lintas yang dirusang	Unit	45	4.200.000.000,00		2.244.131.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	2.244.131.274,00	0,00	53,43	Lalu Lintas	
				Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	45	13.350.612.700,00	-	672.008.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	672.008.280,00	0,00	5,03	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang difasilitasi *(orang)*	Laporan	250	1.214.383.175,00		2.503.743.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	2.503.743.581,00	0,00	206,17	Lalu Lintas	
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	250	3.167.978.703,00	-	567.650.250	12	730.119.000	3	97.402.860	3	162.736.600	3	163.373.240	3	255.895.630	12	679.408.330,00	100,00	93,05	12	1.247.058.580,00	4,80	39,36	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 05		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	250	35.000.000,00		30.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	30.325.000,00	0,00	86,64	Lalu Lintas	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	250	-	-	21.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	21.700.000,00	0,00	-	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 16		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Laporan	250	35.000.000,00		30.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	30.325.000,00	0,00	86,64	Lalu Lintas	
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Laporan	250	3.099.999.200,00	-	-	9	619.999.840	-	-	-	8.197.200	6	220.350.000	3	270.622.000	9	499.169.200,00	100,00	80,51	9	499.169.200,00	3,60	16,10	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	%	100	1.358.850.200,00	100	678.199.740,00	100	245.339.583,00	25	2.345.000,00	25	9.914.990,00	25	48.550.650,00	25	108.442.760,00	100	169.253.400,00	0,00	0,00	200	847.453.140,00	200,00	62,37		
	2 15 02 2.08 04		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemudi yang Mengikuti Kegiatan Abdi Yasa Teladan (orang)	Laporan	55	86.299.500,00	50	61.332.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	61.332.800	-	71,07		-
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	55	295.800.500,00	-	-	12	49.841.683	3	-	-	-	3	35.526.600,00	6	7.917.000,00	12	43.443.600,00	100,00	0,00	12	43.443.600,00	21,82	14,69	Angkutan	
	2 15 02 2.08 05		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan Perusahaan	Jumlah Pengemudi yang mengikuti Peningkatan SDM Pengemudi	Laporan	96	-		308.433.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	308.433.470,00	0,00	-	Angkutan	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	96	390.256.500,00		308.433.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	308.433.470,00	0,00	79,03	Angkutan	
	2 15 02 2.08 07		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	Laporan	96	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
				Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	96	586.493.700,00		-	12	195.497.900	3	2.345.000	-	9.914.990	3	13.024.050	6	100.525.760	12	125.809.800,00	100,00	64,35	12	125.809.800,00	12,50	21,45	Angkutan	
	2 15 02 2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	%	100	1.830.361.380,00	100	-	100	610.120.460,00	25	-	25	553.389.000,00	25	-	25	18.949.000,00	100	572.338.000,00	0,00	0,00	200	572.338.000,00	200,00	31,27		
	2 15 02 2.09 03		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Unit	55	-	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-		
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	55	1.830.361.380,00	-	-	87	610.120.460	50	-	20	553.389.000	10	-	7	18.949.000,00	87	572.338.000,00	100,00	93,81	87	572.338.000,00	158,18	31,27	Angkutan	
	02.15.02.2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk PelayananAngkutan Perkotaan	%	100	1.197.099.986,00	100	414.461.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	414.461.440,00	100,00	34,62	Angkutan	
	02.15.02.2.10.01		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Layanan Trayek Angkutan Umum Yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	11	438.099.986,00	5	414.461.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00					Angkutan	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	11	759.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00					Angkutan	
	1 15 02 2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek	%	100	4.189.825.257,00	100	2.330.421.347,00	100	369.339.616,00	25	1.235.840,00	25	24.064.750,00	25	10.376.000,00	25	236.247.980,00	100	271.924.570,00	0,00	0,00	200	2.602.345.917,00	200,00	62,11		
	2 15 02 2.16 03		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah Pelaksanaan Operasional Tertib Angkutan	Laporan	500	1.234.425.257,00		1.847.170.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1.847.170.493,00	0,00	149,64	Angkutan	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	2.955.400.000,00	-	483.250.854	12	369.339.616	3	1.235.840	3	24.064.750	3	10.376.000	3	236.247.980	12	271.924.570,00	100,00	73,62	12	755.175.424,00	2,40	25,55	Angkutan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	70,37			68,30	63,87		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Rendah		
	2 15 03	Ketersediaan dan aksesbilitas trayek Angkutan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan ASDP	%	100	9.645.908.392,00	75	2.181.332.818,00	75	970.915.364,00	-	50.421.850,00	-	83.715.800,00	-	181.303.550,00	75	349.760.600,00	75	665.201.800,00	100,00	68,51	150	2.846.534.618,00	150,00	29,51		
	2 15 03 2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Fasilitasi terhadap Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan ASDP	%	100	271.879.688,00	100	67.240.827,00	-	-		-		-		-		-		-	0,00	0,00	100	67.240.827,00	100,00	24,73		
	2 15 03 2.03 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Operator Angkutan penyeberangan yang berizin (Orang)	Dokumen	3	133.000.000,00	1	42.940.827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	42.940.827,00	33,33	32,29	Angkutan	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	138.879.688,00	-	24.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	24.300.000,00	0,00	17,50	Angkutan	
	2 15 03 2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	691.273.176,00	100	80.103.150,00		-		-		-		-		-		-	0,00	0,00	100	80.103.150,00	100,00	11,59		
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang tersusun (Aplikasi)	Laporan	8	157.700.000,00	2	80.103.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	80.103.150,00	25,00	50,79	Angkutan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
			Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	8	533.573.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
	2 15 03 2.06 01																												
	2 15 03 2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	7.003.787.956,00	100	1.469.380.730,00	100	636.559.550,00	25	40.701.850,00	25	80.115.800,00	25	170.503.550,00	25	308.182.600,00	100	599.503.800,00	0,00	0,00	200	2.068.884.530,00	200,00	29,54		
	2 15 03 2.07 01		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Angkutan Penyeberangan Berbasis Aktual Data yang disusun *(Antiksis)*	Laporan	3	130.512.822,00	1	59.351.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	59.351.910,00	33,33	45,48	Angkutan	
				Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	54.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
	2 15 03 2.07 02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Petugas Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan *(bulan)*	Laporan	72	634.628.178,00	24	596.493.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	596.493.060,00	33,33	93,99	Angkutan	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	72	2.139.740.128,00	-	217.042.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	217.042.700,00	0,00	10,14	Angkutan	
			-	-	Laporan	72	634.628.178,00	24	596.493.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	24	596.493.060,00	33,33	93,99	Angkutan	
	2 15 03 2.07 04		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	72	3.409.678.650,00	-	-	12	636.559.550	3	40.701.850	-	80.115.800	3	170.503.550	6	308.182.600	12	599.503.800,00	100,00	94,18	12	599.503.800,00	16,67	17,58	Angkutan	
	2 15 03 2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	100	1.678.967.572,00	100	564.608.111,00	100	334.355.814,00	25	9.720.000,00	25	3.600.000,00	25	10.800.000,00	25	41.578.000,00	100	65.698.000,00	0,00	0,00	200	630.306.111,00	200,00	37,54		
	2 15 03 2.12 02		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	300.000.000,00	1	294.206.256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	294.206.256,00	100,00	98,07	Angkutan	
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	136.000.000,00	-	270.401.855	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	270.401.855,00	0,00	198,82	Angkutan	
	2 15 03 2.12 03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	180.015.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	-	100,00	-	Angkutan	
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	1.062.952.572,00	-	-	1	334.355.814	-	9.720.000	-	3.600.000	-	10.800.000	1	41.578.000	1	65.698.000,00	100,00	19,65	1	65.698.000,00	100,00	6,18	Angkutan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	56,91			74,17	70,50		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sedang		
	2 15 05	Ketersediaan dan aksesbilitas trayek Angkutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	%	100	6.374.274.278,00	25	2.055.122.034,00	50	373.994.122,00	-	-	25	80.640.000,00	-	76.759.000,00	25	178.060.320,00	50	335.459.320,00	100,00	89,70	75	2.390.581.354,00	75,00	37,50		
	2 15 05 2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Fasilitasi Terhadap Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	~~100~~	100	4.632.313.278,00	0	1.572.246.000,00	100	-	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00	0,00	-	1.572.246.000,00	0,00	33,94		
	2 15 05 2.01 03		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	Angkutan	
				Jumlah Laporan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	336	4.632.313.278,00	-	1.572.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-	1.572.246.000,00	0,00	33,94	Angkutan	
	2 15 05 2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pengawasan KA sebidang	%	100	1.741.961.000,00		482.876.034,00	100	373.994.122,00		-	50	80.640.000,00	25	76.759.000,00	25	178.060.320,00	100	335.459.320,00	0,00	0,00	100	818.335.354,00	100,00	46,98		
	2 15 05 2.02 01		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	500.000.000,00	2	482.876.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	482.876.034,00	100,00	96,58	Angkutan	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Angkutan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin	Jumlah Penugas Perlintasan KA yang Difasilitasi dan Jumlah Peserta FGD Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan KA yang tidak Berpalang Pintu (orang)	Orang	2	259.462.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	-	100,00	-	Angkutan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2 15 05 2.02 02		Dan Pemanfaatan dan dan Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	-	982.499.000,00	-	-	12	373.994.122	3	-	3	80.640.000	3	76.759.000	3	178.060.320	12	335.459.320,00	100,00	89,70	12	335.459.320,00	0,00	-	Angkutan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	89,70			50,00	44,37		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							70.327.454.107,00	-	11.686.619.733,86	-	16.192.477.374,15	-	15.911.190.215,12		17.002.695.617,98		60.792.982.941,11				175.997.682.984,32				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100,00	75,22			67,10	64,92		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
	2.10.01		Dinas Komunikasi dan Informatika				164.263.013.835		43.474.927.314		24.656.433.095		1.829.863.102		5.097.511.465,00		5.220.382.290,91		11.417.702.403,00		23.565.459.261		95,58		67.040.386.575		40,81		
	2.16.		Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika				153.431.274.835		42.552.564.643		23.439.745.639		1.829.863.102		5.030.351.783		5.118.875.291		10.435.134.966		22.414.225.142		95,62		64.966.789.785		42,34		
	2.16.01	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	600	54.362.614.835	300	18.570.154.103	100	6.270.323.514	100	1.179.013.102	100	1.899.220.697	100	1.540.752.773		1.483.348.207	100	6.102.334.779	100	97,32	100	24.672.488.882	16,67	45,39		
	2.16.01.2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	dokumen/ laporan	8	270.363.370	5	81.401.075	1	22.942.500	-	-		16.086.500	1	4.119.600		2.435.000	1	22.641.100	100	98,69	6	104.042.175	75,00	38,48		
1	2.16.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				185.556.600		68.720.000		12.260.200		-		10.125.650		1.869.600		-		11.995.250		97,84		80.715.250		43,50		
				Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	Orang	150	51.492.000	150	56.154.400	-	-		-		-		-		-	-	-	-	0	150	56.154.400	100,00	109,05		
				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis	8	134.064.600	5	12.565.600	1	12.260.200	-	-	-	10.125.650	1	1.869.600	-	-	1	11.995.250	100	97,84	6	24.560.850	75,00	18,32		
2	2.16.01.2.01.06		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	laporan	72	84.806.770	36	12.681.075	12	10.682.300	-	-	5	5.960.850	2	2.250.000	5	2.435.000	12	10.645.850	100	99,66	48	23.326.925	66,67	27,51		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,69			75,00	38,48		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.02	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	sub kegiatan	18	27.891.844.018	9	11.894.425.897	3	4.684.170.775	3	1.014.287.783	3	1.475.826.403	3	1.068.713.542	3	1.068.597.656	3	4.627.425.384	100	98,79	9	16.521.851.281	50,00	59,24		
1	2.16.01.2.02.01		Penyediaan Gaji Dan Tunianaan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	Tahun	2	7.443.498.200	2	7.477.138.397	-	-		-		-		-		-	-	-	0	0	2	7.477.138.397	100,00	100,45		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	20.379.577.534	68	4.401.358.000	34	4.679.530.695	34	1.014.287.783	34	1.474.167.403	-	1.067.990.542	-	1.066.349.456	34	4.622.795.184	100	98,79	102	9.024.153.184	75,00	44,28		
2	2.16.01.2.02.05		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	laporan	2	3.420.000	2	4.366.000	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	0	0	2	4.366.000	100,00	127,66		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	26.570.142	1	408.000	1	1.720.300	-	-	1	960.000	-	-	-	753.200	1	1.713.200	100	99,59	2	2.121.200	50,00	7,98		
4	2.16.01.2.02.07		Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	laporan	6	8.970.000	6	9.459.000		-		-		-					-	-	0	0	6	9.459.000	100,00	105,45		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	laporan	4	29.808.142	1	1.696.500	1	2.919.780	-	-	-	699.000	-	723.000	1	1.495.000	1	2.917.000	100	99,90	2	4.613.500	50,00	15,48		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,79			50,00	59,24		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	2.16.01.2.05	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	sub kegiatan	18	8.597.000.000	6	2.298.044.550	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0	0	6	2.298.044.550	33,33	26,73		
5	2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	stel	136	-	-	-	-	-		-								-		0	0	-	0,00	0		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	230.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
5	2.16.01.2.05.05		Monitoring, Evahuasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-		-		-		-		-						-		0	0	-	0	0		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evahuasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	825.000.000	-	-	-	-									-	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
5	2.16.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	kali	16	6.000.000.000	8	2.298.044.550	-	-	-			-					-	-	0	0	8	2.298.044.550	50,00	38,30		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	1.542.000.000	-		-	-	-								-	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0	0			33,33	26,73		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.06	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan	42	4.984.159.165	14	1.291.029.146	7	419.107.954	7	-	7	165.125.109	-	76.674.975	-	111.951.020	7	353.751.104	100	84,41	21	1.644.780.250	50,00	33,00		
7	2.16.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerbangan Bangunan kantor				111.552.474		43.203.090		10.987.464		-		10.823.500		-		-		10.823.500		98,51		54.026.590		48,43		
			2021-2022 (renstra lama)	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	Jenis	16	5.509.574	16	26.318.090	-	-	-	-							-	-	0	0	16	26.318.090	100,00	477,68		
			2023-2026 (review renstra)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	106.042.900	1	16.885.000	1	10.987.464	-	-		10.823.500	1	-		-	1	10.823.500	100	98,51	2	27.708.500	50,00	26,13		
8	2.16.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor				2.385.213.897		607.430.600		132.787.675		-		71.695.000		-		-		71.695.000		53,99		679.125.600		28,47		
				Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	jenis	92	239.942.537	92	496.654.600	-	-									-	-	0	0	92	496.654.600	100,00	206,99		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24	2.145.271.360	6	110.776.000	6	132.787.675		-	3	71.695.000		-		-	3	71.695.000	50	53,99	9	182.471.000	37,50	8,51		
	2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				115.284.320		38.581.000		9.997.632		-		9.811.400		-		-		9.811.400		98,14	0	48.392.400		41,98		
				Jumlah Bahan Dan Peralatan pemberah	jenis	46	10.941.970	46	22.896.000	-	-									-	-	0	0	46	22.896.000	100,00	209,25		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	104.342.350	1	15.685.000	1	9.997.632	-	-	1	9.811.400		-			1	9.811.400	100	98,14	2	25.496.400	50,00	24,44		
	2.16.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				483.718.078		131.756.000		59.282.868		-		13.085.000		15.875.000		30.318.500		59.278.500		99,99	0	191.034.500		39,49		
				Jumlah Makanan dan Minuman	dos	550	38.463.078	550	84.356.000	-	-									-	-	0	0	550	84.356.000	100,00	219,32		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	445.255.000	1	47.400.000	1	59.282.868		-	-	13.085.000		15.875.000	1	30.318.500	1	59.278.500	100	99,99	2	106.678.500	50,00	23,96		
	2.16.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				569.114.355		159.459.310		40.123.515		-		19.046.800		5.515.000		12.290.000		36.851.800		91,85	0	196.311.110		34,49		
				Jumlah Banner ,Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan ,Jumlah jasa Publikasi Ucapan	buah (24 banner, 830 amplop, 2020 kertas kop bupati)	2874	33.114.355	2874	111.076.708	-	-		-		-					-	-	0	0	2874	111.076.708	100,00	335,43		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	536.000.000	2	48.382.602	2	40.123.515		-	1	19.046.800		5.515.000	1	12.290.000	2	36.851.800	100	91,85	4	85.234.402	50,00	15,90		
	2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan				64.432.500		14.610.000		1.441.800		-		390.000		600.000		240.000		1.230.000		85,31	0	15.840.000		24,58		
				Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	8	4.022.500	8	11.980.000	-	-		-		-					-	-	0	0	8	11.980.000	100,00	297,82		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	60.410.000	4	2.630.000	4	1.441.800		-	2	390.000		600.000	2	240.000	4	1.230.000	100	85,31	8	3.860.000	50,00	6,39		
	2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				1.254.843.541		295.989.146		164.487.000		-		40.273.409		54.684.975		69.102.520		164.060.904		99,74	0	460.050.050		36,66		
				Jumlah Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jenis	4	26.000.000	4	178.695.694	-	-		-							-	-	0	0	4	178.695.694	100,00	687,29		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1.228.843.541	2	117.293.452	2	164.487.000		-		40.273.409		54.684.975	2	69.102.520	2	164.060.904	100	99,74	4	281.354.356	50,00	22,90		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	84,41			50,00	33,00		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.07	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket	12	4.218.907.813	4	70.200.000	3	14.731.200	3	14.525.000		-		-		-	3	14.525.000	100	98,60	7	84.725.000	58,33	2,01		
	2.16.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lawatan				2.550.000.000		-		-		-		-						-		0	0	-		0,00		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lawatan yang Disediakan	Unit	8	2.550.000.000	-	-	-	-		-		-					-	-	0	0	0	-	0,00		
	2.16.01.2.07.05		Pengadaan Mebel				843.907.813		70.200.000		14.731.200		14.525.000		-					-	14.525.000		98,60	0	84.725.000	0	10,04		
				Jumlah Mebel/Kursi	buah	20	6.037.000	20	70.200.000	-	-		-		-		-		-	-	0	0	20	70.200.000	100,00	1162,83		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	837.870.813	-	-	3	14.731.200	3	14.525.000	-	-		-		-	3	14.525.000	100	98,60	3	14.525.000	4,00	1,73		
	2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				825.000.000		-		-		-		-		-		-		-		0	0	-		0,00		
				jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari	paket	2		2																2					
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	825.000.000	-		-							-			-		0		0		0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,60			58,33	2,01		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.08	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket	18	5.451.597.887	6	2.256.958.210	3	797.679.085	3	129.650.319	3	183.338.718		189.433.784		252.177.496	3	754.600.317	100	94,60	9	3.011.558.527	50,00	55,24		
	2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik				1.650.942.890		614.764.560		206.240.000		37.610.789		40.864.198		44.785.304		44.486.156		167.746.447		81,34	0	782.511.007		47,40		
				Jumlah Operasional Bulanan	jenis	10	465.684.288	10	378.730.560	-			-		-				-	-	-	0	0	10	378.730.560	100,00	81,33		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	30	1.185.258.602	4	236.034.000	5	206.240.000	5	37.610.789	5	40.864.198	5	44.785.304	-	44.486.156	5	167.746.447	100	81,34	9	403.780.447	30,00	34,07		
	2.16.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				519.254.997		156.543.650		40.561.085		-		7.545.000		7.713.000		25.110.700		40.368.700		99,53	0	196.912.350		37,92		
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	61.545.943	6	118.924.750	-	-									-	-	0	0	6	118.924.750	100,00	193,23		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	457.709.054	3	37.618.900	3	40.561.085	-	-	3	7.545.000	-	7.713.000	-	25.110.700	3	40.368.700	100	99,53	6	77.987.600	50,00	17,04		
	2.16.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.281.400.000		1.485.650.000		550.878.000		92.039.530		134.929.520		136.935.480		182.580.640		546.485.170		99,20	0	2.032.135.170		61,93		
				Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu, Jumlah Tenaga Keamanan, Jumlah Tenaga Kebersihan	orang	36	1.000.200.000	36	980.000.000	-	-									-	-	0	0	36	980.000.000	100,00	97,98		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	76	2.281.200.000	19	505.650.000	19	550.878.000	19	92.039.530	19	134.929.520	19	136.935.480	-	182.580.640	19	546.485.170	100	99,20	38	1.052.135.170	50,00	46,12		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	94,60			50,00	55,24		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	2.16.01.2.09	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	paket	12	2.948.742.582	4	678.095.225	2	331.692.000	2	20.550.000	2	58.843.967	-	201.810.872	-	48.187.035	2	329.391.874	100	99,31	6	1.007.487.099	50,00	34,17		
	2.16.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan Perijinan Kendaran Operasional Atau Lapangan				1.164.261.620		421.702.900		184.360.000		20.550.000		58.843.967		55.534.550		48.187.035		183.115.552		99,32	0	604.818.452		51,95		
				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	kendaraaan	12	65.393.620	12	248.225.700	-	-		-		-					-	-	0	0	12	248.225.700	100,00	379,59		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraaan	28	1.098.868.000	6	173.477.200	7	184.360.000	7	20.550.000	7	58.843.967	7	55.534.550		48.187.035	7	183.115.552	100	99,32	13	356.592.752	46,43	32,45		
	2.16.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				1.784.480.962		256.392.325		147.332.000		-		-		146.276.322		-		146.276.322		99,28	0	402.668.647		22,57		
				Jumlah Gedung Kantor dan Banunan yang direlihara	paket	1	109.900.000	1	256.392.325	-										-	-	0	0	1	256.392.325	100,00	233,30		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	1.674.580.962	-	-	1	147.332.000		-	-	-	1	146.276.322			1,00	146.276.322	100	99,28	1	146.276.322	25,00	8,74		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,31			50,00	34,17		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	97,32			16,67	45,39		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.02	1. Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	persen	600	21.907.517.000	300	5.396.418.838	100%	6.693.000.000	100	632.850.000	100	1.671.132.900	100	1.758.191.785		2.597.428.485	100%	6.659.603.170	100	99,50	100%	12.056.022.008	0,17	55,03		
				2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	persen	600%		300%		100%		100%		100%		100%				100%		100		100%		16,67			
				3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPID	persen	600%		300%		100%		100%		100%		100%				100%		100		100%		16,67			
	2.16.02.2.01		Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-. Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	buah	1.185	21.907.517.000	768	5.396.418.838	-	6.693.000.000		632.850.000	-	1.671.132.900	-	1.758.191.785	-	2.597.428.485	-	6.659.603.170	0	99,50	768	12.056.022.008	64,81	55,03		
				-. Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	buah	5.209		6.017		-		-								-		0		6017		115,51			
				-. Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	buah	15		15		-		-								-		0		15		100,00			
				-. Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	buah	683		480		-		-								-		0		480		70,28			
				-. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	buah	2		7		-		-								-		0		7		350,00			
				-. persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	Persen	400%		100%		-		-				-				-		0		100%		25,00			
				-. persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	Persen	400%		100%		-		-				-		-		-		0		100%		25,00			
				-. Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	buah	100		25		-		-		-		-		-		-		0		25		25,00			
				-. Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	buah	11.498		2.668		-				-		-		-		-		0		2668		23,20			
				-. Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk penyebarluasan edukasi	lembaga	95		23		-				-		-		-		-		0		23		24,21			
				1. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	Persen	285,21%				95,6%				97,8%		100%		100%		100%		104,60		1,000		35,06			
				2. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	Persen	300%				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100,00		1		33,33			
				3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	lembaga	27				7		3		3		3		3		12		171,43		12		44,44			
				4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	buah	6.030				2005		1.413		1.462		1.680		1.146		5.701		284,34		5701		94,54			
	2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID	kali	9	1.099.014.400	9	226.141.410	-	42.856.000		-		9.564.000		20.599.500		9.697.275		39.860.775		93,01	9	266.002.185	100,00	24,20		
				Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	kali	15	178.131.000	15	209.708.110	-										-	-	0	0	15	209.708.110	100,00	117,73		
				jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id	kali	3		3		-										-		0	0	3		100,00	0		
				jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD	kali	3		3		-										-		0	0	3		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	4	920.883.400	1	16.433.300	1	42.856.000		-		9.564.000	1	20.599.500		9.697.275	1	39.860.775	100	93,01	2	56.294.075	50,00	6,11		
	2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1.907.546.137		992.747.809		130.000.000		-		70.097.000		2.224.000		56.142.721		128.463.721		98,82	0	1.121.211.530		58,78		
				Jumlah pemeilharaan website gresikkab.go.id	paket	2	620.275.437	2	826.883.909											-	-		0		826.883.909		133,31		
				Jumlah pemeilharaan website SiDesa	paket	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah pemeilharaan website siklip	paket	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah pemeilharaan website PPID	kali	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah lisensi fining	Dokumen	1		1		-										-		0	0	1		100,00	0		
				Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	kali	7		7		-										-		0	0	7		100,00	0		
				jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan	kali	51		51		-										-		0	0	51		100,00	0		
				Jumlah lisensi cpanel tahunan	paket	3		3		-										-		0	0	3		100,00	0		
				jumlah web hosting OPD yang di kelola	paket	45		45		-										-		0	0	45		100,00	0		
				Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis	paket	2		2		-										-		0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	1.287.270.700	1	165.863.900	1	130.000.000		-		70.097.000	1	2.224.000		56.142.721	1	128.463.721	100	98,82	2	294.327.621	50,00	22,86		
	2.16.02.2.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4.614.273.763		2.125.464.958		793.000.000		48.000.000		86.660.000		184.419.500		470.126.500		789.206.000		99,52		2.914.670.958		63,17		
				Pembuatan Perda Radio suara Gresik	perda	1	1.352.661.963	1	1.702.886.228											-	-	0	0	1	1.702.886.228	100,00	125,89		
				Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio	kali	3		3		-										-	-	0	0	3	-	100,00	0		
				Jumlah Iuran tahunan frekuensi radio	lisensi	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah sewa internet (Mbps)	paket	30		30		-										-	-	0	0	30	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut	orang	15		15		-										-	-	0	0	15	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga teknisi radio	orang	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk sosial media	orang	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk video	orang	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				jumlah lisensi lagu yang dibeli	buah	950		950		-										-	-	0	0	950	-	100,00	0		
				Jumlah lisensi radiobost	paket	1		1		-										-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah lisensi Adobe Audition	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah Pemeliharaan peralatan streaming	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah reportase yang dilakukan	kali	372		372		-										-	-	0	0	372	-	100,00	0		
				jumlah domain dan hosting suaragresik.id	paket	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah penayangan di media televisi	kali	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio	kali	92		92		-										-	-	0	0	92	-	100,00	0		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media	kali	12		12		-										-	-	0	0	12	-	100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	3.261.611.800	1	422.578.730	1	793.000.000		48.000.000		86.660.000		184.419.500	1	470.126.500	1	789.206.000	100	99,52	2	1.211.784.730	50,00	37,15		
	2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah panggilan kedaruratan yang difasilitasi			1.128.920.000		20.845.565		50.000.000		-		3.350.000		17.496.500		25.047.114	-	45.893.614	0	91,79	0	66.739.179	0	5,91		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	1.128.920.000	1	20.845.565	1	50.000.000		-		3.350.000		17.496.500	1	25.047.114	1	45.893.614	100	91,79	2	66.739.179	50,00	5,91		
	2.16.02.2.01.07		Layanan Hubungan Media	Jumlah panggilan kedaruratan yang difasilitasi			2.284.895.000		203.447.996		5.000.000.000		525.650.000		1.362.711.900		1.384.127.285		1.707.230.900	-	4.979.720.085	0	99,59	0	5.183.168.081	0	226,84		
				Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	4	2.284.895.000	1	203.447.996	1	5.000.000.000		525.650.000	-	1.362.711.900	-	1.384.127.285	1	1.707.230.900	1	4.979.720.085	100	99,59	2	5.183.168.081	50,00	226,84		
	2.16.02.2.01.09		Manajemen Komunikasi Krisis				7.575.843.400		1.713.152.600		563.900.000		59.200.000		138.750.000		143.525.000		222.197.000		563.672.000		99,96		2.276.824.600		30,05		
				Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	orang	21	4.322.970.400	21	1.157.746.600		-									-	-	0	0	21	1.157.746.600	100,00	26,78		
				jumlah tenaga sound dan multi media center	orang	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	tahun	2		2		-										-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah sewa Backup internet (Mpsi	tahun	50		50		-										-	-	0	0	50	-	100,00	0		
				Jumlah Pembangunan media Centre	unit	1		-												-	-	0	0	0	-	0,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen	4	3.252.873.000	1	555.406.000	1	563.900.000		59.200.000	-	138.750.000	1	143.525.000	-	222.197.000	1	563.672.000	100	99,96	2	1.119.078.000	50,00	34,40		
	2.16.02.0.01.10		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				995.514.100		63.360.500		-		-		-		-		-	-	-	0	0	0	63.360.500	0	6,36		
				Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang di ikuti oleh KIM	kali	1	31.719.000	1	54.360.500		-									-	-	0	0	1	54.360.500	100,00	171,38		
				Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masayarakat (KIM)	kali	4		5		-										-	-	0	0	5	-	125,00	0		
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	520	963.795.100	130	9.000.000	-	-		-		-		-		-	-	-	0	0	130	9.000.000	25,00	0,93		
	2.16.02.0.01.12		penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				1.136.603.200		-		55.200.000		-		-		-		54.973.000	-	54.973.000	0	99,59	0	54.973.000	0	4,84		
				Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	laporan	5	266.603.200	-												-	-	0	-		-	0,00			
				Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	laporan	2		-												-	-	0	-	0	-	0,00			
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4	870.000.000	-	-	1	55.200.000		-		-			1	54.973.000	1	54.973.000	100	########	1	219.892.000	25,00			
	2.16.02.0.01.13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panggilan kedaruratan yang difasilitasi			1.164.907.000		51.258.000		58.044.000		-		-		5.800.000		52.013.975	-	57.813.975	0	99,60	0	109.071.975	0	9,36		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	12	1.164.907.000	3	51.258.000	3	58.044.000	-	-	-	-	-	5.800.000	3	52.013.975	3	57.813.975	100	99,60	6	109.071.975	50,00	9,36		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	165,09	99,50			165,09	55,03		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINEKJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100,00	99,50			11,17	55,03		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	2.16.03	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi	Program Aplikasi Informatika	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	Persen	150%	77.161.143.000	156%	18.585.991.702	25%	10.476.422.125	100%	18.000.000	100%	1.459.998.186	100%	1.819.930.733	100%	6.354.358.274	100%	9.652.287.193	400	92,13	2,56	28.238.278.895	170,67	36,60		
				2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	Persen	252%		34%		50%		2%		32,61%		50% (23/46)		50% (23/46)		50%		100		0,84		33,33			
				3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	Persen	252%		28,08%		50%		26,08%		26,08%		26,08 (12/47)		26,08 (12/47)		26,08%		52,16		0,54		21,49			
				4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	Persen	252%		28,08%		50%		0%		0%		10%		50%		50%		100		0,78		30,98			
				1.Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	600%		300%		100%		0		0		-		100%		100%		100		4,00		66,67			
				2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	600%		300%		100%		0		0		-		100%		100%		100		4,00		66,67			
				3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	525%		164%		100%		100%		100%		100%		-		100%		100		2,64		50,29			
				4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	Persen	272%		53% (8/15)		53% (8/15)		-		40%		46% (7/15)		53%		53%		75		0,53		19,49			
				5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	210%		95%		50%				-		-		50%		50%		100		1,45		69,05			
	2.16.03.2.01.03		Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota	- Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	Gb	9,60	43.697.766.088	2	12.596.167.182	-	8.565.071.825	-	-	-	1.254.317.394	1,60	1.483.277.636		5.061.926.915	-	7.799.521.945	0	91,06	2,10	20.395.689.127	21,88	46,67		
				- Jumlah kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	OPD	176		176		-										-		0		176,00		100,00			
				- jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-										-		0		2,00		100,00			
				- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-										-		0		2,00		100,00			
				- jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-										-		0		2,00		100,00			
				2. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	OPD	50		5		10		-		-		23				23		230,00		28,00		56,00			
				1. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	persen	276% (2417/35 040 jam)				7.884 jam (90% dari 8.760 jam)		-		90.25%		96.87%		90,63%		93.71% (7387.89 jam dari 8760 jam)		104%		104%		38%			
	2.16.03.2.01.03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				43.697.766.088		12.596.167.182		8.565.071.825		-		1.254.317.394		1.483.277.636		5.061.926.915		7.799.521.945		91,06	0	20.395.689.127		46,67		
				Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	GBps	1,50	8.813.204.511	1,50	8.188.320.773	-		-								-	-	0	0	1,50	8.188.320.773	100,00	92,91		
				Jumlah Kelurahan,Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet	lembaga	176		176		-		-								-	-	0	0	176	-	100,00	0		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah	unit	88		52		-		-								-	-	0	0	52	-	59,09	0		
				Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut	orang	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah server clustering yang diadakan	unit	4		4		-		-								-	-	0	0	4	-	100,00	0		
				Jumlah iuran As number (tahunan)	tahun	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan jaringan intra	paket	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik	paket	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				jumlah pemeliharaan jalur CCTV	paket	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra	kali	5		5		-		-								-	-	0	0	5	-	100,00	0		
				jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan	kali	36		36		-		-								-	-	0	0	36	-	100,00	0		
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	4	34.884.561.577	1	4.407.846.409	1	8.565.071.825	1	-	1	1.254.317.394	1	1.483.277.636	1	-	1	2.737.595.030	100	31,96	2	7.145.441.439	50,00	20,48		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	230,00	91,06			79,65	46,67		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	2.16.03.2.02	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Penggelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-. Jumlah server backup yang di adakan	unit	3	33.463.376.912	1	5.989.824.520	-	1.911.350.300	-	18.000.000	-	205.680.792		336.653.097		1.292.431.359	-	1.852.765.248	0	96,93	1	7.842.589.768	33,33	23,44		
				-. Jumlah UPS yang diadakan	unit	2		1		-		-		-		-		-		-		0		1		50,00			
				-. Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	orang	2		2		-		-		-		-		-		-		0		2		100,00			
				-. Kapasitas server clustering	GB	1.220		986		-		-		-				-		-		0		986		80,85			
				-. Kapasitas server backup data	Tb	24		44		-		-		-				-		-		0		44		183,33			
				-. Kapasitas Backup Listrik (UPS)	kVa	12		15		-		-		-				-		-		0		15		125,00			
				-. Manajemen Data Warehouse/Big Data	paket	1		-		-		-		-				-		-		0		0		0,00			
				-. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	tingkat	13		4		-		-		-				-		-		0		4		30,77			
				-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	tingkat	15		3		-		-		-				-		-		0		3		20,00			
				-.Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	lembaga	26		5		-		-		-				-		-		0		5		19,23			
				-. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	tingkat	15		5		-		-		-				-		-		0		5		33,33			
				-. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	4		4		-		-		-				-		-		0		4		100,00			
				-. Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	indikator	94		94		-		-		-				-		-		0		94		100,00			
				-. Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	lembaga	60		56		-		-		-				-		-		0		56		93,33			
				-. jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	aplikasi	2		2		-		-		-				-		-		0		2		100,00			
				-. Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	lembaga	6		6		-		-		-				-		-		0		6		100,00			
				1. Jumlah VPS yang dikelola	buah	585				180		-		170		194		207		207		115,00		207		35,38			
				2. Jumlah API yang dikelola	buah	66				18		-		22		24		28		28		155,56		28		42,42			
				1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	pedoman	8		2		2		-		1		1		-		2,00		100,00		4		50,00			
				2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	dokumen	8		2		2		-		-		-		2		2,00		100,00		4		50,00			
				3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	aplikasi	39		5		8		-		6		7		-		7		87,50		12		30,77			
				4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	indikator	188		47		47		47		-		-		-		47,00		100,00		94		50,00			
				-. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	tingkat	18		3		-		-		-		-		-		-		0		3		16,67			
				-. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	tingkat	14		2		-		-		-		-		-		-		0		2		14,29			
				5.Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk5.	Layanan	99				31		-		31		-		-		31,00		100,00		31		31,31			
	2.16.03.2.02.01		Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Goverment Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				1.904.525.000		418.339.371		176.705.900		-		21.308.582		6.800.000		144.725.000	-	172.833.582		97,81	0	591.172.953		31,04		
				1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	pedoman	3	359.525.000	3	348.343.588	-										-	-	0	0	3	348.343.588	100,00	96,89		
				2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	pedoman	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	pedoman	4		4		-										-	-	0	0	4		100,00	0		
				4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	kali	2		2		-										-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	1.545.000.000	4	69.995.783	2	176.705.900	-	-	1	21.308.582	1	6.800.000	-	144.725.000	2	172.833.582	100	97,81	6	242.829.365	75,00	15,72		
	2.16.03.2.02.02		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				877.734.000		169.424.750		40.000.000		-		8.385.000		10.549.500		17.221.527		36.156.027		90,39	0	205.580.777		23,42		
				1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE	kali	12	329.404.000	12	164.817.750	-	-		-							-	-	0	0	12	164.817.750	100,00	50,04		
				2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	opd	36		76		-			-							-	-	0	0	76	-	211,11	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	8	548.330.000	4	4.607.000	2	40.000.000	-	-	-	8.385.000	-	10.549.500	-	17.221.527	-	36.156.027	-	90,39	4	40.763.027	50,00	7,43		
	2.16.03.2.02.03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				22.557.720.029		566.849.825		196.442.300		-		2.090.000		165.604.500		19.710.000		187.404.500		95,40	0	754.254.325		3,34		
				Jumlah perencanaan Pembangunan media centre	paket	1	3.614.204.447	1	545.784.825		-									-	-	0	0	1	545.784.825	100,00	15,10		
		Meningkatnya kualitas layanan		Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru	paket	1		-		-										-	-	0	0	0		0,00	0		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi		Jumlah Pendeteksi suhu ruangan	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah AC central	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah server clustring yang di adakan	unit	2		2		-										-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah server backup yang di adakan	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah UPS yang diadakan	unit	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah listrik premium yang diadakan	unit	1		1		-						1				-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah rapat koordinasi terkait pementasatan ruang server oleh OPD	kali	10		10												-	-	0	0	10		100,00	0		
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	4	18.943.515.582	2	21.065.000	1	196.442.300	-	-	-	2.090.000	1	165.604.500	1	19.710.000	2	187.404.500	200	95,40	4	208.469.500	100,00	1,10		
	2.16.03.2.02.07	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis PemerintahBerbasis Elektronik				2.323.015.380		3.569.761.380		1.190.000.000		-		58.101.702		55.686.295		1.060.867.102		1.174.655.099		98,71	0	4.744.416.479		204,24		
				Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;	lisensi	3	774.703.380	1	999.572.244	-	-		-							-	-	0	0	1	999.572.244	33,33	129,03		
				Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;	lisensi	10		9		-										-	-	0	0	9		90,00	0		
				Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang disewa;	bulan	23		23		-										-	-	0	0	23		100,00	0		
				Jumlah Tenaga Ahli Prorammer yang direkrut;	orang	2		2		-										-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One Handling System	paket	1		1		-										-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	39	1.548.312.000	11	2.570.189.136	8	1.190.000.000	-	-	6	58.101.702	7	55.686.295	1	1.060.867.102	7	1.174.655.099	88	98,71	18	3.744.844.235	46,15	241,87		
	2.16.03.2.02.08	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data teintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				1.259.099.003		331.795.816		89.908.000		-		8.592.817		55.579.500		10.032.500		74.204.817		82,53	0	406.000.633		32,25		
				Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	orang	2	160.535.162	2	160.705.500	-	-	-								-	-	0	0	2	160.705.500	100,00	100,11		
				Jumlah rapat koordinasi tentang layanan penghubung	kali	4		4		-		-								-	-	0	0	4		100,00	0		
				Jumlah rapat monitoring database OPD	kali	3		3		-		-								-	-	0	0	3		100,00	0		
				Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah perjalanan dinas terkati layanan penghubung di OPD	kali	20		20		-		-								-	-	0	0	20		100,00	0		
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	41	1.098.563.841	14	171.090.316	10	89.908.000		-	-	8.592.817	14	55.579.500	14	10.032.500	28	74.204.817	280	82,53	42	245.295.133	102,44	22,33		
	2.16.03.2.02.09	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Penggembangan Dan Penggelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cedas Dan Kota Gerdas				2.258.051.000		648.551.853		127.756.100		6.000.000		72.408.691		26.409.000		29.478.230		134.295.921		105,12		782.847.774		34,67		
				1. PGD Penerapan Smart City	kali	14	398.250.000	14	384.270.151	-	-									-	-	0	0	14	384.270.151	100,00	96,49		
				2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	kali	5		5		-										-	-	0	0	5		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	24	1.859.801.000	6	264.281.702	6	127.756.100		6.000.000	6	72.408.691	6	26.409.000	-	19.934.600	6	124.752.291	100	97,65	12	389.033.993	50,00	20,92		
	2.16.03.2.02.10		Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1.525.200.500		263.941.025		60.538.000		12.000.000		20.831.500		12.674.302		9.543.630		55.049.432		90,93	0	318.990.457	0	20,91		
				Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 OPD)	kali	48	375.200.500	48	217.562.225	-		-									-		0		217.562.225		57,99		
				Jasa konsultansi Pengelolaan Layanan SPBE	paket	1		1		-		-								-	-	0	0	1		100,00	0		
				Pembangunan Single sign on	paket	1		1		-		-								-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah Pelatihan Manajemen tarinsan OPD	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Pelatihan Manajemen data	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	4	1.150.000.000	1	46.378.800	1	60.538.000	-	12.000.000	-	20.831.500	-	12.674.302	1	9.543.630	1	55.049.432	100	90,93	2	101.428.232	50,00	8,82		
	2.16.03.2.02.12		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				758.032.000		21.160.500		30.000.000		-		13.962.500		3.350.000		10.397.000		27.709.500		92,37	0	48.870.000		6,45		
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	16	758.032.000	4	21.160.500	4	30.000.000	1	-	1	13.962.500	1	3.350.000	2	10.397.000	5	27.709.500	125	92,37	9	48.870.000	56,25	6,45		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	108,29	96,93			59,60	23,44		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		125,24	92,13			58,74	36,60		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika			153.431.274.835		42.552.564.643		23.439.745.639		1.829.863.102		5.030.351.783		5.118.875.291		10.435.134.966		22.414.225.142				64.966.789.785				
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		108,41	96,32			28,86	45,67		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.20.		Urusan Pemerintah Bidang Statistik				4.015.829.000		238.182.772		967.931.181		-		40.398.400		32.196.860		843.729.493		916.324.753		94,67		1.154.507.525		28,75		
	2.20.02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	persen	133%	4.015.829.000	47% (14/30)	238.182.772	27%	967.931.181		-	30% (9/30)	40.398.400	37% (11/30)	32.196.860	43% (13/30)	843.729.493	43%	916.324.753	159	94,67	90%	1.154.507.525	67,67	28,75		
	2.20.02.2.01	Meningkatnya Informasi Pemerintah dan Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daeah Kabupaten / Kota	. Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	data	6	4.015.829.000	3	238.182.772		967.931.181		-		40.398.400		32.196.860		843.729.493	-	916.324.753	0	94,67	3,00	1.154.507.525	50,00	28,75		
				-. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	kali	12		3		-										-		0		3,00		25,00			
				1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	OPD	18		8		4			-		-	4	-		-	4,00		100		12,00		66,67			
				-. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	tingkat	18		3		-										-		0		3,00		16,67			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				2.Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	buah	135		-		35		23		-	-	20	-		-	43,00		123		43,00		31,85			
				3. Jumlah Data Induk yang dikelola	buah	12		-		2		2		-	-		-		-	2,00		100		2,00		16,67			
	2.20.02.2.01.01		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan , Analisis Dan Di Seminasi Data Statistik Sektoral				2.266.680.000		238.182.772		147.931.181		-		40.398.400		32.196.860		54.717.493	-	127.312.753	0	86,06	0,00	365.495.525	0	16,12		
				Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik	buah	100	807.853.000	-	131.908.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0		131.908.772		16,33		
				Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data	kali	6		-		-		-								-	-	0	0	0,00	-	0,00	0		
				Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD	kali	1		1		-		-								-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah Sosialisasi tentang Wali data	kali	2		2		-		-								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah rapat koordinasi data stastik sektoral	kali	4		4		-		-								-	-	0	0	4	-	100,00	0		
				Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik	data	1		1		-		-								-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah penyusunan data anlisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme	data	1		1		-		-								-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah penyusunan data NTN dan NTP	data	1		1		-		-								-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di rekrut	orang	1		1		-		-								-	-	0	0	1		100,00	0		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	4	1.458.827.000	1	106.274.000	1	147.931.181	-	-	-	40.398.400	-	32.196.860	1	54.717.493	1	127.312.753	100	86,06	2	233.586.753	50,00	16,01		
	2.20.02.2.01.02		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				810.000.000		-		50.000.000		-		-		-		25.591.500	-		0		0		0	0,00		
				jumlah OPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral	lembaga	48		-	-		-	-	-		-		-		-	-		0		0		0,00			
				Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	148	810.000.000	-	-	37	50.000.000	-	-	-	-	-	-	49	25.591.500	49		132		49		33,11			
	2.20.02.2.01.05		Pengembangan Infrastruktur				939.149.000		-		770.000.000		-		-				763.420.500	-	763.420.500	0	99,15	0	763.420.500	0	81,29		
				Jumlah Infrastrukrur Statistik	unit	8	939.149.000	2		2	770.000.000		-		-			2	763.420.500	2	763.420.500	100	99,15	4	763.420.500	50,00			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	107,62	94,67			34,48	28,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	159,26	94,67			67,67	28,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik			4.015.829.000		238.182.772		967.931.181		-		40.398.400		32.196.860		843.729.493		916.324.753				1.154.507.525				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK	159,26	94,67			67,67	28,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	2.21.		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				6.815.910.000		684.179.899		248.756.275		-		26.761.282		69.310.140		138.837.944		234.909.366		94,43		919.089.265		13,48		
	2.21.02.		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penanganan Serangan Cyber	persen	600%	6.815.910.000	300%	684.179.899	100%	248.756.275		-	-	26.761.282	57%	69.310.140	114% (8/7)	138.837.944	114%	234.909.366	114,00	94,43	4,14	919.089.265	69,00	13,48		
	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	persen	502%	6.815.910.000	202%	684.179.899	-	248.756.275		-		26.761.282	-	69.310.140		138.837.944	-	234.909.366	0	94,43	2,02	919.089.265	40,24	13,48		
				1. Jumlah OPD yang menerapkan management keamanan informasi	lembaga	27		-		6				1		-		5		6,00	-	100,00	0	6,00	-	22,22	0		
	2.21.02.2.01.02	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur teknologi informatika (TI) keamanan sistem elektronik dan data terintegrasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.175.391.894		146.563.000		9.452.000	-	-		9.425.282		-		-		9.425.282,00		99,72	0	155.988.282		13,27		
				jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	lembaga	58	103.326.000	58	137.943.000	0										-	-	0	0	58	137.943.000	100,00	133,50		
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	1.072.065.894	1	8.620.000	1	9.452.000	-	-	-	9.425.282	1	-	-	-	1	9.425.282,00	100	99,72	2	18.045.282	50,00	1,68		
	2.21.02.2.01.03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik				5.640.518.106		537.616.899		239.304.275		-		17.336.000		69.310.140		138.837.944	-	225.484.084,00	0	94,22	0	763.100.983	0	13,53		
				Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	Unit	1	286.477.000	1	446.281.753	0	-	0								-	-	0	0	1	446.281.753	100,00	155,78		
				Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang berbeda	paket	2		2		0		0								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah user Antivirus	user	75		75		0		0								-	-	0	0	75		100,00	0		
				Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden keamanan yang di rekrut	orang	3		3		0		0								-	-	0	0	3	-	100,00	0		
				Jumlah maintanance email sresikkab.go.id	paket	1		1		0		0								-	-	0	0	1	-	100,00	0		
				Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi	kali	2		2		0		0								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah Sosialisasi Digital Signature	kali	2		2		0		0								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature	kali	5		5		0		0								-	-	0	0	5	-	100,00	0		
				Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature	kali	2		2		0		0								-	-	0	0	2	-	100,00	0		
				Jumlah Perjalana Dinas terkait penanganan keamanan informasi	kali	37		37		0		0								-	-	0	0	37	-	100,00	0		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	5.354.041.106	1	91.335.146	1	239.304.275	-	-	-	17.336.000	-	69.310.140	1	138.837.944	1	225.484.084,00	100	94,22	2	316.819.230	50,00	5,92		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	94,43			31,23	13,48		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	114,00	94,43			69,00	13,48		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian				6.815.910.000		684.179.899		248.756.275		-		26.761.282		69.310.140		138.837.944		234.909.366			0	919.089.265				
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGIARAN DARI URUSAN PERSANDIAN		114,00	94,43			69,00	13,48		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN																												
	2.17.2.17		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				87.413.764.797,37		53.424.067.564,00		12.940.773.600		2.190.993.882		3.181.756.779		2.535.837.182		2.811.160.597		10.719.748.440				-					
									0																				
	2.17.2.17.3.30.301 .	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	%	62.496.655.009,30		30.815.878.033,02		10.368.273.600		2.066.298.482		3.016.997.699		2.321.705.136		2.375.325.897	-	9.780.327.214									
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	Dokumen	138.138.548,89	56	66.280.282,00	20	30.000.000		-	10	9.350.000		-	10	2.480.000	20	11.830.000	100,00	39,43	76	78.110.282,00	84,44	8,56	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	875	Laporan	110.410.400,82	335	59.045.575,00	18	25.000.000		-		-	5	1.872.000	12	5.574.040	17	7.446.040	94,44	29,78	352	66.491.615,00	40,23	6,74	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430	Orang/Bula	45.557.984.234,67	169	23.191.899.433,02	12	7.556.688.000	3	1.633.764.042	3	2.410.849.195	3	1.643.679.624	3	1.550.090.561	12	7.238.383.422	100,00	95,79	181	30.430.282.855,02	42,09	15,89	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	755	Laporan	110.512.321,09	285	49.999.675,00	20	10.000.000		-	10	1.499.600	5	2.312.250	5	6.170.250	20	9.982.100	100,00	99,82	305	59.981.775,00	40,40	9,03	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	Paket	1.381.346.279,07	31	311.606.719,00	15	70.300.000	2	400.000	2	300.000	2	42.181.950	9	10.171.950	15	53.053.900	100,00	75,47	46	364.660.619,00	61,33	3,84	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	552.488.009,57	23	164.873.205,00	12	50.000.000		-	6	9.486.891	3	15.518.000	3	11.612.450	12	36.617.341	100,00	73,23	35	201.490.546,00	58,33	6,63	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	530	Paket	552.562.931,60	12	192.935.576,00	5	40.000.000	2	15.900.000		-	2	16.032.950	1	1.713.500	5	33.646.450	100,00	84,12	17	226.582.026,00	3,21	6,09	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 0 undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	Dokumen	82.641.340,98	12	24.666.000,00	12	-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	12	24.666.000,00	48,00	0,00	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	235	Laporan	82.828.521,73	87	20.824.000,00	25	-		-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	87	20.824.000,00	37,02	0,00	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347	Laporan	1.105.120.724,37	179	107.837.713,00	45	106.703.456	10	16.914.480	10	9.355.500	10	10.829.000	15	6.119.000	45	43.217.980	100,00	40,50	224	151.055.693,00	64,55	3,91	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .08.0002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa pelayananKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12	bulan	83.227.600,00			12	83.227.600	3	14.316.760	3	18.234.473	3	13.156.172	3	11.543.136	12	57.250.541	100,00	68,79	12	57.250.541,00				
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	11.938.651.106,93	23	6.292.745.881,00	12	2.268.246.000	3	364.859.660	3	547.289.490	3	547.289.490	3	722.932.870	12	2.182.371.510	100,00	96,21	35	8.475.117.391,00	350,00	18,28	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	607.789.460,95	21	229.307.974,00	50	98.108.544	10	20.143.540	10	9.482.550	10	17.530.000	19	35.892.600	49	83.048.690	98,00	84,65	70	312.356.664,00	175,00	13,66	Skretariat	
	2.17.2.17.3.30.301 .2 .09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	270	Unit	276.181.128,63	105	103.856.000,00	8	30.000.000	0	-	2	1.150.000	3	11.303.700	3	11.025.540	8	23.479.240	100,00	78,26	113	127.335.240,00	41,85	8,50	Skretariat	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						96,22	61,86			80,50	7,78		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.303 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A		66.35%(420 koperasi)	736.288.319,58		233.588.702,00		20.000.000		670.000		8.026.400		1.152.000		681.000	-	10.529.400								
	2.17.2.17.3.30.303 .2 .01.01.		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	525	Unit Usaha	598.148.477,69	650	219.788.779,00	0	-	0	-		-		-		-	-	-	0,00	0,00	650	219.788.779,00	123,81	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.303 .2 .01.0004.		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30	Unit Usaha	20.000.000,00		-	30	20.000.000	5	670.000,00	15	8.026.400	5	1.152.000,00	5	681.000	30	10.529.400	100,00	52,65	30	10.529.400,00				
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	52,65			61,90	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.304 .	Meningkatnya Pengelolaan Koserasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya		48.49%(354 k	552.561.152,35		195.156.100,00		75.000.000		-		7.523.740		40.636.950		10.153.000	-	58.313.690						10,55		
	2.17.2.17.3.30.304 .2 .01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200	Unit Usaha	276.280.402,12	250	81.871.680,00	40	25.000.000		-	20	7.523.740	10	7.462.950	10	1.630.000,00	40	16.616.690	100,00	66,47	290	98.488.370,00	145,00	6,01	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.304 .2 .01.02.		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30	Unit Usaha	276.280.750,23	90	113.284.420,00	0	-		-			-				-	-			90	113.284.420,00	300,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.304 .2 .01.0003.		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	9	Unit Usaha	50.000.000,00	0	-	9	50.000.000					3	33.174.000	6	8.523.000,00	9	41.697.000	100,00	83,39	9	41.697.000,00				
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	74,93			222,50	3,01		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.305 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih					90.585.400,00		-		-		-						-								
	2.17.2.17.3.30.305 .2 .01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500	Orang	46.500.000	550	90.585.400,00	0			-							0	-	0,00	0,00	550	90.585.400,00	110,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00			110,00	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.306 .	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Pertumbuhan Omzet Koperasi		2.74% (Rp. 110.000.000.000)	2.297.689.282,16		-	0	-	0	-		-				-	-	-						-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.17.2.17.3.30.306 .2 .01.01.		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	665	Unit Usaha	2.297.689.282,16	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.307 .	Meningkatnya Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan		0.12%(200 Usaha Mikro)	1.880.130.434,48		25.435.818.037,00		280.000.000		4.973.500		7.027.950		6.092.950		74.570.500	-	92.664.900								
	2.17.2.17.3.30.307 .2 .01.01.		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	Unit Usaha	826.329.530,67	2000	183.092.000,00	1000		-							-	-	-	0,00	0,00	2000	183.092.000,00	40,00	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.307 .2.01.02.		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1265	Unit Usaha	368.282.549,22	410	158.392.780,00	150	50.000.000	-		50	2.698.000	50	2.698.000	50,00	-	150	5.396.000	100,00	10,79	560	163.788.780,00	44,27	1,47	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.307 .2 .01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1245	Unit Usaha	32.380.198.461,92	1031	24.730.663.257,00	770	180.000.000	100	3.537.500	50	2.671.000	50	2.671.000	570,00	73.572.000	770	82.451.500	100,00	45,81	1801	24.813.114.757,00	144,66	0,25	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.307 .2 .01.14		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah data usaha mikro	1000	/usaha Mikro	50.000.000,00			1000	50.000.000	100	1.436.000		1.658.950	25	723.950	875,00	998.500	1.000	4.817.400	100,00	9,63	1000	4.817.400,00				
	2.17.2.17.3.30.307 .2 .01.15.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1000	Orang	363.670.000,00	0	363.670.000,00	200								-		-	-	0,00	0,00	0	363.670.000,00	0,00	-		
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	13,25			45,79	0,34		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.2.17.3.30.308 .	Meningkatnya Usaha Mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro		1.23% (2.119 usaha mikro)	1.174.582.550,71		954.923.806,00		582.500.000		16.341.000		74.701.500		68.941.950		176.792.262	-	336.776.712								
	2.17.2.17.3.30.308 .2 .01.01.		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	350	Unit Usaha	1.174.582.550,71	325	954.923.806,00	0	-									-	-	0,00	0,00	325	954.923.806,00	92,86	-	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro	
	2.17.2.17.3.30.308 .2 .01.02.		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	75	usaha mikro	582.500.000,00			75	582.500.000	15	16.341.000	25	74.701.500	25	68.941.950	10,00	176.792.262	75	336.776.712	100,00	57,82	75	336.776.712,00	100,00	57,82		
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	57,82			92,86	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.303 .	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara		100%(8 pemeliha	10.071.507.336,11		3.838.617.400,73		1.165.000.000		98.148.400		6.514.450		5.063.300		30.787.778	-	140.513.928								
	3.30.2.17.3.30.303 .2 .01.02.		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40	Unit	7.618.880.939,56	19	3.585.971.554,73	8	1.115.000.000	1	98.148.400	2	5.939.450	1	3.943.300	4,00	6.161.900	8	114.193.050	100,00	10,24	27	3.700.164.604,73	67,50	1,50	Sekretaris	
	3.30.2.17.3.30.303 .2 .02.01.		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6690	Dokumen	552.562.682,95	2338	109.761.601,00	1338	50.000.000		-	500	575.000	500	1.120.000	338,00	24.625.878	1.338	26.320.878	100,00	52,64	3676	136.082.479,00	54,95	4,76	Sekretaris	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	31,44			30,61	1,57		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.304 .	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)		menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	2.426.423.173,51		279.991.500,00		100.000.000		-		9.372.500		26.710.000		24.137.160	-	60.219.660								
	3.30.2.17.3.30.304 .2 .02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36	Laporan	287.608.609,26	77	155.549.500,00	36	100.000.000			15	9.372.500	10	26.710.000	11,00	24.137.160,00	36	60.219.660	100,00	60,22	113	215.769.160,00	313,89	20,94	Kabid. Perdagangan	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	60,22			104,63	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.305 .	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	% Pertumbuhan nilai ekspor		2.32% (1.542.587.407.84 USD)	782.151.943,05		198.159.670,00		75.000.000		-		2.145.000		23.918.500		11.614.500	-	37.678.000								
	3.30.2.17.3.30.305 .2 .01.04.		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha	782.151.943,05	3	198.159.670,00	1	75.000.000			0,5	2.145.000	0,5	23.918.500		11.614.500,00	1	37.678.000	100,00	50,24	4	235.837.670,00	70,00	4,82	Kabid. Perdagangan	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100	50,24			70,00	4,82		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
	3.30.2.17.3.30.306 .	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP berterra sah		97.34%(3800 UTTP)	2.127.367.589,20		814.887.366,00		100.000.000		4.562.500,00		24.260.000		14.830.700		54.500.050	-	98.153.250								
	3.30.2.17.3.30.306 .2 .01.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	17500	Unit	1.851.086.468,75	7100	753.245.308,00	3500	80.000.000	1.000	4.562.500	1.000	21.520.000	1000	12.480.700	500	40.222.000,00	3.500	78.785.200	100,00	98,48	10600	832.030.508,00	60,57	4,26	Sekretaris	
	3.30.2.17.3.30.306 .2 .01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	17500	Orang	276.281.120,45	7025	61.642.058,00	3500	20.000.000		-	500	2.740.000	500	2.350.000	2.500	14.278.050,00	3.500	19.368.050	100,00	96,84	10525	81.010.108,00	60,14	7,01	Sekretaris	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	97,66			30,29	2,13		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.31.2.17.3.30.302 .	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang terdata dan terbina		0,84% (60 IKM)	484.044.689,68		357.710.795,00		75.000.000		-		1.782.350,00		16.242.696,00		27.481.000,00	-	45.506.046								

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	3.31.2.17.3.30.302.2.01.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	Dokumen	-	2	70.032.750,00	0	-	-								-	-	0,00	0,00	2	70.032.750,00	100,00	-	Kabid. Perindustrian	
	3.31.2.17.3.30.302.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	75.000.000	0,50	101.618.500,00	1	75.000.000	-	0,5	1.782.350,00	0,25	16.242.696	0,25	27.481.000	1	45.506.046	100,00	60,67	2	147.124.546,00	150,00	60,67	Kabid. Perindustrian	
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	60,67			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.31.2.17.3.30.303.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi		1,35% (95 IKM)	882.663.838,57		377.637.910,00		50.000.000			9.215.000,00		1.143.000,00		19.101.450,00	-	29.459.450								
	3.31.2.17.3.30.303.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	890	Dokumen	882.663.838,57	348	377.637.910,00	0		-							-	-	0,00	0,00	348	377.637.910,00	39,10	-	Kabid. Perindustrian	
	3.31.2.17.3.30.303.2.01.0004.		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6	Dokumen	50.000.000,00			6	50.000.000	-	2	9.215.000,00	1	1.143.000	3,00	19.101.450	6	29.459.450	100,00	58,92	6	29.459.450,00				
Rata 0 rata capaian kinerja (%)																						100,00	58,92			39,10	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.31.2.17.3.30.304.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dengan memacu produktifitas perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas		0,99% (3 IKM)	636.994.107,42		117.668.992,00		50.000.000		-	14.190.190,00		9.400.000,00		6.016.000,00	-	29.606.190								
	3.31.2.17.3.30.304.2.01.02.		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	150	Dokumen	636.994.107,42	310	117.668.992,00	0	-	-	-							-	-	0,00	0,00	310	117.668.992,00	206,67	-	Kabid. Perindustrian	
	3.31.2.17.3.30.304.2.01.03.		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5	Dokumen	50.000.000,00	0	-	5	50.000.000	-	2	14.190.190,00	0	9400000,00	3	6.016.000	5	29.606.190	100,00	59,21	5	29.606.190,00	100,00	59,21		
0																						100,00	59,21			206,67	0,00		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
TOTAL RATA 0 RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ke 14)																						100,00	82,92			157,91	157,91		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ke 14)																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU																												
Dinas Penanaman Modal dan PTSP																													
	2.18.01	Terwujudnya tertib administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	%	98%	52.497.774.680	100%	30.695.652.249	95%	9.954.483.495	12,50%	1.844.467.966	26,82%	2.670.088.056	22,24%	2.213.834.068	38,44%	2.776.437.818	100,00%	9.504.827.909	105,27%	95,48%	200,00%	40.200.480.158	204,08%	76,58%		
	2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	jenis dokumen	18	950.359.310	6	475.264.084	3	110.007.726	0	0	0	19.527.470	0	18.511.850	1	45.050.650	1	83.089.970	33,33%	17,48%	7	558.354.054	38,89%	58,75%		
1	2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	284.999.897	5	149.917.494	1	70.007.726	0	0	-	11.616.650	-	13.272.600	1	20.961.400	1	45.850.650	100,00%	65,49%	6	195.768.144	60,00%	68,69%	Sekretariat	
2	2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jenis dokumen	3	148.634.354	3	310.926.690	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0	-	310.926.690	100,00%	209,19%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	8	516.725.059	2	14.419.900	2	40.000.000	0	0	1	7.910.820	1	5.239.250	-	24.089.250	2	37.239.320	100,00%	93,10%	2	51.659.220	25,00%	10,00%	Sekretariat	
	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	dokumen	12	26.785.415.446	10	20.875.289.109	2	7.047.118.497	1	1.538.869.680	2	2.195.763.957	2	1.545.421.334	2	1.541.788.894	2	6.821.843.866	100,00%	96,80%	12	20.917.202.083,83	100,00%	78,09%		
3	2.18.1.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP	bulan	24	7.995.339.922	24	14.059.992.751	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	24	14.059.992.751	100,00%	175,85%	Sekretariat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	212	18.692.436.958	51	6.779.930.891	52	7.032.118.497	52	1.538.869.680,31	52	2.194.734.957	52	1.540.580.934,25	52	1.536.049.894,21	52	6.810.235.465,83	100%	96,84%	52	6.810.235.465,83	24,53%	36,43%	Sekretariat	
4	2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	dokumen	2	28.741.762	2	30.787.217	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	2	30.787.217	100,00%	107,12%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	laporan	48	68.896.804	12	4.578.250	12	15.000.000	0	0	6	1.029.000	3	4.840.400	3	5.739.000	12	11.608.400	100,00%	77,39%	24	16.186.650	50,00%	23,49%	Sekretariat	
	2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepagawaian perangkat daerah	paket	6	555.746.752	3	359.938.926	1	66.299.264	0	0	0	0	0	0	1	62.600.000	1	62.600.000	100,00%	94,42%	4	422.538.926	66,67%	76,03%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14 /9x100		16= 8÷14		17= 16/7x100		18	19
5	2.18.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funesi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan funesi	paket	2	252.838.752	2	353.988.926	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	353.988.926	100,00%	140,01%	Sekretariat	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	83	302.908.000	83	5.950.000	83	66.299.264	-	0	-	0	-	0	83	62.600.000	83	62.600.000	100,00%	94,42%	0	68.550.000	0,00%	22,63%	Sekretariat	
	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan	37	4.388.556.162	17	2.644.419.358	6	533.001.965	0	0	6	28.572.218	6	126.904.620	6	334.756.057	6	490.232.895	100,00%	91,98%	23	2.775.022.221	62,16%	63,23%		
6	2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung	buah	300	27.124.753	300	20.375.700	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%	0,00%	300	20.375.700	100,00%	75,12%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	64.008.949	1	11.692.000	1	22.999.895	0	0	1	2.110.000	1	4.953.000	1	15.842.000	1	22.905.000	100,00%	99,59%	2	34.597.000	50,00%	54,05%	Sekretariat	
7	2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	item	108	839.990.635	202	1.464.259.835	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%	0,00%	202	1.464.259.835	187,04%	174,32%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Peralatan dan	paket	40	940.117.411	10	67.838.500	10	91.071.943	0	0	5	5.182.100	5	40.906.382	0	40.403.796	10	86.492.278	100,00%	94,97%	20	154.330.778	50,00%	16,42%	Sekretariat	
8	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	jenis	6	371.660.976	6	328.925.609	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	6	328.925.609	100,00%	88,50%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	827.670.443	3	60.426.932	3	80.131.350	0	0	3	6.147.650	3	18.739.780	3	54.965.410	3	79.852.840	100,00%	99,65%	6	79.852.840	50,00%	9,65%	Sekretariat	
9	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	24	135.415.349	34	189.361.650	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	34	189.361.650	141,67%	139,84%	Sekretariat	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8	320.044.750	2	14.492.000	2	16.948.250	0	0	0	0	0	0	2	14.290.000	2	14.290.000	100,00%	84,32%	4	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	
10	2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	jenis	10	11.021.087	14	22.120.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	14	22.120.000	140,00%	200,71%	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	20	26.115.622	5	7.300.000	5	6.480.000	0	0	0	0	5	4.860.000	0	1.620.000	5	6.480.000	100,00%	100,00%	10	6.480.000	50,00%	24,81%	Sekretariat	
11	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	kali	130	333.099.032	164	381.268.032	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	164	381.268.032	126,15%	114,46%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	260	492.287.155	65	76.359.100	65	102.034.539	0	0	12	5.361.468	30	29.125.858	23	58.963.451	65	93.450.777	100,00%	91,59%	130	93.450.777	50,00%	18,98%	Sekretariat	
12	2.18.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1		0	0	1	213.335.988	0	0	1	9.771.000	0	28.319.600	0	148.671.400	1	186.762.000	100,00%	87,54%	1	-	100,00%	#DIV/0!	Sekretariat	
	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jasa	18	7.570.047.211	9	3.775.314.349	3	1.689.251.847	2	290.259.549	3	379.736.753	3	379.885.969	3	524.686.586	3	1.574.568.857	100,00%	93,21%	12	4.018.291.243	66,67%	53,08%		
13	2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	kali	260	9.026.110	260	3.769.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	260	3.769.000	100,00%	41,76%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	48	16.502.669	1	420.000	12	1.960.000	-	0	-	0	0	0	12	1.747.000	12	1.747.000	100,00%	89,13%	13	1.747.000	27,08%	10,59%	Sekretariat	
14	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kali	24	688.153.589	24	606.082.376	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	0	606.082.376	0,00%	88,07%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	1.451.325.933	12	322.549.091	12	417.243.847	3	97.875.521	3	88.975.711	3	90.416.396	3	105.733.544	12	383.001.172	100,00%	91,79%	24	383.001.172	50,00%	26,39%	Sekretariat	
15	2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	jenis	64	1.824.880.512	64	1.833.871.010	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	0	1.833.871.010	0,00%	100,49%	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	3.580.158.398	12	1.008.622.872	12	1.270.048.000	3	192.384.028	3	290.761.042	3	289.469.573	3	417.206.042	12	1.189.820.685	100,00%	93,68%	24	1.189.820.685	50,00%	33,23%	Sekretariat	
	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	jenis	36	12.247.649.799	9	2.565.426.424	6	508.804.196	2	15.338.737	2	46.487.658	1	143.110.295	1	267.555.631	6	472.492.321	100,00%	92,86%	15	3.037.918.745	41,67%	24,80%		
16	2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	kendaraan	2	71.940.872	2	100.151.706	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	1	100.151.706	50,00%	139,21%	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	150.130.263	1	19.450.924	1	38.610.000	1	9.788.737	0	2.174.020	0	6.178.436	0	20.448.821	1	38.590.014	100,00%	99,95%	2	58.040.938	50,00%	38,66%	Sekretariat	
17	2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kendaraan	26	259.185.008	40	290.102.826	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	40	290.102.826	153,85%	111,93%	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	52	492.287.515	13	59.833.950	13	94.293.000	1	5.550.000	2	18.300.001	3	14.629.999	7	51.210.300	13	89.690.300	100,00%	95,12%	26	149.524.250	50,00%	30,37%	Sekretariat	
18	2.18.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	jenis	10	48.076.642	5	10.116.244	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	5	10.116.244	16,67%	21,04%	Sekretariat	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	76.235.604	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	
19	2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	12	256.369.099	20	196.973.930	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	20	196.973.930	166,67%	76,83%	Sekretariat	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	24	721.975.466	3	45.813.500	6	43.818.750	0	0	1	2.000.000	2	6.717.000	3	33.458.650	6	42.175.650	100,00%	96,25%	9	87.989.150	37,50%	12,19%	Sekretariat	
20	2.18.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah jenis pemeliharaan	jenis	13	2.109.837.626	25	1.539.403.844	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	25	1.539.403.844	192,31%	72,96%	Sekretariat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	13	6.889.701.246	13	159.009.900	13	317.663.800	0	0	3	24.013.637,15	7	110.584.860,00	3	154.518.110,00	13	289.116.607,15	100,00%	91,01%	26	448.126.507	200,00%	6,50%	Sekretariat	
21	2.18.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	jenis	5	229.464.552	9	107.494.600	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	6	107.494.600	120,00%	46,85%	Sekretariat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	jenis	3	942.445.906	5	37.075.000	5	14.418.646	0	0	0	0	3	5.000.000	2	7.919.750	5	12.919.750	100,00%	89,60%	10	49.994.750	333,33%	5,30%	Sekretariat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	105,27%	95,48%	200%	70.896.132.408	204%	76,58%		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Rendah		
	2.18.02	Meningkatnya angka investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	46,85	7.514.260.893	258,51%	858.647.122	31,23%	406.180.477	9,15%	-	26,38%	75.806.000	20,23%	65.751.835	0,00%	55.715.183	55,76%	348.805.236	178,55%	85,87%	314,27%	1.010.829.990	6,71%	13,45%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	draft	12	868.132.659	2	331.533.100	2	174.960.000	-	0	1	65.251.000	-	62.869.285	1	20.812.783	2	148.933.068	100,00%	85,12%	4	387.686.550	33,33%	44,66%		
22	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	draft	2	146.363.529	2	160.674.700	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	160.674.700	100,00%	109,78%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	dokumen	4	598.901.000	1	12.615.800	1	78.020.000	-		-	4.742.500	1	56.677.300	-	7.349.450	1	68.769.250	100,00%	88,14%	-	68.769.250	0,00%	11,48%	Penanaman Modal	
23	2.18.02.2.01.0002		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	hasil evaluasi	2	122.868.130	2	127.401.600	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	127.401.600	100,00%	103,69%	Penanaman Modal	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	8	456.997.000	9	30.841.000	0	0	-				-		-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	30.841.000	0,00%	6,75%	Penanaman Modal	
23	2.18.02.2.01.0004		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	dokumen	6	280.000.000	0	-	2	96.940.000	-	-	1	60.508.500	-	6.191.985	1	13.463.333	2	80.163.818	100,00%	82,69%	0	80.163.818	0,00%	28,63%	Penanaman Modal	
	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	draft/ kajian	12	6.646.128.234	4	527.114.022	1	231.220.477	-	0	-	10.555.000	0	2.882.550	1	34.902.400	1	199.872.168	100,00%	86,44%	4	623.143.440	33,33%	9,38%		
24	2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	draft	2	894.599.757	2	182.144.850	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	2	182.144.850	100,00%	20,36%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4	1.791.343.786	1	46.109.100	1	50.590.277	-		-	10.555.000	-	2.882.550	1	34.902.400	1	48.339.950	100,00%	95,55%	1	48.339.950	0,00%	2,70%	Penanaman Modal	
25	2.18.02.2.02.0002		Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah kajian hasil Peta Potensi dan Peluang Usaha di	kajian	2	515.541.977	2	241.126.422	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	1	241.126.422	50,00%	46,77%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	4	1.913.824.214	1	57.733.650			-	0	-				-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Penanaman Modal	
26	2.18.02.2.02.0003		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	daerah	1	286.690.000	0	-	1	20.230.000	-	-	-	11.796.250	-	6.048.568	1	1.557.100	1	19.401.918	100,00%	95,91%	1	19.401.918	100,00%	6,77%	Penanaman Modal	
27	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	3	1.244.128.500	0	-	1	160.400.200	-	-	-	2.380.450	-	20.502.150	1	109.247.700	1	132.130.300	100,00%	82,38%	1	132.130.300	33,33%	10,62%	Penanaman Modal	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		178,55%	85,87%	314,27%	1.207.452.358	6,71%	13,45%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.18.03	Meningkatnya anaka investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	%	3,71%	1.240.102.441	17,65%	410.037.167	3,93%	426.962.000	0	-	15,00%	86.580.550		128.040.356		172.275.692	15,00%	386.896.598	381,68%	90,62%	32,65%	796.933.765	880,05%	64,26%		
	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	jenis	12	1.240.102.441	1	410.037.167	2	426.962.000	-	0	1	86.580.550	1	128.040.356	1	172.275.692	2	386.896.598	100,00%	90,62%	1	367.857.117	8,33%	29,66%		
28	2.18.03.2.01.0001		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	video, kajian strategi promosi	2	154.592.108	5	119.433.000	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	4	119.433.000	200,00%	77,26%	Penanaman Modal	
				Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	dokumen	4	196.416.245	1	30.957.250	0	0	-	-			-		-	0	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Penanaman Modal	
29	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	kali	4	208.210.892	1	248.424.117	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	248.424.117	0,00%	119,31%	Penanaman Modal	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	16	518.046.755	2	11.222.800	4	371.216.000	0	-	1	83.113.000	2	76.890.106	1	171.481.692	4	331.484.798	100,00%	89,30%	4	331.484.798	0,00%	63,99%	Penanaman Modal	
30	2.18.03.2.02.0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	dokumen	3	162.836.441	0	-	1	55.746.000	-	-	-	3.467.550	1	51.150.250	-	794.000	1	55.411.800	100,00%	99,40%	1	55.411.800	33,33%	34,03%	Penanaman Modal	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		381,68%	90,62%	32,65%	796.933.765	880,05%	64,26%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Rendah		
	2.18.04	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	%	75%	4.658.095.281	197,75%	1.838.850.950	75%	839.290.525	96,87%	-	83,17%	107.248.564	######	211.446.614	98,54%	303.737.878	93,89%	622.433.056	125,18%	74,16%	291,64%	1.754.286.175	388,85%	37,66%		
	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan	pelayanan	29298	4.658.095.281	51699	1.838.850.950	4715	839.290.525	8345	0	17142	107.248.564	5999	211.446.614	11076	303.737.878	42562	622.433.056	902,69%	74,16%	94261	1.754.286.175	321,73%	37,66%		
31	2.18.04.2.01.0001		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan / sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	izin	2865	1.378.258.987	38655	337.615.061	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	38655	337.615.061	1349,21%	24,50%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	6060	625.994.639	62334	53.757.575	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
32	2.18.04.2.01.0002		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	izin	16250	2.077.933.440	4245	1.270.417.264	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	4245	1.270.417.264	26,12%	61,14%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
33	2.18.04.2.01.0003		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	kali	35	397.063.860	33	41.036.800	-	0		-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	33	41.036.800	94,29%	10,34%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	orang	100	85.695.905	26	17.242.950										0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
34	2.18.04.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan	kali	80	93.148.450	12	105.217.050	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	12	105.217.050	15,00%	112,96%	Pelayanan Terpadu Satu	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	kegiatan usaha	160	187.964.177	94	13.564.250	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
35	2.18.03.2.02.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	120	195.198.100	0	-	40	89.000.000	-	-	4	6.952.000	-	600.000	5	41.215.676	9	48.767.676	22,50%	54,80%	1	48.767.676	0,83%	24,98%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
36	2.18.03.2.02.0006		Penyelesaian Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	pelaku usaha	3000	564.007.032	0	-	1000	216.748.000	8345	-	11.086	36.130.071	8.216	33.548.906	12.313	64.839.548	39960	134.518.525	3996,00%	62,06%	39960	134.518.525	1332,00%	23,85%	Pelayanan Terpadu Satu	
37	2.18.03.2.02.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	75	175.137.319	0	-	25	494.005.025	40	-	35	63.630.493	60	171.471.158	70	180.411.287	205	415.512.938	820,00%	84,11%	1	415.512.938	1,33%	237,25%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
38	2.18.03.2.02.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan	kegiatan usaha	75	1.570.000.000	0	-	25	39.537.500	-	-	-	536.000	-	5.826.550	10	17.271.367	10	23.633.917	40,00%	59,78%	1	23.633.917	1,33%	1,51%	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	125,18%	74,16%	291,64%	2.461.284.006	388,85%	37,66%		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.18.05	Meningkatnya angka investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	Persentase Kepatuhan Perusahaan	%	30%	3.465.848.868	31,70%	1.441.543.417	30%	490.934.450	14,42%	-	14,00%	166.009.100	18,00%	122.575.566	23,00%	199.282.552	69,42%	487.867.218	231,39%	99,38%	101,12%	1.350.839.878	337%	38,98%		
	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Jumlah kegiatan dari sinkronisasi pemantuan,	kali	1037	3.465.848.868	271	1.441.543.417	152	490.934.450	12	0	46	166.009.100	33	122.575.566	0	199.282.552	91	487.867.218	59,87%	99,38%	362	1.350.839.878	14,56%	38,98%		
39	2.18.05.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	kali	179	171.538.744	105	155.103.647	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	105	155.103.647	58,66%	90,42%		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	kegiatan usaha	100	499.239.634	23	11.230.800	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
40	2.18.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	kali	22	438.310.212	27	638.107.151	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	17	638.107.151	77,27%	145,58%		
	2.18.05.2.01.03														0		0		0		-		#DIV/0!						
	2.18.05.2.01.04														0		0		0		-		#DIV/0!						
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	1800	934.168.734	470	299.159.100	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
41	2.18.02.2.02.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	75	151.031.000	0	-	25	62.677.200	0	-	6	3.963.350	7	15.060.628	39	43.518.980	52	62.542.958	208,00%	99,79%	52	62.542.958	69,33%	41,41%		
42	2.18.02.2.02.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi PerizinanBerusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	1350	900.012.500	0	-	450	260.912.800	0	-	155	107.862.600	148	51.255.938	175	99.077.565	478	258.196.103	106,22%	98,96%	1	258.196.103	0,07%	28,69%		
43	2.18.05.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	kali	228	371.548.044	198	236.890.019	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	198	236.890.019	86,84%	63,76%		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	500	499.239.634	86	101.052.700	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
44	2.18.02.2.02.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	pelaku usaha	375	460.500.950	0	-	125	167.344.450	12	-	40	54.183.150	26	56.259.000	42	56.686.007	120	167.128.157	96,00%	99,87%	120	167.128.157	32,00%	36,29%		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	231,39%	99,38%	101,12%	1.929.410.635	337%	38,98%		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.18.06	Meningkatnya angka investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	indeks	5	75.920.000	4	92.450.080	5	27.846.000	4	-	4	6.552.700	4	9.454.700	5	11.830.212	5	27.837.612	100,00%	99,97%	4	100.739.092	80,00%	132,69%		
	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	jenis	18	75.920.000	6	92.450.080	3	27.846.000	3	0	3	6.552.700	3	9.454.700	3	11.830.212	3	27.837.612	100,00%	99,97%	9	100.739.092	50,00%	132,69%		
45			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah pengunjung website dan jumlah pengguna aplikasi	bulan, pengujung	7800	75.920.000	89605	72.901.480	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	21789	72.901.480	279,35%	96,02%		
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	8	149.508.000	2	19.548.600	2	27.846.000	2	-	1	6.552.700	1	9.454.700	2	11.830.212	2	27.837.612	100,00%	99,97%	4	27.837.612	50,00%	18,62%		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00%	99,97%	4	193.189.172	80%	132,69%		
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										12.145.696.947											11.378.667.628,98								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	187,01%	93,68%			60,60%	60,60%		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																												
URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																													
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																													
1.	2.23.01	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	39.999.161.738,00	100	16.321.473.156,58	100	6.029.754.170,00	25	1.145.620.631,55	25	1.913.179.595,84	25	1.245.923.658,41	25	1.404.660.688,72	100	5.709.384.574,52	100,00	94,69	100	22.030.857.731,10	100,00	55,08	Sekretariat	
	2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	87	192.621.230,00	49	78.543.205,00	14	21.554.625,00	6	11.659.400,00	4	5.790.650,00	0	1.455.100,00	4	977.300,00	14	19.882.450,00	100,00	92,24	63	98.425.655,00	72,41	51,10	Sekretariat	
	2.23.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	Dokumen	14	42.043.905,00	14	37.239.985,00															14	37.239.985,00	100,00	88,57	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	85.603.245,00	6	12.978.420,00	6	18.742.825,00	1	11.659.400,00	2	3.351.850,00	0	1.091.300,00	3	977.300,00	6	17.079.850,00	100,00	91,13	12	30.058.270,00	50,00	35,11		
				Jumlah dokumen laporan pengendalian dan dokumen pelaporan kinerja keuangan	Dokumen	17	25.339.940,00	17	24.964.800,00															17	24.964.800,00	100,00	98,52		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= =6/7x100		18	19
	2.23.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	33	39.634.140,00	8	3.360.000,00	8	2.811.800,00	5	-	2	2.438.800,00	0	363.800,00	1	-	8	2.802.600,00	100,00	99,67	16	6.162.600,00	48,48	15,55	Sekretariat	
	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan peranakat daerah	Tahun	6	28.789.023.714,00	3	11.679.762.770,58	1	4.093.506.606,00	1	905.601.197,55	1	1.252.077.929,84	1	859.580.458,41	1	864.570.927,72	1	3.881.830.513,52	100,00	94,83	4	15.561.593.284,10	66,67	54,05	Sekretariat	
	2.23.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	3.589.808.000,00	1	3.416.709.444,00															1	3.416.709.444,00	100,00	95,18	Sekretariat	
				Jumlah ASN Disnerusnin	Orang	32	4.467.154.000,00	32	4.265.397.309.00															32	4.265.397.309.00	100,00	95,48		
				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	20.732.061.714,00	32	3.997.656.017,58	32	4.093.506.606,00	32	905.601.197,55	32	1.252.077.929,84	32	859.580.458,41	32	864.570.927,72	32	3.881.830.513,52	100,00	94,83	32	7.879.486.531,10	100,00	38,01		
	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perangkat daerah yang terlaksana	Jenis	34	2.951.510.333,00	15	1.041.148.644,00	5	353.206.239,00	5	-	5	160.786.062,00	5	65.966.372,00	5	119.323.170,00	5	346.075.604,00	100,00	97,98	20	1.387.224.248,00	58,82	47,00	Sekretariat	
	2.23.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Jenis	5	462.973.015,00	5	494.225.718,00															5	494.225.718,00	100,00	106,75	Sekretariat	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	22	1.382.089.800,00	4	153.714.540,00	5	159.540.624,00		-	4	104.969.985,00	0	-	1	52.025.710,00	5	156.995.695,00	100,00	98,40	9	310.710.235,00	40,91			
	2.23.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang tersedia	Makanan	2.057	55.000.000,00	881	122.639.519,00															881	122.639.519,00	42,83	222,98	Sekretariat	
				Jumlah minuman yang tersedia	Minuman	617		146																146		23,66			
				Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	jenis	3	64.797.000,00	3																3		100,00			
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	16	300.722.877,00	4	45.159.500,00	4	69.360.000,00		-	4	12.504.800,00	4	26.620.700,00	4	26.146.400,00	4	65.271.900,00	100,00	94,11	8	110.431.400,00	50,00	36,72		
	2.23.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakkan dan penggandaan	Jenis	6	16.899.350,00	6	16.820.725,00															6	16.820.725,00	100,00	99,53	Sekretariat	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	16	32.021.044,00	4	8.014.800,00	4	15.820.115,00		-	3	9.699.212,00	0	956.200,00	1	4.748.000,00	4	15.403.412,00	100,00	97,37	8	23.418.212,00	50,00	73,13		
	2.23.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jenis	15	24.120.000,00	15	24.080.000,00															15	24.080.000,00	100,00	99,83	Sekretariat	
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	8	42.325.920,00	2	5.215.000,00	4	8.993.000,00	4	-	4	2.997.000,00	4	2.997.000,00	4	2.997.000,00	4	8.991.000,00	100,00	99,98	6	14.206.000,00	75,00	33,56		
	2.23.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk mendapatkan informasi kedinasan	Kali	90	151.725.000,00	87	138.695.624,00															87	138.695.624,00	96,67	91,41	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	200	418.836.327,00	50	32.583.218,00	25	99.492.500,00	8	-	3	30.615.065,00	6	35.392.472,00	8	33.406.060,00	25	99.413.597,00	100,00	99,92	75	131.996.815,00	37,50	31,52		
	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	72	6.893.760.822,00	36	2.813.317.694,00	12	1.048.962.000,00	3	163.828.234,00	3	240.638.134,00	3	240.305.728,00	3	308.352.091,00	12	953.124.187,00	100,00	90,86	48	3.766.441.881,00	66,67	54,64	Sekretariat	
	2.23.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran internet, telepon, wifi, Air dan listrik	Bulan	24	431.999.800,00	24	317.122.530,00															24	317.122.530,00	100,00	73,41	Sekretariat	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	16	918.917.072,00	4	189.620.104,00	4	237.864.000,00	1	33.831.634,00	1	36.893.234,00	1	39.260.828,00	1	44.808.891,00	4	154.794.587,00	100,00	65,08	8	344.414.691,00	50,00	37,48		
	2.23.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran instruktur senam	Kali	96	1.663.200.000,00	96	1.578.300.000,00															96	1.578.300.000,00	100,00	94,90	Sekretariat	
				Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Bulan	24		24																24		100,00			
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	48	3.879.643.950,00	12	728.275.060,00	12	811.098.000,00	3	129.996.600,00	3	203.744.900,00	3	201.044.900,00	3	263.543.200,00	12	798.329.600,00	100,00	98,43	24	1.526.604.660,00	50,00			
	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	30	1.172.245.639,00	15	708.700.843,00	5	512.524.700,00	5	64.531.800,00	5	253.886.820,00	4	78.616.000,00	4	111.437.200,00	5	508.471.820,00	100,00	99,21	20	1.217.172.663,00	66,67	103,83	Sekretariat	
	2.23.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	22	282.333.350,00	20	290.437.025,00															20	290.437.025,00	90,91	102,87	Sekretariat	
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	Unit	36	523.244.904,00	9	125.320.300,00	10	286.249.700,00	3	64.531.800,00	3	68.537.820,00	3	62.651.000,00	1	87.867.200,00	10	283.587.820,00	100,00	99,07	19	408.908.120,00	52,78	78,15		
	2.23.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jenis	7	50.515.275,00	7	49.396.525,00															7	49.396.525,00	100,00	97,79	Sekretariat	
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	26	142.014.600,00	5	22.090.000,00	6	65.716.000,00		-	3	26.160.000,00	1	15.965.000,00	2	23.570.000,00	6	65.695.000,00	100,00	99,97	11	87.785.000,00	42,31	61,81		
	2.23.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset yang dipelihara	Jenis	4	31.818.375,00	3	31.714.000,00															3	31.714.000,00	75,00	99,67	Sekretariat	
				Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	10	55.009.773,00	1	11.488.500,00	0	-		-		-	0	-			0	-	0,00	-	1	11.488.500,00	10,00	20,88		
	2.23.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	2	66.569.800,00	2	66.265.423,00															2	66.265.423,00	100,00	99,54	Sekretariat	
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	20.739.562,00	1	111.989.070,00	2	160.559.000,00		-	2	159.189.000,00	0	-	0	-	2	159.189.000,00	100,00	99,15	3	271.178.070,00	30,00	1.307,54		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)			100,00	95,03	66,25	62,12		
																					Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
2.	2.23.02	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan Meningkatnya Pembangunan Literasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai SKM Perpustakaan	Nilai	(81,26-100) SANGAT BAIK	6.236.148.044,00	84,59 SANGAT BAIK	6.316.390.116,00	(81,26-100) SANGAT BAIK	910.984.436,00	0,00	-	92,65	390.368.260,00	0,00	339.667.875,00	88,25	118.448.315,00	88,25 SANGAT BAIK	848.484.450,00	100,00	93,14	100,00	7.164.874.566,00	100,00	114,89	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Persentase Perpustakaan yang dibina	%	100		94,79		85,34		0,00		0,29		0,44		0,29		95,82		112,29		190,62		190,62		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01		Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan berstandarisasi Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	90	3.916.044.100,00	35	5.558.716.522,00	15	185.941.994,00	0	-	0	81.123.350,00	0	18.608.700,00	0	32.020.600,00	0	131.752.650,00	0,00	70,86	35	5.690.469.172,00	38,89	145,31	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan	Peminjam	8.000		1.716		2.000		1.334		1.675		2.715		1.840		7.564		378,20		9.280		116,00		Bidang Pengembangan Minat Baca	
	2.23.2.2.01.02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perpustakaan reguler	Kunjungan	25.740	92.715.398,00	11.165	209.118.798,00															11.165	209.118.798,00	43,38	225,55	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan	pemustaka	20.824	125.374.000,00	26.411																26.411		100,00		
				Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	20	477.715.766,00	130	62.313.900,00	70	41.563.498,00		-	20	14.108.600,00	21	9.685.900,00	29	17.384.500,00	70	41.179.000,00	100,00	99,07	200	103.492.900,00	1000,00	21,66		
	2.23.02.2.01.04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	Pengelola	150	1.392.980.744,00	150	3.497.421.944,00															150	3.497.421.944,00	100,00	251,07	Bidang Pembinaan dan	
				Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan	Sekolah	28		28																28		100,00		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.23.02.2.01.06		Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	268	435.789.436,00	85	67.973.000,00	22	34.348.496,00		-	5	7.140.750,00	6	8.922.800,00	3	14.636.100,00	14	30.699.650,00	63,64	89,38	99	98.672.650,00	36,94	22,64	Pengembangan Perpustakaan	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan desa yang diberikan pelatihan	Pengelola	100	142.366.396,00	0	141.067.396,00															0	141.067.396,00	0,00	99,09	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah peningkatan kinerja SDM perpustakaan daerah	Peserta	80		80																80		100,00			
				Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	365.477.822,00	51	79.556.454,00	0	-		-							0	-	0,00	-	51	79.556.454,00	25,50	21,77		
	2.23.02.2.01.09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka cetak/e-book	Judul	3.988	362.985.300,00	5.064	560.971.380,00															5.064	560.971.380,00	100,00	154,54	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	5.500	520.639.238,00	200	940.293.650,00	22.430	110.030.000,00		-	187	59.874.000,00			0	-	187	59.874.000,00	0,83	54,42	387	1.000.167.650,00	7,04	192,10		
	2.23.01.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca pada Perpustakaan Umum	Orang	52.000	2.320.103.944,00	31.187	757.673.594,00	8.000	725.042.442,00	5.261	-	7.694	309.244.910,00	8.281	321.059.175,00	11.800	86.427.715,00	33.036	716.731.800,00	412,95	98,85	64.223	1.474.405.394,00	123,51	63,55	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Jumlah masyarakat yang Gemar Membaca pada Perpustakaan Sekolah, Desa dan Khusus	Orang	8.000		2.000		2.000		1.530		1.528		1.803		1.437		6.298		314,90		8.298		103,73		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
	2.23.01.2.02.01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi tingkat dasar, khusus, dan masyarakat	Peserta	230	166.762.644,00	160	147.145.178,00															160	147.145.178,00	69,57	88,24	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	516	514.885.535,00	30	70.643.350,00	142	440.350.515,00	12	-	57	221.270.365,00	52	164.392.250,00	21	48.691.900,00	142	434.354.515,00	100,00	98,64	172	504.997.865,00	33,33	98,08		
	2.23.01.2.02.02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan sesuai kewenangan daerah	Titik/unit	26	33.795.628,00	70	33.060.528,00															70	33.060.528,00	100,00	97,82	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	18	199.603.377,00	1	39.314.044,00	0	-		-							0	-	0,00	-	1	39.314.044,00	5,56	19,70		
	2.23.01.2.02.03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba perpustakaan desa	Desa	32	92.899.800,00	0	92.556.900,00															0	92.556.900,00	0,00	99,63	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah tingkat SD/Mi	Sekolah	32		0																0		0,00			
				Jumlah peserta lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs	Sekolah	32		0																0		0,00			
				Jumlah peserta lomba Story Telling Mi	Siswa	16		0																0		0,00			
				Jumlah peserta lomba Story Telling SD	Siswa	16		0																0		0,00			
				Jumlah peserta lomba implementasi budaya baca	Tim	16																							
				Jumlah peserta lomba Story Telling SD/Mi	Siswa	32		16																16		50,00			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	60	617.883.248,00	6	74.786.350,00	9	210.603.927,00		-	6	57.716.905,00	3	123.123.800,00	0	28.272.000,00	9	209.112.705,00	100,00	99,29	15	283.899.055,00	25,00	45,95		
	2.23.01.2.02.04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	Desa	44	261.081.844,00	22	257.851.144,00															22	257.851.144,00	50,00	98,76	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
				Jumlah peserta pelibatan masyarakat di perpustakaan daerah	Peserta	190		280																280		100,00			
				Jumlah peserta dari perpustakaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	Peserta	1.320		1.370																1.370		100,00			
				Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	108	433.191.868,00	25	42.316.100,00	280	74.088.000,00		-	120	30.257.640,00	120	33.543.125,00	40	9.463.815,00	280	73.264.580,00	100,00	98,89	305	115.580.680,00	282,41	26,68		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		276,51	84,86			95,53	104,43		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3.	2.23.03	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	%	100,00	313.003.196,00	70	94.203.596,00	80	215.000.000,00	0	-	5	177.259.315,00	0	10.954.378,00	0	20.935.200,00	75,00	209.148.893,00	93,75	97,28	145,00	303.352.489,00	145,00	96,92	Bidang Pengembangan Minat Baca	
	2.23.03.2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno/Muatan Lokal yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah Kuno/Muatan Lokal	94	313.003.196,00	24	94.203.596,00	14	215.000.000,00	0	-	2	177.259.315,00	0	10.954.378,00	0	20.935.200,00	26,00	209.148.893,00	185,71	97,28	50	303.352.489,00	53,19	96,92	Bidang Pengembangan Minat Baca	
	2.23.03.2.01.03		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah Kuno	10	80.742.996,00	146	43.851.096,00															146	43.851.096,00	100,00	54,31	Bidang Pengembangan Minat Baca	
				Jumlah Naskah Kuno/Muatan Lokal yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Naskah Kuno/Muatan Lokal	10		0																0		100,00			
				Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	20	232.260.200,00	3	50.352.500,00	1	215.000.000,00		-	2	177.259.315,00		10.954.378,00		20.935.200,00	2	209.148.893,00	200,00	97,28	5	259.501.393,00	25,00	111,73		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		185,71	97,28			53,19	96,92		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
4.	2.24.02	Meningkatnya kualitas tata kelola Kearsipan sesuai ketentuan dan Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	%	81,46	2.403.851.697,00	46,80	941.967.972,00	63,80	125.030.000,00	0	-	11,92	89.651.325,00	0,00	9.856.800,00	0,00	24.590.100,00	58,72	124.098.225,00	92,04	99,25	105,52	1.066.066.197,00	129,54	44,35	Bidang Kearsipan	
				Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	SANGAT BAIK (71-80)		88,07 MEMUASKAN		(71-80)SANGAT BAIK		0		0		0		88,41		88,41		100,00		88,41		0,00		Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dengan Nilai Pengawasan Kategori BAIK	OPD	18	533.236.029,00	6	188.621.178,00	3	61.361.750,00	0	-	3	46.474.950,00	0	9.856.800,00	0	4.190.100,00	3	60.521.850,00	100,00	98,63	9	249.143.028,00	50,00	46,72	Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.01.03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menjadi target pengawasan Kearsipan Internal	OPD	35	152.098.253,00	27	147.356.853,00															27	147.356.853,00	77,14	96,88	Bidang Kearsipan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	156	381.137.776,00	37	41.264.325,00	29	61.361.750,00		-		46.474.950,00		9.856.800,00	29	4.190.100,00	29	60.521.850,00	100,00	98,63	66	101.786.175,00	42,31	26,71		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	2.24.02.2.02		Pengeloldaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola di Lembaga Kearsipan Daerah	Lembar	665.824	1.139.667.151,00	240.307	369.796.247,00	112.004	17.705.375,00	0	-	2.000	17.705.375,00	0	-		-	242.307	17.705.375,00	216,34	100,00	482.614	387.501.622,00	72,48	34,00	Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.02.02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip/Dokumen yang diduplikasi dalam bentuk Informatika	Lembar	5.000	337.703.394,00	4511	323.508.647,00															4.511	323.508.647,00	90,22	95,80	Bidang Kearsipan	
				Jumlah pelaksanaan akuisisi arsip	kali	20		20																20		100,00			
				Jumlah Pengadaan sarana penyimpanan arsip	Buah	3.000		3.000																3.000		100,00			
				Luas Ruangan yang diinjeksi anti rayap	M2	600		600																600		100,00			
				Volume depo arsip yang difumigasi	M3	722		722																722		100,00			
				Jumlah arsip yang direstorasi	berkas	2		1																1		50,00			
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	8.000	801.963.757,00	5000	46.287.600,00	2.000	17.705.375,00		-	2.000	17.705.375,00					2.000	17.705.375,00	100,00	100,00	7.000	63.992.975,00	87,50	7,98		
	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasionaal Kabupaten/Kota yang dikelola	Layanan	6	730.948.517,00	3	383.550.547,00	1	45.962.875,00	1	-	1	25.471.000,00	1	-	0	20.400.000,00	1	45.871.000,00	100,00	99,80	4	429.421.547,00	66,67	58,75	Bidang Kearsipan	
	2.24.02.2.03.01		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah peserta bimtek layanan informasi arsip	Orang	20	169.912.211,00	20	165.564.535,00															20	165.564.535,00	100,00	97,44	Bidang Kearsipan	
				Jumlah repro khazanah arsip	Buah	90		45																45		50,00			
				Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	80	153.442.598,00	20	19.393.500,00	20	35.666.875,00		-	20	15.175.000,00			0	20.400.000,00	20	35.575.000,00	100,00	99,74	40	54.968.500,00	50,00	35,82		
	2.24.02.2.03.02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah juara lomba tertib arsip desa/kelurahan	Juara	5	175.544.868,00	0	182.080.712,00															0	182.080.712,00	0,00	103,72	Bidang Kearsipan	
				Jumlah peserta bimtek kearsipan bagi ormas/orpol	Orang	90		50																50		55,56			
				Jumlah peserta bimtek kearsipan desa/kelurahan	Orang	80		40																40		50,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	232.048.840,00	3	16.511.800,00	48	10.296.000,00		-	48	10.296.000,00					48	10.296.000,00	100,00	100,00	51	26.807.800,00	425,00	11,55		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	138,78	99,48			63,05	46,49		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
5.	2.24.03	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	100,00	78.965.074,00	20,00	13.365.900,00	40,00	-	0	-	0,00	-		-		-	0,00	-	0,00	-	20	13.365.900,00	20,00	16,93	Bidang Kearsipan	
	2.24.03.2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa /Kelurahan	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan/digabung	kegiatan	5	78.965.074,00	1	13.365.900,00	1	-	0	-	0	-		-		-	0	-	0,00	-	1	13.365.900,00	20,00	16,93	Bidang Kearsipan	
	2.24.03.2.03.01		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat dari penggabungan perangkat daerah	meter linier	1	13.998.500,00	1	13.365.900,00															1	13.365.900,00	100,00	95,48	Bidang Kearsipan	
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	12	64.966.574,00			0	-		-		-		-		-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			20,00	16,93		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						48.952.164.675,00		23.674.034.840,58		7.280.768.606,00		1.145.620.631,55		2.570.458.495,84		1.606.402.711,41		1.568.634.303,72		6.891.116.142,52				30.565.150.983,10				
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	175,25	94,16			69,50	77,49		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Tinggi		
	DINAS PERIKANAN																												
	3.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				324.965.787.805	0	27.527.580.615		15.243.196.857	7	1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889,30		4.455.876.975,54	68	10.324.197.693,85	7,00	67,73		47.132.998.033				
	3.01.01.		DINAS PERIKANAN				324.965.787.805		27.527.580.615		15.243.196.857	7	1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889,30		4.455.876.975,54	68	10.324.197.693,85	7,00	67,73		47.132.998.033				
	3.01.		KELAUTAN DAN PERIKANAN				324.965.787.805		27.527.580.615		15.243.196.857	7	1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889,30		4.455.876.975,54	68	10.324.197.693,85	54,0	67,73		47.132.998.033				
	3.01.3.01.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			600	303.241.449.305	58,8260629	22.242.940.368	12	6.131.366.618	3	1.101.051.780		1.203.584.468		1.883.556.849,30		1.473.819.433,89	3	5.662.012.531,20	25,00	92,35	62	27.904.952.899	10,30	9,20	Sekretariat	
	3.01.3.01.01.01.02 .	Terselenggaranya administrasi Pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	Dokumen	600,00	138.286.191.502	100	138.286.191.502	tidak perlu diisi	44.997.193		-		10.165.500		2.160.000		2.052.050		14.377.550			100	138.286.191.502				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8 (2023-2	51.243.500	19	45.543.000	14	34.350.213	-	-	4	10.165.500		2.160.000		2.052.050	4	14.377.550	29,59	41,86	23	59.920.550	289%	117%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	48	29.282.000		disamakan dengan kolom 12	8	10.646.980		-		-		-		-		-								
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	60	424.358.550		45.543.000	14	34.350.213	-	-	4	10.165.500		2.160.000		2.052.050		14.377.550				59.920.550				
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					8	10.646.980		-		-				-		-				-				
	3.01.3.01.01.01.03		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)		100	28.237.885.000	83	21.406.302.396		4.341.352.832		995.401.780		852.517.880,57		1.375.380.843		865.529.118	33	4.088.829.622,18	#DIV/0!	94,18	116	25.495.132.018	116,00	90,29		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	28.237.885.000	33	10.138.797.268	40	4.341.352.832	33	995.401.780	33	852.517.880,57		1.375.380.843		865.529.117,87	33	4.088.829.622,18	82,50	94,18	33	14.227.626.890	89,19	50,38		
	3.01.3.01.01.01.05		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		100	4.200.215.000	106	1.058.498.500		477.827.483		-	59	154.512.633	-	160.850.720		39.588.020	59	354.951.373,00	#DIV/0!	74,28	165	1.413.449.873	165,00	33,65		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	600	1.163.000.000			8	35.000.000		-		-		31.398.100		-										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	900.000.000			35	228.460.952		-	2	118.650.000		51.087.950		-										
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	100.000.000			15	37.308.966		-	1	500.000		17.835.000		500.000										
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	373.435.000			11	58.989.682		-	5	5.753.100		14.202.500		10.744.500										
				t Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	361.000.000			5	21.046.883		-	1	1.167.000		16.699.000		150.000,00										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	46.679.000			4	-		-		-														

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1302	1.256.101.000			160	97.021.000		-	50	28.442.533		29.628.170		28.193.520										
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	600	1.163.000.000	8	#VALUE!	8	35.000.000		-		-		31.398.100		-	-	31.398.100	0,00	89,71	8	#VALUE!	1,33	#VALUE!		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	900.000.000	35	68.690.708	35	228.460.952		-	2	118.650.000		51.087.950		-	2	169.737.950	5,71	74,30	37	238.428.658	154,17	26,49		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	100.000.000	15	8.720.160	15	37.308.966		-	1	500.000		17.835.000		500.000	1	18.835.000	6,67	50,48	16	27.555.160	66,67	27,56		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	373.435.000	11	67.145.000	11	58.989.682		-	5	5.753.100		14.202.500		10.744.500	5	30.700.100	45,45	52,04	16	97.845.100	2,67	26,20		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	t Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	361.000.000	5	32.028.400	5	21.046.883		-	1	1.167.000		16.699.000		150.000,00	1	18.016.000	20,00	85,60	6	50.044.400	100,00	13,86		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	46.679.000	4	7.800.000	4	-		-		-		-			4	-	0,00	0,00	8	7.800.000	11,11	16,71		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1302	1.256.101.000	160	137.077.098	160	97.021.000		-	50	28.442.533		29.628.170		28.193.520	50	86.264.223	31,25	88,91	210	223.341.321	16,13	17,78		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.320.341.500	53	2.881.054.880		778.873.277		105.650.000	26	140.312.564	-	243.979.489		241.241.397	26	731.183.450	#DIV/0!	93,88	79	3.612.238.330	79,00	155,68		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		600	1.163.000.000			12	108.299.785			6	28.749.894		23.222.839		21.227.407										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.157.341.500			20	670.573.492			20	166.504.000		220.756.650		220.013.990										
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		600	1.163.000.000	12	184.422.194	12	108.299.785		-	6	28.749.894		23.222.839		21.227.407	6	73.200.140	50,00	67,59	18	257.622.334	1,00	22,15		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.157.341.500	20	1.161.291.240	22	670.573.492	20	105.650.000	20	111.562.670		220.756.650		220.013.990	20	657.983.310	90,91	98,12	40	1.819.274.550	55,56	157,19		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1.925.044.450	12	694.325.004	12	488.315.833		-		46.075.890		101.185.797		325.408.849,02	-	472.670.536,02	0,00	96,80	12	1.166.995.540	12,00	60,62		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	925.873.200			1	38.610.000		-		-		-			-	-								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	925.873.200			8	116.330.002				-													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	806.281.000			1	10.000.600				-													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						-																	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	600	192.890.250			4	25.496.000		-		-					-	-							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	925.873.200			1	71.289.000		-	1	12.714.740		17.034.125		40.428.100	1	70.176.965							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	925.873.200	16	232.577.300	8	162.742.633		-	8	25.489.650		47.319.300		86.174.450	8	158.983.400	100,00	97,69	24	391.560.700	33,33	42,29		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	806.281.000	-	-	1	205.607.200		-		-		25.602.372		176.406.299,02	-	202.008.671,02	0,00	98,25	-	202.008.671	0,00	25,05		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			-			-		-				-		-	-	-	0,00	0,00	-					
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	600	192.890.250	4	69.640.000	4	48.677.000		-	1	7.871.500		11.230.000		22.400.000	1	41.501.500	25,00	85,26	5	111.141.500	0,83	57,62		
																		Rata - rata capaian Kinerja (%)				#DIV/0!	70,26			30,29	86,77		
																		Predikat Kinerja				#DIV/0!	Sedang			Sangat Rendah	Tinggi		
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap(ton)		23.500	3.099.520.500	11.950	3.880.110.820	11611	1.924.815.925	2.061			291.221.000		88.857.500		466.201.500	2.061	846.280.000,00	17,75	43,97	14.010	4.726.390.820	120,66	152,49	Bidang Perikanan Tanskap	
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)		1	400.000.001				1.314.815.925		-		288.171.000		53.674.500		453.131.000	-	794.976.500	#DIV/0!	60,46			0,00	0,00		
				Jumlah Data Base	Paket	1	400.000.000				140.000.000				-		-												
				Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	1	1				1.314.815.925		-		-		-												
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Base	Paket	1	400.000.000	1	-		140.000.000		-		-		13.915.500		12.028.000	-	25.943.500	0	0,00	1	25.943.500	100,00	6,49		
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	1	1	5	1.986.238.800	2	1.174.815.925		-	1	288.171.000		39.759.000,00		441.103.000	1	769.033.000	50,00	65,46	6	2.755.271.800	559,37	167,97		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan	Orang	400	136.120.000				60.000.000				-														
				Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan	Orang	480	89.400.000				150.000.000				-														
				Peserta Sehat Nelayan	Orang	960	385.780.500				100.000.000				-														
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								310.000.000				-		18.936.500		11.390.500		30.327.000								
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Orang	400	136.120.000	27	283.592.500	16	60.000.000		-		-		8.714.500		10.760.500	-	19.475.000	0,00	32,46	27	303.067.500	6,74	222,65		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Orang	480	89.400.000	31	121.169.400		150.000.000		-		-		10.222.000		630.000	-	10.852.000	#DIV/0!	7,23	31	132.021.400	6,50	147,67		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peserta Sehat Nelayan (orang)	Orang	960	385.780.500	32	62.139.900		100.000.000		-		-		-			-	-	0,00	0,00	32	62.139.900	3,32	16,11		
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)		25	1.952.100.000	1	350.646.520		300.000.000		-		3.050.000		16.246.500		1.680.000	-	20.976.500	#DIV/0!	6,99	1	371.623.020	2,29	19,04		
				Jumlah peserta pembinaan teknis (Kelompok Pengelola)	Kelompok	150	530.100.000				-																		
				Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	300	1.422.000.000				300.000.000				3.050.000		16.246.500		1.680.000										
			Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis (Kelompok Pengelola)	Kelompok	150	530.100.000	44	24.452.000		-		-							-	-	0,00	0,00	44	24.452.000	29,65	4,61		
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	300	1.422.000.000	6	326.194.520		300.000.000		-		3.050.000		16.246.500		1.680.000	-	20.976.500	#DIV/0!	6,99	6	347.171.020	1,89	24,41		
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	%	50	89.400.000	10	37.020.000		-		-		-					-	-	0,00	0,00	10	37.020.000	19,73	41,41		
				Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	480	89.400.000				-				-														
			Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	480	89.400.000	46	37.020.000		-		-		-					-	-	0,00	0,00	46	37.020.000	9,60	41,41		
																			0			#DIV/0!	#REF!			12,16	49,11		
																			Predikat Kinerja			#DIV/0!	#REF!			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		#######	5.584.115.000	#########	9.832.172.631	######	3.132.021.000	######	-		22.654.000		463.398.480		1.614.014.231,44	39.831.889	2.100.066.711,44	26,30	67,05	345.008.468	11.932.239,342	246434,62	213,68	Bidang Perikanan Budidaya	
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)		7	1.002.702.400				635.400.000		-		2.472.000		50.218.500		557.159.320	-	609.849.820	0,00	98,15			0,00	0,00		
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	10	206.892.000				600.400.000				2.472.000														
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	8	795.810.400				35.000.000				-														
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	10	206.892.000	370	7.379.601.332	90	600.400.000		-		2.472.000		32.731.000		554.074.820	-	589.277.820	0,0	98,15	370	7.968.879.152	3700,13	3851,71		
			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang)	Orang	8	795.810.400	144	363.688.300	50	35.000.000		-		-		17.487.500		3.084.500	-	20.572.000	0,00	0,00	144	384.260.300	1800,02	48,29		
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (orang)		20	4.581.412.600				2.496.621.000		-		20.182.000		413.179.980		1.056.854.911,44	-	1.490.216.891,44	50,00	83,10			0,00	0,00		
				Jumlah Data Base (paket)		600	771.561.000																						
				Jumlah Peserta pembinaan (orang)		72	1.600.677.600			1	1.281.621.000				-														
				Jumlah Peserta Pembinaan (orang)		720	400.000.000			100	30.000.000			50	17.077.000					50	17.077.000								
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang) / Demp. Percontohan (unit)		184	1.580.735.000				1.150.000.000				3.105.000														
				Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		1.800	1.000.000.000				-																		
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)				-	141.889.754		-		-							-	-	0,00	0,00	-	141.889.754	0,00	#DIV/0!		
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan (orang)		72	1.600.677.600	45	433.905.300	1	1.281.621.000		-		-		259.679.000		851.412.409,44	-	1.111.091.409,44	0,00	0,00	45	1.544.996.709	0,00	96,52		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)		720	400.000.000	234	115.484.673	100	30.000.000		-	50	17.077.000		2.481.000		5.370.550	50	24.928.550	50,00	83,10	284	140.413.223	39,49	35,10		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang) / Demp. Percontohan (unit)		184	1.580.735.000	49	816.745.400		1.150.000.000		-		3.105.000		121.819.230		197.982.752	-	322.906.982	0,00	0,00	49	1.139.652.382	0,00	72,10		
			Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		1800	1.000.000.000	39	571.487.072		35.000.000		-		-		29.200.750		2.089.200	-	31.289.950	0	0,00	39	602.777.022	2,14	60,28		
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)							-		-							-	-	0,00	0,00			0,00			
																			Rata - rata capaian kinerja (%)			25,00	90,62			306,94	#DIV/0!		
																			Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	#DIV/0!		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan,perikan an secara optimal terkendali dan berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan usaha perikanan		44	8.496.453.000	43	405.246.300	32	899.993.314		-		74.034.000		145.207.000		124.212.400	32	343.453.400	100,00	38,16	75	748.699.700	170,43	8,81	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	
				Persentase " Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan		30		25	-	20										20	-	100,00		45	-				
				Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N		84,5				78										-		-							
			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan		10	8.496.453.000	4	405.246.300		899.993.314		-		74.034.000		145.207.000		124.212.400	-	343.453.400	50,00	38,16	4	748.699.700	38,46	8,81		
				Jumlah Peserta Pembinaan Teknis orang		600	8.207.341.500			4	399.960.204			60	53.390.000		57.595.200		23.026.600										
				Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		3	289.111.500			4	500.033.110			30	20.644.000		87.611.800		101.185.800										
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis orang		600	8.207.341.500	250	239.529.000	90	399.960.204		-	60	53.390.000		57.595.200		23.026.600	60	134.011.800	66,67	33,51	310	373.540.800	51,67	4,55		
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		3	289.111.500	267	165.717.300	90	500.033.110		-	30	20.644.000		87.611.800		101.185.800	30	209.441.600	33,33	41,89	297	375.158.900	9910,49	129,76		
																			Rata - rata capaian kinerja (%)			50,00	38,16			1746,69	#DIV/0!		
																			Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	#DIV/0!		
		Tercapainya kecukupan Gizi dari protein hewani masyarakat dari hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan		75	4.544.250.000	100	441.118.220	85	3.155.000.000		-		226.260.581		368.495.060		777.629.410,21	86	1.372.385.051,21	101	43,50	186	1.820.715.271	247,63	0,00	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Presentase Tingkat konsumsi ikan				0	-	1										-	-	0,00		0	-	119,15	0,00		
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan		50	500.000.000		7.212.000		-		-		-					-	-	0,00	0,00		7.212.000	0,00	1,44		
				Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (paket		1	500.000.000				-																		
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (paket		1	500.000.000	-	7.212.000		-		-		-					-	-	0,00	0,00	-	7.212.000	0,00	1,44		
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mempunyai Kelayakan Produk (unit)	Unit	175	500.000.000	11	474.322.905		500.000.000		-				141.600.000		284.701.398,40	-	426.301.398,40	0,00	85,26	11	900.624.303	6,03	180,12		
				Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Orang)	Orang	1200	500.000.000				-																		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Orang)	Orang	1200	500.000.000	202	474.322.905	32	500.000.000		-		-		141.600.000		284.701.398,40	-	426.301.398,40	0,00	85,26	202	900.624.303	16,83	180,12		
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)		130.000	1.500.450.000	165.108	1.866.034.670		2.655.000.000		-		226.260.581		226.895.060		492.928.011,81	-	946.083.652,81	38,46	55,39	165.108	2.812.118.323	127,01	187,42		
				Jumlah Ketersediaan Ikan(ton)		1.500	1.000.000.000			######	200.000.000				-		153.998.650												
				Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Kelompok)		2.260	500.450.000			39	2.455.000.000			30,000	226.260.581		72.896.410												
	3.01.3.01.01.01.06		Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan(ton)		1500	1.000.000.000	165.226	762.283.350	######	200.000.000		-		-		153.998.650		3.291.800	-	157.290.450	0,00	78,65	165.226	919.573.800	11015,07	91,96		
	3.01.3.01.01.01.07		Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Kelompok)		2260	500.450.000	59	1.103.751.320	39	2.455.000.000		-	30	226.260.581		72.896.410		489.636.211,81	30	788.793.202,81	76,92	32,13	89	1.892.544.523	3,96	378,17		
																			Rata - rata capaian kinerja (%)	-		19,23	70,32			1281,74	113,41		
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							15.243.196.857		1.101.051.780		1.817.754.049		2.949.514.889		4.455.876.976		10.324.197.694				47.132.998.033				
																			TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			54,05	67,73			76,84	76,84		
																			Predikat Kinerja			Rendah	Sedang			Tinggi	Tinggi		
	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,																												
			DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				278.320.680.779,00		76.995.985.870,30		34.364.370.100,00		11.756.831.287,95		4.439.752.412,96		9.834.235.350,68		5.646.066.342,19		31.676.885.393,78		92,18		108.672.871.264,08		39,05		
A			SEKRETARIAT	Persentase Ketercapian Program Disparekrafbudpora dengan nilai minimal 75%	%	100	75.576.412.257,00	100	31.925.374.846,61	100	10.640.138.837,00	25	1.922.835.085,12	25	3.018.183.732,96	25	2.278.131.524,68	25	2.867.376.161,57	100,00	10.086.526.504,33	100,00	94,80	100,00	42.011.901.350,94	100,00	55,59		
1	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100	75.576.412.257,00	100	31.925.374.846,61	100	10.640.138.837,00	25	1.922.835.085,12	25	3.018.183.732,96	25	2.278.131.524,68	25	2.867.376.161,57	100,00	10.086.526.504,33	100,00	94,80	100,00	42.011.901.350,94	100,00	55,59		
1	2.19.01.2.01		Perencanaan,	Jumlah Dokumen dan Laporan	Dokumen	52	1.306.425.375,00	20	354.961.469,00	8	93.485.000,00	4	-	1	24.278.000,00	2	14.646.500,00	1	53.423.800,00	8	92.348.300,00	100,00	98,78	28,00	447.309.769,00	53,85	34,24		
			Penganggaran, dan	Perencanaan, Penganggaran,	Laporan	42		15		9		6		9		6		6		9		100,00		24,00		57,14			
1)	2.19.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	860.793.710,00	24	272.371.119,00	8	35.874.000,00	4	-	1	19.856.000,00	2	9.902.500,00	1	5.180.000,00	8	34.938.500,00	100,00	97,39	32,00	307.309.619,00	66,67	35,70	DISPAREKRAFB UDPORA	
2)	2.19.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	57.815.900,00	4	30.339.500,00															4,00	30.339.500,00	100,00	52,48	DISPAREKRAFB UDPORA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	200.000.000,00	6	13.364.000,00	6	14.611.000,00	6	-	6	4.422.000,00	6	4.744.000,00	6	5.364.500,00	6	14.530.500,00	100,00	99,45	12,00	27.894.500,00	50,00	13,95	DISPAREKRAFB UDPORA	
3)	2.19.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	187.815.765,00	9	38.886.850,00	3	43.000.000,00	0	-	3	-	0	-	0	42.879.300,00	3	42.879.300,00	100,00	99,72	12,00	81.766.150,00	66,67	43,54	DISPAREKRAFB UDPORA	
2	2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	Orang/Bulan	43	46.466.280.225,00	43	19.883.645.581,90	42	5.836.560.000,00	42	1.322.852.804,12	42	1.826.038.456,82	42	1.233.274.483,63	42	1.228.582.615,38	42	5.610.748.359,95	100,00	96,13	43,00	25.494.393.941,85	100,00	54,87		
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	28		20		6		6		6		6		6		6		100,00		26,00		92,86			
4)	2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	46.466.280.225,00	43	19.883.645.581,90	42	5.836.560.000,00	42	1.322.852.804,12	42	1.826.038.456,82	42	1.233.274.483,63	42	1.228.582.615,38	42	5.610.748.359,95	100,00	96,13	85,00	25.494.393.941,85	197,67	54,87	DISPAREKRAFB UDPORA	
3	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	88	5.838.731.877,00	84	1.930.712.081,00	0	534.586.237,00	0	13.940.260,00	0	222.904.307,00	0	57.500.317,00	0	135.009.523,00	0	429.354.407,00	0	80	84,00	2.360.066.488,00	95,45	40,42		
					Paket	68		10		14		14		14		14		14		14		100		24,00		35,29			
					Dokumen	20		11		5		5		5		5		5		5		100		16,00		80,00			
					Laporan	800		40		200		50		50		44		56		200		100		240,00		30,00			
					Sub Kegiatan	46		22		7		1		7		6		6		7		100		29,00		63,04			
5)	2.19.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Jenis	14	97.815.889,00	10	190.259.315,00															10,00	190.259.315,00	71,43	194,51	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	180.000.000,00	1	24.981.810,00	1	22.727.680,00	1	-	1	22.590.780,00	1	-	1	-	1	22.590.780,00	100,00	99,40	2,00	47.572.590,00	50,00	26,43	DISPAREKRAFB UDPORA	
6)	2.19.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	48	330.853.163,00	48	278.436.700,00											0				48,00	278.436.700,00	100,00	84,16	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	28	870.000.000,00	5	75.660.265,00	4	194.809.350,00	4	-	4	57.803.725,00	4	4.945.000,00	4	53.950.000,00	4	116.698.725,00	100,00	59,90	9,00	192.358.990,00	32,14	22,11	DISPAREKRAFB UDPORA	
7)	2.19.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tanaya	Jumlah Peralatan Rumah Tanaya	Jenis	4	147.000.000,00	4	104.875.400,00															4,00	104.875.400,00	100,00	71,34	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	8	400.000.000,00	1	60.281.950,00	2	65.011.815,00	2	-	2	57.719.550,00	2	2.400.000,00	2	3.889.850,00	2	64.009.400,00	100,00	98,46	3,00	124.291.350,00	37,50	31,07	DISPAREKRAFB UDPORA	
8)	2.19.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis	8	446.436.000,00	8	341.912.980,00															8,00	341.912.980,00	100,00	76,59	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	16	720.000.000,00	1	87.421.880,00	4	108.235.700,00	4	13.940.260,00	4	41.365.978,00	4	21.028.000,00	4	30.623.396,00	4	106.957.634,00	100,00	98,82	5,00	194.379.514,00	31,25	27,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
9)	2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis	6	295.603.704,00	6	192.037.550,00															6,00	192.037.550,00	100,00	64,96	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	550.000.000,00	2	31.085.200,00	3	25.010.581,00	3	-	3	15.604.200,00	3	3.110.000,00	3	5.600.000,00	3	24.314.200,00	100,00	97,22	5,00	55.399.400,00	41,67	10,07	DISPAREKRAFB UDPORA	
10)	2.19.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Jenis	8	108.797.989,00	8	22.630.000,00															8,00	22.630.000,00	100,00	20,80	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	20	95.000.000,00	2	10.180.800,00	5	14.823.000,00	5	-	5	6.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	11.200.000,00	100,00	75,56	7,00	21.380.800,00	35,00	22,51	DISPAREKRAFB UDPORA	
11)	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	164	597.225.132,00	235	421.837.390,00															235,00	421.837.390,00	143,29	70,63	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	1.000.000.000,00	40	89.110.841,00	200	103.968.111,00	50	-	50	21.420.074,00	44	23.617.317,00	56	38.546.277,00	200	83.583.668,00	100,00	80,39	240,00	172.694.509,00	30,00	17,27	DISPAREKRAFB UDPORA	
4	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	72	16.475.103.050,00	36	8.230.112.414,00	0	3.387.976.300,00	0	561.442.001,00	-	804.281.205,00	-	799.785.866,00	-	1.050.772.509,00	-	3.216.281.581,00	0,00	94,93	36,00	11.446.393.995,00	50,00	69,48		
					Laporan	396		99		113		113		113		113		113		113		100,00		212,00		53,54			
12)	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	24	541.171.130,00	24	353.604.367,00															24,00	353.604.367,00	100,00	65,34	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	820.000.000,00	4	438.187.068,00	4	400.956.300,00	4	84.413.941,00	4	83.714.805,00	4	82.339.986,00	4	91.715.289,00	4	342.184.021,00	100,00	85,34	8,00	780.371.089,00	50,00	95,17	DISPAREKRAFB UDPORA	
13)	2.19.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang ada	Bulan	24	4.719.931.920,00	24	4.842.850.000,00															24,00	4.842.850.000,00	100,00	102,60	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	380	10.394.000.000,00	95	2.595.470.979,00	109	2.987.020.000,00	109	477.028.060,00	109	720.566.400,00	109	717.445.880,00	109	959.057.220,00	109	2.874.097.560,00	100,00	96,22	204,00	5.469.568.539,00	53,68	52,62	DISPAREKRAFB UDPORA	
5	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit	28	5.489.871.730,00	28	1.525.943.300,71	16	787.531.300,00	10	24.600.020,00	10	140.681.764,14	10	172.924.358,05	10	399.587.714,19	16	737.793.856,38	100,00	93,68	16,00	2.263.737.157,09	57,14	41,23		
				Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jenis	41		20		6		4		4		4		6		6		100,00		7,00		17,07			
14)	2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	1.292.700.000,00	7	638.185.372,00	5	200.787.700,00	5	13.100.020,00	5	69.014.543,00	5	45.952.000,00	5	61.435.060,00	5	189.501.623,00	100,00	94,38	12,00	827.686.995,00	171,43	64,03	DISPAREKRAFB UDPORA	
15)	2.19.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	669.540.000,00	9	239.549.150,00	3	163.121.000,00	1	11.500.000,00	1	20.200.000,00	1	24.257.000,00	1	87.700.000,00	3	143.657.000,00	100,00	88,07	12,00	383.206.150,00	133,33	57,23	DISPAREKRAFB UDPORA	
16)	2.19.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	240.000.000,00	8	100.535.299,00	3	44.185.000,00	1	-	1	-	1	6.147.000,00	1	23.750.000,00	3	29.897.000,00	100,00	67,66	11,00	130.432.299,00	137,50	54,35	DISPAREKRAFB UDPORA	
17)	2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.583.499.999,00	1	435.199.379,71	2	321.255.000,00	1	-	1	9.049.275,00	1	95.668.358,05	1	214.377.654,19	2	319.095.287,24	100,00	99,33	3,00	754.294.666,95	300,00	47,63	DISPAREKRAFB UDPORA	
18)	2.19.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1.408.499.999,00	1	6.217.000	1	37.857.600,00	1	-	1	37.342.946,14	1	-	1	-	1	37.342.946,14	100,00	98,64	2,00	43.559.946,14	200,00	3,09	DISPAREKRAFB UDPORA	
19)	2.19.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	295.631.732,00	2	106.257.100,00	2	20.325.000,00	1	-	1	5.075.000,00	1	900.000,00	1	12.325.000,00	2	18.300.000,00	100,00	90,04	4,00	124.557.100,00	200,00	42,13	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		85	92,77	60	8.402.380.270,19	60	48,05		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah		
B		Meningkatkan prestasi pemuda di bidang kepemudaan dan olahraga	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase pemuda berprestasi dibidang kepemudaan dan olahraga	%	46	184.819.876.500,00	46,96	37.720.090.739,99	42,95	19.383.226.599,00	0	9.616.850.633,00	10,54	589.427.361,00	33,43	6.828.825.660,00	42,98	1.444.583.507,62	42,98	18.479.687.161,62	100,08	95,34	44,97	56.199.777.901,61	98	30		
2	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	%	33	1.665.042.995,00	32,39	284.528.300,00	30	300.000.000,00	0	-	41,67	49.621.350,00	0	56.564.554,00	0	128.508.100,00	41,67	234.694.004,00	138,89	78,23	37,03	519.222.304,00	112	31		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
6	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelapor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Orang	230	1.665.042.995,00	160	284.528.300,00	45	93.208.600,00	0	-	5	49.621.350,00	40	10.126.600,00	-	5.932.100,00	45	65.680.050,00	100,00	70,47	205	350.208.350,00	89	21,03		
20)	2.19.02.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelonor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	70	953.359.995,00	20	224.959.800,00	5	62.229.500,00	0	-	5	49.621.350,00	0	-	-	4.009.100,00	5	53.630.450,00	100,00	86,18	25,00	278.590.250,00	35,71	29,22	DISPAREKRAFB UDPORA	
21)	2.19.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	160	711.683.000,00	140	59.568.500,00	40	30.979.100,00	0	-	0	-	40	10.126.600,00	0	1.923.000,00	40	12.049.600,00	100,00	38,90	180,00	71.618.100,00	112,50	10,06	DISPAREKRAFB UDPORA	
7	2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	260	545.639.627,00	135	306.976.627,00	96	206.791.400,00	0	-	-	-	70	46.437.954,00	-	122.576.000,00	70,00	169.013.954,00	72,92	81,73	205	475.990.581,00	79	87,24		
22)	2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang	260	277.239.627,00	135	306.976.627,00															135,00	306.976.627,00	51,92	110,73	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	4	268.400.000,00			1	206.791.400,00	0	-	0	-	1	46.437.954,00	1	122.576.000,00	1	169.013.954,00	100,00	81,73	1,00	169.013.954,00	25,00	62,97	DISPAREKRAFB UDPORA	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	86,46	76,10	205,00	413.099.465,50	83,99	54,13		
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah		
3	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase cabor Berprestasi	%	87	180.110.231.000,00	92,44	33.935.562.439,99	95	18.083.226.599,00	0	9.616.850.633,00	33,33	539.806.011,00	0	5.772.261.106,00	50,88	1.316.075.407,62	84,21	17.244.993.157,62	88,65	95,36	88	51.180.555.597,61	102	28,42		
				Presentase sarana Prasarana yane Ternelihara	%	100		100		80		100		100		100		100		100		125,00		100		100			
8	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SARPRAS yang Terpelihara	Unit	5	55.073.938.905,00	5	6.327.871.874,99	5	1.547.054.150,00	5	341.806.733,00	5	207.265.661,00	5	284.108.760,00	5	452.686.171,62	5	1.285.867.325,62	100,00	83,12	5	7.613.739.200,61	100,00	13,82		-
23)	2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	5	55.073.938.905,00	5	6.327.871.874,99	5	1.547.054.150,00	5	341.806.733,00	5	207.265.661,00	5	284.108.760,00	5	452.686.171,62	5	1.285.867.325,62	100,00	83,12	5	7.613.739.200,61	100,00	13,82	DISPAREKRAFB UDPORA	
9	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang mengikuti Kejuaraan	Cabor	18	6.710.735.135,00	15	10.233.953.316,00	3	10.584.172.449,00	0	9.193.000.000,00	1	46.681.850,00	0	454.679.046,00	2	716.371.500,00	3	10.410.732.396,00	100,00	98,36	18	20.644.685.712,00	100,00	307,64		
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	15		3		3		1		1		1		1		3		100,00		6		40,00			
24)	2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Cabor	6	1.497.200.696,00	14	10.060.011.816,00															14	10.060.011.816,00	233,33	671,92	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	5.213.534.439,00	1	173.941.500,00	3	10.584.172.449,00	1	9.193.000.000,00	2	46.681.850,00	3	454.679.046,00	1	716.371.500,00	3	10.410.732.396,00	100,00	98,36	4	10.584.673.896,00	33,33	203,02	DISPAREKRAFB UDPORA	
10	2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Organisasi	5	115.623.019.940,00	6	16.937.497.518,00	2	5.685.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	114.942.736,00	3	5.314.942.736,00	150,00	93,49	9	22.252.440.254,00	180,00	19,25		
25)	2.19.03.2.04.0002		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	5	115.623.019.940,00	6	16.937.497.518,00	2	5.685.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	114.942.736,00	3	5.314.942.736,00	150,00	93,49	9	22.252.440.254,00	180,00	19,25	DISPAREKRAFB UDPORA	
11	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Pembinaan Olahraga Rekreasi	Orang	450	2.702.537.020,00	300	436.239.731,00	100	267.000.000,00	0	82.043.900,00	-	85.858.500,00	100	33.473.300,00	100	32.075.000,00	100	233.450.700,00	100,00	87,43	400	669.690.431,00	88,89	24,78		
26)	2.19.03.2.05.0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Orek	Peserta	900	551.719.970,00	200	158.389.731,00															200	158.389.731,00	22,22	28,71	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	2.150.817.050,00	3	277.850.000,00	3	267.000.000,00	2	82.043.900,00	2	85.858.500,00	3	33.473.300,00	2	32.075.000,00	3	233.450.700,00	100,00	87,43	6	511.300.700,00	150,00	23,77	DISPAREKRAFB UDPORA	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	110	90,60	87,60	12795138899,40	101,78	91,37		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Anggota pramuka	%	78	3.044.602.505,00	87,26	3.500.000.000,00	67	1.000.000.000,00	0	-	0,00	-	-	1.000.000.000,00	94,03	-	94,03	1.000.000.000,00	140	100,00	91	4.500.000.000,00	116	147,80		
12	2.19.04.2.01	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Orang	650	3.044.602.505,00	650	3.500.000.000,00	150	1.000.000.000,00	0	-	0	-	-	1.000.000.000,00	92.357	-	92.357	1.000.000.000,00	61571	100,00	93.007	4.500.000.000,00	14308,77	147,80		
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan	6		3		1		1		-		1		-		1		100,00		4		66,67			
27)	2.19.04.2.01.0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan	Kegiatan	2	1.945.217.296,00	2	2.000.000.000,00															2	2.000.000.000,00	100,00	102,82	DISPAREKRAFB UDPORA	Hibah Pramuka
				Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	4	1.099.385.209,00	1	1.500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	-	-	-	1	1.000.000.000,00	-	-	1	1.000.000.000,00	100,00	100,00	2	2.500.000.000,00	50,00	227,40	DISPAREKRAFB UDPORA	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	30836	100,00	46506	4.500.000.000,00	71,88	147,80		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
C		Meningkatnya pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Yang Dilestarikan	%	2,51	12.290.183.000,00	1,64	6.374.821.057,30	1,96	2.790.999.900,00	5,79	55.000.000,00	5,79	660.501.373,00	6,01	436.479.409,00	2,67	848.492.555,00	2,67	2.000.473.337,00	136,36	71,68	2,16	8.375.294.394,30	85,91	68,15		
5	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	%	100	8.198.387.000,00	100	4.190.017.772,80	100	1.654.000.000,00	25	55.000.000,00	25	394.449.066,00	25	282.273.397,00	25	151.837.788,00	100	883.560.251,00	100,00	53,42	100,00	5.073.578.023,80	100,00	61,89		
				Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100			
13	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Budaya yang dikelola, dikembang dan dimanfaatkan	Objek	22	4.298.937.000,00	4	3.396.967.500,00	4	1.298.000.000,00	1	55.000.000,00	1	96.421.438,00	1	264.357.400,00	1	113.301.061,00	4	529.079.899,00	100,00	40,76	8	3.926.047.399,00	36,36	91,33		
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	12		6		2		1		1		1		1		1		50,00		7		58,33			
28)	2.22.02.2.01.0001		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi , dikembangkan dan dimanfaatkan	Kegiatan	5	988.937.000,00	5	934.516.000,00															5	934.516.000,00	100,00	94,50	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	22	1.460.000.000,00	4	181.315.000,00	4	639.000.000,00	1	55.000.000,00	1	96.421.438,00	1	264.357.400,00	1	113.301.061,00	4	529.079.899,00	100,00	82,80	8	710.394.899,00	36,36	48,66	DISPAREKRAFB UDPORA	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
29)	2.22.02.2.01.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan melalui hibah	Kegiatan	34	1.030.000.000,00	39	1.471.154.000,00															39	1.471.154.000,00	114,71	142,83	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	450	820.000.000,00	50	809.982.500,00	50	659.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	50	809.982.500,00	11,11	98,78	DISPAREKRAFB UDPORA	
14	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional	Kegiatan	16	3.899.450.000,00	7	793.050.272,80	2	356.000.000,00	0	-	2	298.027.628,00	2	17.915.997,00	1,00	38.536.727,00	2	354.480.352,00	100,00	99,57	5	1.147.530.624,80	31,25	29,43		
30)	2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan terlindungi , terkembangkan dan termanfaatkannya objek pemajuan tradisi budaya	Kegiatan	5	849.837.000,00	5	458.037.172,80															5	458.037.172,80	100,00	53,90	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	18	2.714.613.000,00	3	320.013.200,00	2	331.000.000,00	0	-	1	288.727.628,00	1	9.215.997,00	1	31.546.727,00	2	329.490.352,00	100,00	99,54	5	649.503.552,00	27,78	23,93	DISPAREKRAFB UDPORA	
31)	2.22.02.2.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kegiatan	1	75.000.000,00	0	-															-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Laporan pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Tradisional	Laporan	4	260.000.000,00	1	14.999.900,00	1	25.000.000,00	0	-	1	9.300.000,00	1	8.700.000,00	1	6.990.000,00	1	24.990.000,00	100,00	99,96	2	39.989.900,00	50,00	15,38	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		83	70,17	7	2.536.789.011,90	42	60,38		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Rendah		
6	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	%	100	3.852.241.000,00	100	573.221.950,00	100	361.999.900,00	0	-	0	18.750.000,00	100	54.331.713,00	100	284.174.991,00	100,00	357.256.704,00	100,00	98,69	100,00	930.478.654,00	100	24,15		
				Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	%	100		100		100		0		0		100		100		100,00		100,00		100,00		100			
				Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	%	10		15,40		10		0		0		0		10,53		10,53		105,30		12,96		130			
15	2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	103	2.175.391.000,00	12	259.581.964,00	5	42.724.900,00	0	-	-	-	-	35.581.713,00	10	4.755.500,00	5	40.337.213,00	100,00	94,41	17,00	299.919.177,00	16,50	13,79		
				Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	6		3		1		0		-		-		1		1		100,00		4,00		66,67			
32)	2.22.05.2.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Potensi Cagar Budaya Terdaftar	CB	2	628.666.630,00	2	92.761.300,00															2,00	92.761.300,00	100,00	14,76	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	Objek	60	726.990.000,00	5	34.991.760,00	5	12.076.900,00	0	-	0	-	0	10.054.739,00	5	1.797.500,00	5	11.852.239,00	100,00	98,14	10,00	46.843.999,00	16,67	6,44	DISPAREKRAFB UDPORA	
33)	2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Potensi Cagar Budaya Tergistrasi	CB	10	169.734.370,00	5	65.639.704,00															5,00	65.639.704,00	50,00	38,67	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Obyek Cagar Budaya yang ditetakan	Objek	31	650.000.000,00	5	66.189.200,00	5	30.648.000,00	0	-	0	-	0	25.526.974,00	5	2.958.000,00	5	28.484.974,00	100,00	92,94	10,00	94.674.174,00	32,26	14,57	DISPAREKRAFB UDPORA	
16	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Objek	6	1.676.850.000,00	1	313.639.986,00	1	319.275.000,00	-	-	1	18.750.000,00	1	18.750.000,00	1	279.419.491,00	1	316.919.491,00	100,00	99,26	2,00	630.559.477,00	33,33	37,60		
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	6		3		1		-		1		1		1		1		100,00		4,00		66,67			
34)	2.22.05.2.02.0003		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya terfasilitasi informasi dan promosi	CB	2	400.000.000,00	0	-															-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Obyek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Objek	4	1.276.850.000,00	1	313.639.986,00	1	319.275.000,00	0	-	1	18.750.000,00	1	18.750.000,00	1	279.419.491,00	1	316.919.491,00	100,00	99,26	2,00	630.559.477,00	50,00	49,38	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100	96,84	7	465.239.327,00	46	25,70		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan kunjungan museum	%	45	239.555.000,00	52,59	1.611.581.334,50	45	775.000.000,00	0,00	-	18,04	247.302.307,00	42,03	99.874.299,00	42,03	412.479.776,00	42,03	759.656.382,00	93,40	98,02	47,31	2.371.237.716,50	105,13	989,85		
17	2.22.06.2.01	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum yang dikelola	%	100	239.555.000,00	100	1.611.581.334,50	100	775.000.000,00	100	-	100	247.302.307,00	100	99.874.299,00	100	412.479.776,00	100	759.656.382,00	100	98,02	100	2.371.237.716,50	100,00	989,85		
				Jumlah Museum yang dikelola	Unit	1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100,00			
35)	2.22.06.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	4	55.000.000,00	2	513.146.856,00	1	210.000.000,00	1	-	1	65.466.854,00	1	17.743.329,00	1	126.100.354,00	1	209.310.537,00	100	99,67	3	722.457.393,00	75,00	1313,56	DISPAREKRAFB UDPORA	
36)	2.22.06.2.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Sarana Informasi Museum	Media	1	29.080.000,00	1	367.586.042,00															1	367.586.042,00	100,00	1264,05	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	1	50.000.000,00	1	341.418.000,00	1	450.000.000,00	1	-	1	140.871.844,00	1	67.345.570,00	1	232.157.464,00	1	440.374.878,00	100	97,86	2	781.792.878,00	200,00	1563,59	DISPAREKRAFB UDPORA	
37)	2.22.06.2.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	105.475.000,00	1	389.430.436,50	1	115.000.000,00	1	-	1	40.963.609,00	1	14.785.400,00	1	54.221.958,00	1	109.970.967,00	100	95,63	2	499.401.403,50	200,00	473,48	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,02	50,50	2.371.237.716,50	100,00	989,85		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
D		Terwujudnya jumlah kunjungan wisata sebagai bagian pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	URUSAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	4-9	4.174.853.022,00	4,01	685.803.226,40	3-5	949.999.749,00	1,00	68.249.999,83	2,06	103.695.545,00	3,01	180.074.493,00	5,00	293.633.756,00	5,00	645.653.793,83	125,00	67,96	4,50	1.331.457.020,23	50	31,89		
8	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	%	25	1.718.171.611,00	37,50	121.308.600,00	25	536.599.982,00	1,54	3.900.000,00	1,54	60.519.245,00	1,54	106.762.753,00	18,46	190.441.092,00	18,46	361.623.090,00	73,85	67,39	27,98	482.931.690,00	112	28,11		
				2.Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100			
				3.Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	%	5		7,88		5		4,85		4,85		11,65		16,50		16,50		330,10		12,19		244			
				4. Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100			
18	3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata	Kegiatan	2	414.999.999,00	2	121.308.600,00	1	49.999.850,00	0	-	1	12.303.000,00	1	12.421.991,00	-	13.512.000,00	1	38.236.991,00	100,00	76,47	2,00	159.545.591,00	100,00	38,44		
38)	3.26.02.2.01.0004		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Monitoring dan evaluasi pada objek Daya Tarik wisata kabupaten Gresik	ODTW	45	154.999.999,00	45	71.063.000,00															45,00	71.063.000,00	100,00	45,85	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	30	50.000.000,00	2	50.245.600,00															2,00	50.245.600,00	6,67	100,49	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	106	210.000.000,00			2	49.999.850,00	0	-	1	12.303.000,00	1	12.421.991,00	1	13.512.000,00	2	38.236.991,00	100,00	76,47	2,00	38.236.991,00	1,89	18,21	DISPAREKRAFB UDPORA	
19	3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata	Unit	3	700.000.000,00	0	-	3	98.999.890,00	3	3.900.000,00	3	15.793.895,00	3	17.873.060,00	3	38.429.687,00	3	75.996.642,00	100,00	76,76	3,00	75.996.642,00	100,00	10,86		
				Jumlah kawasan strategis Pariwisata	Kawasan	2		2		2		2		2		2		2		2		100,00		2,00		100,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14 /9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
39)	3.26.02.2.02.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	370.000.000,00			2	98.999.890,00	2	3.900.000,00	2	15.793.895,00	2	17.873.060,00	2	38.429.687,00	2	75.996.642,00	100,00	76,76	2,00	75.996.642,00	100,00	20,54	DISPAREKRAFB UDPORA	
40)	3.26.02.2.02.0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	10	330.000.000,00			0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
20	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	ODTW	2	603.171.612,00	3	739.724.085,00	2	387.600.242,00	0	-	1	32.422.350,00	1	76.467.702,00	1	138.499.405,00	2	247.389.457,00	124,84	63,83	5,50	987.113.542,00	274,84	163,65		
				Jumlah kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	6		1		1		0		1		1		1		1		100,00		2,00		33,33			
41)	3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan saran prasarana daya tarik wisata	Pelatihan	2	203.171.612,00																	-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	10	400.000.000,00	3	739.724.085,00	2	387.600.242,00	0	-	1	32.422.350,00	1	76.467.702,00	1	138.499.405,00	2	247.389.457,00	100,00	63,83	5,00	987.113.542,00	50,00	246,78	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		104,97	72,35	2,90	407.551.925,00	121,63	70,99		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang		
9	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	%	2	2.456.681.411,00	3,95	564.494.626,40	2	413.399.767,00	2,00	64.349.999,83	2,00	43.176.300,00	2,00	73.311.740,00	5,44	103.192.664,00	5,44	284.030.703,83	2,72	68,71	3,33	848.525.330	167	34,54		
				Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	%	5		7,88		5		5,00		5,00		5,00		-98,03		-98,03		(19,61)		-5,87		-117			
21	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata dan Jumlah Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	kegiatan promosi dan fasilitasi	28	2.456.681.411,00	13	564.494.626,40	5	413.399.767,00	1	64.349.999,83	4	43.176.300,00	4	73.311.740,00	4	103.192.664,00	5	284.030.703,83	100,00	68,71	18,00	848.525.330,23	64,29	34,54		
42)	3.26.03.2.01.0003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah ODTW di kabupaten gresik yang sudah beroperasi kembali untuk melaksanakan pendataan dan informasi pariwisata	ODTW	47	90.000.000,00	47	130.630.150,00															47,00	130.630.150,00	100,00	145,14	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Dokumen	139	575.534.000,00	1	35.376.000,00	1	49.370.593,00	0	-	1	15.645.300,00	1	10.619.000,00	1	23.100.000,00	1	49.364.300,00	100,00	99,99	2,00	84.740.300,00	1,44	14,72	DISPAREKRAFB UDPORA	
43)	3.26.03.2.01.0004		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah event kerjasama dalam kegiatan promosi potensi pariwisata di Kab. Gresik	event	2	138.896.677,00	1	14.034.800,00															1,00	14.034.800,00	50,00	10,10	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Dokumen	139	573.315.000,00	2	41.947.077,00	1	30.048.760,00	0	-	1	17.656.500,00	1	9.106.990,00	1	3.285.000,00	1	30.048.490,00	100,00	100,00	3,00	71.995.567,00	2,16	12,56	DISPAREKRAFB UDPORA	
44)	3.26.03.2.01.0002		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah networking pemasaran pariwisata berupa fasilitasi event kepariwisataan di Kab. Gresik	Event	6	712.395.990,00	6	346.124.600,00															6,00	346.124.600,00	100,00	48,59	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Laporan	3	600.000.000,00	2	51.146.650,00															2,00	51.146.650,00	66,67	8,52	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	15	1.800.000.000,00			1	189.530.414,00	1	47.899.999,83	1	9.874.500,00	1	11.267.000,00	1	34.488.914,00	1	103.530.413,83	100,00	54,62	1,00	103.530.413,83	6,67	5,75	DISPAREKRAFB UDPORA	
45)	3.26.03.2.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Sarana dan atau media informasi dan promosi pariwisata baik cetak, elektronik, dan lainnya serta pengembangannya dalam rangka mendukung upaya optimalisasi promosi potensi wisata kab gresik	Media Promosi	6	705.681.411,00	6	535.056.676,40															6,00	535.056.676,40	100,00	75,82	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri	Dokumen	4	370.000.000,00	2	29.437.950,00															2,00	29.437.950,00	50,00	7,96	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.03.2.01.0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	18	1.381.000.000,00			1	144.450.000,00	0	16.450.000,00	1	0,00	1	42.318.750,00	1	42.318.750,00	1	101.087.500,00	100,00	69,98	1,00	101.087.500,00	5,56	7,32	DISPAREKRAFB UDPORA	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100	68,71	18	848.525.330,23	64	34,54		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah		
E		Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kraetif dalam mendukung perekonomian	URUSAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan sub sektor Ekonomi Kreatif	%	46	1.459.356.000,00	30,39	289.896.000,00	38	600.005.015,00	11,7647	93.895.570,00	17,65	67.944.401,00	23,53	110.724.264,00	41,18	191.980.362,00	41,18	464.544.597,00	108,36	77,42	35,78	754.440.597,00	77,78	51,70		
10	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	I.pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	%	2	1.459.356.000,00	16,47	289.896.000,00	2	600.005.015,00	30,54	93.895.570,00	30,54	67.944.401,00	30,54	110.724.264,00	46,79	191.980.362,00	46,79	464.544.597,00	23,39	77,42	31,63	754.440.597,00	1.581,47	51,70		
22	3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	Orang	285	989.356.000,00	150	289.896.000,00	75	419.670.570,00	25	93.895.570,00	25	54.605.451,00	25	77.925.280,00	-	106.609.982,00	75	333.036.283,00	100,00	79,36	225,00	622.932.283,00	78,95	62,96		
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan	6		3		1		1		1		1		1		1		100,00		4,00		66,67			
46)	3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembinaan	4	312.556.000,00	3	289.896.000,00															3,00	289.896.000,00	75,00	92,75	DISPAREKRAFB UDPORA	
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	285	570.000.000,00	0	-	75	287.019.190,00	25	93.895.570,00	25	19.159.551,00	25	28.284.530,00	138	97.135.400,00	213	238.475.051,00	284,00	83,09	213,00	238.475.051,00	74,74	41,84	DISPAREKRAFB UDPORA	
47)	3.26.05.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	12	9.600.000,00	0	-															-	-	0,00	0,00	DISPAREKRAFB UDPORA	
	3.26.05.2.01.0011		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	36	97.200.000,00	0	-	30	132.651.380,00	0	-	10	35.445.900,00	10	49.640.750,00	10	9.474.582,00	30	94.561.232,00	100,00	71,29	30,00	94.561.232,00	83,33	97,29	DISPAREKRAFB UDPORA	
			Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Orang	64	[illegible]	30	[illegible]	30	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	40	[illegible]	0	[illegible]	40	[illegible]	133,33	[illegible]	70,00	[illegible]	109,38	[illegible]		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
23	3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan	12	470.000.000,00	1	182.599.713,00	1	180.334.445,00	0	-	1	13.338.950,00	1	32.798.984,00	1	85.370.380,00	1	131.508.314,00	100,00	72,92	2,00	314.108.027,00	16,67	66,83		
48)	3.26.05.2.02.0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	14	470.000.000,00	30	182.599.713,00	30	180.334.445,00	0	-	0	13.338.950,00	40	32.798.984,00	-	85.370.380,00	40	131.508.314,00	133,33	72,92	70,00	314.108.027,00	500,00	66,83	DISPAREKRAFB UDPORA	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	108,33	76,14	75,25	468.520.155,00	67,91	64,90		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah		
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									34.364.370.100,00		11.756.831.287,95		4.439.752.412,96	-	9.834.235.350,68	-	5.646.066.342,19		31.676.885.393,78								
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGIARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)	100,11	83,20			186,18	145,32		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	DINAS PERTANIAN																												
			URUSAN BIDANG PANGAN	Rasio ketersediaan pangan utama	erkapita/ta	491	6.724.937.000,00	13	935.262.147,00	182,50	880.408.825,00	47,00	18.179.250,00	47,00	160.240.450,00	47,00	190.510.764,00	47,00	312.285.686,00	141	691.002.150,00	77,26027	78,48651	154	1.626.264.297	31,40	24,18		
			DINAS PERTANIAN			#VALUE!	158.516.438.659,00	60	35.853.292.353,87	1,0	50.000.000,00	47,00	3.330.626.554,77	47,00	21.764.802.382,54	47,00	10.700.659.430,72	#VALUE!	9.718.765.934,91	141,00	45.524.640.302,94	77,26	78,49	201	81.377.932.657	31,40	76,72		
1	2.09.02	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	Beras	254	4.708.979.000,00	60	1.992.100.072	1,00	50.000.000,00	1,00	-	1,00	6.843.250,00		16.272.000,00		15.354.000,00	1	38.469.250,00	100	76,94	61	2.030.569.322	24,02	43,12	BIDANG PANGAN	
	2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	254	3.031.472.000.000	59	1.974.580.072,00	62	50.000.000,00	-	-	1,00	6.843.250,00	-	16.272.000,00	-	15.354.000,00	1	38.469.250,00	1,612903	76,9385	60	2.013.049.322	23,62	0,07		
	2.09.02.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	4	275.000.000,00	1	17.520.000,00	1	50.000.000,00	-	-	1	6.843.250,00	-	16.272.000,00		15.354.000,00	1	38.469.250,00	100	77	2	55.989.250	50,00	20,36	PANGAN	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	76,94			24,02	43,12		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	2.09.03	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)		86,5	654.932.000,00	6	466.830.029,00	86,5	647.631.475,00	86,50	18.179.250,00	86,50	129.188.950,00	86,50	107.435.765,00	86,50	270.539.936,00	346	525.343.901,00	400	81,12	352	992.173.930	406,94	151,49	BIDANG PANGAN	
	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Laporan	4	436.932.000,00	1	43.580.600	1	498.558.000,00	-	18.179.250,00	1	54.064.700,00		95.526.215,00		218.932.536,00	1	-	100	81,01	1	43.580.600	25,00	9,97	BIDANG PANGAN	
				Layanan Pangan Berbasis Elektronik	Laporan	12			-	4		1		1						2									
	2.09.03.2.01.05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	15.000.000,00	6	43.580.600,00	1	160.000.000,00	-	18.179.250,00	1	22.925.700,00	-	22.649.000,00		65.856.255,00	1	129.610.205,00	100	81,01	7	173.190.805	233,33	1154,61	BIDANG PANGAN	
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	8	198.932.000,00	-		2	43.000.000,00	-	-	2	11.514.000,00	2	13.792.250,00		11.001.500,00	2	36.307.750,00	100	84,44	2	36.307.750	25,00	18,25	BIDANG PANGAN	
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	2	10.000.000,00			0	142.358.000,00	-	-	-	8.232.750,00	-	29.004.765,00		84.445.781,00	-	121.683.296,00	100	85,48	-	121.683.296	0,00	1216,83	BIDANG PANGAN	
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokuemn	6	30.000.000,00			2	53.200.000,00	-	-	1	9.968.000,00	1	12.964.000,00		24.400.000,00	2	47.332.000,00	100	88,97	2	47.332.000	33,33	157,77	BIDANG PANGAN	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	3	30.000.000,00			1	100.000.000,00	-	-	-	1.424.250,00	1	17.116.200,00		33.229.000,00	1	51.769.450,00	100	51,77	1	51.769.450	33,33	172,56	BIDANG PANGAN	
				Layanan Pangan Berbasis Elektronik		12				4				2							0,00	-	#DIV/0!	-	-	0,00	0,00	BIDANG PANGAN	
	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita tani yang diberdayakan	Persen	20	218.000.000	1	423.249.429	20	149.073.475	-	-	20	75.124.250	20	11.909.550	20	51.607.400	20	138.641.200,00	100	93,00	20	561.890.629	100,00	257,75	BIDANG PANGAN	
	2.09.03.2.04.02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	218.000.000,00	1	423.249.429,00	1	149.073.475,00	-	-	1,00	75.124.250,00	-	11.909.550,00		51.607.400,00	1	138.641.200,00	100	93,00	2	561.890.629	50,00	257,75	BIDANG PANGAN	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	87,00			62,50	133,86		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
3	2.09.04	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	70	1.113.141.000,00	-	26.025.500,00	14,00	112.777.350,00	14,00	-	14,00	4.292.000,00	14,00	34.399.349,00	14,00	12.125.000,00	3,00	60.602.349,00	21	53,74	3	86.627.849	100,00	3,22	BIDANG PANGAN	
	2.09.04.2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Informasi desa rawan pangan	Laporan	1	1.113.141.000,00	-	26.025.500,00	1	10.936.350,00	-	-	-	-					1	9.786.000,00	100	89,48	1	35.811.500	100,00	3,22	BIDANG PANGAN	
	2.09.04.2.01.01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Panean	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	4	392.656.000,00		26.025.500,00	1	10.936.350,00	-	-	-	-	1	6.063.000,00	-	3.723.000,00	1	9.786.000,00	100	89,48	1	35.811.500	25,00	9,12	BIDANG PANGAN	
	2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan	11,00	612.993.000,00	-	-	2,00	101.841.000,00	-	-	-	4.292.000,00	2,00	34.399.349,00	-	12.125.000,00	2	50.816.349,00	100	49,89773	2	50.816.349	18,18	8,29	BIDANG PANGAN	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, danPenyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	300.000.000,00			1	28.841.000,00	-	-	-	2.668.250,00	1,00	17.885.750,00		4.938.500,00	1	25.492.500,00	100	88,39	1	25.492.500	33,33	8,50	BIDANG PANGAN	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3	133.205.000,00			1	73.000.000,00	-	-	-	1.623.750,00	1	16.513.599,00		7.186.500,00	1	25.323.849,00	100	34,69	1	25.323.849	33,33	19,01	BIDANG PANGAN	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	139,38			59,09	5,75		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
4	2.09.05	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persen	80	247.885.000,00	5	36.279.000,00	81,00	70.000.000,00	-	-	81,00	19.916.250,00	1,00	32.403.650,00	-	14.266.750,00	82	66.586.650,00	101	95,12	87	102.865.650	108,75	41,50	BIDANG PANGAN	
	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	Dokuemn	17	198.644.000,00	5	36.279.000	3,00	70.000.000,00	-	-	-	19.916.250,00	1,00	32.403.650,00	-	14.266.750,00	3,00	66.586.650,00	100	95,12	8	102.865.650	47,06	51,78	BIDANG PANGAN	
	2.09.05.2.01.05		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	3	30.000.000,00	5	36.279.000,00	1	40.000.000,00	-	-	-	11.167.750,00	1	16.550.900,00	-	11.249.500,00	1	38.968.150,00	100	97,42	6	75.247.150	200,00	250,82	BIDANG PANGAN	
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	6	85.778.000,00			2	30.000.000,00	-	-	1	8.748.500,00	1	15.852.750,00	-	3.017.250,00	2	27.618.500,00	100	92,06	2	27.618.500	33,33	32,20	BIDANG PANGAN	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	95,12			47,06	51,78		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			URUSAN BIDANG PERTANI	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan	Persen	#VALUE!	151.791.501.659,00	56.263	34.918.030.206,87		#REF!	-	3.312.447.304,77	-	21.604.561.932,54	-	10.510.148.666,72	#VALUE!	9.406.480.248,91	-	44.833.638.152,94	0	0	56.263	79.751.668.360	0,00	52,54	DISPERTA	
5	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	%	A	105.475.459.000,00	3.661	18.328.476.908,80	A	16.941.634.326,00	A	3.196.827.304,77	A	5.010.056.128,91	A	3.983.065.610,52	A	4.023.049.594,90	A	16.212.998.639,10								
				Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	%	100%				95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%	A	23,78537					SEKRETARIAT	
				Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100%				100%		100%		100%		100%		100%		100%									
	3.27.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	160	1.110.881.000,00	40	126.999.345	40,00	360.165.812,00	-	-	20,00	51.125.877,00		271.323.500,00		30.723.700,00	20	353.173.077,00	50	98,05847	60	480.172.422	37,50	43,22		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	192		48		48		-		12,00														SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	160	120.785.000,00	107	72.706.320,00	40	335.368.054,00	-	-	20	40.917.527,00	20	270.748.500,00	-	18.903.660,00	40	330.569.687,00	100	99	147	403.276.007	91,88	333,88	SEKRETARIAT	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	192	761.148.000,00			48	16.663.928,00	-	-	24	4.142.000,00			24	10.970.500,00	48	15.112.500,00	100	91	48	15.112.500	25,00	1,99		
	3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	228.948.000,00	48	54.293.025,00	18	8.133.830,00	-	-	6	6.066.350,00	6	575.000,00	6	849.540,00	18	7.490.890,00	100	92	66	61.783.915	91,67	26,99	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	155	54.421.652.000	155	28.974.375.020	190	12.632.989.999,00	190,00	2.692.404.849,27	190,00	4.070.976.847,98	######	2.844.284.812,52	155,00	2.845.583.202,90	155,00	12.453.249.712,67	81,58	98,58	155	41.427.624.733	100,00	51,78	SEKRETARIAT	
				Jumlah buku laporan keuangan	Dokumen	472		118		118		30,00		30,00		30,00		30,00						118					
	3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	264	54.356.352.000,00	155	28.966.596.304,00	190	12.622.414.999,00	190	2.692.404.849,27	190	4.065.242.047,98	190	2.841.062.812,52	190	2.843.982.942,90	190	12.442.692.652,67	100	99	190	41.409.288.957	71,97	76,18	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	103	37.000.000,00			103	7.000.000,00	-	-	53	3.788.520,00	50	1.600.260,00	-	1.600.260,00	103	6.989.040,00	100	100	103	6.989.040	100,00	18,89	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	32	23.000.000,00	18	7.778.716,00	8	1.950.000,00	-	-	8	1.946.280,00	0	-	-	-	8	1.946.280,00	100	100	26	9.724.996	81,25	42,28	SEKRETARIAT	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	28	5.300.000,00	-	0,00	7	1.625.000,00	-	-	-	-	7	1.621.740,00	-	-	7	1.621.740,00	100	100	7	1.621.740	25,00	30,60	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	52		13		13				4						13		100,00	0	26		50,00	0,00		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	32		8		8				2						2		25,00		10					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	28		7		7				2						45,86		655,1429		53					
		Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.823.852.000,00	1	514.087.149,80	1	512.168.510,00		-	1	248.706.932,00		73.693.587,00		103.880.964,00	1	426.281.483,00	100	83,23071	2	426.281.483			SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	432		108		108				50						50		46,2963		158					
	3.27.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	Paket	32	986.512.000,00	18	573.053.679,80	8	157.428.910,00	-	-	4	122.362.518,00	4	4.917.236,00	-	27.970.900,00	8	155.250.654,00	100	99	26	728.304.334	81,25	73,83	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	331.012.000,00	3	216.267.200,00	3	87.869.550,00	-	-	1	32.154.024,00	1	15.816.614,00	1	26.282.400,00	3	74.253.038,00	100	85	6	290.520.238	50,00	87,77	SEKRETARIAT	
			Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	31.472.000,00			4	10.460.000,00	-	-	-	-	4	5.280.000,00		5.000.000,00	4	10.280.000,00	100	98	4	10.280.000	33,33	32,66		
	3.27.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	192	363.016.000,00	84	224.490.253,00	48	130.466.000,00	-	-	22	30.673.390,00	20	38.349.737,00	6	44.627.664,00	48	113.650.791,00	100	87	132	338.141.044	68,75	93,15	SEKRETARIAT	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	450.000.000,00			1	125.944.050,00	-	-	1	63.517.000,00	0	9.330.000,00		-	1	72.847.000,00	100	58	1	72.847.000	33,33	16,19		
	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	256	12.450.736.000,00	91	2.568.867.018,00	64	3.190.544.305,00	20,00	498.479.374,00	20,00	781.802.092,00	20,00	748.941.811,00	16,00	992.405.828,00	64,00	3.021.629.105,00	100,00		155	5.590.496.123	60,55	51,78	SEKRETARIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	360				90		30,00		30,00		30,00				90				90					
	3.27.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	1.804.784.000,00	7	590.650.581,00	4	508.142.905,00	1	68.469.794,00	1	124.387.722,00	1	100.929.601,00	1	112.550.808,00	4	406.337.925,00	100	80	11	996.988.506	68,75	55,24	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	360	10.505.952.000,00	212	4.651.635.000,00	90	2.682.401.400,00	25	430.009.580,00	25	657.414.370,00	25	648.012.210,00	15	879.855.020,00	90	2.615.291.180,00	100	97	302	7.266.926.180	83,89	69,17	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	1.912.750.000,00	17	350.989.500,00	12	245.765.700,00	12,00	5.943.081,50	12,00	106.151.311,93	17,00	44.821.900,00	-	50.455.900,00	12,00	207.372.193,43	100,00	84,38	29	558.361.693	241,67	51,78	SEKRETARIAT	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4				4		4,00		4,00						4				4					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2				2		2,00		2,00															
	3.27.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	148.400.000,00	2	68.637.800,00	2	40.610.000,00	-	-	2	8.472.800,00	2	6.855.000,00		24.340.000,00	2	39.667.800,00	100	98	2	108.305.600	100,00	72,98	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit	10	809.600.000,00	10	408.834.817,00	10	73.495.700,00	-	-	10	22.934.700,00	10	15.649.900,00		10.785.900,00	10	49.370.500,00	100	67	10	458.205.317	100,00	56,60	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	513.000.000,00	4	198.183.400,00	4	66.660.000,00	-	-	4	20.091.000,00	4	22.317.000,00		12.630.000,00	4	55.038.000,00	100	83	4	253.221.400	100,00	49,36	SEKRETARIAT	
	3.27.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	431.750.000,00	1	4.900.000,00	1	65.000.000,00	1	5.943.081,50	1	54.652.811,93	1	-		-	1	60.595.893,43	100	93	1	65.495.893	100,00	15,17	SEKRETARIAT	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	3.27.01.2.09.0011.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1	2.700.000,00							1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	100	100	1	2.700.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		86,32	53,24			97,94	39,72		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6	3.27.02	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prosentase realisasi pupuk bersubsidi	Persen	96	25.481.719,00	174	7.334.010.034,58	96	5.314.048.000,00	96,00	61.220.000,00	96,00	15.896.732.240,00	96,00	5.122.679.300,00	96,00	1.727.749.700,00	384	22.808.381.240,00	400	429,2092	558	30.142.391.275	581,25	118290,26	SARPRASLUH	
				proerentase alsintan dalam kondisi baik	Persen	90,4				90,4		90		90		90,4		90,4						-	-				
	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan dan pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan	68	2.440.000.000,00	35	4.140.722.979,58	17	23.788.318.000,00	4	56.255.000,00	4	15.824.313.500,00		5.041.684.500,00		1.647.672.500,00	11	22.569.925.500	69	75	46	26.710.648.480	67,65	1094,70	SARPRASLUH	
	3.27.02.2.01.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Laporan	64	1.550.000.000,00	35	4.140.722.979,58	16	3.303.318.000,00	-	-	6	891.306.500,00	5	396.767.000,00		1.205.508.500,00	11	2.493.582.000,00	69	75	46	6.634.304.980	71,88	428,02	SARPRASLUH	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	490.000.000,00			1	20.485.000.000,00	-	56.255.000,00	1	14.933.007.000,00	0	4.644.917.500,00		442.164.000,00	1	20.076.343.500,00	100	98					SARPRASLUH	
	3.27.02.2.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	20.557.775	-	-	1	177.333.000,00	-	4.965.000,00	1,00	44.029.700,00		43.869.000,00		77.070.200,00	1,00	169.933.900,00	100	96	1	169.933.900	25,00	826,62	SARPRASLUH	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	36	1.817.640.000,00			12	177.333.000,00	3	4.965.000,00	3	44.029.700,00	3	43.869.000,00		77.070.200,00	9	169.933.900,00	75	96	9	169.933.900	25,00	9,35	SARPRASLUH	
	3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Laporan	4	20.557.775	1	5.416.077.500,00	1	69.500.000,00	-	-	-	28.389.040,00	-	37.125.800,00	-	3.007.000,00	1,00	68.521.840,00	100	99	2	5.484.599.340	50,00	26678,95	SARPRASLUH	
	3.27.02.2.03.01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	3	20.557.775.000,00	-	6.639.378.730,00	1	69.500.000,00	-	-	-	28.389.040,00	1	37.125.800,00		3.007.000,00	1	68.521.840,00	100	99	1	6.707.900.570	33,33	32,63	SARPRASLUH	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		89,58	89,97			47,55	9533,42		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
7	3.27.03	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan CLP2B	Lahan	27.721	30.386.118.940,00	27.721	843.593.598,00	27.721	504.400.000,00	-	-	27.721	145.181.346,63	27.721	565.687.096,20	27.721	1.483.663.128,01	27.721	2.194.531.570,84	100	435	55.442	3.038.125.169	27.721	10,00	SARPRASLUH	
				Persentase infrastruktur pertanian dalam kondisi baik	Persen	35,86				35,86				35,86		35,86		35,86		35,86				36	-	35,86			
	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan yang divalidasi	Dokumen	4	2.710.000.000,00	1	421.796.799,00	1	504.400.000,00	-	-	1	41.104.950		113.838.842		234.091.750	1,00	389.035.542	100,00	77,13	2	389.035.542	50,00	14,36	SARPRASLUH	
				Jumlah neta LP2B	Dokumen	4		1		1				1						1,00		100,00		2					
				Jumlah pengawasan pembangunan prasarana pendukung pertanian	Laporan	8		2		2				2						2,00		100,00		4		50,00	0,00		
	3.27.03.2.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	6	1.000.000.000,00	2	421.796.799,00	2	300.000.000,00	-	-	1	41.104.950,00	1	57.838.842,00		168.264.750,00	2	267.208.542,00	100	89	4	689.005.341	66,67	68,90	SARPRASLUH	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan								204.400.000,00						56.000.000,00		65.827.000,00	-	121.827.000,00	#DIV/0!	60	-	121.827.000	0,00	0,00	SARPRASLUH	
	3.27.03.2.01		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang danat difasilitasi	Persen	87,00	27.676.118.940,00	-	421.796.799,00	27,00	4.110.013.095,00	-	-	27,00	104.076.396,63		451.848.254,20		1.249.571.378,01	10	1.805.496.028,84	37	44	10	2.227.292.828	11,49	8,05	SARPRASLUH	
	3.27.03.2.01.03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	18	1.351.037.940,00	-	421.796.799,00	4	400.000.000,00	-	-	-	-	4	96.500.000,00		303.500.000,00	4	400.000.000,00	100	100	4	821.796.799	22,22	60,83	SARPRASLUH	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	45	4.396.392.000,00			15	300.000.000,00	-	-	15	21.512.396,63	15	172.482.702,80		100.668.521,64	30	294.663.621,07	200	98,22121	30	294.663.621	66,67	6,70	SARPRASLUH	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	12.560.880.000,00			4	1.048.769.095,00	-	-	4	82.564.000,00	4	104.551.276,40		657.447.131,37	8	844.562.407,77	200	80,52892	8	844.562.408	66,67	6,72	SARPRASLUH	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	12	9.367.809.000,00			4	235.034.000,00	-	-	-	-	4	59.052.275,00		175.981.725,00	4	235.034.000,00	100	100	4	235.034.000	33,33	2,51	SARPRASLUH	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan								2.126.210.000,00						19.262.000,00		11.974.000,00	-	31.236.000,00	0	1,469093	-	31.236.000	0,00	0,00	PETERNAKAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	38,56			30,75	11,20		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinesi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8	3.27.04	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	Persen	88,2	1.829.280.000,00	87,9	#REF!	88,2	335.433.000.000,00	-	-	88,2	67.614.017,00	88,2	75.635.000,00	88,2	390.276.830,00	88,2	533.525.847,00	100	0	88,2	610.988.241,00	100,00	33,40	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak	Laporan	8	992.900.000,00	2	168.869.590,00	2	65.499.671,00	-	-	1,00	47.447.801,00	6,00	13.902.000,00	-	-	2,00	61.349.801,00	100	94	2,00	230.219.391,00	25,00	23,19	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.01.02		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	36	692.900.000,00	-	168.869.590,00	12	65.499.671,00	-	-	6	47.447.801,00	6	13.902.000,00		-	12	61.349.801,00	100	94	12	230.219.391	33,33	33,23	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4	836.380.000,00	-	-	1	391.150.000,00	-	-	1	690.000,00	-	2.740.000,00	-	377.338.850,00	1	380.768.850,00	100	97,35	-	380.768.850,00	0,00	45,53	PETERNAKAN	
	3.27.3.27.2.09.004 .2.03.02		Pengawasan atas Penerapan PersyaratanTeknis untuk Pemasukan dan/atauPengeluaran Hewan, Produk Hewan danMedia Pembawa Penyakit Hewan Lainnya(HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan	2	20.000.000,00			1	10.000.000,00		-	690.000,00	0	2.740.000,00		4.624.500,00	-	8.054.500,00	-	81	-	8.054.500	0,00	40,27	PETERNAKAN	
	3.27.04.2.04		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Laporan	3	45.000.000,00	-	-	1	381.150.000,00	-	-	1	-	-	-	-	372.714.350,00	1	372.714.350,00	100	#DIV/0!	1	372.714.350	33,33	828,25		
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	3	45.000.000,00			1	381.150.000,00	-	-	-	-		-		372.714.350,00	-	372.714.350,00	-	98	-	372.714.350	0,00	828,25	PETERNAKAN	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengikuti pendampingan	Laporan	1	796.380.000	-	-	1	98.850.000	-	-	1	19.476.216		58.993.000		12.937.980	1	91.407.196	100	17,19306	1	91.407.196	100,00	11,48		
				Jumlah jenis produk hewan yang diawasi	Laporan					1				1						1		-							
				Layanan Peternakan Berbasis Elektronik	Laporan					4				4						4		1							
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	36	333.338.000,00			12	75.000.000,00	-	-	6	13.111.216,00	6	47.853.000,00		7.958.480,00	12	68.922.696,00	100	92	12	68.922.696	33,33	20,68	PETERNAKAN	
			Pengujian Laboratorium KesehatanMasyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	2	20.000.000,00			1	13.850.000,00	-	-	-	4.809.000,00	1	8.479.500,00		-	1	13.288.500,00	100	96	1	13.288.500	50,00	66,44	PETERNAKAN	
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	-	20.000.000,00			1	10.000.000,00	-	-	-	1.556.000,00	1	2.660.500,00		4.979.500,00	1	9.196.000,00	100	92	1	9.196.000	0,00	45,98	PETERNAKAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	95,51			41,67	26,73		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	83	12.089.653.000,00	82,23	2.259.806.085,00	82,64	531.651.764,00	-	-	82,64	87.827.250,00	82,64	106.875.610,00	82,64	258.812.200,00	82,64	453.515.060,00	100	85	82,64	2.752.305.145,00	100,00	22,77	TPH	
	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Laporan	7	8.632.412.000,00	1	2.259.806.085,00	1	531.651.764,00	-	-	1	87.827.250	1	106.875.610	1	258.812.200	1	453.515.060	100	85	2	2.752.305.145,00	28,57	31,88	TPH	
		Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan		Layanan Pertanian Berbasis Elektronik		12				4		-		4		4		4		4				4	-				
	3.27.05.2.01.01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	1.044,00	2.589.722.000,00	1.043	1.912.509.125,00	1043,00	254.722.700,00	-	-	1.043	41.456.000,00	1043	34.306.500,00		107.814.700,00	1043	183.577.200,00	100	72	2.086	2.096.086.325	199,81	80,94	TPH	
				Layanan Pertanian Berbasis Elektronik		4				4		-		4										-	-				
	3.27.05.2.01.02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	3.169	2.755.190.000,00	11	347.296.960,00	3169	276.929.064,00	-	-	3.169	46.371.250,00	3169	72.569.110,00		150.997.500,00	3.169	269.937.860,00	100	97	3.180	617.234.820	100,35	22,40	TPH	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	85,30			28,57	31,88		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
10	3.27.07		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin	Persen	50,00%	1.985.509.000,00	37,50	9.742.641.752,00	50,00%	360.690.000,00	-	-	50,00%	12.130.000,00	50,00%	18.968.000,00	50,00%	19.813.000,00	50,00%	19.492.000,00	100	5	2,00	19.492.000,00	50,00%	149,94	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomtek izin usaha pertanian yang diterbitkan	Dokumen	4	13.000.000,00	1,00		1	50.000.000,00	-	-	1,00	10.600.000,00	1,00	13.927.500,00	1,00	17.705.000,00	1,00	19.492.000,00	100	39	2	19.492.000	50,00	149,94	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.01		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	3	400.000.000,00	1	154.166.472,00	1	25.000.000,00	-	-	1	10.600.000,00	0	952.000,00		7.940.000,00	1	19.492.000,00	100	78	2	173.658.472	66,67	43,41	SARPRASLUH	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapanstandar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	3	400.000.000,00			1	25.000.000,00	-	-	-	-	1	12.975.500,00		9.765.000,00										
	3.27.07.2.01		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah SakitHewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek ijin usaha peternakan yang diterbitkan	Laporan	4	900.000.000,00	1,00	9.742.641.752,00	1	10.000.000,00	-	-	1,00	1.530.000,00	1,00	5.040.500,00	1,00	2.108.000,00	1,00	8.678.500,00	100	87	2	9.751.320.252	50,00	1.083,48	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.01		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, PraktikDokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri,Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atauPasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan	3	620.000.000,00			1	10.000.000,00	-	-	-	1.530.000,00	1	5.040.500,00		2.108.000,00	1	8.678.500,00	100	87	1	8.678.500	33,33	1,40	SARPRASLUH	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	62,88			50,00	616,71		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
11	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh bersertifikat	Persen	40,98%	1.985.509.000,00	36,07%	4.717.154.404,00	40,98%	360.690.000,00	40,98%	54.400.000,00	40,98%	397.150.950,00	40,98%	656.206.050,00	40,98%	1.503.115.796,00	40,98%	2.610.872.796,00	100	724	36,07%	7.328.027.200,00	88,02	369,08	SARPRASLUH	
				Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	Persen	15,92%		14,48%		15,92%		15,92%		15,92%		15,92%		15,92%		15,92%				14,48%	-				
	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	Unit	16		889,00		16		-	54.400.000,00	16	397.150.950,00	16	656.206.050,00	16	1.503.115.796,00	16	2.610.872.796,00	100	91	16	7.328.027.200	100,00	369,08		
				Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	Poktan	40	1.985.509.000,00		4.717.154.404,00	40	2.869.796.665,00			40		40		40		40				40	-			SARPRASLUH	
				Jumlah kelompok tani yang difasilitasi kartu Go Tani	Poktan	229				293				293		293		293		293				229	-				
				Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang	Poktan	40				40				40		40		40		40				40	-				
	3.27.07.2.01.01	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan	Unit	16	450.000.000,00	16	154.166.472,00	16	57.795.719,00	-	-	-	-	16	32.490.000,00	16	25.250.000,00	16	57.740.000,00	100	100	16	211.906.472	100,00	47,09	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	40	590.000.000,00	40	2.786.943.726,00	40	2.212.000.946,00	40	54.400.000,00	40	397.150.950,00	40	620.466.050,00	40	890.169.772,00	40	1.962.186.772,00	100	89	40	4.749.130.498	100,00	804,94	SARPRASLUH	
	3.27.07.2.01.03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	2	680.509.000,00	2	1.776.044.206,00	2	600.000.000,00	-	-	-	-	2	3.250.000,00	2	587.696.024,00	2	590.946.024,00	100	98	2	2.366.990.230	100,00	347,83	SARPRASLUH	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	90,98	19,33	2442675733,33	100,00	369,08		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										Rp 3.330.626.555		Rp 21.764.802.383		Rp 10.700.659.431												
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)		97,81	83,17	1,93	244267573,33	53,56	53,56		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)		Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah		
	INSPEKTORAT																												
	6.		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																										
	6.01		INSPEKTORAT DAERAH																										
	6.01		INSPEKTORAT				101.520.775.532		35.754.642.239		29.178.315.379		2.527.310.821		3.305.980.572		3.078.605.588		4.478.251.724		13.390.148.705				49.144.790.944				
1	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	67.407.801.326	93,64%	28.716.722.259	100%	18.904.373.707	57,94%	2.269.151.481	57,94%	2.587.842.514	75,07%	2.298.141.885	95,07%	2.510.727.340	95,07%	9.665.863.220	95,07	51,13	94,36	38.382.585.479	94,36	56,94		
1	6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah (2021-2022)	Buku	48	210.998.240	48	169.858.855															48	169.858.855	100,00	80,50	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (2023-2026)	Dokumen	28	784.950.131	7	50.733.380	7	280.703.481	2	560.000	2	1.504.600	2	2.429.000	1	3.429.853	7	7.923.453	100,00	2,82	14	58.656.833	50,00	7,47		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14 /9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
1	6.01.01.2.01.01	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	52.749.804	48	51.492.382															48	51.492.382	100,00	97,62	Inspektorat	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2023-2026)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	119.578.518	4	26.403.380	6	238.846.898	2	560.000	2	1.504.600	2	2.429.000,00	2	3.429.853	8	7.923.453	133,33	3,32	12	34.326.833	300,00	28,71		
2	6.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	11.650.000															48	11.650.000	100,00	55,21	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	97.400.202	3	8.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3	8.130.000	75,00	8,35		
3	6.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	12.757.500															48	12.757.500	100,00	60,46	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	93.403.668	2	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	4.200.000	50,00	4,50		
4	6.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	9.010.000															48	9.010.000	100,00	42,70	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	93.403.668	1	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	2.100.000	25,00	2,25		
5	6.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	13.205.000															48	13.205.000	100,00	62,58	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	93.403.668	2	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.200.000	50,00	4,50		
6	6.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	21.099.717	48	31.402.339															48	31.402.339	100,00	148,83	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2023-2026)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	112.508.521	2	3.540.000	2	18.960.643	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	4	3.540.000	25,00	3,15		
7	6.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	52.749.851	48	40.341.634															48	40.341.634	100,00	76,48	Inspektorat	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2023-2026)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	175.251.887	1	2.160.000	1	22.895.940	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	2	2.160.000	12,50	1,23		
2	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) (2021-2022)	Bulan	24	12.348.228.333	24	13.466.811.451															24	13.466.811.451	100,00	109,06	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2023-2026)	Laporan	12	32.305.540.526	3	7.864.213.043	3	8.008.229.186	2	1.728.338.262	2	2.407.066.066	3	1.704.436.745	3	1.754.546.635	3	7.594.387.708	100,00	94,83	6	15.458.600.751	50,00	47,85		
8	6.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2021-2022)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	24	12.303.816.000	24	13.436.105.851															24	13.436.105.851	100,00	109,20	Inspektorat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2023-2026)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	47	32.168.025.230	47	7.848.176.043	46	7.977.808.768	46	1.727.495.262	46	2.402.266.066	46	1.694.989.745	46	1.748.366.635	46	7.573.117.708	100,00	94,93	47	15.421.293.751	100,00	47,94		
9	6.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	28.312.383	48	21.220.250															48	21.220.250	100,00	74,95	Inspektorat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (2023-2026)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	89.683.889	12	15.488.000	2	16.860.419	3	843.000	3	4.800.000	3	2.997.000	3	3.570.000	12	12.210.000	600,00	72,42	24	27.698.000	50,00	30,88		
10	6.01.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (2021-2022)	Jumlah Laporan yang di Cetak	Buku	48	16.099.950	48	9.485.350															48	9.485.350	100,00	58,92	Inspektorat	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (2023-2026)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	48	47.831.407	12	549.000	1	13.559.999	0	0	0	0	1	6.450.000	1	2.610.000	2	9.060.000	200,00	66,81	14	9.609.000	29,17	20,09		
3	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah APIP yang Bersertifikasi di Bidang Pengawasan (2021-2022)	Orang	26	1.676.418.940	29	263.534.607															29	263.534.607	111,54	15,72	Inspektorat	
				Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti (2023-2026)	Jenis Diklat	12	3.939.606.034	3	417.534.437	3	2.222.844.500	0	0	2	9.360.000	3	133.488.000	19	297.673.342	24	440.521.342	800,00	19,82	3	858.055.779	25,00	21,78		
11	6.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (2021-2022)	Jumlah APIP yang Bersertifikasi di Bidang Pengawasan	Orang	26	1.676.418.940	29	263.534.607															29	263.534.607	111,54	15,72	Inspektorat	
				Jumlah APIP yang Mengikuti Diklat	Orang	20		29																29		145,00			
				Jumlah Pelaksanaan Pasilitasi Bimtek	Kali	155		139																139		89,68			
				Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kali	57		139																139		243,86			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (2023-2026)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	3.939.606.034	30	417.534.437	28	2.222.844.500	0	0	19	9.360.000	21	133.488.000	30	297.673.342	39	440.521.342	139,29	19,82	69	858.055.779	265,38	21,78		
4	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Mamin (2021-2022)	Jenis	12	1.501.339.810	12	521.969.072															12	521.969.072	100,00	34,77	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (2023-2026)	Laporan	28	6.411.878.442	7	708.533.687	7	2.136.343.130	2	166.945.417	3	61.995.739	4	264.335.654	6	267.810.560	7	761.087.370	100,00	35,63	14	1.469.621.057	50,00	22,92		
12	6.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2023-2026)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	200	821.048.851	50	211.188.000	50	251.473.320	0	0	0	0	44	188.146.000	10	41.996.400	54	230.142.400	108,00	91,52	104	12.827.435.153	52,00	1562,32	Inspektorat	
13	6.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2023-2026)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	1.772.173.510	6	110.646.200	10	149.623.045	10	76.839.400	0	0	0	0	2	12.100.000	12	88.939.400	0,00	59,44	18	7.568.841.211	75,00	427,09	Inspektorat	
14	6.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2021-2022)	Jumlah Jenis Mamin	Jenis	12	227.623.170	14	112.552.731															14	112.552.731	116,67	49,45	Inspektorat	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2023-2026)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	756.324.456	7	90.724.344	6	301.423.606	2	11.197.716	2	29.306.869	2	39.147.580	2	31.007.654	8	110.659.819	133,33	36,71	15	201.384.163	62,50	26,63		
15	6.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2021-2022)	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	Jenis	24	118.239.910	24	85.877.485															24	85.877.485	100,00	72,63	Inspektorat	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2023-2026)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	193.952.948	12	47.967.850	12	64.673.275	0	0	0	0	0	0	12	60.030.000	12	60.030.000	100,00	92,82	24	107.997.850	50,00	55,68		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
16	6.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2021-2022)	Jumlah Jenis Media yang Berlangganan	Jenis	18	90.499.930	18	67.217.950															18	67.217.950	100,00	74,27	Inspektorat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2023-2026)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	226.815.338	7	41.952.000	6	49.522.470	0	0	2	12.211.020	2	12.211.020	2	12.211.020	6	36.633.060	100,00	73,97	13	78.585.060	54,17	34,65		
17	6.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2021-2022)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terfasilitasi	Kali	500	984.931.100	530	256.320.906															530	256.320.906	106,00	26,02	Inspektorat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1000	1.775.514.564	252	139.301.403	250	1.055.032.080	51	22.232.367	47	20.477.850	67	24.831.054	94	110.465.486	259	178.006.757	103,60	16,87	511	317.308.160	51,10	17,87		
18	6.01.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (2021-2026)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6000	626.891.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
19	6.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2021-2022)	Jumlah Pengadaan Aplikasi SPBE	Aplikasi	2	80.045.700	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (2023-2026)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	239.157.037	1	66.753.890	1	264.595.334	1	56.675.934	0	0	0	0	0	0	1	56.675.934	100,00	21,42	2	123.429.824	50,00	51,61		
5	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021-2022)	Jenis	14	1.966.393.236	14	3.075.503.713															14	3.075.503.713	100,00	156,40	Inspektorat	
				Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2023-2026)	Unit	207	1.117.123.822	12	510.205.100	50	5.159.038.190	50	304.761.000	0	0	0	0	5	17.450.000	55	322.211.000	0,00	6,25	67	832.416.100	32,37	74,51		
20	6.01.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2021-2026)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11	1.013.671.428	13	2.422.800.000	10	2.848.262.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	2.422.800.000	118,18	239,01	Inspektorat	
21	6.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel (2021-2022)	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Jenis	10	150.947.083	5	55.953.000															5	55.953.000	50,00	37,07	Inspektorat	
			Pengadaan Mebel (2023-2026)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28	295.113.049	4	228.019.300	10	291.621.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	228.019.300	14,29	77,27		
22	6.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2021-2022)	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	14	658.443.188	17	596.750.713															17	596.750.713	121,43	90,63	Inspektorat	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2023-2026)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	178	822.010.774	8	282.185.800	8	2.019.153.650	50	304.761.000	0	0	0	0	5	17.450.000	55	322.211.000	0,00	15,96	63	604.396.800	35,39	73,53		
23	6.01.01.2.07.08		Pengadaan Aset tak Berwujud (2021-2022)	Jumlah Jenis Pengadaan Aplikasi	Jenis	4	143.331.537	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Pengadaan Aset tak Berwujud (2023-2026)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
6	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan (Orang) (2021-2022)	Orang	20	684.176.000	16	456.848.401															16	456.848.401	80,00	66,77	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2023-2026)	Laporan	12	1.072.994.173	8	224.671.960	8	272.196.000	2	59.463.650	2	40.046.600	2	79.384.750	2	61.717.800	8	240.612.800	100,00	88,40	16	917.071.511	133,33	85,47		
24	6.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2021-2022)	Jumlah Surat dan Dokumen Terkirim	Surat	780	50.900.000	1.397	5.061.650															1397	5.061.650	179,10	9,94	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	57.315.690	7	5.092.600	2	8.700.000	1	107.000	1	120.000	1	64.800	2	2.041.200	2	2.333.000	100,00	26,82	9	7.425.600	112,50	12,96		
25	6.01.01.2.08.02	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2021-2022)	Jumlah Pembayaran Internet Servis Provider	Bulan	24	55.980.000	21	14.986.751															21	14.986.751	87,50	26,77	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8	43.928.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
26	6.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor (2021-2022)	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan	Orang	10	577.296.000	16	436.800.000															16	436.800.000	160,00	75,66	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor (2023-2026)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	971.750.400	8	219.579.360	8	263.496.000	8	59.356.650	8	39.926.600	8	79.319.950	8	59.676.600	8	238.279.800	100,00	90,43	16	457.859.160	200,00	47,12		
7	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara (2021-2022)	Unit	200	579.208.556	200	612.004.576															200	612.004.576	100,00	105,66	Inspektorat	
				Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (2023-2026)	Unit	684	2.808.945.082	100	374.299.977	100	825.019.220	25	9.083.152	25	67.869.509	25	114.067.736	25	108.099.150	100	299.119.547	100,00	36,26	200	1.218.695.069	29,24	43,39		
27	6.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2021-2026)	Jumlah Kendaran Eselon II yang Terpelihara	Unit	2	107.098.825	2	66.729.031															2	66.729.031	100,00	62,31	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2023-2026)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	427.131.582	1	31.403.870	1	92.037.900	1	1.867.241	1	9.333.081	1	10.060.126	1	9.220.466	1	30.480.914	100,00	33,12	2	61.884.784	50,00	14,49		
28	6.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2021-2022)	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	Unit	32	385.124.875	32	406.835.445															32	406.835.445	100,00	105,64	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2023-2026)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	1.615.645.626	16	199.866.727	16	474.388.820	4	7.215.911	6	43.685.228	9	97.867.210	9	91.973.284	16	240.741.633	100,00	50,75	32	440.608.360	50,00	27,27		
29	6.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel (2021-2022)	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel	Jenis	10	21.074.371	5	11.250.000															5	11.250.000	50,00	53,38	Inspektorat	
			Pemeliharaan Mebel (2023-2026)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	220	47.831.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
30	6.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2021-2022)	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Unit	200	47.673.125	200	82.735.600															200	82.735.600	100,00	173,55	Inspektorat	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2023-2026)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	392	428.336.467	100	48.998.740	100	91.905.000	0	0	30	14.851.200	30	6.140.400	40	6.905.400	100	27.897.000	100,00	30,35	200	76.895.740	51,02	17,95		
31	6.01.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset tak Berwujud (2021-2022)	Jumlah Aplikasi yang Terselihara	Aplikasi	4	18.237.360	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Pemeliharaan Aset tak Berwujud (2023-2026)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset	4	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
32	6.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2021-2022)	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Jenis	0	0	1	44.454.500															1	44.454.500	0,00	0,00	Inspektorat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2023-2026)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	230.000.000	2	94.030.640	1	166.687.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	94.030.640	0,00	0,00	Inspektorat	
																						186	41			76	62		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
2	6.01.02	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelengaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	Persentase	100%	17.125.824.410	98,10%	2.995.942.883	100%	2.289.157.338	100%	137.130.950	100%	322.489.267	100%	401.215.679	100%	651.050.856	100%	1.511.886.752	100	66,05	99,05	4.507.829.635	99,05	26,32		
				Persentase tindak lanjut audit eksternal	Persentase	100%		80,78%		100%		89,71%		89,71%		88,41%		88,41%		88,41%		88,41		84,60		84,60			
				Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	Persentase	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		100,00		100,00			
				Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	Persentase	100%		89%		100%		0%		0%		87%		87%		87%		86,96		88,14		88,14			
8	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah (LHP) (2021-2022)	LHP	30	10.890.227.914	82	1.245.650.033		1.991.942.044		128.348.950		284.518.948		369.457.639		554.027.671		1.336.353.208		67,09	82	2.582.003.241	273,33	23,71	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (2023-2026)	LHP	28		16		7		4		4		4		7		7		100,00		23		82,14			
				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal (2023-2026)	LHP	4		4		1		1		1		1		1		1		100,00		5		125,00			
				Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (2023-2026)	Level	4		5		4		5		5		5		5		5		125,00		10		250,00			
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (2023-2026)	Level	4		3		2		3		3		3		3		3		150,00		6		150,00			
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (2023-2026)	Level	4		3		2		3		3		3		3		3		150,00		6		150,00			
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (2023-2026)	Level	4		0		1		0		0		0		3		3		300,00		3		75,00			
				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG (2023-2026)	LHP	4		1		1		0		0		0		0		0		0,00		1		25,00			
32	6.01.02.2.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	182	4.236.105.335	170	666.495.856	35	363.769.768	4	17.960.000	2	14.695.773	7	54.989.637	13	146.162.830	26	233.808.240	74,29	64,27	196	900.304.096	107,69	21,25	Inspektorat	
33	6.01.02.2.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	170	2.741.444.331	139	445.468.645	35	182.089.806	3	0	1	12.285.000	1	24.841.878	9	58.193.611	14	95.320.489	40,00	52,35	153	540.789.134	90,00	19,73	Inspektorat	
34	6.01.02.2.01.03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	LHP	114	1.439.210.835	93	287.493.669	22	313.243.756	8	17.190.000	12	42.100.038	19	94.756.637	4	98.132.274	43	252.178.949	195,45	80,51	136	539.672.618	119,30	37,50	Inspektorat	
35	6.01.02.2.01.04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LHP	302	2.471.885.653	236	769.201.881	60	520.450.050	37	67.102.450	12	155.248.500	44	113.435.000	43	111.344.500	136	447.130.450	226,67	85,91	372	1.216.332.331	123,18	49,21	Inspektorat	
36	6.01.02.2.01.05		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	LHP	64	1.402.552.388	50	102.688.245	18	172.646.091	0	0	0	0	1	6.767.500	5	24.420.410	6	31.187.910	33,33	18,06	56	133.876.155	87,50	9,55	Inspektorat	
37	6.01.02.2.01.06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dokumen kesepakatan	8	815.324.802	3	7.351.500	1	74.303.796	0	0	1	800.000	1	1.202.000	2	10.199.000	2	12.201.000	200,00	16,42	5	19.552.500	62,50	2,40	Inspektorat	
38	6.01.02.2.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	LHP	12	2.054.216.619	10	447.423.970	4	365.438.777	2	26.096.500	2	59.389.637	2	73.464.987	6	105.575.046	12	264.526.170	300,00	72,39	22	711.950.140	183,33	34,66	Inspektorat	
9	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (LHP)	Laporan	16	334.264.806	20	163.128.809															20	163.128.809	125,00	48,80	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	LHP	8	1.630.819.641	2	106.692.308	2	297.215.294	1	8.782.000	2	37.970.319	2	31.758.040	2	97.023.185	2	175.533.544	100,00	59,06	4	282.225.852	50,00	17,31		
39	6.01.02.2.02.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	LHP	56	863.706.299	15	46.693.093	12	116.337.500	0	0	1	1.800.000	3	10.111.000	1	40.728.185	5	52.639.185	41,67	45,25	20	99.332.278	35,71	11,50	Inspektorat	
40	6.01.02.2.02.02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP	64	1.101.378.148	20	223.128.024	12	180.877.794	1	8.782.000	6	36.170.319	2	21.647.040	2	56.295.000	11	122.894.359	91,67	67,94	31	346.022.383	48,44	31,42	Inspektorat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	128,13	63,07			130,55	31,12		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3	6.01.03	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	Persen	100%	16.987.149.796	100%	4.041.977.097	100%	7.984.784.334	0%	121.028.390	0%	395.648.791	0%	379.248.024	100%	1.316.473.528	100%	2.212.398.733	100,00	27,71	100	6.254.375.830	100	36,82		
10	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan (2021-2022)	SOP	20	431.999.786	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
				Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun (2023-2026)	Rekomendasi	8	600.000.000	1	0	1	115.181.857	0	0	0	0	0	0	1	21.173.000	1	21.173.000	100,00	0,00	2	21.173.000	25,00	3,53		
41	6.01.03.2.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (2021-2022)	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan	SOP	20	215.999.893	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (2023-2026)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	300.000.000	0	0	5	115.181.857	0	0	0	0	0	0	5	21.173.000	5	21.173.000	100,00	0,00	5	21.173.000	62,50	7,06		
42	6.01.03.2.01.02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (2021-2022)	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terselesaikan	SOP	20	215.999.893	0	0															0	0	0,00	0,00	Inspektorat	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (2023-2026)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
11	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2021-2022)	Laporan	24	3.568.395.191	28	1.916.017.330															28	1.916.017.330	116,67	53,69	Inspektorat	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (2023-2026)	SKPD	212	12.386.754.819	47	2.125.959.767	46	7.869.602.477	46	121.028.390	46	395.648.791	46	379.248.024	46	1.295.300.528	46	2.191.225.733	100,00	27,84	93	4.317.185.500	43,87	34,85		
				Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM (2023-2026)	Unit	8		0		2		0		0		0		1		1		50,00		1		12,50			
43	6.01.03.2.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	996.999.708	24	467.594.821															24	467.594.821	100,00	46,90	Inspektorat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (2023-2026)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	188	3.783.513.281	47	835.828.127	46	2.842.194.866	46	13.592.010	46	92.741.573	46	170.251.066	46	433.285.142	46	709.869.791	100,00	24,98	93	1.545.697.918	49,47	40,85	Inspektorat	
44	6.01.03.2.02.02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (2021-2022)	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	2	360.999.913	4	180.614.946															4	180.614.946	200,00	50,03	Inspektorat	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (2023-2026)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD	188	951.197.802	47	19.157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	47	19.157.500	25,00	2,01		
45	6.01.03.2.02.03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2021-2022)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan kegiatan	24	1.849.395.657	28	1.069.787.101															28	1.069.787.101	116,67	57,85	Inspektorat	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (2023-2026)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan kegiatan	48	6.181.331.500	12	1.143.507.834	5	4.288.025.433	2	56.151.229	2	281.927.218	2	199.780.594	1	717.001.522	7	1.254.860.563	140,00	29,26	19	2.398.368.397	39,58	38,80		
46	6.01.03.2.02.04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (2021-2022)	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan	2	360.999.913	4	198.020.462															4	198.020.462	200,00	54,85	Inspektorat	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (2023-2026)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD	188	1.470.712.236	47	127.466.306	46	739.382.178	46	51.285.151	46	20.980.000	46	9.216.364	46	145.013.864	46	226.495.379	100,00	30,63	93	353.961.685	49,47	24,07		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	83,33	27,84			20,34	23,02		
																					Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program				101.520.775.532		35.754.642.239		29.178.315.379		2.527.310.821		3.305.980.572		3.078.605.588		4.478.251.724		13.390.148.705	99,06	45,89		49.144.790.944	73,62	48,41		
																	TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)											95,07	48,29			94,36	40,03		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN																												
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			79.467.172.632,85		10.694.960.407,34		13.809.070.900,00		1.721.883.734,81		2.740.105.022,02		2.748.808.735,17		4.919.635.871,31		12.857.902.243		93,11		23.552.862.650,65		29,64		
		Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		PERENCANAAN			77.166.513.428,85		8.988.202.630,34		12.369.070.900,00		1.651.809.924,81		2.654.206.623,02		2.572.774.185,17		3.956.683.932,31		11.562.943.545		93,48		6.326.042.173,00		8,20		
1.	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persentase	100	42.000.000.002,00	100	6.906.764.273,34	100	7.696.479.000,00	21,81	1.568.218.474,81	29,69	2.078.864.834,02	28,91	1.697.423.466,17	20	1.973.832.954,31	100	7.318.339.729,31	100	95,09	100,00	14.225.104.002,65	33,33	33,87		
1.	5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi	18	541.329.711,00	3	36.460.869,00	3	226.295.099,00	-	12.380.000,00		11.918.000,00	3,00	34.519.000,00	3	136.622.000,00	3	195.439.000,00	100,00	86,36	6	231.899.869,00	33,33	42,84		
(1)	5.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi	3	541.329.711,00		36.460.869,00						-				195.439.000,00										
	5.01.01.2.01.0001			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		3		3	226.295.099,00	-	12.380.000,00		11.918.000,00	3	34.519.000,00	3	136.622.000,00	3	195.439.000,00	100,00	86,36	3	231.899.869,00	100,00	42,84	Sekretariat	
2	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia/ Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	35.634.793.954,00	1	6.127.154.366,34	1	5.975.097.000,00	1	1.359.575.382,81	1	1.834.641.347,02	1	1.304.336.695,17	1	1.284.300.136,31	1	5.782.853.561,31	100,00	96,78	2	11.910.007.927,65	16,67	33,42	Sekretariat	
(2)	5.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	56	35.634.793.954,00	56	6.127.154.366,34	47	5.975.097.000,00	47	1.359.575.382,81	47	1.834.641.347,02	47	1.304.336.695,17	47	1.284.300.136,31	47	5.782.853.561,31	100,00	96,78	47	11.910.007.927,65	27,98	33,42	Sekretariat	
	5.01.01.2.02.01			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang										-		-												
	5.01.01.2.02.0001			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56									-		-												
3	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	4	1.771.877.953,00	4	118.082.888,00	4	574.923.830,00	4	72.460.704,00	4	64.264.363,00	4	111.377.795,00	4	241.469.434,00	4	489.572.296,00	25,00	85,15	4	607.655.184,00	33,33	34,29	Sekretariat	
(3)	5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	325.041.319,00	4	17.636.000,00	4	64.930.000,00	4	2.686.000,00	4	3.036.000,00	4	8.236.000,00	4	8.208.000,00	4	22.166.000,00	100,00	34,14	4	39.802.000,00	33,33	12,25	Sekretariat	
(4)	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	130.016.528,00	5	8.225.000,00	5	13.476.000,00	5	2.100.000,00	5	2.400.000,00	5	6.113.000,00	5	2.835.000,00	5	13.448.000,00	100,00	99,79	5	21.673.000,00	33,33	16,67	Sekretariat	
(5)	5.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	70.918.106,00	3	3.360.000,00	3	1.800.000,00	-		-	-	-	0,00			-	0,00	0,00	0,00	0	3.360.000,00	0,00	4,74	Sekretariat	
(6)	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.181.968.433,00	12	88.861.888,00	20	397.413.030,00	5	62.887.400,00	5	55.098.554,00	5	32.196.078,00	5	229.727.235,00	5	379.909.267,00	25,00	95,60	17	468.771.155,00	1700,00	39,66	Sekretariat	
(7)	5.01.01.2.06.0001 1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	63.933.567,00			2	97.304.800,00	2	4.787.304,00	2	3.729.809,00	2	64.832.717,00	2	699.199,00	2	74.049.029,00	100,00	76,10						
4	5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia/Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3.342.817.324,00	3	498.267.450,00	3	712.251.379,00	3	92.157.388,00	3	119.493.824,00	3	197.700.476,00	3	240.558.864,00	3	649.910.552,00	100,00	91,25	3	1.148.178.002,00	33,33	34,35	Sekretariat	
(8)	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	75.775.102,00	3	15.705.050,00	1	2.400.000,00	1	329.008,00	1	166.504,00	1	247.756,00	1	166.504,00	1	909.772,00	100,00	37,91	2	16.614.822,00	22,22	21,93	Sekretariat	
(9)	5.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	61	1.139.499.043,00	61	84.424.000	3	274.221.379,00	3	19.238.500,00	3	17.969.500,00	3	101.148.900,00	3	105.320.600,00	3	243.677.500,00	100,00	88,86	5	328.101.500,00	2,73	28,79	Sekretariat	
(10)	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	168	2.127.543.179,00	168	398.138.400	4	435.630.000,00	4	72.589.880,00	4	101.357.820,00	4	96.303.820,00	4	135.071.760,00	4	405.323.280,00	100,00	93,04	14	803.461.680,00	2,78	37,76	Sekretariat	
5	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	709.181.060,00	18	126.798.700,00	18	207.911.692,00	3	31.645.000,00	3	48.547.300,00	3	49.489.500,00	3	70.882.520,00	3	200.564.320,00	4,17	96,47	18	327.363.020,00	300,00	46,16		
(11)	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	709.181.060,00	16	126.798.700,00	18	207.911.692,00	3	31.645.000,00	3	48.547.300,00	3	49.489.500,00	3	70.882.520,00	3	200.564.320,00	16,67	96,47	7	327.363.020,00	14,58	46,16	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)															-		0					65,83	91,20		-	83,33	38,21		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
Predikat Kinerja															-		0					Sedang	Sangat Tinggi		-	Tinggi	Sangat Rendah		
II.		Menghadirkan keselaraan perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	Persentase	100	10.745.805.132,00	100	269.379.912,00	100	1.329.591.900,00	37,98	62.597.400,00	28,89	266.424.059,00	89,16	246.877.447,00	100	650.173.972,00	100,00	1.281.689.878,00	100,00	96,40	100,00	1.551.069.790,00	33,33	14,43	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
6	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	8.419.371.621,00	100	243.162.112,00	100	1.081.176.900,00	42,50	48.527.400,00	26,42	191.327.572,00	92,28	195.332.697,00	-	650.173.972,00	100,00	1.085.361.641,00	100,00	100,39	100,00	1.328.523.753,00	33,33	15,78	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(12)	5.01.02.2.01.0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	6	158.075.127													0	0								
(13)	5.01.02.2.01.0002		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	12	2.504.006.209	2	3.135.000,00	2	99.015.000,00	2	-	2	9.490.455,00	2	0,00	2	87.826.850,00	2	97.317.305,00	100,00	98,29	4	100.452.305,00	33,33	4,01	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(14)	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6	145.079.461			1	35.600.400,00	1	18.075.400,00	1	17.525.000,00	1	0,00	1	0,00	1	35.600.400,00	100,00	100,00	1	35.600.400,00	16,67	24,54		
(15)	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	183.146.364													0	0								
(16)	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	1.416.906.338			2	91.268.600,00	-	-	1	90.599.800,00	1	0,00	-	0,00	2	90.599.800,00	100,00	99,27	2	90.599.800,00	33,33	6,39		
(17)	5.01.02.2.01.0006		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	6	132.105.406			300	24.452.000,00	300	20.852.000,00	-	3.600.000,00	-	0,00	-	0,00	300	24.452.000,00	100,00	100,00	300	24.452.000,00	5000,00	18,51		
(18)	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	3.880.052.716	2	240.027.112,00	4	830.840.900,00	1	9.600.000,00	1	70.112.317,00	1	195.332.697,00	1	562.347.122,00	4	837.392.136,00	100,00	100,79	6	1.077.419.248,00	60,00	27,77	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
7	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	100	183.146.364,00				39.235.000,00		-	33,82	12.432.930,00	95,92	19.514.000,00	100	5.512.000,00	100,00	37.458.930,00		95,47	100,0	37.458.930,00	100,00	20,45		
(19)	5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	124.878.364,00			2	39.235.000,00	-	-	1	12.432.930,00	1,00	19.514.000,00		5.512.000,00	2	37.458.930,00	100	95,47	2,0	37.458.930,00	66,67	30,00		
(20)	5.01.02.2.02.0002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	46	58.268.000,00													0	0								
8	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun	Persentase	100	1.261.800.007,00	100	26.217.800,00	100	97.784.500,00	2,42	13.170.000,00	60,86	34.185.000,00	22,72	11.164.000,00	14	16.060.000,00	100,00	74.579.000,00	100	76,27	100,0	100.796.800,00	33,33	7,99	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(21)	5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	6	331.277.951,00													0	0								
(22)	5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	930.522.056,00	3	26.217.800,00	3	97.784.500,00	3	13.170.000,00	3	34.185.000,00	3,00	11.164.000,00	3	16.060.000,00	3,00	74.579.000,00	100,00	76,27	6	100.796.800,00	75,00	10,83	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
9	5.01.02.2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			881.487.140				111.395.500	1,29	900.000	69,75	28.478.557,00	0,96	20.866.750,00	28	34.045.000,00	100	84.290.307		75,66761	100,00	84290307,00		9,562284369	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(23)	5.01.02.2.04.0001		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	293.829.047													0	0								
(24)	5.01.02.2.04.0002		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	3	293.829.047			1	111.395.500	1	900.000	1	28.478.557,00	1	20.866.750,00	1	34.045.000,00	1	84.290.307							Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
(25)	5.01.02.2.04.0003		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	293.829.047													0	0								
															-		0												
Rata - rata capaian kinerja (%)															-		0					100	88,33		-	33,33	11,88		
Predikat Kinerja															-		0					Sangat Tinggi	Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
III.		Menghadirkan keselaraan perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	Persentase	100	24.420.708.294,85	100	1.812.058.445,00	100	3.343.000.000,00	10,01	20.994.050,00	34,30	308.917.730,00	32,56	628.473.272,00	23	1.332.677.006,00	100,00	2.962.913.938,00	100,00	88,63	100,00	4.774.972.383,00	33,33	19,55	Bidang Sosial Budaya dan Pemeritahan	
				Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	Persentase	100		100		100		10,01		34,30	-	32,56	-	23		100,00					-				
				Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	Persentase	100		100		100		10,01		34,30	-	32,56	-	23		100,00					-				
10	5.01.03.2.01.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	7.781.985.581,00	100	336.878.553,00	100	700.000.000,00	14,45	11.878.800,00	26,73	118.913.680,00	30,70	102.606.750,00	28	363.661.400,00	100,00	597.060.630,00	100	85,29	100	933.939.183,00	33,33	12,00	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
(26)	5.01.03.2.01.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	459.294.523,00	2	21.864.000,00												0,00	0,00	0,00	0	21.864.000,00	0,00	4,76	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
	5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	617.071.174,00			2	33.275.500,00	2	2.895.000,00	2	3.012.000,00	2	4.504.500,00	2	21.155.200,00	2	31.566.700,00								
(27)	5.01.03.2.01.02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	21	1.072.883.908,00	22	8.968.500,00			-	-	-	-		0,00			-	0,00	0,00		0	8.968.500,00	0,00	0,84	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
	5.01.03.2.01.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	66	1.526.439.221,00			22	97.263.900,00	22	-	22	4.918.000,00	22	10.578.200,00		78.917.050,00	-	94.413.250,00								
															-		0,00												

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
(28)	5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	1.329.791.058,00	2	196.448.478,00	2	408.998.600,00	2	8.983.800,00	2	15.212.210,00	2	77.343.150,00	2	215.887.750,00	2	317.426.910,00	100,00	77,61	2	513.875.388,00	8,33	38,64	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
																	0,00												
(29)	5.01.03.2.01.06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	6	1.315.021.336,00	3	109.597.575,00	6	160.462.000,00	2,00	-	2	95.771.470,00	2	10.180.900,00	2	47.701.400,00	6	153.653.770,00	100,00	95,76	6	263.251.345,00	33,33	20,02	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	
	5.01.03.2.01.0006			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	18	1.461.484.361,00								-																
																	0,00												
11			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	5.771.171.572,71	100	296.365.138,00	100	678.000.000,00	7,03	9.115.250,00	26,28	109.476.232,00	39,54	97.114.230,00	27	209.364.378,00	100,00	425.070.090,00	100,00	62,69	100	721.435.228,00	33,33	12,50	Bidang Perekonomian dan SDA	
(30)	5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	2.881.635.174,61	1	115.414.390,00	3	280.218.770,00	3	1.810.000,00	3	93.574.282,00	3	86.980.380,00	3	29.729.998,00	3	212.094.660,00	100,00	75,69	3	327.509.050,00	12,50	11,37	Bidang Perekonomian dan SDA	
																	0,00												
(31)	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	4	1.649.988.902,98	1	57.151.118,00	3	326.168.010,00	3	4.655.000,00	3	7.388.900,00	3	8.437.950,00	3	141.572.050,00	3	162.053.900,00	100,00	49,68	3	219.205.018,00	25,00	13,29	Bidang Perekonomian dan SDA	
																	0,00												
(32)	5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	1.239.547.495,13	1	123.799.630,00	1	71.613.220,00	1	2.650.250,00	1	8.513.050,00	1	1.695.900,00	1	38.062.330,00	1	50.921.530,00	100,00	71,11	1	174.721.160,00	8,33	14,10	Bidang Perekonomian dan SDA	
																	0,00												
12			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	10.867.551.141	100	1.178.814.754	100	1.965.000.000,00	9,33	-	40,94	80.527.818,00	30,46	428.752.292,00	19	759.651.228,00	100,00	1.940.783.218,00	100	98,77	100	3.119.597.972,00	33,33	28,71	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
																	0,00												
(33)	5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat	2	2.371.414.094,00	2	288.204.394,00	1	400.000.000,00	1	-	1	-	1	174.059.100,00	1	222.223.180,00	1	396.282.280,00	100,00	99,07	3	684.486.674,00	150,00	28,86	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	6	2.598.194.419,00	2		0	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-		0,00			-			Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
(34)	5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat	2	335.612.933,00	2	38.006.498,00	2	130.000.000,00	2	-	2	9.298.100,00	2	42.875.473,00	2	77.759.932,00	2	129.933.505,00	100,00	99,95	2	167.940.003,00	33,33	50,04	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	6	389.729.163,00								-		0,00											
(35)	5.01.03.2.03.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat	2	2.612.316.336,00	3	403.503.281,00	3	760.000.000,00	3	-	3	17.802.180,00	3	276.176.880,00	3	459.668.116,00	3	753.647.176,00	100,00	99,16	6	1.157.150.457,00	300,00	44,30	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	12	3.247.743.023,00								-		0,00											
																	0,00												
(36)	5.01.03.2.03.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat	2	464.982.159,00	3	26.274.000,00	3	150.000.000,00	3	-	3	53.427.538,00	3	47.064.859,00	3	41.321.500,00	3	141.813.897,00	100,00	94,54	3	168.087.897,00	50,00	36,15	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	6	649.548.605,00								-		0,00											
																	0,00												
(37)	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	8	5.083.225.619,14		422.826.581,00	2	525.000.000,00	2	-	2	-	2	0,00	2	519.106.360,00	2	519.106.360,00	100,00	98,88	2	941.932.941,00	25,00	18,53	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Rata - rata capaian kinerja (%)													-				0					100,0	82,25		-	36,36	20,35		
Predikat Kinerja													-				0					Sangat Tinggi	Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata - rata capaian kinerja Urusan Perencanaan (%)													-				0					100,00	93,48		-	33,33	22,62		
Predikat Kinerja													-				0					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			81,26	2.300.659.204,00	81,26	1.706.757.777,00	81,26	1.440.000.000,00	9,07	70.073.810,00	11,41	85.898.399,00	35,90	176.034.550,00	25	962.951.939,00	9,07	1.294.958.698,00	11,2	89,93		3.001.716.475,00		130,47		
IV.			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	Persentase	81,26	2.300.659.204,00	81,26	1.706.757.777,00	81,26	1.440.000.000,00	9,07	70.073.810,00	11,41	85.898.399,00	35,90	176.034.550,00	25	962.951.939,00	81,26	1.294.958.698,00	100,00	89,93	81,26	3.001.716.475,00	33,33	130,47	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
				Capaian Indeks Inovasi Daerah	Nilai	45,50		1001		45,3					-		0,00								-			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
				Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	Persentase	100									-		0,00												
				Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	Persentase	100									-		0,00												

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	Persentase	100				100					-		0,00												
13			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase fasilitasi penelitian bidang sosial dan kependudukan	Persentase	100	896.583.323,00	100	240.805.283,00	100	206.473.900,00	1,8	-	0,45	-	48,64	6.249.350,00	49	194.144.600,00	100,0	200.393.950,00	100,00	97,06	100,00	441.199.233,00			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(38)	5.05.02.2.01.12		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	438.687.318,00	100	240.805.283,00			0	-		-		0,00			-	0,00			50,00	240.805.283,00			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(39)			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	3	457.896.005,00			1	206.473.900,00					1,00	6.249.350,00	1	194.144.600,00	1,00	200.393.950,00	100,00	97,06	1	200.393.950,00				
14			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	Persentase	100	296.138.949,00																					Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(40)			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Fasilitasi Satu Data	Fasilitasi	72	296.138.949,00																					Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
15			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase	80	683.087.978,00	80	1.176.436.501,00	100	99.571.600,00	5,16	-	0,59	-	29,15	8.148.500,00	65	86.318.000,00	100,00	94.466.500,00	100,00	94,87	80	1.270.903.001,00	33,33	186,05	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(41)	5.05.02.2.03.02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	683.087.978,00	1	1.176.436.501,00	0		-	-		-		0,00			-	0,00	0,00	0,00	1	1.176.436.501,00	33,33	172,22	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(42)	5.05.02.2.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	896.305.949,00			1	99.571.600,00	-	-		-	1	8.148.500,00	1	86.318.000,00	1	94.466.500,00	100	94,87	1	94.466.500,00				
13			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(1) Persentase Inkubasi Inovasi; (2) Persentase Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (3) Persentase Fasilitasi KKN	Persentase	100	1.321.432.277,00	100	530.321.276,00	100	1.133.954.500,00	11,17	70.073.810,00	14,58	85.898.399,00	60,25	161.636.700,00	14	682.489.339,00	100,00	1.000.098.248,00	100	88,20	100	1.530.419.524,00	33,33	115,82	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(43)	5.05.02.2.04.01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1.321.432.277,00	1	530.321.276,00																			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
(44)	5.05.02.2.01.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	7	1.465.833.637,00			1	571.466.100,00	1	29.873.024,00	1	19.633.949,00	1	22.458.100,00		474.832.327,00	1	546.797.400,00	90,00	95,68	0,45	546.797.400,00	2,14	37,30		
(45)	5.05.02.2.01.0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	7	1.361.727.855,00			1	533.926.200,00	1	40.200.786,00	1	66.264.450,00	1	132.424.750,00		189.032.560,00	1	427.922.546,00	91,00	80,15	0,46	427.922.546,00	2,17	31,42		
(46)	5.05.02.2.01.0005		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	4	966.740.880,00			1	28.562.200,00	1		1		1	6.753.850,00		18.624.452,00	1	6.753.850,00	100,00	23,65	0,50	6.753.850,00	4,17	0,70		
Rata - rata capaian kinerja Urusan Penelitian (%)																						100,00	89,93		-	33,33	130,47		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																					12.857.902.243,31				12.857.902.243,31				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100,00	92,51		-	33,33	40,58		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGIAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET																												
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA																												
	5	Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				129.012.213.395,00		28.516.491.638,00		16.772.863.817		1.930.893.998		2.601.195.015		3.345.884.533		5.996.452.664		13.874.426.209,99	99%	82,72%		28.516.491.638		22%		
	5.03		KEPEGAWAIAN				80.237.592.395,00																						
	5.03.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	40.743.210.708,00	100%	14.895.616.112,00	100%	9.618.152.245	25%	1.535.080.498	25%	2.434.628.336	100%	2.278.330.778	100%	3.007.513.749	100%	9.255.553.361	100%	96,23%	100%	31.682.920.157	75%	78%	SEKRETARIAT	
	5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase fasilitasi terhadap tercapainya laporan kinerja OPD	Persen	100%	820.456.068,00	100%	89.115.254,00	100%	54.910.571	25%	-	25%	17.810.000	100%	12.833.750	100%	14.636.700	100%	45.280.450	100%	82,46%	100%	157.416.453	75%	19%		
				Nilai Sakin BKPSDM	Nilai	A		A		A						A				A		A		A		A			
1	5.03.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan SOP BKPSDM	Buah	120	105.595.178,00	90	67.111.454,00															90	67.111.454	75%	64%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	223.915.119,00	6	12.329.249,00	6	22.503.343	2	-	2	12.530.000	1	4.988.750,00	1	4.796.950	6	22.315.700	100%	99,17%	12	34.644.949	50%	15%		
2	5.03.01.2.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD (LKjIP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)	Buah	55	25.350.000,00	25	22.003.800,00															25	22.003.800	45%	87%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	48	465.595.771,00	12	10.691.500,00	12	32.407.228	3	-	3	5.280.000	3	7.845.000,00	3	9.839.750	12	22.964.750	100%	70,86%	24	33.656.250	50%	7%		
	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase fasilitasi tercapainya laporan keungan yang berkualitas	Persen	100%	32.513.290.604,00	100%	19.625.377.112,92	100%	6.805.970.322	100%	1.455.582.348	100%	2.124.466.181	100%	1.546.027.203,26	100%	1.524.303.713	100%	6.650.379.445	100%	97,71%	100%	26.277.746.558	75%	81%		
3	5.03.01.2..02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun	Bulan	24	11.150.049.767,00	24	12.971.619.689,00															24	12.971.619.689	100%	116%		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	220	21.269.023.653,00	55	6.637.628.923,92	55	6.800.056.816	55	1.455.582.348	55	2.122.643.781	55	1.546.027.203,31	55	1.520.927.713	55	6.645.181.045	100%	97,72%	55	13.282.809.969	100%	62%		
4	5.03.01.2..02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Laporan	24	11.394.591,00	24	7.628.800,00															24	7.628.800	100%	67%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	48	31.003.275,00	12	500.000,00	12	5.913.506	3	-	3	1.822.400	3	0,00	3	3.376.000	12	5.198.400	100%	87,91%	24	5.698.400	50%	18%	SEKRETARIAT	
5	5.03.01.2..02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester yang tesusun	Laporan	60	13.926.642,00	30	7.999.700,00															30	7.999.700	50%	57%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	144	37.892.676,00	36	1.990.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0,00%	36	1.990.000	25%	5%		
	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase fasilitasi terhadap tercapainya pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Persen	100%	4.892.189.588,00	100%	1.889.085.984,00	100%	2.370.748.752	25%	37.075.550	25%	213.805.237	100%	591.682.459,00	100%	1.340.266.662	100%	2.182.829.908	100%	92,07%	100%	4.076.335.892	75%	83%		
6	5.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia selama setahun	Jenis	80	489.175.444,00	80	474.160.240,00															80	474.160.240	100%	97%		
				Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia selama setahun	Unit	56		50																50		89%			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlenekanan Kantor	Paket	12	1.239.235.820,00	3	214.465.250,00	3	671.369.632	0	-	0	67.686.236	2	15.965.778,00	1	518.810.495	3	602.462.509	100%	89,74%	6	816.927.759	50%	66%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
7	5.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Porsi	2754	90.947.871,00	1496	96.507.272,00															1.496	96.507.272	54%	106%	SEKRETARIAT	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	100	340.028.726,00	23	32.781.000,00	25	63.874.801	0	-	5	13.374.000		13.386.500,00	20	37.475.500	25	64.236.000	100%	100,00%	48	97.017.000	48%	29%		
8	5.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang Cetakan yang tersedia selama setahun	Jenis	38	284.064.120,00	38	295.137.676,00															38	295.137.676	100%	104%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	49	616.176.395,00	10	77.722.300,00	13	82.610.244	0	-	2	1.661.100	7	41.134.140,00	4	38.908.850	13	81.704.090	100%	98,90%	23	159.426.390	47%	26%		
9	5.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Jenis	6	17.660.814,00	6	19.272.000,00															3	19.272.000	100%	109%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	38.449.708,00	12	4.420.000,00	3	6.419.250	0	-	3	1.752.300	3	2.316.600,00	3	1.930.500	9	5.999.400	100%	93,46%	9	10.419.400	100%	27%		
10	5.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana selama setahun	Kali	210	321.039.500,00	162	225.984.799,00															162	225.984.799	77%	70%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	320	1.005.411.190,00	80	453.055.447,00	80	635.503.000	3	37.075.550	30	125.421.601		280.970.870,00		162.698.765	33	606.166.786	41%	95,38%	113	1.059.222.233	35%	105%		
	5.03.01.2.06.12		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	450.000.000,00			1	910.971.825	0	-	0	3.910.000	-	237.908.571,00	1	580.442.552	1	822.261.123	100%	90,26%	1	822.261.123	33%	183%		
	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	Presntase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	841.655.717,00	100%	237.455.616,00	100%	175.134.000	100%	29.156.600	100%	43.656.600	100%	43.813.200,00	100%	58.313.200	100%	174.939.600	100%	99,89%	100%	617.438.276	75%	73%	SEKRETARIAT	
11	5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Orang	4	240.744.272,00	4	237.455.616,00															4	237.455.616	100%	99%		
				Jumlah Honorarium Tenaga Pembantu Administrasi Kantor yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Orang	4		4																4		100%			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	16	600.911.445,00	4	205.043.060,00	4	175.134.000	1	29.156.600	1	43.656.600	1	43.813.200,00	1	58.313.200	4	174.939.600	100%	99,89%	15	379.982.660	94%	63%		
	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presntase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	1.675.618.731,00	100%	351.859.020,00	100%	211.388.600	100%	13.266.000	100%	34.890.318	100%	83.974.166,00	100%	69.993.474	100%	202.123.958	100%	95,62%	100%	553.982.978	75%	33%	SEKRETARIAT	
12	5.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional pada BKD yang terpelihara selama 1 Tahun	Unit	14	253.742.613,00	14	272.726.366,00															14	272.726.366	100%	107%		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	44	587.584.033,00	11	121.558.220,00	11	199.798.600	11	13.266.000	11	30.906.318	11	80.407.166,00	11	66.183.474	7	190.762.958	100%	95,48%	18	312.321.178	100%	53%		
K	5.03.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun	Kali	228	255.883.188,00	230	198.000.800,00															230	198.000.800	101%	77%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	338	578.408.897,00	73	32.300.000,00	80	11.590.000	0	-	10	3.984.000	45	3.567.000,00	25	3.810.000	80	11.361.000	100%	98,02%	153	43.661.000	45%	8%		
																					Rata- Rata Capaian Kinerja (%)	100%	96,23%			75%	77,8%		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	5.03.02		Program Kepegawaian	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	Persen	100%	39.494.381.687,00	99,90%	6.752.275.831,00	100%	4.395.099.459	0	395.813.500	0	165.321.179		94.930.162	99,0%	1.943.186.903	99,0%	2.599.251.744	99%	59,14%	99%	9.583.807.525	99%	24%		
				Prosentase kedisiplinan ASN	Persen	100%		96,51%		100%		0		0				96,3%		96,3%		96%		96%		96%			
				Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	87%		87%		90%		0		0				93,0%		93,0%		103%		93%		107%			
				Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetenj	Persen	98%		80%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		90%		92,31%			
				Prosentase Peningkatan pelyanan Kepegawaian	Persen	91%		88%		90%		0%		98%		0		99,0%		99%		109%		93,25%		102,66%			
	5.03.02.01.		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan CPNS selama setahun	Persen	100%	10.790.318.831,00	100%	2.176.263.651,00	100%	849.062.950	0%	18.267.000	0%	64.773.600	0%	42.465.688		376.403.843	0%	501.910.131	0%	59,11%	0%	2.910.453.732	50%	27%		
				Presentase tingkat akurasi data kepegawaian	Persen	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		50%			
				Tingkat kematangan layanan kepegawaian	Indeks	4		4		4		0		0		0%				0		0%		0%		0%			
				Presentase peningkatan pembinaan anggota kopri	Persen	100%		100%		100%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		50%			
14	5.03.02.01.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen bezetting	OPD	240	2.862.094.352,00	62	1.527.095.090,00															62	1.527.095.090	26%	53%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
				Jumlah pendaftar CPNS dan P3K	Orang	25000		2102																2.102		8%			
				Jumlah Penerima SK CPNS dan P3K	Orang	1537		2102																2.102		137%			
				Jumlah peserta bintal CPNS dan P3K	Orang	1537		690																690		45%			
				Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Orang	500		500																500		100%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	12	5.258.323.347,00	3	75.609.800,00	3	661.801.059	1	16.467.000	1	57.190.000	-	17.002.400,00	1	267.937.270	3	358.596.670	100%	54,18%	6	434.206.470	50%	8%		
15	5.03.02.01.08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi OPD yang dimonitoring	OPD	104	293.172.361,00	52	191.635.863,00				-											52	191.635.863	50%	65%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
				Jumlah Asn yang dibina minat bakat bidang Olahraga, Paduan Suara, MTQ KORPRI	ASN	60		23																23		38%			
				Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani	ASN	50		23																23		46%			
				Penyelenggaraan HUT KORPRI dan rangkaian	Kali	2		1																1		50%			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	4	1.143.380.908,00	1	50.500.000,00	1	110.561.791	1	-	1	1.756.950		1.345.463,00	1	86.293.283	1	89.395.696	100%	80,86%	100	139.895.696	100%	12%		
16	5.03.02.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi	Aplikasi	4	385.095.399,00	4	457.532.698,00															4	457.532.698	100%	119%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
				Jumlah Kegiatan Verifikasi data kepegawaian	Kali	4		0																0		0%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	8	848.252.464,00	2	106.170.150,00	2	76.700.100	0	1.800.000	1	5.826.650	0	24.117.825,00	1	22.173.290	2	53.917.765	100%	70,30%	4	160.087.915	50%	18,87%		
	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase penataan formasi sesuai kompetesensi	Persen	100%	13.546.852.886,00	100%	2.793.826.628,00	100%	901.170.841	25%	306.682.600	25%	100.187.579	25%	27.973.900	25%	242.313.700	100%	677.157.779	100%	75,14%	100%	3.470.984.407	50%	26%		
				Presesntase kenaikan pangkat tepat waktu	Persen	100%		100%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		100%		50%			
				Presentase KGB tepat waktu	Persen	100%		100%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		100%		50%			
17	5.03.02.2.02.01			Jumlah SK Pengangkatan PPPK, Jumlah SK Pengangkatan PNS, Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS, dan Jumlah SK Kenaikan Jabatan Fungsional	Orang	2750	707.331.905,00	1236	561.501.820,00															1.236	561.501.820	45%	79%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
17	5.03.02.2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN																										
				Jumlah Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS	Orang	50		28																28		56%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	16	1.632.863.845,00	4	31.603.000,00	4	60.715.568	1	3.540.000	1	900.000	1	4.100.000,00	1	35.476.250	4	44.016.250	100%	72,50%	8	75.619.250	50%	5%	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN ASN	
18	5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, Jumlah ASN yang menerima SK Pangkat Pengabdian/SK Pensiun, Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah ASN yang bisa menghitung angka kredit	Orang	12769	903.751.903,00	10586	512.446.352,00															10.586	512.446.352	83%	57%		
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	112	2.160.311.565,00	28	132.640.100,00	28	240.456.122	7	48.193.000	7	29.260.000	7	15.223.900,00	7	96.226.750	28	188.903.650	100%	78,56%	56	321.543.750	50%	15%		
19	5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah hasil uji kompetensi PNS	Orang	422	2.631.141.649,00	66	1.515.209.356,00															66	1.515.209.356	16%	58%		
				Jumlah JPT Pratama yang lowongan	Jabatan	13		10																10		77%			
				Jumlah Pelantikan Pejabatan Struktural & Fungsional	Kali	12		11																11		92%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	19	5.511.452.019,00	6	40.426.000,00	2	599.999.151	1	254.949.600	1	70.027.579		8.650.000,00		110.610.700	2	444.237.879	100%	74,04%	8	484.663.879	42%	9%		
	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja ASN	Persen	100%	5.359.230.234,00	100%	455.724.507,00	100%	2.180.739.516	33%	2.993.900	0%	-	56%	4.790.200,00	11%	1.273.984.800	56%	1.281.768.900	56%	58,78%	56%	1.737.493.407	25%	32%	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
20	5.03.02.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta Uji Kesehatan bagi Aparatur maupun PNS sakit menahun	Orang	350	194.419.066,00	106	455.724.507,00															106	455.724.507	30%	234%		
				Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	20	164.811.168,00	5	3.227.700,00	5	31.202.230	3	1.993.900	-	-	2	4.790.200,00		4.794.000	5	11.578.100	100%	37,11%	10	14.805.800	50%	7,6%		
	5.03.02.2.03.02		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	2.000.000.000,00			1	1.509.099.586	0	-	-	-	-	-	1	1.212.104.500	1	1.212.104.500	100%	80,32%	1	1.212.104.500	25%	735,5%		
	5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	4	2.000.000.000,00			35	151.194.812	0	-	-	-	-	-	35	4.380.000	35	4.380.000	100%	2,90%	35	4.380.000	875%	0,2%		
	5.03.02.2.03.13		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	4	1.000.000.000,00			100	489.242.888	0	1.000.000	-	-	-	0,00	17	52.706.300	17	53.706.300	17%	10,98%	17	53.706.300	425%	2,7%		
	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase ASN yang mengumpulkan SKP sesuai dengan standart yang berlaku	Persen	100%	9.797.979.736,00	100%	1.326.461.045,00	100%	464.126.152	0	67.870.000	-	360.000	100	19.700.374	100	50.484.560	100,0	138.414.934	100,0	29,82%	75%	1.464.875.979	75%	15%	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
				Tingkat kematangan layanan kinerja pegawai	Indeks	5		5		4						-													
24	5.03.02.2.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang memiliki penilaian kinerja baik (Jumlah ASN yang mengikuti workshop sipantas)	Orang	250	383.532.078,00	199	260.556.504,00															199	260.556.504	80%	68%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	1.160.451.736,00	3	134.840.220,00	3	25.378.514	1	-		-	1	15.479.374,00	1	2.250.000	3	17.729.374	100%	69,86%	6	152.569.594	50%	13%		
25	5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Peserta Bimtek Purna Tugas	Orang	722	1.484.775.631,00	1336	105.135.891,00															1.336	105.135.891	185%	7%		
				Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Orang	1100		1707																1.707		155%			
26				Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Tapera, dan Klaim JKK-JKM yang dilayani	Orang	1000		0																0		0%			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	5530	3.686.983.360,00	1330	33.567.800,00	1400	341.878.736	15	67.870.000		-		0,00	946	15.050.000	961	82.920.000	69%	24,25%	2.291	116.487.800	41%	3%		
27	5.03.02.2.04.07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	515	2.735.857.074,00	230	752.023.750,00	95	66.640.902	0	-		-	5	3.450.000,00	90	33.184.560	0	36.634.560	0%	54,97%	230	788.658.310	45%	29%		
28	5.03.02.2.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	37	346.379.857,00	22	40.336.880,00	5	30.228.000	0	-		360.000	2	771.000,00	3	-	5	1.131.000	100%	3,74%	27	41.467.880	73%	12%		
																				Rata- Rata Capaian Kinerja (%)		102%	59,14%			68%	24%		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi			
	5.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				48.774.621.000,00		4.187.425.606,00		2.759.612.113		-		1.245.500				1.045.752.012		1.046.997.512		37,94%		7.411.130.315		15%		
	5.04.02.		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	Persen	69.5%	48.774.621.000,00	60%	4.187.425.606,00	72%	2.759.612.113	0	-		1.245.500		972.623.593	90%	1.045.752.012	90%	2.019.621.105	125%	73,18%	75%	7.411.130.315		15%	BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEGEMBANGAN SDM	
				Prosentase Pejabat Struktural yang memiliki sifat Pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang	Persen	77.83%		67%		80%		0						54%		54%		68%		61%					
	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat teknis selama setahun	Persen	100%	7.790.491.357,00	100%	505.384.410,00	100%	1.181.131.656	0	-		1.245.500	100	275.511.195,00	100	278.051.450	100%	554.808.145	100%	46,97%	100%	505.384.410	50%	6%		
29	5.04.02.2.01.03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Teknis (Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Penanggulangan Penyakit Menular, Diklat Pemeliharaan Sistem, Diklat Imunisasi Terpadu, Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keselamatan Kerja Kontruksi, FGD 3 Kegiatan)	Orang	580	1.929.076.809,00	192	505.384.410,00																192	505.384.410	33%	26%		
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	8	5.861.414.548,00	2	127.446.400,00	2	1.181.131.656	0	-		1.245.500		275.511.195,00	2	278.051.450	2	554.808.145	100%	46,97%	4	682.254.545	50%	12%		
	5.04.02.2.02		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembagan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat struktural selama setahun	Persen	100%	40.984.129.643,00	100%	6.905.745.905,00	100%	1.578.480.457	0	-		-	50%	697.112.398	50%	767.700.562	50%	1.464.812.960	100%	92,80%	100%	6.905.745.905	75%	17%		
				Tingkat kematangan penerapan kompetensi Sumber Daya manusia	Indeks	3		3		3		0				-				0		0%		0%					
				Presentase fasilitasi terlaksananya tugas belajar ASN	Persen	100%		100%		100%		0		0		-				0		0%		0%		50%			
30	5.04.02.2.02.07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Orang	90	12.502.942.191,00	30	6.868.989.905,00															30	6.868.989.905		55%		
				Jumlah peserta pelatihan dasar (latsar) CPNS	Orang	800		454																454					
				Jumlah peserta diklat calon kepala sekolah	Orang	100		154																154					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	36	26.961.459.452,00	6	826.852.800,00	6	1.578.480.457	0	-		-	3	697.112.398	3	767.700.562	6	1.464.812.960	100%	92,80%	12	2.291.665.760	33%	8%		
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan	Jumlah ASN yang Tugas Belajar Selama setahun	Orang	10	506.576.000,00	2	36.756.000,00											-	-			2	36.756.000	20%	7%		
31	5.04.02.2.02.08			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	4	1.013.152.000,00	0	-	0	1.578.480.457											0%	0,00%	0	-	0%	0%		
																					Rata- Rata Capaian Kinerja (%)	96%	73,18%			58%	15,2%		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																													
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	99%	82,72%			67%	22%		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Tinggi						
	SEKRETARIAT DAERAH																												
	SEKRETARIAT DPRD																												
1		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%	577.512.523.142	67%	269.221.816.157	100%	110.103.971.901	30%	19.888.630.845,65	30%	20.302.055.911,32	33%	20.121.987.887	31%	23.761.896.120,24	124%	84.074.570.764,36	124%	76,36%	191%	390.062.118.154	191%	67,54%	SEKRETARIAT DPRD	
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				313.983.285.598		60.628.636.209		46.475.555.625		9.456.242.747,65		11.078.546.519,32		10.473.147.928,15		13.088.327.363,17		44.096.264.558		94,88%		141.545.764.310		45,08%	Bagian Program dan Keuangan	
Indikator Program				Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	43.167.783.131	A	20.709.319.295	A	5.580.476.004	A	1.010.125.281,65	A	1.792.387.697,32	A	1.228.961.517	A	1.290.418.591	A	5.321.893.087	A	95,37%	A	26.757.155.523	A	100,00%	Bagian Program dan Keuangan	
1		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terususun	Dokumen	107	3.706.497.203	86	2.188.683.361	17	613.655.840	9	-	1	217.013.691,00	2	154.699.790	5	159.905.378	17	531.618.859	100%	86,63%	103	2.720.302.220	97%	73,39%		
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	39	1.588.335.876	37	1.250.825.953	8	299.692.180	3	-	-	88.565.191,00	1	87.584.800	4	95.381.617,00	8	271.531.608	100%	90,60%	45	1.522.357.561	114%	95,85%		
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	40	1.178.220.786	26	576.867.908	6	200.945.000	3		1	72.975.500,00	1	54.292.990	1	35.482.000,00	6	162.750.490	100%	80,99%	32	739.618.398	79%	62,77%		
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28	939.940.542	24	360.989.500	3	113.018.660	3	-	-	55.473.000,00	-	12.822.000,00	-	29.041.761,00	3	97.336.761	100%	86,12%	27	458.326.261	96%	48,76%		
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Dokumen	4.649	39.461.285.928	1.402	18.520.635.934	1.153	4.966.820.164	195	1.010.125.281,65	221	1.575.374.006,32	220	1.074.261.727	548	1.130.513.212,73	1.184	4.790.274.228	103%	96,45%	36	24.036.853.303	0%	60,91%		
4			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	37.603.027.474	36	18.520.635.934	36	4.682.404.044	31	1.010.125.281,65	31	1.476.405.986,32	31	1.036.165.727	31	1.022.847.856,73	31	4.545.544.852	86%	97,08%	36	23.066.180.786	100%	61,34%		
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4.552	1.299.427.392	1.331	538.374.050	1.138	243.231.300	180	-	210	84.998.020,00	210	26.636.000	538	106.465.356,00	1.138	218.099.376	100%	89,67%	2469	756.473.426	54%	58,22%		
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	20	186.589.938	21	110.605.000	5	15.704.820	5	-	-	8.870.000,00	-	3.375.000	-	-	5	12.245.000	100%	77,97%	26	122.850.000	130%	65,84%		
7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	261.526.125	9	55.834.091	9	16.752.500	10	-	10	5.100.000,00	10	2.880.000	10	1.200.000,00	10	9.180.000	111%	54,80%	9	65.014.091	25%	24,86%		
8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	110.715.000	5	21.130.000	1	8.727.500	-	-	1	-	-	5.205.000	-	-	1	5.205.000	100%	59,64%	6	26.335.000	120%	23,79%		
Indikator Program				Persentase ketercapaian sasaran program Perangkat Daerah		100%	270.815.502.467	50%	39.919.316.914	100%	40.895.079.621	#REF!	8.446.117.466,00	#REF!	9.286.158.822,00	#REF!	9.244.186.411	#REF!	11.797.908.772,44	#REF!	38.774.371.471	#REF!	94,81%	3778%	114.788.608.787	3778%	42,39%	Bagian Umum	
3		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dokumen	429	2.256.643.044	97	1.199.513.839	47	188.473.900	15	-	8	48.134.700,00	6	32.304.500	4	72.216.732,00	33	152.655.932	18%	81,00%	130	1.352.169.771	30%	59,92%		
9			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	29	85.228.415	34	26.581.800	17	10.181.000	4	-	4	600.000,00	6	4.350.000	4	800.000,00	18	5.750.000	106%	56,48%	52	32.331.800	181%	37,94%		
10			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	240	1.872.760.561	39	1.120.251.039	22	133.372.900	4	-	4	32.981.200,00	5	27.954.500	7	53.587.232,00	20	114.522.932	91%	85,87%	59	1.234.773.971	24%	65,93%		
11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	298.654.069	24	52.681.000	8	44.920.000	7	-	-	14.553.500,00	-	-	7	17.829.500,00	14	32.383.000	175%	72,09%	38	85.064.000	24%	28,48%		
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen	356	12.080.839.774	699	6.416.526.853	241	1.423.841.822	15	5.940.000,00	31	420.732.756,00	26	101.169.000	26	587.009.163,00	687	1.114.850.919	285%	78,30%	1386	8.073.947.772	389%	66,83%		
12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	882.532.397	12	386.634.979	1	108.206.200	-	-	1	92.650.000,00	-	-	-	-	1	92.650.000	100%	85,62%	13	479.284.979	325%	54,31%		
13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	28	3.085.559.470	38	2.080.389.300	7	204.472.578	-	-	7	118.577.000,00	-	-	-	61.944.500,00	7	180.521.500	100%	88,29%	45	2.260.910.800	159%	73,27%		
14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	8	996.129.086	28	516.705.520	2	110.515.744	1	-	1	66.422.000,00	-	14.385.000,00	-	19.180.000,00	2	99.987.000	100%	90,47%	30	616.692.520	369%	61,91%		
15			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	296	909.351.362	578	425.487.107	74	98.865.000	13	-	21	16.013.000,00	25	18.942.000,00	22	41.000.100,00	81	75.955.100	109%	76,83%	659	501.442.207	223%	55,14%		
16			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	1.445.911.553	44	757.203.472	5	287.358.700	1	-	1	4.300.000,00	1	33.064.000,00	4	196.615.000,00	7	233.979.000	140%	81,42%	51	991.182.472	253%	68,55%		
17			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	792	1.434.241.777	768	787.665.610	132	136.031.000	143	-	154	21.045.000,00	125	9.250.000,00	136	43.026.500,00	558	73.321.500	423%	53,90%	1326	860.987.110	167%	60,03%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
18			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	3.327.114.130	75	1.462.440.865	20	204.215.600	6	-	8	83.905.756,00	3	7.708.000,00	13	98.598.063,00	30	190.211.819	150%	93,14%	105	1.652.652.684	88%	49,67%		
19			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0		-	542.570.000	1	274.177.000	-	5.940.000,00	-	17.820.000,00	-	17.820.000,00	1	126.645.000,00	1	168.225.000	100%	61,36%	1	710.795.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
5			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	17	1.083.347.432	0	9.401.188.297	3	2.226.190.842	5	-	3	161.750.000,00	-	53.200.000	-	1.215.362.950,00	8	1.430.312.950	267%	64,25%	8	10.831.501.247	47%	999,82%		
20			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	1.083.347.432	-	9.401.188.297	3	2.226.190.842	5	-	3	161.750.000,00	-	53.200.000	-	1.215.362.950,00	8	1.430.312.950			8	10.831.501.247	47%	999,82%		
6			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	720	17.021.822.928	632	16.076.561.633	180	2.710.082.000	77	453.231.124,00	77	639.964.745,00	77	668.425.021	76	831.704.391,00	308	2.593.325.281	171%	95,69%	940	18.669.886.914	131%	109,68%		
21			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	360	817.648.616	34	1.319.120.110	90	35.416.000	17	-	24	11.980.000,00	24	12.520.000	25	10.730.000,00	90	35.230.000	100%	99,47%	124	1.354.350.110	35%	165,64%		
22			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	2.184.871.692	598	7.868.151.187	12	373.690.000	3	93.066.838,00	3	76.516.875,00	3	98.199.685	3	90.391.743,00	12	358.175.141	100%	95,85%	610	8.226.326.328	1271%	376,51%		
23			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	312	14.019.302.620	-	6.889.290.336	78	2.300.976.000	74	360.164.286,00	74	551.467.870,00	74	557.705.336	73	730.582.648,00	74	2.199.920.140	95%	95,61%	74	9.089.210.476	24%	64,83%		
7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit	1.695	9.355.091.647	906	3.994.746.404	294	1.575.785.200	96	8.950.000,00	81	293.671.571,00	45	536.157.502	80	573.490.621,44	302	1.412.269.694	103%	89,62%	1208	40.959.366.501	71%	437,83%		
24			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	1.147.519.173	68	1.612.011.879	4	246.076.350	3	1.600.000,00	3	62.220.449,00	2	36.489.300	9	94.521.165,00	4	194.830.914	100%	79,17%	72	1.806.842.793	449%	157,46%		
25			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	104	2.734.523.145	714	408.245.500	26	307.810.000	7	7.350.000,00	6	124.306.287,00	5	67.956.050	-	92.894.951,00	5	292.507.288	18%	95,03%	719	700.752.788	691%	25,63%		
26			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.069	202.289.868	75	584.908.018	156	33.500.000	26	-	46	1.400.000,00	22	-	62	28.750.000,00	39	30.150.000	25%	90,00%	114	615.058.018	11%	304,05%		
27			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	432	1.024.594.653	16	1.389.581.007	101	193.967.500	54	-	22	39.598.600,00	16	24.074.200,00	9	75.259.331,00	25	138.932.131	25%	71,63%	41	1.528.513.138	9%	149,18%		
28			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	1.755.004.750	33	2.032.962.611	2	290.507.750	-	-	2	14.515.470,00	-	198.376.297	-	57.793.394,58	1	270.685.162	25%	93,18%	33	2.303.647.773	165%	131,26%		
29			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	54	2.491.160.058	-	33.519.387.791	5	503.923.600	6	-	2	51.630.765,00	-	209.261.655	-	224.271.779,86	2	485.164.200	40%	96,28%	2	34.004.551.991	4%	1365,01%		
8			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Orang	300	228.025.774.796	23	2.391.677.687	50	32.275.705.857	-	7.977.996.342,00	0	7.707.052.992,00	2	7.638.467.598	28	8.412.225.176,00	30	31.735.742.108	60%	98,33%	53	34.127.419.795	18%	14,97%		
30			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	224.528.654.096	23	1.780.910.500	50	31.624.705.857	50	7.977.996.342,00	50	7.707.052.992,00	50	7.636.177.598,00	50	7.809.907.176,00	50	31.131.134.108	100%	98,44%	50	32.912.044.608	100%	14,66%		
31			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	20	2.993.818.200	86	94.139.481	5	576.000.000	-	-	-	-	-	-	5	571.030.000,00	5	571.030.000	100%	99,14%	91	665.169.481	455%	22,22%		
32			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	200	503.302.500	-	516.627.706	50	75.000.000	-	-	-	-	2	2.290.000	23	31.288.000,00	25	33.578.000	50%	44,77%	25	550.205.706	13%	109,32%		
9			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Dokumen	80	991.982.846	38	439.102.200	20	495.000.000	-	-	4	14.852.058,00	6	214.462.790	5	105.899.739,00	15	335.214.587	75%	67,72%	53	774.316.787	66%	78,06%		
33			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	40	259.020.706	21	113.032.200	10	70.000.000	-	-	4	14.852.058,00	1	24.564.540,00	1	15.974.739,00	6	55.391.337	60%	79,13%	27	168.423.537	68%	65,02%		
34			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	40	732.962.140	17	326.070.000	10	425.000.000	-	-	-	-	5	189.898.250,00	4	89.925.000,00	9	279.823.250	90%	65,84%	26	605.893.250	65%	82,66%		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		131,19	84,22			0,65	1,46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		kali	2652	263.529.237.544	3174,36927	208.593.179.948	627	63.628.416.276	184	10.432.388.098		9.223.509.392		9.648.839.959		10.673.568.757,07	712	39.978.306.206		62,83%		248.516.353.844		94,30%		
		Indikator Program		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	%	100	72.289.903.349	100	23.034.078.217	100	8.099.807.560	5%	33.547.000	10%	704.753.900,00	0%	2.232.668.576	0%		15%	3.751.612.176,00	0%	46,32%	102	26.785.690.393	102%	37,05%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
10		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Dokumen	120	72.289.903.349	83	23.034.078.217	20	8.099.807.560	1	33.547.000	2	704.753.900,00		2.232.668.576		780.642.700,00	19	3.751.612.176,00	95%	46,32%	102	26.785.690.393	85%	203,30%		
35			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	32	1.796.556.732	24	357.632.105	8	509.214.399	1	22.894.000	2	14.081.500,00	2	10.225.000,00	3	8.638.750,00	8	55.839.250,00	100%	10,97%	32	413.471.355	100%	23,01%		
36			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	8.188.107.747	29	4.939.835.365	2	4.234.089.961	-	-	-	3.880.000,00	1	1.115.927.301,00	1	689.460.750,00	2	1.809.268.051,00	100%	42,73%	31	6.749.103.416	388%	82,43%		
37			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	16	22.941.909.788	6	2.549.822.940	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	6	2.549.822.940	38%	11,11%		
38			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	32	19.681.664.541	6	3.933.528.637	8	2.762.549.600	-	10.653.000	-	686.792.400,00	1	1.101.268.275,00	7	20.163.200,00	8	1.818.876.875	100%	65,84%	14	5.752.405.512	44%	29,23%		
39			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	32	19.681.664.541	18	11.253.259.170	1	593.953.600	-	-	-	-	-	5.248.000,00	1	62.380.000,00	1	67.628.000	100%	11,39%	19	11.320.887.170	59%	57,52%		
		Indikator Program		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	%	100	9.877.649.485	100	4.337.288.595	100	2.007.456.250	0%	-	0%	-	58%	768.228.300	42%	597.630.900,00	100%	1.365.859.200	1%	68,04%	218	5.703.147.795	218%	57,74%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
11		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	Dokumen	104	9.877.649.485	192	4.337.288.595	26	2.007.456.250	-	-	-	-	15	768.228.300	11	597.630.900,00	26	1.365.859.200	100%	68,04%	218	5.703.147.795	209%	57,74%		
40			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	16	1.957.986.249	56	930.622.425	4	359.583.250	-	-	-	-	1	2.754.000	3	291.818.550,00	4	294.572.550	100%	81,92%	60	1.225.194.975	372%	62,57%		
41			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	16	1.655.605.898	23	696.287.000	4	372.464.600	-	-	-	-	4	258.078.800	-	-	4	258.078.800	100%	69,29%	27	954.365.800	167%	57,64%		
42			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	24	1.099.895.132	20	936.727.275	6	434.373.200	-	-	-	-	-	-	6	295.386.350,00	6	295.386.350	100%	68,00%	26	1.232.113.625	108%	112,02%		
43			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	16	2.390.319.089	59	922.886.925	4	391.624.000	-	-	-	-	4	208.179.100	-	-	4	208.179.100	100%	53,16%	63	1.131.066.025	391%	47,32%		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
44			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	16	231.551.690	13	25.797.700	4	82.833.550	-	-	-	-	2	7.972.000	2	10.426.000,00	4	18.398.000	100%	22,21%	17	44.195.700	105%	19,09%		
45			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	16	2.542.291.426	22	824.967.270	4	366.577.650	-	-	-	-	4	291.244.400	-	-	4	291.244.400	100%	79,45%	26	1.116.211.670	163%	43,91%		
Indikator Program				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD		100	21.210.082.153	100	10.490.278.256	100	22.562.067.600	103%	5.887.441.330	91%	3.098.958.148	12%	1.433.705.773,00	74%	3.028.136.679,00	279%	13.448.241.930	3%	59,61%	512	23.883.387.876	512%	368,59%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
12		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Pungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Laporan	236	7.292.626.068	271,404762	1.750.897.870	59	20.248.008.600	67	5.105.575.330	62	2.867.464.609	8	1.433.705.773	50	2.529.113.329,00	187	11.935.859.041	317%	58,95%	458	13.686.756.911	194%	187,68%		
46			Pengawasan Urusan Pemerintahanan Bidang Pemerintahanan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	732.635.326	64	237.406.815	12	4.696.623.250	14	1.239.170.800	10	638.253.753,00	2	229.134.325	12	573.993.000,00	38	2.680.551.878	317%	57,07%	102	2.917.958.693	212%	398,28%		
47			Pengawasan Urusanan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	717.672.826	60	150.316.415	12	4.596.280.950	18	1.173.951.350	14	629.910.000,00	2	395.325.825	12	666.204.000,00	46	2.865.391.175	383%	62,34%	106	3.015.707.590	220%	420,21%		
48			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	717.672.826	62	135.758.605	12	5.373.630.750	17	1.433.391.650	14	713.166.203,00	2	256.458.598	12	633.531.500,00	45	3.036.547.951	375%	56,51%	107	3.172.306.556	222%	442,03%		
49			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	717.672.826	44	102.448.285	12	4.730.830.750	16	1.253.410.530	17	619.278.853,00	2	294.919.525	12	631.137.829,00	47	2.798.746.737	392%	59,16%	91	2.901.195.022	190%	404,25%		
50			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	4	1.574.330.736	-	-	1	367.475.450	-	-	1	-	-	257.867.500	-	-	1	257.867.500	100%	0,00%	1	257.867.500	25%	16,38%		
51			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	24	595.482.800	19	145.196.175	6	97.115.800	2	2.560.000	2	11.272.000,00	-	-	2	24.247.000,00	6	38.079.000,00	100%	39,21%	25	183.275.175	103%	30,78%		
52			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	16	2.237.158.727	24	979.771.575	4	386.051.650	-	3.091.000	4	255.583.800,00	-	-	-	-	4	258.674.800,00	100%	67,01%	28	1.238.446.375	172%	55,36%		
13			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Dokumen	28	13.749.365.177	24,1666667	8.508.772.476	7	2.237.192.950	3	781.866.000	-	231.493.539	-	-		492.841.350,00	3	1.506.200.889,00	43%	67,33%	27	10.014.973.365	97%	72,84%		
53			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	16	4.110.898.900	13	2.450.327.800	4	868.392.300	2	367.836.000	-	6.454.539,00	-	-	-	42.510.000,00	2	331.780.539,00	50%	38,21%	15	2.782.108.339	92%	67,68%		
54			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	12	9.638.466.277	12	6.058.444.676	3	1.368.800.650	1	414.030.000	-	225.039.000,00	-	-	1	535.351.350,00	2	1.174.420.350,00	67%	85,80%	14	7.232.865.026	113%	75,04%		
14			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	Laporan	8	168.090.908	26	230.607.910	2	76.866.050	0	-	-	-	-	-		6.182.000,00	-	6.182.000	0%	8,04%	26	181.657.600	325%	108,07%		
55			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	168.090.908	26	175.475.600	2	76.866.050	-	-	-	-	-	-	1	6.182.000,00	1	6.182.000,00	50%	8,04%	27	181.657.600	338%	108,07%		
Indikator Program				Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	160.151.602.557	90	170.731.534.880	A	30.959.084.866		4.511.399.768		5.419.797.344					0%	21.412.592.900,07			3.081	192.144.127.780	A	100,00%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
15		Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Pungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kanasitas DPRD	Dokumen	1436	105.500.734.541	2049,26085	134.932.917.150	333	17.355.813.302	74	2.476.998.538	74	2.912.200.022	123	2.456.441.292	78	4.937.150.305,07	328	12.782.790.157,07	98%	73,65%	2377	147.715.707.307	166%	140,01%		
56			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	50	500.000.000,00	50	-	50	576.968.000	-	-	-	-	49	390.438.500	1	20.472.540,00	50	410.911.040,00	100%	71,22%	100	410.911.040	200%	82,18%		
57			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	24	11.581.790.210,94	105	67.145.925.325	6	3.729.801.000	1	99.986.500	1	205.896.000,00	1	140.281.220	1	772.823.840,00	4	1.218.987.560,00	67%	32,68%	109	68.364.912.885	455%	590,28%		
58			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	1.076	88.876.123.943,66	1.743	67.145.925.325	7	253.060.000	7	42.000.000	7	63.000.000,00	7	63.000.000	7	84.000.000,00	7	252.000.000,00	100%	99,58%	1750	67.397.925.325	163%	75,83%		
59			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	42	1.673.661.633,85	25	252.000.000	24	134.847.011	3	19.210.000	9	20.470.000,00	14	39.630.000	-	40.760.000,00	7	120.070.000	27%	89,04%	32	372.070.000	75%	22,23%		
60			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	96	776.468.555,68	105	102.032.500	1	139.289.250	-	-	-	-	1	35.240.500	-	76.468.800,00	1	111.709.300	100%	80,20%	106	213.741.800	110%	27,53%		
61			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	148	2.092.690.196,91	21	287.034.000	269	12.521.848.041	66	2.315.802.038	66	2.622.834.022,00	65	1.787.851.072	69	3.942.625.125,07	266	10.669.112.257	99%	85,20%	287	10.956.146.257	194%	523,54%		
16			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	Dokumen	728	54.650.868.016,07	555	35.798.617.730	182	13.603.271.564	39	2.034.401.230	36	2.507.597.322	36	2.757.796.018	38	1.330.008.173,00	149	8.629.802.743	82%	63,44%	704	44.428.420.473	97%	81,29%		
62			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	464	43.395.467.119,57	313	31.362.359.574	116	5.593.902.914	16	484.509.350	16	794.435.000,00	16	1.295.637.606	16	495.946.500,00	64	3.070.528.456	55%	54,89%	377	34.432.888.030	81%	79,35%		
63			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Praksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Laporan	24	1.853.935.511,00	25	976.279.960	6	462.122.450	-	20.639.500	6	227.509.500,00	-	71.270.000	-	-	6	319.419.000	100%	69,12%	31	1.295.698.960	129%	69,89%		
64			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	96	334.888.518,34	84	80.966.165	24	22.484.000	4	3.948.000	3	2.905.000,00	2	3.710.000	4	6.750.000,00	13	17.313.000	54%	77,00%	97	98.279.165	101%	29,35%		
65			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	144	9.066.576.867,16	133	3.379.012.031	36	7.524.762.200	19	1.525.304.380	11	1.482.747.822,00	18	1.387.178.412	18	827.311.673,00	66	5.222.542.287	183%	69,40%	199	8.601.554.318	138%	94,87%		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		105,02	55,11			1,68	1.22		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							110.103.971.901,00										84.074.570.764				390.062.118.154				
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		118,11	69,66			1,49	2,07		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	SEKRETARIAT DAERAH																												
	Bagian Tata Pemerintahan																												
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH																										
	4.01.02	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan data dukung IKK	Persen	100	11.853.605.812	100	3.591.689.666	100	1.374.999.268	100,00	61.284.400		95.118.285		315.201.158		196.845.797	100	668.449.640	100	48,61	100,00	4.260.139.306	100	35,94	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	Persen	100	3.034.662.766	100	378.183.695	100	448.141.943	100,00	37.059.500		30.750.261		23.191.753		99.829.255,00	100	190.830.769	100	42,58	100	569.014.464	100	18,75	Bagian Tata Pemerintahan	
				Jumlah pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	Pelayanan	1	4.231.611.978	1	2.885.845.358															1	2.885.845.358	1	68,20		
				Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	Persen	27,78	1.266.474.000	27,78	193.441.900															27,78	193.441.900	27,78	15,27		
				Persentase pelayanan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	Persen	100	1.138.667.743			100,00	313.667.743	-	-	22,22	19.271.000	13,88	39.341.900	63,90	52.848.140,00	100,00	111.461.040	100,00	35,53	100,00	111.461.040	100,00	9,79		
				Persentase penegasan batas kecamatan yang dilakukan secara kartometrik	Persen	22,22	1.314.272.639			11,11	364.272.639		18.931.000	11,11	24.039.623		216.874.635		20.575.940,00	11,11	280.421.198	100	76,98	100	280.421.198	50	21,34		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	4.01.02.2.01.01		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan			100	2.556.611.978		2.220.387.230			-	-	-	-	-	39.341.900	100,00	52.848.140	100,00	111.461.040	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	2.331.848.270	50,00	91,21		
			2021-2022	Jumlah Aplikasi PATEN (SIPELANDUK) yang dikembangkan	Aplikasi	1		1	2.559.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.559.225	100,00	86,85		
				Jumlah Pembinaan PATEN	Kecamatan	18		18	16.589.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16.589.010	100,00			
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Kecamatan	18		18	8.592.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8.592.675	100,00			
				Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba sinereitas	Kecamatan	18		18	354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	354.000	100,00			
				Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Kecamatan	18		18	96.275.740	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	96.275.740	100,00			
				Jumlah Fasilitasi Rapat Forkopimda	Rapat	192		66	2.096.016.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	2.096.016.580	34,38			
			2023-2026	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	2.813.667.743,00	1	74.214.750	1	313.667.743			-	19.271.000		39.341.900	1,00	52.848.140	1	111.461.040	100,00	35,53	2	185.675.790	50,00	6,60		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	2.331.848.270	50,00	91,21		
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.02.2.01.02		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			100	841.474.000		591.243.378											-	280.421.198	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	871.664.576	50,00	103,59		
			2021-2022	Jumlah Dokumen Penegasan Batas	Dokumen	6		2	371.521.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	371.521.514	33,33	70,26		
				Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi	Dokumen	8		2	219.721.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	219.721.864	25,00			
			2023-2026	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	8	1.739.272.639,00	2	193.441.900	2	364.272.639		18.931.000		24.039.623	2	216.874.635		20.575.940	2	280.421.198	100,00	76,98	4	473.863.098	50,00	27,24		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	50,000	871.664.576	39,17	103,59		
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.02.2.01.03		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			100	911.520.823		203.326.681											-	190.830.769	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	394.157.450	50,00	43,24		
			2021-2022	Jumlah LPPD disusun	Lansoran	6		3	94.557.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	94.557.170	50,00	22,31		
				Jumlah pelantikan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	Orang	8		2	29.771.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29.771.125	25,00			
				Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi	Kunjungan	132		57	59.554.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	59.554.920	43,18			
				Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal yang disusun	Laporan	6		2	19.443.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.443.466	33,33			
			2023-2026	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	8	2.123.141.943,00	2	174.857.014	2	448.141.943	1	37.059.500	1	30.750.261		23.191.753		99.829.255	2	190.830.769	100,00	42,58	4	365.687.783	50,00	17,22		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	51,70	50,00	394.157.450	42,93	34,07		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	4.01.02.2.04		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	MoU	30	867.916.686	62	134.218.713	5	248.916.943	-	5.293.900	3	21.057.401	2	35.792.870	4,00	23.592.462	9	85.736.633	180	34,44	71	219.955.346	236,67	25,34	Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.04.01	2021-2022	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Rapat TKKSD yang dilaksanakan	Rapat	40	143.999.743,00	40	86.179.822											-	-	-	-	40	86.179.822	100,00	0,60		
		2023-2026		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	22	723.916.943,00	17	48.038.891,00	5	248.916.943		5.293.900,00	3	21.057.401,00	2	35.792.870,00	4	23.592.462,00	9	85.736.633	180,00	34,44	26	133.775.524	118,18	18,48		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		180	34,44			236,67	25,34		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																			140,00	43,07	-	3.868.257.068,00	139,80	29,71		
										TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																			
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Hukum																												
	4.01		Sekretariat Daerah																										
	4.01.02	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang diproses	Persen	90	4.037.196.986	100	4.405.277.724	90	1.500.000.000	-		20	326.719.995	70	205.876.399		708.592.145	90	-	100		190	1.349.834.389	211,11	142,55	Bagian Hukum	
				Persentase Perbup yang diproses	Persen	90		98		90		45		40		42,5				128		141,67		226		250,56			
				Persentase Keputusan Bupati yang diproses	Persen	90		126		90		36		70		63				169		187,78		295		327,78			
	4.01.02.2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diproses	dokumen	1730		952												-		-		952		55,03			
				Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah	Persen	90		100		90		-		-		90		10		100		100,00							
				Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi	perkara	8		8					108.645.850							-		-	89,99	8		100,00			
				Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dan jumlah peserta yang disuluh	perkara dan orang	104 perkara dan 2150 orang		65 perkara dan 505 orang		26 perkara dan 440 orang		7 perkara		7 perkara		3 perkara		14 perkara dan 75 orang		30 perkara dan 206 orang		77,50		65 dan 505		43,00			
				Tingkat kematangan layanan produk hukum daerah	indeks	5		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5 indeks		5		5		5		100,00			
1	4.01.02.2.03.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi permasalahan peraturan perundang-undangan	Kali	60	915.999.222	93	1.186.384.135															93	1.186.384.135	155,00	129,52	Bagian Hukum	
				Jumlah Perda yang diproses	Dokumen	20		18																18		90,00			
				Jumlah Perbup yang diproses	Dokumen	80		192																192		240,00			
				Jumlah Keputusan Bupati yang diproses	Dokumen	1600		1584																1584		99,00			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dalam Proleda	Dokumen	20		30																30		150,00			
				Jumlah produk hukum daerah yang disusun	dokumen	3400	1.930.000.000			700	517.381.000	297	21.211.350	438	135.068.370	461	289.921.640	323	11.654.205	1.519	457.855.565	217,00	88,49	1519	457.855.565	44,68	23,72	Bagian Hukum	
2	4.01.02.2.03.02		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara litigasi yang difasilitasi	perkara	8	1.969.199.550	8	1.888.071.499															8	1.888.071.499	100,00	95,88	Bagian Hukum	
				Jumlah perkara non litigasi yang terselesaikan	kasus	11		27																27					
				Jumlah bantuan hukum untuk masyarakat miskin	perkara	5		0																0					
				Jumlah Peserta Lomba Keluarga Sadar Hukum	regu	3		0																0					
				Jumlah peserta Temu Kader Keluarga Sadar Hukum	orang	200		0																0					
				Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	orang	240		299																299					
				Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum	desa / kelurahan	4		10																10					
				Jumlah Peta Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan	kecamatan	4		0																0					
				Jumlah peserta Diklat Legal Drafting dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	orang	17		8																8					

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	kasus	104	3.990.250.000			26	596.665.000	7	80.389.500	7	92.778.900	3	120.490.400	14	196.953.000	31	490.611.800	119,23	82,23	31	490.611.800	29,81	12,30	Bagian Hukum	
3	4.01.02.2.03.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundang-undangan, Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	buku	2880	1.151.998.214	2683	1.330.822.090															2683	1.330.822.090	93,16	115,52	Bagian Hukum	
				Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah yang ditetankan	orang	850		320																320					
				Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokumen	7		7																7					
				Jumlah produk hukum yang terdokumentasikan	Dokumen	1730		1794																1794					
				Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	2800	2.360.000.000			700	385.954.000	297	7.045.000	438	98.872.725	461	164.521.404	323	130.927.895	1.519	401.367.024	217,00	103,99	1519	401.367.024	54,25	17,01	Bagian Hukum	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	184,41	91,57						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																										
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	184,41	91,57			184,41	91,57		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	Bagian Kesejahteraan Rakyat																												
	4.01		*Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah*																										
	4.01.02	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum dan harmonis	*PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT*	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Predikat	100	259.361.842.899	100,00	85.832.134.807	100	46.889.549.698	4,40	1.449.254.950	13,36	4.201.369.900	42,13	10.427.696.400		10.150.695.480	59,89	26.229.016.730	59,89	55,94	43,32	112.061.151.537	43,32	43,21	KESRA	
	4.01.02.2.02.		*Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetankan	SK Penetapan	12	259.361.842.899	4	82.892.728.898	4	38.104.494.807	1,00	1.390.909.450		6.675.144.670	-	10.427.696.400	-	10.150.695.480	1,00	28.644.446.000	25,00	75,17	5,00	111.537.174.898	41,666667	43,00	Total Kesra	
	4.01.02.2.02.01.		*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*																									Sub Bag. Bina Mental Spiritual	
			2021-2022	Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik untuk Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabunaten	Orang	700	12.099.999.848	175	9.597.687.160															175	9.597.687.160	25	79,32		
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik yang difalitasi untuk pengiriman MTQ Tinskat Prosinsi	Orang			-																-		-			
				Jumlah Kafilah MTQ Kabupaten Gresik Yang difalitasi untuk pengiriman MTQ Tinskat Nasional	Orang	6		6																6		100			
				Jumlah Peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	PHBI	3		3																3		100			
				Jumlah Ta'mir Masjid, Pengurus UPZ dan LPTQ yang dibina	Kegiatan	3		3																3		100			
				Jumlah Pemberangkatan calon jamaah haji	Kali	1		1																1		100			
				jumlah hewan qurban yang disalurkan	Ekor	150		150																150		100			
				Jumlah Halaqoh dan umarah dan umaro	Kali	5		5																5		100			
				Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan uang kehormatan	Orang	10.156		-																-		-			
			2023-2026	Jumlah dokumen hasil fasilitasi bina mental spiritual	Dokumen	52	35.996.979.309			13	7.695.399.895	4	79.697.650,00	4	3.553.605.770	3	1.432.842.750	2	1.657.619.430,00	13,00	6.723.765.600	100,00	87,37	13	6.723.765.600	25,0	18,68		
	4.01.02.2.02.02.		*Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial*																									Sub Bag. Kesejahteraan Sosial	
			2021 - 2022	Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang di evaluasi	Lembaga	654	61.756.193.104	327	71.689.825.170															327	71.689.825.170	50	116,09		
				Jumlah Organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah yang dilaksanakan pengendalian	Lembaga	655		328																328		50			
				Jumlah Usulan Organisasi keagamaan dan tempat ibadah penerima hibah yang direkomendasikan	Lembaga	656		328																328		50			
			2023 - 2026	Jumlah Dokumen hasil kebijakatan, evahuasi, dan capaian kineja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	12	245.109.161.086			3	30.009.094.912	1	1.299.377.300	1	3.042.313.900	1	8.833.144.650	0	8.371.596.300	3,00	21.546.432.150	100,00	71,80	3	21.546.432.150	25,0	8,79		
	4.01.02.2.02.03.		*Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat*																									Sub Bag Kesejahteraan Masyarakat	
			2021 - 2022	Jumlah Rakorda UKS/M	orang	100	1.650.056.964	100	1.605.216.568														100	1.605.216.568	100	97,28		
				Jumlah peserta Validasi Program dan Rencana Kerja UKS/M	orang	101		101																101		100			
				Jumlah LSS UKS/M Propinsi	orang	160		160																160		100			
				Jumlah LSS UKS/M Nasional	orang	160		160																160		100			
				Jumlah LSS UKS/M Verifikasi	orang	161		161																161		100			
				Jumlah Peserta Jambore UKS/ M Kab	orang	200		200																200		100			
				Jumlah Peserta Jambore UKS/ M Prop	orang	75		75																75		100			
				Jumlah peserta senam UKS/M Tim Pelaksana (lembaga) kecamatan se kabupaten	kecamatan	16	104.967.340	16																16		100			
				Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani karyawan dilingkungan pemkab gresik	opd	20		20																20		100			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah pengendalian dan evaluasi penyaluran santunan kematian	kecamatan	16	106.733.815	16																16		100			
				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	orang	350	126.525.366	350																350		100			
				Jumlah peserta rakor Komisi Daerah Lansia Kecamatan dan Kabupaten	orang	250	81.935.290	250																250		100			
			2023 - 2026	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Linmas	Dokumen	44	5.796.376.919			11	400.000.000	3	11.834.500	3	79.225.000	3	161.709.000	2	121.479.750	11,00	374.248.250	100,00	93,56	11	374.248.250	25,0	6,46		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		25,00	75,17			41,666667	43,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Bagian Administrasi Pembangunan																												
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
			SEKRETARIAT DAERAH																									Bagian Administrasi Pembangunan	
	4.01.03	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	Persen	100	20.384.280.716	100	2.736.348.944	100	1.249.729.371	-	120.887.858	50,00	159.160.620	25,00	202.869.048	25,00	140.317.704	100,00	623.235.230	100,00	49,87	100,00	3.359.584.174	100,00	16,48		
	4.01.03.2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Dokumen	34	11.326.006.819	18	1.336.582.607	4	536.651.516	0,75	46.061.557	1,25	84.043.360	1,00	74.809.630	1,00	30.244.500	4	235.159.047	100,00	43,82	22,00	1.571.741.654	64,71	13,88		
				Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kali	24	9.058.273.897	12	1.399.766.337	4	713.077.855	1	74.826.301	1	75.117.260	1	128.059.418	1	110.073.204	4	388.076.183	100,00	54,42	16	1.787.842.520	66,67	19,74		
	4.01.03.2.02.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Buku Renja Sekretariat Daerah	Buku	85	2.641.371.053	85	724.971.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	724.971.392	100,00	27,45		
				Jumlah Buku Renstra Setda Tahun 2021 s/d 2026	Buku	55		55		-		-		-		-		-		-		-		55		100,00			
				Jumlah Buku Standar Analisa Biaya	Buku	120		115		-		-		-		-		-		-		-		115		95,83			
				Jumlah Rapat Koordinasi tentang Permasalahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kali	25		3		-		-		-		-		-		-		-		3		12,00			
				Jumlah Forum Koordinasi Sinergitas Program Pembangunan	Kali	10		14		-		-		-		-		-		-		-		14		140,00			
				Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Kebijakan	1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		100,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	21	8.684.635.766	5	611.611.215	4	536.651.516	0,75	46.061.557	1,25	84.043.360	1,00	74.809.630	1	30.244.500	4	235.159.047	100,00	43,82	9	846.770.262	42,86	9,75		
	4.01.03.2.02.02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah buku pedoman kerja dan pelaksanaan tugas	Buku	891	1.164.088.704	811	474.073.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811	474.073.331	91,02	40,72		
				Jumlah rapat penyelesaian permasalahan OPD	Kali	11		8		-		-		-		-		-		-		-		8		72,73			
				Jumlah rapat permasalahan perangkat daerah	Kali	7		7		-		-		-		-		-		-		-		7		100,00			
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Kali	20		20		-		-		-		-		-		-		-		20		100,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	3.428.724.000	1	320.670.850	1	511.515.509	0,25	36.234.400	0,25	62.981.000	0,25	90.460.650	0,25	85.437.300	1,00	275.113.350	100,00	53,78	2,00	595.784.200	50,00	17,38		
	4.01.03.2.02.03		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah buku laporan realisasi kinerja SKPD se Kabupaten Gresik	Buku	168	1.045.460.077	168	512.074.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	512.074.886	100,00	48,98		
				Jumlah Pelaksanaan Review APBD	Kali	6		6		-		-		-		-		-		-		-		6		100,00			
				Pemeliharaan/ pengembangan Aplikasi E-Controlling	Aplikasi	1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		100,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	48	3.420.001.116	12	92.947.270	12	201.562.346	3	38.591.901	3	12.136.260	3	37.598.768	3	24.635.904	12	112.962.833	100,00	56,04	24	205.910.103	50,00	6,02		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	49,87	100,00	3.359.584.174	100,00	16,48		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.736.348.944		1.249.729.371		120.887.858		159.160.620		202.869.048		140.317.704		623.235.230		49,87		3.359.584.174		16,48		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100,00	49,87	100,00	3.359.584.174	100,00	16,48		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Perekonomian dan SDA																												
	4		SEKRETARIAT								-										-								
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH						-		-		-								-					-	-		
	4	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai evaluasi kinerja TPID	Nilai	68,75	12.624.074.337,00	65,62	337.126.141,00	67	1.000.000.000,00	-	31.348.918,00	-	40.084.744,00		251.762.894,00		162.860.430,00	-	486.056.986,00	144,1766		-	1,00	0	0,00	Bagian Perekonomian dan SDA	
	4		KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah Kebijakan BUMD yang difasilitasi	BUMD	4	8.770.503.409,00	3	282.755.641,00	1	475.000.000,00		24.494.145,00		40.084.744,00		62.236.382,00		51.545.528,00	-	178.360.799,00	63,08		5	461.116.440,00	0	5,26	Sub Bagian BUMD	
				Jumlah laporan TPID	Laporan	1	0,00		-		-	-								-		0		1			0,00	Sub Bagian Perekonomian	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVELUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	Jumlah unit pelayanan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Unit Pelayanan	16	2.341.170.171,00	16	183.226.005,00	16	250.000.000,00	-	10.616.125,00		20.354.558,00		53.521.442,00		25.845.512,00	-	110.337.637,00	60		17	293.563.642,00	106	12,54	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	
				Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja BUMD	Kali	12	0,00	2	-	2	-	2	-	-						2	-	0		6	-	300	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	Kali	8	0,00	12	-	8	-	2	-	3						5	-	0,00		6	-	75	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi PPPK BLUD	Laporan	17	0,00	7	-	17	-	-	-	-						-	-	0		1	-	14	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator BUMD	
	4		SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	Jumlah Pelaksanaan High Level Meeting TPID	Kali	6	2.100.636.149,00	6	34.780.051,00	6	150.000.000,00	1	13.878.020,00		19.173.186,00		4.514.251,00		20.224.561,00	2	57.790.018,00	38,53		2	92.570.069,00	33	4,41	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah peserta Capacity Building TPID	Kali	50	0,00	0	-	-	-	-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Pelaksanaan Sidak Sembako dan Bahan Penting Lainnya	Kali	2	0,00	0	-	1	-	-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Pemantauan Barang Kena Cukai Ilegal	Kali	18	0,00	0	-	-	-	-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
	4		SUB KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	Jumlah Event Kontes Bandeng Tradisional	Kali	1	4.328.697.089,00	-	64.749.585,00	1	75.000.000,00	-	-		557.000,00		4.200.689,00		5.475.455,00	1	10.233.144,00	16			74.982.729,00	0	1,73	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro	Kali	50	0,00	0	-	50		-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
				Jumlah Peserta Sharing Informasi tentang Kebijakan Perekonomian	Orang	50	0,00	0	-	-		-	-	-						-	-	0		-	-	0	0,00	Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Perekonomian	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								12,67	307.410.960,00	176,29	7,98		
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	4		KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi kebijakan SDA	Laporan	1	3.853.570.928,00		54.370.500,00	1	525.000.000,00	-	6.854.773,00	-			189.526.512,00			1	307.696.187,00	566		1	362.066.687,00	9,40	9,40	Sub Bagian SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVELUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kali	1	2.749.414.758,00	0	15.620.000,00	-	425.000.000,00	-	6.854.773,00	-	96.272.456,00		185.397.216,00		588.851,00	1	289.113.296,00	19		1	304.733.296,00	11	11,08	Kasubag SDA	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Kebijakan dan Peraturan Di Bidang Cukai	Kali	1	0,00	0	-	1	-	-	-	1						1	-	0,00		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
				Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan	laporan	1	0,00	0	-	1	-	-	-	-						1	-	0		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVELUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kali	1	483.366.675,00	1	8.156.000,00	1	50.000.000,00	1	-	-	704.546,00		4.129.296,00		7.528.909,00	1	12.362.751,00	152		1	20.518.751,00	100	4,24	Kasubag SDA	
				Jumlah Laporan Monev Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan	1	0,00	1	-	1		-	-	-						1	-	0		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
	4		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVELUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Energi dan Air	Kali	4	620.789.495,00	1	30.594.500,00	1	50.000.000,00	-	-	-	2.367.570,00		-		3.852.570,00	-	6.220.140,00	20		1	36.814.640,00	100	5,93	Kasubag SDA	
				Jumlah Laporan Monev Kebijakan Energi dan Air	Laporan	1	0,00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1	-	100	0,00	Kasubag SDA	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELUSUH PROGRAM																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUKUH PROGRAM																										206,83	10,22		
Predikat Kinerja																										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program											-										-								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUKUH PROGRAM																						62,15	48,37			191,56	9,10		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																												
	4		*Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan*																										
	4		*Sekretariat Daerah*																										
			Bagian PBJ																										
	4	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang pembangunan, perekonomian dan sumberdaya alam dan pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	3	6.421.199.498,00	3	1.785.941.675,56	3	999.999.867,00	3	71.283.566,00	3,42	195.847.264,00	3,42	131.296.812,00	3,51	325.355.080,00	3,28	723.782.722,00	109,33	72,38	3,14	2.509.724.397,56	104,67	39,08	BPBJ	Nilai didapat dari perhitungan pada sistem survey kepuasan masyarakat E-SUKMA per semester 2
	4		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	Persen	100	6.421.199.498,00	59,70	1.785.941.675,56															59,70	1.785.941.675,56	59,70	39,08		Persentase dokumen tender masuk dari OPD ke BPBJ yang tendernya dilaksakanan dibanding dengan target renstra

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
				Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	3				3	999.999.867,00	3	71.283.566,00	3	195.847.264,00	3	131.296.812,00	3,00	325.355.080,00	3	723.782.722,00	100,00	72,38	3,00	723.782.722,00	100,00			Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan nilai yang didapat pada penilaian terbaru (2024) diterbitkan oleh LKPP
	4		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Paket	305	2.589.999.828,00	400	605.815.856,00															400,00	605.815.856,00	131,15	34,92		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	670				165	402.499.900,00	16	31.580.410,00	24	111.272.685,00	8	54.245.714,00	6	101.531.850,00	54	298.630.659,00	32,73	74,19	54,00	298.630.659,00	8,06			Jumlah dokumen tender berdasakan paket tender dari OPD yang masuk ke BPBJ
	4		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Secara Elektronik yang Tertib Administrasi	Paket	305	1.899.999.849,00	400	467.437.546,56															400,00	467.437.546,56	131,15	33,42		
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	670		0		165	305.095.967,00	16	16.029.665,00	24	26.123.288,00	8	48.016.724,00	6	77.278.568,00	54	167.448.245,00	32,73	54,88	54,00	167.448.245,00	8,06			
	4		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Orang	410	1.931.199.821,00	1807	712.688.273,00															1807,00	712.688.273,00	440,73	50,25		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	900		0		220	292.404.000,00	251	23.673.491,00	53	58.451.291,00	57	29.034.374,00	18	146.544.662,00	379	257.703.818,00	172,27	88,13	379,00	257.703.818,00	42,11			Jumlah peserta pembinaan merupakan masyarakat maupun OPD yang datang untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa berdasarkan daftar hadir
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		109,33	72,38	3,14	2.509.724.397,56	104,67	39,08		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							6.421.199.498,00		1.785.941.675,56		999.999.867,00		71.283.566,00		195.847.264,00						723.782.722,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						109,33	72,38	3,14	2.509.724.397,56	104,67	39,08		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																						Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	Bagian Umum																												
	4		*Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan*				602.154.631.708		184.800.001.832																				
	4.01		*Sekretariat Daerah*																										
	4.01.01	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akasi) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	*BAGIAN UMUM* *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*								60.174.845.593		10.993.406.981		13.333.492.399		13.070.329.366		16.807.839.991		54.205.068.737,08		90,08		239.892.753.890		0		
				Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	602.154.631.708	100	239.892.753.890	100		100		-		-		0		100		100		50		50,00			
				Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	Persen	100		102		100		40		51		47		45		100	-	100		49		49,40			
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	Persen	100		92		100		14		16		41		43		100	-	100		48		48,18			
				Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	Persen	100		50		100		6		7		29		68		100	-	100		75		74,66			
1.	4.01.01.2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	Laporan	6	154.459.109.440	2	58.009.451.600	1	19.855.262.235	1	4.311.085.000	-	6.078.972.843	-	4.384.108.285	0	4.319.388.582	1	19.093.554.709	100,00	96,16	3	77.103.006.309	50,00	49,92		
	4.01.01.2.02.0001		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diterimakan	Bulan	24	46.895.776.689	24	38.088.301.754															24	38.088.301.754	100,00	81,22	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	561	101.719.044.533	132	19.119.407.377	129	19.728.258.000	126	4.296.478.100	132	6.063.161.392,61	129	4.357.590.035	127	4.274.633.632	129	18.991.863.159,24	100,00	96,27	261	38.111.270.536	46,52	37,47		
	4.01.01.2.02.0003		*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD*	Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset	Kali	48	1.442.740.666	33	352.568.082															33	352.568.082	68,75	24,44	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	576	2.471.326.539	141	66.821.300	153	127.004.235	5	14.606.900	56	15.811.450	33	26.518.250	59	44.754.950	153	101.691.550	100,00	80,07	294	168.512.850	51,04	6,82		
	4.01.01.2.02.0005		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah laporan keuangan dan aset	Buku	354	611.950.866	580	344.570.987															580	344.570.987	163,84	56,31	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan dan aset	Kali	60		40																40		66,67			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	30	1.318.270.147	10	37.782.100	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	10	37.782.100	33,33	2,87		
II.	4.01.01.2.03		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	696.150.000	-	107.310.250	100	83.739.015	-	10.979.600	-	13.788.400	40	12.028.100	60	28.135.100	100	64.931.200	100,00	77,54	100	172.241.450	100,00	24,74		
	4.01.01.2.03.0006		*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	696.150.000	15	107.310.250	15	83.739.015	-	10.979.600	-	13.788.400	6	12.028.100	9	28.135.100	15	64.931.200	100,00	77,54	30	172.241.450	50,00	24,74	Subbagian Keuangan dan Aset	
III.	4.01.01.2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1) Persentase pakaian dinas yang disediakan.	Persen	100	8.174.805.915	100	1.667.486.700	100	461.594.690	14	50.000.000	43	71.105.200	43	201.345.000	29	72.225.000	100	394.675.200	100,00	85,50	50	2.062.161.900	49,93	25,23		
				2) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	35		-		-		-	-	-		-		0		-		-		-		-			
	4.01.01.2.05.0002		*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah pakaian dinas untuk pimpinan	Setel	60	4.839.539	120	1.181.126.650															120	1.181.126.650	200,00	24.405,77	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis pakaian dinas untuk pimpinan	Jenis	10		10																10		100,00			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	32	6.643.691.376	8	462.578.050	7	461.594.690	1	50.000.000	3	71.105.200	3	201.345.000	2	72.225.000	7	394.675.200	100,00	85,50	15	857.253.250	46,88	12,90		
	4.01.01.2.05.0009		*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	546	1.526.275.000	148	23.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	148	23.782.000	27,11	1,56	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
IV.	4.01.01.2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1) Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang difasilitasi	Persen	100	60.166.564.039	109	24.482.354.201	100	8.467.873.601	21	862.586.707	37	1.637.661.340	19	2.363.902.617	25	2.402.079.578	100	7.266.230.242	100,00	85,81	48	31.748.584.442	48	52,77		
				2) Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang difasilitasi						100		19		29		31		22		102								
	4.01.01.2.06.0001		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi komponen instalasi listrik / penerangannya	Gedung	5	1.194.192.388	5	1.192.257.023															5	1.192.257.023	100,00	99,84	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis komponen instalasi listrik yang dilakukan penaadaan	Jenis	6		6																6		100,00			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	19	2.527.181.231	4	480.313.066	7	387.520.325	-	-	3	168.862.114	3	160.090.159	1	55.922.183	7	384.874.456	100,00	99,32	11	865.187.522	57,89	34,24		
	4.01.01.2.06.0002		*Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	Gedung	1	2.500.304.330	1	2.314.960.064															1	2.314.960.064	100,00	92,59	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	10		10																10		100,00			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	23	5.770.397.144	5	542.162.714	8	634.393.383	-	-	2	130.315.566	5	305.683.990	3	183.783.911	8	619.783.466,74	100,00	97,70	13	1.161.946.180	56,52	20,14		
	4.01.01.2.06.03		*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah peralatan rumah tangga yang dilakukan penaadaan	Jenis	7	1.990.410.662	6	1.858.181.594															6	1.858.181.594	85,71	93,36	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi penyediaan peralatan rumah tangganya	Gedung	2		2																2		100,00			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	4.211.968.718	4	377.197.704	4	315.700.793	-	-	-	3.426.200	3	174.030.713	4	134.157.210	4	311.614.123	100,00	98,71	8	688.811.827	50,00	16,35		
	4.01.01.2.06.0004		*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah mamin rapat	Kali	120	2.991.668.251	138	3.984.821.641															138	3.984.821.641	115,00	133,20	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah mamin harian	Kali	500		500																500		100,00			
				Jumlah mamin keriatan	Kali	50		70																70		140,00			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.000	6.339.012.920	220	2.095.201.708	240	1.990.156.000	53	241.171.308	94	616.427.879	36	514.369.504	57	541.732.778	240	1.913.701.469	100,00	96,16	460	4.008.903.177	46,00	63,24		
	4.01.01.2.06.0005		*Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan*	Jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis	10	984.897.464	8	797.749.490															8	797.749.490	80,00	81,00	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	2.084.924.516	5	148.474.580	10	725.538.000	6	235.293.000	2	59.454.500	-	31.056.000	2	219.514.800	10	545.318.300	100,00	75,16	15	693.792.880	42,86	33,28		
	4.01.01.2.06.0007		*Penyediaan Bahan/Material*	Jenis bahan / material yang dilakukan pengadaan	Jenis	10	3.020.721.040	4	2.163.400.372															4	2.163.400.372	40,00	71,62	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	16	6.402.192.452	4	867.221.985	4	1.030.079.000	1	96.921.870	2	155.722.173	1	216.282.700	2	262.673.910	4	731.600.653	100,00	71,02	8	1.598.822.638	50,00	24,97		
	4.01.01.2.06.0008		*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kali	25	724.217.127	39	1.100.473.627															39	1.100.473.627	156,00	151,95	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	1.537.368.582	25	801.291.325	25	668.004.000	4	81.294.029	6	149.221.510	9	220.873.903	6	181.856.955	25	633.246.397	100,00	94,80	50	1.434.537.722	50,00	93,31		
	4.01.01.2.06.0009		*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD*	Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi	Kali	440	6.577.083.961	320	3.686.199.555																320	3.686.199.555	72,73	56,05	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pejabat	Kali	375		319																319		85,07			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.720	11.093.011.465	400	2.072.447.753	420	2.716.482.100	81	207.906.500	123	354.231.398	132	741.515.648	94	822.437.831	430	2.126.091.377	102,38	78,27	830	4.198.539.130	48,26	37,85		
	4.01.01.2.06.0011		*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD*	Jumlah aplikasi	Aplikasi	2	217.011.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
V.	4.01.01.2.07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	46.071.169.506	83	23.553.904.498	100	1.646.732.584	3	720.590.000	6	39.402.100	57	660.985.277	36	212.276.420	100	1.633.253.797	100,00	99,18	47	25.187.158.295	46,96	54,67		
	4.01.01.2.07.0001		*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	2.885.481.347	1	79.849.000															1	79.849.000	25,00	2,77	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	3.689.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.01.01.2.07.0002		*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan*	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	360	891.288.808	358	12.706.720.000																358	12.706.720.000	99,44	1.425,66	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	35	4.563.117.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17= 16/7x100		18	19
	4.01.01.2.07.0005		*Pengadaan Mebel*	Jenis mebel	Jenis	7	2.639.836.703	6	2.398.036.850															6	2.398.036.850	85,71	90,84	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	540	3.709.306.233	228	278.381.250	38	176.717.092	-	-	-	-	28	124.320.000	10	48.334.500	38	172.654.500	100,00	97,70	266	451.035.750	49,26	12,16		
	4.01.01.2.07.0006		*Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya*	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jenis	15	3.582.577.536	10	4.166.011.554															10	4.166.011.554	66,67	116,29	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	337	7.422.467.737	103	842.232.700	76	1.194.925.492	2	699.500.000	7	39.402.100	36	308.282.500	31	140.635.250	76	1.187.819.850	100,00	99,41	179	2.030.052.550	53,12	27,35		
	4.01.01.2.07.0010		*Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	5	2.277.738.065	5	30.023.280															5	30.023.280	100,00	1,32	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	7.497.253.643	1	960.231.600	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	960.231.600	16,67	12,81		
	4.01.01.2.07.0011		*Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	9	2.786.449.022	8	1.532.430.944															8	1.532.430.944	88,89	55,00	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	4.125.781.412	4	559.987.320	1	275.090.000	1	21.090.000	-	-	1	228.382.777	0	23.306.670	1	272.779.447	100,00	99,16	5	832.766.767	55,56	20,18		
VI.	4.01.01.2.08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1) Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,	Persen	100	269.396.748.746	100	100.598.162.630	100	15.089.228.925	25	2.401.776.959	25	3.756.793.051	25	2.790.386.249	25	4.736.382.170	100	13.685.338.429	100,00	90,70	49	114.283.501.059		42,42		
				2) Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi						100		24		25		25		25		99									
	4.01.01.2.08.0001		*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah Pengiriman Surat	Kali	60	65.879.621	39	23.258.569															39	23.258.569	65,00	35,30	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah Pengiriman Paket	Kali	200		394																394		197,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	139.416.164	12	7.311.750	12	14.389.775	-	-	-	-	-	-	1	476.500	1	476.500	8,33	3,31	13	7.788.250	27,08	5,59		
	4.01.01.2.08.0002		*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Bulan	24	72.878.547.973	24	73.543.813.375															24	73.543.813.375	100,00	100,91	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis jasa operasional kantor	Jenis	9		8																8		88,89			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	204	155.345.996.132	60	4.590.302.018	48	5.936.300.600	12	1.107.515.369	12	1.167.720.021	12	1.176.232.220	12	1.317.887.193	48	4.769.354.803	100,00	80,34	108	9.359.656.821	52,94	6,03		
	4.01.01.2.08.0003		*Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	Kali	36	2.291.180.032	36	3.113.262.580															36	3.113.262.580	100,00	135,88	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	6		6																6		100,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.896.756.205	12	4.071.675.210	12	3.327.414.550	3	351.877.100	3	1.158.427.930	3	182.237.279	3	1.529.871.627	12	3.222.413.936	100,00	96,84	24	7.294.089.146	50,00	123,70		
	4.01.01.2.08.0004		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah tenaga sopir	Orang	5	10.518.717.946	5	10.039.766.000															5	10.039.766.000	100,00	95,45	Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	
				Jumlah tenaga administrasi kantor	Orang	153		150																150		98,04			
				Jumlah tenaga keamanan	Orang	4		4																4		100,00			
				Jumlah tenaga kebersihan	Orang	30		30																30		100,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9.216	22.260.254.673	2.289	5.208.773.128	2.349	5.811.124.000	576	942.384.490	581	1.430.645.100	591	1.431.916.750	580	1.888.146.850	2.328	5.693.093.190	99,11	97,97	4.617	10.901.866.318	50,10	48,97		
VII.	4.01.01.2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	Persen	100	43.157.933.970	100	22.518.869.206	100	8.461.450.792	12	1.601.179.865	15	632.431.211	19	1.554.591.094	77	3.973.643.979	100	7.761.846.148	100,00	91,73	49	30.280.715.355	49,32	70,16		
	4.01.01.2.09.0001		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	1.120.531.067	10	1.428.927.639															10	1.428.927.639	100,00	127,52	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	45	2.379.762.325	9	1.142.060.176	12	1.253.180.000	12	163.128.486	12	243.706.142	12	241.115.880	12	352.854.916	12	1.000.805.424	100,00	79,86	21	2.142.865.600	46,67	90,05		
	4.01.01.2.09.0002		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan*	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	2.025.662.707	37	2.348.263.274															37	2.348.263.274	100,00	115,93	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	442	4.633.165.590	210	2.241.992.281	69	2.161.500.000	69	246.378.837	69	320.268.669	69	305.141.631	69	977.361.261	69	1.849.150.398	100,00	85,55	279	4.091.142.679	63,12	88,30		
	4.01.01.2.09.0005		*Pemeliharaan Mebel*	Jumlah mebel yang dilakukan pemeliharaan	Unit	240	258.741.472	240	411.164.284															240	411.164.284	100,00	158,91	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis mebel yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	3		3																3		100,00			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2.747	547.555.933	500	118.955.200	610	99.000.000	-	-	-	-	-	-	610	96.969.600	610	96.969.600	100,00	97,95	1.110	215.924.800	40,41	39,43		
	4.01.01.2.09.0006		*Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya*	Jenis peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	20	6.453.027	12	1.734.248.586															12	1.734.248.586	60,00	26.874,96	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	2.865	5.728.164.724	775	669.648.860	395	434.926.000	50	73.926.000	80	43.272.750	120	72.456.750	145	220.383.000	395	410.038.500	100,00	94,28	1.170	1.079.687.360	40,84	18,85		
	4.01.01.2.09.0009		*Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya*	Jumlah gedung/bangunan yang dilakukan pemeliharaan	Gedung	10	4.195.797.475	10	5.519.340.461															10	5.519.340.461	100,00	131,54	Subbagian Rumah Tangga	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	22	12.687.528.051	5	2.469.521.129	7	3.240.499.881	4	734.446.281	-	8.160.000	3	870.044.833	7	1.541.689.048	7	3.154.340.162	100,00	97,34	12	5.623.861.291	54,55	44,33		
	4.01.01.2.09.0010		*Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarananya	Gedung	5	795.644.204	5	773.115.570															5	773.115.570	100,00	97,17	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	10		10																10		100,00			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	22	1.895.385.923	5	585.510.000	7	405.000.000	1	12.526.350	1	14.380.050	3	58.569.600	3	300.918.080	7	386.394.080	100,00	95,41	12	971.904.080	54,55	51,28		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	4.01.01.2.09.0011		*Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya*	Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukungnya	Gedung	5	2.208.256.196	5	2.474.673.474															5	2.474.673.474	100,00	112,06	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis sarana dan prasarana pendukung yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	21		8																8		38,10			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	24	4.675.285.276	5	601.448.273	9	867.344.911	2	370.773.911	-	2.643.600	-	7.262.400	7	483.468.073	9	864.147.984	100,00	99,63	14	1.465.596.257	58,33	31,35		
VIII.	4.01.01.2.11		*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	1)Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan , 2) Persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Persen	100	13.333.677.717	100	5.941.390.103	100	5.261.690.000	100	922.048.850	100	924.821.204	100	878.562.767	100	841.542.886	100	3.566.975.707	100,00	67,79	50	9.508.365.810	50,00	71,31		
	4.01.01.2.11.0001		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Bulan	24	1.220.332.572	24	333.183.179															24	333.183.179	100,00	27,30	Subbagian Keuangan dan Aset	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	666.608.000	2	165.913.424	2	2.871.690.000	2	324.598.850	2	327.371.204	2	281.112.767	2	502.992.886	2	1.436.075.707	100,00	50,01	4	1.601.989.131	200,00	240,32		
	4.01.01.2.11.0004		*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	Jumlah penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	Bulan	24	3.161.677.942	24	3.065.318.500															24	3.065.318.500	100,00	96,95		
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	8.285.059.203	2	2.376.975.000	2	2.390.000.000	2	597.450.000	2	597.450.000	2	597.450.000	2	338.550.000	2	2.130.900.000	100,00	89,16	4	4.507.875.000	200,00	54,41	Subbagian Keuangan dan Aset	
IX.	4.01.01.2.12		*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan	Persen	100	6.698.472.375	100	3.013.824.702	100	847.273.751	25	113.160.000	25	178.517.050	25	224.419.978	50	222.166.277	100	738.263.305	100,00	87,13	49	3.752.088.007	49	56		
	4.01.01.2.12.0001		*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Bulan	12	1.154.385.990	24	1.069.073.418															24	1.069.073.418	200,00	92,61		
				Jenis kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Jenis	4		4																4		100,00			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	2.442.941.856	3	558.355.250	3	479.000.000	1	66.747.000	1	104.166.100	1	151.497.478	1	70.053.000	3	392.463.578	100,00	81,93	6	950.818.828	50,00	38,92	Subbagian Rumah Tangga	
	4.01.01.2.12.0002		*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	915.547.599	24	831.787.158															24	831.787.158	200,00	90,85	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Jenis	4		4																4		100,00			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.937.505.611	3	371.579.806	3	340.000.000	1	46.413.000	1	73.270.950	1	71.457.000	1	127.893.815	3	319.034.765	100,00	93,83	6	690.614.571	50,00	35,64		
	4.01.01.2.12.0003		*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	Bulan	12	79.612.570	24	113.123.298															24	113.123.298	200,00	142,09	Subbagian Rumah Tangga	
				Jenis kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	Jenis	2		2																2		100,00			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	8	168.478.749	2	69.905.772	2	28.273.751	-	-	-	1.080.000	-	1.465.500	2	24.219.462	2	26.764.962	100,00	94,66	4	96.670.734	50,00	57,38		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											-		-		-		-		-		-								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						100	86,84			55,48	49,69		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan																												
	04.01		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
			Sekretariat Daerah																										
	4.01.0.00.0.00.01.0013	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akasi) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan , dan umum yang responsif.	*Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol*																										
	04:01:01		*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi.	Persen	100	21.482.327.684	99,2	4.252.516.137	4205	4.402.844.000	361	322.164.360	302	433.033.696	1377	690.146.670		1.982.546.690	2040	3.427.891.416	48,51	77,86	1070	7.680.407.553	1069,6	35,752	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
1.	4.01.01.2.14		*Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	Persentase realisasi Kegiatan Protokoler.	Persen	100	2.284.682.215	33,3333333	679.876.158	1920	448.803.000	198	90.228.100	173	153.584.896	532	168.876.880	733	334.474.479	1636	747.164.355	85,21	########	1669	1.427.040.513	1669,3333	62,461	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan.	Persen	100	13.271.903.600	365	2.972.639.979	365	3.634.153.000	28	167.136.260	28	165.619.900	174	376.956.490	123	1.080.932.911	353	1.790.645.561	96,71	########	718	4.763.285.540	32,785388	35,890	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan.	Persen	100	5.925.741.869	1920	600.000.000	1920	319.888.000	135	64.800.000	101	113.828.900	671	144.313.300	941	567.139.300	1.848	890.081.500	96,25	278,2479	3768	1.490.081.500	32,708333	25,146	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
1.	4.01.01.2.14.01		*Fasilitasi Keprotokolan.*	Jumlah Kegiatan Keprotokolan.	Laporan	11520	2.284.682.215	1920	679.876.158	1920	448.803.000	198	90.228.100	173	153.584.896	532	168.876.880	733	334.474.479	1.636	747.164.355	85,21	166,4794	3556	1.427.040.513	30,868056	62,461	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
2.	4.01.01.2.14.02		*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.*	Jumlah Berita yang di Publikasikan.	Berita	2190	13.271.903.600	365	2.972.639.979	365	3.634.153.000	28	167.136.260	28	165.619.900	174	376.956.490	123	1.080.932.911	353	1.790.645.561	96,71	49,27271	718	4.763.285.540	32,785388	35,890	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
3.	4.01.01.2.14.03		*Pendokumentasian Tugas Pimpinan.*	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan.	Eksemplar	11520	5.925.741.869	1920	600.000.000	1920	319.888.000	135	64.800.000	101	113.828.900	671	144.313.300	941	567.139.300	1848	890.081.500	96,25	278,2479	3768	1.490.081.500	32,708333	25,146	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			2021-2022	Jumlah Media cetak yang disediakan	Media	22	1.634.676.560	22	1.526.604.900,00															22	1.526.604.900	100	93,39		
				Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan	Dokumen	3840		1784																1784		46,458333			
			2023-2026	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Laporan	7680	(600-1.230) ditambah			1920	319.888.000	10	31.574.000							1920	31.574.000	100	10	1920	31.574.000	100	10		
																				(KEGIATAN) Rata - rata capaian kinerja (%)		99,7	164,7			578,77568	62,46		
																				Predikat Kinerja									
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)																						49	78			35,75	35,75		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)																													
	Bagian Organisasi																												
	4.1.1.	Terwujudnya pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi		2,8	8.348.386.613	3,22	1.621.252.004	1,9	400.000.000		27.279.350		23.235.250		27.916.921	3,22	151.602.116	3,22	230.033.637	169%	57,51%	6,44	2.254.968.724	230,0%	27,0%	Bagian Organisasi	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
		administrasi pengelolaan Keuangan, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kehumasan	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal "A"		96%		89,13%		83%	300.000.000		40.949.750		24.477.800	87%	21.632.950		140.680.244	87%	227.740.744	105%	75,91%	176%		183,4%		633.716.720	
				Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah		91		84,29		88	300.000.000	86,77	24.073.350	87,43	34.721.445	87,97	37.044.144	88,22	80.103.400	88,22	175.942.339	100%	58,65%	86,26		94,8%		63,37%	####
	4.1.1.2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"		80	8.348.386.613	86	1.621.252.004	73	300.000.000	60	24.073.350	78	34.721.445	65	37.044.144	88	80.103.400	88	175.942.339	121%	58,65%	174	2.254.968.724	217,5%	27,0%	Bagian Organisasi	#####
				Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		84%		71,14%		78%	300.000.000	11,51%	40.949.750	36,69%	24.477.800	71,94%	21.632.950	78,10%	140.680.244	78,10%	227.740.744	100%	75,91%	1		177,7%			
				Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah		30		5		5	400.000.000	3	27.279.350		23.235.250	1	27.916.921	1	151.602.116	5	230.033.637	100%	57,51%	10		33,3%			
	4.1.1.2.13.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisa beban kerjanya		47	2.689.549.395	47	567.573.624,00															0	567.573.624	0,0%	21,1%		Sampai 2022
				Jumlah Pembahasan Permasalahan / Isu Strategis		22		17																17		77,3%			
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi jabatannya		17		47																47		276,5%			
				Jumlah Jabatan ASN yang telah disusun SKJ		477		37																37		7,8%			
				Jumlah tusi perangkat daerah yang dievaluasi		48		46																46		95,8%			
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		188		47	113.039.709,00	46	400.000.000,00	46	27.279.350	46	23.235.250	46	27.916.921	46	151.602.116	46	230.033.637	100%	58%	93		49,5%			
	4.1.1.2.13.2		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM		80	3.046.791.530	73	565.058.097,00															73	565.058.097	91,3%	18,5%		Sampai 2022
				Jumlah Inovasi yang mengikuti kompetisi		30		57																57		190,0%			
				Jumlah UPP yang difasilitasi penyusunan / reviu SPP/SOP/Proses Bisnis		48		47																47		97,9%			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		20		5	56.757.800,00	5	300.000.000,00	2	24.073.350	1	34.721.445	2	37.044.144	1	80.103.400	6	175.942.339	120%	58,65%	11		55,0%			
	4.1.1.2.13.3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penyusunan dokumen SAKIP & Reformasi Birokrasi		48	2.578.903.473	47	464.698.860,00															47	464.698.860	97,9%	18,0%		Sampai 2022
				Jumlah UPP yang difasilitasi dalam pengusulan Zona Integritas		32		32																32		100,0%			
				Jumlah Dokumen Sakip dan RB sekretariat Daerah		10		11																11		110,0%			
				Jumlah Dokumen Sakip dan RB Pemerintah Kabupaten Gresik		5		9																9		180,0%			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		40		10	161.068.935,00	10	300.000.000,00	6	40.949.750	3	24.477.800	1	21.632.950	1	140.680.244	11	227.740.744	110%	75,91%	21		52,5%			
	4.1.1.2.13.4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Unit Pelayanan yang dievaluasi kualitas pelayanan publik		80	12.961.025	44	8.676.823,00											-	-			44	8.676.823	55,0%	66,9%	Subkoordinasi Tata Laksana dan Pelayanan Publik	Sampai 2021
				Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi tata laksana		48		48												-				48		100,0%			
	4.1.1.2.13.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik		1	20.181.190	1	15.244.600,00											-	-			1	15.244.600	100,0%	75,5%	Subkoordinasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sampai 2021
				Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik		1		1												-				1		100,0%			
				Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan kinerja Instansi Perangkat Daerah		48		48												-				48		100,0%			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	108,45%	64,02%						
																					Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																									
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	108,45%	64,02%			108,45%	64,02%		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
	KECAMATAN GRESI K																												
			Unsur Kewilayahan				30.314.822.000		19.940.767.133		27.606.310.730		3.549.258.288		5.880.539.006		5.590.070.801		9.399.587.499		24.419.455.594				44.360.222.726,53				
			Kecamatan Gresik				30.314.822.000		19.940.767.133		27.606.310.730		3.549.258.288		5.880.539.006		5.590.070.801		9.399.587.499		24.419.455.594		88,46		44.360.222.727		146,33		
	7.01.01	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	14.924.256.939		13.069.178.474	100	16.141.075.755	100	2.905.786.268	100	4.462.055.796	100	3.333.871.721	100	3.434.539.932	-	14.136.253.716	-	87,58	-	27.205.432.190	-	182,29	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.01	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	21.400.000	4 Dokumen	15.265.100	100	23.110.527	100	-	100	3.903.800	100	-	100	16.160.900	-	20.064.700	-	86,82	-	35.329.800	-	165,09		
	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.400.000	17 Buku	3.500.000	2 Dokumen	3.955.646	2 Dokumen	-	2 Dokumen	3.903.800	Dokumen	-	2 Dokumen	-		3.903.800		98,69		7.403.800		137,11	Kecamatan Gresik	
	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	6.000.000	10 Buku	4.180.100	2 Dokumen	8.995.733	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	6.510.900		6.510.900		72,38		10.691.000		178,18	Kecamatan Gresik	
	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	6.000.000	10 Buku	4.100.000	2 Dokumen	7.124.200	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	7.120.000		7.120.000		99,94		11.220.000		187,00	Kecamatan Gresik	
	0006		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	4.000.000	8 Dokumen	3.485.000	2 Dokumen	3.034.948	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	2.530.000		2.530.000		83,36		6.015.000		150,38	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.02	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	13.757.750.000	2 Dokumen	11.592.588.154	100	14.061.083.244	100	2.685.770.786	100	4.048.451.017	100	2.780.097.676	100	2.701.384.820	-	12.215.704.298	-	86,88	-	23.808.292.452	-	173,05	Kecamatan Gresik	
	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		130 Orang	13.750.750.000	130 Orang	11.592.588.154	130 Orang	14.054.547.354	130 Orang	2.685.770.786	130 Orang	4.048.451.017	130 Orang	2.780.097.676	130 Orang	2.696.819.820		12.211.139.298		86,88		23.803.727.452		173,11	Kecamatan Gresik	
	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	7.000.000	13 Buku	-	2 Laporan	6.535.890	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	-	2 Laporan	4.565.000		4.565.000		69,85		4.565.000		65,21	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.05	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	45.935.500	4 Jenis	-	100	81.207.575	100	-	100	782.000	100	66.505.000	100	-	-	67.287.000	-	82,86	-	67.287.000	-	146,48	Kecamatan Gresik	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		21 Desa / Kelurahan	6.000.000	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	6.900.000	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	782.000	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-		782.000		11,33		782.000		13,03	Kecamatan Gresik	
	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		21 Desa / Kelurahan	39.935.500	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	74.307.575	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	66.505.000	21 Desa / Kelurahan	-		66.505.000		89,50		66.505.000		166,53		
	7.01.01.2.06	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	446.071.439	5 Rekening	171.328.700	100	407.445.295	100	-	100	46.096.596	100	134.276.050	100	150.787.550	-	331.160.196	-	81,28	-	502.488.896	-	112,65	Kecamatan Gresik	
	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	100.000.000	4 Jenis	59.503.000	2 Paket	104.810.462	2 Paket	-	2 Paket	3.988.846	2 Paket	29.320.600	2 Paket	63.994.000		97.303.446		92,84		156.806.446		156,81	Kecamatan Gresik	
	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	225.000.000	3 Jenis	94.232.000	3 Paket	182.736.640	3 Paket		3 Paket	28.299.000	3 Paket	56.497.000	3 Paket	65.987.000		150.783.000		82,51		245.015.000		108,90		
	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	12.106.439	8 Jenis	9.667.700	2 Paket	9.788.868	2 Paket		2 Paket	4.988.000	2 Paket	1.012.000	2 Paket	2.886.550		8.886.550		90,78		18.554.250		153,26		
	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	5.900.000	2 Jenis	3.570.000	2 Dokumen	5.346.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	1.320.000	2 Dokumen	1.760.000		3.080.000		57,61		6.650.000		112,71	Kecamatan Gresik	
	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	65.000.000	2 Jenis	4.356.000	2 Laporan	48.901.000	2 Laporan		2 Laporan	8.820.750	2 Laporan	6.676.450	2 Laporan	410.000		15.907.200		32,53		20.263.200		31,17	Kecamatan Gresik	
	0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD		2 Dokumen	38.065.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	55.862.325	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	39.450.000	2 Dokumen	15.750.000										
	7.01.01.2.08	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	407.100.000	3 Jenis	1.194.170.910	100	1.364.230.100	100	211.415.482	100	333.424.633	100	327.918.995	100	439.283.647	-	1.312.042.757	-	96,17	-	2.506.213.667	-	615,63	Kecamatan Gresik	
	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Laporan	303.600.000	12 Bulan	1.114.344.019	12 Laporan	1.244.658.000	12 Laporan	197.874.870	12 Laporan	308.866.230	12 Laporan	308.170.530	12 Laporan	416.474.040		1.231.385.670		98,93		2.345.729.689		772,64	Kecamatan Gresik	
	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	103.500.000	12 Bulan	79.826.891	12 Laporan	119.572.100	12 Laporan	13.540.612	12 Laporan	24.558.403	12 Laporan	19.748.465	12 Laporan	22.809.607		80.657.087		67,45		160.483.978		155,06	Kecamatan Gresik	
	7.01.01.2.09	Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	246.000.000	3 Jenis	95.825.610	100	203.999.014	100	8.600.000	100	29.397.750	100	25.074.000	100	126.923.015	-	189.994.765	-	93,14	-	285.820.375	-	116,19	Kecamatan Gresik	
	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	120.000.000	4 Unit	74.081.000	4 Unit	96.015.014	4 Unit	8.600.000	4 Unit	21.697.750	4 Unit	18.424.000	4 Unit	40.483.750		89.205.500		92,91		163.286.500		136,07	Kecamatan Gresik	
	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Jenis	26.000.000	3 Jenis	13.197.610	3 Jenis	43.110.000	3 Jenis		3 Jenis	7.700.000	3 Jenis	6.650.000	3 Jenis	23.599.945		37.949.945		88,03		51.147.555		196,72	Kecamatan Gresik	
	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	100.000.000	1 Unit	8.547.000	1 Unit	64.874.000	1 Unit		1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	62.839.320		62.839.320		96,86		71.386.320		71,39	Kecamatan Gresik	
	7.01.02	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	3.735.196.385	100	900.601.867	100	2.633.152.182	100	43.634.458	100	239.818.482	100	619.196.170	100	1.234.954.697	-	2.137.603.807	-	81,18	-	3.038.205.674	-	81,34		
	7.01.02.2.02	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan			84	3.735.196.385	83	900.601.867	84	2.633.152.182	84	43.634.458	84	239.818.482	84	619.196.170	84	1.234.954.697	-	2.137.603.807	-	81,18	-	3.038.205.674	-	81,34	Kecamatan Gresik	
	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		16 Laporan	3.723.996.385	83	894.876.867	16 Laporan	2.614.970.327	16 Laporan	43.634.458	16 Laporan	239.818.482	16 Laporan	601.014.370	16 Laporan	1.234.954.697		2.119.422.007		81,05		3.014.298.874		80,94	Kecamatan Gresik	
	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21 Laporan	11.200.000	100	5.725.000	21 Laporan	18.181.855	21 Laporan		21 Laporan	18.181.800	21 Laporan	-	21 Laporan	18.181.800		18.181.800		100,00		23.906.800		213,45	Kecamatan Gresik	
	7.01.03	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	11.218.138.676	100	5.786.026.792	100	8.434.497.632	100	599.837.562	100	1.058.016.989	100	1.595.949.539	100	4.505.117.420	-	7.758.921.510	-	91,99	-	13.544.948.302	-	120,74	Kecamatan Gresik	
	7.01.03.2.01	Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitasi	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	98.300.000	21 Desa / Kelurahan	72.156.500	100	99.999.897	100	-	100	46.772.829	100	15.937.650	100	33.356.200	-	96.066.679	-	96,07	-	168.223.179	-	171,13	Kecamatan Gresik	
	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		21 Laporan	37.500.000	21 Desa / Kelurahan	29.886.500	21 Laporan	31.874.644	21 Laporan		21 Laporan	29.074.644	21 Laporan	-	21 Laporan	-		29.074.644		91,22		58.961.144		157,23	Kecamatan Gresik	
	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21 Laporan	60.800.000	21 Desa / Kelurahan	42.270.000	21 Laporan	68.125.253	21 Laporan		21 Laporan	17.698.185	21 Laporan	15.937.650	21 Laporan	33.356.200		66.992.035		98,34		109.262.035		179,71	Kecamatan Gresik	
	7.01.03.2.02	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16 Kelurahan	11.119.838.676	16 Kelurahan	5.713.870.292	16 Kelurahan	8.334.497.735	16 Kelurahan	599.837.562	16 Kelurahan	1.011.244.160	16 Kelurahan	1.580.011.889	16 Kelurahan	4.471.761.220	-	7.662.854.831	-	91,94	-	13.376.725.123	-	120,30	Kecamatan Gresik	
	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		16 Kelurahan	8.902.430.088	6 Jenis	1.653.947.292	16 Kelurahan	2.897.313.305	16 Kelurahan	599.837.562	16 Kelurahan	47.000.000	16 Kelurahan	303.345.389	16 Kelurahan	1.690.631.662		2.640.814.613		91,15		4.294.761.905		48,24	Kecamatan Gresik	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		16 Kelurahan	2.217.408.588	10 Kegiatan	4.059.923.000	16 Kelurahan	5.437.184.430	16 Kelurahan		16 Kelurahan	964.244.160	16 Kelurahan	1.276.666.500	16 Kelurahan	2.781.129.558		5.022.040.218		92,36		9.081.963.218		409,58	Kecamatan Gresik	
	7.01.04	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	94.100.000	100	68.360.000	100	99.942.538	100	-	100	24.750.000	100	10.800.000	100	64.232.023	-	99.782.023	-	99,84	-	168.142.023	-	178,68	Kecamatan Gresik	
	7.01.04.2.01	Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			24 Kali	82.900.000	24 Kali	63.180.000	24 Kali	92.952.065	24 Kali	-	24 Kali	24.750.000	24 Kali	10.800.000	24 Kali	57.241.750	-	92.791.750	-	99,83	-	155.971.750	-	188,14	Kecamatan Gresik	
	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	73.900.000	21 Desa / Kelurahan	63.180.000	12 Laporan	87.460.315	12 Laporan		12 Laporan	24.750.000	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	51.750.000		87.300.000		99,82				-		
	0002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	9.000.000		-		5.491.750				-		5.491.750									-		
	7.01.04.2.02	Jumlah Koordinasi Penegakan Perda	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			21 Desa / Kelurahan	11.200.000	21 Desa / Kelurahan	5.180.000	21 Desa / Kelurahan	6.990.473	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	-	21 Desa / Kelurahan	6.990.273		6.990.273		100,00		12.170.273		108,66	Kecamatan Gresik	
	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Laporan	11.200.000	21 Desa / Kelurahan	5.180.000	12 Laporan	6.990.473	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	6.990.273		6.990.273		100,00				-		
	7.01.06	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	343.130.000	100	116.600.000	100	297.642.623	100	-	100	95.897.739	100	30.253.371	100	160.743.428	-	286.894.538	-	96,39	-	403.494.538	-	117,59	Kecamatan Gresik	
	7.01.06.2.01	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	343.130.000	100	116.600.000	100	297.642.623	100	-	100	95.897.739	100	30.253.371	100	160.743.428	-	286.894.538	-	96,39	-	403.494.538	-	117,59	Kecamatan Gresik	
	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		5 Dokumen	11.200.000	5 Desa	6.890.000	5 Dokumen	12.735.411	5 Dokumen		5 Dokumen	6.288.439	5 Dokumen	-	5 Dokumen	6.166.900		12.455.339		97,80		19.345.339		172,73	Kecamatan Gresik	
	05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		5 Dokumen	16.700.000	21 Desa / Kelurahan	-	5 Dokumen	4.972.228	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	-	5 Dokumen	4.972.228		4.972.228		100,00		4.972.228		29,77	Kecamatan Gresik	
	07		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		5 Dokumen	11.200.000	5 Desa	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	-	5 Dokumen	-		-		#DIV/0!				-	Kecamatan Gresik	
	12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		12 Dokumen	281.630.000	21 Desa / Kelurahan	104.270.000	12 Dokumen	261.000.013	12 Dokumen		12 Dokumen	84.169.300	12 Dokumen	17.808.400	12 Dokumen	148.554.300		250.532.000				354.802.000		125,98		
	16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12 Dokumen	11.200.000	21 Desa / Kelurahan	5.440.000	12 Dokumen	13.150.000	12 Dokumen		12 Dokumen	5.440.000	12 Dokumen	7.710.000	12 Dokumen	-		13.150.000		100,00		18.590.000		165,98	Kecamatan Gresik	
	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		2 Laporan	11.200.000	5 Desa	-	2 Laporan	5.784.971	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	4.734.971	2 Laporan	1.050.000										
							30.314.822.000		19.940.767.133		27.606.310.730		3.549.258.288		5.880.539.006		5.590.070.801		9.399.587.499		24.419.455.594		88,46	0%	0,00				
Rata - rata capaian kinerja (%)																								0,00	1760768432,57				
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											27.606.310.730,00										24.419.455.594								
Total Rata - rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program																						98,46	88,46	0,00	1760768432,57	98,46	88,46		
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi		
	KECAMATAN KEBOMAS																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan berbasis Good and Clean Governance	KECAMATAN KEBOMAS			100	115.582.549.502	100	16.248.359.827,86	100	19.335.637.033	10	1.930.188.862	20	3.817.068.414	26	5.063.094.239	44	6.394.851.476,77	100,00	17.205.202.992,17	100,00	88,98	200,00	33.453.562.820,03	200,00	28,94		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100	57.590.352.002	100	9.168.871.795,06	100	10.270.502.310	18	1.801.255.528	27	2.818.814.122	21	2.114.797.559	34	2.099.825.805	100	8.834.693.013,57	99,57	86,02	200	18.003.564.808,63	199,57	31,26		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Dokumen	20	149.593.711	5	23.069.000,00	5	36.588.583	-	-	1	8.714.000	2	9.348.000	2	18.257.000	5	36.319.000	100,00	99,26	10	59.388.000,00	50,00	39,70		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Renstra SKPD (Lama)	Dokumen	2	19.421.922																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Baru)	Dokumen	5	27.522.029	1	8.600.000,00	1	9.356.904	-	-	-	-	1	9.348.000,00		0,00	1	9.348.000,00	100,00	99,90	2	17.948.000,00	40,00	65,21		
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Lama)	Dokumen	5	5.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Baru)	Dokumen	25	26.550.000	5	3.542.000,00	5	9.318.300	-	-	-	-			5	9.092.000,00	5	9.092.000,00	100,00	97,57	10	12.634.000,00	40,00	47,59		
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (lama)	Dokumen	5	5.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Baru)	Dokumen	25	26.550.000	5	3.542.000,00	5	9.172.875		-		-			5	9.165.000,00	5	9.165.000,00	100,00	99,91	10	12.707.000,00	40,00	47,86		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lama)	Buku	15	12.999.760																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Baru)	Laporan	20	26.550.000	4	7.385.000,00	4	8.740.504	-	-	4	8.714.000,00	4				8	8.714.000,00	200,00	99,70	12	16.099.000,00	60,00	60,64		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Dokumen	10	52.163.087.649	2	8.090.799.013,06	2	8.942.878.073	-	1.701.134.848		2.548.732.592		1.755.934.493	2	1.702.094.068	2	7.707.896.001	100,00	86,19	4	15.798.695.013,63	40,00	30,29		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Kehomas (Lama)	Bulan	12	14.206.502.538																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Baru)	Orang	62	37.894.860.886	62	8.082.919.013,06	62	8.933.244.000	62	1.701.134.848	62	2.539.109.091,53	62	1.755.934.492,89	62	1.702.094.067,77	248	7.698.272.500,57	400,00	86,18	310	15.781.191.513,63	500,00	41,64		
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Lama)	Dokumen	1	16.799.822																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Baru)	Laporan	5	44.924.403	1	7.880.000,00	1	9.634.073	-	-	1	9.623.500,00		0,00			1	9.623.500,00	100,00	99,89	2	17.503.500,00	40,00	38,96		
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan	Kali	10	112.794.878	2	22.110.000,00	2	3.160.000	-	-	2	3.160.000	-	-		-	2	3.160.000	100,00	100,00	4	25.270.000,00	40,00	22,40		
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek (Lama)	Orang	100	15.809.001																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Baru)	Orang	80	46.250.257	80	18.010.000,00	80	-	-	-		-					-	0,00	0,00	#DIV/0!	80	18.010.000,00	100,00	38,94		
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek (Lama)	Orang	30	14.999.920																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Baru)	Orang	25	35.735.700	25	4.100.000,00	25	3.160.000		-	25	3.160.000,00	-	0,00			25	3.160.000,00	100,00	100,00	50	7.260.000,00	200,00	20,32		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap tukoesi perangkat Daerah	%	100	1.099.576.830	100	258.914.400,00	100	258.939.754	-	-	37	96.288.000	23	60.171.000	40	97.912.500	100	254.371.500	100,42	98,24	200	513.285.900,00	200,42	46,68		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lama)	Jenis	44	102.206.282																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Baru)	Paket	100	271.465.217	20	157.130.750,00	20	111.696.772	-	-	5	58.255.000,00	5	21.577.000,00	10	30.429.000,00	20	110.261.000,00	100,00	98,71	40	267.391.750,00	40,00	98,50		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman (Lama)	Jenis	3	67.198.383																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Baru)	Paket	15	179.695.196	3	42.885.000,00	3	55.429.750	-	-	3	21.765.000,00	3	9.820.000,00	3	21.220.000,00	9	52.805.000,00	300,00	95,26	12	95.690.000,00	80,00	53,25		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi (Lama)	Jenis	1	42.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Baru)	Paket	5	112.312.200	1	6.700.000,00	1	10.137.732	-	-	1	2.820.000,00	1	5.178.500,00	1	2.019.500,00	3	10.018.000,00	300,00	98,82	4	16.718.000,00	80,00	14,89		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan (Lama)	Jenid	3	8.400.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Baru)	Dokumen	15	22.462.440	3	3.180.000,00	3	2.929.500	-	-	3	990.000,00	3	820.000,00	3	1.105.000,00	9	2.915.000,00	300,00	99,51	12	6.095.000,00	80,00	27,13		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (Lama)	Jenis	2	80.535.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Baru)	Laporan	5	213.302.111	1	49.018.650,00	1	78.746.000	-	-	1	12.458.000,00	1	22.775.500,00	1	43.139.000,00	3	78.372.500,00	300,00	99,53	4	127.391.150,00	80,00	59,72		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	3.507.503.383	100	526.006.282,00	100	613.853.500	15	92.370.680	23	141.439.530	24	145.299.635	38	208.259.987	100	587.369.832	99,76	95,69	200	1.113.376.114,00	199,76	31,74		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Pembayaran jasa administrasi kantor (Lama)	Bulan	12	823.052.139																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Baru)	Laporan	60	2.185.501.053	12	412.616.160,00	12	457.992.000	3	76.309.860	3	114.464.790,00	3	114.464.790,00	3	152.619.720,00	12	457.859.160,00	100,00	99,97	24	870.475.320,00	40,00	39,83		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Lama)	Jenis	3	105.067.635																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Baru)	Laporan	5	290.500.000	12	62.720.122,00	12	99.454.000	3	16.060.820	3	16.174.740,00	3	18.834.845,00	3	31.240.267,00	12	82.310.672,00	100,00	82,76	24	145.030.794,00	480,00	49,92		
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenekanan Kantor	Jumlah Pembayaran rekening listrik, air dan telepon (Lama)	Bulan	12	29.923.688																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Baru)	Laporan	60	73.458.868	3	50.670.000,00	3	56.407.500	-	-	3	10.800.000,00	3	12.000.000,00	3	24.400.000,00	9	47.200.000,00	300,00	83,68	12	97.870.000,00	20,00	133,23		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara	Jenis	25	557.795.551	100	247.973.100,00	100	415.082.400	2	7.750.000	5	20.480.000	35	144.044.431	58	73.302.250	100	245.576.681	99,50	59,16	200	493.549.781,00	798,01	88,48		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Fasilitasi Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Lama)	Unit	2	54.971.511																	0	-	0,00	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Baru)	Unit	2	120.339.734	2	88.105.000,00	2	116.650.000	2	7.750.000	2	17.373.000,00	2	23.554.381,00	2	65.061.250,00	8	113.738.631,00	400,00	97,50	10	201.843.631,00	500,00	167,73		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara (Lama)	Jenis	3	42.924.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Baru)	Unit	4	139.463.676	4	40.310.000,00	4	20.510.000	-	-	4	3.107.000,00	4	8.319.000,00	4	8.241.000,00	12	19.667.000,00	300,00	95,89	16	59.977.000,00	400,00	43,01		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Lama)	Unit	1	54.461.400																	0	-	0,00	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laimnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Baru)	Unit	1	145.635.230	1	119.558.100,00	1	277.922.400	-	-		-	1	112.171.050,00		0,00	1	112.171.050,00	100,00	40,36	2	231.729.150,00	200,00	159,12		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	%	100	101.143.300	100	8.722.000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8.722.000,00	100,00	8,62		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang menerapkan SPM	Kelurahan	10	101.143.300	100	8.722.000,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	8.722.000,00	1000,00	8,62		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Kecamatan yang memiliki SPM (Lama)	Jenis	60	25.501.800																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	5	75.641.500	1	8.722.000,00	1	-	-	-		-					-	0,00	0,00	0,00	1	8.722.000,00	20,00	11,53		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	49,79	43,01						
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Desa	100	627.644.789	100,424637	91.272.000,00	100	108.759.654	-	-	44	47.740.000	29	31.335.500		14.632.500	73	93.708.000	72,71	86,16	173	184.980.000,00	173,13	29,47		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	%	100	627.644.789	21	91.272.000,00	21	108.759.654	-	-	21	47.740.000	21	31.335.500	21	14.632.500	63	93.708.000	300,00	86,16	84	184.980.000,00	84,00	29,47		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan (Lama)	Desa	21	81.759.496																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Baru)	Lembaga	21	235.210.092	21	40.070.000,00	21	30.341.504	-	-	21	27.921.000,00					21	27.921.000,00	100,00	92,02	42	67.991.000,00	200,00			
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta UKM dan Bumdes yang difasilitasi (Lama)	Orang	120	57.744.996																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	5	252.930.205	1	51.202.000,00	1	78.418.150	-	-	1	19.819.000,00	1	31.335.500,00	1	14.632.500,00	3	65.787.000,00	300,00	83,89	4	116.989.000,00	80,00			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	72,71	86,16						
																					Predikat Kinerja	Sedang	Tinggi						
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	431.431.000	99,6034247	56.469.500,00	100	78.419.916	-	-	31	24.655.713	23	18.325.900	-	15.550.900	55	58.532.513	54,81	74,64	154	115.002.013,00		26,66		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	Kali	60	361.358.054	12	47.069.500,00	12	61.575.002	-	-	32	20.006.113	25	15.445.900	42	15.550.900	100	51.002.913	829,79	82,83	112	98.072.413,00	185,96	27,14		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan (Lama)	Bulan	12	100.274.200																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	60	261.083.854	12	47.069.500,00	12	61.575.002	-	-	6	20.006.113,00	3	15.445.900,00	3	15.550.900,00	12	51.002.913,00	100,00	82,83	24	98.072.413,00	40,00			
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penegakan Perda dan Perkada	Bulan	12	70.072.946	12	9.400.000,00	12	16.844.914	-	-	6	4.649.600	6	2.880.000		-	12	7.529.600	100,00	44,70	24	16.929.600,00	200,00	24,16		
	7.01.02.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan Monitoring (Lama)	Bulan	12	17.382.800																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baru)	Laporan	60	52.690.146	12	9.400.000,00	12	16.844.914	-	-	6	4.649.600,00	2	2.880.000,00	4	0,00	12	7.529.600,00	100,00	44,70	24	16.929.600,00	40,00			
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	54,81	74,64						
																					Predikat Kinerja	Rendah	Sedang						
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100	1.921.653.707	99,9948504	126.310.900,00	100	325.876.919	-	-	23	74.103.950	21	69.096.800	38	102.452.892	82	245.653.642	81,94	75,38	182	371.964.542,00	181,94	19,36		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	1.921.653.707	21	126.310.900	100	325.876.919	-	-	30	74.103.950	25	69.096.800	45	102.452.892	100	245.653.642	100,00	75,38	121	417.203.409,38	121,00	21,71		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Lama)	Desa	11	20.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Baru)	Dokumen	55	56.100.000	11	1.036.000,00	11	9.089.952	-	-		-					-	0,00	0,00	0,00	11	1.036.000,00	20,00			
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Peserta yang difasilitasi (Lama)	Orang	44	20.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Baru)	Dokumen	55	56.100.000	11	24.666.000,00	11	60.264.206	-	-	11	7.112.000,00	11	3.500.000,00	11	14.382.000,00	33	24.994.000,00	300,00	41,47	44	49.660.000,00	80,00			
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Lama)	Desa	11	20.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Baru)	Dokumen	55	51.051.000	11	3.463.900,00	11	9.127.052	-	-	11	9.122.000,00				0,00	11	9.122.000,00	100,00	99,94	22	12.585.900,00	40,00			

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Organisasi Wanita Desa/Kelurahan yang dibina Jumlah Pelaksanaan Monev BPNT dan Santunan Kematian Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi UKS Kecamatan Jumlah Peserta Kegiatan MTQ Jumlah Peserta Pembinaan dan Seleksi Kafilah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi di Kecamatan	Dokumen	20	355.956.548																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Baru)	Dokumen	20	1.129.395.659	1	81.793.000,00	1	214.224.857	-	-	1	48.973.950,00	1	57.884.800,00	1	78.764.892,00	3	185.623.642,00	300,00	86,65	4	267.416.642,00	20,00			
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Monev Musrenbang (Lama)	Dokumen	5	35.369.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Baru)	Dokumen	5	106.630.500	1	8.670.000,00	1	22.541.260	-	-	1	8.896.000,00	1	4.228.000,00	1	9.306.000,00	3	22.430.000,00	300,00	99,51	4	31.100.000,00	80,00			
	7.01.06.2.01.17		Koordinas Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kelurahan dan Desa yang ikut Pendampingan (Lama)	Desa	21	20.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Baru)	Laporan	55	51.051.000	11	6.682.000,00	11	10.629.592	-	-		-	11	3.484.000,00		0,00	11	3.484.000,00	100,00	32,78	22	10.166.000,00	40,00			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		81,94	75,38						
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	13.659.284.700	100	1.372.378.147,00	100	2.254.936.198,00	6	128.933.334,00	12	281.027.641,00	32	723.186.640,00	36	908.670.446,00	86	2.041.818.061	86,25	90,55	186	3.414.196.208,00	186,25	25,00		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kelurahan	10	13.659.284.700	99,8834413	1.372.378.147,00	90	2.254.936.198	6	128.933.334	12	281.027.641	32	723.186.640	40	908.670.446	90	2.041.818.061	100,28	90,55	190	3.414.196.208,00	1901,35	25,00		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Kelurahan yang memiliki SPM (Lama)	Jenis	16	3.727.153.200																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Baru)	Laporan	50	9.932.131.500	1	1.372.378.147,00	1	2.254.936.198	1	128.933.334,00	1	281.027.641,00	1	723.186.640,00	1	908.670.446,00	4	2.041.818.061,00	400,00	90,55	5	3.414.196.208,00	10,00			
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	41.251.040.004	100	5.424.335.485,80	100	6.297.142.036	6	-	9	570.726.988	33	2.106.351.841	51	3.253.718.934	100	5.930.797.763	99,51	94,18	200	11.355.133.248,40	199,51	27,53		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan	10	41.251.040.004	10	5.424.335.485,80	10	6.297.142.036	-	-	2	570.726.988	4	2.106.351.841	4	3.253.718.934	10	5.930.797.763	100,00	94,18	20	11.355.133.248,40	200,00	27,53		
	7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Gending (Lama)	Jenis	7	9.759.652.318																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Baru)	Unit	20	25.236.819.044	4	4.048.611.795,80	4	4.648.407.125	-	-	2	181.627.440,00	4	1.684.766.558,60	4	2.539.050.527,00	10	4.405.444.525,60	250,00	94,77	14	8.454.056.321,40	70,00			
	7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gending (Lama)	Kegiatan	8	1.494.568.642																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Baru)	Pokmas/Ormas	4	4.760.000.000	4	1.375.723.690,00	4	1.648.734.911	-	-	4	389.099.548,00	4	421.585.282,00	4	714.668.407,00	12	1.525.353.237,00	300,00	92,52	16	2.901.076.927,00	400,00			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		92,88	92,37						
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																												
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)						82,47	84,49		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)						Tinggi	Tinggi		
	KECAMATAN MANYAR																												
			KECAMATAN MANYAR						3.352.084.720				683.815.232		1.082.625.959		910.517.609		1.073.598.159		3.750.556.959,02								
	7,01,01	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	21.814.287.135	100	3.148.561.720	100	3.466.289.099	19,73	683.815.232	29,00	1.005.166.848	23,40	810.941.362	27,88	874.756.751	100,00	3.374.680.193,02	100,00	100,00	200,00	6.441.708.413	200,00	29,53	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,01		Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan anggaran dan monev evaluasi renja		100	70.000.000	100	1.051.300	100%	3.177.648	0,00	-	-	-	-	495.000		2.675.700	-	3.170.700		-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,01		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	Prosentase	100	10.000.000	0%	-		-				-	-			-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	25.000.000	500%	1.051.300	5	3.177.648					1,00	495.000	4,00	2.675.700	5,00	3.170.700	100,00	99,78	10,00	4.222.000,00	200,00	16,89		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselesainya koordinasi dan penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase	100	10.000.000	0%	-		-				-		-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	25.000.000		-													-			-	-	-		
	7,01,01,2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuanaan akhir		100	17.795.976.673	100	2.606.958.612	100%	2.807.923.655	21,53	604.500.362	31,42	882.283.890	22,13	621.262.721	24,93	623.657.834	100,00	2.731.704.807,02	100,00	100,00	200,00	5.338.663.419	200,00	30,00	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,02,01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Prosentase	100	4.653.642.538,00	0%	0							-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	13.061.024.000	2000%	2.606.958.612	20	2.807.923.655	20	604.500.362	20	882.283.890	20,00	621.262.721	20,00	623.657.834,24	20	2.731.704.807,02	20	20	40,00	5.338.663.419,02	200,00	40,87		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselesainya laporan keuangan yang disusun	Prosentase	100	100.000,00	#DIV/0!	0				-		-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,02,05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	28.000.000		-												-			-	-	-		
	7,01,01,2,06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terlaksananya penyediaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah		100	428.010.135	51,8018535	60.748.800	100%	108.733.796	0,00	-	8,53	9.271.325	35,17	38.246.575	56,30	58.648.800	100,00	106.166.700			151,80	166.915.500	151,80	39,00	Kasubag umum dan kepegawaian	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7,01,01,2,06,02		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase	100	33.210.135,00	#DIV/0!	0							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	140.000.000	600%	18.110.800	6	45.304.938			2	7.028.177	2,00	9.338.123	2,00	27.386.700	6,00	43.753.000	100,00	96,57	12,00	61.863.800,00	200,00	44,19		
	7,01,01,2,06,04		Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase tersedianya bahan logistik	Prosentase	100	20.000.000,00	#DIV/0!	0							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,04		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	68.000.000	200%	33.728.000	2	33.790.738			1	2.243.148	1,00	18.047.452	1,00	13.452.100	2,00	33.742.700	100,00	99,86	4,00	67.470.700,00	200,00	99,22		
	7,01,01,2,06,05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Prosentase	100	10.000.000,00	#DIV/0!	0				-		-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	20.500.000		-		-						-				-			-	-	-	-		
	7,01,01,2,06,06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Prosentase	100	6.000.000,00	#DIV/0!	0							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang Disediakan	Dokumen	12	15.300.000	1200%	1.080.000	-	-										-			12,00	1.080.000,00	100,00	7,06		
	7,01,01,2,06,09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Prosentase	100	20.000.000,00	#DIV/0!	0				-			#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	100,00	-		
	7,01,01,2,06,09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	95.000.000	1200%	7.830.000	12	29.638.120					6,00	10.861.000	6,00	17.810.000	12,00	28.671.000	-	96,74	24,00	36.501.000,00	200,00	38,42		
	7,01,01,2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah		100	2.401.174.560	98,8904067	397.646.008	100%	431.872.500,00	17,90	77.314.870,00	23,84	102.976.633,00	31,82	137.427.066,00	25,14	108.583.917,00	98,71	426.302.486	98,71	98,71	197,60	823.948.494	197,60	34,31	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,08,02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Fasilitasi pembayaran listrik , air dan listrik	Prosentase	100	107.174.560,00	#DIV/0!	-			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,08,02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	230.000.000	1200%	52.747.168	12	59.391.000	3,00	14.997.110	3,00	12.488.153	3,00	13.563.746	3,00	15.570.597	6,00	56.619.606	6	3	18,00	109.366.774,00	150,00	47,55		
	7,01,01,2,08,04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaranan jasa pelayanan dan administrasi kantor	Prosentase	100	684.000.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,08,04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.380.000.000	1200%	344.898.840	12	372.481.500	3,00	62.317.760	3,00	90.488.480	3,00	123.863.320	3,00	93.013.320	6,00	369.682.880	6	3	18,00	714.581.720,00	150,00	51,78		
	7,01,01,2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terlaksananya pemeliharaan barang-barang milik daerah		100	1.119.125.767	99,8262454	82.157.000,00	100%	114.581.500,00	1,75	2.000.000,00	9,28	10.635.000,00	11,79	13.510.000,00	77,18	81.190.500,00	100,00	107.335.500	100,00	100,00	199,83	112.181.000	199,83	10,02	Kasubag umum dan kepegawaian	
	7,01,01,2,09,01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Prosentase	100	47.496.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,09,01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	52	115.000.000	5200%	29.507.000	52	49.310.000	2	2.000.000	2	9.415.000	2,00	6.475.000	46,00	25.369.000	2,00	43.259.000	2,00	2,00	54,00	72.766.000,00	103,85	63,27		
	7,01,01,2,09,06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Prosentase	100	36.700.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,09,06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	48.500.000	2400%	14.010.000	24	26.600.000			6	1.220.000	6,00	7.035.000	12,00	17.150.000	24,00	25.405.000	6,00	95,51	48,00	39.415.000,00	200,00	81,27		
	7,01,01,2,09,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor ndan Bangunan Lainnya	Persentase fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Prosentase	100	346.429.767,00	#DIV/0!	-			#DIV/0!	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	7,01,01,2,09,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	2	525.000.000	200%	38.640.000	2	38.671.500							2,00	38.671.500	2,00	38.671.500	100,00	100,00	4,00	77.311.500,00	200,00	14,73		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		28,41	32,68			125,85	29,53		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7,01,02	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100	Rp 591.000.000	100	Rp 10.765.000	0	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	-	Rp -	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	10.765.000	#DIV/0!	1,82		
	7,01,02,2,02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100	591.000.000,00	100	10.765.000,00	0	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -	-	Rp -	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	10.765.000	#DIV/0!	1,82		
	7,01,02,2,02,03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Prosentase	100	66.000.000,00	#DIV/0!	-				-			#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Pemerintahan	
	7,01,02,2,02,03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan	23	525.000.000	100%	10.765.000	-	-										-			1,00	10.765.000,00	4,35	2,05		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			52,17	30,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
	7,01,03	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan yang dibina		100	Rp 587.085.000	93,1338913	Rp 113.128.000	100	Rp 212.390.262	0,00	Rp -	26,44	Rp 56.147.111	24,65	Rp 52.359.247	48,91	Rp 87.906.389	100,00	196.412.747	92,48	92,48	193,13	309.540.747	193,13	52,73		
	7,01,03,2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan		100	176.804.000,00	100	37.457.000,00	100%	77.703.021,00	0,00	-	28,83	22.398.879,00	14,04	10.910.000,00	57,13	28.774.142,00	100,00	62.083.021	79,90	79,90	200,00	99.540.021	200,00	56,30		
	7,01,03,2,01,01		Peningkatan Partisipasin Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan musrenbang kecamatan	Prosentase	100	56.804.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi pembangunan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7,01,03,2,01,01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum muayawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	120.000.000	1000%	37.457.000	10	77.703.021			3	22.398.879	2,00	10.910.000	5,00	28.774.142	10,00	62.083.021	10,00	79,90	20,00	99.540.021,00	200,00	82,95		
	7,01,03,2,03		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga keamsyarakatan tingkat kecamatan		100	410.281.000,00	67,2383018	75.671.000,00	100%	134.687.241,00	0,00	-	25,06	33.748.232,00	30,77	41.449.247,00	44,17	59.132.247,00	100,00	134.329.726	99,73	99,73	167,24	210.000.726	167,24	51,18		
	7,01,03,2,03,01		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat	Prosentase	100	89.142.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Kesra	
	7,01,03,2,03,01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	7	131.500.000	700%	30.275.000	7	83.487.701			3	31.798.232	2,00	23.919.247	2,00	27.414.082	7,00	83.131.561	100,00	99,57	14,00	113.406.561,00	200,00	86,24		
	7,01,03,2,03,04		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan yang difasilitasi	Prosentase	100	20.000.000,00	#DIV/0!	-				-			#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Ekonomi	
	7,01,03,2,03,04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	169.639.000	900%	45.396.000	12	51.199.540			4	1.950.000	4,00	17.530.000	4,00	31.718.165	12,00	51.198.165	100,00	100,00	21,00	96.594.165,00	175,00	56,94		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		48,70	57,39			155,28	41,70		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7,01,04	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi		100	320.363.000,00	90,6809873	66.850.000,00	100	Rp 110.756.833	0,00	Rp -	31,04	19.040.000,00	38,53	42.673.000,00	30,43	48.081.944,00	100,00	109.794.944	99,13	99,13	190,68	176.644.944	190,68	55,14		
	7,01,04,2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI, Polri		100	320.363.000,00	90,6809873	66.850.000,00	100%	Rp 110.756.833	0,00	Rp -	31,04	19.040.000	38,53	42.673.000	30,43	48.081.944	100,00	109.794.944	99,13	99,13	190,68	176.644.944	190,68	55,14		
	7,01,04,2,01,03		*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan*	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Prosentase	100	86.437.000,00	#DIV/0!	-							#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Trantib	
	7,01,04,2,01,03		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	233.926.000	1200%	66.850.000	12	110.756.833			6	19.040.000		42.673.000	6,00	48.081.944	-	109.794.944	-	99,13	12,00	176.644.944,00	100,00	75,51		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	49,57			100,00	37,76		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7,01,06	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	343.100.000,00	100	12.780.000,00	100	69.807.075,00	0,00	-	3,25	2.272.000,00	6,51	4.544.000,00	90,24	62.853.075,00	100,00	69.669.075	99,80	99,80	200,00	95.167.253	200,00	27,74		
	7,01,06,2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang di tetapkan tetap waktu		100	343.100.000,00	0	12.780.000,00	100%	69.807.075,00	0,00	-	3,25	2.272.000,00	6,51	4.544.000,00	90,24	62.853.075,00	100,00	69.669.075	99,80	99,80	100,00	95.167.253	100,00	27,74		
	7,01,06,2,01,01		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase	100	20.000.000,00																	100,00	20.000.000,00	100,00	100,00		
	7,01,06,2,01,01		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Dokumen	23	62.791.000		-												-			-		-		
	7,01,06,2,01,03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase	100	19.701.000,00	0%	-				-			#DIV/0!	-		-	0,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Pemerintahan	
	7,01,06,2,01,03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	23	137.608.000	2300%	12.780.000	23	62.525.253			2	2.272.000	4,00	4.544.000	17,00	55.571.253	-	62.387.253	-	99,78	23,00	75.167.253,00	100,00	54,62		
	7,01,06,2,01,06		Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Prosentase	100	10.000.000,00																	-		-	-		
	7,01,06,2,01,06		Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Dokumen																			-		-	-		
	7,01,06,2,01,12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarkatan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarkatana		100	10.000.000,00																	-		-	-		
	7,01,06,2,01,12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarkatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen																			-		-	-		
	7,01,06,2,01,16		Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase	100	15.000.000,00	0%	-				-			#DIV/0!	-	-	-	0,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Kasi Pembangunan	
	7,01,06,2,01,16		Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen	23	68.000.000		-	23	7.281.822						-	23,00	7.281.822		7.281.822			-		-	-		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	33,26			40,00	15,46		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
									Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program	#######	3.859.243.269		683.815.232		1.082.625.959		910.517.609		1.073.598.159		3.750.556.959,02				7.033.826.357			
																				Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s/d program selanjutnya)		92,36	97,18	#DIV/0!	7.033.826.357,02	94,66	30,89		
																				Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s/d program selanjutnya)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	KECAMATAN CERME																												
	7		UNSUR KEWILAYAHAN																										
	7.1		KECAMATAN CERME																										
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	26.473.392.962	100	15.004.573.472	100	3.107.000.414	19	585.317.942	27	899.515.933	27	696.565.426	27	763.302.773	100	2.944.702.074	100,00	94,78		17.949.275.545		67,80	Kec.cerme	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Anggaran dan Monev Evaluasi Renja			362.000.000		69.874.500		18.730.440		-				-		15.135.000	-	15.135.000	100,00	80,80	123	85.009.500		23,48	Sekretariat	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganaeraran OPD		120	92.000.000	20	7.175.000,00	0	-		-	-				20		20	-	0		20	7.175.000		7,80	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD		120	45.000.000,00	20	10.349.500,00	5	1.658.550		-					5	1.657.500,00	5	1.657.500	100	99,94	20	12.007.000		26,68	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan-SKPD		120	45.000.000,00	20	10.300.000,00	5	1.657.500							5	1.657.500,00	5	1.657.500	100	100,00	20	11.957.500		26,57	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD		120	45.000.000,00	20	12.630.000,00	5	6.315.750							5	5.990.000,00	5	5.990.000	100	94,84	20	18.620.000		41,38	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD Perubahan		120	45.000.000,00	20	12.350.000,00	5	6.234.750							5	5.830.000,00	5	5.830.000	100	93,51	20	18.180.000		40,40	Sekretariat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievahuasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
			Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun		120	45.000.000	20	12.120.000,00	3	2.863.890			3	2.710.000,00					3	2.710.000	100	94,63	40	14.830.000		32,96	Sekretariat	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi		18	45.000.000	3	4.950.000,00	0	-													3	4.950.000		11,00	Sekretariat	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.204.302.000		12.560.337.901		2.376.661.730		507.834.464		740.398.580		528.023.889		529.348.147		2.305.605.080		97,01		14.865.942.980		73,58	Sekretariat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		6	20.145.305.000	1	10.241.612.821	1	2.373.371.790	21%	507.834.464	31%	737.263.579,62	22%	528.023.889,12	26%	529.348.147,00	100%	2.302.470.080	100	97,01		12.544.082.901		62,27	Sekretariat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun		120	58.997.000	20	13.120.000	3	3.289.940			100	3.135.000,00		0,00			100	3.135.000	100	95,29	10	16.255.000		27,55	Sekretariat	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah			1.954.097.089		769.228.687,00		213.225.244		-		44.057.250		40.079.000		54.136.750	-	138.273.000,00		64,85		907.501.687		46,44	Sekretariat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik		42	72.000.000	7	23.954.000,00	7	7.855.036					7	7.760.000,00			7	7.760.000	100	98,79	7	31.714.000		44,05	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		234	751.999.673	39	337.045.400,00	30	35.661.622			12	12.043.500	8	5.916.000,00	10	16.632.000	30	34.591.500	100	97,00	39	371.636.900		49,42	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga		180	404.100.116	30	134.717.287,00	30	39.041.136			15	9.500.000,00	9	12.230.000,00	6	13.852.000,00	30	35.582.000	100	91,14	30	170.299.287		42,14	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik		7500	255.000.000	2375	135.315.000,00	621	29.234.280			220	10.950.000,00	240	11.075.000,00	161	7.100.000,00	621	29.125.000	100	99,63	2510	164.440.000		64,49	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		12	187.502.300	2	91.954.000,00	2	21.256.320			1	10.743.750,00			1	10.312.750,00	2	21.056.500	100	99,06	2	113.010.500		60,27	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah		6	26.000.000	2	10.488.000	12	4.374.000							6	2.400.000,00	6	2.400.000	50	54,87	2	12.888.000		49,57	Sekretariat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		6	257.495.000	2	35.755.000	1	22.652.000				820.000,00		3.098.000,00	1	3.840.000,00	1,00	7.758.000,00	100	34,25	2	43.513.000		16,90	Sekretariat	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Belanja Pendukung SPBE		4	115.000.000	0		2	53.150.850				-			1	5.286.900,00	1,00	5.286.900,00	50	9,95						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah			2.301.695.726		1.340.191.384		443.760.000		70.883.478		107.660.103		111.462.537		145.237.876		435.243.994		98,08		1.775.435.378		77,14	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon		6	285.200.626	2	154.012.424	12	53.037.000	3,00	6.883.478	3	11.660.103,00	3	11.012.537,00	3	15.306.836,00	12	44.862.954	100,00	84,59		198.875.378		69,73	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor		60	1.975.995.600	22	1.173.898.960	12	386.268.000	2	64.000.000	3	96.000.000,00	3	96.000.000,00	4	129.931.040	12	385.931.040	100,00	99,91		1.559.830.000		78,94	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan kantor yang di sewa		30	40.499.500	7	12.280.000	5	4.455.000		-				4.450.000,00			-	4.450.000,00	100	99,89	7	16.730.000		41,31	Sekretariat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang- barang milik daerah			1.651.298.147		264.941.000		54.623.000		6.600.000		7.400.000		17.000.000		19.445.000		50.445.000				315.386.000			Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		45627	490.800.000	4	131.465.000	1	36.600.000	1	6.600.000	-	7.400.000		8.400.000,00		14.195.000,00	1	36.595.000	100	99,99		168.060.000		34,24	Sekretariat	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor		36	157.500.147	16	58.085.000	6	7.355.000					2	2.000.000,00	4	5.250.000,00	6	7.250.000	100	98,57		65.335.000		41,48	Sekretariat	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		6	1.002.998.000	2	75.391.000	1	10.668.000		-			1	6.600.000,00			1	6.600.000,00	50	61,87		81.991.000		8,17	Sekretariat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	95,00	94,78						
																					Predikat Kinerja	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			377500000		63.260.000	2	11.829.478		0					2	11.829.478	2	11.829.478,00	100	100,00		75.089.478		19,89		
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik		60	182500000	2	28.935.000	2	11.829.478		0		0			2	11.829.478	2,00	11.829.478,00	100	100,00	2	40.764.478		22,34		
			Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan		10	182500000	2	28.935.000	2	11.829.478		0		0			2	11.829.478	2,00	11.829.478,00	100	100,00	2	40.764.478		22,34		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		60	195000000	2	34.325.000	2	0									0	0	0	#DIV/0!		34.325.000		17,60		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pembinaan pelaksanaan pelayanan perijinan non usaha yang dilimpahkan ke kecamatan		10	195000000	2	34325000	2	0		0	1	0					-	-	0	#DIV/0!		34.325.000		17,60	Pemerintahan	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu																									
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			1.257.367.300,00		426.960.000,00		127.597.072,00		-		72.620.000,00		18.000.000,00		32.850.000,00		123.470.000,00	100,00	96,77		217.382.000,00		105,26		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Pembinaan Lembaga ekonomi serta pelaku ekonmi ditingkat Kecamatan		18 kl	403.000.100,00	3 kl	186.332.000,00	3 kl	31.295.067,00		-		31.050.000		-				31.050.000,00			100	217.382.000,00		105,26		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan		600	215.200.100	200	123.702.000,00	100	31.295.067,00			100,00	31.050.000,00					100	31.050.000				154.752.000		71,91	asi Pembangunan	
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi		150	187.800.000	50	62.630.000,00	25	-		-							-	-				62.630.000		33,35	Kasi Ekonomi	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		500	854.367.200,00		240.628.000,00		96.302.005,00		-		41.570.000,00		18.000.000,00		32.850.000,00		92.420.000								
			Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan		60	689.568.000	24	198.996.500,00	12	85.409.627,00			4	41.570.000	4	18.000.000,00	4	22.000.000,00	8	81.570.000	100							
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Usahan Ekonomi Masyarakat		10	164.799.200	4	41.631.500,00	2	10.892.378,00		-					2	10.850.000,00	2	10.850.000	100							
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100	96,77						
																					Predikat Kinerja	ST	ST						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		600	485.000.000		283.199.000		57.384.756		-		13.350.000		13.350.000		27.600.000		54.300.000	100	94,62		337.499.000		69,59		
			Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI ,Polri		6	375.000.000	1	232.607.000	1	57.384.756	0%	-	3	13.350.000	3	13.350.000	6	27.600.000	12	54.300.000	12	94,62		286.907.000		76,51	Kasi Trantib	
			Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		6	375.000.000	1	232.607.000	12	57.384.756			3	13.350.000	3	13.350.000	6	27.600.000,00	12,0	54.300.000	100	94,62		286.907.000		76,51		
			Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dengan TNI dan Polri		6	110.000.000		50.592.000	1	-		-		-						-	0	#DIV/0!		50.592.000			Kasi Trantib	
			Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda		6	110.000.000	4	50.592.000,00											-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		50.592.000				
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		47,00	94,62						
																				Predikat Kinerja		SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		500	185000000		30.400.000	100	0									0%	-	0	0,00		30.400.000			Kasi Kesra	
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanaka		5	185000000		30.400.000	1	0									0%	-	0	0,00		30.400.000			Kasi Kesra	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan FKUB		5	185000000	1	30.400.000	1	0									0%	-	0	0,00		30.400.000			Kasi Kesra	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00						
																				Predikat Kinerja		SR	SR						
		Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			1.090.750.000		238.220.500		55.501.040		-		-		-		54.739.500	-	54.739.500	100	98,63		292.960.000				
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.090.750.000		238.220.500		55.501.040		-		-		-		54.739.500	-	54.739.500	100,00	98,63						
			Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun		250	167.500.000	50	53.915.000	50	21.751.556		-					50	21.027.500	50,0	21.027.500	100	96,67		74.942.500		44,74	Kasi pemrintahan	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa		150	203.000.000	25	41.550.000,00	2	11.879.878							2	10.859.500,00	2,0	10.859.500	100	91,41		52.409.500		25,82		
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintaha Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa		125	167.500.000	50	28.985.000,00	25	10.872.228							25	11.867.500,00	25,0	11.867.500	100	109,15		40.852.500		24,39		
			Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD		150	187.500.000	75	44.688.000		-		-								-	#DIV/0!	#DIV/0!		44.688.000		23,83	Kasi Pemerintahan/Kasi Kesra	
			Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan		150	182.500.000	75	39.847.500												-	#DIV/0!	#DIV/0!		39.847.500		21,83	Kasi Pemerintahan/Kasi Kesra	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan		150	182.750.000		29.235.000,00	25	10.997.378							25	10.985.000,00	25,0	10.985.000	100	99,89		40.220.000		22,01	Kasi Pembangunan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,63						
																				Predikat Kinerja		ST	ST						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							29.306.510.262		16.046.612.972		3.359.312.760																		
																				TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM [PROGRAM 1 s.d PROGRAM....]		95,0	94,26			95,0	94,26		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM [PROGRAM 1 s.d PROGRAM....]		ST	ST			ST	ST		
	KECAMATAN BENJENG																												
	7.01.00		URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01.05.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	KECAMATAN BENJENG			100	26.761.717.001	100	12.085.809.569,47	100	4.414.251.262	17,10	754.739.509,09	29,61	1.307.051.198	23,27	1.027.036.220	23,89	1.054.394.582	99,90	4.143.221.510,37	99,90	93,86	199,90	16.229.031.079,84	199,90	60,64		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	24.475.150.001	100	10.782.616.919,47	100	4.050.278.799	18,63	754.739.509,09	29,93	1.212.433.488	22,17	898.026.960	22,64	916.886.422	99,89	3.782.086.380	99,89	93,38	199,89	14.564.703.299,84	199,89	59,51		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persen	100	161.199.880	100	59.459.680,00	100	15.108.120	-	-	15,62	2.359.620	32,76	4.949.140	52	7.785.860	100	15.094.620	99,91	99,91	200	74.554.300,00	199,91	46,25		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan SKPD	Dokumen	8	26.199.940	8	26.399.940,00																8	26.399.940,00	100,00	100,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	54.400.000	4	3.329.900,00	4	8.599.800	-	-	1,00	1.130.900,00	2	2.629.900	1	4.831.500	4	8.592.300,00	100,00	99,91	8	11.922.200,00	50,00	21,92		
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	Dokumen	8	26.199.940	8	26.399.940,00															8	26.399.940,00	100,00	100,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	54.400.000	4	3.329.900,00	4	6.508.320	-	-	1,00	1.228.720,00	2	2.319.240	1	2.954.360	4	6.502.320,00	100,00	99,91	8	9.832.220,00	50,00	18,07		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Persen	100	19.553.468.174	100	9.082.494.832,47	100	3.386.554.000	21,16	716.519.968	31,78	1.076.192.799	21,44	726.032.419	21,47	727.008.293	100,00	3.245.753.480,37	100,00	95,84	200	12.328.248.312,84	200,00	63,05		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjanaan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan (20	12	5.525.350.950	12	5.882.474.586,00															12	5.882.474.586,00	100,00	106,46	SEKRETRIAT	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bu	25	14.028.117.224	25	3.200.020.246,47	25	3.386.554.000	25	716.519.968,09	25	1.076.192.799,35	25	726.032.419,49	25	727.008.293	25	3.245.753.480,37	100,00	95,84	50	6.445.773.726,84	200,00	45,95		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	100	1.232.938.536	100	380.765.448,00	100	143.658.179	-	-	6,40	9.194.696	25,72	36.949.935	24,13	34.661.129	97,90	80.805.760,00	97,90	56,25	198	461.571.208,00	197,90	37,44		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersediainya ATK, bahan kebersihan, listrik dan pengadaan alat kantor lainnya	Persen	100	174.456.352	100	178.805.628,00																100	178.805.628,00	100,00	102,49	SEKRETRIAT	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	32	291.851.824	8	23.991.500,00	8	40.979.583	-	-	2	5.802.196,00	6	20.667.609,00	-	14.509.778,00	8	40.979.583,00	100,00	100,00	16	64.971.083,00	50,00	22,26		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan (20	12	108.000.000	12	114.000.000,00															12	114.000.000,00	100,00	105,56	SEKRETRIAT	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	250.614.000	4	7.200.000,00	4	23.893.880	-	-	1	2.692.500,00	3	7.883.440,00	-	13.275.940,00	4	23.851.880,00	100,00	99,82	8	31.051.880,00	50,00	12,39		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan (20	12	29.249.640	12	29.224.820,00															12	29.224.820,00	100,00	99,92	SEKRETRIAT	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	67.873.790	2	5.671.500,00	2	9.534.552	-	-	-	-	1	4.618.886,00	1	4.915.411,00	2	9.534.297,00	100,00	100,00	4	15.205.797,00	50,00	22,40		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan media cetak	Bulan (20	12	8.400.000	12	7.540.000,00															12	7.540.000,00	100,00	89,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	19.492.200	24	3.870.000,00	24	4.200.000	-	-	4	700.000,00	12	2.000.000,00	8,00	1.000.000,00	24	3.700.000,00	100,00	88,10	48	7.570.000,00	50,00	38,84		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan perjalanan dinas	Tahun	1	25.076.000	1	10.462.000,00															1	10.462.000,00	100,00	41,72	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	58.188.858	0	-	12	4.707.000	-	-	-	-	6	1.780.000	6	960.000	12	2.740.000,00	100,00	58,21	12	2.740.000,00	25,00	4,71		
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	199.735.872	0	-	4	60.343.164	-	-	-	-	-	-	4	-	4	0,00	87,50	0,00	4	-	21,88	-		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	2.158.618.904	100	961.345.189	100	393.988.500	8,99	35.419.541	29,54	116.382.373	25,70	101.274.466	28,25	111.314.140	100,00	364.390.520,00	100,00	92,49	200	1.325.735.709,00	200,00	61,42		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi kantor	Bulan (20	12	403.200.000	12	426.000.000,00															12	426.000.000,00	100,00	105,65	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	201.600.000	12	290.787.394,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	12	290.787.394,00	100,00	144,24		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telkom listrik air, petugas kebersihan, peniaga kantor	Bulan (20	12	225.889.512	12	145.214.186,00															12	145.214.186,00	100,00	64,29	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	524.176.613	12	57.756.609,00	12	68.499.000	3	9.027.791,00	3	13.457.123,00	3	20.793.466,00	3	15.801.140,00	12	59.079.520,00	100,00	86,25	24	116.836.129,00	50,00	22,29		
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persen	100	20.999.000	100	27.587.000,00															100	27.587.000,00	100,00	131,37	SEKRETRIAT	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	48.728.180	1	14.000.000,00	1	8.707.500	-	-	-	-	1	8.707.500,00	-	-	1	8.707.500,00	100,00	100,00	2	22.707.500,00	50,00	46,60		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Pembayaran Jasa Administrasi Kantor	Laporan	0	-	0	-															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	734.025.600	0	-	12	316.782.000	1	26.391.750	5	102.925.250,00	3	71.773.500,00	3	95.513.000,00	12	296.603.500,00	100,00	93,63	12	296.603.500,00	33,33	40,41		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	Persen	100	1.368.924.507	100	298.551.770	100	110.970.000	2,52	2.800.000	7,48	8.304.000	25,97	28.821.000	33	36.117.000	98,80	76.042.000	98,80	68,52	199	374.593.770,00	198,80	27,36		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya secara berkala	Bulan/Un	0	-	0	-															0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	31.500.000	0	-			-	-	-	-	-	-	-		-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	4	161.000.000	4	142.976.450,00															4	142.976.450,00	100,00	88,81	SEKRETRIAT	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	373.600.500	4	37.232.000,00	4	71.500.000	1	2.800.000	1	8.304.000,00	1	23.701.000,00	1	28.437.000,00	4	63.242.000,00	100,00	88,45	8	100.474.000,00	200,00	26,89		
	7.01.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	JUmlah peralatan kantor yang direlihara	Bulan (20	12	26.916.846	12	25.813.110,00															12	25.813.110,00	100,00	95,90	SEKRETRIAT	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	62.460.541	2	3.900.000,00	2	12.800.000	-	-	-	-	1	5.120.000,00	1	7.680.000,00	2	12.800.000,00	100,00	100,00	4	16.700.000,00	200,00	26,74		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Gedung	2	49.031.820	2	88.630.210,00															2	88.630.210,00	100,00	180,76	SEKRETRIAT	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	2	695.914.800	0	-	2	26.670.000	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0,00	75,00	0,00	2	-	75,00	-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		99,32	82,60			199,32	47,10		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.03.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100	211.256.000	32,1	67.860.000,00	100	23.213.300	-	-	-	-	33,89	7.866.900	65	15.198.100	100	23.065.000	100,00	99,36	132,10	90.925.000,00	132,10	43,04		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100	145.200.000	100	45.180.000	100	15.799.200	-	-	-	-	49,79	7.866.900	50	7.866.900	100,00	15.733.800	100,00	99,59	200	60.913.800,00	200,00	41,95		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Pemerintahan yang Menerapkan SPM	Persen	100	12.000.000	100	22.580.000,00															100	22.580.000,00	100,00	188,17	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	36	60.600.000	0	-	9	7.899.600	-	-	-	-	4	3.933.450,00	5	3.933.450,00	9	7.866.900,00	100,00	99,59	9	7.866.900,00	25,00	12,98		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan sosialisasi peraturan tentang Pelayanan Publik	Persen	100	12.000.000	100	22.600.000,00															100	22.600.000,00	100,00	188,33	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	60.600.000	0	-	23	7.899.600	-	-	-	-	11	3.933.450,00	12	3.933.450,00	23	7.866.900,00	100,00	99,59	23	7.866.900,00	25,00	12,98		
	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100	66.056.000	100	22.680.000	100	7.414.100		-		-		-	99	7.331.200	100,00	7.331.200,00	100,00	98,88	200	30.011.200,00	200,00	45,43		
	7.01.02.2.04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelaksanaan pembinaan pelayanan perijinan non usaha yang dilimpahkan ke kecamatan	Persen	100	11.172.000	33,33	22.680.000,00															33	22.680.000,00	33,33	203,01	KASI TRANTIB	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= :6/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	92	54.884.000	0	-	23	7.414.100		-	-	-	-	-	23	7.331.200,00	23	7.331.200,00	100,00	98,88	23	7.331.200,00	25,00	13,36		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,23			200,00	43,69		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Sangat Rendah		
	7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi, Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina dan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		100	869.438.000	100	487.034.410,00	100	164.671.858	-	-	47,39	78.038.510	24,29	39.992.900	27,46	45.211.150	100,00	163.242.560	100,00	99,13	200,00	650.276.970,00	200,00	74,79		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembanegunan	persen	100	476.438.000	100	293.770.410	100	93.363.438	-	-	50,16	46.834.740	24,76	23.118.800	23,96	22.368.500	100,00	92.322.040	100,00	98,88	200	386.092.450,00	200,00	81,04		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen perencanaan usulan pembangunan	Dokumen	1	89.863.960	1	101.838.730,00															1	101.838.730,00	100,00	113,33	KASI PEMBANGUNAN	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	92	179.863.960	23	24.816.100,00	23	35.663.350	-	-	23	34.754.200,00	-	-	-	-	23	34.754.200,00	100,00	97,45	46	59.570.300,00	50,00	33,12		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Elektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya pembinaan kopwan dan bumdes	Desa	23	60.409.040	23	157.516.580,00															23	157.516.580,00	100,00	260,75	KASI EKONOMI	
				Jumlah Laporan Peningkatan Elektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	146.301.040	23	9.599.000,00	23	57.700.088	-	-	7,00	12.080.540,00	4,00	23.118.800,00	12,00	22.368.500,00	23	57.567.840,00	100,00	99,77	46	67.166.840,00	50,00	45,91		
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100	393.000.000	100	193.264.000	100	71.308.420	-	-	43,76	31.203.770	23,66	16.874.100	32	22.842.650	100,00	70.920.520,00	100,00	99,46	200	264.184.520,00	200,00	67,22		
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Desa	23	79.000.000	23	165.655.200,00															23	165.655.200,00	100,00	209,69	KASI KESRA	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	92	314.000.000	23	27.608.800,00	23	71.308.420	-	-	7	31.203.770,00	4	16.874.100,00	12	22.842.650,00	23	70.920.520,00	100,00	99,46	46	98.529.320,00	50,00	31,38		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,17			200,00	74,13		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Sedang		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100	388.441.000	100	326.152.630,00	100	69.375.705	-	-	23,90	16.579.200	40,29	27.952.860	36	24.657.060	100,00	69.189.120	100,00	99,73	200,00	395.341.750,00	200,00	101,78		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	Persen	100	301.700.910	100	178.586.910	100	39.566.400	-	-	24,85	9.834.200	41,65	16.479.000	33	13.183.200	100,00	39.496.400	100,00	99,82	200	218.083.310,00	200,00	72,28		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan	Bulan (2021-2022)	12	90.870.910	12	137.870.910,00															12	137.870.910,00	100,00	151,72	KASI TRANTIB	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	48	210.830.000	12	40.716.000,00	12	39.566.400	-	-	6	9.834.200,00	3	16.479.000,00	3	13.183.200,00	12	39.496.400,00	100,00	99,82	24	80.212.400,00	50,00	38,05		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	Persen	100	86.740.090	100	147.565.720	100	29.809.305	-	-	22,63	6.745.000	38	11.473.860	38	11.473.860	100,00	29.692.720,00	100,00	99,61	200	177.258.440,00	200,00	204,36		
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monev pelaksanaan keamanan lingkungan desa	Desa	23	26.931.090	23	137.966.720,00															23	137.966.720,00	100,00	512,30	KASI TRANTIB	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	92	59.809.000	23	9.599.000,00	23	29.809.305	-	-	7	6.745.000,00	4	11.473.860,00	12	11.473.860,00	23	29.692.720,00	100,00	99,61	46	39.291.720,00	50,00	65,70		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,72			200,00	138,32		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Sangat Tinggi		
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100	88.457.000	100	29.519.970,00	100	7.311.500	-	-	-	-	-	-	100	7.308.500	100	7.308.500	100,00	99,96	200,00	36.828.470,00	200,00	41,63		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dilaksanakan		100	88.457.000	100	29.519.970	100	7.311.500	-	-	-	-	-	-	100	7.308.500	100	7.308.500	100,00	99,96	200	36.828.470,00	200,00	41,63		
	7.01.05.2.01.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Tersedianya rakor FKUB	Persen	100	26.827.000	100	29.519.970															100	29.519.970,00	100,00	110,04	KASI KESRA	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	23	61.630.000	0	-	23	7.311.500	-	-	-	-	-	-	23	7.308.500,00	23	7.308.500,00	100,00	99,96	23	7.308.500,00	100,00	11,86		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,96			200,00	41,63		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Sangat Rendah		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		100	728.975.000	100	392.625.640,00	100	99.400.100,00	-	-	-	-	53,52	53.196.600,00	45	45.133.350,00	100,00	98.329.950,00	100,00	98,92	200,00	490.955.590,00	200,00	67,35		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	728.975.000	100	392.625.640,00	100	99.400.100	-	-	-	-	53,52	53.196.600	45	45.133.350	100,00	98.329.950	100,00	98,92	200	490.955.590,00	200,00	67,35		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	MOnev pengelolaan keuangan desa	Desa	23	75.526.920	23	171.426.840,00															23	171.426.840,00	100,00	226,97	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	92	152.329.900	23	19.206.400,00	23	45.221.500	-	-	-	-	11	27.112.350,00	12	18.074.900,00	23	45.187.250,00	100,00	99,92	46	64.393.650,00	50,00	42,27		
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemantauan Pilkades	Desa	23	12.000.000	0	-															0	-	-	-	KASI PEMERINTAHAN	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	92	15.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-		-		-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= =6/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Pungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya pembinaan PKK, monev santunan sosial, dan SKJ	Desa	23	101.847.170	23	70.241.490,00															23	70.241.490,00	100,00	68,97	KASI KESRA	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Pungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	92	241.989.050	0	-	0	-		-		-		-		-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	-	-		
	7.01.06.2.01.18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	MOnev pelaksanaan pembangunan desa	Desa	23	31.701.910	23	122.151.910,00															23	122.151.910,00	100,00	385,31	KASI PEMBANGUNAN	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	98.580.050	23	9.599.000,00	23	54.178.600	-	-	-	-	11	26.084.250,00	12	27.058.450,00	23	53.142.700,00	100,00	98,09	46	62.741.700,00	50,00	63,65		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,92			200,00	67,35		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.414.251.262,00		754.739.509,09		1.307.051.198,35		1.027.036.220,49		1.054.394.582,44		4.143.221.510,37								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)																						99,90	93,86			64,68	64,68		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN BALONGPANGGANG																												
			Urusr Kesilayahan																										
			Kecamatan Balonggapanggang																										
1	7.1.01	1, Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERENTAH DAERAH KAB./KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			4.174.329.684		3.991.565.124		4.165.819.099		833.384.032		1.470.023.713		645.806.205		894.484.560		3.865.781.510	92,80	92,80	-	7.857.346.633		188	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Laporan	7	4.200.000	5	700.000		4.200.000	0	-	17	699.794	26	1.076.800	47	1.971.500	89	3.748.094	89,24	89,24	94	4.448.094	1.346	106	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	700.000	5	700.000	5	700.000	0	-				380.000		320.000	5	700.000	100	100,00	10	1.400.000	200	200		
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-						320.000		320.000	0	45,71	-	320.000	-	46		
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-		699.794						699.794	0	99,97	-	699.794	-	100		
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-				348.400		320.000		668.400	0	95,49	-	668.400	-	95		
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	700.000	0	-	5	700.000		-						691.500		691.500	0	98,79	-	691.500	-	99		
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	700.000	0	-	5	700.000		-				348.400		320.000		668.400	0	95,49	-	668.400	-	95		
	7.01.01.2.02		Admministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan	Kegiatan	2	3.607.499.584		3.585.121.114	2	3.615.164.558	21	771.610.824	38	1.356.150.227	14	496.131.301	20	716.135.491	93	3.340.027.843	92,39	92,39	93	6.925.148.956	4.635	192	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	3.606.824.584	30,00	3.584.716.114	30	3.614.489.558	30	771.610.824	30	1.355.990.227		496.131.301		715.620.691		3.339.353.042,69	0	92,39	30	6.924.069.156	100	192		
	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	675.000	5	405.000	5	675.000	0	-		160.000				514.800		674.800	0	99,97	5	1.079.800	100	160		
	7.01.01.2.06		Admministrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Rekening	5	152.298.900	5	74.413.600	5	140.899.056	0	-	11	14.909.000	27	37.771.250	46	64.471.250	83	139.234.500	98,82	98,82	88	213.648.100	1.763	287	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	42.093.600	10	31.570.000	10	26.115.229	0	-		250.000		8.836.250		16.548.750		25.635.000	-	98,16	10	57.205.000	100	136		
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1500	45.000.000	7	12.563.700	1500	28.980.000	0	-		3.600.000		14.250.000		11.110.000		28.960.000	0	99,93	7	41.523.700	0	92		
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	5.677.300	5	3.419.900	3	12.066.283	0	-		439.000		1.775.000		9.851.500		12.065.500	0	99,99	5	15.485.400	167	273		
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	23.000.000	5	3.500.000	2	10.808.000	0	-		3.200.000		1.560.000		4.985.000		9.745.000	0	90,16	5	13.245.000	250	58		
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	222	36.528.000	12	23.360.000	222	40.827.000	0	-		7.420.000		11.350.000		21.976.000		40.746.000	0	99,80	12	64.106.000	5	175		
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	26.669.000			10	22.102.544		-						22.083.000		22.083.000	0	99,91		22.083.000				
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jenis	3	315.011.200	3	266.240.410	3	323.623.000	17	54.073.208	21	69.119.692	26	84.651.054	29	93.025.434	93	300.869.388	92,97	92,97	96	567.109.798	3.199	180	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	89.011.200	3	64.758.251	3	86.127.000	3	16.169.628		12.264.322		18.445.684		16.568.274		63.447.908	0	73,67	3	128.206.159	100	144		
	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	10.000.000	4	-	3	10.000.000	0	-				9.350.000		650.000		10.000.000	0	100,00	4	10.000.000	200	100		
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	216.000.000	6	201.482.159	8	227.496.000	8	37.903.580		56.855.370		56.855.370		75.807.160		227.421.480	0	99,97	6	428.903.639	86	199		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jenis	3	95.320.000	3	65.090.000	3	81.932.485	9	7.700.000	36	29.145.000	32	26.175.800	23	18.880.885	100	81.901.685	99,96	99,96	103	146.991.685	3.432	154	SEKRETARIAT	
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	69.580.000	3	57.340.000	3	71.112.485	3	7.700.000		27.275.000		20.875.000		15.262.485		71.112.485	0	100,00	3	128.452.485	100	185		
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	13.800.000	1	2.880.000	5	4.120.000	0	-				3.890.800		198.400		4.089.200	0	99,25	1	6.969.200	20	51		
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	11.940.000	11	4.870.000	60	6.700.000	0	-		1.870.000		1.410.000		3.420.000		6.700.000	0	100,00	11	11.570.000	18	97		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		94,68							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
2	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			25.000.000	80	6.650.000		24.193.360		-		1.400.000		14.737.500		7.700.000		23.837.500	99	98,53		30.487.500			PEMERINTAHAN	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		2	25.000.000	80	6.650.000	2	24.193.360	0	-	6	1.400.000	61	14.737.500	32	7.700.000	99	23.837.500	98,53	98,53	179	30.487.500	8926,455	122	PEMERINTAHAN	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	24.914.000	2	6.650.000	2	24.193.360	0			1.400.000		14.737.500		7.700.000		23.837.500	0	98,53	2	30.487.500	100	122		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,53							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
3	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat			157.895.000	25	92.245.650		174.778.916		-		59.648.000		42.527.360		61.456.200		163.631.560	93,62	93,62						
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	Desa	25	38.501.200	25	34.861.100	25	28.352.330	0	-	28	7.800.000	18	5.120.000	22	6.240.000	68	19.160.000	67,58	67,58	93	54.021.100	370	140		
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	25	38.501.200	25	34.861.100	25	28.352.330	0			7.800.000		5.120.000		6.240.000		19.160.000	-	67,58	25	54.021.100	100	140	PEMBANGUNAN	
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang dibina		2	119.393.800	25	57.384.550		146.426.586	0	-	35	51.848.000	26	37.407.360	38	55.216.200	99	144.471.560	98,66	98,66	124	201.856.110	6183,2421	169		
	7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3	41.695.900	2	20.670.000	3	86.375.141	0			36.630.000		10.740.000		37.507.500		84.877.500	0	98,27	2	105.547.500	67	253	EKONOMI	
	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	2	52.897.900	25	25.006.300	2	52.897.900	0			14.984.000		22.131.815		15.324.700		52.440.515	-	99,14	25	77.446.815	1.250	146	KESRA	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	24.800.000	25	11.708.250	25	7.153.545	0			234.000		4.535.545		2.384.000		7.153.545	0	100,00	25	18.861.795	2.500	76	EKONOMI	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		83,12							
																				Predikat Kinerja		Tinggi							
4	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Laporan		49.828.000		38.400.000		48.123.323		-		3.225.000		12.900.000		31.998.000		48.123.000	100,00	100,00					TRANTIB	
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penegakan Konflik	Laporan	12	49.828.000	80	38.400.000		48.123.323	0	-	7	3.225.000	27	12.900.000	66	31.998.000	100	48.123.000	100,00	100,00	180	86.523.000	1499,9944	174		
	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	49.828.000	1	38.400.000	12	48.123.323	0			3.225.000		12.900.000		31.998.000		48.123.000	0	100,00	1	86.523.000	8	174		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
5	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			33.219.000		10.441.000		8.694.830		-		-		-		8.679.650		8.679.650	99,83	99,83					KESRA	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah		25	33.219.000	80	10.441.000		8.694.830		-		-		-		8.679.650	-	8.679.650	99,83	99,83	80	19.120.650	320	58		
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	25	33.219.000	25	10.441.000	25	8.694.830	0							8.679.650		8.679.650	0	99,83	25	19.120.650	100	58		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		99,83							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
6	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		25	12.457.000	25	21.014.600	25	7.469.230		-	32	2.360.400	0	-	68	5.101.000	100	7.461.400	99,90	99,90					PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi dan rekomendasi Pemerintah Desa	Desa	25	12.457.000	25	21.014.600	25	7.469.230	0	-	32	2.360.400	0	-	68	5.101.000	100	7.461.400	99,90	99,90	125	28.476.000	500	229		
	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	12.457.000	2	21.014.600	25	7.469.230	0			2.360.400				5.101.000		7.461.400	0	99,90	2	28.476.000	100	229		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		99,90							
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.429.078.758		833.384.032		1.536.657.113		715.971.065		1.009.419.410		4.117.514.620								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						92,97	92,97			165	165		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN																												
	7		URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. MENINGKATNY	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN			100	20.593.079.000,00	100	7.679.942.161,47	100	3.783.577.246,00	14,36	705.327.135,85	33,31	1.135.297.467,41	25,94	908.981.553,32	26,39	963.821.390,89	100	3.713.427.547,47	100,00	98,15	200	11.393.369.708,94	200,00	55,33		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	18.264.506.100,00	100	6.694.196.061,47	100	3.344.336.606,00	14,16	665.387.135,85	48,60	998.835.491,41	12,37	807.832.265,32	24,87	811.547.872,89	100,00	3.283.602.765,47	100,00	98,18	200	9.977.798.826,94	200,00	54,63		
	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase	100	117.722.432,00	100	91.759.400,00	100	12.483.000,00	0	0,00	65,90	7.323.000,00	0,00	0,00	0	2.760.000,00	65,9	10.083.000,00	65,90	80,77	165,9	101.842.400,00	165,90	86,51		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	16.987.667,00	8	2.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8	0,00	16,67	0,00	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	48	18.788.440,00	16	6.780.000,00	8	3.180.000,00	0	0,00	4	3.180.000,00	0	0,00	0	0,00	4	3.180.000,00	50,00	100,00	20	9.960.000,00	41,67	53,01	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	36	16.653.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	42	16.209.740,00	14	5.493.000,00	7	3.093.000,00	0	0,00	7	3.093.000,00	0	0,00	0	0,00	7	3.093.000,00	100,00	100,00	21	8.586.000,00	50,00	52,97	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	36	14.606.263,00	12	3.660.000,00	6	5.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.760.000,00	0	2.760.000,00	0,00	53,49	12	6.420.000,00	33,33	43,95	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	96	19.476.077,00	32	3.450.000,00	16	1.050.000,00	0	0,00	16	1.050.000,00	0	0,00	0	0,00	16	1.050.000,00	100,00	100,00	48	4.500.000,00	50,00	23,11	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	15.000.955,00	24	69.916.400,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	24	69.916.400,00	33,33	466,08	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Persentase	100	14.669.310.300,00	100	5.548.619.702,47	100	2.739.883.246,00	13,99	600.086.849,85	37,00	872.769.918,41	0,00	615.859.958,32	22,67	624.749.709,89	73,66	2.713.466.436,47	73,66	99,04	173,66	8.262.086.138,94	173,66	56,32		
	7.01.01.2.02.01		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula	19	14.655.791.000,00	19	5.544.509.702,47	19	2.737.333.246,00	19	600.086.849,85	19	872.769.918,41	19	615.859.958,32	19	622.199.709,89	19	2.710.916.436,47	100,00	99,03	19	8.255.426.138,94	100,00	56,33	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.02.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	13.519.300,00	2	4.110.000,00	2	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		2.550.000,00	0	2.550.000,00	0,00	100,00	2	6.660.000,00	16,67	49,26	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Barang Persediaan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Kantor	Persentase	100	828.789.374,00	100	218.089.976,00	100	114.533.560,00	6,23	0,00	8,39	9.357.900,00	40,19	45.614.700,00	45,19	40.732.858,00	100	95.705.458,00	100,00	83,56	200	313.795.434,00	200,00	200,00		
	7.01.01.2.06.02		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	539.074.000,00	48	137.114.600,00	48	52.624.800,00	0	0,00	48	6.430.900,00	48	12.126.000,00		31.859.000,00	48	50.415.900,00	100,00	95,80	48	187.530.500,00	100,00	34,79	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.04		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	137.468.085,00	12	43.013.000,00	12	27.065.000,00	0	0,00	12	2.927.000,00	12	18.607.000,00		4.494.000,00	12	26.028.000,00	100,00	96,17	12	69.041.000,00	100,00	50,22	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.05		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	64.886.585,00	12	13.462.800,00	12	6.425.760,00	0	0,00	0	0,00	12	5.271.700,00		528.000,00	0	5.799.700,00	0,00	90,26	12	19.262.500,00	100,00	29,69	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.06		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	19.547.476,00	48	5.260.000,00	24	1.134.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		450.000,00	0	450.000,00	0,00	39,68	48	5.710.000,00	33,33	29,21	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.06.09		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	67.813.228,00	24	19.239.576,00	12	27.284.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.610.000,00		3.401.858,00	0	13.011.858,00	0,00	47,69	24	32.251.434,00	33,33	47,56	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pembayaran Jasa-Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	2.170.562.456,00	100	671.328.883,00	100	379.624.000,00	18,06	60.350.286,00	24,29	90.330.082,00	100,00	103.754.607,00	100	114.727.145,00	100	369.162.120,00	100,00	97,24	200	1.040.491.003,00	200,00	47,94		
	7.01.01.2.08.01		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	1.692.766.650,00	24	527.213.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	24	527.213.720,00	33,33	31,15	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08.02		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	288	460.969.095,00	96	131.565.163,00	48	80.004.000,00	12	12.230.406,00	12	17.931.562,00	12	21.436.207,00	12	18.208.745,00	48	69.806.920,00	100,00	87,25	144	201.372.083,00	50,00	43,68	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08.03		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	16.826.711,00	4	12.550.000,00	2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	9.800.000,00	0	0,00	2	9.800.000,00	100,00	98,00	6	22.350.000,00	50,00	132,82	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0,00	0	0,00	2	289.620.000,00	2	48.119.880,00	2	72.398.520,00	2	72.518.400,00	2	96.518.400,00	8	289.555.200,00	100,00	99,98	8	289.555.200,00	66,67	#DIV/0!		
	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor yang dirawat	Persentase	100	478.121.538,00	100	164.398.100,00	100	97.812.800,00	15,76	4.950.000,00	15,2	19.054.591,00	24,20	42.603.000,00	44,84	28.578.160,00	100	95.185.751,00	100,00	97,31	200	259.583.851,00	200,00	54,29		
	7.01.01.2.09.01		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	260.516.338,00	36	142.220.600,00	35	82.950.000,00	35	4.950.000,00	35	16.557.591,00	35	33.048.000,00	35	26.598.160,00	36	81.153.751,00	100,00	97,83	36	223.374.351,00	100,00	85,74	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	7.01.01.2.09.06		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	0,00	0	0,00	1	9.830.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.055.000,00	1	1.980.000,00	1	9.035.000,00	100,00	91,91		9.035.000,00		#DIV/0!		
	7.01.01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	217.605.200,00	1	22.177.500,00	1	5.032.800,00	0	0,00	1	2.497.000,00	1	2.500.000,00	0	0,00	1	4.997.000,00	100,00	99,29	1	27.174.500,00	100,00	12,49	SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,18	200	9.977.798.826,94	200,00	54,63		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	384.194.000,00	100	59.316.000,00	100	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001.528,00	0,00	6.201.528,00	0	6.201.528,00	0,00	20.404.584,00	0,00	84,86	100,00	79.720.584,00	100,00	20,75		
	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Persentase	100	384.194.000,00	100	59.316.000,00	100	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	8.001.528,00	0,00	6.201.528,00	0	6.201.528,00	0,00	20.404.584,00	0,00	84,86	100,00	79.720.584,00	100,00	20,75		
	7.01.01.2.02.02		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	73.021.350,00	4	46.272.000,00	2	24.045.000,00	0	0,00	1	8.001.528,00	1	6.201.528,00	1	6.201.528,00	3	20.404.584,00	100,00	84,86	7	66.676.584,00	58,33	91,31	SEKSI PEMERINTAHAN	
	7.01.01.2.02.03		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	311.172.650,00	2	13.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2	0,00	16,67	0,00	SEKSI PEMERINTAHAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	84,86	100,00	79720584,00	100,00	20,75		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	742.648.000,00	100	584.848.000,00	100	284.080.668,00	19,54	26.922.000,00	25,15	105.538.448,00	21,25	72.415.760,00	34,06	74.829.218,00	100	279.705.426,00	100,00	98,46	200	864.553.426,00	200,00	116,41		
	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Desa	Persentase	100	742.648.000,00	100	584.848.000,00	100	284.080.668,00	19,54	26.922.000,00	25,15	105.538.448,00	21,25	72.415.760,00	34,06	74.829.218,00	100	279.705.426,00	100,00	98,46	200	864.553.426,00	200,00	116,41		
	7.01.03.2.01.01		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	23	324.529.000,00	23	98.933.500,00	23	35.921.000,00	23	5.922.000,00	23	25.532.800,00	0	0,00	23	4.379.818,00	23	35.834.618,00	100,00	99,76	23	134.768.118,00	100,00	41,53	SEKSI PEMBANGUNAN	
	7.01.03.2.01.02		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	72	108.515.100,00	24	379.483.900,00	12	229.839.812,00	3	21.000.000,00	3	80.005.648,00	3	57.473.760,00	3	68.849.400,00	12	227.328.808,00	100,00	98,91	36	606.812.708,00	50,00	559,20	SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	7.01.03.2.01.03		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	309.603.900,00	4	106.430.600,00	2	18.319.856,00	0	0,00	0	0,00	2	14.942.000,00	2	1.600.000,00	4	16.542.000,00	100,00	90,30	8	122.972.600,00	66,67	39,72	SEKSI EKONOMI	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,46	200,00	864.553.426,00	200,00	116,41		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	579.544.000,00	100	197.799.000,00	100	96.400.000,00	25,17	13.018.000,00	14,39	20.322.000,00	18,9	19.932.000,00	100,00	42.207.800,00	100,00	95.479.800,00	100,00	99,05	200,00	293.278.800,00	200,00	50,61		
	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	525.076.500,00	100	131.841.000,00	100	79.488.000,00	25,17	13.018.000,00	27,01	18.672.000,00	22,87	19.932.000,00	24,95	27.045.800,00	100	78.667.800,00	100,00	98,97	200	210.508.800,00	200,00	40,09		
	7.01.04.2.01.01		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	525.076.500,00	24	131.841.000,00	12	79.488.000,00	3	13.018.000,00	3	18.672.000,00	3	19.932.000,00	3	27.045.800,00	12	78.667.800,00	100,00	98,97	36	210.508.800,00	50,00	40,09	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100	54.467.500,00	100	65.958.000,00	100	16.912.000,00	0	0,00	100	1.650.000,00	0	0,00	100,00	15.162.000,00	100	16.812.000,00	100,00	99,41	200	82.770.000,00	200,00	151,96		
	7.01.04.2.02.01		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	54.467.500,00	4	65.958.000,00	2	16.912.000,00	0	0,00	1	1.650.000,00	0	0,00	1	15.162.000,00	2	16.812.000,00	100,00	99,41	6	82.770.000,00	50,00	151,96	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,05	200,00	293.278.800,00	200,00	50,61		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	622.186.900,00	100	143.783.100,00	100	34.714.972,00	0	0,00	39,17	2.600.000,00	35,03	2.600.000,00	25,8	29.034.972,00	100,00	34.234.972,00	100,00	98,62	200,00	178.018.072,00	200,00	28,61		
	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	622.186.900,00	100	143.783.100,00	100	34.714.972,00	0	0,00	39,17	2.600.000,00	35,03	2.600.000,00	25,8	29.034.972,00	100,00	34.234.972,00	100,00	98,62	200,00	178.018.072,00	200,00	28,61		
	7.01.06.2.01.02		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	173.146.100,00	4	73.885.100,00	2	5.854.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.854.000,00	0	5.854.000,00	0,00	100,00	4	79.739.100,00	33,33	46,05	SEKSI PEMERINTAHAN	
	7.01.06.2.01.03		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	449.040.800,00	4	69.898.000,00	2	28.860.972,00	0	0,00	1	2.600.000,00	1	2.600.000,00	1	23.180.972,00	3	28.380.972,00	100,00	98,34	7	98.278.972,00	58,33	21,89	SEKSI PEMERINTAHAN	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,62	200,00	178.018.072,00	200,00	28,61		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.783.577.246,00		705.327.135,85		1.135.297.467,41		908981553,3		963821390,9		3.713.427.547,47								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																						100,00	98,15			55,33	55,33		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN DRIYOREJO																												
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah			225.712.600,00		9.267.938.356,25		3.108.484.486,00		-		924.520.060,97		760.261.162,58		694.119.783,90	96	2.983.438.404,87	95,98	95,98	95,98	12.251.376.761,12	95,98	95,98		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			133.256.300,00		41.339.496,00		17.186.144,00				3.340.000,00		8.969.593,00		4.116.551,00		16.426.144,00		95,58		57.765.640,00		95,58		
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10 dokumen	10	22.100.000,00	10	3.000.000,00	10	2.627.440,00		-				2.627.440		-	100,00	2.627.440,00	1.000,00	100,00	1000	5.627.440,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10 dokumen	10		10		10			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya buku rencana kerja OPD Kecamatan	10 dokumen	10	22.100.000,00	10	3.000.000,00	10	2.627.440,00		-				2.627.440		-	100,00	2.627.440,00	1.000,00	100,00	1000	5.627.440,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10 Dokumen	10	23.756.300,00	10	4.000.000,00	15	1.910.410,00		-				1.910.410		-	100,00	1.910.410,00	666,67	100,00	667	5.910.410,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10 Dokumen	10		10		15			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	10 Dokumen	10	23.756.300,00	10	4.000.000,00	15	1.910.410,00		-				1.910.410		-	100,00	1.910.410,00	666,67	100,00	667	5.910.410,00	0,00	0,25	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5 dokumen	5	19.900.000,00	5	5.099.950,00	10	2.080.109,00		-				2.080.109		-	100,00	2.080.109,00	1.000,00	100,00	1000	7.180.059,00	0,00	0,36	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5 dokumen	5		5		10			-				0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Buku Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	5 dokumen	5	19.900.000,00	5	5.099.950,00	10	2.080.109,00		-				2.080.109		-	100,00	2.080.109,00	1.000,00	100,00	1000	7.180.059,00	0,00	0,36	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA OPD Kecamatan	7 dokumen	7	18.800.000,00	7	5.999.756,00	17	2.803.975,00		-		1.269.791		1.534.184		2.803.975,00	588,24	100,00	588	8.803.731,00	0,00	0,47	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA OPD Kecamatan	7 dokumen	7		7		17			-		0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA OPD Kecamatan	7 dokumen	7	18.800.000,00	7	5.999.756,00	17	2.803.975,00		-		1.269.791		1.534.184	100,00	2.803.975,00	588,24	100,00	588	8.803.731,00	0,00	0,47	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	7 dokumen	7	20.500.000,00	7	4.719.920,00	15	2.184.060,00		-		1.081.843		342.217	65,20	1.424.060,00	434,68	65,20	435	6.143.980,00	0,00	0,30	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	7 dokumen	7		7		15			-		0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	7 dokumen	7	20.500.000,00	7	4.719.920,00	15	2.184.060,00		-		1.081.843		342.217	65,20	1.424.060,00	434,68	65,20	435	6.143.980,00	0,00	0,30	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	7 laporan	7	9.500.000,00	7	8.019.870,00	10	2.765.925,00		-		940.000		1.825.925	100,00	2.765.925,00	1.000,00	100,00	1000	10.785.795,00	0,00	1,14	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	7 laporan	7		7		10			-		0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	7 laporan	7	9.500.000,00	7	8.019.870,00	10	2.765.925,00		-		940.000		1.825.925	100,00	2.765.925,00	1.000,00	100,00	1000	10.785.795,00	0,00	1,14	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4 laporan	4	18.700.000,00	4	10.500.000,00	10	2.814.225,00		-		2.400.000		0		414.225	100,00	2.814.225,00	100,00	100,00	100	13.314.225,00	100,00	0,71	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4 laporan	4		4		10			-		0			#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	4 laporan	4	18.700.000,00	4	10.500.000,00	10	2.814.225,00		-		2.400.000		0		414.225	100,00	2.814.225,00	100,00	100,00	100	13.314.225,00	100,00	0,71	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			
																				Predikat Kinerja						#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.091.202.150,00		7.625.546.449,63		2.624.949.174,00		565.304.262,42		806.881.634,97		576.732.671,58		561.151.370,90	96	2.510.069.939,87	95,62	95,62	95,62	10.135.616.389,50	77,42	77,42		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12 bulan	12	13.072.404.150,00	12	7.621.546.449,63	18	2.622.427.000,00		565.304.262,42		805.453.634,97		576.732.671,58		560.057.204,90	96	2.507.547.773,87	95,62	95,62	-	10.129.094.223,50	77,48	77,48	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12 bulan	12		12		18										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	12 bulan	12	13.072.404.150,00	12	7.621.546.449,63	18	2.622.427.000,00		565.304.262,42		805.453.634,97		576.732.671,58		560.057.204,90	96	2.507.547.773,87	95,62	95,62	95,62	10.129.094.223,50	77,48	77,48	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan		18.798.000,00		4.000.000,00		2.522.174,00				1.428.000,00		-		1.094.166,00	100	2.522.166,00	100,00	100,00	-	6.522.166,00	34,70	34,70	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan				-											#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	95,62	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan		18.798.000,00		4.000.000,00		2.522.174,00				1.428.000,00		-		1.094.166,00	100	2.522.166,00	100,00	100,00	-	6.522.166,00	34,70	34,70	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			
																				Predikat Kinerja						#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran			1.295.424.500,00		479.044.183,00		182.850.753,00		-		52.038.484		78.737.115		51.050.931	99	181.826.530,00	99,44	99,44	99	660.870.713,00	51,02	51,02	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6	331.186.050,00	6	142.687.583,00	6	29.064.146,00				6.933.004		16.752.229		5.265.696	100	28.950.929,00	99,61	99,61	100	171.638.512,00	51,83	51,83	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6		6		6										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6	331.186.050,00	6	142.687.583,00	6	29.064.146,00				6.933.004		16.752.229		5.265.696	100	28.950.929,00	99,61	99,61	100	171.638.512,00	51,83	51,83	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4 jenis	4	602.956.550,00	4	252.753.300,00	4	110.754.080,00				35.347.880		38.171.576		37.186.676	100	110.706.132,00	99,96	99,96	100	363.459.432,00	60,28	60,28	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4 jenis	4		4		4										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	4 jenis	4	602.956.550,00	4	252.753.300,00	4	110.754.080,00				35.347.880		38.171.576		37.186.676	100	110.706.132,00	99,96	99,96	100	363.459.432,00	60,28	60,28	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	12 bulan	3	67.056.900,00	3	26.485.800,00	2	12.991.209,00				4.067.600		3.492.409		5.378.559	100	12.938.568,00	99,59	99,59	100	39.424.368,00	58,79	58,79	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	12 bulan	3		3		2										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	12 bulan	3	67.056.900,00	3	26.485.800,00	2	12.991.209,00				4.067.600		3.492.409		5.378.559	100	12.938.568,00	99,59	99,59	100	39.424.368,00	58,79	58,79	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	12	202.225.000,00	12	57.117.500,00	3	13.888.000,00				5.690.000		4.370.000		3.220.000	96	13.280.000,00	95,62	95,62	96	70.397.500,00	34,81	34,81	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	12		12		3										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	12	202.225.000,00	12	57.117.500,00	3	13.888.000,00				5.690.000		4.370.000		3.220.000	96	13.280.000,00	95,62	95,62	96	70.397.500,00	34,81	34,81	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	0	92000000	0	0	7	16153318				0		15950901		0	99	15.950.901,00	98,75	98,75	99	15.950.901,00	17,34	17,34	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	0	0	0	0	7	16153318									-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	0	92000000	0	0	7	16153318						15950901		0	99	15.950.901,00	98,75	98,75	99	15.950.901,00	17,34	17,34	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			961.765.400,00		568.640.776,00		228.032.415,00		39.233.135,00		53.898.942		57.155.783		69.400.931	96	219.688.791,00	96,34	96,34	96	788.329.567,00	81,97	81,97	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1 jenis	1	30.200.000,00	1	14.291.557,00	1	8.039.100,00		1.192.650,00		1.275.325		1.440.675		1.887.350	72	5.796.000,00	72,10	72,10	72	20.087.557,00	66,52	66,52	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1 jenis	1		1		1										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	1 jenis	1	30.200.000,00	1	14.291.557,00	1	8.039.100,00		1.192.650,00		1.275.325		1.440.675		1.887.350	72	5.796.000,00	72,10	72,10	72	20.087.557,00	66,52	66,52	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4 jenis	4	241.316.000,00	4	89.815.130,00	3	38.481.315		9.702.245,00		8.396.417		9.600.108		7.729.641	92	35.428.411,00	92,07	92,07	92	125.243.541,00	51,90	51,90	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= =6/7x100		18	19
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4 jenis	4		4		3										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	4 jenis	4	241.316.000,00	4	89.815.130,00	3	38.481.315		9.702.245,00		8.396.417		9.600.108		7.729.641	92	35.428.411,00	92,07	92,07	92	125.243.541,00	51,90	51,90	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3 jenis	3	85.449.400,00	3	35.954.000,00	3	11.340.000				1.927.200		3.915.000		5.013.000	96	10.855.200,00	95,72	95,72	96	46.809.200,00	54,78	54,78	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3 jenis	3		3		3										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	3 jenis	3	85.449.400,00	3	35.954.000,00	3	11.340.000				1.927.200		3.915.000		5.013.000	96	10.855.200,00	95,72	95,72	96	46.809.200,00	54,78	54,78	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga pengelola keuangan/barang aset OPD dan tenaga pembantu administrasi kantor	5 orang	5	604.800.000,00	5	302.810.959,00	4	170.172.000		28.338.240,00		42.300.000		42.200.000		54.770.940	98	167.609.180,00	98,49	98,49	98	470.420.139,00	77,78	77,78	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga pengelola keuangan/barang aset OPD dan tenaga pembantu administrasi kantor	5 orang	5		5		4										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga pengelola keuangan/barang aset OPD dan tenaga pembantu administrasi kantor	5 orang	5	604.800.000,00	5	302.810.959,00	4	170.172.000		28.338.240,00		42.300.000		42.200.000		54.770.940	98	167.609.180,00	98,49	98,49	98	470.420.139,00	77,78	77,78	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!			#DIV/0!			
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!			#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			1.599.884.350,00		553.367.451,62		55.466.000,00		-		8.361.000		38.666.000		8.400.000	100	55.427.000,00	99,93	99,93	100	608.794.451,62	38,05	38,05	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	2 jenis	1	245.242.800,00	1	70.768.036,00	2	33.600.000,00				8.361.000		16.800.000		8.400.000	99,88	33.561.000,00	99,88	99,88	100	104.329.036,00	42,54	42,54	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	2 jenis	1		1		2										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	2 jenis	1	245.242.800,00	1	70.768.036,00	2	33.600.000,00				8.361.000		16.800.000		8.400.000	99,88	33.561.000,00	99,88	99,88	100	104.329.036,00	42,54	42,54	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo	4 jenis		358.933.650,00		33.600.000,00		-				0		0			#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33.600.000,00	9,36	9,36	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo	4 jenis				-		-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan dan terbayarkannya STNK Kendaraan Dinas yang Jatuh Tempo	4 jenis		358.933.650,00		33.600.000,00		-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33.600.000,00	9,36	9,36	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	385.933.650,00	2	124.020.050,00	2	21.866.000,00				0		21.866.000		-	100,00	21.866.000,00	100,00	100,00	100	145.886.050,00	37,80	37,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2		2		2										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	385.933.650,00	2	124.020.050,00	2	21.866.000,00						21.866.000		-	100,00	21.866.000,00	100,00	100,00	100	145.886.050,00	37,80	37,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	609.774.250,00	2	324.979.365,62	2	-				0		0		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	324.979.365,62	53,30	53,30	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2		2		2	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	2 jenis	2	609.774.250,00	2	324.979.365,62	2	-								-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	324.979.365,62	53,30	53,30	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!	0		#DIV/0!			
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!	0		#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.02	Peningkatan Pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			217.046.000,00		84.987.000,00		42.977.290,00		-		11.659.050		16.747.035		14.240.419	99	42.646.504,00		99,23	0	127.633.504,00	58,80	58,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat			217.046.000,00		84.987.000,00		42.977.290,00		-		11.659.050		16.747.035		14.240.419	99	42.646.504,00	#DIV/0!	99,23	#DIV/0!	127.633.504,00	58,80	58,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	2 kegiatan	2		2		2			-							#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	2 kegiatan	2	217.046.000,00	2	84.987.000,00	2	42.977.290,00		-		11.659.050		16.747.035		14.240.419	99	42.646.504,00	4.961,52	99,23	4962	127.633.504,00	58,80	58,80	kecamatan driyorejo	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03	Terlaksananya RKPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kermasyarakatan di desa)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			521.483.000,00		432.742.000,00		100.012.670,00		-		34.416.604		29.897.475		34.312.570	99	98.626.649,00	98,61	98,61	99	531.368.649,00	101,90	101,90	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			244.403.000,00		286.432.300,00		56.372.232,00		-		17.209.429		19.518.867		18.425.971	98	55.154.267,00	97,84	97,84	98	341.586.567,00	139,76	139,76	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	78 orang	70		70												#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	78 orang	70	95.597.000,00	70	110.418.500,00		11.797.880,00				8.007.625		0		3.750.255	100	11.757.880,00	99,66	99,66	100	122.176.380,00	127,80	127,80	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	16 desa															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	16 desa		74.780.250,00		57.906.400,00		14.385.060,00				8.840.000		5.040.000		505.060	100	14.385.060,00	100,00	100,00	100	72.291.460,00	96,67	96,67	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	16 desa	32		100		100										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	16 desa	32	74.025.750,00	100	118.107.400,00	100	30.189.292,00				361.804		14.478.867		14.170.656	96	29.011.327,00	96,10	96,10	96	147.118.727,00	198,74	198,74	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			277.080.000,00		146.309.700,00		43.640.438,00				17.207.175		10.378.608		15.886.599		43.472.382,00								
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga		149.770.000,00		83.397.700,00		22.670.160,00				9.619.167		5.424.756		7.538.895	100	22.582.818,00	99,61	99,61		105.980.518,00	70,76	70,76		
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 desa															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 desa		127.310.000,00		62.912.000,00		20.970.278,00				7.588.008		4.953.852		8.347.704	100	20.889.564,00	99,62	99,62	100	83.801.564,00	65,82	65,82	kecamatan driyorejo	
																					PI/	-	#DIV/0!			#DIV/0!			
																						-	#DIV/0!			#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.04	Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman serta penyelesaian konflik secara damai	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			228.508.000,00		278.749.260,00		48.269.430,00		-		23.480.000		14.146.189		10.558.772	100	48.184.961,00	99,83	99,83	100	326.934.221,00	143,07	143,07	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			228.508.000,00		278.749.260,00		48.269.430,00		-		23.480.000		14.146.189		10.558.772	100	48.184.961,00	99,83	99,83	100	326.934.221,00	143,07	143,07	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	12 bulan	12		12		4										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	12 bulan	12	170.314.000,00	12	175.648.000,00	4	24.562.268,00				10.880.000		7.870.000		5.802.268	100	24.552.268,00	99,96	99,96	100	200.200.268,00	117,55	117,55	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi Muspika dengan Tokoh Agama di Kecamatan	12 bulan	12		12		12										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.04.2.01.0002		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi Muspika dengan Tokoh Agama di Kecamatan	12 bulan	12	58.194.000,00	12	103.101.260,00	12	23.707.162,00				12.600.000		6.276.189		4.756.504	100	23.632.693,00	99,69	99,69	100	126.733.953,00	217,78	217,78	kecamatan driyorejo	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)					#DIV/0!			
																					Predikat Kinerja					#DIV/0!	Sangat Rendah		
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan			598.332.000,00		624.487.590,00		100.340.624,00		-		33.791.569,00		28983278		36668521	99,11	99.443.368,00	99,11	99,11	99,11	723.930.958,00	120,99	120,99	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			598.332.000,00		624.487.590,00		100.340.624,00		-		33.791.569,00		28983278		36668521	99,11	99.443.368,00	99,11	99,11	99,11	723.930.958,00	120,99	120,99	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan kepala desa	16 desa															#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan kepala desa	16 desa		46.000.000,00		68.823.000,00		16.779.070,00				3.204.713,00		5749426		7648278	98,95	16.602.417,00	98,95	98,95		85.425.417,00	185,71	185,71		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	32 dokumen	16		16		16										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	32 dokumen	16	77.600.000,00	16	74.817.000,00	16	16.182.545,00				5.489.426,00		4843852		5743565	99,35	16.076.843,00	99,35	99,35	99,35	90.893.843,00	117,13	117,13	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 bulan	12		12		16										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 bulan	12	248.157.000,00	12	108.638.400,00	16	16.747.590,00				4.830.000,00		5870000		6007590	99,76	16.707.590,00	99,76	99,76	99,76	125.345.990,00	50,51	50,51	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	12 bulan	12		12												#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	12 bulan	12	66.236.000,00	12	80.663.400,00		12.658.600,00				2.130.000,00		4110000		6216128	98,40	12.456.128,00	98,40	98,40	98,40	93.119.528,00	140,59	140,59	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya Pemahaman BPD tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPD	16 desa	12		12												#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0007		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya Pemahaman BPD tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPD	16 desa	12	44.156.000,00	12	19.022.500,00		8.807.711,00				5.059.666,00		2390000		1060988	96,63	8.510.654,00	96,63	96,63	96,63	27.533.154,00	62,35	62,35	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban umum	16 bulan	1		1		1										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.0011		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan ketertiban umum	16 bulan	1	51.183.000,00	1	105.540.000,00	1	12.680.538,00				5.760.945,00		2580000		4339197	100,00	12.680.142,00	100,00	100,00	100,00	118.220.142,00	230,98	230,98	kecamatan driyorejo	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tentang tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	12 bulan	12		12		6										#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	kecamatan driyorejo	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.0012		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tentang tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	12 bulan	12	65.000.000,00	12	166.983.290,00	6	16.484.570,00				7.316.819,00		3440000		5652775	99,55	16.409.594,00	99,55	99,55	99,55	183.392.884,00	282,14	282,14	kecamatan driyorejo	
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			18.739.358.000,00		12.289.956.616,87		3.400.084.500,00	17,78	604.537.397,42	30,23	1.027.867.283,97	47,10	1.601.326.709,16	43,53	1.479.903.298,80	96,24	3.272.339.886,87	#DIV/0!	98,55	426,64	13.961.244.093,12	74,50	74,50		
																						100	96,24			100	96,24		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN WRINGINANOM																												
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah			2.911.397.998,00		2.911.397.998,00		3.256.523.073,00		667.173.834,73		960.755.146,33		706.765.285,62	-	766.952.557,15	95,93	3.123.851.485,86		95,93		6.035.249.483,86		207,30		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			46.499.585,00		46.499.585,00		24.135.000,00		0,00		3.850.610,00		9.543.080,00	-	10.706.613,00	99,86	24.100.303,00		99,86		70.599.888,00		151,83	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen rencana kerja OPD Kecamatan	Dokumen	10	5.999.970,00	10	5.999.970,00	10	3.330.000,00		0,00		973.350,00		837.740		1.515.460	99,90	3.326.550,00		99,90		9.326.520,00		155,44	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.02		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RKA) OPD Kecamatan	Dokumen	10	5.999.880,00	10	5.999.880,00	15	3.495.000,00		0,00		1.967.310,00		789.550		733.715	99,87	3.490.575,00		99,87		9.490.455,00		158,18	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.03		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RKA) Perubahan OPD Kecamatan	Dokumen	5	5.999.850,00	5	5.999.850,00	10	3.495.000,00		0,00		348.400,00		2.360.570		785.605	99,99	3.494.575,00		99,99		9.494.425,00		158,24	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.04		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-RKA OPD Kecamatan	Dokumen	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	17	3.495.000,00		0,00		331.700,00		2.005.125		1.158.175	100,00	3.495.000,00		100,00		9.495.000,00		158,25	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.05		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Tersusunnya Buku DPA-RKA Perubahan OPD Kecamatan	Dokumen	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	15	3.495.000,00		0,00		229.850,00		1.693.845		1.556.598	99,58	3.480.293,00		99,58		9.480.293,00		158,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	Dokumen	7	10.499.885,00	7	10.499.885,00	10	3.165.000,00		0,00		0,00				3.158.860	99,81	3.158.860,00		99,81		13.658.745,00		130,08	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan	Dokumen	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	10	3.660.000,00		0,00		0,00		1.856.250		1.798.200	99,85	3.654.450,00		99,85		9.654.450,00		160,91	Kecamatan Wringinanom	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	-	99,86	-	10.085.698,29		154,16		
																					Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.02	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Administrasi Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.467.548.350,00		2.467.548.350,00		2.784.887.944,00		623.689.525,73		887.894.713,33		597.730.363,62		548.805.857,15	95,55	2.660.830.459,86		95,55		5.128.378.809,86		207,83		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan	Orang/Bulan	12	2.467.548.350,00	12	2.467.548.350,00	22	2.782.177.944,00		623.689.525,73		887.894.713,33		597.730.363,62		548.805.857,18	95,54	2.658.120.459,86		95,54		5.125.668.809,86		207,72	Kecamatan Wringinanom	
			Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen				-		2.710.000,00		0,00		0,00		0,00		2.710.000,00	100,00	2.710.000,00		100,00		2.710.000,00		-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0,00	97,77	0,00	97,77	0,00	97,77		
																					Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.06	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran			124.753.813,00		124.753.813,00		132.612.265,00		900.000,00		10.622.483,00		32.473.196,00		60.542.518,00	99,74	132.267.197,00		99,74		257.021.010,00		-	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	6	52.786.774,00	6	52.786.774,00	6	42.061.000,00		0,00		3.825.913,00		9.924.360		28.297.224	99,97	42.047.497,00		99,97		94.834.271,00		1,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	Jenis	4	41.367.362,00	4	41.367.362,00	4	25.079.000,00		0,00		3.189.450,00		9.172.300		12.717.250	100,00	25.079.000,00		100,00		66.446.362,00		2,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	Jenis	3	14.999.677,00	3	14.999.677,00	2	7.320.700,00		0,00		2.457.120,00		2.250.536		2.613.044	100,00	7.320.700,00		100,00		22.320.377,00		3,00	Kecamatan Wringinanom	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis					2	-		0,00		0,00				-	0,00	-		-		-		4,00		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	12	15.600.000,00	12	15.600.000,00	3	30.283.165,00		900.000,00		1.150.000,00		11.126.000		16.915.000	99,37	30.091.000,00		99,37		45.691.000,00		5,00	Kecamatan Wringinanom	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sarana Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jenis	12				4	27.868.400,00		0,00		0,00		0,00		27.729.000		27.729.000,00								
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		124,77	-	121.578.255,00				
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		0,00		0,00		0			#DIV/0!	-		#DIV/0!		-		5,00	Kecamatan Wringinanom	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Persen	100					-		0,00							#DIV/0!	-		#DIV/0!		-		6,00	Kecamatan Wringinanom	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Rendah	#DIV/0!		
	7.01.01.2.08	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			186.978.364,00		186.978.364,00		249.885.114,00		42.584.309,00		54.639.340,00		58.018.646,00	-	94.642.819,00	97,31	243.163.526,00		97,31		430.141.890,00		6,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kegiatan surat menyurat OPD Kecamatan	Orang	1	127.200.000,00	1	127.200.000,00	1									-	#DIV/0!	-		#DIV/0!		127.200.000,00		7,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	Unit	4	34.999.656,00	4	34.999.656,00	3	39.751.114,00		8.913.109,00		4.218.182		7.426.330		12.608.905,00	83,44	33.166.526,00		83,44		68.166.182,00		8,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sewa Perlengkapan Kantor	Bulan	3	24.778.708,00	3	24.778.708,00	3	8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		7.863.000,00	98,29	7.863.000,00		98,29		32.641.708,00		9,00	Kecamatan Wringinanom	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					7	202.134.000,00		33.671.200,00		50.421.158		50.592.316		67.449.326,00	100,00	202.134.000,00		100,00		202.134.000,00		10,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	-	93,91	-	76.002.630,00	0,00	76.002.630,00		
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.09	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			85.617.886,00		85.617.886,00		65.002.750,00		0,00		3.748.000,00		9.000.000,00		52.254.750,00	97,67	63.490.000,00		97,67		149.107.886,00		10,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	Persen	100	34.984.286,00	1	34.984.286,00	2	37.430.000,00		0,00		2.528.000,00		9.000.000		24.400.000,00	95,99	35.928.000,00		95,99		70.912.286,00		11,00	Kecamatan Wringinanom	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100				5	6.500.000,00		0,00		1.220.000,00		0,00		5.280.000,00	100,00	6.500.000,00		100,00		6.500.000,00		12,00		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Persen	100	14.999.000,00	2	14.999.000,00	2	10.430.000,00		0,00		0,00		0,00		10.427.000,00	99,97	10.427.000,00		99,97		25.426.000,00		13,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Persen	100	35.634.600,00	2	35.634.600,00	2	10.642.750,00		0,00		0,00		0,00		10.635.000,00	99,93	10.635.000,00		99,93		46.269.600,00		14,00	Kecamatan Wringinanom	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	-	131,96	-	49.702.628,67	0,00	49.702.628,67		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																				Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.02	Peningkatan Pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			14.999.960,00		14.999.960,00		16.000.000,00		0,00		600.000,00		4.608.252,00	0,00	9.464.904,00	91,71	14.673.156,00		91,71		29.673.116,00		14,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat			14.999.960,00		14.999.960,00		16.000.000,00		0,00		600.000,00		4.608.252,00	0,00	9.464.904,00	91,71	14.673.156,00		91,71		29.673.116,00		15,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kali	10	14.999.960,00	2	14.999.960,00	2	16.000.000,00		0,00		600.000,00		4.608.252		9.464.904	91,71	14.673.156,00		91,71		29.673.116,00		16,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	91,71	0,00	29.673.116,00	0,00	16,00		
																				Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03	Terlaksananya REPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			275.263.000,00		275.263.000,00		98.897.674,00		-		16.759.379,00		28.468.254,00	0,00	53.618.651,00	99,95	98.846.284,00		99,95		374.109.284,00		16,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			275.263.000,00		275.263.000,00		98.897.674,00		-		16.759.379,00		28.468.254,00	0,00	53.618.651,00	99,95	98.846.284,00		99,95		374.109.284,00		17,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	Persen	100	58.199.910,00	70	58.199.910,00	70	36.331.000,00		0,00		15.759.379		0,00		20.539.125	99,91	36.298.504,00		99,91		94.498.414,00		18,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	Persen	100	217.063.090,00	100	217.063.090,00	6	29.952.574,00		0,00		1.000.000,00		9.704.752		19.245.251	99,99	29.950.003,00		99,99		247.013.093,00		19,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100					32.614.100,00		0,00		0,00		18.763.502		13.834.275	99,95	32.597.777,00		99,95		32.597.777,00		19,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		49,97	99,95	49,97	170.755.753,50	49,97	18,50		
																				Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.04	Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman serta penyelesaian konflik secara damai	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			49.123.530,00		49.123.530,00		70.510.000,00		0,00		7.500.000,00		24.906.504,00		38.031.404,00	99,90	70.437.908,00		99,90		119.561.438,00		19,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			49.123.530,00		49.123.530,00		70.510.000,00		0,00		7.500.000,00		24.906.504,00		38.031.404,00	99,90	70.437.908,00		99,90		119.561.438,00		20,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	Bulan	12	49.123.530,00	12	49.123.530,00	12	70.510.000,00		0,00		7.500.000,00		24.906.504		38.031.404	99,90	70.437.908,00		99,90		119.561.438,00		21,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	99,90	-	119.561.438,00	0,00	21,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			20.000.000,00		20.000.000,00		25.775.000,00		0,00		300.000,00		0,00		25.472.004,00	99,99	25.772.004,00		99,99		45.772.004,00		21,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			20.000.000,00		20.000.000,00		25.775.000,00		0,00		300.000,00		0,00		25.472.004,00	99,99	25.772.004,00		99,99		45.772.004,00		22,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.05.2.01.01		Pembinaan wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka memantapkan Pancasila Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik ndonesia	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	Kali	12	20.000.000,00		20.000.000,00		25.775.000,00		0,00		300.000,00		0,00		25.472.004,00	99,99	25.772.004,00		99,99		45.772.004,00		23,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	99,99	-	45.772.004,00	0,00	23,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan			184.613.000,00		184.613.000,00		166.642.310,00		0,00		3.000.000,00		34.339.014,00		118.733.293,00	93,66	156.072.307,00		93,66		340.685.307,00		23,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			184.613.000,00		184.613.000,00		166.642.310,00		0,00		3.000.000,00		34.339.014,00		118.733.293,00	93,66	156.072.307,00		93,66		340.685.307,00		24,00	Kecamatan Wringinanom	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasiliasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen					32	26.245.400,00		0,00		600.000,00		5.633.752,00		20.008.880,00	99,99	26.242.632,00		99,99		26.242.632,00		25,00		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	Kali	16	56.380.000,00	16	56.380.000,00	16	21.180.092,00		0,00		500.000,00		5.000.000,00		15.680.092,00	100,00	21.180.092,00		100,00		77.560.092,00		26,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kali	12	20.352.000,00	12	20.352.000,00	16	15.153.804,00		0,00		500.000,00		4.730.500,00		9.923.304,00	100,00	15.153.804,00		100,00		35.505.804,00		27,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.04		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Tentang Undang-Undang Desa	Kali	32	22.376.000,00	32	22.376.000,00	16			0,00						-	0,00	-		#DIV/0!		22.376.000,00		28,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	Kali	12	20.505.000,00	12	20.505.000,00		14.716.756,00		0,00		500.000,00		7.188.282,00		7.028.474,00	100,00	14.716.756,00		100,00		35.221.756,00		29,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa Yang Tertib dan Aman	Kali	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.554.222,00		0,00		0,00		0,00		-	0,00	-		-		15.000.000,00		30,00	Kecamatan Wringinanom	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen					16	20.899.036,00		0,00		0,00		0,00		20.898.036,00	100,00	20.898.036,00		100,00		20.898.036,00		31,00		
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tentang tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	Kali	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	6	36.320.000,00		0,00		900.000,00		11.786.480,00		23.624.381,00	99,97	36.310.861,00		99,97		56.310.861,00		32,00	Kecamatan Wringinanom	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terpenuhinya Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Kali	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	16	21.573.000,00		0,00		0,00		0,00		21.570.126,00	99,99	21.570.126,00		99,99		51.570.126,00		33,00	Kecamatan Wringinanom	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		-	-	-	44.920.382,14	0,00	44.920.382,14	Kecamatan Wringinanom	
																				Predikat Kinerja								Kecamatan Wringinanom	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program						3.455.397.488,00		3.455.397.488,00		3.634.348.057,00	18,36	667.173.834,73	27,21	988.914.525,33		1.496.309.515,24	27,85	1.012.272.813,15	96,02	3.489.653.144,86	96,02	########	96,02	3.489.653.144,86	96,02	##########		
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)			96,02	96,02			96,02	96,02		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8÷14		17= 16/7x100		18	19
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)							
																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN KEDAMEAN																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
			KECAMATAN KEDAMEAN				25.248.117.620,00		3.053.703.124,00		3.311.189.352		551.361.412		1.627.814.406		722.588.897		347.600.695	0,00	3.249.365.409,76	#DIV/0!	98,13	0,00	6.303.068.533,76	#DIV/0!	24,96		
	7.01.01	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Presentase	100	23.009.537.620,00	100	2.710.153.524,00	100	2.834.635.352	23	551.361.412	0	1.438.614.621,52	0	641.448.268,44		110.664.794,60	22,70	2.742.089.096,76	22,70	96,74	123	5.452.242.620,76	122,70	23,70		
	7.01.01.2.01		PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase	100	347.000.000,00	100	46.967.500,00	100	12.632.400	0	0	0	6.146.106,00	0	0,00		0,00	0,00	6.146.106,00	0,00	48,65	100	53.113.606,00	100,00	15,31		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Dokumen	160	257.000.000,00	40	31.975.000,00	40	6.032.400	0	0	0	5.260.000,00	0	0,00		0,00	0,00	5.260.000,00	0,00	87,20	40	37.235.000,00	25,00	14,49	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	Laporan	90	90.000.000,00	15	14.992.500,00	20	6.600.000	0	0	0	886.106,00	0			0,00	0,00	886.106,00	0,00	13,43	15	15.878.606,00	16,67	17,64	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.01.07		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi					0,00																				
	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		100	18.290.754.514,00	100	2.154.712.714,00	100	2.379.654.952	24	513.182.361	0	1.254.550.262,52	0	523.169.949,44		13.772.263,60	24,00	2.304.674.836,76	24,00	96,85	124	4.459.387.550,76	124,00	24,38		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	72	18.230.754.514,00	12	2.144.715.214,00	12	2.379.654.952	23	513.182.361,20	0	1.254.550.262,52	0	523.169.949,44	0	13.772.263,60	23,16	2.304.674.836,76	193,00	96,85	35	4.449.390.050,76	48,83	24,41	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.02.01		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	120	60.000.000,00	20	9.997.500,00	20	0	0	0	0	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	20	9.997.500,00	16,67	16,66	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		100	1.011.153.816,00	100	124.187.100,00	100	81.951.200	9	0	0	22.616.359,00	66	41.013.797,00		18.542.500,00	75,00	82.172.656,00	75,00	100,27	175	206.359.756,00	175,00	20,41		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	Paket	42	43.500.000,00	7	5.732.000,00	9	6.500.000	0		0	0,00	0	5.798.000,00		0,00	0,00	5.798.000,00	0,00	89,20	7	11.530.000,00	16,67	26,51	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	150	135.000.000,00	0	0,00	23	23.190.000	0		0	0,00	0	21.532.200,00		0,00	0,00	21.532.200,00	0,00	92,85	0	21.532.200,00	0,00	15,95	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	66	28.500.000,00	11	3.444.000,00	9	7.500.000	0		0	0,00	0	7.004.843,00		0,00	0,00	7.004.843,00	0,00	93,40	11	10.448.843,00	16,67	36,66	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	Paket	8.520	330.000.000,00	1.420	50.000.000,00	1.463	18.900.000	0	0	0	9.000.000,00	0	0,00		9.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	95,24	1.420	68.000.000,00	16,67	20,61	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	170.790	87.000.000,00	28.465	12.146.100,00	27.230	7.981.200	0	0	0	4.163.359,00	0	2.438.754,00		1.792.500,00	0,00	8.394.613,00	0,00	105,18	28.465	20.540.713,00	16,67	23,61	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Dokumen	12	30.553.816,00	8	3.840.000,00	2	2.520.000	0	0	0	1.200.000,00	0	400.000,00		800.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	95,24	8	6.240.000,00	66,67	20,42	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan bahan /material	Jumlah penyediaan bahan / Material	Paket	26	19.100.000,00	104	20.875.000,00			0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	104	20.875.000,00	400,00	109,29	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	72	337.500.000,00	12	28.150.000,00	12	15.360.000	0		0	8.253.000,00	0	3.840.000,00		6.950.000,00	0,00	19.043.000,00	0,00	123,98	12	47.193.000,00	16,67	13,98	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		100	544.140.000,00	100	94.088.500,00	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94.088.500,00	100,00	17,29		
	7.01.01.2.08.01		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel		6	100.000.000,00	0	0,00	1	0	0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		31	444.140.000,00	11	94.088.500,00	2	0	0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	94.088.500,00	35,48	21,18	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	1.951.489.290,00	100	218.512.710,00	100	302.206.800	29	30.029.051	54	132.751.894,00	0	72.964.522,00		69.150.031,00	82,50	304.895.498,00	82,50	100,89	183	523.408.208,00	182,50	26,82		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon		72	686.689.290,00	12	39.712.710,00	12	64.500.000	38	8.707.551	0	26.144.394,00	0	11.250.022,00	0	4.480.894,00	37,60	50.582.861,00	313,33	78,42	50	90.295.571,00	68,89	13,15	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor		72	1.264.800.000,00	12	178.800.000,00	12	237.706.800	1	21.321.500	0	106.607.500,00	0	61.714.500,00	0	64.669.137,00	1,00	254.312.637,00	8,33	106,99	13	433.112.637,00	18,06	34,24	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah		100	865.000.000,00	100	71.685.000,00	100	58.190.000	14	8.150.000	0	22.550.000,00	0	4.300.000,00		9.200.000,00	14,00	44.200.000,00	14,00	75,96	114	115.885.000,00	114,00	13,40		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		36	375.000.000,00	12	61.705.000,00	6	51.850.000	14	8.150.000	0	20.250.000,00	0	3.500.000,00	0	6.150.000,00	13,50	38.050.000,00	225,00	73,38	26	99.755.000,00	70,83	26,60	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor		18	90.000.000,00	6	9.980.000,00	24	6.340.000	0	0	0	2.300.000,00	0	800.000,00		3.050.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	97,00	6	16.130.000,00	33,33	17,92	Sekretariat Kec. Kedamean	
	7.01.01.2.08.02		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		24	400.000.000,00	0	0,00	4	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		0,00	0,00	0,00		
eria (%)																						22,70	96,74	122,70	5.452.242.620,76	122,70	23,70		
Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.02	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kematangan pelayanan publik		100	75.000.000,00	100	0,00	100	8.000.000	0	0,00	0	0,00	100	0,00		9.983.300,00	100,00	9.983.300,00	100,00	124,79	200	9.983.300,00	200,00	13,31		
	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik		100	75.000.000,00	100	0,00	100	8.000.000	0	0,00	0	0,00	100	0,00		9.983.300,00	100,00	9.983.300,00	100,00	124,79	200	9.983.300,00	200,00	13,31		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan		10	75.000.000,00	0	0,00	1	8.000.000	0		0	0,00	0	0,00		9.983.300,00	0,00	9.983.300,00	0,00	0,00	0	9.983.300,00	0,00	13,31	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
eria (%)																						100,00	124,79	200,00	9.983.300,00	200,00	13,31		
Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.03	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1). Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2). Persentase pelaku ekonomi di wilayah kecamatan yang difasilitasi 3). Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi 4). Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina		100	1.135.700.000,00	100	124.794.000,00	100	268.764.000,00	0	-	0	142.973.101,00	0	73.472.804,00		81.170.400,00	0,00	297.616.305,00	0,00	110,74	100	422.410.305,00	100,00	37,19		
	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa		100	520.700.000,00	100	124.794.000,00	100	122.650.000	0	-	0	46.618.547,00	0	45.072.804,00		37.182.700,00	0,00	128.874.051,00	0,00	105,07	100	253.668.051,00	100,00	48,72		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan		540	233.200.000,00	60	56.479.500,00	90	62.270.000	0	-	0	46.618.547,00	0	9.080.000,00		10.856.200,00	0,00	66.554.747,00	0,00	106,88	60	123.034.247,00	11,11	52,76	Seksi Pembangunan Kec. Kedamean	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan FGD		78	287.500.000,00	15	68.314.500,00	4	60.380.000	0	-	0	0,00	0	35.992.804,00		26.326.500,00	0,00	62.319.304,00	0,00	103,21	15	130.633.804,00	19,23	45,44	Seksi Ekonomi Kec. Kedamean	
	7.01.03.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		100	615.000.000,00	100	0,00	100	146.114.000	0	-	0	96.354.554,00	0	28.400.000,00		43.987.700,00	0,00	168.742.254,00	0,00	115,49	100	168.742.254,00	100,00	27,44		
	7.01.03.2.01.01		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah FGD pengembangan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan kedamean		40	525.000.000,00	0	0,00	6	146.114.000	0	-	0	96.354.554,00	0	28.400.000,00	0	32.254.500,00	0,00	157.009.054,00	0,00	107,46	0	157.009.054,00	0,00	29,91	Seksi Kesra Kec. Kedamean	
	7.01.03.2.01.03		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi Online Single Submision (OSS) di kecamatan Kedamean		375	90.000.000,00	0	0,00	0	0	0		0	-	100	-		11.733.200,00	100,00	11.733.200,00	0,00		100	11.733.200,00	26,67	13,04	Seksi Ekonomi Kec. Kedamean	
eria (%)																						0,00	110,74	100,00	422.410.305,00	100,00	37,19		
Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.04	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi		100	399.000.000,00	100	75.943.500,00	100	106.020.000	0	0	0	24.694.329,00	0	3.827.825,00		71.477.800,00	0,00	99.999.954,00	0,00	94,32	100	175.943.454,00	100,00	44,10		
	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum		100	301.500.000,00	100	43.901.500,00	100	36.000.000	0	0	0	23.084.329,00	0	3.827.825,00		19.067.800,00	0,00	45.979.954,00	0,00	127,72	100	89.881.454,00	100,00	29,81		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	301.500.000,00	12	43.901.500,00	12	36.000.000	0	0	0	23.084.329,00	0	3.827.825,00	0	19.067.800,00	0,00	45.979.954,00	0,00	127,72	12	89.881.454,00	16,67	29,81	Seksi Trantib Kec. Kedamean	
	7.01.04.2.01		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan perda dan perkada		100	97.500.000,00	100	32.042.000,00	100	70.020.000	0	0	0	1.610.000,00	0	0,00		52.410.000,00	0,00	54.020.000,00	0,00	77,15	100	86.062.000,00	100,00	88,27		
	7.01.04.2.01.01		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	Laporan	60	97.500.000,00	1	32.042.000,00	6	70.020.000	0	0	0	1.610.000,00	0	0,00		52.410.000,00	0,00	54.020.000,00	0,00	77,15	1	86.062.000,00	1,67	88,27	Seksi Trantib Kec. Kedamean	
eria (%)																						0,00	94,32	100,00	175.943.454,00	100,00	44,10		
Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.05	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100	150.000.000,00	100	0,00	100	0		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100	0,00	100,00	0,00		
	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		100	150.000.000,00	100	0,00	100	0		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100	0,00	100,00	0,00		
	7.01.05.2.01.01		Pemberisiaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah laporan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		5	60.000.000,00	0	0,00	0	0	0		0		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Seksi Trantib Kec. Kedamean	
	7.01.05.2.01.01		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan Forkopimcam	Jumlah pelaksanaan Forkopimcam		10	90.000.000,00	0	0,00	0	0	0		0		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
eria (%)																						0,00	#DIV/0!	100,00	0,00	100,00	0,00		
Kinerja																						Sangat Rendah	#DIV/0!	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.06	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERMANFAATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Presentase	100	478.880.000,00	100	142.812.100,00	100	93.770.000	0	0	0	21.532.354,00	0	3.840.000,00		74.304.400,00	0,00	99.676.754,00	0,00	106,30	100	242.488.854,00	100,00	50,64		
	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		100	478.880.000,00	100	142.812.100,00	100	93.770.000	0	0	0	21.532.354,00	0	3.840.000,00		74.304.400,00	0,00	99.676.754,00	0,00	106,30	100	242.488.854,00	100,00	50,64		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun		180	30.380.000,00	30	9.997.500,00	30	8.300.000	0		0	0,00	0	0,00		8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	100,00	30	18.297.500,00	16,67	60,23	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pemerintahan desa (kegiatan PGD)		65	90.000.000,00	15	25.972.600,00	6	69.120.000	0	0	0	19.104.077,00	0	3.840.000,00		54.432.900,00	0,00	77.376.977,00	0,00	111,95	15	103.349.577,00	23,08	114,83	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa		18	82.500.000,00	3	9.997.500,00	4	6.500.000	0		0	0,00	0	0,00		5.735.000,00	0,00	5.735.000,00	0,00	88,23	3	15.732.500,00	16,67	19,07	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES		14	25.000.000,00	0	2.210.000,00			0		0		0	0,00		3.664.900,00	0,00	3.664.900,00	0,00	0,00	0	5.874.900,00	0,00	23,50	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat		15	86.000.000,00	60	74.639.500,00			0		0		0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	74.639.500,00	400,00	86,79	Seksi Kesra Kec. Kedamean	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.16		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel		18	82.500.000,00	3	9.997.500,00	3	5.250.000	0		0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	9.997.500,00	16,67	12,12	Seksi Pemerintahan Kec. Kedamean	
	7.01.06.2.01.16		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	jumlah pelaksanaan monev pembangunan	18	82.500.000,00	3	9.997.500,00	3	4.600.000	0		0	2.428.277,00	0	0,00		2.171.600,00	0,00	4.599.877,00	0,00	100,00	3	14.597.377,00	16,67	17,69	Seksi Pembangunan Kec. Kedamean	
nerja (%)																						0,00	106,30	100,00	242.488.854,00	100,00	50,64		
			Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program				25.248.117.620,00		3.053.703.124,00		3.311.189.352		551.361.412		1.627.814.405,52		722.588.897,44		347.600.694,60		3.249.365.409,76				6.303.068.533,76				
			TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												1627814406							148,93	98,13			144,54	33,79		
			Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	KECAMATAN MENGANTI																												
	7.01.01	Terfasilitasinya pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah			3.958.100.476,00		3.958.100.476,00		3.394.093.525,00		690.934.870,87		1.040.763.061,80		729.930.369,91		818.518.968,91	96,64	3.280.147.271,49	96,64	96,64	96,64	3.280.147.271,49	96,64	96,64		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			4.944.000,00		4.944.000,00		4.944.000,00		-		823.475,00		1.648.000,00		2.471.900,00	99,99	4.943.375,00	99,99	99,99	99,99	4.943.375,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen																								
	7.01.01.2.01.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.472.000,00	6	2.472.000,00	1	824.000,00		-		-				824.000	100,00	824.000,00	100,00	100,00	100,00	824.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00								823.950	99,99	823.950,00	99,99	99,99	99,99	823.950,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00						824.000			100,00	824.000,00	100,00	100,00	100,00	824.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00						824.000			100,00	824.000,00	100,00	100,00	100,00	824.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	824.000,00				823.475					99,94	823.475,00	99,94	99,94	99,94	823.475,00	99,94	99,94	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.01.06		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kecamatan	Dokumen	12	2.472.000,00	12	2.472.000,00	1	824.000,00		-						823.950	99,99	823.950,00	99,99	99,99	99,99	823.950,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
																						299,96	299,96	299,96	2.471.687,50	299,96	299,96		
																					Predikat Kinerja					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.02	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan baik (ASN Kecamatan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.332.582.100,00		3.332.582.100,00		2.759.373.270,00		587.856.580,87		858.289.309,80		617.743.097,91		600.328.866,91	96,55	2.664.217.855,49	96,55	96,55	96,55	2.661.934.255,49	96,55	96,55		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN Kantor Kecamatan Menganti	OB	23	3.330.298.100,00	23	3.330.298.100,00	23	2.757.089.582,00		587.856.580,87		857.147.309,80		617.743.097,91		599.187.266,91	96,55	2.661.934.255,49	96,55	96,55	96,55	2.661.934.255,49	96,55	96,55	Kecamatan Menganti	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporam	1	2.284.000,00	1	2.284.000,00	1	1.141.688,00		-						1.141.600,00	99,99	1.141.600,00	99,99	99,99	99,99	1.141.600,00	99,99	99,99	Kecamatan Menganti	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah buku susunan laporan keuangan perbulan/pertriwulan persemester	Laporam	1		1		1	1.142.000,00				1.142.000,00					100,00	1.142.000,00	100,00	100,00	100,00	1.142.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	96,55	96,55	96,55	1.331.537.927,75	96,55	96,55		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.06	Terwujudnya Administrasi Umum Perkantoran dengan baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran			183.841.700,00		183.841.700,00		208.460.579,00		-		47.162.783,00		36.404.550,00		96.481.050,00	86,37	180.048.383,00	86,37	86,37	86,37	180.048.383,00	86,37	86,37	Kecamatan Menganti	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kntor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	14.644.000,00	4	14.644.000,00	1	14.646.000,00		-				8.135.000		6.511.000	100,00	14.646.000,00	100,00	100,00	100,00	14.646.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	32	41.820.600,00	32	41.820.600,00	1	22.501.870,00		-		9.256.597,00		5.663.100		7.581.700	100,00	22.501.397,00	100,00	100,00	100,00	22.501.397,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1	14.160.000,00				4.810.000,00		4.270.000		5.080.000	100,00	14.160.000,00	100,00	100,00	100,00	14.160.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan dan minum	Paket	7	83.478.000,00	7	83.478.000,00	1	50.780.260,00				22.998.720,00		14.125.200		13.656.300	100,00	50.780.220,00	100,00	100,00	100,00	50.780.220,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan OPD Kecamatan	Paket	2	8.066.100,00	2	8.066.100,00	1	7.830.899,00				3.227.966,00		1.601.250		3.001.600	100,00	7.830.816,00	100,00	100,00	100,00	7.830.816,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	24	2.976.000,00	24	2.976.000,00	12	2.972.700,00				1.560.000,00		780.000		630.000	99,91	2.970.000,00	99,91	99,91	99,91	2.970.000,00	99,91	99,91	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	230	32.857.000,00	230	32.857.000,00	1	32.916.000,00				3.159.500,00		410.000		12.100.000	47,60	15.669.500,00	47,60	47,60	47,60	15.669.500,00	47,60	47,60	Kecamatan Menganti	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	62.652.850,00				2.150.000,00		1.420.000		47.920.450	82,18	51.490.450,00	82,18	82,18	82,18	51.490.450,00	82,18	82,18		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	107,92	107,92	107,92	21.426.322,17	107,92	-		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.08	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Operasional dan Jasa kegiatan Kantor			273.697.676,00		273.697.676,00		300.205.676,00		23.606.290,00		116.899.494,00		65.734.722		105.495.952	103,84	311.736.458,00	103,84	103,84	104	311.736.458,00	103,84	103,84	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon OPD Kecamatan	Laporan	3	39.547.676,00	3	39.547.676,00	12	39.547.676		1.902.881,00		29.981.639,00		3.612.344		19.773.575	139,76	55.270.439,00	139,76	139,76	139,76	55.270.439,00	139,76	139,76	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan	8	234.150.000,00	8	234.150.000,00	8	260.658.000		21.703.409,00		86.917.855,00		62.122.378		85.722.377	98,39	256.466.019,00	98,39	98,39	98,39	256.466.019,00	98,39	98,39	Kecamatan Menganti	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	119,07	119,07	119,07	155.868.229,00	119,07	119,07		
																					Predikat Kinerja		#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.09	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan			163.035.000,00		163.035.000,00		121.110.000,00		79.472.000,00		17.588.000,00		8.400.000		13.741.200	98,42	119.201.200,00	98,42	98,42	98,42	119.201.200,00	98,42	98,42	Kecamatan Menganti	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.09.01	baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas OPD Kecamatan	Unit	2	71.200.000,00	2	71.200.000,00	2	37.600.000,00		2.800.000,00		14.000.000,00		8.400.000		10.491.200	94,92	35.691.200,00	94,92	94,92	94,92	35.691.200,00	94,92	94,92	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Unit	1	79.695.000,00	1	79.695.000,00	1	77.280.000,00		76.672.000,00		608.000,00					100,00	77.280.000,00	100,00	100,00	100,00	77.280.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya aset milik daerah	Jenis	6	12.140.000,00	6	12.140.000,00	6	6.230.000,00				2.980.000,00				3.250.000	100,00	6.230.000,00	100,00	100,00	100,00	6.230.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		98,31	98,31	98,31	39.733.733,33	98,31	98,31		
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.02	Peningkatan Pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			13.892.000,00		13.892.000,00		11.091.831,00		-		-		0		11.091.800	100,00	11.091.800,00	100,00	100,00		-			Kecamatan Menganti	
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat			13.892.000,00		13.892.000,00		11.091.831,00		-						11.091.800	100,00	11.091.800,00	100,00	100,00	100	-	0,00	0,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan Masyarakat	Laporan	1	13.892.000,00	1	13.892.000,00	1	11.091.831,00		-						11.091.800	100,00	11.091.800,00	9.999,97	9.999,97			0,00	0,00	Kecamatan Menganti	
																							######			0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja			#DIV/0!			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03	Terlaksananya RKPDes tepat waktu dan lembaga ekonomi masyarakat berjalan dengan lancar (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			137.370.000,00		137.370.000,00		143.002.967,00		-		102.412.410,00		2.550.000		30.332.500	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	Kecamatan Menganti	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa			137.370.000,00		137.370.000,00		143.002.967,00		-		102.412.410,00		2.550.000		30.332.500	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	94,61	135.294.910,00	94,61	94,61	Kecamatan Menganti	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan	22	54.810.000,00	22	54.810.000,00	5	31.240.000,00				24.240.000,00					77,59	24.240.000,00	77,59	77,59	77,59	24.240.000,00	77,59	77,59	Kecamatan Menganti	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecaatan	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga yang ada di desa	Laporan	5	82.560.000,00	5	82.560.000,00	5	111.762.967,00		-		78.172.410,00		2.550.000		30.332.500	99,37	111.054.910,00	99,37	99,37	99,37	111.054.910,00	99,37	99,37	Kecamatan Menganti	
																						88,48	88,48	88,48	67.647.455,00	88,48	88,48		
																							#DIV/0!			Tinggi	Tinggi		
	7.01.04	Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman serta penyelesaian konflik secara damai	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah kecamatan			74.432.000,00		74.432.000,00		94.279.300,00		-		19.700.000,00		10.100.000		64.479.247	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			74.432.000,00		74.432.000,00		94.279.300,00		-		19.700.000,00		10.100.000		64.479.247	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Kecamatan	Laporan	3	74.432.000,00	3	74.432.000,00	12	94.279.300,00		-		19.700.000,00		10.100.000		64.479.247	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00	100,00	94.279.247,00	100,00	100,00		
																				Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.06	Terwujudnya APBDes Dengan Tepat Waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan			112.790.000,00		112.790.000,00		54.180.000,00		-		0,00		0,00		40.170.000,00	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			112.790.000,00		112.790.000,00		54.180.000,00		-		0,00		0,00		40.170.000,00	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	74,14	40.170.000,00	74,14	74,14	Kecamatan Menganti	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Evahuasi APBDes dari perangkat Desa	orang	44	10.510.000,00	44	10.510.000,00	44	10.590.000,00		0,00				0		10.590.000,00	100,00	10.590.000,00	100,00	100,00	100,00	10.590.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa	Dokumen	1	21.020.000,00	1	21.020.000,00	1	7.790.000,00		-						7.790.000,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Dokumen	1	49.730.000,00	1	49.730.000,00	1	20.220.000,00		-						6.210.000,00	30,71	6.210.000,00	30,71	30,71	30,71	6.210.000,00	30,71	30,71	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa Yang Tertib dan Aman	Dokumen		-		-	0	-		-						-	#DIV/0!	-				-		#DIV/0!	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksana monef, penggunaan dana desa	Dokumen	1	21.020.000,00	1	21.020.000,00	1	7.790.000,00		-						7.790.000,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
	7.01.06.2.01.16		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Profil Desa dan Profil Kecamatan yang disusun	Laporan	1	10.510.000,00	1	10.510.000,00	1	7.790.000,00		-						7.790.000,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	100,00	7.790.000,00	100,00	100,00	Kecamatan Menganti	
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			4.296.584.476,00		4.296.584.476,00		3.696.647.623,00	18,69	690.934.870,87	31,46	1.162.875.471,80	39,79	1.470.862.739,82	26,09	964.592.515,91	96,33	3.560.983.228,49	96,33	#######	96,33	3.560.983.228,49	96,33	96,33		
																						99,67	93,33			99,67	93,33		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN SIDAYU																												
			URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SIDAYU			100	25.031.213.059	92,32	8.330.475.316	100	3.976.844.100	16,88	671.472.261,25	27,42	1.090.574.179,88	22,09	878.611.507,80	24,01	954.744.266,17	90,41	3.595.402.215,10	90,41	90,41	183	11.925.877.531	183	47,64		
	7.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	PROGIRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	21.773.669.143	33	7.275.086.816	100	3.478.762.581	19,30	671.472.261,25	27,31	950.018.924,88	20,64	718.008.083,80	21,99	765.026.466,17	89,24	3.104.525.736,10	89,24	89,24	123	10.379.612.552	123	47,67		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	214.602.500	10	22.500.500	100	14.999.195	-	-	9,43	1.415.010	27,53	4.129.595	46,23	6.934.590	83,20	12.479.195	83,20	83,20	94	34.979.695	94	16,30	Subbag UP	
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD (2021-2022)	buku	3	5.000.000	1	7.065.000					-	-					-	-			1	7.065.000	33,33	141,30		
				Jumlah buku rencana kerja SKPD (2023-2026)	dokumen	5	29.000.000	1	570.000	1	2.999.839						621.585	1	1.538.254	1,00	2.159.839	100,00	72,00	2	2.729.839	40	9,41		
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA (2021-2022)	buku	10	5.000.000	5	2.558.000															5	2.558.000	50,00	51,16		
				Jumlah Dokumen RKA (2023-2026)	dokumen	4	24.320.500			1	2.999.839						1.718.760	1,00	1.281.079	1,00	2.999.839	100,00	100,00	1	2.999.839	25	12,33		
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2021-2022)	buku	10	5.000.000	5	2.544.000															5	2.544.000	50,00	50,88		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2023-2026)	dokumen	4	24.320.500													-	-			0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (2021-2022)	buku	17	5.000.000	5	2.490.000															5	2.490.000	29,41	49,80		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen DPA SKPD (2023-2024)	dokumen	4	24.320.500			1	2.999.839						1.789.250	1,00	1.210.589	1,00	2.999.839	100,00	100,00	1	2.999.839	25	12,33		
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2021-2022)	buku	13	5.000.000	5	2.179.000															5	2.179.000	38,46	43,58		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2023-2026)	dokumen	4	24.320.500			1	2.999.839							1,00	2.159.839	1,00	2.159.839	100,00	72,00	1	2.159.839	25	8,88		
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (2021-2022)	laporan	10	5.000.000	5	5.094.500											-	-			5	5.094.500	50,00	101,89		
				Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (2023-2026)	laporan	48	29.000.000			6	2.999.839			3	1.415.010			3	744.829	6	2.159.839	100,00	72,00	6	2.159.839	13	7,45		
	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi (2021-2022)	laporan	2	5.000.000																	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi (2022-2023)	laporan	8	24.320.500																	0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		bulan	12	18.358.353.036	12	6.254.971.331	12	2.950.448.839	3	614.444.854,25	3	835.609.262,88	3,00	583.817.453	3,00	571.031.621,17	12	2.604.903.191,10	100,00	88,29	24	8.859.874.522	200	48,26	Subbag UP	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan (2021-2022)	orang	24	4.989.681.721	24	3.236.501.374												2.602.743.352,10			24	5.839.244.726	100,00	117,03		
				Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan (2023-2026)	orang/bulan	24	13.320.630.515	24	3.013.006.957	24	2.947.449.000	6	614.444.854,25	6	835.609.262,88	6	583.817.452,80	6,00	568.871.782,17	24	2.602.743.352,10	100,00	88,30	48	5.615.750.309	200	42,16		
	7.01.01.2.02.0001		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanean Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun (2021-2022)	buku	1	5.000.000	1	1.860.000											-	-			1	1.860.000	100,00	37,20		
				Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun (2023-2026)	laporan	4	25.025.500	1	2.190.000	1	2.999.839							1,00	2.159.839	1,00	2.159.839	100,00	72,00	2	4.349.839	50	17,38		
			Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD (2021-2022)	laporan	3	3.000.000	2	1.413.000															2	1.413.000	66,67	47,10		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD (2023-2026)	laporan	72	15.015.300			0	0	-	-							-	-			0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Anaratur di Kecamatan	orang	156	53.071.000	66	62.346.300	35	11.324.780	0	-	0	-	0	3.775.545	0	5.445.235	35	9.220.780,00	100,00	81,42	101	71.567.080	65	134,85	Subbag UP	
	7.01.01.2.05.0009		Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (2021-2022)	orang	32	18.785.500	31	55.956.900															31	55.956.900	96,88	297,87		
				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (2022-2023)	orang	124	34.285.500	35	6.389.400	35	11.324.780	-	-				3.775.545		5.445.235	35	9.220.780	100,00	81,42	70	15.610.180	56	45,53		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	bulan	12	748.176.802	12	172.517.400	12	94.599.488	-	-	23,23	21.976.030	41,42	39.179.271	33,76	31.933.537	98,40	93.088.838	820,03	98,40	110	265.606.238	920	35,50	Subbag UP	
	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Listrik (2021-2022)	buah	54	3.000.000	54	3.000.000															54	3.000.000	100,00	100,00		
				Jumlah belanja Komponen Listrik (2023-2026)	paket	4	32.961.500	1	1.478.000	1	10.258.858		-		3.007.322		2.261.250		4.990.286	1	10.258.858	100,00	100,00	2	11.736.858	50	35,61		
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (2021-2022)	jenis	108	112.381.421	50	63.937.000															50	63.937.000	46,30	56,89		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (2022-2023)	paket	32	108.564.000	8	43.614.500	8	44.560.218			2,00	11.116.897	4,00	20.016.940	2	13.426.381	8	44.560.218	100,00	100,00	16	88.174.718	50	81,22		
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum (2021-2022)	kegiatan	36	24.219.000	14	11.442.000				-							-	-			14	11.442.000	38,89	47,24		
				Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum (2023-2026)	paket	76	55.818.038		2.603.000	19	4.564.400			5	1.134.900	5	1.035.500	9	2.210.000	19	4.380.400	100,00	95,97	19	6.983.400	25	12,51		
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (2021-2022)	jenis	4	16.380.976	2	15.380.800				-							-	-			2	15.380.800	50,00	93,89		
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan (2023-2026)	paket	16	52.519.287		7.610.000	4	7.496.900			1	1.895.180	1	2.280.850	2	3.320.870	4	7.496.900	100,00	100,00	4	15.106.900	25	28,76		
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (2021-2022)	jenis	2	3.600.000	1	1.800.000															1	1.800.000	50,00	50,00		
				Jumlah bahan bacaan (2023-2026)	dokumen	48	8.035.380	9	1.029.000	12	1.944.000			4	486.000	4	486.000	4	486.000	12	1.458.000	100,00	75,00	21	2.487.000	44	30,95		
	7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materai/Buku cek (2021-2022)	lembar	300	32.784.600	228	2.508.000															228	2.508.000	76,00	7,65		
				Jumlah Materai/Buku cek (2023-2026)	paket	4	26.784.600			607	6.070.000			150	1.500.000	187	1.870.000	270	2.700.000	607	6.070.000	100,00	100,00	607	6.070.000	15.175	22,66		
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi (2021-2022)	bulan	24	39.000.000	68,11	9.660.000															68	9.660.000	283,80	24,77		
				Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi (2023-2026)	laporan	48	44.641.000	12	8.455.100	12	11.100.000			3,00	1.840.000	4,00	3.680.000	5,00	4.800.000	12	10.320.000	100,00	92,97	24	18.775.100	50	42,06		
	7.01.01.2.06.0011.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PBE pada SKPD (2024-2026)	dokumen	5	187.487.000			1	8.605.112				995.731		7.548.731			1	8.544.462	100,00	99,30						
	7.01.01.27		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Kecamatan Sidayu	jenis	30	287.846.000	4	73.275.000		-		-		-		-		-	-	-			4	73.275.000	13	25,46	Subbag UP	
	7.01.01.27.5		Pengadaan Mebel	Jumlah belanja pengadaan mebel kantor (2021-2022)	jenis	1	30.000.000	1	20.475.000											-	-			1	20.475.000	100,00	68,25		
				Jumlah belanja pengadaan mebel kantor (2023-2024)	unit	4	197.846.000	1	12.000.000											-	-			1	12.000.000	25	6,07		
	7.01.01.27.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (2021-2022)	jenis	5	30.000.000	4	40.800.000											-	-			4	40.800.000	80,00	136,00		
				Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (2023-2026)	unit	5	30.000.000													-	-			0	-	-	0,00		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		bulan	72	1.427.057.323	100	511.861.685	100	336.129.813	16,09	54.082.507	23,53	79.081.672	22,70	76.308.148	31,77	106.788.039	94,09	316.260.366	94,09	94,09	194	828.122.051	270	58,03	Subbag UP	
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik (2021-2022)	bulan	24	108.499.443	12	22.274.235											-	-			12	22.274.235	50,00	20,53		
				Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik (2023-2026)	bulan	48	221.630.600	12	46.894.130	12	38.783.313	3	4.752.147	3	7.348.282	3	8.049.058	3	10.163.419	12,00	30.312.906	100,00	78,16				0,00		
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa adm. kantor (2021-2022)	bulan	24	321.600.000	12	160.800.000															12	160.800.000	50,00	50,00		
				Jumlah lap. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan (2023-2026)	laporan	48	775.327.280	12	281.893.320	12	297.346.500	2	49.330.360	3	71.733.390	2	68.259.090	3	96.624.620	10	285.947.460	83,33	96,17	22	567.840.780	46	73,24		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi pemerliharaan thd sarana prasarana aparatur	bulan	100	684.562.482	100	177.614.600	100	71.260.466	4,13	2.944.900	16,75	11.936.950	15,15	10.798.072	60,19	42.893.444	96,23	68.573.366	96,23	96,23	196	246.187.966	196	35,96	Subbag UP	
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan (2021-2022)	bulan	24	49.999.950	12	17.264.300															12	17.264.300	50,00	34,53		
				Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan (2023-2024)	unit	24	101.243.500	6	16.403.300	6	33.258.666	1,00	2.944.900	2,00	9.436.950	1,00	5.223.072	2,00	12.966.644	6	30.571.566	100,00	91,92	12	46.974.866	50	46,40		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= =6/7x100		18	19
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya (2021-2022)	unit	6	96.115.800	3	124.297.000															3	124.297.000	50,00	129,32		
				Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya (2023-2026)	unit	12	350.333.000			3	27.736.800							3	27.736.800	3	27.736.800	100,00	100,00	3	27.736.800	25	7,92		
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor (2021-2022)	unit	40	24.943.732	40	14.900.000															40	14.900.000	100,00	59,73		
				Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor (2023-2026)	unit	80	61.926.500	15	4.750.000	15	10.265.000			4,00	2.500.000	8	5.575.000	3	2.190.000	15	10.265.000	100,00	100,00	30	15.015.000	38	24,25		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		89,24	89,24			122,65	47,67		
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	116.191.994	100	12.839.900	100	3.939.762	-	-	-	-		-		3.939.762	100,00	3.939.762	100,00	100,00	3	16.779.662	3	14,44		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		147	116.191.994	147	12.839.900	147	3.939.762	-	-	-	-		-		3.939.762	147	3.939.762	100,00	100,00	90	16.779.662	61	61,22	Seksi Pemerintahan	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Sidayu	Jumlah peserta sosialisasi Administrasi Kependudukan (2021-2022)	orang	294	69.559.994	147	12.839.900															147	12.839.900	50,00	18,46		
				Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat (2023-2026)	laporan	4	46.632.000			1	3.939.762							1	3.939.762	1	3.939.762	100,00	100,00	1	3.939.762	25	8,45		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			61,22	61,22		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		persen	100	1.966.737.429	100	663.418.200	100	299.212.682	-	0	37,36	111.781.335	27,85	83.319.933	32,39	96.906.374	97,59	292.007.642	97,59	97,59	198	955.425.842	198	48,58		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	persen	100	854.506.489	100	394.742.000	100	179.582.360	-	0	25,68	46.121.650	27,66	49.666.010	42,65	76.594.700	95,99	172.382.360	95,99	95,99	196	567.124.360	195,99	66,37		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang (2021-2022)	orang	200	89.745.500	100	113.105.000															100	113.105.000	50,00	126,03	Seksi Pembangunan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum Musrenbang(2023-2026)	Lembaga	28	205.000.000		55.429.000	7	75.616.500	-	-		32.543.200		19.240.900		23.832.400	7	75.616.500	100,00	100,00	7	131.045.500	25	63,92		
	7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan	Jumlah buku RKPDes (2021-2022)	buku	21	15.000.000	21	45.158.000															21	45.158.000	100,00	301,05	Seksi Pembangunan	
				Jumlah buku RKPDes (2023-2026)	dokumen	84	65.000.000		8.985.000	21	36.486.500		-				5.790.000		30.696.500	21	36.486.500	100,00	100,00	21	45.471.500	25	69,96		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kopwan, Bumdes (2021-2022)	kegiatan	45	152.760.989	25	146.065.000															25	146.065.000	55,56	95,62	Seksi Ekonomi	
				Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2023-2026)	laporan	92	327.000.000		26.000.000	23	67.479.360		-		13.578.450		24.635.110		22.065.800	23	60.279.360	100,00	89,33	23	86.279.360	25	26,39		
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100	1.112.230.940	100	268.676.200	100	119.630.322				65.659.685		33.653.923		20.311.674	-	119.625.282	-	100,00	100	388.301.482	100	34,91		
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina (2021-2022)	Lembaga	10	294.632.940	5	217.575.700															5	217.575.700	50,00	73,85	Seksi Kesra	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina (2023-2026)	Lembaga	20	817.598.000		51.100.500	5	119.630.322			0	65.659.685		33.653.923		20.311.674	5	119.625.282	100,00	100,00	5	170.725.782	25	20,88		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		97,59	97,59			197,59	48,58		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM			100	627.980.000	100	241.220.100	100	99.818.791	-	-	11,10	11.080.085	34,07	34.010.520	54,83	54.728.186	100,00	99.818.791	100,00	100,00	200	341.038.891	200	54,31		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		bulan	12	491.598.923	12	158.661.900	12	72.848.740	3	-	3	11.080.085		18.421.920		43.346.735	6	72.848.740	50,00	100,00	18	231.510.640	150,00	47,09		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan Linmas desa se kec. (2021-2022)	orang	50	118.809.000	25	50.726.900															25	50.726.900	50,00	42,70	Kasi Trantib	
				Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal	laporan	48	292.475.667	12	33.192.900	12	45.918.743			3	11.080.085	3	10.730.170	6	24.108.488	12	45.918.743	100,00	100,00	24	79.111.643	50	27,05		
	7.01.04.2.01.02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Konflik/Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitasi (2021-2022)	orang	28	10.000.000	28	59.642.100															28	59.642.100	100,00	596,42	Kasi Trantib	
				Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (2023-2026)	laporan	48	70.314.256		15.100.000	12	26.929.997		-		7.691.750		19.238.247			12	26.929.997	100,00	100,00	12	42.029.997	25	59,77		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pelanggaran yang tertangani	persen	100	136.381.077	100	82.558.200	19,78	26.970.051		-	-	-	57,80	15.588.600	42,20	11.381.451	100,00	26.970.051	505,68	100,00	200	109.528.251	200,00	80,31		
	7.01.04.2.02.01		Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada (2021-2022)	kali	8	35.060.000	4	67.338.200																4	67.338.200	50,00	192,07	Kasi Trantib	
				Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI (2023-2026)	laporan	32	101.321.077		15.220.000	8	26.970.051	-		-		4	15.588.600	4	11.381.451	8	26.970.051	100,00	100,00	8	42.190.051	25	41,64		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			200,00	54,31		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14.508.000																	0	-		-		
	7.01.05.2.01		Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.508.000																	0	-		-		
	7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan	peserta	480	14.508.000													-	-	-	0,00	0	-	-	0,00		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			0,00	0,00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persen	100	532.126.493	100	137.910.300	100	95.110.284	-	-	18,60	17.693.835	45,50	43.272.971	35,90	34.143.478	100,00	95.110.284	100,00	100,00	200	233.020.584	200	43,79		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa		persen	100	532.126.493	100	137.910.300	100	95.110.284	-	-	18,60	17.693.835	45,50	43.272.971	35,90	34.143.478	100,00	95.110.284	100,00	100,00	200	233.020.584	200,00	43,79		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peraturan Desa (2021-2022)	buku	42	36.872.000	21	15.938.000															21	15.938.000	50,00	43,23	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa (2023-2026)	dokumen	84	62.000.000			21	3.407.743					21,00	3.407.743			21	3.407.743	100,00	100,00	21	3.407.743	25	5,50		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina (2021-2022)	desa	42	45.980.000	42	28.674.000															42	28.674.000	100,00	62,36	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (2023-2026)	dokumen	84	23.495.000		17.260.000	21	43.301.941		-		14.414.441		14.443.750		14.443.750	21	43.301.941	100,00	100,00	21	60.561.941	25	257,77		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa (2021-2022)	desa	42	40.089.993	63	21.414.900															63	21.414.900	150,00	53,42	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Yg difasilitasi dlm rangka Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa (2023-2026)	dokumen	84	67.212.000	21	3.279.900	21	3.279.394		-	21	3.279.394					21	3.279.394	100,00	100,00	42	6.559.294	50	9,76		
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa (2021-2022)	orang	252	63.367.500	90	30.219.500															90	30.219.500	35,71	47,69	Seksi Pemerintahan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa (2023-2026)	dokumen	24	132.798.000		10.090.000	4	45.121.206		-			2	25.421.478	2,00	19.699.728	4	45.121.206	100,00	100,00	4	55.211.206	17	41,58		
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi & Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg dibina	lembaga	3	15.000.000													-	-			0	-	0,00	-	Seksi Kesra	
			Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kenala Desa	Jumlah Desa yang menaadakan PILKADES	desa	21	15.000.000													-	-			0	-	0,00	-	Seksi Pemerintahan	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pembinaan BPD (2021-2022)	kali	4	15.156.000	3	11.034.000															3	11.034.000	75,00	72,80	Seksi Pemerintahan	
				Jumlah dok. Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD (2023-2026)	dokumen	4	15.156.000			0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0	-	-	0,00		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			200,00	43,79		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program							-																		
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	97,37	97,37			156,29	51,11		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN UJUNG PANGKAH																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2.	KECAMATAN UJUNGPANGKAH			100	3.493.290.492	100	4.361.532.100,00	100	3.488.257.560	34	1.189.534.382	47	1.624.214.721	-	18.486.846.900	-	321.948.599	80,66	2.305.509.285,64	80,66	66,09	180,66	6.667.041.385,64		190,85		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		12 bln	3.130.734.052	100	3.412.513.500,00	100	3.138.233.713	38	1.181.092.382	49	1.533.801.921	-	18.414.274.800	-	175.414.149	87	2.158.974.835,64	86,51	68,80	187	5.571.488.335,64		177,96		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan		30 bk	13.843.586	5	8.500.000,00	5	13.843.247	-	-		3.517.950				2.087.000	-	6.976.500,00	0,00	50,40	5	15.476.500,00		111,80		
	7.01.01.2.01.01			INDIKATOR 2021 - 2022	Buku	30	-	1	-		-													1	-	3,33	#DIV/0!	Kasubag Umum	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INDIKATOR 2023 - 2026	Dokumen	30	2.949.981		5.500.000	30	2.949.981	30	-	-	-	5	742.500,00	-	742.500,00	30	742.500,00	100,00	25,17	30	6.242.500,00	100,00	211,61	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		30	3.609.512	2	6.000.000,00	30	3.609.512	30	-	10	965.700,00	4	1.114.200,00		1.114.200,00	30	1.114.200,00	100,00	30,87	`	7.114.200,00		197,10	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40	3.433.377	2	6.000.000,00	40	3.433.377	40	-	20	1.520.800,00	6	3.032.800,00		3.032.800,00	40	3.032.800,00	100,00	88,33		9.032.800,00		263,09	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		30 bk	3.850.716	12	8.500.000,00	12 bln	3.850.377	-	-	5 bln	1.031.450,00	4	2.087.000,00		2.087.000,00	5	2.087.000,00	0,00	54,20		10.587.000,00		274,94	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan		12 bln	2.690.389.087	2	2.857.379.000,00	100	2.690.389.087	21	571.868.574	52	1.410.579.989	0	939.800		939.800	74	1.979.610.986,64	73,72	73,58	76	4.836.989.986,64		179,79		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Bulan - Persen - Orang - Tahun (2021-2022)	12	2.686.550.689	12	2.848.879.000,00	12	2.686.550.689	3 bln	-											12	3.719.298.386,00	100,00	138,44		
					Orang/Bulan (2023-2026)	12	2.683.550.689			12	2.683.550.689	17	571.868.574	17	1.410.579.989,00	17	1.978.671.186,64	17	1.978.671.186,64	17	1.978.671.186,64	17,00	74%	17	1.978.671.186,64	141,67	73,73	Kasubag keuanagn	
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8	3.838.398	8	8.500.000,00	8	3.838.398	8	-	8	-	8	939.800,00	8	939.800,00	32	939.800,00	100,00	24,48		9.439.800,00		245,93	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan		2	-	2	7.500.000,00	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,00	0,00	0	7.500.000,00		#DIV/0!		
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perusdang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	100	7.500.000,00	0	7.500.000	20	-		-	-	0,00			20	0,00	0,00	0,00		7.500.000,00		-		
	7.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	30	-	30	-		-		-		0,00			-	0,00	0,00	0,00		-		-		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum		5	139.248.553	5	218.216.500,00	100	139.248.553	411	571.868.574	18	25.526.000	34	47.886.000		52.991.000	463	52.991.000,00	463,40	38,05	468	271.207.500,00		194,77		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bln	69.485.078	44	130.230.500,00	11	69.485.078	-	-	5	12.921.000,00	10	29.291.000,00		29.291.000,00	10	29.291.000,00	90,91	42,15		159.521.500,00		229,58	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 bln	25.782.750	3	38.000.000,00	12	25.782.750	-	-	3	5.550.000,00	8	14.695.000,00		14.695.000,00	11	14.695.000,00	91,67	57,00		52.695.000,00		204,38	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 bln	7.243.075	1	19.606.000,00	12	7.243.075	-	-	1	1.950.000,00	6	3.900.000,00		3.900.000,00	7	3.900.000,00	58,33	53,84		23.506.000,00		324,53	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 bln	2.079.000	3	4.380.000,00	12	2.079.000	-	-	3	-	8			0,00	11	0,00	91,67	0,00		4.380.000,00		210,68	Kasubag Umum	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bln	17.920.000	2	26.000.000,00	12	17.920.000	-	-	6	5.105.000,00	8			5.105.000,00	6	5.105.000,00	50,00	28,49		31.105.000,00		173,58	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.06.011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan PBSE SKPD		2 pkt	16.738.650		-		16.738.650	-	-		-		0,00		0,00		0,00		0,00		-		-		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	221.976.000		196.250.000,00	100	221.976.000	17	37.355.234	41	91.913.982		18.365.449.000		99.882.349	58	99.882.349,00	58,24	45,00	58	296.132.349,00		133,41		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bln	186.534.000	12	148.800.000,00	12	186.534.000	3	31.066.860	6	77.620.800,00	9			77.620.800,00	6	77.620.800,00	50,00	41,61		226.420.800,00		121,38	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bln	26.577.000	12	30.450.000,00	12	26.577.000	3	6.288.374	6	12.793.182,00	9	18.361.549.000,00		18.361.549,00	6	18.361.549,00	50,00	69,09		48.811.549,00		183,66	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bln	8.865.000	3	17.000.000,00	3	8.865.000	-	-	3	1.500.000,00	-	3.900.000,00		3.900.000,00	3	3.900.000,00	100,00	43,99		20.900.000,00		235,76		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara		12	33.600.000		67.200.000,00		33.600.000																		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	33.600.000		67.200.000,00	12	65.276.826	-	-	12	8.864.000,00				8.864.000,00	4	8.864.000,00	4	13,58		76.064.000,00		226,38		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara		5	31.676.826	5	124.668.000,00	100	31.676.826	-	-	7	2.264.000	-	-	31	19.514.000	38	19.514.000,00	38,15	61,60	43	144.182.000,00		455,17		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 bln	7.142.326	4	41.482.000,00	12	7.142.326	-	-	2	300.000,00	8	0,00		300.000,00	2	300.000,00	16,67	4,20		41.782.000,00		584,99	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 bln	7.284.500	3	10.925.000,00	12	7.284.500	-	-	2	1.964.000,00	7	0,00		1.964.000,00	2	1.964.000,00	16,67	26,96		12.889.000,00		176,94	Kasubag Umum	
	7.01.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		12 bln	17.250.000	1	72.261.000,00	12	17.250.000	-	-	1	-	-	0,00		17.250.000,00	1	17.250.000,00	8,33	0,00		89.511.000,00		518,90	Kasubag Umum	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	8,33	2,10						
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	7.533.000		-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		4	7.533.000		-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	-	-		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	7.533.000		-	0	-	#DIV/0!	-		-		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00		-		-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	#DIV/0!	34,40						
																					Predikat Kinerja	#DIV/0!	Sangat Rendah						
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100	123.808.599	100	220.500.000,00	100	123.808.599	7	8.442.000	30	37.005.800	59	72.572.100	37	61.142.000	132	61.142.000,00	132,32	49,38	232	281.642.000,00		227,48		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan		21	123.808.599	21	220.500.000,00	21	123.808.599	21	8.442.000	21	37.005.800	21	72.572.100	21	61.142.000	84	61.142.000,00	400,00	49,38	105	281.642.000,00		227,48		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembaneunan di Desa		13 Desa	34.559.056	21	87.540.000,00	13	34.559.056	21	8.442.000,00	13	34.324.000,00	13	0,00		34.324.000,00	13	34.324.000,00	100,00	99,32		121.864.000,00		352,63	Kasi Pembangunan	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13/12 bln	36.749.542	120	132.960.000,00	13/12 bln	36.749.542	1	-	13/12 bln	2.681.800,00	13	0,00		26.818.000,00	13/12 bln	26.818.000,00	0,00	72,98		159.778.000,00		434,78	Kasi Ekonomi	
	7.01.03.2.01.08	Peningkatan Kapasaitas Lembaga Lembaga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		KUMULATIF	13/12 bln	52.500.001	13/12 bln	19.500.000,00	13/12 bln	52.500.001	-	-	13	13.950.600,00	13	0,00		13.950.600,00	13/12 bln	13.950.600,00	0,00	26,57	0	-		-		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	132,32	49,38						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100	79.900.202	100	208.179.000,00	100	79.900.202	-	-	-	-	-	-	51	14.445.000	51	14.445.000,00	51,00	18,08	151	222.624.000,00		278,63		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan		12	79.900.202	24	208.179.000,00	12	79.900.202	3	-	3	-	3	-	3	14.445.000	12	14.445.000,00	100,00	18,08	36	222.624.000,00		278,63		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		13/12 bln	79.900.202	12	208.179.000,00	13/12 bln	79.900.202	3	-	3	-	7	0,00		14.445.000,00	13	14.445.000,00	0,00	18,08		222.624.000,00		278,63	Kasi Trantib	
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12		12		12		-		3		6		6		15		125,00	0,00	27		-	#DIV/0!		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	112,50	9,04						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100	151.314.639	100	520.339.600,00	100	146.315.046	-	-	37	53.407.000	-	-	43	70.947.450	80	70.947.450,00	79,50	48,49	180	591.287.050,00		390,77		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	151.314.639	21	520.339.600	21	146.315.046	21	-	21	53.407.000	21	-	21	70.947.450	84	70.947.450,00	400,00	48,49	105	141.894.948,49		93,77		
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		13 Desa	6.500.064	11	50.709.900,00	11	6.500.064	-	-	-	-	13	0,00		6.500.064,00	13	6.500.064,00	118,18	100,00		57.209.964,00		880,14	Kasi Pemerintah	
	7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		13 desa	11.499.657	44	59.480.000,00	44	6.500.064	11	-	11	-	13	0,00		6.500.064,00	35	6.500.064,00	79,55	100,00		65.980.064,00		573,76	Kasi Pemerintah	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		13 desa	4.500.322	11	59.479.900,00	11	4.500.322	-	-		-	13	0,00		4.500.322,00	13	4.500.322,00	118,18	100,00		63.980.222,00		1.421,68	Kasi Pemerintah	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		13/12 bln	115.499.840	100	234.040.000,00	13/12 bln	115.499.840	1	-	45	53.407.000,00	1	0,00		53.447.000,00	45	53.447.000,00	0,00	46,27		287.487.000,00		248,91		
	7.01.06.2.01.16		Rekomendasi Pengangkatan Pengangkatan dan Peberhetian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		0	-			0	-	-	-	1	-		0,00		0,00	1	0,00	0,00	0,00		-		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.17		Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemabngunan Desa	Jumlah Fasilitasi Singkronisasi perecanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		13 desa	13.314.756	21	116.629.800,00	13/12 bln	13.314.756	11	-	-	-		0,00		0,00	11	0,00	0	0,00		116.629.800,00		875,94	Kasi Pembangunan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		79,50	48,49						
																				Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	-	100	-	100	-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	31	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		93	-	90	-	90	-	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	29	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilavah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilavah Kecamatan		0	-	0	-	1	-	1	-		-		0,00		0,00	1	0,00	100,00	0,00		-		#DIV/0!		
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	-	100	-	100	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	62	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan		10	-	10	-	10	-	-	-	#DIV/0!	-	10	-	10	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-		#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	-	0	-	4	-	2	-	2	-		0,00		0,00	4	0,00	100,00	0,00		-		#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	-	0	-	4	-	4	-	4	-		0,00		0,00	8	0,00	200,00	0,00		-		#DIV/0!		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!	0,00						
																				Predikat Kinerja		#DIV/0!	Sangat Rendah						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																	TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		95,42	95,42			95,42	95,42		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN PANCENG																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Govermance	KECAMATAN PANCENG			100	8.006.192.026	100	4.132.332.000,00	100	3.988.420.566	22	787.269.438,26	28	1.113.706.650	28	1.127.114.736,06	22	888.041.587	100	3.916.132.411,63	100	98	200	8.048.464.411,63	200,00	100,53		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	6.137.861.000	100	3.251.389.800,00	100	3.616.114.487	21	757.840.434,26	27	953.793.074	29	1.030.218.720,06	23	802.074.231	100	3.543.926.459,63	100,00	98,00	200	6.795.316.259,63	200,00	110,71		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan		4	28.999.700	5	22.266.000,00	5	14.699.350	1	916.750	-	-	2	2.530.000	2	9.419.100	5	12.865.850,00	100,00	87,53	10	35.131.850,00	250,00	121,15		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	Dokumen	4	17.500.000	2	3.484.000,00															2	3.484.000,00	50,00	19,91	BIDANG KESEKRETARIATAN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INDIKATOR 2023 - 2026	Dokumen	8	33.250.000			2	2.677.230	-	-	-	-	1	575.000	1	2.102.230,00	2	2.677.230,00	100,00	100,00	2	2.677.230,00	25,00	8,05		
	7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	3.500.000	1	2.876.000,00															1	2.876.000,00	100,00	82,17		
				Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	4	26.200.000			2	2.492.185	-	-	-	-	1	690.000	1	1.802.185,00	2	2.492.185,00	100,00	100,00	2	2.492.185,00	50,00	9,51		
	7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	31.700.000	2	3.000.000,00											-				2	3.000.000,00	33,33	9,46		
				Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	5	31.700.000			1	2.031.730	-	-	-	-	1	690.000	1	1.341.730,00	1	2.031.730,00	100,00	100,00	1	2.031.730,00	20,00	6,41		
	7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	1	3.004.000,00															1	3.004.000,00	100,00	85,83		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	5	29.700.000			1	2.492.185	-	-	-	-	-	0	1	2.492.185,00	1	2.492.185,00	100,00	100,00	1	2.492.185,00	20,00	8,39		
	7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.500.000	1	3.004.000,00															1	3.004.000,00	100,00	85,83		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	4	19.200.000			1	2.255.770	-	-	-	-	1	575.000	1	1.680.770,00	1	2.255.770,00	0,00	100,00	1	2.255.770,00	25,00	11,75		
	7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja yang disusun	Laporan	32	11.499.700	15	6.898.000,00			-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	15	6.898.000,00	46,88	59,98		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Laporan	64	20.750.000			12	2.750.250	12	916.750		-	-		-	0,00	12	916.750,00	100,00	33,33	12	916.750,00	18,75	4,42		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuanaan		4	4.104.168.542	2	2.527.092.000,00	100	2.981.063.241	23	663.519.847	28	815.004.580,14	27	798.478.159,06	22	640.639.954	100	2.917.642.540,63	100,00	97,87	102	5.444.734.540,63	2550,00	132,66		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Bulan (2021-2022)	22	4.083.668.542	12	2.518.796.000,00															12	2.518.796.000,00	54,55	61,68		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (INDIKATOR 2023 - 2026)	Orang/Bulan (2023-2026)	22	14.042.136.542			22	2.975.268.820	20	660.238.823,26	22	815.004.580,14	22	797.476.159,06	22	639.128.557,17	22	2.911.848.119,63	100,00	97,87	22	2.911.848.119,63	100,00	20,74		
	7.01.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Dokumen (2021 - 2022)	2	3.031.500	0	-															1	-	50,00	-		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen (2023 - 2026)	4	7.008.000			0	-					-	-			-	0,00			0	-	0,00	-		
	7.1.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TAhun SKPD	Jumlah laporan keuangan Ahir Tahun yang disusun	Laporan	2	6.919.350	1	4.426.000,00															1	4.426.000,00	50,00	63,97		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (INDIKATOR 2023 - 2026)	Laporan	4	15.750.000			1	2.364.415	1	2.364.415		-	-	-	-	-	1	2.364.415,00	100,00	100,00	1	2.364.415,00	25,00	15,01		
	7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan / Semesteran yang disusun	Laporan	12	8.521.100	12	3.870.000,00															12	3.870.000,00	100,00	45,42		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisemester/Semesteran SKPD (2023-2026)		24	20.500.000			22	3.430.006	1	916.609	-	-	16	1.002.000	5	1.511.397,00	22	3.430.006,00	100,00	100,00	22	3.430.006,00	91,67	16,73		
	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan		2	135.364.000	2	126.264.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	126.264.000,00	100,00	93,28		
	7.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	135.364.000	90	126.264.000,00						-					-	0,00	0,00	0,00	90	126.264.000,00	66,67	93,28		
					Orang					0		-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum		5	887.915.760	5	218.122.000,00	100	216.170.396	12	25.517.850	21	46.074.200	50	107.568.511	17	36.897.000	100	216.057.561,00	100,00	99,95	105	434.179.561,00	2100,00	48,90		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.403.000	12	5.403.000,00	0															5.403.000,00	0,00	122,71		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (2023 - 2026)	Paket	4	18.312.000			1	5.359.402,00	1	551.943	-	-	1	3.382.439	1	1.425.000,00	1	5.359.382,00	100,00	100,00	1	5.359.382,00	25,00	29,27		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	177.926.160	12	101.397.000,00											-	0,00				101.397.000,00	0,00	56,99		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2023-2026)	Paket	4	144.524.000			3	70.914.782,00	1	8.600.428	1	6.200.000	-	43.197.872	1	12.913.000,00	3	70.911.300,00	100,00	100,00	3	70.911.300,00	75,00	49,07		
	7.01.01.2.06.03		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah tangga	Bulan	12	8.431.000	12	15.262.000,00											-				12	15.262.000,00	100,00	181,02		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (2023-2026)	Bulan	4	31.434.000			1	7.200.038,00	1	815.604	-	-	-	2.721.000	1	3.663.000,00	1	7.199.604,00	100,00	99,99	1	7.199.604,00	25,00	22,90		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian makan dan minum	Bulan	24	99.640.000	12	45.530.000,00											-				12	45.530.000,00	50,00	45,69		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Paket	4	144.280.000			3	18.194.460,00	1	1.924.875	-	-	1	10.996.900	1	5.272.000,00	3	18.193.775,00	100,00	100,00	3	18.193.775,00	75,00	12,61		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Pengadaan	Jenis	4	31.028.600	12	17.150.000,00															12	17.150.000,00	55,27	55,27		
				Jumlah Paket Barang dan Cetakan Penggandaan yang disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Paket	4	57.056.000			2	15.394.539,00	-	-	0,08	600.000,00	1	7.070.300	1	7.724.000,00	2	15.394.300,00	100,00	100,00	2	15.394.300,00	50,00	26,98		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Dokumen	2	5.480.000	1	4.380.000,00															1	4.380.000,00	50,00	79,93		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (INDIKATOR 2023 - 2026)	Dokumen	4	14.936.000			0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	59.220.000	12	29.000.000,00															12	29.000.000,00	50,00	48,97		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	48	91.245.000			12	26.625.000	1	13.625.000	-	-	9	7.100.000	2	5.900.000,00	12	26.625.000,00	100,00	100,00	12	26.625.000,00	25,00	29,18		
	7.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	INDIKATOR 2021-2022 (Tidak ada)		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-					-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
				INDIKATOR 2023-2026 (diawali tahun 2024)	Dokumen	3	90.319.000	0	-	3	72.482.175	-	-	2	39.274.200,00	1	33.100.000,00	-	0,00	3	72.374.200,00	100,00	99,85	3	72.374.200,00	100,00	80,13		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5	981.412.998	5	237.163.800,00	100	284.640.000	20	49.750.987	30	85.764.294	24	69.149.050	26	73.158.177	100	277.822.508,00	100,00	97,60	105	514.986.308,00	2100,00	52,47		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INDIKATOR 2021-2022 (Belum ada)	Laporan	12	208.800.000	0	-	0	-	-	-	-	-					-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	72.000.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap. fasilitasi telepon, air, dan listrik	Laporan	12	94.012.998	12	28.363.800,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12	28.363.800,00	100,00	30,17		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	189.000.000			12	49.344.000,00	3	10.534.987	3	7.343.094	3	10.333.150	3	14.315.277,00	12	42.526.508	100,00	86,18	12	42.526.508,00	100,00	22,50		
	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	208.800.000	12	208.800.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12	208.800.000,00	100,00	100,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	208.800.000			12	235.296.000	3	39.216.000	3	78.421.200	3	58.815.900	3	58.842.900,00	12	235.296.000,00	100,00	100,00	12	235.296.000,00	100,00	112,69		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah		5	1.409.502.000	5	120.482.000,00	100	119.541.500	15	18.135.000	6	6.950.000	44	52.493.000	35	41.960.000,00	100	119.538.000,00	100,00	100,00	105	240.020.000,00	2100,00	17,03		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16=8+14		17=16/7x100		18	19
	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	32.500.000	0	-															0	-	0,00	-		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	4	147.628.500			2	78.150.000	1	16.000.000	1	6.950.000,00	1	21.550.000,00	2	33.650.000,00	2	78.150.000,00	100,00	100,00	2	78.150.000,00	50	52,94		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	INDIKATOR 2021-2022 (Belum ada)	Unit	42	348.175.000	7	85.450.000,00															7	85.450.000,00	16,67	24,54		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	6	129.892.500			5	5.500.000		-		-	-	0,00	5	5.500.000,00	5	5.500.000,00	100,00	100,00	5	5.500.000,00	83,33	4,23		
	7.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR 2021 - 2022 (Belum ada)	Unit	12	205.000.000	0	-															0	-	0,00	-		
				Jumlah Mebel yang dipelihara (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	10	11.250.000					-	-			-				-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Unit	60	204.550.000	10	13.000.000,00															10	13.000.000,00	16,67	6,36		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	10	70.500.000			5	4.945.000	1	2.135.000	-	-	-	0,00	4	2.810.000,00	5	4.945.000,00	100,00	100,00	5	4.945.000,00	50,00	7,01		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Unit	12	113.756.000	2	22.032.000,00	0										-	0,00	0,00	0,00	2	22.032.000,00	19,37	16,67		
				Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	2	68.250.000			2	30.946.500	-	-	-	-	2	30.943.000		0,00	2	30.943.000,00	100,00	99,99	2	30.943.000,00	100,00	45,34		
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Unit	4	24.000.000	0	-	0	-													0	-	0,00	-		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (INDIKATOR 2023-2026)	Unit	4	54.000.000			0	-													4	54.000.000,00	100,00	100,00		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	96,59			6891,67	364,53		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	465.096.000		259.712.200,00	100	127.220.388	-	-	83	104.649.572	4	5.682.000	13	16.800.000	100	127.131.572,00	100,00	99,93	100	386.843.772,00	100,00	83,18		
	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		2	465.096.000		190.712.200,00	100	127.220.388	-	-	83	104.649.572	4	5.682.000	13	16.800.000	100	127.131.572,00	100,00	99,93	100	317.843.772,00	5000,00	68,34		
	7.01.02.2.01.01		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.	INDIKATOR 2021 - 2022 (belum ada)	Laporan	12	3.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	19.689.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-	0,00	0,00	1,00	0	-	0,00	-		
	7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	33	343.076.000	5	190.712.200,00											-	0,00	0,00	0,00	5	190.712.200,00	15,15	55,59		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	2	99.331.000			6	127.220.388		-	4	104.649.572,00	1	5.682.000	1	16.800.000,00	6	127.131.572,00	100,00	99,93	6	127.131.572,00	300,00	127,99		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik		2	156.469.000	28	12.220.000,00	0	-	-	-	-	-	0	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	28	12.220.000,00	1400,00	7,81		
	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Laporan	2	3.500.000	0	-											-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	6	21.761.000			0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	31.877.000	28	12.220.000											-	0,00	0,00	0,00	28	12.220.000,00	700,00	38,33	BID. EKONOMI	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	8	99.331.000									-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		1	82.551.000	0	56.780.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	56.780.000,00	0,00	68,78		
	7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan	Laporan	14	6.500.000	28	56.780.000																				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	56	76.051.000			0		-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. EKONOMI	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	99,93			3066,67	99,37		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100	176.437.000	100	212.805.000,00	100	112.193.171	26	29.429.004	22	24.974.252	27	29.807.504	25	27.971.100	100	112.181.860,00	100,00	99,99	200	324.986.860,00	200,00	184,19		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembanaunan		100	176.437.000	100	82.616.000,00	100	26.783.504	100	26.783.504	-	-	-	-	-	-	100	26.783.504,00	100,00	100,00	200	109.399.504,00	200,00	62,00		
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LKD	36	211.976.000	6	82.616.000,00											-	-	0,00	0,00	6	82.616.000,00	16,67	38,97		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (INDIKATOR 2023-2026)	LKD	4	150.502.000			6	26.783.504	6	26.783.504,00	-	-	-	0,00	-	0,00	6	26.783.504,00	100,00	100,00	6	26.783.504,00	150,00	17,80	BID. PEMBANGUNAN	
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lbg	3	25.935.000	0	0											-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Jenis	3	25.935.000		-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. EKONOMI	
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12	465.951.000	15	130.189.000,00	11	85.409.667,00	1	2.645.500	3	24.974.252,00	4	29.807.504	3	27.971.100	11	85.398.356,00	100,00	99,99	26	215.587.356,00	216,67	46,27		
	7.01.03.2.03.03		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKD	5	50.000.000	12	49.300.000																				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya (INDIKATOR 2023- 2026)	Bulan	12	291.279.000			8	44.617.907,00	2	2.645.500	2	16.443.500,00	2	12.746.000	2	12.771.596	8	44.606.596,00	100,00	99,97	8	44.606.596,00	66,67	15,31	BID. KESRA	
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	INDIKATOR 2021-2022	Laporan	15	15.000.000	3	80.889.000,00											-	0,00	0,00	0,00	3	80.889.000,00	20,00	539,26	BID. EKONOMI	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	12	109.672.000			3	40.791.760	-	-	1	8.530.752,00	1	17.061.504	1	15.199.504	3	40.791.760,00	100,00	100,00	3	3,00	25,00	0,00	BID. EKONOMI	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99			316,67	77,27		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100	384.676.026	100	197.824.000,00	100	81.295.008	-	-	37	30.289.752	40	32.785.504	22	18.219.752	100	81.295.008,00	100,00	100,00	200	279.119.008,00	200,00	72,56		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.		12	312.282.000	24	134.804.000,00	12	72.764.256	-	-	5	30.289.752	4	24.254.752	3	18.219.752	12	72.764.256,00	100,00	100,00	36	207.568.256,00	300,00	66,47		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	454.845.000	56	134.804.000,00											-	-	0,00	0,00	56	134.804.000,00	77,78	29,64	BID. TRANTIB	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	48	312.282.000			12	72.764.256	-	-	4	30.289.752,00	4	24.254.752,00	4	18.219.752,00	12	72.764.256,00	100,00	100,00	12	72.764.256,00	25,00	23,30		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12	72.394.026	12	63.020.000,00	12	8.530.752	-	-	-	-	12	8.530.752	-	-	12	8.530.752,00	100,00	100,00	24	71.550.752,00	200,00	98,84		
	7.01.02.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap. Pelaksanan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Laporan	72	15.122.000	14	63.020.000,00											-	-	0,00	0,00	14	63.020.000,00	19,44	416,74	BID. TRANTIB	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik (2023-2026)	Laporan	12	72.394.026	0	-	12	8.530.752,00	-	-	-	-	12	8.530.752	-	0	12	8.530.752,00	100,00	100,00	12	8.530.752,00	100,00	11,78		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			400,00	132,07		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa		100	810.333.000	100	210.601.000,00	100	51.597.512,00	-	-	-	-	55	28.621.008	45	22.976.504	100	51.597.512,00	100,00	100,00	200	262.198.512,00	200,00	32,36		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1048	810.333.000	126	210.601.000,00	100	51.597.512	-	-	-	-	55	28.621.008	45	22.976.504	100	51.597.512,00	100,00	100,00	226	262.198.512,00	21,56	32,36		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	168	50.370.000	28	8.500.000,00											-	-	0,00	0,00	28	8.500.000,00			BID. PEM	
				Jumlah Dokumen yang Difasilasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	112	36.006.000	0	-	28	8.856.752	-				24	7.568.752,00	4	1.288.000,00	28	8.856.752,00	100,00	100,00		8.856.752,00		24,60	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	84	39.550.000	14,00	55.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	0,00	16,67	0	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Laporan	56	31.789.000			14	9.049.752					14	9.049.752	-	-	14	9.049.752	100,00	100	14,00	9.049.752,00	25,00	28,47	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Prndayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Dokumen	168	45.086.000	28,00	8.500.000											-	0,00	0,00	0	28,00	8.500.000,00	16,67	18,85	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	56	33.086.000			14	11.118.752	-				6	5.233.752	8	5.885.000,00	14	11.118.752,00	100,00	100,00	14	11.118.752,00	25,00	33,61	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Dokumen	1	5.200.250	0	-											-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	28	25.282.000												0,00	-	-	0,00	0,00	0	11.118.752,00	0,00	43,98	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Dok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	84	70.205.000	14	56.335.000											-	-	0,00	0,00	14	56.335.000,00	16,67	80,24	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	56	51.234.000			14	9.034.752							0,00	14	9034752,00	14	9.034.752,00	100,00	100,00	14	9.034.752,00	25,00	17,63	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Dokumen			0	-											-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	3	27.250.000			14	13.537.504	-	-	-	-	7	6.768.752	7	6768752,00	14	13.537.504,00	100,00	100,00	14	13.537.504,00	466,67	49,68	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	INDIKATOR 2021-2022 (belum ada)	Dokumen	14	7.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	14	34.436.000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
	7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dok. fasilitasi Pembinaan Administarsai Lembaga Kemayarakatan dan atau (RT/RW)	Laporan	28	132.554.750	14	8.886.000,00											-	-	0,00	0,00	14	8.886.000,00	50,00	6,70	BID. PEM DAN PEMB.	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	8	41.109.000			0		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM DAN PEMB.	
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dok. fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan monev. pembangunan di Desa	Dokumen	28	35.000.000	14	66.980.000,00											-	-	0,00	0,00	14	66.980.000,00	50,00	191,37	BID. PEMB	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (INDIKATOR 2023-2026)	Dokumen	56	98.675.000			0		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEMB	
	7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Lap. Fasilitasi Penyusunan PRODE/Kel.		28	13.000.000	14	6.000.000											-	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	0,00	46,15	BID. PEM	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (INDIKATOR 2023-2026)		56	33.000.000			0		-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	-	BID. PEM	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			21,56	32,36		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																										
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)	100,00	98,18			100,00	98,18		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN BUNGAH																												
			KECAMATAN BUNGAH				27.162.500.000,00		12.594.558.928,76		4.251.662.422,00		505.218.414,51		1.640.748.669,45		907.227.070,64		1.066.681.966,55		4.119.876.121,15				16.698.550.249,91				
			KECAMATAN				27.162.500.000,00		12.594.558.928,76		4.251.662.422,00		505.218.414,51		1.640.748.669,45		907.227.070,64		1.066.681.966,55		4.119.876.121,15		96,90		16.698.550.249,91		61,48	Kec. Bungah	
1	7.01.01	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			24.229.513.000		11.250.953.819		3.902.088.088		505.218.415		1.486.741.219		851.259.771		927.100.383		3.770.319.787,15		96,62		15.005.388.806		61,93		
1	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Dokumen	18	204.499.800	6	58.009.800	3	16.190.000	-	-	1	3.916.750	1	3.820.750	1	8.372.500	3	16.110.000,00	100,00	99,51	9	58.235.000	50,00	28,48	Kec. Bungah	
(1)	*7.01.01.2.01.01*		*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran*	Buku	60	18.999.800	20	15.884.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	15.884.800	33,33	83,61		
	7.01.01.2.01.0001			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*24*	*60.000.000*	*6*	*6.065.000*	*6*	*6.065.000*	-	-	*2*	*3.475.000*	-	-	*4*	*2.510.000*	*6*	*5.985.000,00*	*100,00*	*98,68*	*12*	*12.050.000,00*	50,00	*20,08*		
(2)	*7.01.01.2.01.06*		*Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun*	Buku	*70*	*27.000.000*	*14*	*19.625.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	19.625.000	20,00	72,69		
	7.01.01.2.01.0006			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	*42*	*54.000.000*	*7*	*6.305.000*	*7*	*6.305.000*	-	-	-	-	*3*	*2.379.000*	*4*	*3.926.000*	*7,00*	*6.305.000,00*	*100,00*	*100,00*	14	12.610.000	33	23,35		
(3)	*7.01.01.2.01.07*		*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi*	*Buku*	*12*	*13.000.000*	*6*	*10.130.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.130.000	50,00	77,92		
	7.01.01.2.01.0007			*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Laporan*	*18*	*31.500.000*	-	-	*3*	*3.820.000*	-	-	*1*	*441.750*	*1*	*1.441.750*	*1*	*1.936.500*	*3*	*3.820.000,00*	*100,00*	*100,00*	*3*	3.820.000	17	12,13		
2	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	20.116.720.000	12	9.553.149.656	12	3.197.469.805	3	465.529.460	3	1.289.702.338	3	681.326.352	3	658.645.183	12	3.095.203.332,15	100,00	96,80	12	12.648.352.988,51	100,00	62,87	Kec. Bungah	
(4)	*7.01.01.2.02.01*		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	*Bulan*	*12*	*6.329.958.000*	*12*	*6.408.664.134*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.408.664.134	100,00	101,24		
	7.01.01.2.02.0001			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang / Bulan*	*25*	*13.744.762.000*	*25*	*3.136.713.522*	*25*	*3.194.454.805*	*25*	*465.529.460*	*25*	*1.286.687.338*	*25*	*681.326.352*	*25*	*658.645.183*	*25*	*3.092.188.332,15*	*100,00*	*96,80*	25	6.228.901.855	100,00	45,32		
(5)	*7.01.01.2.02.05*		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah laporan keuangan yang disusun*	*Laporan*	*5*	-	*5*	*3.015.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.015.000	100,00	-		
	7.01.01.2.02.0005			*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*	*15*	*42.000.000*	*5*	*4.757.000*	*5*	*3.015.000*	-	-	*5*	*3.015.000*	-	-	-	-	*5,00*	*3.015.000,00*	*100,00*	*100,00*	10	7.772.000	67	18,50		
3	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	Bulan	12	809.423.875	12	307.649.070	12	135.370.027	3	2.253.300	3	48.295.100	3	33.595.800	3	46.750.700	12	130.894.900,00	100,00	96,69	12	438.543.970,00	100,00	54,18	Kec. Bungah	
(6)	*7.01.01.2.06.01*		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik*	*Jenis*	*1*	-	*1*	*5.415.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.415.000	100,00	-		
	7.01.01.2.06.0001			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*2*	*28.000.000*	*1*	*3.808.000*	*1*	*2.851.100*	-	-	*1*	*1.036.000*	-	*1.803.500*	-	-	*1,00*	*2.839.500,00*	*100,00*	*99,59*	2	6.647.500	100,00	23,74		
(7)	*7.01.01.2.06.02*		*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jenis*	*8*	*21.754.225*	*8*	*128.859.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	128.859.000	100,00	592,34		
	7.01.01.2.06.0002			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*12*	*108.000.000*	*4*	*10.640.000*	*4*	*26.505.452*	*1*	*2.253.300*	*1*	*1.841.600*	*2*	*12.931.550*	-	*9.351.000*	*4,00*	*26.377.450,00*	*100,00*	*99,52*	8	37.017.450	66,67	34,28		
(8)	*7.01.01.2.06.04*		*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah penyediaan bahan logistik kantor*	*Bulan*	*12*	*51.946.500*	*12*	*38.538.250*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	38.538.250	100,00	74,19		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.0004			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	150.973.250	3	9.115.000	3	38.517.000	-	-	1	13.020.000	1	6.192.000	1	19.305.000	3,00	38.517.000,00	100,00	100,00	6	47.632.000	50,00	31,55		
(9)	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Jenis	10	18.999.900	10	21.389.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21.389.820	100,00	112,58		
	7.01.01.2.06.0005			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	60.000.000	5	6.000.000	5	9.317.500	-	-	2	2.126.250	2	2.976.750	1	-	5,00	5.103.000,00	100,00	54,77	10	11.103.000	33,33	18,51		
(10)	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	Jenis	5	6.240.000	5	6.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6.620.000	100,00	106,09		
	7.01.01.2.06.0006			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	16	16.820.000	4	1.500.000	4	2.519.100	-	-	2	500.000	1	1.000.000	1	1.015.200	4,00	2.515.200,00	100,00	99,85	8	4.015.200	50,00	23,87		
(11)	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Persen	100	50.690.000	100	67.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	67.570.000	100,00	133,30		
	7.01.01.2.06.0009			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	141.000.000	12	8.194.000	12	37.040.000	-	-	6	11.200.000	3	8.692.000	3	17.079.500	12,00	36.971.500,00	100,00	99,82	24	45.165.500	50,00	32,03		
(12)	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	155.000.000	-	-	1	18.619.875	-	-	-	18.571.250	-	-	-	-	-	18.571.250,00	-	-	-	18.571.250,00	-	11,98		
4	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia	Jenis	18	319.616.020	18	87.005.781	9	42.996.827	-	-	4	8.437.500	2	10.824.650	3	23.445.000	9	42.707.150,00	100,00	99,33	27	129.712.931,00	150,00	40,58	Kec. Bungah	
(13)	7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia	Persen	100	85.567.270	100	76.812.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	76.812.381	100,00	89,77		
	7.01.01.2.07.0010			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	47	234.048.750	47	10.193.400	47	42.996.827	-	-	9	8.437.500	12	10.824.650	26	23.445.000	47,00	42.707.150,00	100,00	99,33	94	52.900.550	200,00	22,60		
5	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.637.790.313	12	875.746.224	12	360.666.429	3	30.435.655	3	112.389.531	3	89.754.219	3	109.299.275	12	341.878.680,00	100,00	94,79	12,00	1.217.624.904,00	100,00	74,35	Kec. Bungah	
(14)	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	Bulan	12	70.042.063	12	71.846.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	71.846.813	100,00	102,58		
	7.01.01.2.08.0002			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	194.250.000	12	39.000.744	12	61.596.429	3	6.185.655	3	14.734.781	3	10.161.369	3	11.775.475	12,00	42.857.280,00	100,00	69,58	24	81.858.024	50,00	42,14		
(15)	7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan pendukung kegiatan kantor	Jenis	7	12.998.250	7	17.942.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17.942.000	100,00	138,03		
	7.01.01.2.08.0003			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	30.500.000	-	-	12	6.450.000	-	-	6	-	3	6.450.000	3	-	12,00	6.450.000,00	100,00	100,00	12	6.450.000	25,00	21,15		
(16)	7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	Bulan	12	420.000.000	12	482.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	482.300.000	100,00	114,83		
	7.01.01.2.08.0004			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	910.000.000	12	264.656.667	12	292.620.000	3	24.250.000	3	97.654.750	3	73.142.850	3	97.523.800	12,00	292.571.400,00	100,00	99,98	24	557.228.067	50,00	61,23		
6	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	1.141.462.992	12	369.393.287	12	149.395.000	3	7.000.000	3	24.000.000	3	31.938.000	3	80.587.725	12	143.525.725,00	100,00	96,07	12,00	512.919.012,40	100,00	44,94	Kec. Bungah	
(17)	7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	67.200.000	12	67.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	67.200.000	100,00	100,00		
	7.01.01.2.09.0001			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	172.200.000	1	22.000.000	1	37.600.000	1	3.500.000	1	11.000.000	1	12.678.000	1	9.263.100	1,00	36.441.100,00	100,00	96,92	2	58.441.100	200,00	33,94		
(18)	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Bulan	12	100.800.000	12	100.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	100.800.000	100,00	100,00		
	7.01.01.2.09.0002			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	263.600.000	6	26.061.500	6	39.100.000	6	3.500.000	6	13.000.000	6	11.000.000	6	7.574.000	6,00	35.074.000,00	100,00	89,70	12	61.135.500	200,00	23,19		
(19)	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Bulan	12	-	12	11.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.360.000	100,00	-		
	7.01.01.2.09.0006			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(20)	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Gedung	1	-	1	120.983.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.983.051	100,00	-		
	7.01.01.2.09.0009			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	413.563.000	-	-	1	64.435.000	-	-	-	-	-	-	1	63.750.625	1,00	63.750.625,00	100,00	98,94	1	63.750.625	100,00	15,41		
(21)	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Bulan	12	15.099.992	12	20.988.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20.988.736	100,00	139,00		
	7.01.01.2.09.0011			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	75.000.000	-	-	11	8.260.000	-	-	-	-	11	8.260.000	-	-	11,00	8.260.000,00	100,00	100,00	11	8.260.000	122,22	11,01		
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	97,20			100,00	50,90		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
II	7.01.02	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			90.251.000		58.390.000		9.679.800		-		9.679.800		-		-		9.679.800,00				68.069.800,00				
7	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kegiatan	6	90.251.000	2	58.390.000	1	9.679.800	-	-	1,00	9.679.800	-	-	-	-	1	9.679.800,00	100,00	100,00	3,00	68.069.800,00	50,00	75,42	Kec. Bungah	
(22)	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan	Kali	1	26.240.000	1	58.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58.390.000	100,00	222,52		
	7.01.02.2.02.0003			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	64.011.000	-	-	5	9.679.800	-	-	5	9.679.800	-	-	-	-	5,00	9.679.800,00	100,00	100,00	5	9.679.800	25,00	15,12		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																					0	100,00	100,00			50,00	75,42		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Rendah	Tinggi		
III	7.01.03	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			1.575.911.000		742.024.740		195.474.750		-		99.882.650		30.768.150		64.805.950		195.456.750,00				937.481.490,00				
8	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdavaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdavaan desa	Bulan	12	660.692.920	12	283.921.870	12	61.974.900	3	-	3	38.481.650	3	11.333.300	3	12.159.950	12	61.974.900,00	100,00	100,00	12,00	345.896.770,00	100,00	52,35	Kec. Bungah	
(23)	*7.01.03.2.01.01*		*Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa*	*Jumlah peserta Musrenbang kecamatan*	*Orang*	*150*	*77.425.000*	*150*	*69.650.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	69.650.000	100,00	89,96		
	7.01.03.2.01.0001			*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*8*	*199.000.000*	*16*	*33.495.000*	*8*	*33.495.000*	-	-	*8*	*33.495.000*	-	-	-	-	*8*	*33.495.000,00*	*100,00*	*100,00*	24	66.990.000	300,00	33,66		
(24)	*7.01.03.2.01.03*		*Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	*Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi*	*Desa*	*22*	*110.674.920*	*22*	*173.311.870*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	173.311.870	100,00	156,60		
	7.01.03.2.01.0003			*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*40*	*273.593.000*	*10*	*7.465.000*	*10*	*28.479.900*	-	-	*2*	*4.986.650*	*4*	*11.333.300*	*4*	*12.159.950*	*10*	*28.479.900,00*	*100,00*	*100,00*	20	35.944.900	50,00	13,14		
9	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Bulan	12	915.218.080	12	458.102.870	12	133.499.850	3	-	*3*	61.401.000	*3*	19.434.850	*3*	52.646.000	12	133.481.850,00	100,00	100	12,00	591.584.720,00	100,00	64,64	Kec. Bungah	
(25)	*7.01.03.2.03.01*		*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan*	*Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat*	*Bulan*	*12*	*240.872.080*	*12*	*394.570.470*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	394.570.470	100,00	163,81		
	7.01.03.2.03.0001			*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dielenggarakan*	*Lembaga Kemasyarakatan*	*27*	*560.278.000*	*27*	*39.252.400*	*27*	*125.000.000*	-	-	*27*	*61.401.000*	*27*	*10.935.000*	-	*52.646.000*	*27*	*124.982.000,00*	*100,00*	*99,99*	54	164.234.400	200,00	29,31		
(26)	*7.01.03.2.03.04*		*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Jumlah pelaku ekonomi diusilayah kecamatan yang difasilitasi*	*Desa*	*22*	-	*22*	*11.160.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	11.160.000	100,00	-		
	7.01.03.2.03.0004			*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Laporan*	*12*	*114.068.000*	*4*	*13.120.000*	*4*	*8.499.850*	*1*	-	*1*	-	*1*	*8.499.850*	*1*	-	*4*	*8.499.850,00*	*100,00*	*100,00*	8	21.619.850	66,67	18,95		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99			100,00	58,50		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Rendah		
IV	7.01.04	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			396.915.000		243.131.640		59.999.784		-		25.205.000		15.639.150		19.155.634		59.999.784,00				303.131.424,00				
10	7.01.04.2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	Bulan	12	303.675.060	12	177.341.700	12	44.999.800	3	-	*3*	21.485.000	*3*	11.734.800	*3*	11.780.000	12	44.999.800,00	100	100	12,00	222.341.500,00	100,00	73,22	Kec. Bungah	
(27)	*7.01.04.2.01.01*		*Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan*	*Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan*	*Bulan*	*12*	*81.175.060*	*12*	*142.986.700*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	142.986.700	100,00	176,15		
	7.01.04.2.01.0001			*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Laporan*	*48*	*222.500.000*	*12*	*34.355.000*	*12*	*44.999.800*	-	-	*6*	*21.485.000*	*3*	*11.734.800*	*3*	*11.780.000*	*12*	*44.999.800,00*	*100,00*	*100,00*	24	79.354.800	50,00	35,67		
11	7.01.04.2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	Bulan	12	93.239.940	12	65.789.940	12	14.999.984	3	-	3	3.720.000	3	3.904.350	3	7.375.634	12	14.999.984	100	100	24,00	80.789.924,00	200,00	86,65	Kec. Bungah	
(28)	*7.01.04.2.02.01*		*Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas /fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI*	*Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada*	*Bulan*	*12*	*24.303.940*	*12*	*65.789.940*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	65.789.940	100,00	270,70		
	7.01.04.2.02.0001			*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Persandangl/ndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	*Laporan*	*72*	*68.936.000*	-	-	*12*	*14.999.984*	*3*	-	*3*	*3.720.000*	*3*	*3.904.350*	*3*	*7.375.634*	*12*	*14.999.984,00*	*100,00*	*100,00*	12	14.999.984	16,67	21,76		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			150,00	79,93		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Tinesi	Tinggi		
V	7.01.05	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			153.908.000		11.795.000		16.700.000		-		-		-		16.700.000		16.700.000,00				28.495.000,00				
12	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kali	14	153.908.000	2	11.795.000	2	16.700.000	-	-	-	-	-	-	2,00	16.700.000	2	16.700.000,00	100	100	4	28.495.000,00	28,57	18,51	Kec. Bungah	
(29)	*7.01.05.2.01.04*		*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	*Jumlah pelaksanaan FKUB*	*Kali*	*1*	*21.885.000*	*1*	*11.795.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.795.000	100,00	53,90		
	7.01.05.2.01.0004			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	*Orang*	*103*	*95.126.000*	-	-	*22*	*8.200.000*	-	-	-	-	-	-	*22*	*8.200.000*	*22*	*8.200.000,00*	*100,00*	*100,00*	22	8.200.000	21,36	8,62		
(30)	*7.01.05.2.01.0008*		*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	*Dokumen*	*9*	*36.897.000*	-	-	*3*	*8.500.000*	-	-	-	-	-	-	*3*	*8.500.000*	*3*	*8.500.000,00*	*100*	*100*	3	*8.500.000,00*	*33,33*	*23,04*		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			28,57	18,51		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinesi	Sangat Tinesi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
VI	7.01.06	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			716.002.000		288.263.730		67.720.000		-		19.240.000		9.560.000		38.920.000		67.720.000,00				355.983.730,00				

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
13	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bulan	12	716.002.000	12	288.263.730	12	67.720.000	3	-	3	19.240.000	3	9.560.000	3	38.920.000	12	67.720.000,00	100	100	12,00	355.983.730,00	100,00	49,72	Kec. Bungah	
(31)	*7.01.06.2.01.0001*		*Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Dokumen*	*264*	*96.263.880*	*88*	*62.194.730*	*44*	*9.680.000*	-	-	-	-	-	-	*44*	*9.680.000*	*44*	*9.680.000,00*	*100,00*	*100,00*	132	71.874.730	50,00	74,66		
(32)	*7.01.06.2.01.0002*		*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Dokumen*	*36*	*99.098.000*	-	-	*12*	*9.680.000*	-	-	-	-	-	-	*12*	*9.680.000*	*12*	*9.680.000,00*	*100,00*	*100,00*	12	9.680.000	33,33	9,77		
(33)	*7.01.06.2.01.03*		*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa*	*Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa*	*Bulan*	*12*	*29.999.900*	*12*	*33.394.900*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33.394.900	100,00	111,32		
	7.01.06.2.01.0003			*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Dokumen*	*12*	*90.285.000*	-	-	*12*	*9.680.000*	-	-	*12*	*9.680.000*	-	-	-	-	*12*	*9.680.000,00*	*100,00*	*100,00*	12	9.680.000	100,00	10,72		
(34)	*7.01.06.2.01.0006*		*Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	*Dokumen*	*18*	*33.022.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(35)	*7.01.06.2.01.07*		*Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD*	*Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD*	*Desa*	*22*	*15.000.000*	*22*	*19.295.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19.295.000	100,00	128,63		
	7.01.06.2.01.0007			*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	*Dokumen*	*4*	*65.000.000*	-	-	*1*	*9.560.000*	-	-	-	-	-	-	*1*	*9.560.000*	*1*	*9.560.000,00*	*100,00*	*100,00*	1	9.560.000	25,00	14,71		
(36)	*7.01.06.2.01.0013*		*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Dokumen*	*3*	*61.723.000*	-	-	*1*	*9.560.000*	-	-	*1*	*9.560.000*	-	-	-	-	*1*	*9.560.000,00*	*100,00*	*100,00*	1	*9.560.000,00*	*33,33*	*15,49*		
(37)	*7.01.06.2.01.16*		*Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa*	*Jumlah pelaksanaan monev pembangunan*	*Bulan*	*12*	*52.610.220*	*10*	*161.967.100*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	161.967.100	83,33	307,86		
	7.01.06.2.01.0016			*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*	*Dokumen*	*20*	*105.000.000*	*5*	*11.412.000*	*5*	*9.560.000*	-	-	-	-	*5*	*9.560.000*	-	-	*5*	*9.560.000,00*	*100,00*	*100,00*	10	20.972.000	50,00	19,97		
(38)	*7.01.06.2.01.0017*		*Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	*Laporan*	*3*	*68.000.000*	-	-	*1*	*10.000.000*	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000*	-	*10.000.000,00*	-	-	-	10.000.000	-	14,71		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			100,00	49,72		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
																					Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program	100,00	99,53			88,10	55,50		
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
	KECAMATAN DUKUN																												
			URUSAN KEWILAYAHAN																										
	7.01	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	KECAMATAN DUKUN			100	30.554.198.075	100	3.648.928.350,00	100	4.324.724.200	25	35.740.059	25	159.328.830	25	255.640.377	25	3.460.596.516	100,00	4.220.989.001,99	100,00	97,60	200,00	7.869.917.351,99		25,76		
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100	28.386.586.075	100	3.559.021.350,00	100	3.805.296.193	25	35.740.059	25	105.705.320	25	188.311.752	25	3.308.109.891	100	3.701.667.871,99	100,00	97,28	200	7.260.689.221,99		25,58		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan		3	-	3	7.963.900	3	12.000.000		-	-	-	3	9.176.800	-	-	3	11.993.800,00	100,00	99,95	6	19.957.700,00		#DIV/0!		
	7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR 2021 - 2022	Dokumen	36	-	6	-	6			-		-									1	-	2,78	#DIV/0!	SUBBAG. KPP	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INDIKATOR 2023 - 2026	Dokumen	36	20.000.000	6	3.398.900,00	6	5.000.000	-	-		-	3	2.182.100,00	3	2.817.000,00	6	4.999.100,00	100,00	99,98	12	8.398.000,00	33,33	41,99		
	7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan realisasi kinerja	Laporan	42	12.000.000	7	3.104.000,00	7	4.000.000	-	-		-	7	3.998.800,00		0,00	7	3.998.800,00	100,00	99,97	14	7.102.800,00	33,33	59,19		
	7.01.01.2.01.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	15	10.000.000	3	1.461.000,00	7	3.000.000	-	-		-	7	2.995.900,00		0,00	7	2.995.900,00	100,00	99,86	9	4.456.900,00	60,00	44,57		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuanean		2	24.773.189.000	2	3.255.254.000,00	100	3.339.389.000	-	-	-	-	50	3.499.525	50	3.233.567.589	100	3.237.067.113,99	100,00	96,94	102	6.492.321.113,99		26,21		
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN'	- Bulan - Persen - Orang - Tahun (2021-2022)	72	24.714.189.000	12	3.251.774.000,00	12	3.335.889.000,00	3		3		3		3	3.233.567.588,99	12	3.233.567.588,99	100,00	96,93	9	3.719.298.386,00	12,50	15,05		
																										#DIV/0!			
	7.01.01.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	30	59.000.000	4	3.480.000,00	5	3.500.000	-	-	-	-	5	3.499.525,00	-	0,00	5	3.499.525,00	100,00	99,99	6	6.979.525,00	20,00	11,83		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum		5	1.441.482.575	5	73.788.900,00	100	134.989.803	-	-	27	36.223.850	37	49.565.800	13	12.747.500	77	134.921.000,00	76,55	99,95	82	208.709.900,00		14,48		
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	15	10.000.000	0	6.384.000,00	8	6.388.172	-		5	4.859.000	3	1.525.750	-	-	8	6.384.750,00	100,00	99,95		12.768.750,00		127,69		
	7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	36	375.840.575	6	24.769.000,00	7	27.356.329	-	-	4	13.633.850,00	2	11.789.200,00	1	1.929.200,00	7	27.352.250,00	100,00	99,99		52.121.250,00		13,87		
	7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		72	517.642.000	12	21.419.000,00	3	38.598.580	-	-	1	8.997.700,00	1	20.824.250,00	1	8.762.400,00	3	38.584.350,00	100,00	99,96		60.003.350,00		11,59		
	7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30	138.000.000	5	13.840.900,00	5	13.364.722	-		2	5.747.500,00	2	6.554.750,00	1	1.062.300,00	5	13.364.550,00	100,00	100,00		27.205.450,00		19,71		
	7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	45.000.000	52	5.110.000,00	12	3.942.000	-		6	1.954.800,00	3	993.600,00	3	993.600,00	12	3.942.000,00	100,00	100,00		9.052.000,00		20,12		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72	365.000.000	12	8.650.000,00	12	15.340.000	-		6	5.890.000,00	6	9.404.000,00	-	0,00	12	15.294.000,00	100,00	99,70		23.944.000,00		6,56		
	7.01.01.2.08.01		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit SPBE yang Disediakan		100	418.646.425	0	-	100	30.000.000	-	-	50	2.899.100,00	50	27.100.000,00	-		100	29.999.100,00	100,00	100,00		29.999.100,00		7,17		
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	1.310.200.000		171.566.550,00	100	183.685.040	17	30.740.059	32	59.481.470	25	40.037.977	26	52.194.802	100	182.454.308,00	100,12	99,33	100	354.020.858,00		27,02		
	7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		72	286.000.000	12	37.616.550,00	12	38.875.040	3	6.620.179	3	11.241.710,00	3	3.858.157,00	3	16.014.982,00	12	37.735.028,00	100,00	97,07		75.351.578,00		26,35		
	7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.024.200.000	12	133.950.000,00	12	144.810.000	3	24.119.880	3	48.239.760,00	3	36.179.820,00	3	36.179.820,00	12	144.719.280,00	100,00	99,94		278.669.280,00		27,21		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara		5	861.714.500	5	50.448.000,00	100	135.232.350	25	5.000.000	25	10.000.000	25	86.031.650	25	9.600.000	100	135.231.650,00	100,00	100,00	105	185.679.650,00		21,55		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		72	260.600.000	12	33.600.000,00	12	33.600.000	3	5.000.000	3	10.000.000,00	3	9.000.000,00	3	9.600.000,00	12	33.600.000,00	100,00	100,00		67.200.000,00		25,79		
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		72	376.850.000	12	33.600.000,00	12	33.600.000	3	5.000.000	3	10.000.000,00	3	9.000.000,00	3	9.600.000,00	12	33.600.000,00	100,00	100,00		67.200.000,00		17,83		
	7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		72	77.989.500	12	4.672.000,00	12	5.000.000	-	-	-	-	9	4.999.300,00	-		9	4.999.300,00	75,00	99,99		9.671.300,00		12,40		
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6	523.125.000	1	12.176.000,00	1	47.248.600	-	-	-	-	1	47.248.600,00			1	47.248.600,00	100,00	100,00		59.424.600,00		11,36		
	7.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		72	66.861.230	0	1.830.000,00	12	15.783.750	-	-	-	-	9	15.783.750,00	-		9	15.783.750,00	75,00	100,00		17.613.750,00		26,34		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	50,00	50,00						
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		100	85.412.000		-	100	3.300.000	-	-	-	-	-	-	100	3.298.575	100	3.298.575,00	99,96	99,96	100	3.298.575,00		3,86		
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		4	85.412.000		-	100	3.300.000	-	-	-	-	-	-	100	3.298.575	100	3.298.575,00	99,96	99,96	100	3.298.575,00		3,86		
	7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6	85.412.000	1	-	1	3.300.000	-	-		-		0,00	1	3.298.575,00	1	3.298.575,00	100,00	99,96		3.298.575,00		3,86		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	99,98	98,62						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi		100	667.400.000	100	28.726.000,00	100	278.841.987	-	-	50	18.823.510	25	9.258.575	25	31.957.700	100	278.813.355,00	100,00	99,99	200	307.539.355,00		46,08		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan		21	667.400.000	21	28.726.000,00	21	60.051.827	-	-	7	18.823.510	7	9.258.575	7	31.957.700	21	60.039.785,00	100,00	99,98	42	88.765.785,00		13,30		
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	Persen	100	452.070.000	100	11.123.000,00	100	35.086.527	38%		48%						86%									
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan																									
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan																									
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		900	215.330.000	150	17.603.000,00	150	24.965.300	-	-	50	18.823.510,00	50	640.000,00	50	5.497.600,00	150	24.961.110,00	100,00	99,98		42.564.110,00		19,77		
	7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		156	452.070.000	26	11.123.000,00	26	35.086.527	-	-	-	-	13	8.618.575,00	13	26.460.100,00	26	35.078.675,00	100,00	99,98		46.201.675,00		10,22		
	7.01.03.2.03		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		72	1.403.119.000	12	64.658.000,00	12	218.790.160	12	-	-	79.498.520	9	46.360.000	-	50.690.000	12	218.773.570,00	100,00	99,99	24	283.431.570,00		20,20		
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		72	1.239.445.000	12	64.658.000,00	12	177.015.725	-		6	79.498.520,00	3	41.599.650,00	3	55.907.550,00	12	177.005.720,00	100,00	99,99		241.663.720,00		19,50		
	7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		130	163.674.000	12	-	12	41.774.435	-		-		-	0,00	12	41.767.850,00	12	41.767.850,00	100,00	99,98		41.767.850,00		25,52		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100	729.800.000	100	38.935.000,00	100	93.401.370	-	-	37	34.800.000	31	28.960.000	32	29.610.000	100	93.370.000,00	100,26	99,97	200	132.305.000,00		18,13		
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketentiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan		12	375.000.000	24	38.935.000,00	12	73.293.000	-	-	3	34.800.000	6	17.400.000	3	21.080.000	12	73.280.000,00	100,00	99,98	36	112.215.000,00		29,92		
	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		72	375.000.000	12	38.935.000,00	12	73.293.000	-	-	6	34.800.000,00	3	17.400.000,00	3	21.080.000,00	12	73.280.000,00	100,00	99,98		112.215.000,00		29,92		
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12	354.800.000	12	-	12	20.108.370	-	-	-	-	9	11.560.000	3	8.530.000	12	20.090.000,00	100,00	99,91	24	20.090.000,00		5,66		
	7.01.02.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik		72	354.800.000	12	-	12	20.108.370	-	-	-	-	9	11.560.000,00	3	8.530.000,00	12	20.090.000,00	100,00	99,91	12	20.090.000,00		5,66		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,95						

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi		100	459.168.000	100	11.123.000,00	100	27.110.425	-	-	-	-	50	-	50	15.987.000	100	27.108.800,00	100,00	99,99	200	38.231.800,00		8,33		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		12	459.168.000	0	11.123.000,00	80	27.110.425	-	-	-	-	40	-	40	15.987.000	80	27.108.800,00	100,00	99,99	80	38.231.800,00		8,33		
	7.01.05.2.01.08		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiltas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		320	104.368.000	0	11.123.000,00	80	15.987.425	-	-	-	-	-	0,00	80	15.987.000,00	80	15.987.000,00	100,00	100,00		27.110.000,00		25,98		
	7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forkopimcam		12	354.800.000	0	-	12	11.123.000	-	-	-	-	-	0,00	12	11.121.800,00	12	11.121.800,00	100,00	99,99		11.121.800,00		3,13		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu		100	685.000.000	100	22.246.000,00	100	116.774.225	-	-	-	-	25	29.110.050	43	87.620.350	100	116.730.400,00	100,00	99,96	200	138.976.400,00		20,29		
	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	685.000.000	12	22.246.000	12	116.774.225	-	-	-	-	-	29.110.050	12	87.620.350	12	116.730.400,00	100,00	99,96	24	233.460.899,96		34,08		
	7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		72	100.000.000	12	11.123.000,00	12	12.881.850	-	-	-	-	9	11.352.500,00	3	1.520.000,00	12	12.872.500,00	100,00	99,93		23.995.500,00		24,00		
	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		72	100.000.000	12	-	12	11.123.000		-		-	-	0,00	12	11.117.000,00	12	11.117.000,00	100,00	99,95						
	7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan		72	100.000.000,00	12	-	12	22.246.000		-		-	9	11.738.975,00	3	10.498.500,00	12	22.237.475,00	100,00	99,96						
	7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		156	100.000.000	12	11.123.000,00	12	11.123.000		-		-	6	5.538.575,00	6	5.583.500,00	12	11.122.075,00	100,00	99,99						
	7.01.06.2.01.13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		18	100.000.000	12	-	12	26.031.375	-	-		-	-		12	26.023.950,00	12	26.023.950,00	100,00	99,97		26.023.950,00		26,02		
	7.01.06.2.01.16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		72	100.000.000	12	-	12	22.246.000	-	-	-	-	1	480.000,00	11	21.761.400,00	12	22.241.400,00	100,00	99,98		22.241.400,00		22,24		
									-																				
	7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		72	85.000.000	12	-	12	11.123.000	-	-	-	-	-		12	11.116.000,00	12	11.116.000,00	100,00	99,94		11.116.000,00		13,08		
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,96						
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00						
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																		TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	100,04	99,52			100,04	99,52		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	KECAMATAN SANGKAPURA																												
	KECAMATAN TAMBAK																												
							3.407.099.339		4.071.500.385		3.589.309.630		560.289.623		1.489.357.230		2.157.210.276		3.453.599.576		7.547.237.575		210,27		11.617.362.810		3,19		
V	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.073.824.571		3.402.234.235		3.288.328.430		560.289.623		1.413.494.322		2.031.513.768		3.356.827.576		7.248.906.159		98,87		10.651.140.394		2,42		
I.1	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.996.000		7.727.000		-		-		-		5.413.000		3.583.000		8.996.000		0,00		16.723.000		0,93		
I.1.1	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD		6	8.996.000	6	7.727.000	6	-	6	-	6	-	6	5.413.000		3.583.000	6	8.996.000	6	0,00	6	16.723.000	6	1,86		
I.2	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.466.809.339		2.525.357.000		2.623.031.060		525.189.623		1.273.360.622		1.761.441.868		3.034.802.496		6.594.794.609		125,71		9.120.151.609		1,85		
I.2.1	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100	2.466.809.339	100	2.525.357.000	100	2.623.031.060	100	525.189.622,62	6	1.273.360.622,47	6	1.761.441.868		3034802496	100	6.594.794.609	100	251,42	100	9.120.151.609	100	3,70		
I.3	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				260.633.837		495.737.210		355.024.830		-		23.224.000		69.233.750		178.670.380		157.909.000		94,76		653.646.210		2,24		
I.3.1	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik		12	10.317.400	12	4.635.400	12	5.732.580	12	-	12	-	12	2.500.000		7.800.000	12	10.300.000	12	179,67	12	14.935.400	12	1,45		
I.3.2	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		3	74.380.804	3	101.757.410	3	35.170.350	3	-	3	-	3	13.400.000		59.938.000	3	73.338.000	3	208,52	3	175.095.410	3	2,35		
I.3.4	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik		12	46.739.220	12	49.995.000	12	36.202.500	12	-	12	2.061.000,00	12	8.741.000		26.990.000	12	37.792.000	12	104,39	12	87.787.000	12	1,88		
I.3.5	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		5	6.445.630	5	5.093.400	5	4.303.400	5	-	5	-	5	1.900.000		4.500.000	5	6.400.000	5	148,72	5	11.493.400	5	1,78		
I.3.6	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		12	92.064.000	12	167.128.000	12	136.808.000	12	-	12	21.163.000	12	30.962.750		61.093.380	12	-	12	0,00	12	167.128.000	12	1,82		
I.3.6	7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		12	30.686.783	12	167.128.000	12	136.808.000	12	-	12	-	12	11.730.000		18.349.000	12	30.079.000	12	21,99	12	197.207.000	12	6,43		
I.4	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.357.750		243.303.000		237.700.140		35.100.000		104.159.700		167.075.150		96.162.700		402.497.550		175,56		645.800.550		2,30		
I.4.1	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tenaga jasa administrasi		5	156.234.000	5	138.960.000	5	134.443.200	5	35.100.000	5	71.399.700,00	5	107.399.700		48.000.000	5	261.899.400	5	194,80	5	400.859.400	5	2,57		
I.4.2	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon		3	50.681.250	3	48.000.000	3	44.425.000	3	-	3	7.460.000,00	3	22.235.450		27.162.700	3	56.858.150	3	127,99	3	104.858.150	3	2,07		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
I.4.3	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	8.042.500	3	4.897.000	3	5.000.000	3	-	3	4.300.000	3	8.040.000		-	3	12.340.000	3	246,80	3	17.237.000	3	2,14		
I.4.4	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor		3	50.400.000	3	51.446.000	3	53.831.940	3	-	3	21.000.000,00	3	29.400.000		21.000.000	3	71.400.000	3	132,64	3	122.846.000	3	2,44		
I.5	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.027.645		130.110.025		72.572.400		-		12.750.000		28.350.000		43.609.000		84.709.000		98,32		214.819.025		4,76		
I.5.1	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		2	47.977.445	2	46.818.000	2	30.695.400	2	-	2	12.750.000,00	2	26.350.000		21.584.000	2	60.684.000	2	197,70	2	107.502.000	2	2,24		
I.5.2	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor		1	20.675.200	1	59.010.525	1	30.057.000	1	-	1	-	1	-		20.650.000	1	20.650.000	1	68,70	1	79.660.525	1	3,85		
I.5.2	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		5	3.375.000	5	24.281.500	5	11.820.000	5	-	5	-	5	2.000.000		1.375.000	5	3.375.000	5	28,55	5	27.656.500	5	8,19		
II	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				197.664.199		321.057.150		155.472.300		-		61.362.908		86.116.908		47.242.000		194.721.816		154,62		514.403.816		2,73		
II.1	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				65.856.720		154.071.400		67.357.000		-		20.683.408		23.273.408		9.808.000		53.764.816		149,27		207.836.216		3,13		
II.1.1	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan		65	28.123.408	65	39.706.000	65	15.533.000	65	-	65	20.683.408,00	65	22.523.408		-	65	43.206.816	65	278,16	65	82.912.816	65	2,95		
II.1.2	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah BUMDes, UKM dan Intensifikasi PBB yang difasilitasi		13	37.733.312	13	114.365.400	13	51.824.000	13	-	13	-	13	750.000		9.808.000	13	10.558.000	13	20,37	13	124.923.400	13	3,31		
II.2	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				131.807.479		166.985.750		88.115.300		-		40.679.500		62.843.500		37.434.000		140.957.000		159,97		306.567.600		2,33		
II.2.1	7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kelembagaan		13	131.807.479	13	165.610.600	13	88.115.300	13	-	13	40.679.500,00	13	62.843.500		37.434.000	13	140.957.000	13	159,97	13	306.567.600	13	2,33		
III	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.818.248		215.737.000		95.489.000		-		14.500.000		23.300.000		21.220.000		59.020.000		61,81		274.757.000		5,63		
III.1	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.818.248		215.737.000		95.489.000		-		14.500.000		23.300.000		21.220.000		59.020.000		61,81		274.757.000		5,63		
III.1.1	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan		12	48.818.248	12	215.737.000	12	95.489.000	12	-	12	14.500.000,00	12	23.300.000		21.220.000	12	59.020.000	12	61,81	12	274.757.000	12	5,63		
IV	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				86.792.321		132.472.000		50.019.900		-		-		16.279.600		28.310.000		44.589.600		52,08		177.061.600		1,97		
IV.1	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				86.792.321		132.472.000		50.019.900		-		-		16.279.600		28.310.000		44.589.600		52,08		177.061.600		1,97		
IV.1.1	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monev APBDes Jumlah fasilitasi pembinaan perangkat desa		13	21.473.600	13	11.000.000	13	20.064.000	13	-	13	-	13	7.403.600		13.710.000	13	21.113.600	13	105,23	13	32.113.600	13	1,50		
IV.1.2	7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD		13	32.852.003	13	81.425.000	13	14.629.900	13	-	13	-	13	-		5.100.000	13	5.100.000	13	34,86	13	86.525.000	13	2,63		
IV.1.3	7.01.06.2.01.0007		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD		13	17.177.310	13	3.447.000	13	-	0	-	0	-	0	6.500.000		1.420.000	13	7.920.000	13	0,00	13	11.367.000	13	0,66		
IV.1.4	7.01.06.2.01.0016		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan		13	15.289.408	13	36.600.000	13	15.326.000	13	-	13	-	13	2.376.000		8.080.000	13	10.456.000	13	68,22	13	47.056.000	13	3,08		
Rata - rata capaian kinerja (%)																							210,27				3,19		
Predikat Kinerja																							T		12.226.343.910		SR		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			3.407.099.339		4.071.500.385		3.589.309.630	13,76	560.289.623	41,49	1.489.357.230	#####	2.157.210.276	231,89	3.453.599.576	210,27	7.547.237.575		210,27		11.617.362.810		3,19		
																						TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		100,00	89,96			100,00	89,96		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																												
	8.01.8.01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Persen	100	183.137.414.273,50	100	79.607.298.954,50	100	82.953.008.185	41	874.729.856,38	19	14.086.615.080,61	29	54.832.204.254,72	-	9.634.790.110,35	89	79.428.339.302,06	89,01	95,75	189	159.035.638.256,56	189,01	86,84	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	21.105.413.827,50	100	21.126.468.082,50	100	5.051.093.857	27	782.413.356,38	27	1.275.957.812,61	27	1.431.524.408,98	19	1.131.973.787,77	100	4.621.869.365,74	100,00	91,50	200	25.748.337.448,24	200,00	122,00	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	Persen	100	708.935.396,50	40	862.991.822,50	20	646.086.252,00	2	-	2	257.598.000,00	16	240.815.000,00	-	2.460.000,00	20	500.873.000,00	100,00	77,52	60	1.363.864.822,50	60,00	192,38	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.01.0001.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanna OPD	Dokumen	12	241.162.754,00	12	241.162.754,00															12	241.162.754,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	62.350.150,00	6	27.356.000	6	35.488.804	1	-	1	20.980.000,00	2	2.430.000,00	2	2.460.000	6	25.870.000,00	100,00	72,90	12	53.226.000,00	50,00	85,37	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.01.0006.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	10	350.732.531,50	10	350.732.531,50															10	350.732.531,50	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	54.689.961,00	7	243.740.537	84	610.597.448	21	-	22	236.618.000,00	40	238.385.000,00	1	-	84	475.003.000,00	100,00	77,79	91	718.743.537,00	325,00	1.314,21	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	Persen	100	16.341.604.430,00	100	8.210.614.840,00	100	3.350.101.786,00	25	722.285.686,38	25	910.379.086,61	26	892.931.952,98	-	699.023.107,81	76	3.224.619.833,78	76,00	96,25	176	11.435.234.673,78	176,00	69,98	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.02.0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	13	4.924.269.840,00	13	4.924.269.840,00															13	4.924.269.840,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	11.417.334.590,00	28	3.286.345.000	29	3.350.101.786	21	722.285.686,38	21	910.379.086,61	21	892.931.952,98	7	699.023.108	22	3.224.619.833,78	75,86	96,25	50	6.510.964.833,78	166,67	57,03	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persen	100	1.806.378.572,00	100	1.120.655.179,00	100	603.156.819,00	5	21.560.375,00	35	43.047.543,00	8	168.526.326,00	52	219.528.320,96	100	452.662.564,96	100,00	86,37	200	1.573.317.743,96	200,00	87,10	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0002.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	88	341.351.609,00	88	341.351.609,00															88	341.351.609,00	100,00	100,00	Sekretariat	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	176	403.009.626,00	44	257.595.000	13	192.760.949	1	1.944.475,00	5	20.229.593,00	5	41.252.858,00	2	113.561.179	13	176.988.105,00	100,00	91,82	57	434.583.105,00	32,39	107,83	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0004.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Nakanan dan Minum	Tahun	2	41.569.290,00	2	41.569.290,00															2	41.569.290,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	576	108.262.267,00	144	29.056.000	2	29.047.720	1	1.245.000,00	-	1.680.000,00	1	4.603.600,00	-	7.996.470	2	15.525.070,00	100,00	53,45	146	44.581.070,00	25,35	41,18	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0005.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	Jenis	24	35.616.840,00	24	35.616.840,00															24	35.616.840,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	92.759.820,00	12	20.859.440	3	22.963.375	-	-	1	3.061.900,00	1	5.800.000,00	1	5.426.475	3	14.288.375,00	100,00	62,22	15	35.147.815,00	31,25	37,89	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0006.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jesnis Surat kabar	Jenis	3	7.200.000,00	3	7.200.000,00															3	7.200.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	19.689.120,00	36	6.700.000	36	12.916.000	9	-	9	729.000,00	9	3.715.000,00	9	972.000	36	5.416.000,00	100,00	41,93	72	12.116.000,00	50,00	61,54	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0009.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Tahun	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00															2	210.000.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	546.920.000,00	60	170.707.000	32	247.423.000	3	18.370.900,00	3	17.347.050,00	18	113.154.868,00	8	75.172.197	32	224.045.014,96	100,00	90,55	92	394.752.014,96	38,33	72,18	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.06.0011.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	6	450.000.000,00	0	-	2	98.045.775	-	-	-	-	-	-	2	16.400.000	2	16.400.000,00	100,00	16,73	2	16.400.000,00	33,33	3,64	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana apaatur	Persen	100	990.051.360,00	100	433.483.200,00	100	171.972.000,00	25	14.392.558,00	25	28.642.558,00	18	71.606.395,00	32	57.213.837,00	100	171.855.348,00	100,00	99,93	200	605.338.548,00	200,00	61,14	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.08.0004.		Penyediaan Jasa Pelavanan Umum Kantor	Jumlah Pelakana Tugas ASN	Orang	10	274.680.000,00	10	274.680.000,00															10	274.680.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	715.371.360,00	6	158.803.200	72	171.972.000	18	14.392.558,00	18	28.642.558,00	18	71.606.395,00	18	57.213.837	72	171.855.348,00	100,00	99,93	78	330.658.548,00	325,00	46,22	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	1.258.444.069,00	100	10.498.723.041,00	100	279.777.000,00	25	24.174.737,00	25	36.290.625,00	25	57.644.735,00	25	153.748.522,00	100	271.858.619,00	100,00	97,17	200	10.770.581.660,00	200,00	855,86	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0001.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	72.210.000,00	1	72.210.000,00															1	72.210.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	154.440.000,00	1	38.610.000	1	38.610.000	1	6.432.439,00	-	8.250.577,00	-	2.250.000,00	-	21.443.228	1	38.376.244,00	100,00	99,39	2	76.986.244,00	200,00	49,85	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0002.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Unit	3	134.400.000,00	3	134.400.000,00															3	134.400.000,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	403.200.000,00	3	134.400.000	4	134.400.000	4	17.742.298,00	-	27.210.048,00	-	49.764.735,00	-	39.553.182	4	134.270.263,00	100,00	99,90	7	268.670.263,00	233,33	66,63	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.0009.		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kursi dan Meja	Unit	0	-	0	-															0	-	0,00	-	Sekretariat	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	20.893.684,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0006.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	60	16.681.241,00	60	16.681.241,00															60	16.681.241,00	100,00	100,00	Sekretariat	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	128	73.459.144,00	32	13.150.000	28	16.440.000	6	-	-	830.000,00	12	5.630.000,00	10	5.065.000	28	11.525.000,00	100,00	70,10	60	24.675.000,00	46,88	33,59	Sekretariat	
	8.01.8.01.0.00.001 .2.09.0010.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	383.160.000,00	7	10.089.271.800,00	2	90.327.000	2	-	-	-	-	-	-	87.687.112	2	87.687.112,00	100,00	97,08	9	10.176.958.912,00	75,00	2.656,06	Sekretariat	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	91,50			200,00	122,00		
																					Predikat Kinerja								
	8.01.8.01.0.00.002		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	15.746.374.346,00	100	3.346.651.672,00	100	2.986.220.427	14	18.600.000	6	435.208.000	40	758.656.479	40	1.169.851.200	100	2.382.315.679,00	100,00	79,78	200	5.728.967.351,00	200,00	36,38	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.002 .2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Lembaga	100	15.746.374.346,00	100	3.346.651.672,00	100	2.986.220.427,00	14	18.600.000,00	6	435.208.000,00	40	758.656.479,00	40	1.169.851.200,00	100	2.382.315.679,00	100,00	79,78	200	5.728.967.351,00	200,00	36,38	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.002 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Upacara hari-hari Besar Nasional dan HUT Pemhda	Kali	19	834.028.120,00	19	834.028.120,00															19	834.028.120,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	40000	6.463.600.000,00	10000	828.336.452	10155	1.426.309.121	1.437	-	750	38.510.000,00	2.250	220.929.000,00	5.718	1.058.191.200	10.155	1.317.630.200,00	100,00	92,38	20155	2.145.966.652,00	50,39	33,20	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.002 .2.01.0004.		Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pembaruan Kebangsaan	Kali	16	1.219.637.600,00	16	1.219.637.600,00															16	1.219.637.600,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	40000	7.229.108.626,00	1000	464.649.500	440	1.559.911.306	77	18.600.000,00	0	396.698.000,00	300	537.727.479,00	63	111.660.000	440	1.064.685.479,00	100,00	68,25	1440	1.529.334.979,00	3,60	21,16	Bidang Kesatuan Bangsa	
																					Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	79,78			200,00	36,38		
																					Predikat Kinerja								
	8.01.8.01.0.00.003.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	Persen	100	126.088.412.400,00	100	51.309.260.200,00	100	64.823.921.382	3	6.080.000	13	10.452.477.900	80	51.300.851.550	4	2.102.731.163	100	63.862.140.613,00	100,00	98,52	200	115.171.400.813,00	200,00	91,34	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	8.01.8.01.0.00.003 .2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	Persen	100	126.088.412.400,00	100	51.309.260.200,00	100	64.823.921.382,00	3	6.080.000,00	13	10.452.477.900,00	80	51.300.851.550,00	4	2.102.731.163,00	100	63.862.140.613,00	100,00	98,52	200	115.171.400.813,00	200,00	91,34	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.003 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Sosialisasi Persiapan, Pemantauan, Koordinasi dan Pelaporan Pemilihan Umum	Kali	80	6.405.192.400,00	80	6.405.192.400,00																80	6.405.192.400,00	100,00	100,00	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	4000	994.400.000,00	1000	36.439.967.800	360	58.786.104.223	8	6.080.000,00	-	7.080.830.000,00	352	50.922.720.400,00	-	72.981.053	360	58.082.611.453,00	100,00	98,80	1360	94.522.579.253,00	34,00	9.505,49	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.003 .2.01.0005.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang Dibina	Partai Politik	16	4.240.620.000,00	16	4.240.620.000,00																16	4.240.620.000,00	100,00	100,00	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	80	114.448.200.000,00	20	4.223.480.000	12	6.037.817.159	3	-	3	3.371.647.900,00	3	378.131.150,00	3	2.029.750.110	12	5.779.529.160,00	100,00	95,72	32	10.003.009.160,00	40,00	8,74	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			100,00	100,00		
																				Predikat Kinerja									
	8.01.8.01.0.00.004		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	Persen	100	1.705.218.000	100	419.034.000	100	306.749.919	25	-	25	37.945.000	25	40.653.500	25	39.039.450	100	117.637.950,00	100,00	38,35	200	536.671.950,00	200,00	31,47	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.004 .2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	Persen	100	1.705.218.000	100	419.034.000	100	306.749.919	25	-	25	37.945.000	25	40.653.500	25	39.039.450	100	117.637.950,00	100,00	38,35	200	536.671.950,00	200,00	31,47	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.8.01.0.00.004 .2.01.0005.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang dibina	LSM dan ORMAS	100	337.918.000	100	337.918.000															100	337.918.000,00	100,00	100,00	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah	Laporan	200	1.367.300.000	50	81.116.000	12	306.749.919	3	-	3	37.945.000	3	40.653.500,00	3	39.039.450	12	117.637.950,00	100,00	38,35	62	198.753.950,00	31,00	14,54	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	38,35			200,00	31,47		
																				Predikat Kinerja									
	8.01.8.01.0.00.005.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	Persen	100	11.841.354.300,00	100	1.932.609.000,00	100	905.000.000	-	-	7	600.000.000	82	203.716.000	11	-	100	803.716.000,00	100,00	88,81	200	2.736.325.000,00	200,00	23,11	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.005 .2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	Persen	100	11.841.354.300,00	100	1.932.609.000,00	100	905.000.000,00	-	-	7	600.000.000,00	82	203.716.000,00	11	-	100	803.716.000,00	100,00	88,81	200	2.736.325.000,00	200,00	23,11	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.005 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Hibah FKUB	Tahun	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00																2	1.200.000.000,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	4000	2.400.000.000,00	1000	600.000.000	600	800.000.000	-	-	-	600.000.000,00	600	200.000.000,00	-	-	600	800.000.000,00	100,00	100,00	1600	1.400.000.000,00	40,00	58,33	Bidang Kesatuan Bangsa	

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit PD Penanggung jawab	Ket.
												I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		18	19
	8.01.8.01.0.00.005 .2.01.0004.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitas FKUB, P4GN dan Satgas Toleransi kehidupan hermasyarakat	Kali	48	128.169.000,00	48	128.169.000,00														48	128.169.000,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	4000	8.113.185.300,00	1000	4.440.000	384	105.000.000	-	-	70	-	300	3.716.000,00	14	-	384	3.716.000,00	100,00	3,54	1384	8.156.000,00	34,60	0,10	Bidang Kesatuan Bangsa	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	88,81			200,00	23,11		
	8.01.8.01.0.00.006.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	Persen	100	6.650.641.400,00	100	1.473.276.000,00	100	8.880.022.600,00	36	67.636.500	-	1.285.026.368	-	1.096.802.317	64	5.191.194.510	100	7.640.659.694,32	100,00	86,04	200	9.113.935.694,32	200,00	137,04	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan FKDM	Persen	100	6.650.641.400,00	100	1.473.276.000,00	100	8.880.022.600,00	36	67.636.500,00	-	1.285.026.368,00	-	1.096.802.316,74	64	5.191.194.509,58	100	7.640.659.694,32	100,00	86,04	200	9.113.935.694,32	200,00	137,04	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.0003.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	600	200.000.000,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	-	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.0004.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pemantauan Pengamanan Hari-hari Besar, Pemantauan Pengamanan Pejabat, Pemantauan Pengamanan Unjuk Rasa Rapak Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi penanganan Konflik Sosial	Kali	98	931.841.400,00	98	931.841.400,00																98	931.841.400,00	100,00	100,00	Bidang Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3600	3.800.000.000,00	900	498.084.600	993	834.950.000	63	22.756.500,00	139	361.740.000,00	550	49.034.991,00	241	67.578.500	993	501.109.991,00	100,00	60,02	1893	999.194.591,00	52,58	26,29	Bidang Kesatuan Bangsa	
	8.01.8.01.0.00.006 .2.01.0006.		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	48	1.718.800.000,00	12	43.350.000	12	8.045.072.600	1	44.880.000,00	5	923.286.368,00	4	1.047.767.325,74	2	5.123.616.010	12	7.139.549.703,32	100,00	88,74	24	7.182.899.703,32	50,00	417,90	Bidang Kesatuan Bangsa	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	86,04			200,00	137,04		
																				Predikat Kinerja									
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																													
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)																						89,01	95,75			189,01	86,84		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM.....)																													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																													
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						98,29	93,02			89,50	63,49		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

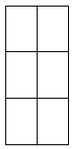

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINATAH DAERAH KABUPEN GRESIK TAHUN 2026

Tabel 5.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**970.248.976.192,00**							**911.498.169.658,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**970.248.976.192,00**							**911.498.169.658,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**970.248.976.192,00**							**911.498.169.658,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**553.568.570.147,00**						**-**	**570.655.092.060,00**	
		[Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah]	**Rerata Persentase Capaian Kinerja Program**	**100**	**100**	**100**	**100**	**553.568.570.147,00**	-	-	-	-	-	-	**570.655.092.060,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD*	-			4 Dokumen	558.339.103,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	645.366.176,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	119.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		149.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	258.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		283.507.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	179.862.103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		212.508.676,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	545.226.777.500,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	561.583.580.824,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4937 Orang/bulan	545.163.323.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		561.518.223.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	25.734.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		26.506.638,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	37.719.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		38.850.776,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.285.340.940,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.521.243.004,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		66.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	188.177.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		382.360.411,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	202.276.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-		208.345.248,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	88.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-		90.722.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	55.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		57.008.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	246.256.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		253.644.195,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	440.202.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		462.212.310,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.847.133.204,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	5.065.631.674,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.362.689.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.403.570.395,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	45.099.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		119.536.959,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	3.439.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		3.542.524.320,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**553.568.570.147,00**	-	-	-	-	-	-	**570.655.092.060,00**	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.650.979.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.839.270.382,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	383.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		395.519.176,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah]	**Rerata Persentase Capaian Kinerja Program**	**100**	**100**	**100**	**100**	**553.568.570.147,00**	-	-	-	-	-	-	**570.655.092.060,00**	-
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	69.545.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		210.393.362,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.197.434.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.233.357.844,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**383.976.489.897,00**						**-**	**307.158.044.093,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun]	**Angka Partisipasi Kasar PAUD** **Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni PAUD** **Angka Partisipasi Murni Paud Sederajat dari Keluarga Miskin** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni**	**100** **102.77** **34.74** **56.59** **58.13** **65.15** **72.92** **74.95** **76.30** **79.45** **83.97** **90.73** **93.24** **94.30** **95.64** **97.28**	**100** **102.6** **34.62** **49.58** **56.41** **57.95** **72.74** **74.77** **76.12** **79.27** **83.79** **90.61** **93.06** **94.12** **95.52** **97.1**	**100** **102.62** **34.64** **51.15** **56.44** **57.98** **72.77** **74.8** **76.15** **79.30** **83.82** **90.63** **93.09** **94.15** **95.54** **97.13**	**100** **102.65** **34.66** **56.47** **57.15** **58.01** **72.80** **74.83** **76.18** **79.33** **83.85** **90.65** **93.12** **94.18** **95.56** **97.16**	**383.976.489.897,00**	-	-	-	-	-	-	**307.158.044.093,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin **Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan** **Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatk an pelayanan melalui UPT LPABK** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan** **Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah** **Rasio sekolah yang melakukan pelatihan atau sosialisasi sekolah ramah anak kepada guru dan siswa setiap tahun**														
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	145.158.272.512,02			-	#GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	107.632.853.259,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	493.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		508.642.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	115.840.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		119.315.328,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2995 Orang	208.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		214.631.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2000 Orang	303.374.729,02	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		312.475.971,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	50.730.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	22.378.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		23.049.803.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				480 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	16.750.000,00	Kab. Gresik, Gresik, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				480 Kegiatan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		82.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				453 Orang	85.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		88.196.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				389 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				147 Ruang	27.900.671.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		34.126.676.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	42.595.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		48.873.210.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	85.636.240.384,98			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	70.762.854.524,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				52 Ruang	11.671.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		12.021.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	216.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		223.098.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				36654 Peserta Didik	37.315.719.875,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		38.435.191.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3500 Peserta Didik	355.340.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		366.000.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	272.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		281.165.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	16.934.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	18.399.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		18.951.412.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				125 Dokumen	162.742.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		167.624.548,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				18 Dokumen	107.830.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		111.065.473,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				35 Satuan Pendidikan	132.138.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		136.102.758,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1500 Orang	68.022.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		70.063.212,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	72.641.647.000,00			-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	74.820.896.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				201 Paket	10.164.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		10.469.071.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				65389 Peserta Didik	15.693.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		16.164.160.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3206 Orang	7.694.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		7.925.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				650 Satuan Pendidikan	450.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		464.015.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1455 Satuan Pendidikan	38.109.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		39.252.517.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		545.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	80.540.330.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	53.941.439.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				173088 Peserta Didik	39.677.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		40.867.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	28.170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	#GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	2.626.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-		2.705.119.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				3101 Orang	10.005.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-		10.305.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				14 Peserta Didik	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		63.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**32.488.938.000,00**						**-**	**33.463.606.140,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	**Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP**	**92.29** **99.01**	**92.17** **98.67** **98.89**	**92.19** **98.69** **98.91**	**92.21** **98.71** **98.93**	**32.488.938.000,00**	-	-	-	-	-	-	**33.463.606.140,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	32.488.938.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	33.463.606.140,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1920 Dokumen	32.488.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		33.463.606.140,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**214.978.148,00**						**-**	**221.427.365,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	**Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP** **Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP**	**100** **92.29** **98.79** **99.01**	**100** **92.17** **98.67** **98.89**	**100** **92.19** **98.69** **98.91**	**100** **92.21** **98.71** **98.93**	**214.978.148,00**	-	-	-	-	-	-	**221.427.365,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	51.579.024,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	53.126.395,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				120 Dokumen	51.579.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		53.126.395,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	163.399.124,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	168.300.970,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				636 Dokumen	163.399.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		168.300.970,00	DINAS PENDIDIKAN
		UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS						**347.089.068,00**							**357.501.740,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**347.089.068,00**							**357.501.740,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**347.089.068,00**							**357.501.740,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**347.089.068,00**						**-**	**357.501.740,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus]	**Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan pelayanan melalui UPT LPABK**	**65.15**	**49.58**	**51.15**	**57.15**	**347.089.068,00**	-	-	-	-	-	-	**357.501.740,00**	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	347.089.068,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	357.501.740,00	UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				107 Satuan Pendidikan	347.089.068,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		357.501.740,00	UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
		UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME						**1.518.851.440,00**							**1.564.416.983,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.518.851.440,00**							**1.564.416.983,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.518.851.440,00**							**1.564.416.983,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.518.851.440,00**						**-**	**1.564.416.983,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT Sanggar Kegiatan Belajar Cerme]	**Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan** **Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.518.851.440,00**	-	-	-	-	-	-	**1.564.416.983,00**	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.518.851.440,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.564.416.983,00	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	1.518.851.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.564.416.983,00	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME
		UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP NEGERI 1 GRESIK)						**2.015.234.800,00**							**2.075.691.844,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.015.234.800,00**							**2.075.691.844,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.015.234.800,00**							**2.075.691.844,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.015.234.800,00**						**-**	**2.075.691.844,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 1 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.015.234.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.075.691.844,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.015.234.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.075.691.844,00	UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP NEGERI 1 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.015.234.800,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.075.691.844,00	UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP NEGERI 1 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP NEGERI 2 GRESIK)						**1.589.403.200,00**							**1.637.085.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.589.403.200,00**							**1.637.085.296,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.589.403.200,00**							**1.637.085.296,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.589.403.200,00**						**-**	**1.637.085.296,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 2 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.589.403.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.637.085.296,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.589.403.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.637.085.296,00	UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP NEGERI 2 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.589.403.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Kebungson	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.637.085.296,00	UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP NEGERI 2 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP NEGERI 3 GRESIK)						**1.826.055.200,00**							**1.880.836.856,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.826.055.200,00**							**1.880.836.856,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.826.055.200,00**							**1.880.836.856,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.826.055.200,00**						**-**	**1.880.836.856,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 3 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.826.055.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.880.836.856,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.826.055.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.880.836.856,00	UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP NEGERI 3 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.826.055.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.880.836.856,00	UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP NEGERI 3 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP NEGERI 4 GRESIK)						**1.809.670.800,00**							**1.863.960.924,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.809.670.800,00**							**1.863.960.924,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.809.670.800,00**							**1.863.960.924,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.809.670.800,00**						**-**	**1.863.960.924,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 4 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.809.670.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.863.960.924,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.809.670.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.863.960.924,00	UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP NEGERI 4 GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.809.670.800,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.863.960.924,00	UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP NEGERI 4 GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP NEGERI 1 CERME)						**2.084.939.200,00**							**2.147.487.376,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.084.939.200,00**							**2.147.487.376,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.084.939.200,00**							**2.147.487.376,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.084.939.200,00**						**-**	**2.147.487.376,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 5 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.084.939.200,00**	-	-	-	-	-	-	**2.147.487.376,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.084.939.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.147.487.376,00	UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP NEGERI 1 CERME)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.084.939.200,00	Kab. Gresik, Cerme, Cerme Kidul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.147.487.376,00	UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP NEGERI 1 CERME)
		UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP NEGERI 1 SIDAYU)						**1.264.623.600,00**							**1.302.562.308,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.264.623.600,00**							**1.302.562.308,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.264.623.600,00**							**1.302.562.308,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.264.623.600,00**						**-**	**1.302.562.308,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 6 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.264.623.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.302.562.308,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.264.623.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.302.562.308,00	UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP NEGERI 1 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.264.623.600,00	Kab. Gresik, Sidayu, Mriyunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.302.562.308,00	UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP NEGERI 1 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 7 GRESIK (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)						**1.074.520.000,00**							**1.106.755.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.074.520.000,00**							**1.106.755.600,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.074.520.000,00**							**1.106.755.600,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.074.520.000,00**						**-**	**1.106.755.600,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 7 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.074.520.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.106.755.600,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.074.520.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.106.755.600,00	UPT SMP NEGERI 7 GRESIK (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.074.520.000,00	Kab. Gresik, Sangkapura, Sawahmulya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.106.755.600,00	UPT SMP NEGERI 7 GRESIK (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)
		UPT SMP NEGERI 8 GRESIK (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)						**2.206.437.600,00**							**2.272.630.728,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.206.437.600,00**							**2.272.630.728,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.206.437.600,00**							**2.272.630.728,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.206.437.600,00**						**-**	**2.272.630.728,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 8 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.206.437.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.272.630.728,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.206.437.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.272.630.728,00	UPT SMP NEGERI 8 GRESIK (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.206.437.600,00	Kab. Gresik, Driyorejo, Tenaru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.272.630.728,00	UPT SMP NEGERI 8 GRESIK (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)
		UPT SMP NEGERI 9 GRESIK (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)						**1.599.338.000,00**							**1.647.318.140,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.599.338.000,00**							**1.647.318.140,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.599.338.000,00**							**1.647.318.140,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.599.338.000,00**						**-**	**1.647.318.140,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 9 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.599.338.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.647.318.140,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.599.338.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.647.318.140,00	UPT SMP NEGERI 9 GRESIK (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.599.338.000,00	Kab. Gresik, Balongpanggang, Balongpanggang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.647.318.140,00	UPT SMP NEGERI 9 GRESIK (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)
		UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP NEGERI 1 BUNGAH)						**1.392.795.200,00**							**1.434.579.056,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.392.795.200,00**							**1.434.579.056,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.392.795.200,00**							**1.434.579.056,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.392.795.200,00**						**-**	**1.434.579.056,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 10 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.392.795.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.434.579.056,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.392.795.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.434.579.056,00	UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP NEGERI 1 BUNGAH)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.392.795.200,00	Kab. Gresik, Bungah, Bungah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.434.579.056,00	UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP NEGERI 1 BUNGAH)
		UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUKUN)						**1.155.561.600,00**							**1.190.228.448,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.155.561.600,00**							**1.190.228.448,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.155.561.600,00**							**1.190.228.448,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.155.561.600,00**						**-**	**1.190.228.448,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 11 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **76.3** **95.64**	**57.95** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **76.15** **95.54**	**58.01** **76.18** **95.56**	**1.155.561.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.190.228.448,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.155.561.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.190.228.448,00	UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUKUN)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.155.561.600,00	Kab. Gresik, Dukun, Mentaras	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.190.228.448,00	UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUKUN)
		UPT SMP NEGERI 12 GRESIK (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)						**1.789.580.800,00**							**1.843.268.224,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.789.580.800,00**							**1.843.268.224,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.789.580.800,00**							**1.843.268.224,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.789.580.800,00**						**-**	**1.843.268.224,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 12 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.789.580.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.843.268.224,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.789.580.800,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.843.268.224,00	UPT SMP NEGERI 12 GRESIK (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.789.580.800,00	Kab. Gresik, Wringinanom, Wringinanom	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.843.268.224,00	UPT SMP NEGERI 12 GRESIK (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)
		UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)						**723.863.600,00**							**745.579.508,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**723.863.600,00**							**745.579.508,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**723.863.600,00**							**745.579.508,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**723.863.600,00**						**-**	**745.579.508,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 13 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**723.863.600,00**	-	-	-	-	-	-	**745.579.508,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	723.863.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	745.579.508,00	UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	723.863.600,00	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		745.579.508,00	UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)
		UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP NEGERI 1 BENJENG)						**1.829.843.600,00**							**1.884.738.908,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.829.843.600,00**							**1.884.738.908,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.829.843.600,00**							**1.884.738.908,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.829.843.600,00**						**-**	**1.884.738.908,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 14 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.829.843.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.884.738.908,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.829.843.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.884.738.908,00	UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP NEGERI 1 BENJENG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.829.843.600,00	Kab. Gresik, Benjeng, Dermo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.884.738.908,00	UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP NEGERI 1 BENJENG)
		UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)						**1.395.071.600,00**							**1.436.923.748,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.395.071.600,00**							**1.436.923.748,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.395.071.600,00**							**1.436.923.748,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.395.071.600,00**						**-**	**1.436.923.748,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 15 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.395.071.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.436.923.748,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.395.071.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.436.923.748,00	UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.395.071.600,00	Kab. Gresik, Duduksampeyan, Sumengko	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.436.923.748,00	UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)
		UPT SMP NEGERI 16 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)						**1.821.835.200,00**							**1.876.490.256,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.821.835.200,00**							**1.876.490.256,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.821.835.200,00**							**1.876.490.256,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.821.835.200,00**						**-**	**1.876.490.256,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 16 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.821.835.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.876.490.256,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.821.835.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.876.490.256,00	UPT SMP NEGERI 16 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.821.835.200,00	Kab. Gresik, Kedamean, Kedamean	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.876.490.256,00	UPT SMP NEGERI 16 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)
		UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP NEGERI 1 MANYAR)						**1.808.881.200,00**							**1.863.147.636,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.808.881.200,00**							**1.863.147.636,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.808.881.200,00**							**1.863.147.636,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.808.881.200,00**						**-**	**1.863.147.636,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 17 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.808.881.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.863.147.636,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.808.881.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.863.147.636,00	UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP NEGERI 1 MANYAR)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.808.881.200,00	Kab. Gresik, Manyar, Sukomulyo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.863.147.636,00	UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP NEGERI 1 MANYAR)
		UPT SMP NEGERI 18 GRESIK (SMP NEGERI 1 MENGANTI)						**2.033.282.800,00**							**2.094.281.284,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.033.282.800,00**							**2.094.281.284,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.033.282.800,00**							**2.094.281.284,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.033.282.800,00**						**-**	**2.094.281.284,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 18 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**2.033.282.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.094.281.284,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	2.033.282.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	2.094.281.284,00	UPT SMP NEGERI 18 GRESIK (SMP NEGERI 1 MENGANTI)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	2.033.282.800,00	Kab. Gresik, Menganti, Domas	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		2.094.281.284,00	UPT SMP NEGERI 18 GRESIK (SMP NEGERI 1 MENGANTI)
		UPT SMP NEGERI 19 GRESIK (SMP NEGERI 1 TAMBAK GRESIK)						**439.176.400,00**							**452.351.692,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**439.176.400,00**							**452.351.692,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**439.176.400,00**							**452.351.692,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**439.176.400,00**						**-**	**452.351.692,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 19 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**439.176.400,00**	-	-	-	-	-	-	**452.351.692,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	439.176.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	452.351.692,00	UPT SMP NEGERI 19 GRESIK (SMP NEGERI 1 TAMBAK GRESIK)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	439.176.400,00	Kab. Gresik, Tambak, Tambak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		452.351.692,00	UPT SMP NEGERI 19 GRESIK (SMP NEGERI 1 TAMBAK GRESIK)
		UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)						**1.781.072.000,00**							**1.834.504.160,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.781.072.000,00**							**1.834.504.160,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.781.072.000,00**							**1.834.504.160,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.781.072.000,00**						**-**	**1.834.504.160,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 20 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.781.072.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.834.504.160,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.781.072.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.834.504.160,00	UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.781.072.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sekarkurung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.834.504.160,00	UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)
		UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP NEGERI 1 PANCENG)						**604.166.400,00**							**622.291.392,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**604.166.400,00**							**622.291.392,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**604.166.400,00**							**622.291.392,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**604.166.400,00**						**-**	**622.291.392,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 21 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**604.166.400,00**	-	-	-	-	-	-	**622.291.392,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	604.166.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	622.291.392,00	UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP NEGERI 1 PANCENG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	604.166.400,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		622.291.392,00	UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP NEGERI 1 PANCENG)
		UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)						**1.813.565.600,00**							**1.867.972.568,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.813.565.600,00**							**1.867.972.568,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.813.565.600,00**							**1.867.972.568,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.813.565.600,00**						**-**	**1.867.972.568,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 22 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.813.565.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.867.972.568,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.813.565.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.867.972.568,00	UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.813.565.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.867.972.568,00	UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)
		UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP NEGERI 2 SIDAYU)						**446.479.600,00**							**459.873.988,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**446.479.600,00**							**459.873.988,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**446.479.600,00**							**459.873.988,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**446.479.600,00**						**-**	**459.873.988,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 23 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**446.479.600,00**	-	-	-	-	-	-	**459.873.988,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	446.479.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	459.873.988,00	UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP NEGERI 2 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	446.479.600,00	Kab. Gresik, Sidayu, Wadeng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		459.873.988,00	UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP NEGERI 2 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP NEGERI 2 CERME)						**1.416.762.800,00**							**1.459.265.684,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.416.762.800,00**							**1.459.265.684,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.416.762.800,00**							**1.459.265.684,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.416.762.800,00**						**-**	**1.459.265.684,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 24 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.12** **72.74** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **94.18** **95.56**	**1.416.762.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.459.265.684,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.416.762.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.459.265.684,00	UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP NEGERI 2 CERME)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.416.762.800,00	Kab. Gresik, Cerme, Dungus	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.459.265.684,00	UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP NEGERI 2 CERME)
		UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP NEGERI 2 MANYAR)						**1.340.041.200,00**							**1.380.242.436,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.340.041.200,00**							**1.380.242.436,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.340.041.200,00**							**1.380.242.436,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.340.041.200,00**						**-**	**1.380.242.436,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 25 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.340.041.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.380.242.436,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.340.041.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.380.242.436,00	UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP NEGERI 2 MANYAR)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.340.041.200,00	Kab. Gresik, Manyar, Sembayat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.380.242.436,00	UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP NEGERI 2 MANYAR)
		UPT SMP NEGERI 26 GRESIK (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)						**1.421.153.200,00**							**1.463.787.796,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.421.153.200,00**							**1.463.787.796,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.421.153.200,00**							**1.463.787.796,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.421.153.200,00**						**-**	**1.463.787.796,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 26 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.15** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.421.153.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.463.787.796,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.421.153.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.463.787.796,00	UPT SMP NEGERI 26 GRESIK (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.421.153.200,00	Kab. Gresik, Wringinanom, Kedunganyar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.463.787.796,00	UPT SMP NEGERI 26 GRESIK (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)
		UPT SMP NEGERI 27 GRESIK (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)						**775.263.600,00**							**798.521.508,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**775.263.600,00**							**798.521.508,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**775.263.600,00**							**798.521.508,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**775.263.600,00**						**-**	**798.521.508,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 27 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**775.263.600,00**	-	-	-	-	-	-	**798.521.508,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	775.263.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	798.521.508,00	UPT SMP NEGERI 27 GRESIK (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	775.263.600,00	Kab. Gresik, Balongpanggang, Dapet	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		798.521.508,00	UPT SMP NEGERI 27 GRESIK (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)
		UPT SMP NEGERI 28 GRESIK (SMP NEGERI 2 BENJENG)						**1.242.988.800,00**							**1.280.278.464,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.242.988.800,00**							**1.280.278.464,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.242.988.800,00**							**1.280.278.464,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.242.988.800,00**						**-**	**1.280.278.464,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 28 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.242.988.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.280.278.464,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.242.988.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.280.278.464,00	UPT SMP NEGERI 28 GRESIK (SMP NEGERI 2 BENJENG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.242.988.800,00	Kab. Gresik, Benjeng, Balongmojo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.280.278.464,00	UPT SMP NEGERI 28 GRESIK (SMP NEGERI 2 BENJENG)
		UPT SMP NEGERI 29 GRESIK (SMP NEGERI 2 MENGANTI)						**1.803.116.400,00**							**1.857.209.892,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.803.116.400,00**							**1.857.209.892,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.803.116.400,00**							**1.857.209.892,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.803.116.400,00**						**-**	**1.857.209.892,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 29 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.803.116.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.857.209.892,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.803.116.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.857.209.892,00	UPT SMP NEGERI 29 GRESIK (SMP NEGERI 2 MENGANTI)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.803.116.400,00	Kab. Gresik, Menganti, Laban	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.857.209.892,00	UPT SMP NEGERI 29 GRESIK (SMP NEGERI 2 MENGANTI)
		UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP NEGERI 3 SIDAYU)						**380.468.400,00**							**391.882.452,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**380.468.400,00**							**391.882.452,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**380.468.400,00**							**391.882.452,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**380.468.400,00**						**-**	**391.882.452,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 30 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**380.468.400,00**	-	-	-	-	-	-	**391.882.452,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	380.468.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	391.882.452,00	UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP NEGERI 3 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	380.468.400,00	Kab. Gresik, Sidayu, Mriyunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		391.882.452,00	UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP NEGERI 3 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 31 GRESIK (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)						**688.283.600,00**							**708.932.108,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**688.283.600,00**							**708.932.108,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**688.283.600,00**							**708.932.108,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**688.283.600,00**						**-**	**708.932.108,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 31 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**688.283.600,00**	-	-	-	-	-	-	**708.932.108,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	688.283.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	708.932.108,00	UPT SMP NEGERI 31 GRESIK (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	688.283.600,00	Kab. Gresik, Balongpanggang, Pacuh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		708.932.108,00	UPT SMP NEGERI 31 GRESIK (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)
		UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP NEGERI 4 SIDAYU)						**344.578.800,00**							**354.916.164,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**344.578.800,00**							**354.916.164,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**344.578.800,00**							**354.916.164,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**344.578.800,00**						**-**	**354.916.164,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 32 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.30** **94.30** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.80** **76.18** **94.18** **95.56**	**344.578.800,00**	-	-	-	-	-	-	**354.916.164,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	344.578.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	354.916.164,00	UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP NEGERI 4 SIDAYU)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	344.578.800,00	Kab. Gresik, Sidayu, Lasem	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		354.916.164,00	UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP NEGERI 4 SIDAYU)
		UPT SMP NEGERI 33 GRESIK (SMP NEGERI 2 DRIYOREJO)						**1.034.784.000,00**							**1.065.827.520,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.034.784.000,00**							**1.065.827.520,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.034.784.000,00**							**1.065.827.520,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.034.784.000,00**						**-**	**1.065.827.520,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri 33 Gresik]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**1.034.784.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.065.827.520,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.034.784.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.065.827.520,00	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK (SMP NEGERI 2 DRIYOREJO)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	1.034.784.000,00	Kab. Gresik, Driyorejo, Bambe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.065.827.520,00	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK (SMP NEGERI 2 DRIYOREJO)
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATU ATAP)						**101.100.400,00**							**104.133.412,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**101.100.400,00**							**104.133.412,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**101.100.400,00**							**104.133.412,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**101.100.400,00**						**-**	**104.133.412,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SMP Negeri Satu Atap]	**Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan**	**58.13** **72.92** **76.3** **94.3** **95.64**	**57.95** **72.74** **76.12** **94.12** **95.52**	**57.98** **72.77** **76.15** **94.15** **95.54**	**58.01** **72.8** **76.18** **94.18** **95.56**	**101.100.400,00**	-	-	-	-	-	-	**104.133.412,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	101.100.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	104.133.412,00	UPT SMP NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATU ATAP)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	101.100.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Manyarejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		104.133.412,00	UPT SMP NEGERI SATU ATAP (SMP NEGERI SATU ATAP)
		UPT SD NEGERI 1 GRESIK (SD NEGERI BEDILAN GRESIK)						**415.770.400,00**							**428.243.512,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**415.770.400,00**							**428.243.512,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**415.770.400,00**							**428.243.512,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**415.770.400,00**						**-**	**428.243.512,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 1 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**415.770.400,00**	-	-	-	-	-	-	**428.243.512,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	415.770.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	428.243.512,00	UPT SD NEGERI 1 GRESIK (SD NEGERI BEDILAN GRESIK)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	415.770.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		428.243.512,00	UPT SD NEGERI 1 GRESIK (SD NEGERI BEDILAN GRESIK)
		UPT SD NEGERI 2 GRESIK (SD NEGERI KARANGTURI)						**210.211.200,00**							**216.517.536,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**210.211.200,00**							**216.517.536,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**210.211.200,00**							**216.517.536,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**210.211.200,00**						**-**	**216.517.536,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 2 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **92.65** **93.12** **97.16**	**210.211.200,00**	-	-	-	-	-	-	**216.517.536,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	210.211.200,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	216.517.536,00	UPT SD NEGERI 2 GRESIK (SD NEGERI KARANGTURI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	210.211.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Karang Turi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		216.517.536,00	UPT SD NEGERI 2 GRESIK (SD NEGERI KARANGTURI)
		UPT SD NEGERI 3 GRESIK (SD NEGERI LUMPUR)						**227.891.200,00**							**234.727.936,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**227.891.200,00**							**234.727.936,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.891.200,00**							**234.727.936,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**227.891.200,00**						**-**	**234.727.936,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 3 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**227.891.200,00**	-	-	-	-	-	-	**234.727.936,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	227.891.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	234.727.936,00	UPT SD NEGERI 3 GRESIK (SD NEGERI LUMPUR)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	227.891.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Lumpur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		234.727.936,00	UPT SD NEGERI 3 GRESIK (SD NEGERI LUMPUR)
		UPT SD NEGERI 4 GRESIK (SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK)						**752.456.000,00**							**775.029.680,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**752.456.000,00**							**775.029.680,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**752.456.000,00**							**775.029.680,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**752.456.000,00**						**-**	**775.029.680,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 4 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **9716**	**752.456.000,00**	-	-	-	-	-	-	**775.029.680,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	752.456.000,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	775.029.680,00	UPT SD NEGERI 4 GRESIK (SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	752.456.000,00	Kab. Gresik, Gresik, Karang Turi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		775.029.680,00	UPT SD NEGERI 4 GRESIK (SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK)
		UPT SD NEGERI 5 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL)						**709.706.400,00**							**730.997.592,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**709.706.400,00**							**730.997.592,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**709.706.400,00**							**730.997.592,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**709.706.400,00**						**-**	**730.997.592,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 TahunUPT SD NEGERI 5 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**402.62** **74.8** **93.09** **93.63** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**709.706.400,00**	-	-	-	-	-	-	**730.997.592,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	709.706.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	730.997.592,00	UPT SD NEGERI 5 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	709.706.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		730.997.592,00	UPT SD NEGERI 5 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL)
		UPT SD NEGERI 6 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 2)						**758.405.600,00**							**781.157.768,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**758.405.600,00**							**781.157.768,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**758.405.600,00**							**781.157.768,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**758.405.600,00**						**-**	**781.157.768,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 6 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**758.405.600,00**	-	-	-	-	-	-	**781.157.768,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	758.405.600,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	781.157.768,00	UPT SD NEGERI 6 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 2)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	758.405.600,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		781.157.768,00	UPT SD NEGERI 6 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 2)
		UPT SD NEGERI 7 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 3)						**510.787.200,00**							**526.110.816,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**510.787.200,00**							**526.110.816,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**510.787.200,00**							**526.110.816,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**510.787.200,00**						**-**	**526.110.816,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 7 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**510.787.200,00**	-	-	-	-	-	-	**526.110.816,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	510.787.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	526.110.816,00	UPT SD NEGERI 7 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 3)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	510.787.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		526.110.816,00	UPT SD NEGERI 7 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 3)
		UPT SD NEGERI 8 GRESIK (SDN 5 SIDOKUMPUL)						**219.260.000,00**							**225.837.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**219.260.000,00**							**225.837.800,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**219.260.000,00**							**225.837.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**219.260.000,00**						**-**	**225.837.800,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 8 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**219.260.000,00**	-	-	-	-	-	-	**225.837.800,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	219.260.000,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	225.837.800,00	UPT SD NEGERI 8 GRESIK (SDN 5 SIDOKUMPUL)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	219.260.000,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		225.837.800,00	UPT SD NEGERI 8 GRESIK (SDN 5 SIDOKUMPUL)
		UPT SD NEGERI 9 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 6)						**163.879.200,00**							**168.795.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**163.879.200,00**							**168.795.576,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**163.879.200,00**							**168.795.576,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**163.879.200,00**						**-**	**168.795.576,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 9 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**163.879.200,00**	-	-	-	-	-	-	**168.795.576,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	163.879.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	168.795.576,00	UPT SD NEGERI 9 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 6)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	163.879.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		168.795.576,00	UPT SD NEGERI 9 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 6)
		UPT SD NEGERI 10 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 7)						**140.086.400,00**							**144.288.992,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**140.086.400,00**							**144.288.992,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**140.086.400,00**							**144.288.992,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**140.086.400,00**						**-**	**144.288.992,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 10 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**402.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**140.086.400,00**	-	-	-	-	-	-	**144.288.992,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	140.086.400,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	144.288.992,00	UPT SD NEGERI 10 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 7)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	140.086.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Sido Kumpul	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		144.288.992,00	UPT SD NEGERI 10 GRESIK (SD NEGERI SIDOKUMPUL 7)
		UPT SD NEGERI 11 GRESIK (SD NEGERI SIDORUKUN)						**379.429.600,00**							**390.812.488,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**379.429.600,00**							**390.812.488,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**379.429.600,00**							**390.812.488,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**379.429.600,00**						**-**	**390.812.488,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 11 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**379.429.600,00**	-	-	-	-	-	-	**390.812.488,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	379.429.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	390.812.488,00	UPT SD NEGERI 11 GRESIK (SD NEGERI SIDORUKUN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	379.429.600,00	Kab. Gresik, Gresik, Sidorukun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		390.812.488,00	UPT SD NEGERI 11 GRESIK (SD NEGERI SIDORUKUN)
		UPT SD NEGERI 12 GRESIK (SD NEGERI SUKORAME)						**587.948.800,00**							**605.587.264,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**587.948.800,00**							**605.587.264,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**587.948.800,00**							**605.587.264,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**587.948.800,00**						**-**	**605.587.264,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 12 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**587.948.800,00**	-	-	-	-	-	-	**605.587.264,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	587.948.800,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	605.587.264,00	UPT SD NEGERI 12 GRESIK (SD NEGERI SUKORAME)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	587.948.800,00	Kab. Gresik, Gresik, Sukorame	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		605.587.264,00	UPT SD NEGERI 12 GRESIK (SD NEGERI SUKORAME)
		UPT SD NEGERI 13 GRESIK (SD NEGERI 1 TLOGOPATUT)						**161.197.600,00**							**166.033.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**161.197.600,00**							**166.033.528,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**161.197.600,00**							**166.033.528,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**161.197.600,00**						**-**	**166.033.528,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 13 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.662** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**161.197.600,00**	-	-	-	-	-	-	**166.033.528,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	161.197.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	166.033.528,00	UPT SD NEGERI 13 GRESIK (SD NEGERI 1 TLOGOPATUT)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	161.197.600,00	Kab. Gresik, Gresik, Tlogo Patut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		166.033.528,00	UPT SD NEGERI 13 GRESIK (SD NEGERI 1 TLOGOPATUT)
		UPT SD NEGERI 14 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPATUT 2)						**430.182.400,00**							**443.087.872,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**430.182.400,00**							**443.087.872,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**430.182.400,00**							**443.087.872,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**430.182.400,00**						**-**	**443.087.872,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 14 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**430.182.400,00**	-	-	-	-	-	-	**443.087.872,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	430.182.400,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	443.087.872,00	UPT SD NEGERI 14 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPATUT 2)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	430.182.400,00	Kab. Gresik, Gresik, Tlogo Patut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		443.087.872,00	UPT SD NEGERI 14 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPATUT 2)
		UPT SD NEGERI 15 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPOJOK)						**395.927.200,00**							**407.805.016,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**395.927.200,00**							**407.805.016,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**395.927.200,00**							**407.805.016,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**395.927.200,00**						**-**	**407.805.016,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 15 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**395.927.200,00**	-	-	-	-	-	-	**407.805.016,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	395.927.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	407.805.016,00	UPT SD NEGERI 15 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPOJOK)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	395.927.200,00	Kab. Gresik, Gresik, Tlogo Pojok	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		407.805.016,00	UPT SD NEGERI 15 GRESIK (SD NEGERI TLOGOPOJOK)
		UPT SD NEGERI 16 GRESIK (SD NEGERI DAHANREJO)						**511.504.000,00**							**526.849.120,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**511.504.000,00**							**526.849.120,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**511.504.000,00**							**526.849.120,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**511.504.000,00**						**-**	**526.849.120,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 16 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.86** **90.65** **97.16**	**511.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**526.849.120,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	511.504.000,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	526.849.120,00	UPT SD NEGERI 16 GRESIK (SD NEGERI DAHANREJO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	511.504.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		526.849.120,00	UPT SD NEGERI 16 GRESIK (SD NEGERI DAHANREJO)
		UPT SD NEGERI 17 GRESIK (SD NEGERI GENDING)						**407.758.400,00**							**419.991.152,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**407.758.400,00**							**419.991.152,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**407.758.400,00**							**419.991.152,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**407.758.400,00**						**-**	**419.991.152,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 17 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**407.758.400,00**	-	-	-	-	-	-	**419.991.152,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	407.758.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	419.991.152,00	UPT SD NEGERI 17 GRESIK (SD NEGERI GENDING)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	407.758.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Gending	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		419.991.152,00	UPT SD NEGERI 17 GRESIK (SD NEGERI GENDING)
		UPT SD NEGERI 18 GRESIK (SD NEGERI GULOMANTUNG)						**465.773.600,00**							**479.746.808,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**465.773.600,00**							**479.746.808,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**465.773.600,00**							**479.746.808,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**465.773.600,00**						**-**	**479.746.808,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 18 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**402.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**465.773.600,00**	-	-	-	-	-	-	**479.746.808,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	465.773.600,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	479.746.808,00	UPT SD NEGERI 18 GRESIK (SD NEGERI GULOMANTUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	465.773.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Gulomantung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		479.746.808,00	UPT SD NEGERI 18 GRESIK (SD NEGERI GULOMANTUNG)
		UPT SD NEGERI 19 GRESIK (SD NEGERI INDRO)						**628.609.600,00**							**647.467.888,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**628.609.600,00**							**647.467.888,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**628.609.600,00**							**647.467.888,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**628.609.600,00**						**-**	**647.467.888,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 19 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.27** **74.95** **90.73** **93.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**628.609.600,00**	-	-	-	-	-	-	**647.467.888,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	628.609.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	647.467.888,00	UPT SD NEGERI 19 GRESIK (SD NEGERI INDRO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	628.609.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Indro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		647.467.888,00	UPT SD NEGERI 19 GRESIK (SD NEGERI INDRO)
		UPT SD NEGERI 20 GRESIK (SD NEGERI KARANGKERING)						**146.516.000,00**							**150.911.480,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**146.516.000,00**							**150.911.480,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**146.516.000,00**							**150.911.480,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**146.516.000,00**						**-**	**150.911.480,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 20 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **97.16**	**146.516.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.911.480,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	146.516.000,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	150.911.480,00	UPT SD NEGERI 20 GRESIK (SD NEGERI KARANGKERING)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	146.516.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Karangkiring	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		150.911.480,00	UPT SD NEGERI 20 GRESIK (SD NEGERI KARANGKERING)
		UPT SD NEGERI 21 GRESIK (SD NEGERI KAWISANYAR)						**375.542.400,00**							**386.808.672,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**375.542.400,00**							**386.808.672,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**375.542.400,00**							**386.808.672,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**375.542.400,00**						**-**	**386.808.672,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 21 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**074.8** **102.62** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**375.542.400,00**	-	-	-	-	-	-	**386.808.672,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	375.542.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	386.808.672,00	UPT SD NEGERI 21 GRESIK (SD NEGERI KAWISANYAR)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	375.542.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kawis Anyar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		386.808.672,00	UPT SD NEGERI 21 GRESIK (SD NEGERI KAWISANYAR)
		UPT SD NEGERI 22 GRESIK (SD NEGERI KEBOMAS)						**290.706.400,00**							**299.427.592,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**290.706.400,00**							**299.427.592,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**290.706.400,00**							**299.427.592,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**290.706.400,00**						**-**	**299.427.592,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 22 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.562** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**290.706.400,00**	-	-	-	-	-	-	**299.427.592,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	290.706.400,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	299.427.592,00	UPT SD NEGERI 22 GRESIK (SD NEGERI KEBOMAS)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	290.706.400,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		299.427.592,00	UPT SD NEGERI 22 GRESIK (SD NEGERI KEBOMAS)
		UPT SD NEGERI 23 GRESIK (SD NEGERI KEDANYANG)						**1.020.604.800,00**							**1.051.222.944,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.020.604.800,00**							**1.051.222.944,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.020.604.800,00**							**1.051.222.944,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**1.020.604.800,00**						**-**	**1.051.222.944,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 23 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**1.020.604.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.051.222.944,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	1.020.604.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	1.051.222.944,00	UPT SD NEGERI 23 GRESIK (SD NEGERI KEDANYANG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	1.020.604.800,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kedayang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		1.051.222.944,00	UPT SD NEGERI 23 GRESIK (SD NEGERI KEDANYANG)
		UPT SD NEGERI 24 GRESIK (SD NEGERI KEMBANGAN)						**388.624.000,00**							**400.282.720,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**388.624.000,00**							**400.282.720,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**388.624.000,00**							**400.282.720,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**388.624.000,00**						**-**	**400.282.720,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 24 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**388.624.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.282.720,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	388.624.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	400.282.720,00	UPT SD NEGERI 24 GRESIK (SD NEGERI KEMBANGAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	388.624.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Kembangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		400.282.720,00	UPT SD NEGERI 24 GRESIK (SD NEGERI KEMBANGAN)
		UPT SD NEGERI 25 GRESIK (SD NEGERI KLANGONAN)						**222.451.200,00**							**229.124.736,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**222.451.200,00**							**229.124.736,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**222.451.200,00**							**229.124.736,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**222.451.200,00**						**-**	**229.124.736,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 25 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**222.451.200,00**	-	-	-	-	-	-	**229.124.736,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	222.451.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	229.124.736,00	UPT SD NEGERI 25 GRESIK (SD NEGERI KLANGONAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	222.451.200,00	Kab. Gresik, Kebomas, Klangonan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		229.124.736,00	UPT SD NEGERI 25 GRESIK (SD NEGERI KLANGONAN)
		UPT SD NEGERI 26 GRESIK (SD NEGERI PRAMBANGAN)						**183.621.600,00**							**189.130.248,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**183.621.600,00**							**189.130.248,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**183.621.600,00**							**189.130.248,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**183.621.600,00**						**-**	**189.130.248,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 26 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **9.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**10265** **74.83** **90.65** **93.12** **9716**	**183.621.600,00**	-	-	-	-	-	-	**189.130.248,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	183.621.600,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	189.130.248,00	UPT SD NEGERI 26 GRESIK (SD NEGERI PRAMBANGAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	183.621.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Prambangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		189.130.248,00	UPT SD NEGERI 26 GRESIK (SD NEGERI PRAMBANGAN)
		UPT SD NEGERI 27 GRESIK (SD NEGERI 1 RANDUAGUNG)						**276.712.000,00**							**285.013.360,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**276.712.000,00**							**285.013.360,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**276.712.000,00**							**285.013.360,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**276.712.000,00**						**-**	**285.013.360,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 27 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**276.712.000,00**	-	-	-	-	-	-	**285.013.360,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	276.712.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	285.013.360,00	UPT SD NEGERI 27 GRESIK (SD NEGERI 1 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	276.712.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		285.013.360,00	UPT SD NEGERI 27 GRESIK (SD NEGERI 1 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 28 GRESIK (SD NEGERI 2 RANDUAGUNG)						**497.803.200,00**							**512.727.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**497.803.200,00**							**512.727.296,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**497.803.200,00**							**512.727.296,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**497.803.200,00**						**-**	**512.727.296,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 28 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**10265** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**497.803.200,00**	-	-	-	-	-	-	**512.727.296,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	497.803.200,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	512.727.296,00	UPT SD NEGERI 28 GRESIK (SD NEGERI 2 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	497.803.200,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		512.727.296,00	UPT SD NEGERI 28 GRESIK (SD NEGERI 2 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 29 GRESIK (SD NEGERI 3 RANDUAGUNG)						**461.832.800,00**							**475.687.784,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**461.832.800,00**							**475.687.784,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**461.832.800,00**							**475.687.784,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**461.832.800,00**						**-**	**475.687.784,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 29 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **63.12** **74.83** **90.65** **97.16**	**461.832.800,00**	-	-	-	-	-	-	**475.687.784,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	461.832.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	475.687.784,00	UPT SD NEGERI 29 GRESIK (SD NEGERI 3 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	461.832.800,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		475.687.784,00	UPT SD NEGERI 29 GRESIK (SD NEGERI 3 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 30 GRESIK (SD NEGERI 4 RANDUAGUNG)						**327.548.000,00**							**337.374.440,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**327.548.000,00**							**337.374.440,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**327.548.000,00**							**337.374.440,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**327.548.000,00**						**-**	**337.374.440,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 30 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**327.548.000,00**	-	-	-	-	-	-	**337.374.440,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	327.548.000,00			-	JATIM CERDAS M emperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_ CEMERLA NG Pening katan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilita s Layanan dan Keseja hteraan Tenaga Pendidik	-	-	337.374.440,00	UPT SD NEGERI 30 GRESIK (SD NEGERI 4 RANDUAGUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	327.548.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		337.374.440,00	UPT SD NEGERI 30 GRESIK (SD NEGERI 4 RANDUAGUNG)
		UPT SD NEGERI 31 GRESIK (SD NEGERI SEGOROMADU)						**239.381.600,00**							**246.563.048,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**239.381.600,00**							**246.563.048,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**239.381.600,00**							**246.563.048,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**239.381.600,00**						**-**	**246.563.048,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 31 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**239.381.600,00**	-	-	-	-	-	-	**246.563.048,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	239.381.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	246.563.048,00	UPT SD NEGERI 31 GRESIK (SD NEGERI SEGOROMADU)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	239.381.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Segoromadu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		246.563.048,00	UPT SD NEGERI 31 GRESIK (SD NEGERI SEGOROMADU)
		UPT SD NEGERI 32 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOMORO)						**717.673.600,00**							**739.203.808,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**717.673.600,00**							**739.203.808,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**717.673.600,00**							**739.203.808,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**717.673.600,00**						**-**	**739.203.808,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 32 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**717.673.600,00**	-	-	-	-	-	-	**739.203.808,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	717.673.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	739.203.808,00	UPT SD NEGERI 32 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOMORO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	717.673.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sidomoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		739.203.808,00	UPT SD NEGERI 32 GRESIK (SD NEGERI 1 SIDOMORO)
		UPT SD NEGERI 33 GRESIK (SD NEGERI 2 SIDOMORO)						**115.437.600,00**							**118.900.728,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115.437.600,00**							**118.900.728,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**115.437.600,00**							**118.900.728,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**115.437.600,00**						**-**	**118.900.728,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 33 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**115.437.600,00**	-	-	-	-	-	-	**118.900.728,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	115.437.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	118.900.728,00	UPT SD NEGERI 33 GRESIK (SD NEGERI 2 SIDOMORO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	115.437.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sidomoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		118.900.728,00	UPT SD NEGERI 33 GRESIK (SD NEGERI 2 SIDOMORO)
		UPT SD NEGERI 34 GRESIK (SD NEGERI 4 SIDOMORO)						**189.997.600,00**							**195.697.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**189.997.600,00**							**195.697.528,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**189.997.600,00**							**195.697.528,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**189.997.600,00**						**-**	**195.697.528,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 34 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**189.997.600,00**	-	-	-	-	-	-	**195.697.528,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	189.997.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	195.697.528,00	UPT SD NEGERI 34 GRESIK (SD NEGERI 4 SIDOMORO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	189.997.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Sidomoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		195.697.528,00	UPT SD NEGERI 34 GRESIK (SD NEGERI 4 SIDOMORO)
		UPT SD NEGERI 35 GRESIK (SD NEGERI SINGOSARI)						**656.233.600,00**							**675.920.608,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**656.233.600,00**							**675.920.608,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**656.233.600,00**							**675.920.608,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**656.233.600,00**						**-**	**675.920.608,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 35 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**656.233.600,00**	-	-	-	-	-	-	**675.920.608,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	656.233.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	675.920.608,00	UPT SD NEGERI 35 GRESIK (SD NEGERI SINGOSARI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	656.233.600,00	Kab. Gresik, Kebomas, Singosari	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		675.920.608,00	UPT SD NEGERI 35 GRESIK (SD NEGERI SINGOSARI)
		UPT SD NEGERI 36 GRESIK (SD NEGERI BETOYOGUCI)						**91.034.400,00**							**93.765.432,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**91.034.400,00**							**93.765.432,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**91.034.400,00**							**93.765.432,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**91.034.400,00**						**-**	**93.765.432,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 36 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**91.034.400,00**	-	-	-	-	-	-	**93.765.432,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	91.034.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	93.765.432,00	UPT SD NEGERI 36 GRESIK (SD NEGERI BETOYOGUCI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	91.034.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Betoyoguci	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		93.765.432,00	UPT SD NEGERI 36 GRESIK (SD NEGERI BETOYOGUCI)
		UPT SD NEGERI 37 GRESIK (SD NEGERI GUMENO)						**109.286.400,00**							**112.564.992,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.286.400,00**							**112.564.992,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**109.286.400,00**							**112.564.992,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**109.286.400,00**						**-**	**112.564.992,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 37 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**109.286.400,00**	-	-	-	-	-	-	**112.564.992,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	109.286.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	112.564.992,00	UPT SD NEGERI 37 GRESIK (SD NEGERI GUMENO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	109.286.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Gumeno	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		112.564.992,00	UPT SD NEGERI 37 GRESIK (SD NEGERI GUMENO)
		UPT SD NEGERI 38 GRESIK (SD NEGERI KARANGREJO)						**173.298.400,00**							**178.497.352,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**173.298.400,00**							**178.497.352,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**173.298.400,00**							**178.497.352,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**173.298.400,00**						**-**	**178.497.352,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 38 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**173.298.400,00**	-	-	-	-	-	-	**178.497.352,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	173.298.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	178.497.352,00	UPT SD NEGERI 38 GRESIK (SD NEGERI KARANGREJO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	173.298.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Karangrejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		178.497.352,00	UPT SD NEGERI 38 GRESIK (SD NEGERI KARANGREJO)
		UPT SD NEGERI 39 GRESIK (SD NEGERI LERAN)						**215.188.800,00**							**221.644.464,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**215.188.800,00**							**221.644.464,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**215.188.800,00**							**221.644.464,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**215.188.800,00**						**-**	**221.644.464,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 39 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**215.188.800,00**	-	-	-	-	-	-	**221.644.464,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	215.188.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	221.644.464,00	UPT SD NEGERI 39 GRESIK (SD NEGERI LERAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	215.188.800,00	Kab. Gresik, Manyar, Leran	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		221.644.464,00	UPT SD NEGERI 39 GRESIK (SD NEGERI LERAN)
		UPT SD NEGERI 40 GRESIK (SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI)						**397.172.000,00**							**409.087.160,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**397.172.000,00**							**409.087.160,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**397.172.000,00**							**409.087.160,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**397.172.000,00**						**-**	**409.087.160,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 40 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**397.172.000,00**	-	-	-	-	-	-	**409.087.160,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	397.172.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	409.087.160,00	UPT SD NEGERI 40 GRESIK (SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	397.172.000,00	Kab. Gresik, Manyar, Leran	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		409.087.160,00	UPT SD NEGERI 40 GRESIK (SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI)
		UPT SD NEGERI 41 GRESIK (SD NEGERI MANYAREJO)						**462.411.200,00**							**476.283.536,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**462.411.200,00**							**476.283.536,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**462.411.200,00**							**476.283.536,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**462.411.200,00**						**-**	**476.283.536,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 41 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**462.411.200,00**	-	-	-	-	-	-	**476.283.536,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	462.411.200,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	476.283.536,00	UPT SD NEGERI 41 GRESIK (SD NEGERI MANYAREJO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	462.411.200,00	Kab. Gresik, Manyar, Manyarejo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		476.283.536,00	UPT SD NEGERI 41 GRESIK (SD NEGERI MANYAREJO)
		UPT SD NEGERI 42 GRESIK (SD NEGERI MOROBAKUNG)						**39.161.600,00**							**40.336.448,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39.161.600,00**							**40.336.448,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**39.161.600,00**							**40.336.448,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**39.161.600,00**						**-**	**40.336.448,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 42 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**39.161.600,00**	-	-	-	-	-	-	**40.336.448,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	39.161.600,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	40.336.448,00	UPT SD NEGERI 42 GRESIK (SD NEGERI MOROBAKUNG)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	39.161.600,00	Kab. Gresik, Manyar, Morobakung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		40.336.448,00	UPT SD NEGERI 42 GRESIK (SD NEGERI MOROBAKUNG)
		UPT SD NEGERI 43 GRESIK (SD NEGERI PONGANGAN)						**863.914.400,00**							**889.831.832,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**863.914.400,00**							**889.831.832,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**863.914.400,00**							**889.831.832,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**863.914.400,00**						**-**	**889.831.832,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 43 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**863.914.400,00**	-	-	-	-	-	-	**889.831.832,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	863.914.400,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	889.831.832,00	UPT SD NEGERI 43 GRESIK (SD NEGERI PONGANGAN)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	863.914.400,00	Kab. Gresik, Manyar, Pongangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		889.831.832,00	UPT SD NEGERI 43 GRESIK (SD NEGERI PONGANGAN)
		UPT SD NEGERI 44 GRESIK (SD NEGERI ROOMO)						**226.492.800,00**							**233.287.584,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**226.492.800,00**							**233.287.584,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**226.492.800,00**							**233.287.584,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**226.492.800,00**						**-**	**233.287.584,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 44 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**226.492.800,00**	-	-	-	-	-	-	**233.287.584,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	226.492.800,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-	-	233.287.584,00	UPT SD NEGERI 44 GRESIK (SD NEGERI ROOMO)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				389 Satuan Pendidikan	226.492.800,00	Kab. Gresik, Manyar, Roomo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan #GRESIK_CEMERLANG Peningkatan Kualitas Pendidikan didukung Perluasan Aksesibilitas Layanan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	-		233.287.584,00	UPT SD NEGERI 44 GRESIK (SD NEGERI ROOMO)
		UPT SD NEGERI 45 GRESIK (SD NEGERI 1 SEMBAYAT)						**228.555.200,00**							**235.411.856,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**228.555.200,00**							**235.411.856,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**228.555.200,00**							**235.411.856,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**228.555.200,00**						**-**	**235.411.856,00**	
		[Tercapainya Program Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun UPT SD NEGERI 45 GRESIK]	**Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat** **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin** **Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan**	**102.77** **74.95** **90.73** **93.24** **97.28**	**102.59** **74.77** **90.61** **93.06** **97.1**	**102.62** **74.8** **90.63** **93.09** **97.13**	**102.65** **74.83** **90.65** **93.12** **97.16**	**228.555.200,00**	-	-	-	-	-	-	**235.411.856,00**	-